PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

FUNGSI RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam :

a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan RKPD.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 8

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 terdiri atas :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
i. BAB IX : PENUTUP; dan
j. *CASCADING*;

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(3) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,22/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021-2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Bantul dan wakil Bupati Bantul.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 140

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1. LATAR BELAKANG 1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-8
1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD 1-9
1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 1-9
1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 1-10
1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 1-10
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 1-10
1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD 1-11
1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD 1-11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1-11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 1-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-15
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2-15
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 2-15
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2-32
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2-40
2.1.4. Demografi 2-48
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2-53
2.2.1. Pertumbuhan PDRB 2-53
2.2.2. PDRB Perkapita 2-63
2.2.3. Laju Inflasi 2-63
2.2.4. Indeks Gini 2-64
2.2.5. Kemiskinan 2-65
2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka 2-68
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2-69
2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2-70
2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah 2-70
2.2.10. Umur Harapan Hidup 2-71
2.2.11. Angka Kematian Bayi 2-72
2.2.12. Angka Kematian Ibu 2-74
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2-75
2.3.1. Layanan Urusan Wajib 2-75
2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2-251
2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum 2-276
2.3.4. Layanan Keistimewaan 2-294
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2-307
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 2-307
2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur 2-309

2.4.3. Iklim Berinvestasi....2-312
2.4.4. Sumber Daya Manusia....2-328
2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2-331
2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021....2-350
2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)....2-357
2.7.1. Bidang Pendidikan....2-358
2.7.2. Bidang Kesehatan....2-359
2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....2-363
2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman....2-363
2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat....2-364
2.7.6 Bidang Sosial....2-366
2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR....2-367
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH....3-1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU....3-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD....3-3
3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah....3-10
3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah....3-12
3.1.4. Neraca Daerah....3-29
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU....3-39
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran....3-39
3.2.2. Analisis Pembiayan....3-44
3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19) 3-48
3.3. KERANGKA PENDANAAN....3-52
3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan....3-52
3. 3. 2 Penghitungan Kerangka Pendanaan....3-75
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH....4-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN....4-1
4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah....4-1
4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah....4-14
4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19....4-15
4.2 ISU-ISU STRATEGIS....4-16
4.2.1. Telaah Isu Internasional....4-17
4.2.2. Telaah Isu Nasional....4-20
4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta....4-28
4.2.4. Telaah Isu Daerah....4-61
4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul....4-80
4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar....4-88
4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul....4-95
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN....5-1
5.1. Visi....5-2
5.2. Misi....5-3
5.3. Tujuan dan Sasaran....5-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan....6-1

6.1.1. Analisis SWOT 6-2
6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 6-11
6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6-38
6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan 6-49
6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19 6-61
6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 6-63
6.2. Program Pembangunan Daerah 6-64
6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah 6-65
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 7-1
7.2. Program Perangkat Daerah 7-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 8-1
BAB IX PENUTUP 9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan 9-2
9.2. Pedoman Transisi 9-2
CASCADING L-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul 2-17
Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul 2-23
Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul 2-25
Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul 2-26
Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-27
Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-29
Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 2-40
Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-46
Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-47
Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon 2-49
Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul 2-50
Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%) 2-56
Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori 2-60
Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata 2-62
Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-66
Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon 2-67
Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-68
Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020 2-69
Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi 2-73
Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-74
Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-76
Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-77
Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-79
Tabel 2 24 Jumlah sekolah menurut peringkat akreditasi yang diperoleh 2-79
Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-79
Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-80
Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-81
Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-82
Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-82
Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul 2-83
Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul 2-84
Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul 2-85
Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020 2-86
Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-87
Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-88
Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-89
Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting 2-91
Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul 2-92
Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul 2-92
Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-93
Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-94
Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul 2-95

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-101
Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul 2-103
Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-103
Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-105
Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-106
Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-107
Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-108
Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul 2-109
Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul 2-112
Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul 2-114
Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020 2-116
Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-118
Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-119
Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-120
Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018 2-122
Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-123
Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-124
Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-126
Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-127
Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-128
Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul 2-128
Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ... 2-129
Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020 2-134
Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-135
Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-20202-136
Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-137
Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020 2-137
Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-139
Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-141
Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-141
Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-142
Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-142
Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-143
Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-143
Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-144
Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 2-145

Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 2-146
Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-147
Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-147
Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-150
Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-151
Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-153
Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-156
Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul..... 2-157
Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020..... 2-157
Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-159
Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-159
Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020..... 2-160
Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-161
Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020 2-163
Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020 2-164
Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 2-166
Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi 2-167
Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 2-170
Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018..... 2-171
Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019 2-171
Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020 2-171
Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-172
Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul,..... 2-172
Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-174
Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-176
Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020..... 2-176
Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-177
Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-178
Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-179
Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020..... 2-179
Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-180
Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-180
Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-181
Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-182
Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-183
Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-183
Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-184
Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-184
Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-186
Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-187

Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-191
Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018 2-192
Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-192
Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul 2-193
Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, ... 2-193
Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-195
Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-199
Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul 2-200
Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul 2-200
Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul 2-201
Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul 2-201
Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-201
Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-202
Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-202
Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul 2-203
Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-204
Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-205
Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-208
Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018 2-208
Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019 2-209
Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020" 2-210
Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-210
Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 2-211
Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI 2-213
Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap 2-216
Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020 2-218
Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik 2-219
Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen 2-220
Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020 2-221
Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian 2-222
Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 2-225
Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul 2-226
Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul 2-238
Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-242
Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020 2-243
Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca 2-243
Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi 2-244
Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-245
Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020 2-245
Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-247
Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-247
Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan 2-248

Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan 2-249
Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020 2-250
Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-251
Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-252
Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-253
Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-253
Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-254
Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-255
Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-256
Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-256
Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019 2-257
Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-258
Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-258
Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-260
Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-261
Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-263
Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-264
Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-265
Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-266
Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-266
Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-267
Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-268
Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-268
Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 2-269
Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-271
Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) 2-271
Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-272
Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-273
Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-274
Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-274
Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul 2-275
Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 2-276
Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-277
Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-278
Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-279
Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul 2-280
Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-285
Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-285

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-288
Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-290
Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-290
Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-291
Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020 2-292
Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-294
Tabel 2 205 Penetapan Desa Budaya di Kabupaten Bantul 2-297
Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul 2-298
Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul 2-299
Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019 2-302
Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul 2-304
Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-306
Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul 2-307
Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-308
Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul 2-309
Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019 2-310
Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-311
Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 2-313
Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-314
Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-315
Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-316
Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-318
Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2-319
Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-324
Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul 2-324
Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul 2-325
Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020 2-331
Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2-332
Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul 2-351
Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul ... 2-354
Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 2-359
Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-360
Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 2-363
Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-364
Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-365
Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-366
Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-367
Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) 3-4

Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020 3-7
Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 3-12
Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 3-12
Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)..... 3-17
Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) 3-21
Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-23
Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 3-31
Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020 3-36
Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-40
Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab Bantul, 2016-2020.... 3-41
Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-42
Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-43
Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)..... 3-45
Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta) 3-46
abel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 3-49
Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 3-51
Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bantul Tahun 2021-2026..... 3-56
Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026 3-59
Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait 3-64
Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait 3-68
Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020. 3-71
Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..... 3-78
Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..... 3-80
Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 3-81
Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025..... 4-29
Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 4-62
Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang 4-69
Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang 4-73
Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis..... 4-79
Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD 4-86
Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain 4-89
Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul 5-5
Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 5-6
Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 5-8
Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 6-12
Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif 6-22

Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak 6-28
Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026 6-29
Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD 6-30
Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU 6-33
Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026 6-34
Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi 6-35
Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025 . 6-36
Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025 6-37
Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM 6-40
Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul 6-52
Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas. 6-54
Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul 6-55
Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul 6-56
Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 6-59
Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul 6-60
Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul 6-60
Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 6-63
Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 6-66
Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul 7-2
Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 7-4
Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. 8-1
Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. 8-2
Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul 8-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1-8
Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul 2-16
Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul 2-16
Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul 2-20
Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul 2-21
Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul 2-23
Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul 2-24
Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul 2-26
Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-28
Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-28
Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul 2-41
Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul 2-42
Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul 2-42
Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul 2-43
Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul 2-43
Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Bantul 2-44
Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul 2-44
Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul 2-45
Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul 2-45
Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021 2-52
Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020 2-53
Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-54
Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010 2-55
Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010 2-55
Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kab Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020 2-57
Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2-58
Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020 2-59
Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-61
Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-64
Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 2-65
Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 2-66
Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul 2-70
Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul 2-71
Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-72
Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-73
Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-74
Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul 2-90
Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-91
Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul 2-97
Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul 2-99
Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul 2-100
Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-113
Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-115

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik 2-117
Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 2-130
Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 2-131
Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 2-136
Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-144
Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-148
Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-149
Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-154
Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-160
Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai 2-161
Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-162
Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul 2-163
Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul 2-164
Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2-165
Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020 2-175
Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-185
Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-188
Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-189
Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data 2-212
Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 2-241
Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020 2-309
Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-314
Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan 2-329
Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020 3-8
Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 3-9
Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020 3-18
Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020 3-19
Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul 5-3
Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 6-21
Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021 6-52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Bantul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo. Pelantikan dilaksanakan pada Jumat 26 Februari 2021 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sedangkan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 angka 3 (tiga) menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan Musrenbang, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPJMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

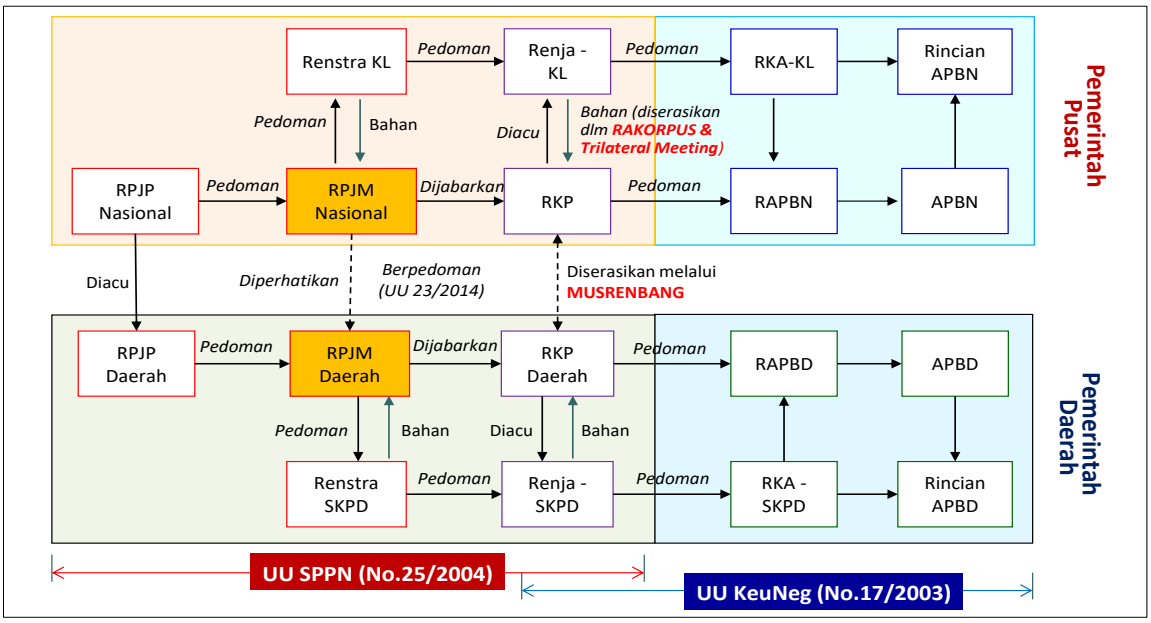

Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025. RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Visi RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2005-2025 adalah: "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis". Kata "Projotamansari" dimaknai sebagai: etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Kata "Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" merupakan keadaan yang ingin diwujudkan di tahun 2025. Secara singkat, kondisi yang ingin diwujudkan Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah: "Bantul yang Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, Asri, Sejahtera, dan Demokratis dan Agamis".

1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bantul. RPJMD Kabupaten Bantul juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Bantul.

1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Tahun 2021 -2026 didasari pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah memberi arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2022-2026 bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD serta pembangunan daerah dalam

rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
3) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2021–2026 disajikan dalam sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan program perangkat daerah yang disajikan

berdasarkan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bab IX Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Informasi berkaitan dengan gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section.*

Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan periode data yang tersedia sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Periode 2016-2021 (terkait target pembangunan), serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km^2 (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

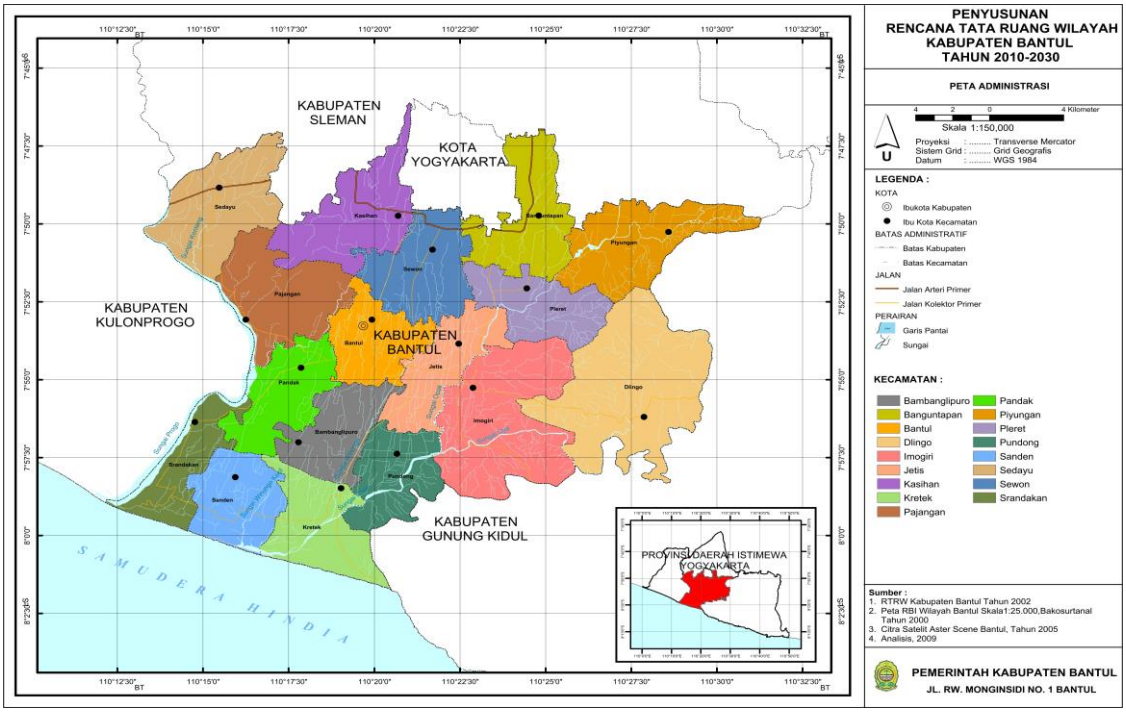

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda, 2021

Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar 2.2.

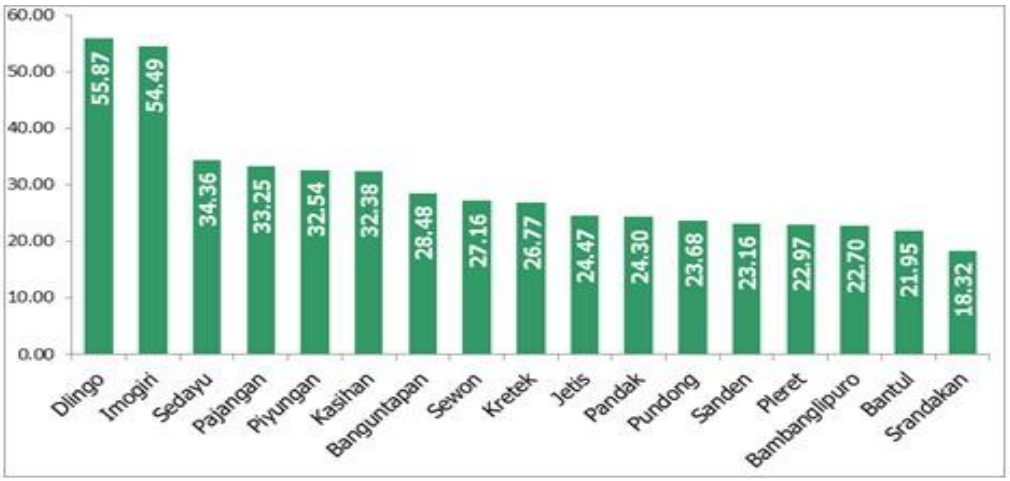

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 padukuhan dengan jumlah kalurahan dan padukuhan yang terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72

padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yaitu dua kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi kalurahan perdesaan (*rural area*) sebanyak 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 kalurahan. Secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
1	Srandakan	Poncosari (24 padukuhan)	11,86	Trimurti (19 padukuhan)	6,46
2	Sanden	Sri Gading (20 padukuhan)	7,57	Gadingsari (18 padukuhan)	8,12
				Gadingharjo (6 padukuhan)	3,08
				Murtigading (18 padukuhan)	4,39
3	Kretek	Tirtohargo (6 padukuhan)	3,62	Donotirto (13 padukuhan)	4,70
		Parangtritis (11 padukuhan)	11,87		
		Tirtosari (7 padukuhan)	2,39		
		Tirtomulyo (15 padukuhan)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 padukuhan)	11,10	Srihardono (17 padukuhan)	6,87
		Panjangrejo (16 padukuhan)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo (16 padukuhan)	8,19	Sidomulyo (15 padukuhan)	8,05
				Mulyodadi (14 padukuhan)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14 padukuhan)	5,93	Wijirejo (10 padukuhan)	4,68
		Triharjo (10 padukuhan)	6,43		
		Gilangharjo (15 padukuhan)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 padukuhan)	8,78	Triwidadi (22 padukuhan)	12,71
				Sendangsari (18 padukuhan)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 padukuhan)	2,32	Palbapang (10 padukuhan)	5,53
				Ringinharjo (6 padukuhan)	2,77
				Bantul (12 padukuhan)	5,24
				Trirenggo (17 padukuhan)	6,10

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
9	Jetis	Patalan (20 padukuhan)	5,65	Trimulyo (12 padukuhan)	7,11
		Canden (15 padukuhan)	5,36	Sumberagung (17 padukuhan)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro (18 padukuhan)	22,75	Kebonagung (5 padukuhan)	1,87
		Sriharjo (13 padukuhan)	6,32	Karangtalun (5 padukuhan)	1,21
		Karangtengah (6 padukuhan)	2,88	Imogiri (4 padukuhan)	0,83
				Wukirsari (16 padukuhan)	15,39
				Girirejo (5 padukuhan)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 padukuhan)	9,52	Dlingo (10 padukuhan)	9,16
		Muntuk (11 padukuhan)	12,85		
		Temuwuh (12 padukuhan)	7,67		
		Jatimulyo (10 padukuhan)	8,91		
		Terong (9 padukuhan)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 padukuhan)	3,75	Baturetno (8 padukuhan)	3,94
		Jagalan (2 padukuhan)	0,27	Banguntapan (11 padukuhan)	8,33
		Singosaren (5 padukuhan)	0,67		
		Wirokerten (8 padukuhan)	3,86		
		Jambidan (7 padukuhan)	3,76		
		Potorono (9 padukuhan)	3,90		
13	Pleret	Bawuran (7 padukuhan)	4,97	Wonokromo (12 padukuhan)	4,34
		Wonolelo (8 padukuhan)	4,54	Pleret (11 padukuhan)	4,25
		Segoroyoso (9 padukuhan)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 padukuhan)	9,40	Srimulyo (22 padukuhan)	14,56
				Srimartani (17 padukuhan)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo (16 padukuhan)	6,98	Bangunharjo (17 padukuhan)	6,79
		Timbulharjo (16 padukuhan)	7,78	Panggungharjo (14 padukuhan)	5,61
16	Kasihan	Tamantirto (10 padukuhan)	6,72	Tirtonirmolo (12 padukuhan)	5,13
		Ngestiharjo (12 padukuhan)	5,10		
		Bangunjiwo (19 padukuhan)	15,43		

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
17	Sedayu	Argodadi (14 padukuhan)	11,21	Argosari (13 padukuhan)	6,37
		Argomulyo (14 padukuhan)	9,55	Argorejo (13 padukuhan)	7,23
	Jumlah	**41 Kalurahan**	**289,65 (28.965 ha)**	**34 Kalurahan**	**217,20 (21.720 ha)**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"- 110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"- 08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil.

Secara geostrategik, Kabupaten Bantul berada pada posisi yang strategis. *Pertama*, Kabupaten Bantul berada di sisi selatan yang merupakan daerah hilir sebagai muara aliran sungai yang memberikan keuntungan ketersedian air untuk pemenuhan kebutuhan air. Selain itu, berdasarkan Visi Gubernur DIY 2017-2022 Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Kabupaten Bantul akan menjadi muka atau wajah DIY. Namun, wilayah hilir juga mempunyai dampak negative terhadap kualitas lingkungan dan sumber air. K*edua*, wilayah Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini memberikan keuntungan strategis untuk berkembangnya wilayah.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.

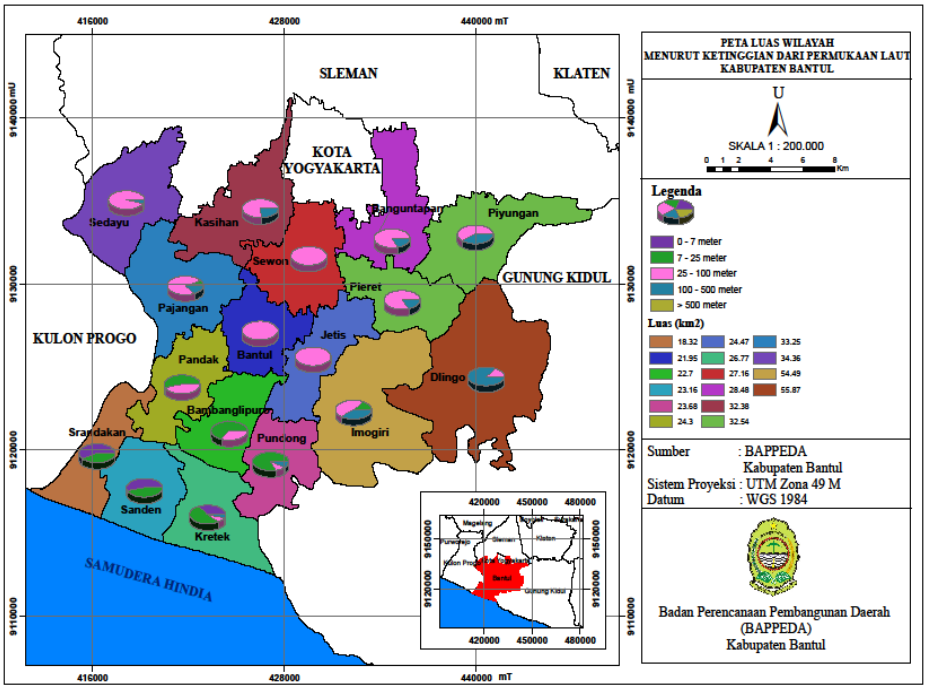

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan.

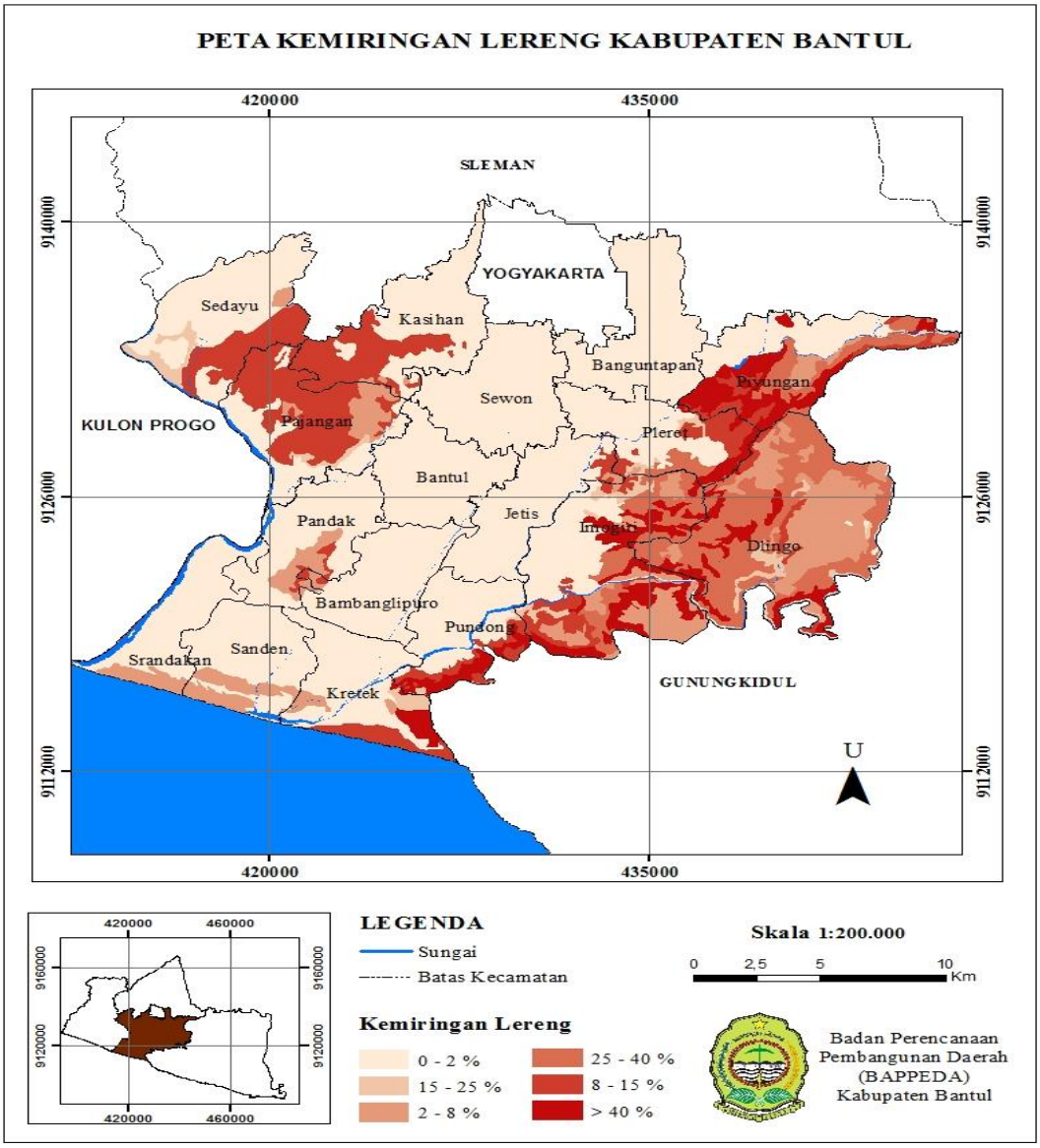

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden merupakan daerah terendah di antara Kapanewon lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya

berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%).

Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1- 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah Kapanewon terlihat bahwa wilayah Kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah Kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi.

Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat sebagai berikut :

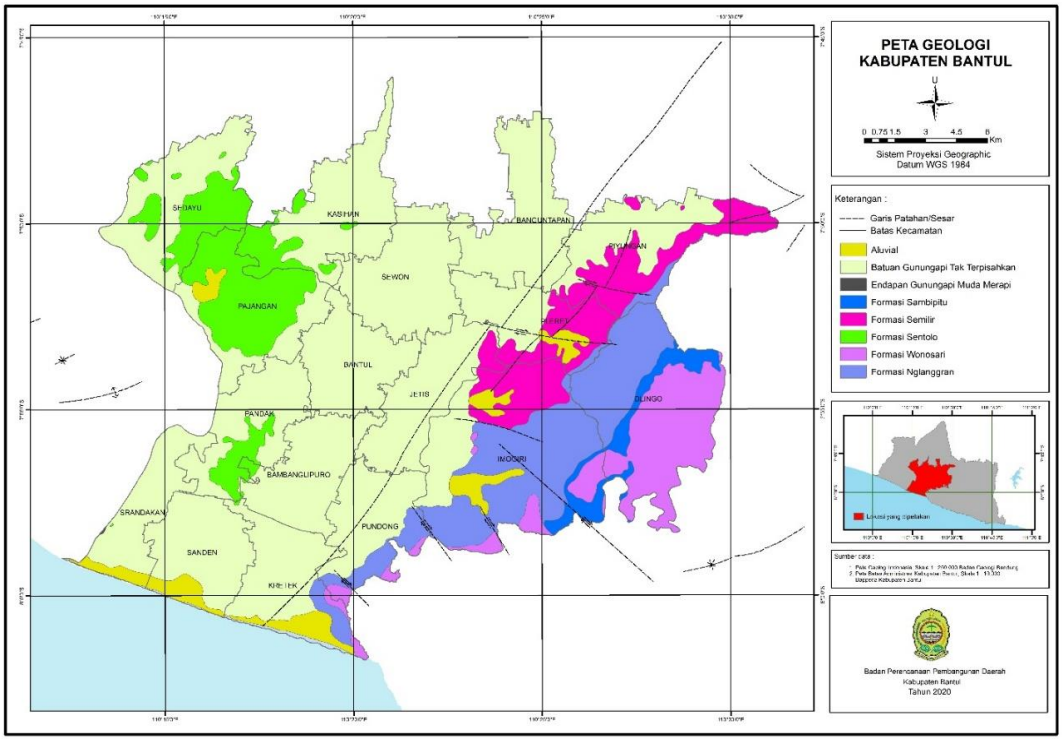

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

No.	Formasi Batuan	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	1.669	3,27
2	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan	30.984	60,63
3	Endapan Gunungapi Muda Merapi	4	0,01
4	Formasi Sambipitu	950	1,86
5	Formasi Semilir	3.703	7,25
6	Formasi Sentolo	4.622	9,04
7	Formasi Wonosari	3.388	6,63
8	Formasi Nglanggran	5.783	11,32
Jumlah		50.685	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Kabupaten Bantul sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984.03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggeran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9.04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau

1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi Semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

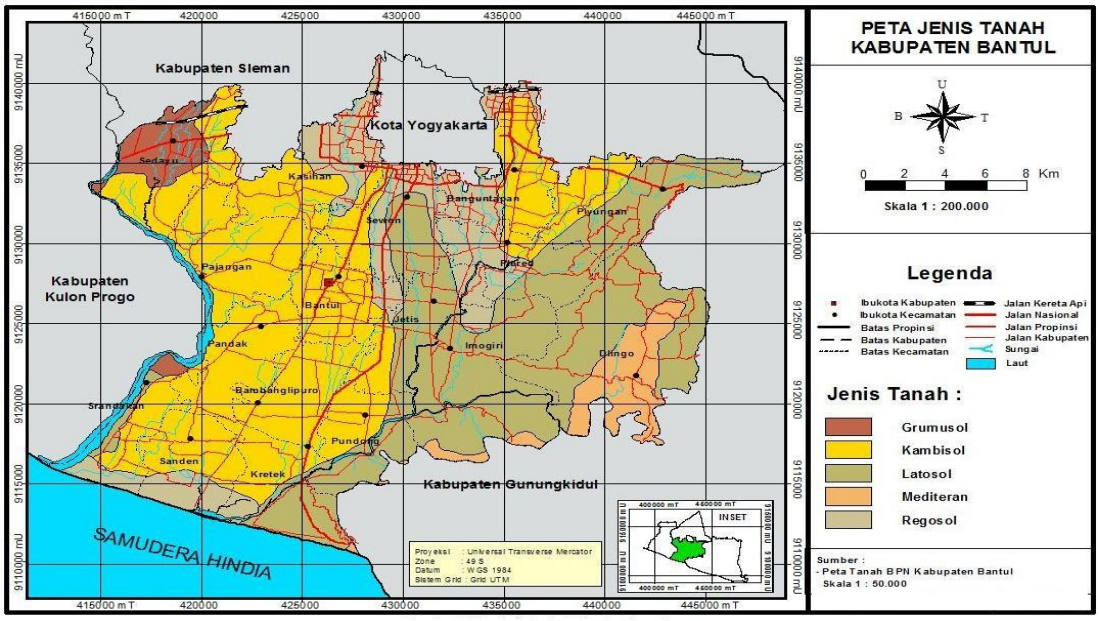

Sumber: BPN,2021

Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu.

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret.

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Di wilayah Bantul terdapat dua DAS yaitu DAS Progo dan DAS Opak.

Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS(Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,50	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: BPDAS KLHK, 2019

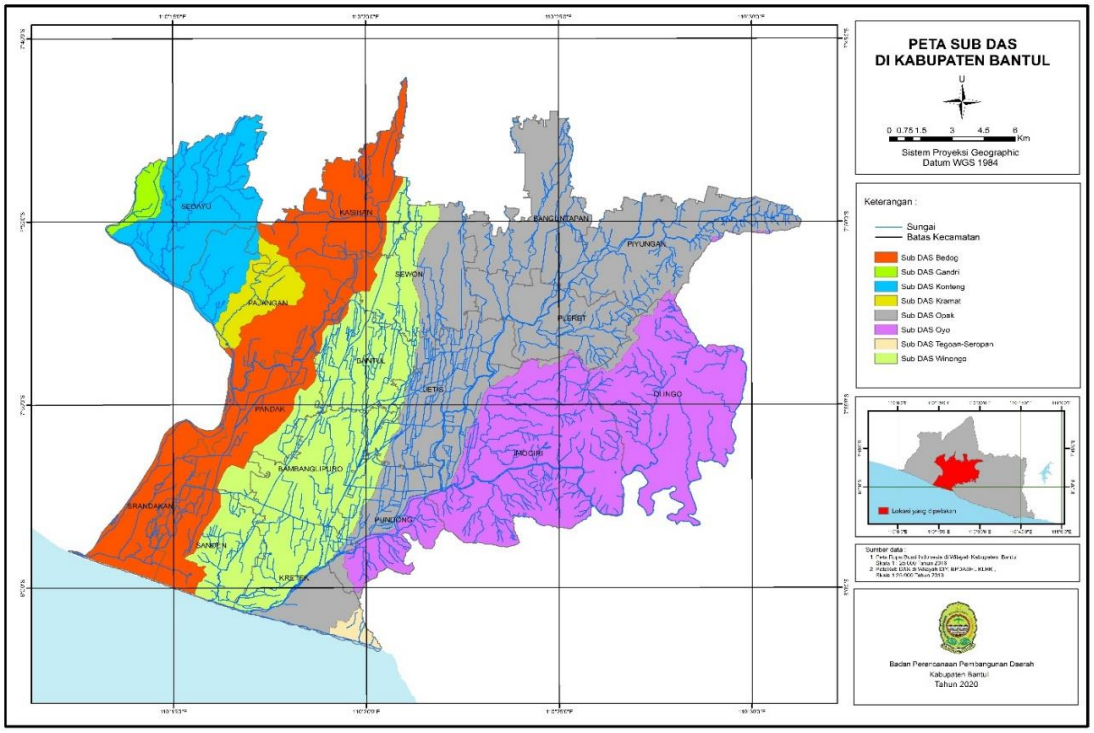

Sumber: BPDAS KLHK, 2019

Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati 5 sungai besar yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gadjah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/ industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam menyusun program kegiatan.

Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan
II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gadjahwong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gadjahwong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo,Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.1.1.6 Klimatologi

Data curah hujan Kabupaten Bantul diperoleh dari hasil pengamatan di 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso.

Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	132	300	556	171,8	145,8	18	22	24	20	17
Februari	234	302	362	122,5	136,6	19	20	21	14	15
Maret	236	385	395	272,5	195,9	20	20	16	16	19
April	135	216	227	54,6	128,4	14	15	14	7	11

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mei	80	38	20	1,9	79,4	16	5	4	6	11
Juni	125	24	14	0,4	2,3	11	3	1	2	1
Juli	54	4	-	-	0,3	11	3	-	-	1
Agustus	57	1	-	-	4,0	10	2	-	-	2
September	169	60	7	-	2,8	16	4	1	-	2
Oktober	223	96	5	-	76,6	19	13	1	-	9
Nopember	347	587	217	23,5	114,3	21	16	12	4	12
Desember	318	308	210	73,1	188,8	24	17	16	12	21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

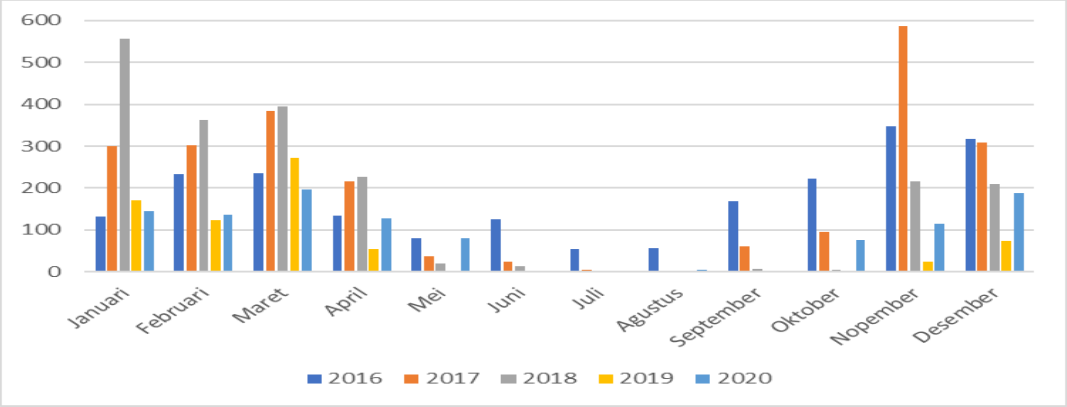

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

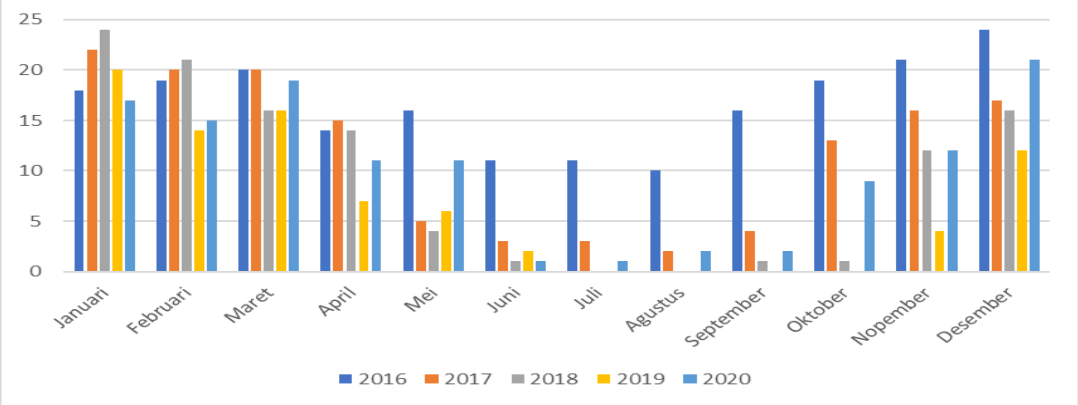

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, intensitas hujan tertinggi selama 5 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi di akhir tahun sedangkan tahun 2018-2019 terjadi pada awal tahun. Intensitas

hujan yang tinggi merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrim yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2017 dan tahun 2019, di Kabupaten Bantul terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir besar di beberapa wilayah sebagai akibat dari Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Tropis Dahlia serta Siklon Tropis Savanna yang merupakan dampak perubahan iklim. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Berdasarkan SNI 7645-1:2014 penggunaan lahan diklasifikasi terdiri dari hutan lahan kering, hutan lahan basah, sawah irigasi, sawah non irigasi, Kawasan terbangun, Kawasan tidak terbangun, gosomng sungai, pasir pantai, tambak, tubuh air. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hutan Lahan Kering	1,573.6	1,547.5	1,497.5	1,488.8	1,471.4
2	Hutan Lahan Basah	49.2	47.5	46.3	45.2	47.3
3	Sawah Irigasi	14,935.3	14,877.6	14,477.6	14,270.8	13,772.1
4	Sawah Non Irigasi	14,325.4	14,281.9	13,965.9	13,888.3	13,566.1
5	Kawasan Terbangun	16,559.3	16,721.2	17,531.5	17,959.9	18,675.7
6	Kawasan Tidak Terbangun	2,329.5	2,296.4	2,258.4	2,122.0	1,986.3
7	Gosong Sungai	17.7	18.3	19.2	16.5	15.9

No.	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Pasir Pantai	270.3	269.9	265.9	265.9	237.2
9	Tambak	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
10	Tubuh Air	570.1	570.1	568.1	573.0	858.5
	Jumlah	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**

Sumber: Bappeda dan DPTR, 2021

Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh lahan terbangun sebesar 36,85%, sawah irigasi 27,17% dan sawah non irigasi 26,77%. Selanjutnya, pada data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang berkurang terjadi pada penggunaan lahan sawah baik yang beririgasi maupun tidak beririgasi, kawasan tidak terbangun dan pasir pantai. Sementara untuk penambahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan terbangun dan tubuh air. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perubahan lahan yang didasarkan pada data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sehingga merupakan data eksisting di lapangan. Hal ini tentu akan memiliki perbedaan dengan data pada perubahan penggunaan lahan yang didasarkan pada data ijin pemanfaatan penggunaan lahan. Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah menjadi lahan terbangun. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Tabel 2 7 Alih Fungsi Sawah Irigasi

Tahun	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)
2017	57.70
2018	400.00
2019	206.80
2020	498.70

Sumber: Bappeda dan DPTR (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021, diolah

Perubahan penggunaan lahan khususnya lahan sawah yang dilakukan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah-langkah guna pengendalian alih fungsi lahan dengan penyusunan Peraturan Daerah Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain upaya tersebut, juga, dilakukan langkah penumbuhan minat dan perlindungan pertanian, sehingga masyarakat tetap mempertahankan lahannya. Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta berikut ini:

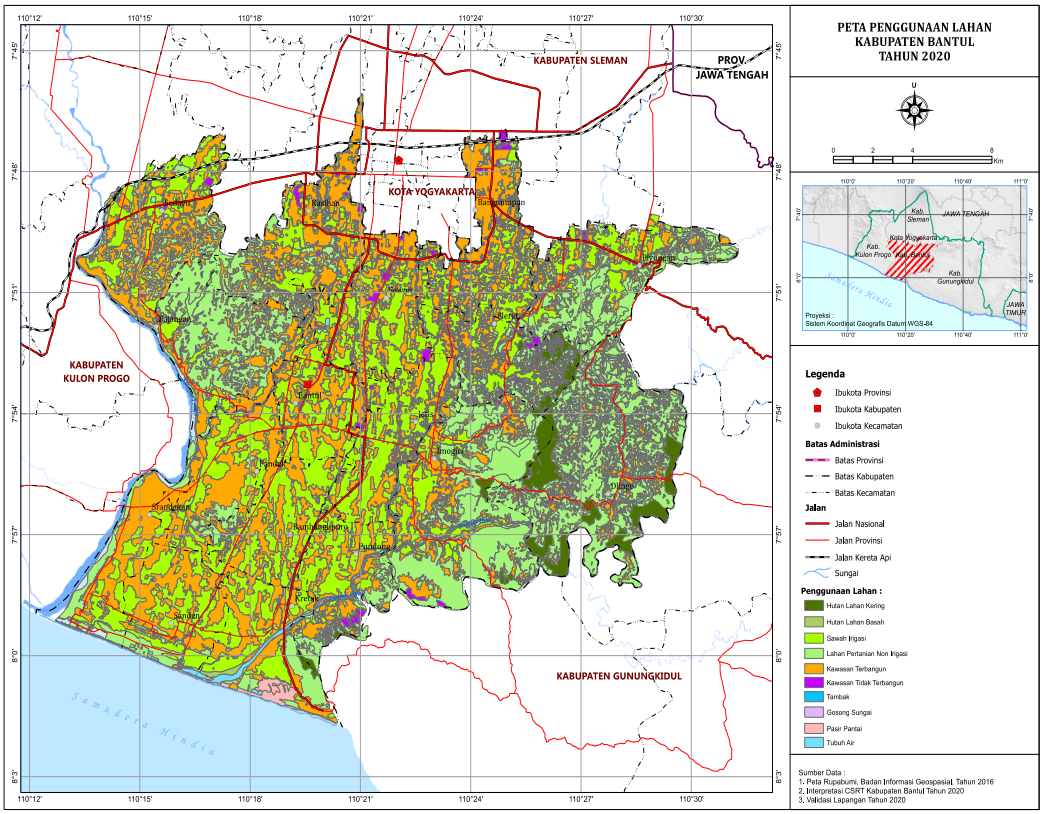

Sumber: Interpretasi CSRT Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.10. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diamati penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan kansekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah terbangun. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan pertanian non irigasi dan belum banyak lahan terbangun. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penataan ruang Kabupaten Bantul yaitu

mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan perkebunan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

2.1.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

2.1.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian tanaman hortikultura, dan kawasan peternakan, yaitu:

1) Kawasan pertanian tanaman pangan direncanakan seluas ±11.3177,69 Ha (22,05%) difokuskan terutama berada pada wilayah bagian tengah dengan penyebarannya kapanewon;
2) Kawasan hortikultura direncanakan seluas ±7.897,32 Ha (15,58%) yang berada di seluruh wilayah kapanewon, kecuali Kapanewon Sewon dan Kapanewon Bantul;
3) Kawasan peternakan direncanakan untuk peruntukan :
   a. ternak besar potong tersebar di seluruh wilayah kapanewon;
   b. ternak besar perah berada di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu;
   c. ternak kecil dan unggas berada di seluruh wilayah Kapanewon;

Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 19.075,01Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 14.407,50Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.667,51Ha.

2.1.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek;
2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan direncanakan di seluruh wilayah kapanewon, yang terdiri dari:
   a. Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembesaran direncanakan berada di Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Srandakan, selain di Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan Kapanewon Pandak, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu.

b. Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembenihan direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pandak.
c. Kawasan Perikanan Budidaya untuk jenis ikan hias direncanakan berada di Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Bantul.

2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan direncanakan seluas ±4.426 Ha yang terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas ±565Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Imogiri.
2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas ±2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Dlingo.
3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat seluas ±910Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Jetis.

2.1.2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1) Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan besar sebagai berikut :
   a. Kapanewon Piyungan dengan luas 374,96 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan enam) hektar;

b. Kapanewon Sedayu dengan luas 246,14 (dua ratus empat puluh enam koma satu empat) hektar;
c. Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar.

2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
3) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, dengan sebaran sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di:
   a. Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
   b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
   c. Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret;
   d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan;
   e. Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
   f. Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;
   g. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   h. Desa/Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
   i. Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;

j. Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan
k. Parangendog di Kalurahan Parangtritis.

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
   a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
   b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
   c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
   d. Kompleks Goa Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
   e. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   f. Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; dan Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten Bantul:
   a. Desa Wisata Kebonagung di Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri;
   b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon;
   c. Desa Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan;
   d. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan;
   e. Desa Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
   f. Desa Wisata Serut;
   g. Desa Wisata Trimulyo; dan
   h. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Dari uraian di atas Goa Jepang masuk dalam kawasan pariwisata alam maupun budaya karena sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa Goa Jepang masuk pada wisata budaya dan wisata alam.

Goa Jepang masuk pada wisata budaya karena merupakan peninggalan Jepang, dan masuk dalam cagar budaya, sehingga pengelolaan wisata di Goa Jepang harus memperhatikan ketentuan pengelolaan cagar budaya.

2.1.2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 4.922,72 (empat ribu sembilan rarus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Sewon;
2) Rencana permukiman kota satelit direncanakan seluas 1.846,45 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma empat lima) hektar berada di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan; Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan; dan Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak;
3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 9.450,22 (sembilan ribu empat ratus lima puluh koma dua dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan.

2.1.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi: kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

1). Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
   a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan Udara di Kapanewon Banguntapan;
   b. Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
   c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
   d. Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
   e. Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
   f. Stasiun Radar di Kapanewon Kretek.

2). Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
   a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlayaninya wilayah kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pajangan;
   c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti

puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan;

d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing Kapanewon dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penilaian dari BNPB memiliki nilai Indeks Risiko Bencana 187,20 dengan kategori tinggi. Risiko bencana berbanding lurus dengan tingkat bahaya dan kerentanan, artinya semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan maka semakin tinggi risiko bencana. Sebaliknya, risiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas daerah artinya semakin baik/tinggi kapasitas daerah maka semakin rendah risiko bencana.

Komponen bahaya bencana adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam sedangkan komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Selama tahun 2020 tercatat 530 kejadian bencana yang tersebar hampir di seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil kajian dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut :

Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

NO	JENIS BENCANA	LOKASI YANG BERPOTENSI
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh Kapanewon
2.	Kawasan rawan	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan

NO	JENIS BENCANA	LOKASI YANG BERPOTENSI
	longsor	Pajangan
3.	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret
4.	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:

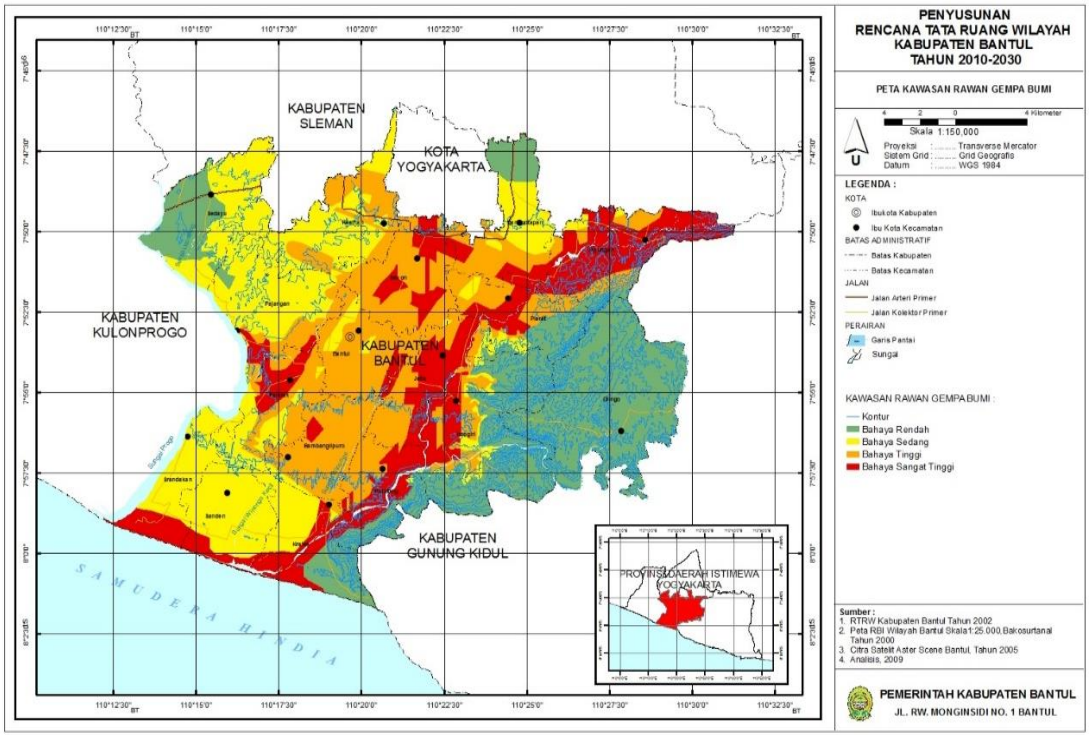

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul

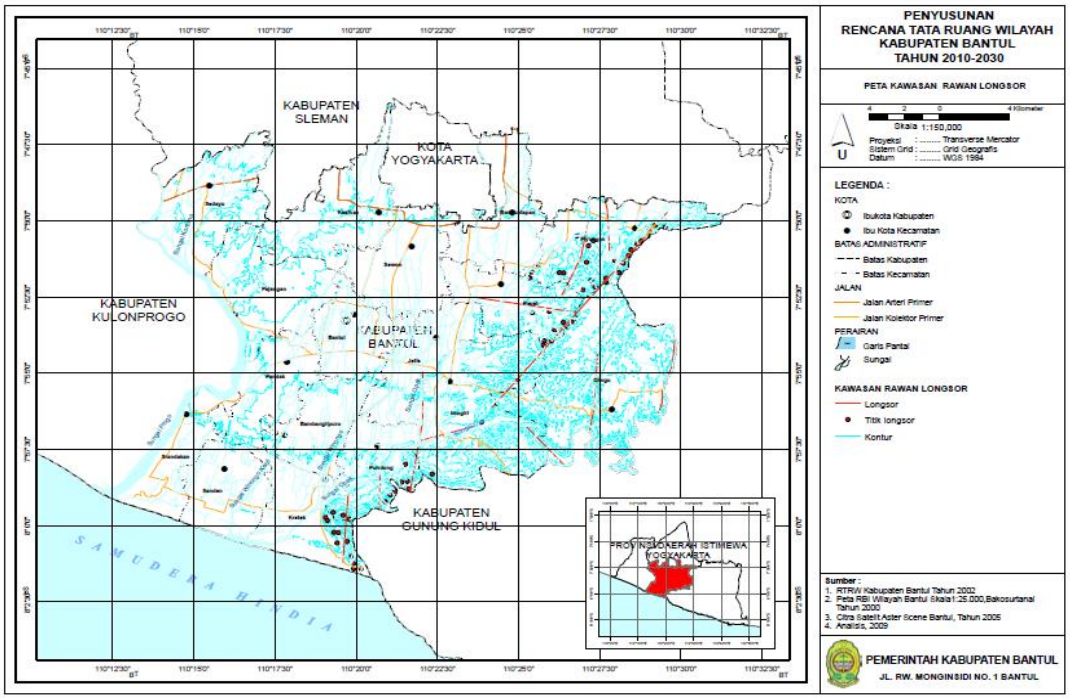

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul

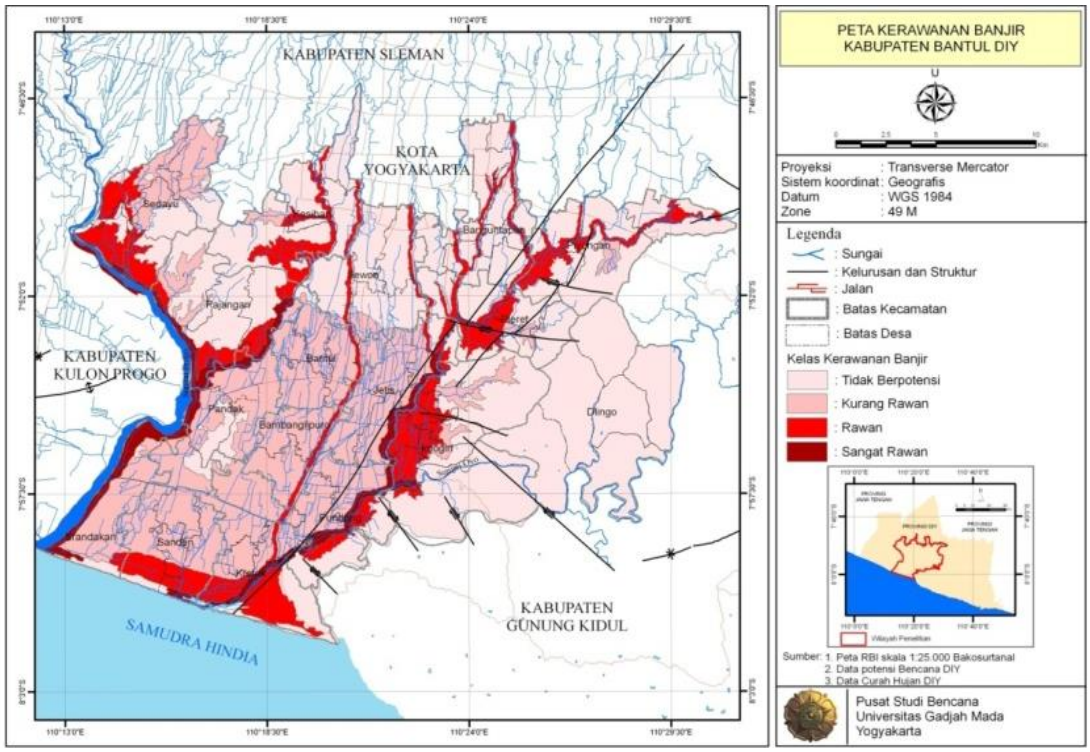

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,

Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul

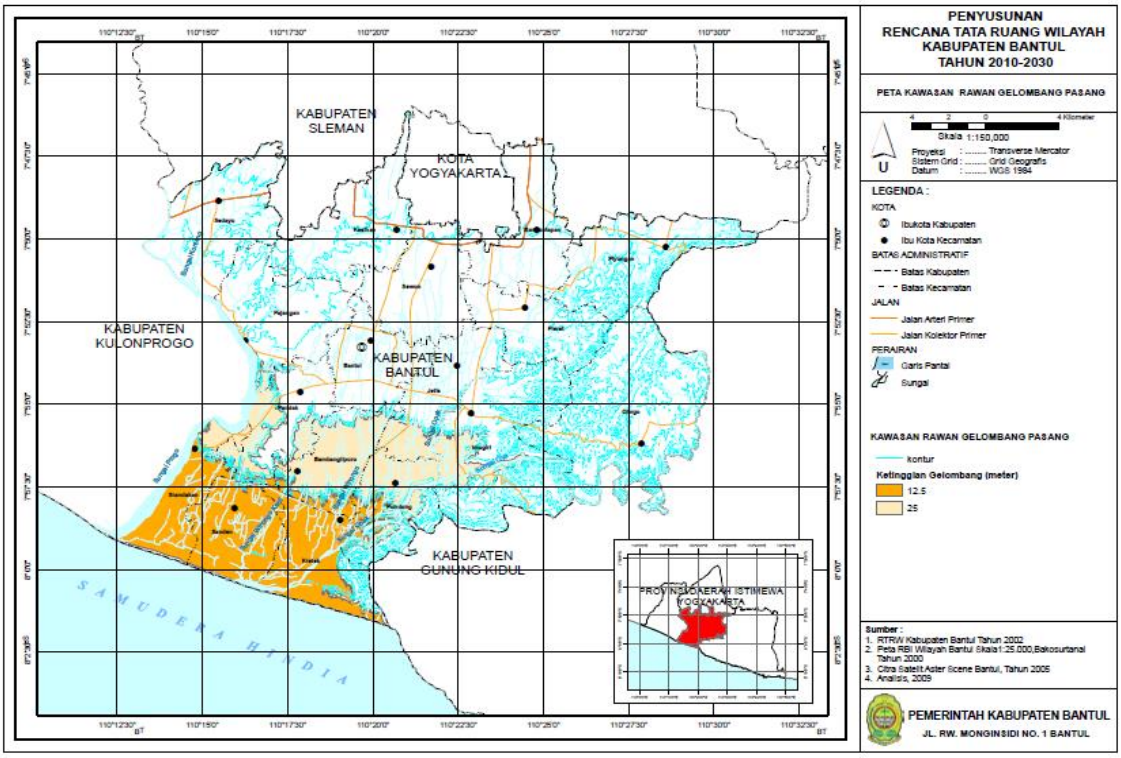

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

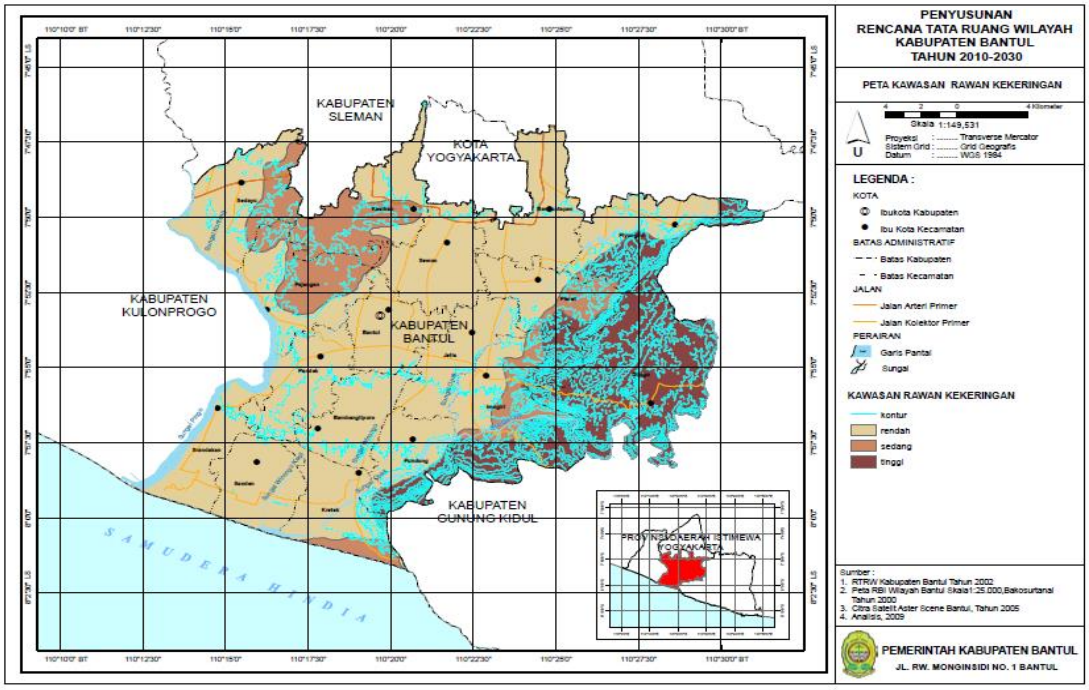

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

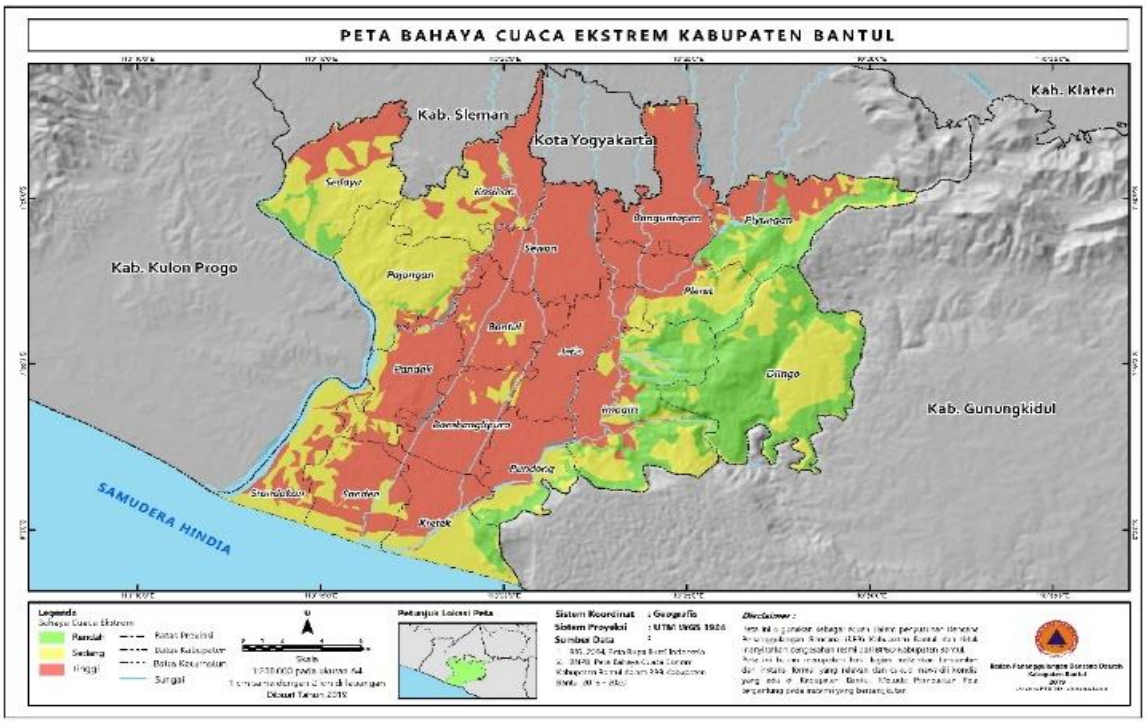

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul

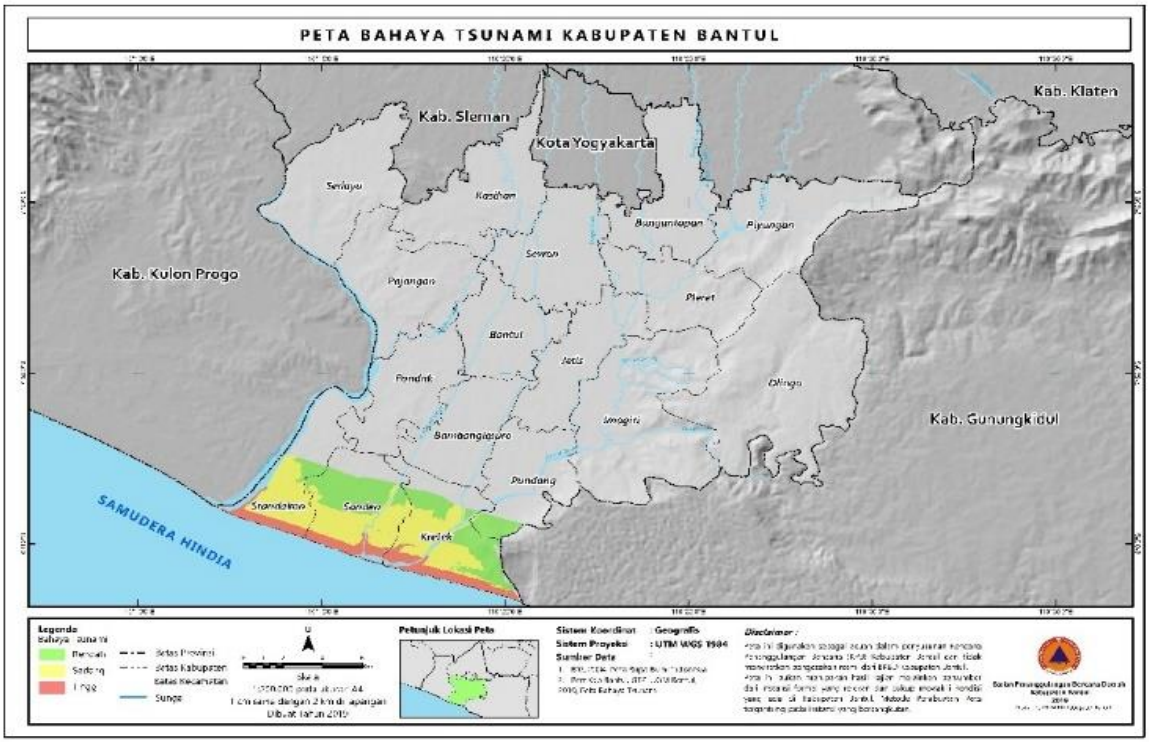

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

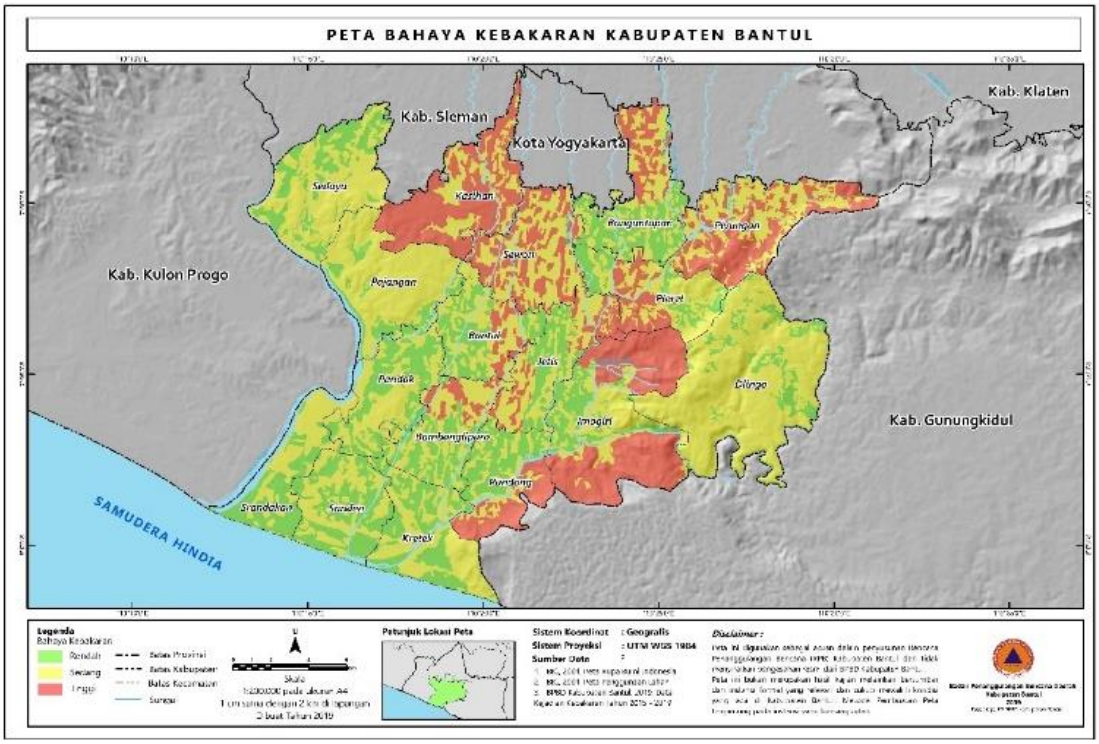

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul

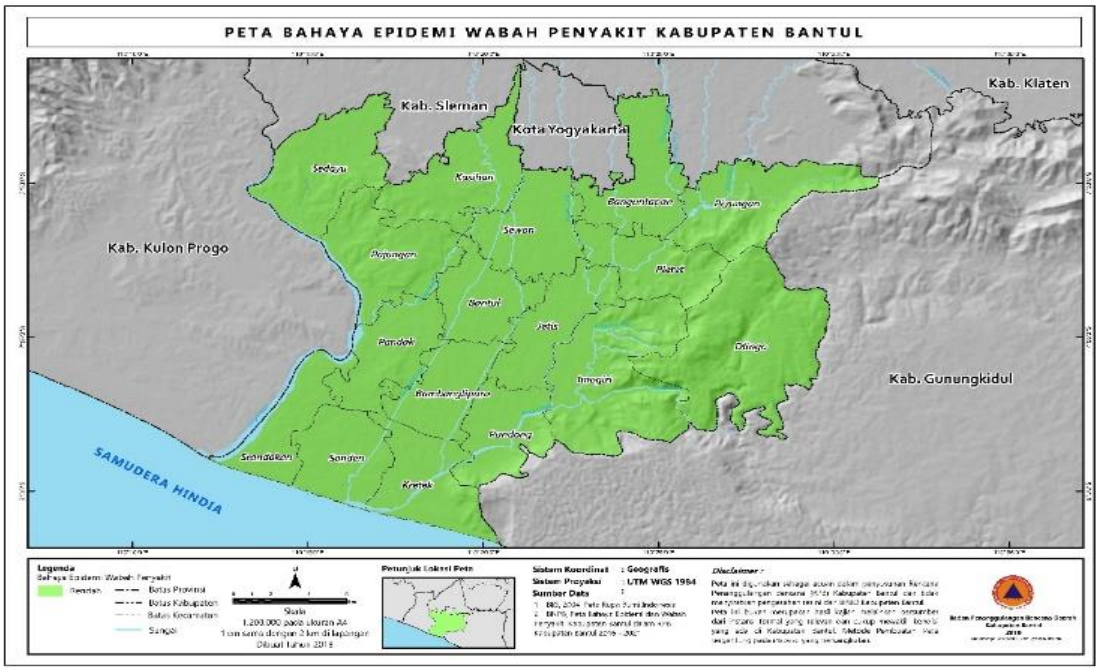

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul

Komponen kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian

risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Peningkatan kapasitas daerah salah satunya dilakukan dengan perwujudan kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Pencapaian kalurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2020 sebanyak 35 kalurahan dari 75 kalurahan atau baru mencapai 46,67%. Sedangkan pencapaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 23 atau sebesar 4,51%.

Potensi tingkat risiko bencana pada 9 (sembilan) jenis bencana adalah tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Ancaman	Luas Ancaman		Jumlah Penduduk Terpapar		Nilai Kerugian		Tingkat Kapasitas Daerah	Tingkat risiko
		Ha	Kelas	Jiwa	Kelas	Miliyar	Kelas	Kelas	
1	Gempa Bumi	6.978	Tinggi	93.414	Sedang	8.417	Sedang	Rendah	Sedang
2	Longsor	6.874	Tinggi	63.369	Sedang	5.629	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir	15.068	Tinggi	24.558	Sedang	24.104	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	799	Tinggi	7.031	Rendah	651	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan	11.225	Tinggi	93.460	Sedang	13	Rendah	Rendah	Rendah
6	Cuaca Ekstrim	44.768	Tinggi	692.936	Tinggi	53.486	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	3.384	Tinggi	34.735	Sedang	1.751	Sedang	Rendah	Sedang
8	Kebakaran	11.727	Tinggi	94.878	Sedang	22.173	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Epidemi dan Wabah penyakit	50.685	Sedang	945.441	Tinggi	317*	Rendah	Rendah	tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

*Keterangan : * angka sementara, belum memperhitungkan kerugian* yang dirasakan/dialami masyarakat

Jenis bencana tidak hanya bencana alam, namun bencana non alam juga berpotensi menjadi ancaman. Hal ini terbukti dengan terjadinya pandemi Covid-19. Sejak awal Maret 2020, wilayah Kabupaten Bantul mulai dilanda wabah Covid-19 dan terus bertambah

menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul bahkan pada bulan Maret 2021 tiga wilayah kapanewon terkonfimasi lebih dari 1000 kasus yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat karena mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, meskipun pada sektor tertentu ada dampak positif yang diperoleh seperti sektor informasi dan komunikasi. Luasnya sektor kehidupan yang terdampak menjadikan tidak mudah dalam mengidentifikasi atau menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun, melalui pendekatan kondisi perekonomian makro daerah, kerugian dampak Pandemi Covid-19 dapat tergambar dari pertumbuhan PDRB . Merujuk pada hal tersebut, maka selama pandemi Covid-19 (2019-2020) telah menyebabkan penurunan PDRB sebesar Rp317,140 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah ada penurunan sebesar Rp30,64 Milyar. Sementara untuk kerugian yang dirasakan/dialami masyarakat setiap sektor belum dapat terhitung secara detil karena luasnya dampak yang ditimbulkan

Tingkat risiko bencana per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
1.	Pajangan	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Rendah
2.	Pandak	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
3.	Sedayu	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
4.	Sanden	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
5.	Dlingo	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah		Sedang
6.	Sewon	Tinggi	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang
7.	Srandakan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
8.	Kasihan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi		Tinggi
9.	Imogiri	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Sedang
10.	Pleret	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
11.	Bantul	Sedang	Tinggi		Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
12.	Pundong	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi		Sedang
13.	Kretek	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
14.	Bambanglipuro	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang
15.	Piyungan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Rendah
16.	Jetis	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
17.	Banguntapan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Keterangan: * Data covid 19 di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah 928.676 jiwa dan cenderung meningkat mencapai 954.706 jiwa pada tahun 2020. Dihitung dari nilai totalnya, pertumbuhan penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 0,57%.

Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon

No	Kapanewon	2016				2017				2018				2019				2020				Pertumbuhan 2020 (%)	Proporsi 2020 (%)
		L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio		
1	Kretek	15232	15850	31082	96.10	15061	15776	30837	95.47	15099	15756	30855	95.83	15101	15762	30863	95.81	15076	15688	30764	96.10	-0,32%	3,2
2	Srandakan	15590	15654	31244	99.59	15551	15725	31276	98.89	15522	15642	31164	99.23	15505	15713	31218	98.68	15475	15607	31082	99.15	-0,44%	3,3
3	Sanden	16085	16409	32494	98.03	15755	16169	31924	97.44	15747	16220	31967	97.08	15763	16209	31972	97.25	15713	16097	31810	97.61	-0,51%	3,3
4	Pundong	17554	17930	35484	97.90	17456	17992	35448	97.02	17503	18165	35668	96.36	17658	18250	35908	96.76	17587	18079	35666	97.28	-0,67%	3,7
5	Pajangan	17409	17265	34674	100.83	17467	17427	34894	100.23	17691	17774	35465	99.53	18000	18040	36040	99.78	18271	18280	36551	99.95	1,42%	3,8
6	Dlingo	19401	19625	39026	98.86	19188	19314	38502	99.35	19463	19629	39092	99.15	19649	19888	39537	98.80	19872	20126	39998	98.74	1,17%	4,2
7	Bambanglipuro	20498	20887	41385	98.14	20326	20875	41201	97.37	20551	21070	41621	97.54	20673	21207	41880	97.48	20620	21086	41706	97.79	-0,42%	4,4
8	Sedayu	23155	22898	46053	101.12	23109	23043	46152	100.29	23507	23546	47053	99.83	23754	23892	47646	99.42	24046	24110	48156	99.73	1,07%	5,0
9	Pleret	23610	23053	46663	102.42	23590	23235	46825	101.53	23906	23953	47859	99.80	24246	23924	48170	101.35	24430	24067	48497	101.51	0,68%	5,1
10	Pandak	25986	25784	51770	100.78	25820	25672	51492	100.58	25981	25800	51781	100.70	26112	25901	52013	100.81	26118	25918	52036	100.77	0,04%	5,5
11	Piyungan	25463	25383	50846	100.32	25490	25561	51051	99.72	25714	25978	51692	98.98	26041	26292	52333	99.05	26320	26542	52862	99.16	1,01%	5,5
12	Jetis	28650	28824	57474	99.40	28540	28868	57408	98.86	28906	29300	58206	98.66	29111	29438	58549	98.89	29237	29394	58631	99.47	0,14%	6,1
13	Imogiri	31247	31172	62419	100.24	31168	31363	62531	99.38	31442	31737	63179	99.07	31583	31959	63542	98.82	31730	32105	63835	98.83	0,46%	6,7
14	Bantul	31548	31576	63124	99.91	31230	31558	62788	98.96	31637	32032	63669	98.77	31988	32377	64365	98.80	32146	32506	64652	98.89	0,45%	6,8
15	Sewon	49084	48336	97420	101.55	48760	48274	97034	101.01	49463	49043	98506	100.86	50183	49624	99807	101.13	50539	50024	100563	101.03	0,76%	10,5
16	Kasihan	50397	49933	100330	100.93	50152	50070	100222	100.16	51055	51120	102175	99.87	51749	51778	103527	99.94	52215	52384	104599	99.68	1,04%	11
17	Banguntapan	53951	53957	107908	99.99	53786	53810	107596	99.96	54948	55178	110126	99.58	55800	56155	111955	99.37	56476	56822	113298	99.39	1,20%	11,9
Jumlah		464860	464536	929396	100.07	462449	464732	927181	99.51	5E+05	471943	940078	99.19	472916	476409	949325	99.27	475871	478835	954706	99.38	**0,57%**	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Di tahun 2020, pertumbuhan penduduk yang tertinggi ada di Kapanewon Pajangan (1,42%), Kapanewon Banguntapan (1,20%), dan Dlingo (1,17%). Jumlah penduduk terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan (11,9%), Kasihan (11%) dan Sewon (10,5%). Hal ini terjadi karena ketiga kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kapanewon Kretek (3,2%), Srandakan (3,3%) dan Sanden (3,3%).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender.* Dari sisi *sex ratio*, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bantul lebih besar daripada lelaki. Di tahun 2020, kapanewon yang memiliki *sex ratio* di atas 100% (lelaki lebih banyak daripada perempuan) ada di Kapanewon Pandak (100,49%), Pleret (101,64%) dan Sewon (100,94%). Dari sisi *sex ratio* ini sangat jelas bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dioptimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul

NO	KAPANEWON	KEPADATAN (jiwa/km²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	RERATA
1	Dlingo	692	689	700	705	715	700
2	Pajangan	1.043	1.049	1.067	1.076	1.099	1.066
3	Imogiri	1.146	1.148	1.159	1.164	1.171	1.157
4	Kretek	1.161	1.152	1.153	1.154	1.149	1.153
5	Sedayu	1.340	1.343	1.369	1.381	1.401	1.366
6	Sanden	1.403	1.378	1.380	1.381	1.373	1.383
7	Pundong	1.498	1.497	1.506	1.510	1.506	1.503
8	Piyungan	1.563	1.569	1.589	1.601	1.624	1.589
9	Srandakan	1.705	1.707	1.701	1.704	1.696	1.702
10	Bambanglipuro	1.823	1.815	1.834	1.840	1.837	1.829

NO	KAPANEWON	KEPADATAN (jiwa/km²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	RERATA
11	Pleret	2.031	2.039	2.068	2.083	2.111	2.066
12	Pandak	2.130	2.119	2.131	2.137	2.141	2.131
13	Jetis	2.349	2.346	2.379	2.387	2.396	2.371
14	Bantul	2.876	2.861	2.901	2.915	2.945	2.899
15	Kasihan	3.099	3.095	3.156	3.180	3.230	3.152
16	Sewon	3.587	3.573	3.627	3.655	3.702	3.628
17	Banguntapan	3.776	3.778	3.867	3.906	3.978	3.861
RERATA		**1.954**	**1.950**	**1.976**	**1.987**	**2.004**	**1.974**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Dilihat dari tabel di atas kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk belum merata. Rerata tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.974 jiwa per km^2 dengan standar deviasi sebesar 914 jiwa per km^2.

Di tahun 2020, kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan (3.861 jiwa/km^2), Sewon (3.628 jiwa/km^2), dan Kasihan (3.152 jiwa/km^2). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kapanewon Dlingo (700 jiwa/km^2).

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kapanewon. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

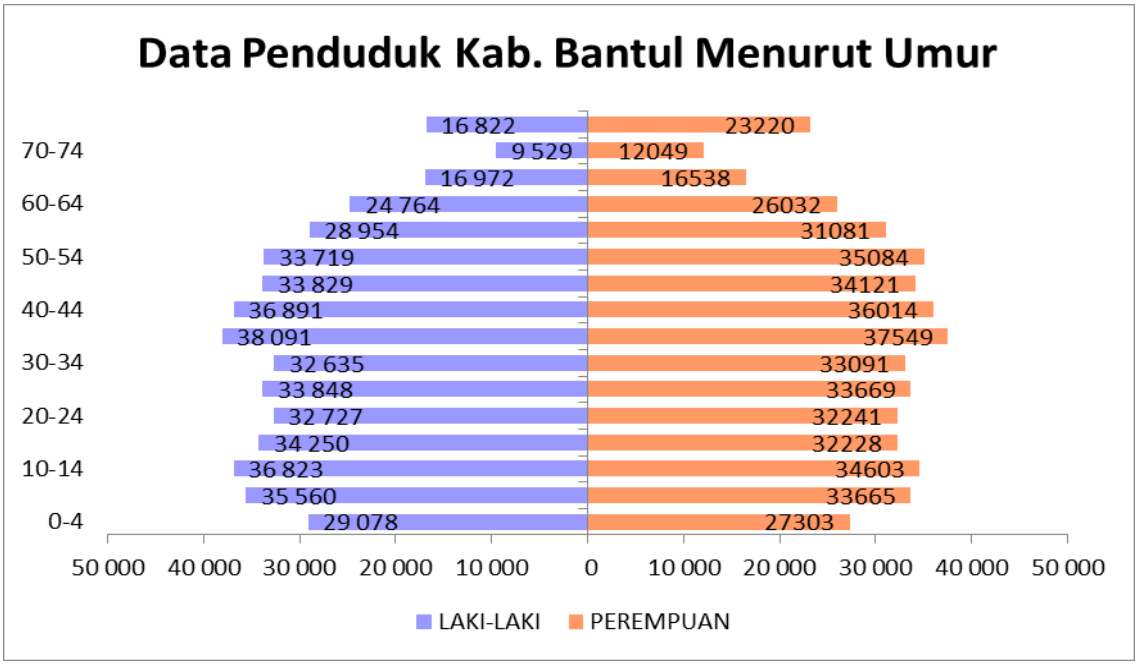

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021

Komposisi Penduduk menurut kelompok usia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.19. Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 64 tahun) menurun dapat dikatakan Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan.

Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Upaya pemanfaatan peluang tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk

menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

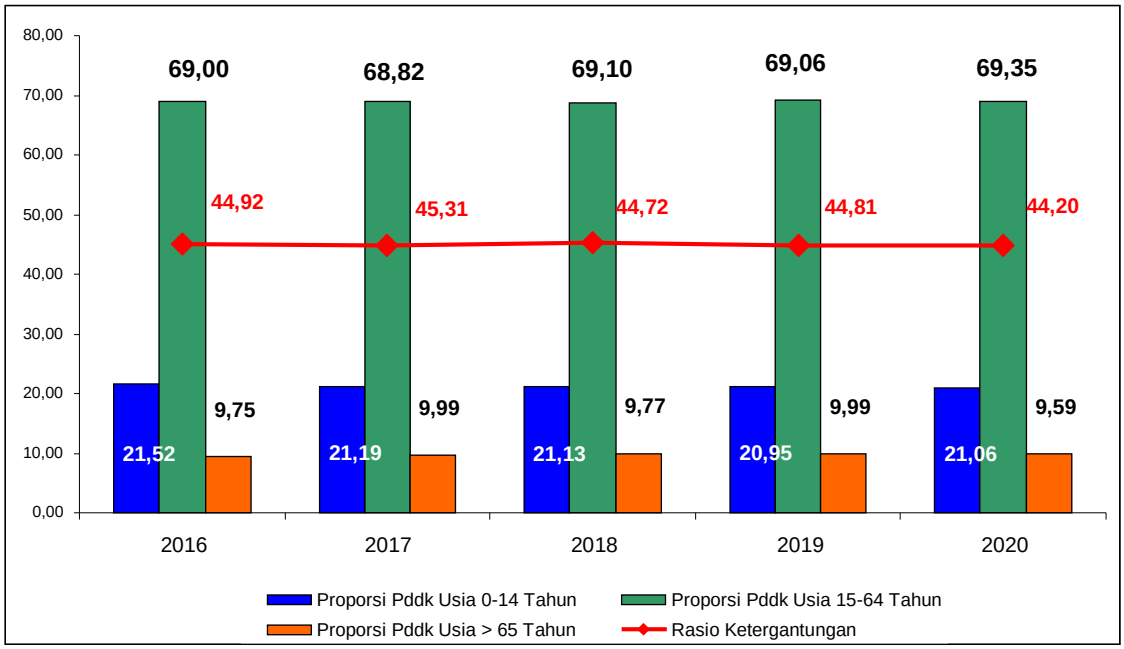

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah.

Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memuat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantul berdasarkan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan target serta capaian RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB dapat menggambarkan kinerja pembangunan dan transformasi struktural perekonomian. PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan ini terjadi pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil). Apabila dicermati angka-angkanya, peningkatan ini dapat dikatakan

signifikan dengan rata-rata 1,3 triliun rupiah per tahun untuk PDRB atas harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 0,61 triliun untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB baik nominal maupun riil pada periode 2016-2020.

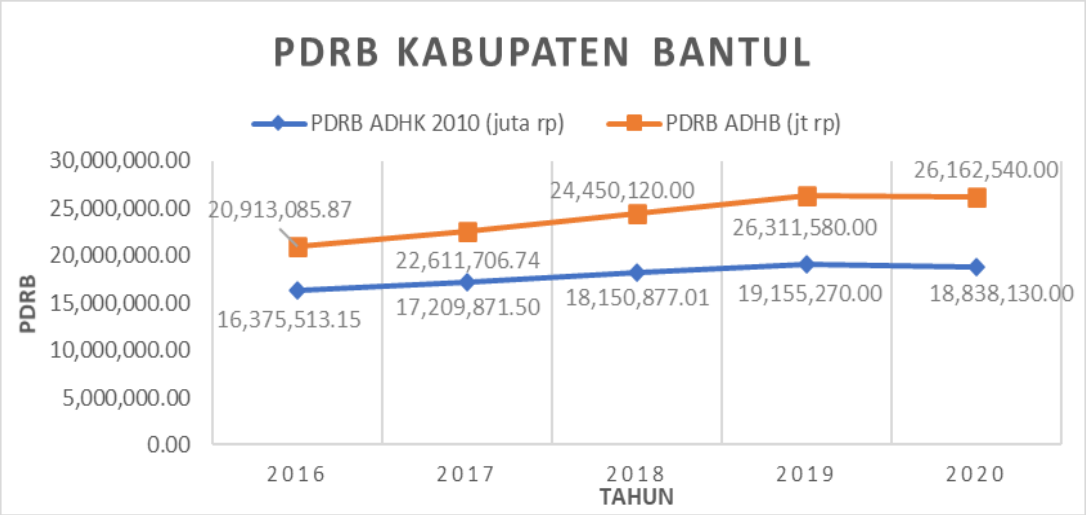

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 trilliun rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Grafik PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku. Periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 trilliun rupiah.

Jika diperhatikan berdasar atas harga konstan perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, besarnya PDRB mengikuti tren yang berbentuk kuadratik. Besarnya PDRB mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian pada

tahun 2021 dan selanjutnya perlu diambil tindakan antisipasi agar penurunannya tidak semakin besar.

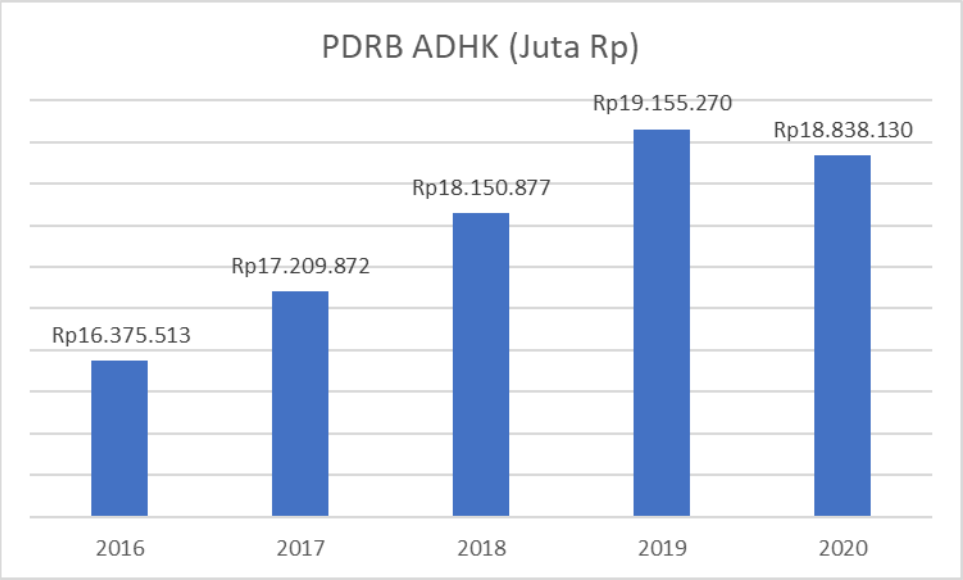

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dalam rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

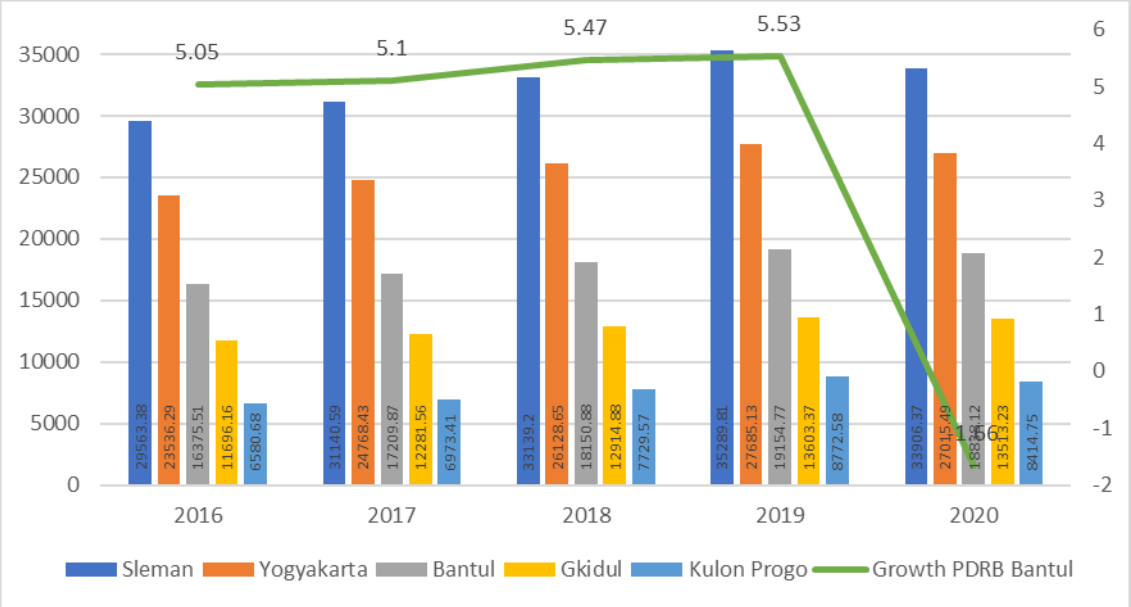

Sumber:Tabel Dinamis, BPS, 2021

Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010

Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY 2016-2020

Secara umum kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY berada dalam posisi ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 18,53%, kontribusi Sleman sebesar 33,66% dan kontribusi Kota Yogyakarta sebesar 26,67%. Sedangkan kontribusi kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 13,22% dan kontribusi Kulonprogo sebesar 7,91%. Pola kontribusi semua kabupaten/kota tersebut cenderung stabil dalam rentang tahun 2016-2020.

Apabila PDRB dilihat dengan menggolongkan lapangan usahanya, maka dengan menggunakan pengelompokan 17 sektor hasil perhitungan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,33	13,85	13,63	13,07	14,12
2	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,57	0,54	0,51	0,47
3	Industri Pengolahan	15,21	15,25	15,22	15,18	14,84
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,29	9,38	9,72	9,75	8,5
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,47	8,61	8,69	8,65	8,46
8	Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,74	4,72	4,85	4,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,67	11,73	11,69	11,92	10,73
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,38	7,32	7,27	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,8	2,77	2,83	2,94	2,88
12	Real Estate	6,58	6,57	6,56	6,71	6,9
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,48	0,47	0,49	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Perta-hanan, dan Jaminan Sosial	7,55	7,77	7,73	7,63	7,72
15	Jasa Pendidikan	6,87	6,82	6,8	6,9	7,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,85	1,81	1,85	2,28
17	Jasa-jasa Lainnya	1,98	2,01	2,04	2,05	1,86
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum; yang masing-masing berkisar kurang lebih 14 persen, 15 persen dan 11 persen. Pada tahun 2016-2020 sektor pertanian dan industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang menurun secara bertahap (kecuali sektor pertanian tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan).

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan pula. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY tahun 2016-2020.

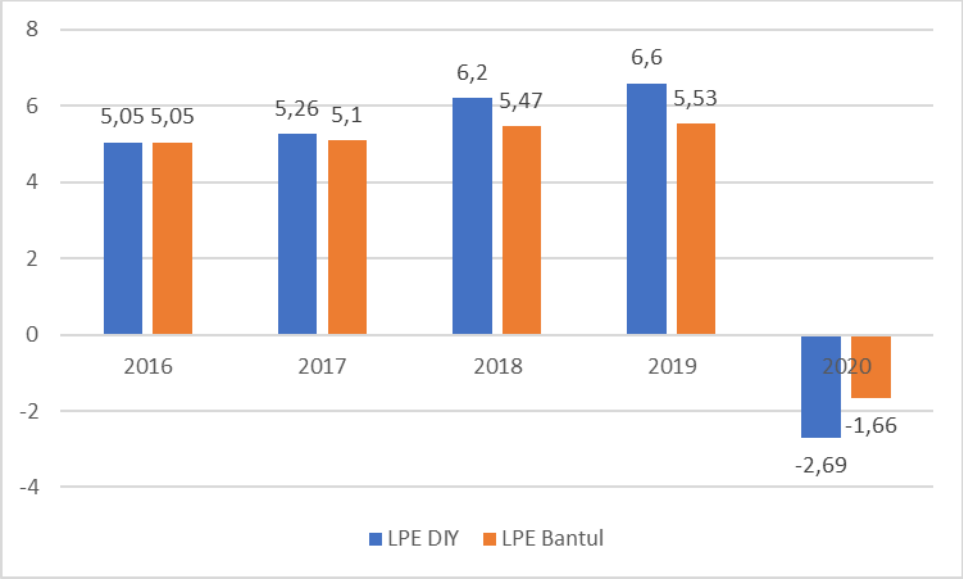

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besar peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan

tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen. Tahun 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY pada tahun 2016 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan DIY.

Tren dari data berbentuk kuadratik dengan puncak, perlu usaha yang besar agar tahun-tahun berikutnya besar pertumbuhan ekonominya tidak mengikuti tren seperti di atas. Besaran pertumbuhan ekonomi harus diupayakan menjadi positif kembali agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan

Apabila dilihat dari struktur PDRB maka besarnya pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

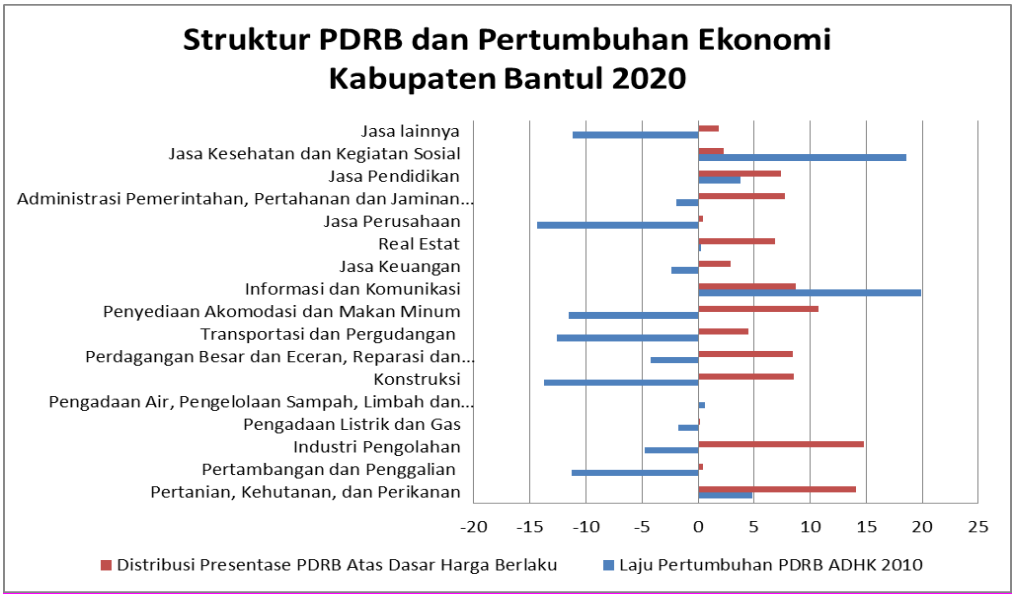

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan kategori usaha yang lain. Pertanian mempunyai pertumbuhan yang juga positif

meskipun lebih rendah dibanding kedua sektor tersebut di atas. Kontribusi terbesar masih disumbang oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku apabila dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer, dapat dilihat pada gambar berikut.

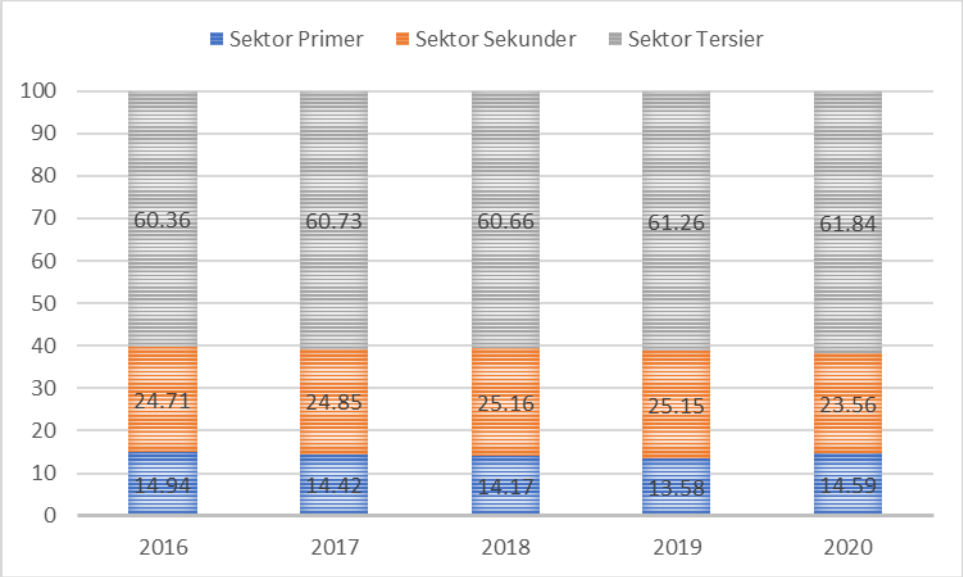

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2016-2019 pangsa sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun, baru tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,01 persen. Sebaliknya sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) konsisten rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit sekali mengalami

penurunan. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen dari total PDRB Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,52	2,5	2	0,13	4,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,06	1,57	-0,27	-11,32
3	Industri Pengolahan	5,43	6,39	5,52	5,38	-4,8
4	Pengadaan Listrik, Gas	15,58	3,99	4,85	4,73	-1,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,96	3,18	5,16	8,25	0,61
6	Konstruksi	4,07	5,93	7,24	5,17	-13,78
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	6,54	5,79	5,64	5,19	-4,2
8	Transportasi dan Pergudangan	4,23	3,88	5,51	6,46	-12,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,19	5,7	6,75	8,68	-11,55
10	Informasi dan Komunikasi	8,41	5,87	6,18	7,29	19,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	2,82	6,59	9,97	-2,41
12	Real Estate	5,82	4,97	5,41	6,43	0,23
13	Jasa Perusahaan	4,26	4,27	5,37	7,38	-14,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	4,98	4,55	3,42	-1,96
15	Jasa Pendidikan	2,95	5,16	6,08	6,65	3,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	5,13	4,62	7,02	18,59
17	Jasa Lainnya	6,02	5,61	7,14	6,09	-11,21
	PDRB	5,05	5,1	5,47	5,53	-1,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2018 dan 2019 melaju relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,1 persen, sementara tahun 2018 tumbuh menjadi 5,47 persen dan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,53 persen.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Hanya ada beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di antaranya adalah sektor informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 19,94%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (tumbuh sebesar 18,59%) dan sektor

pertanian yang tumbuh sebesar 4,86%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan di antaranya adalah sektor jasa perusahaan (-14,4%), sektor konstruksi (-13,78%), sektor transportasi dan pergudangan (-12,58%), sektor akomodasi dan makan minum (-11,55%), sektor pertambangan dan penggalian (-11,32%) dan sektor jasa lainnya (-11,21%).

Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul dalam pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

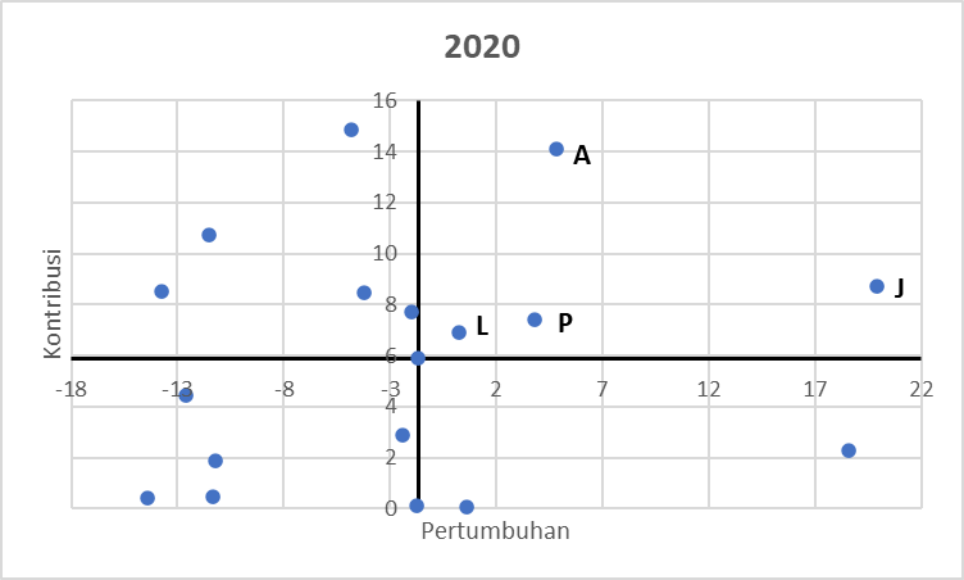

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Keterangan
A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
J: Informasi dan Komunikasi
P: Jasa Pendidikan
L: Informasi dan Komunikasi.

Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Dari pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat ditunjukkan perubahan posisi sektor-sektor di Kabupaten Bantul tahun 2016, 2018 dan 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata

Tahun	2016	2018	2020
Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul	• Industri pengolahan • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	• Industri pengolahan • Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Jasa Pendidikan	• Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Jasa Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 ada beberapa lapangan usaha yang konsisten tumbuh dan berkontribusi di atas angka rata-rata Kabupaten Bantul. Lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makanan dan minuman dan informasi dan komunikasi.

Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 hanya sektor informasi dan komunikasi yang tetap tumbuh dan berkontribusi di atas rata-rata, sementara sektor lain yang juga tumbuh di atas rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan kondisi pandemi telah mengubah komposisi sektor ekonomi.

2.2.2. PDRB Perkapita

Perkembangan nilai PDRB per kapita dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Nilai PDRB per kapita diukur menggunakan harga berlaku tahun 2020, yaitu sebesar 25,4 juta rupiah. Dengan perhitungan menggunakan harga konstan tahun 2010 tercatat bahwa nilai PDRB per kapita sebesar 18,29 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 mencapai 4,32%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020.

2.2.3. Laju Inflasi

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian.

Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Kondisi inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

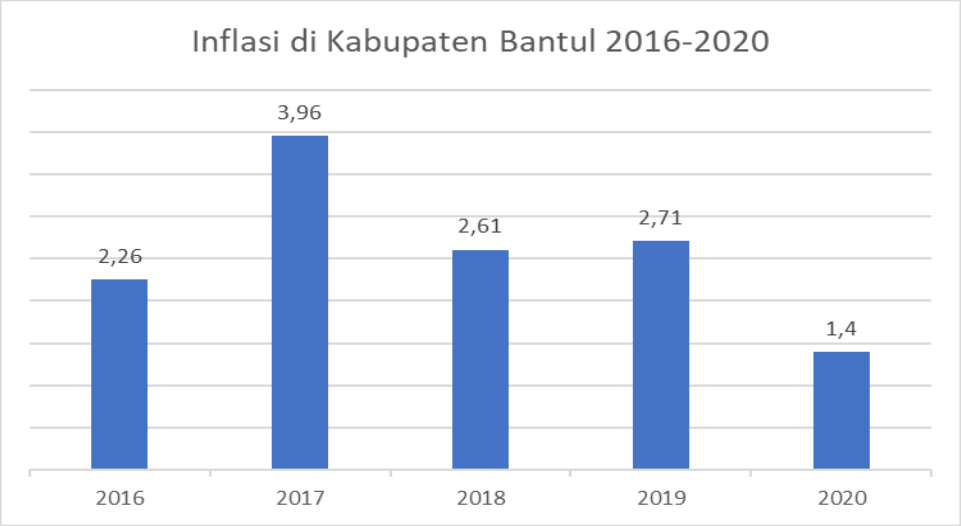

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020

Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren kuadratik yang mencapai posisi tertinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, selanjutnya selama tahun 2018 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif, dalam arti mengalami peningkatan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020.

2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

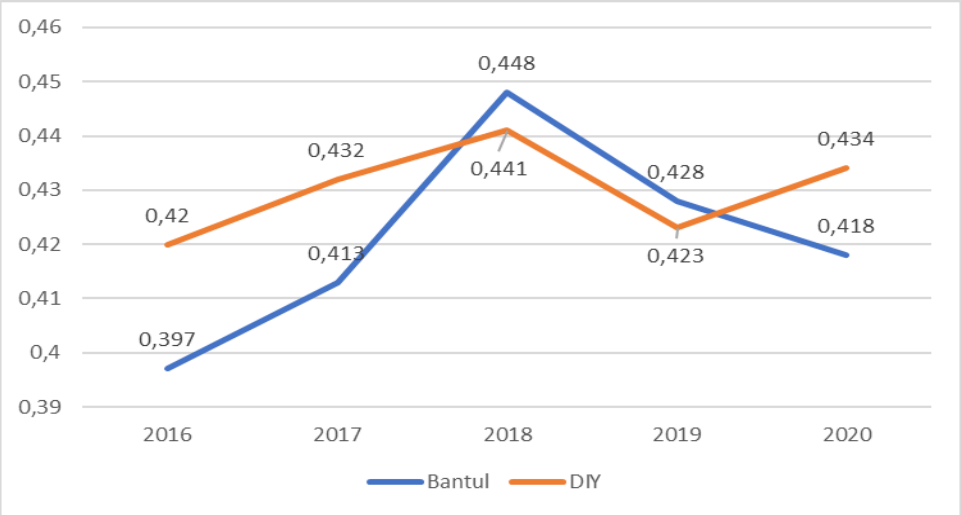

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2020 berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan "moderat". Indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016, 2017 dan 2020 lebih baik dibandingkan DIY. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan provinsi.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian. Karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan.

2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata

pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tingkat kemiskinan pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten Bantul dengan DIY disajikan pada gambar berikut:

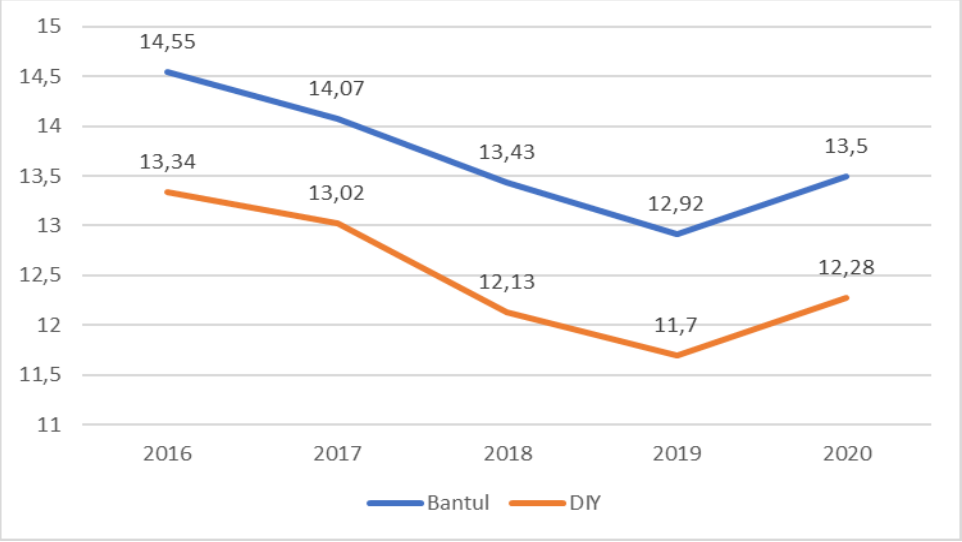

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020. Selama periode 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selalu lebih tinggi dibandingkan DIY.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS di atas digunakan sebagai indikator makro daerah, sehingga tidak dapat menampilkan data *by name by addres* yang dibutuhkan dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel berikut menunjukkan data jumlah penduduk miskin di setiap kapanewon menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon

No.	KAPANEWON	Penduduk tahun 2020	Jumlah	%
1	BAMBANGLIPURO	41.706	12.637	30,30
2	BANGUNTAPAN	113.298	15.551	13,73
3	BANTUL	64.652	12.341	19,09
4	DLINGO	39.998	14.518	36,30
5	IMOGIRI	63.835	21.458	33,61
6	JETIS	58.631	15.383	26,24
7	KASIHAN	104.599	18.639	17,82
8	KRETEK	30..764	7.131	23,18
9	PAJANGAN	36.551	15.793	43,21
10	PANDAK	52.036	19.824	38,10
11	PIYUNGAN	52.862	13.603	25,73
12	PLERET	48.497	14.916	30,76
13	PUNDONG	35.666	12.822	35,95
14	SANDEN	31..810	9.369	29,45
15	SEDAYU	48.156	13.456	27,94
16	SEWON	100.563	18.968	18,86
17	SRANDAKAN	31.082	10.562	33,98
TOTAL		**954.706**	**246.971**	**25,87**

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) No. 146 tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan kapanewon dengan persentase individu desil 1-4 terbanyak adalah Kapanewon Pajangan, Pandak, Dlingo, Pundong, Imogiri, dan Srandakan, sementara data jumlah penduduk miskin yang sebesar 246.971 berbeda dengan data dari BPS yang sebesar 138.660 karena data penduduk miskin pada DTKS mencakup penduduk miskin dan penduduk rawan miskin.

2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	TPT	TPT DIY
1	2016	3,00	2,72
2	2017	2,87	3,02
3	2018	2,72	3,37
4	2019	3,06	3,18
5	2020	4,06	4,57

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2021

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 3,06% di tahun 2019 menjadi 4,06% di tahun 2020. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul dibandingkan DIY lebih rendah, kecuali tahun 2016. Jumlah pengangguran di Bantul pada tahun 2017 sebanyak 17.466 orang, sempat menurun menjadi 15.730 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 17.700 orang pada

tahun 2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61
D.I Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, levelnya mencapai 80,01. Capaian level IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 78,42. Komponen IPM Kabupaten Bantul adalah indikator usia harapan hidup (UHH) 73,86 tahun, angka harapan lama sekolah (HLS) 15,17 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 9,55 tahun, dan pengeluaran perkapita riil (KAP) Rp15,52 juta yang disesuaikan.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga perkembangan Kota Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Bantul, karena daya tampung wilayah Kota Yogyakarta yang sudah tidak memungkinkan.

2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

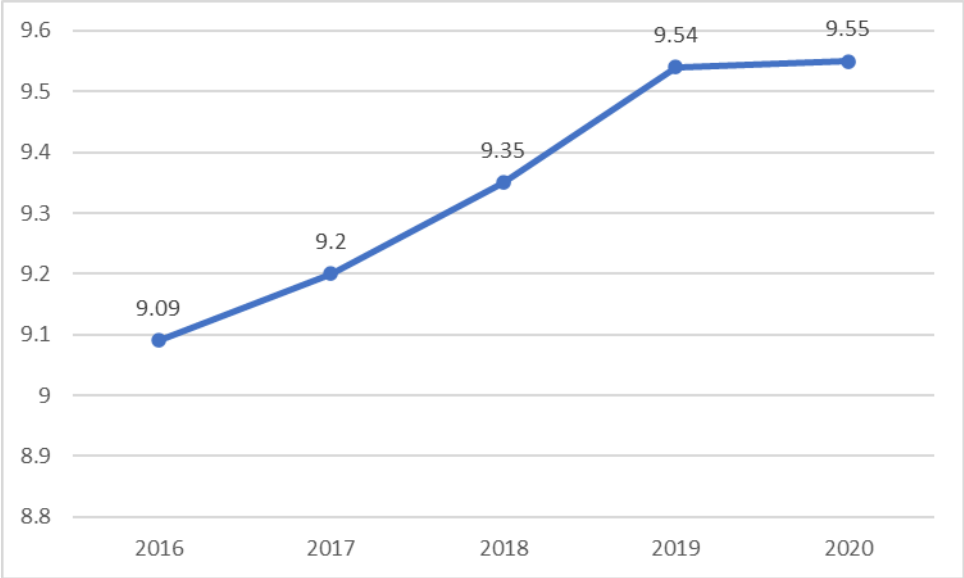

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,09 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,55 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

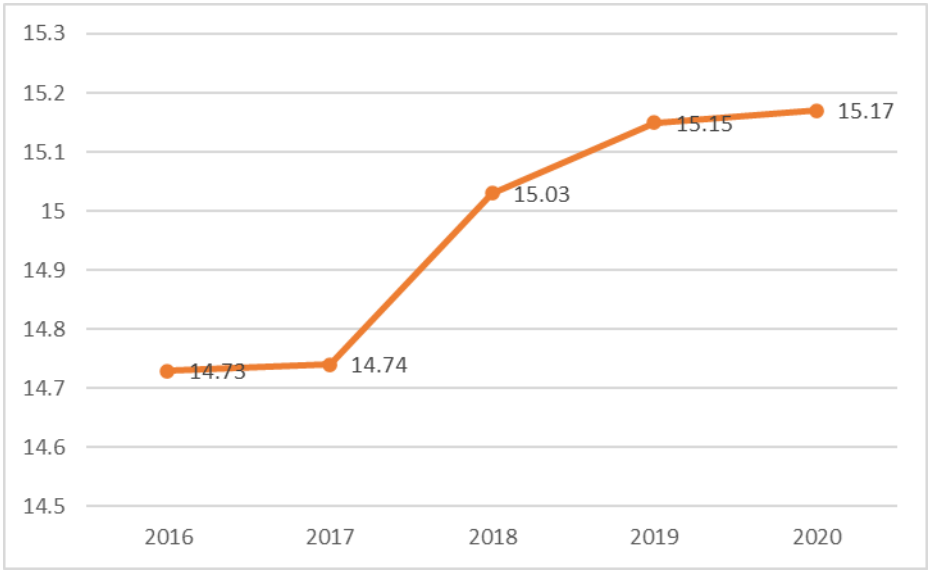

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 15,17 tahun. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

2.2.10. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat dinilai dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi salah satu IKU Bupati. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

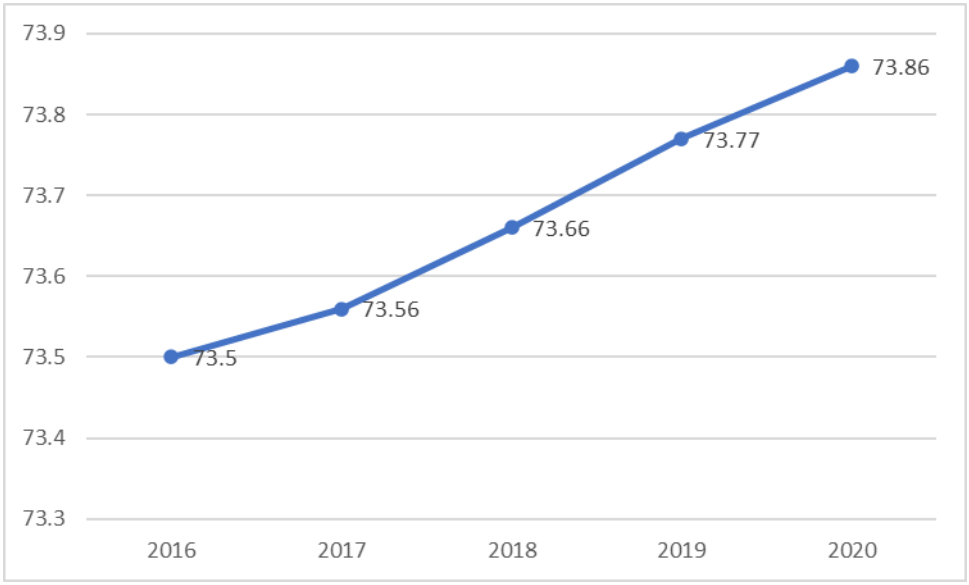

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu 73,86 tahun, 2019 yaitu 73,77 tahun meningkat dari tahun 2018 sebesar 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (*Incidence Rate*/ IR) DBD serta penyakit tidak menular (PTM).

2.2.11. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

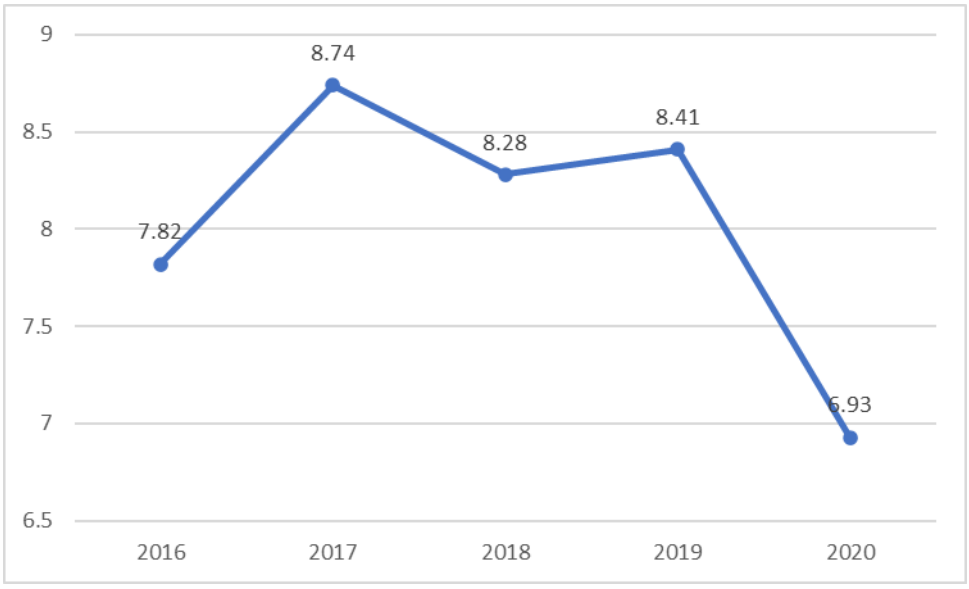

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perubahan angka kematian bayi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 cenderung menurun cukup signifikan dibanding tahun 2019. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93 terjadi penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,41 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan kelainan bawaan. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada berikut.

Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi

No	Sebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bayi Berat Lahir Rendah	22	22	31	28	16
2	Asfiksia	24	14	32	27	16
3	Kelainan bawaan	23	20	19	20	26
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	52	25	35	17
	J u m l a h	94	108	107	109	75

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada

bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.12. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

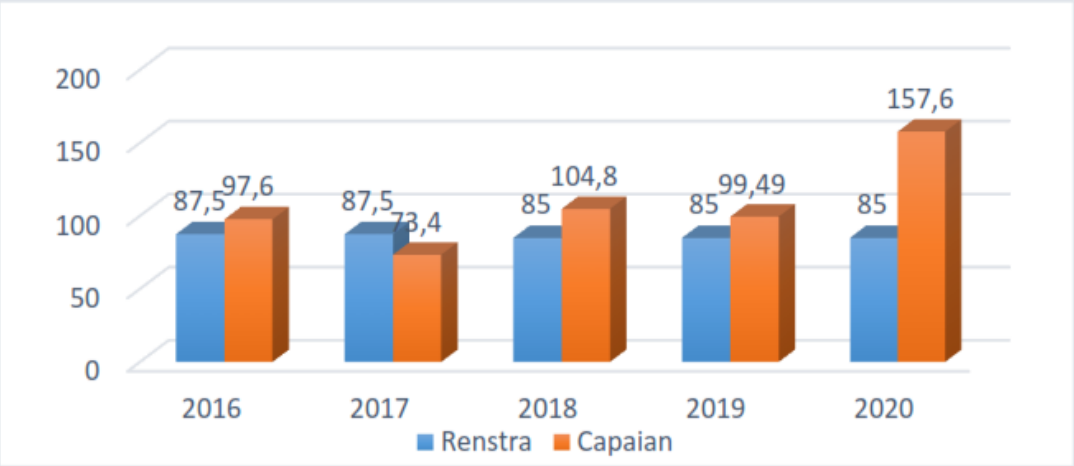

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kasus kematian ibu atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdarahan	2	2	5	3	1
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5
3	Emboli air ketuban	0	0	0	1	0
4	Infeksi	2	2	0	-	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0
9	Kanker	0	0	0	0	2
10	Syok Septik/Hypovolemik	0	0	0	0	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2
	J u m l a h	12	9	14	13	20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu: 1) program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2) program pencegahan penyakit; 3) program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Kalurahan Siaga, ambulan kalurahan, dan donor darah; 4) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi; 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) diintegrasikan dengan kelas ibu; 6) membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); dan 7) peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED); serta 8) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara

secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan SPM meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2.3.1.1. Pendidikan

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan Kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	7	553	25.793	2.886	1.674	58%
2.	KB	0	492	8263	1605	0	0
3.	TPA	0	56	811	214	0	0
4.	SPS	0	237	3.604	778	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Indikator untuk mengukur tingkat Pendidikan PAUD antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam

Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 usia PAUD adalah 4-6 tahun. Sedangkan APM menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD.

Tingkat Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh nilai APK dan APM sebagai berikut:

Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK PAUD	93,44	98,20	100,70	106,24	97,70
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM PAUD	83,73	88,68	86,54	83,84	81,20

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai APK yang semakin tinggi dari 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Namun turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal.

Nilai APM yang menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa daya serap sistem pendidikan yang ada masih belum mencukupi, fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia belum dapat dimanfaatkan penduduk sesuai usia PAUD dalam arti bahwa penduduk usia PAUD belum semua dapat bersekolah tepat waktu.

Dalam perkembangannya sesuai Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara Holistik Integratif pula.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI merupakan layanan yang kompleks dan menyeluruh, sehingga dibutuhkan sinergi dari lintas sektor, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD), Polres, Kapanewon, Kalurahan, Organisasi Mitra PAUD, Posyandu, Tokoh masyarakat dan Paguyuban Orangtua serta Komite Sekolah.

Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Bantul telah mencapai 90% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2020 PAUD HI tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi Covid 19, namun dari hasil pemantauan perkembangan anak oleh pendidik/guru, layanan PAUD HI tetap dilaksanakan meski sangat terbatas.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik.

Kondisi pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	83	73.523	5.033	2552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,7
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai akreditasi yang diperoleh lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 24 Jumlah Sekolah Menurut Peringkat Akreditasi yang Diperoleh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Peringkat Akreditasi				
		A	B	C	BT	Jumlah
1	SD	306	56	0	2	364
2	MI	24	8	0	1	33
3	SMP	64	22	3	4	93
4	MTs	18	6	0	1	25

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud, 2021

Partisipasi peserta didik jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SLTP/MTs ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	101.78
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	102.86
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	92,96
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	79,01
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI			100	100	99,80
	APS SMP/Mts			100	99,74	99,36

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2020 sebesar 101,78%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,84 % dari capaian tahun 2019 sebesar 95,26. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,48% menjadi 102,86%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2020 adalah 92,96%, dan APM SMP/MTs tahun 2020 adalah 79,01%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterjangkauan dan pemerataan pendidikan dengan melihat proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan. Semakin kecil angka putus sekolah berarti semakin baik pendidikan di wilayah tersebut

Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah					
	SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin turun dan pada jenjang SMP/MTs sudah mencapai angka 0 berarti tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah semakin baik, namun masih belum merata.

Beberapa strategi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan indikator di atas diantaranya adalah :

(1) Program Wajar 9 tahun dilakukan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan pengembangan kompentensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;

(2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

c. Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SKB					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	143	296	170	317	386
	- Jumlah Tutor	9	36	36	36	31
2	PKBM					
	- Jumlah Lembaga	33	27	31	31	26
	- Jumlah Warga Belajar	1762	1768	2570	3115	2771
	- Jumlah Tutor	210	423	135	226	404
3	LKP					
	- Jumlah Lembaga	62	44	44	34	42
	- Jumlah Warga Belajar	3276	3452	2272	2296	2059
	- Jumlah Tutor	210	423	518	315	264
4	TBM					
	- Jumlah Lembaga	35	47	53	62	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
5	Rumah Pintar					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
6	*Homeschooling*					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar	21	21	25	-	-
	- Jumlah Tutor	10	10	10	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Keterangan :

SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
Rumpin : Rumah Pintar;

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2020 jumlah data rumah pintar dan *homeschooling* nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan ijin.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	563	469	1,032
2	Paket B	466	203	669
3	Paket C	998	458	1.456

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD	98,7	98,75	108.41	106.24	97,70
2.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	92,77
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	97,23
3.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	86,55
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	76,31
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	9,2	9,35	9,55
5	Peringkat Rata-rata Nilai USM					
	- Nilai USM SD / MI	-	4	4	3	0
	- Nilai USM SMP / MTs	-	3	3	3	0
6	Jumlah Prestasi Non Akademik TK Nasional (Buah)		6	8	4	4

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Kelulusan					
	- SD / MI	100	100	100	100	100
	- SMP / MTs	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM)					
	- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	109,61	108,56	101,27
	- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	108,54	111,18	105,93
9	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	- SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2020 nilai APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs, angka capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu yang sekolah di jenjang atasnya. Selain itu, terdapat siswa yang bersekolah di luar wilayah Bantul.

2.3.1.2. Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	1.137	1.141	1.141	1.139	1.139
2	Jumlah balita	59.720	58.255	60.087	59.522	59.947
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,04	19,59	18,99	19,2	20,3
4	Cakupan layanan posyandu	52 (balita)	51 (balita)	53 (balita)	52 (balita)	49 (balita)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1.000 Balita sebesar 20,3 berarti dalam 1.000 Balita terdapat 20 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 49 Balita.

2) Ketersediaan Fasilitas

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	11	10	11	10
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	5	5	6	6	6
4	Klinik Utama	2	3	2	2	2
5	Klinik Pratama	47	55	56	61	70
	Klinik Pratama Rawat Jalan	38	45	45	50	59
	Klinik Pratama Rawat Inap	9	10	11	11	11
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	4	5	0	0	0
7	Apotek	123	125	140	157	175
8	Klinik kecantikan estetika	10	9	9	8	8
9	Laboratorium	4	3	3	3	3
10	Toko obat	4	5	7	8	10
11	Optik	12	12	13	7	7
12	Puskesmas rawat inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas pembantu	65	65	65	65	65
15	Puskesmas keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu	1132	1132	1142	1142	1139
17	Posyandu lansia	901	967	1034	1034	1034

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2020 terdapat RS sejumlah 10 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas yang terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap, dan 11 Puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi Puskesmas sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NomornHK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi puskesmas.

Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
1	Pajangan	√			√	tidak dilaksanakan akreditasi	Utama
2	Pleret	√			√		Utama
3	Piyungan	√			√		Paripurna
4	Banguntapan II	√			√		Utama
5	Srandakan	√		√			Utama
6	Sanden	√			√		Madya
7	Pundong	√			√		Madya
8	Bantul I	√			√		Utama
9	Imogiri I	√		√			Utama
10	Bambanglipuro			√			Utama
11	Jetis I	√		√			Utama
12	Jetis II			√			Paripurna
13	Kasihan I		√		√		Utama
14	Pandak I		√		√		Utama

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
15	Pandak II		√		√		Utama
16	Kretek		√				Utama
17	Bantul II		√				Utama
18	Imogiri II		√				Madya
19	Dlingo I		√				Madya
20	Dlingo II		√				Utama
21	Sewon I		√				Madya
22	Sewon II		√				Utama
23	Sedayu I		√				Madya
24	Sedayu II		√				Madya
25	Banguntapan I		√				Utama
26	Banguntapan III		√				Madya
27	Kasihan II		√				Madya

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B-Umum	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolukito	B-Umum	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C-Umum	Akreditasi
4	RSU Nur Hidayah	D-Umum	Akreditasi
5	RSU Santa Elizabeth	D-Umum	Akreditasi
6	RSU Permata Husada	D-Umum	-
7	RSU Rahma Husada	D-Umum	Akreditasi
8	RSU Rajawali Citra	D-Umum	Akreditasi
9	RSU Griya Mahardika	C-Umum	Akreditasi
10	RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah	C-Khusus KIA	Akreditasi
11	RSK Bedah Ringroad Selatan	C-Khusus Bedah	Akreditasi
12	RSK Paru Respira	C-Khusus Paru	Akreditasi
13	RSK Ibu dan Anak Adinda	C-Khusus KIA	-

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
14	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C-Khusus KIA	-
15	RSK Bedah Adelia	C-Khusus Bedah	Akreditasi
16	RS UII	C-Umum	-

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain fasilitas fisik sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas lain yang disediakan pemerintah Kabupaten Bantul adalah pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN. Pada tahun 2020 kepesertaan JKN sebesar 841.108 jiwa atau 88,10%. Data kepesertaan JKN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Jaminan Kesehatan Nasional				
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	53,61	445.505	46,66
1.2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	5,64	50.887	5,33
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	26,14	224.980	23,57
1.4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	10,70	88.688	9,29
1.5	Bukan Pekerja	32.340	3,90	31.048	3,25
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,50	841.108	88,10
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	118.210	12,50	113.598	11,90
	Total penduduk Kab Bantul	945.441	100,00%	954.706	100,00

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Dari total kepesertaan JKN tersebut, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2020 merupakan kepesertaan dengan jumlah terbesar yaitu 445.505 jiwa atau 46,66%. Kepesertaan JKN-PBI dari APBD sebesar 50.887 jiwa atau 5,33%. Hal tersebut merupakan perubahan program pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin/Jamkesda menjadi peserta JKN. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 224.980 jiwa atau 23,57%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 88.688 jiwa atau 9,29% dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 31.048 atau 3,25%. Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 113.598 jiwa atau 11,90%, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait. Tingginya jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.

3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Umum	127	154	238	307	417
2	Jumlah Dokter Spesialis	61	65	202	215	304
3	Jumlah Penduduk	928.676	931.356	939.718	949.325	954.706
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,16	0,25	0,32	0,43
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,065	0,070	0,21	0,23	0,32

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter umum per 1000 penduduk mencapai 0,43 artinya satu dokter melayani 4.367 penduduk. Hal

ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara rekruitmen tenaga dokter baik melalui tenaga kontrak maupun ASN.

4) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia. Pada Tahun 2020 telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1.034, artinya telah terdapat Posyandu Lansia di setiap padukuhan di Kabupaten Bantul. Tidak ada peningkatan jumlah posyandu lansia dari tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

b. Kesehatan Masyarakat

1) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita yang diukur	48.750	48.895	48.943	48.502	18.621
Jumlah Balita Gizi Buruk	195	202	202	199	57
Prevelensi Balita Gizi Buruk	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%	0,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pengukuran berat badan balita pada tahun 2020 dilaksanakan secara sampling. Balita status gizi buruk sebesar 0,31%. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di

dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut.

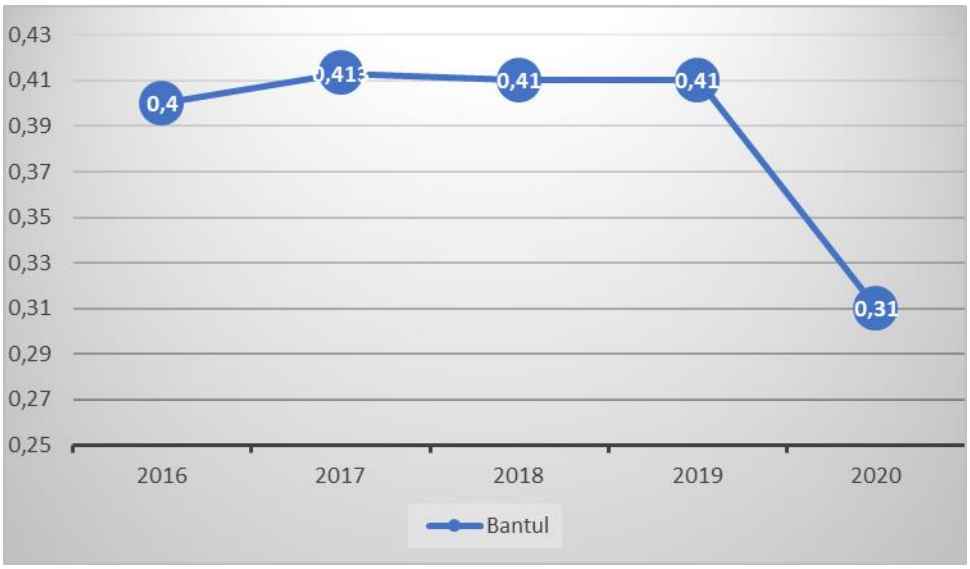

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

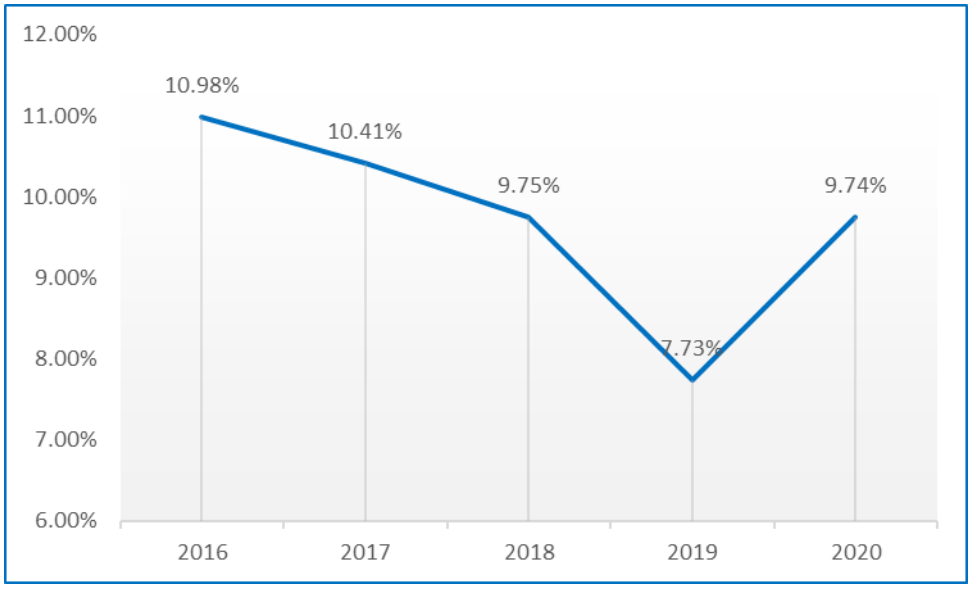

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Bantul Tahun 20216-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48,476	5,325	10.98%
2017	47,899	4,987	10.41%
2018	48,553	4,733	9.75%
2019	48,181	3,725	7.73%
2020	18,638	1,816	9.74%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul

No	Analisa Penyebab	% Balita Stunting
1	Keluarga Gakin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53,00%	53,10%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61,00%	62,20%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59,00%	59,15%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

3) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

4) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat. Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Bambanglipuro	39	6.713	34
Banguntapan	20	7.443	89
Bantul	26	7.377	136
Dlingo	1465	5.131	66
Imogiri	294	8.968	49
Jetis	90	7.500	49
Kasihan	225	9.166	79
Kretek	8	4.391	18
Pajangan	507	5.590	56
Pandak	369	8.311	80
Piyungan	161	6.639	31
Pleret	83	6.677	71
Pundong	33	6.981	82

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Sanden	76	5.482	42
Sedayu	435	6.203	30
Sewon	47	9.228	35
Srandakan	97	5.369	16
Jumlah Rumah Tangga	3.975	117.169	963

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2021

5) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap kalurahan.

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Penyakit Menular**					
1	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	295	175	344	112,9	343
2	Jumlah Kasus HIV	144	49	184	127	103
3	Jumlah Kasus AIDS	55	9	36	22	38
4	Jumlah Kasus Syphilis	18	100	8	64	3
5	Kusta	11	7	15	8	4

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah Kasus Campak	124	-	3	1	-
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	744	1.197	1.093	941	424
8	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.822	5.481	4.877	4.622	6.005
9	AFP Rate (non polio) < 15 th	6	10	9	5	3
10	DBD	2.442	538	181	150	128
11	Malaria	-	3	-	7	3
12	Leptospirosis	74	94	93	92	79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	IR (‰)	JUMLAH MENINGGAL	CFR (%)
1	2016	2442	2,62	4	0,16
2	2017	538	0,55	2	0,37
3	2018	182	0,18	0	0
4	2019	1424	1,5	4	0,6
5	2020	1222	1,3	4	0,3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kesakitan DBD pada tahun 2020 sebesar 129 per 100.000 penduduk (1.222 kasus) menurun dibanding tahun 2019 yaitu 140 per 100.000 penduduk (1424 kasus). Pada tahun 2020 terdapat empat kematian penderita DBD, sama dibandingkan tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader padukuhan, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan

koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue; Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama lintas program dan lintas sektor; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

2) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.

Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul masih terkait dengan penemuan kasus yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan. Cakupan Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) yang diobati per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (*Success Rate*/SR) dapat dilihat pada grafik berikut.

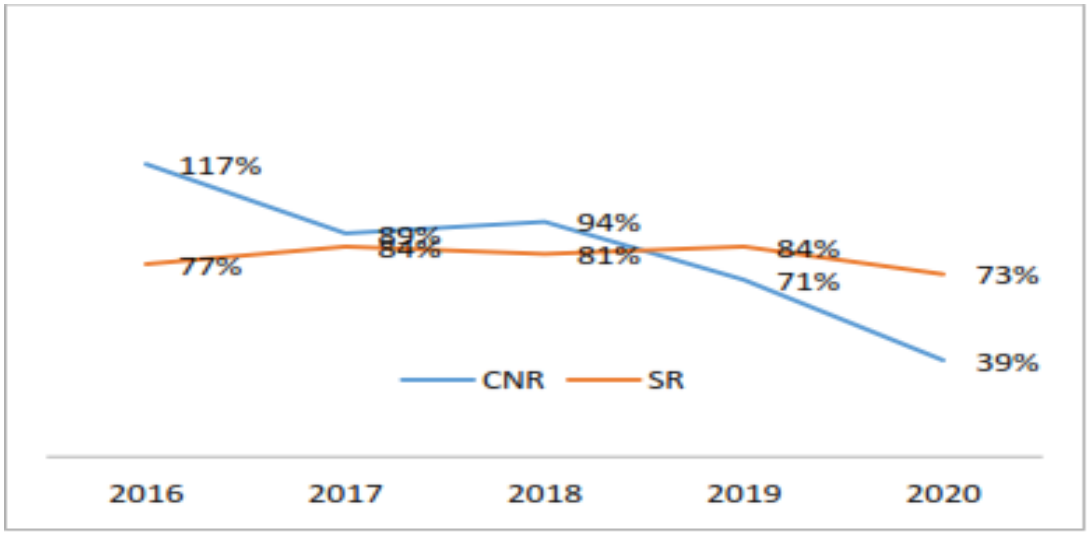

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020, pada tahun 2020 ini angka penemuan TBC mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kunjungan pasien kelayanan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi angka penemuan kasus TBC dilayanan. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TBC yang belum mencapai target hal ini disebabkan masih tingginya angka gagal, putus berobat dan meninggal.

Angka penemuan kasus TB *(case detection rate)* terlihat menurun, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*). Namun demikian, angka kesembuhan (cure rate) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR). Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pemutusan rantai penularan TBC.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan

kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

3) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 79 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 92 kasus. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2020 adalah 8,29 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,79 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah.

4) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan

fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut disajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2020.

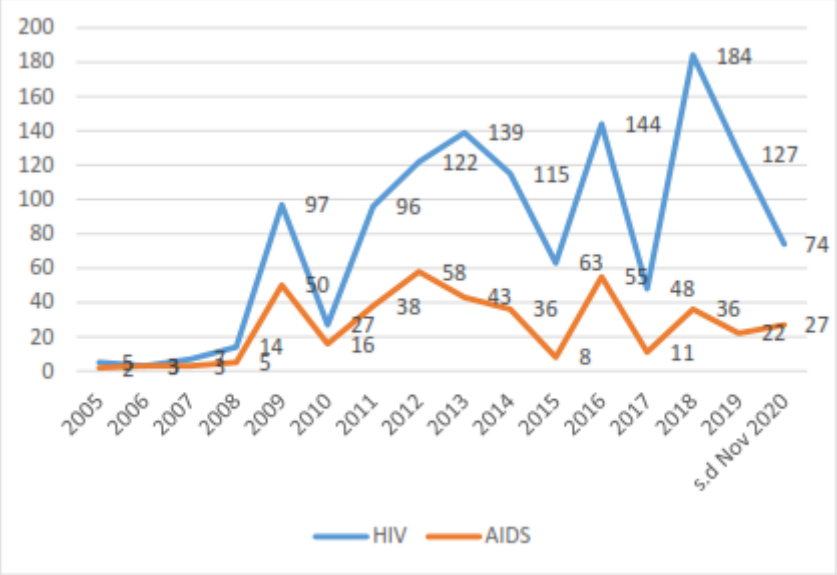

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2020 sebesar 0,01% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari 127 kasus menjadi 74 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2020 digambarkan dalam grafik berikut.

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit); Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Puskesmas; Klinik layanan IMS di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan VCT; Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi metadhone, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS); Klinik pelayanan VCT di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth,

RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan Care Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di 2 (dua) RS dan 1 (satu) Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjolukito dan Puskesmas Kretek; Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA); dan Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penyakit Tidak Menular					
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	254	74	19	44	6
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	17	4	31	45	2
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	26	14	9	12	81
4	Diabetes Melitus	20.969	50.242	33.013	43.696	18.516
5	Gangguan Jiwa	3.875	6.864	6.844	9.761	2.097
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	44.954	50.242	69.228	91.266	58.069
7	Obesitas	398	406	994	239	NA

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Diabetes Mellitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)

Tahun 2019 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular DM dan PJPD.

Pada tahun 2020 pelayanan pada DM sebanyak 18.516 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 43.696 kasus, sedangkan pelayanan pada PJPD sebanyak 58.069 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 91.266 kasus.

2) Deteksi Dini NAPZA

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes bekerjasama dengan BNNK Bantul dan RSPAU dr S. Harjolukito serta Paskas TNI AU dan Kodim 0729 Bantul.

3) Pengendalian kasus kesehatan jiwa

Pada tahun 2020 pelayanan pada ODGJ sebanyak 2.097 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 9.761 kasus.

e. Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus. pada tahun 2019 masih didominasi dengan kejadian Keracunan Makanan yaitu 9 (Sembilan) kasus diikuti adanya dugaan kasus Pertusis, gastroenteritis dan GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) masing-masing 1 (satu) kasus. Capaian Accute Flaccid Paralysis (AFP) sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap adanya virus Polio liar di masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus. Surveilans Campak mencatat sebanyak 199 suspek dengan hasil konfirmasi Campak positif 1 kasus dan Rubella positif sebanyak 14 kasus.

Pada tahun 2020 terdapat 3 jenis kejadian luar biasa yaitu: GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), keracunan makanan dan

wabah Covid-19 (merscov) yang masih menunjukkan peningkatan, data sampai dengan per 31 Juli 2021 terkonfirmasi sebanyak 42.374 positif terjangkit virus dengan 988 kasus kematian. Sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan per 31 Juli 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul (per 31 Juli 2021)

No.	Kapanewon	Dalam Perawatan	Meninggal	Sembuh	Jumlah Kasus Positif
1	Bambanglipuro	894	31	1.106	2.031
2	Banguntapan	2.229	121	3.734	6.084
3	Bantul	1.855	87	2.121	4.063
4	Dlingo	170	24	437	631
5	Imogiri	887	63	1.679	2.629
6	Jetis	830	83	2.455	3.368
7	Kasihan	1.014	65	2.275	3.354
8	Kretek	406	35	824	1.265
9	Pajangan	406	34	1.030	1.470
10	Pandak	777	43	1.455	2.275
11	Piyungan	574	24	634	1.232
12	Pleret	660	76	1.461	2.197
13	Pundong	468	27	689	1.184
14	Sanden	268	35	1.342	1.645
15	Sedayu	407	50	1.828	2.285
16	Sewon	1.389	136	3.663	5.188
17	Srandakan	341	54	1.078	1.473
	Jumlah	13.575	988	27.811	42.374

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

f. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Kesehatan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	96,77	72,8	108,3	99,49	157,6

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	7,65	8,74	8,28	8,33	6,93
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,40	0,41	0,41	0,41	0,31
Prevalensi Penderita HIV (Angka)	0,083	0,09	0,19	0,12	0,01
Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD) per 100.000 Penduduk	237,75	57,98	19,52	140	128
Net Death Rate per 1000 pasien	18,69	16,98	22,62	18,7	21,17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari data dapat kita lihat adanya peningkatan nilai Angka Kematian Ibu pada tahun 2020, kondisi ini disebabkan karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2017	624.47	463.23	74.18	161.24	25.82
2018	624.47	465.73	74.58	158.74	25.42
2019	624.47	468.97	75.10	156.64	24.90
2020	624.47	470.98	75.42	153.49	24.58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan dikabupaten bantul bisa dalam kondisi mantap.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah

Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik)			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

Dapat diketahui bahwa belum semua DI memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpoteni menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung.

Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
		Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
1	2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2	2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
3	2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
4	2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
5	2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

c. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran.

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021
Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

d. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakamanan umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu terdapat juga lahan pemakaman di Tegaldowo, Bantul. Lahan pemakaman disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagi warga perumahan maupun masyarakat umum namun pada masa pandemi dapat dimanfaatkan bagi jenazah yang meninggal akibat Covid 19. Sampai saat ini belum ada jenazah

Covid-19 yang dimakamkan di Tilaman, karena tidak ada pertentangan dari warga untuk memakamkan jenazah Covid 19 di pemakaman warga.

e. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Peraturan Bupati Bantul nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kapanewon : RDTR dan PZ Kapanewon Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu (2014) RDTR dan PZ Kapanewon Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan) (2015) RDTR dan PZ Kapanewon Pundong dan Jetis (2016) RDTR dan PZ Kapanewon Bambanglipuro, Dlingo,(2017) Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong (2017) RDTR dan PZ Kapanewon Sewon dan Kasihan (2018) RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaaan (2018) Draft RDTR Pansela, Perkotaan, dan Perdesaan (2020)
7.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) : RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018) RTBL Zona pengembangnan Kawasan Parangtritis II (2018) RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negoro Babadan, Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020)
8.	Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020)
9	Masterplan dan DED : Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) Masterplan Watu Amben (2019)

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul saat ini masih berupa kajian yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. Sampai saat ini dokumen RDTR yang telah disusun dalam Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan masuk dalam RDTR Perkotaan. RDTR Pansela ditargetkan selesai akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, dan RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2022. RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur ditargetkan selesai tahun 2023. Proses penyusunan RDTR yang membutuhkan waktu cukup lama ini, disebabkan antara lain oleh tata cara dan tata kala proses penyusunan dan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan unsur eksternal lintas sektor dan instansi, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, maupun Kementerian/Lembaga pemerintah pusat.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018 peninjauan kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan perbaikan revisi RTRW agar sesuai dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kegiatan konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahapan persetujuan substansi RTRW ke Kementerian ATR, masih diperlukan persyaratan yang harus dilengkapi pada tahun 2020 antara lain:

1) Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi dengan DPRD;
2) Rekomendasi Gubernur terhadap rancangan RTRW;

3) SK Bupati tentang rekomendasi hasil PK RTRW (sedang dilaksanakan);
4) Tabel sandingan RTRW eksisting dengan rancangan perubahan RTRW;
5) Surat pernyataan Bupati bahwa bertanggungjawab terhadap kualitas raperda RTRW;
6) Konsultasi publik minimal dua kali;
7) Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;
8) Berita acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal peta dasar RTRW;
9) KLHS RTRW yang sudah divalidasi; dan
10) Surat permohonan persetujuan substansi Materi teknis dan album peta RTRW;

KLHS RTRW telah divalidasi oleh DIY, proses Peninjauan Kembali RTRW, saat ini tengah berproses penyampaian materi untuk evaluasi gubernur dan akan dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan DPRD. Setelah itu akan berproses di Kementerian ATR/BPN. Tatakala optimis diperkirakan akhir tahun dapat disampaikan Kementrian ATR, namun tatakala pesimis diperkirakan akan selesai pada triwulan pertama 2022. Target Kabupaten Bantul adalah RTRW selesai di tahun 2021.

f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta

mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1009,82	33,15	228,01	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20.14	109,02	275,64
	Jumlah Lindung (Ha)	**5.291,07**	**53,29**	**1.470,58**	**6.814,92**
	% terhadap Kawasan Lindung	**77,64**	**0,78**	**21,58**	**100,00**
	% terhadap Kabupaten Bantul	**9,73**	**0,37**	**3,52**	**13,62**
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	10.110,43	752,34	73,23	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.005,58	5.182,31	7,87	12.195,75
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
	Kawasan Peruntukan Industri	1.776,79	-	686,96	2.463,75
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	-	-	982,96
	Jumlah Budidaya (Ha)	**32.230,19**	**6.974,74**	**4.004,54**	**43.209,47**
	% terhadap Kawasan Budidaya	**74,59**	**16,14**	**9,27**	**100**
	% terhadap Kabupaten Bantul	**64,43**	**13,94**	**8,01**	**86,38**
TOTAL (Ha)		**37.521,26**	**7.028,03**	**5.475,12**	**50.024,41**
% terhadap Kabupaten Bantul		**75,01**	**14,05**	**10,94**	**100**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2020 dengan kriteria ‘sesuai’ sebesar 75,01%; ‘belum sesuai’ sebesar 14,05%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 10,94%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan

ruang kurang berkualitas (<80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

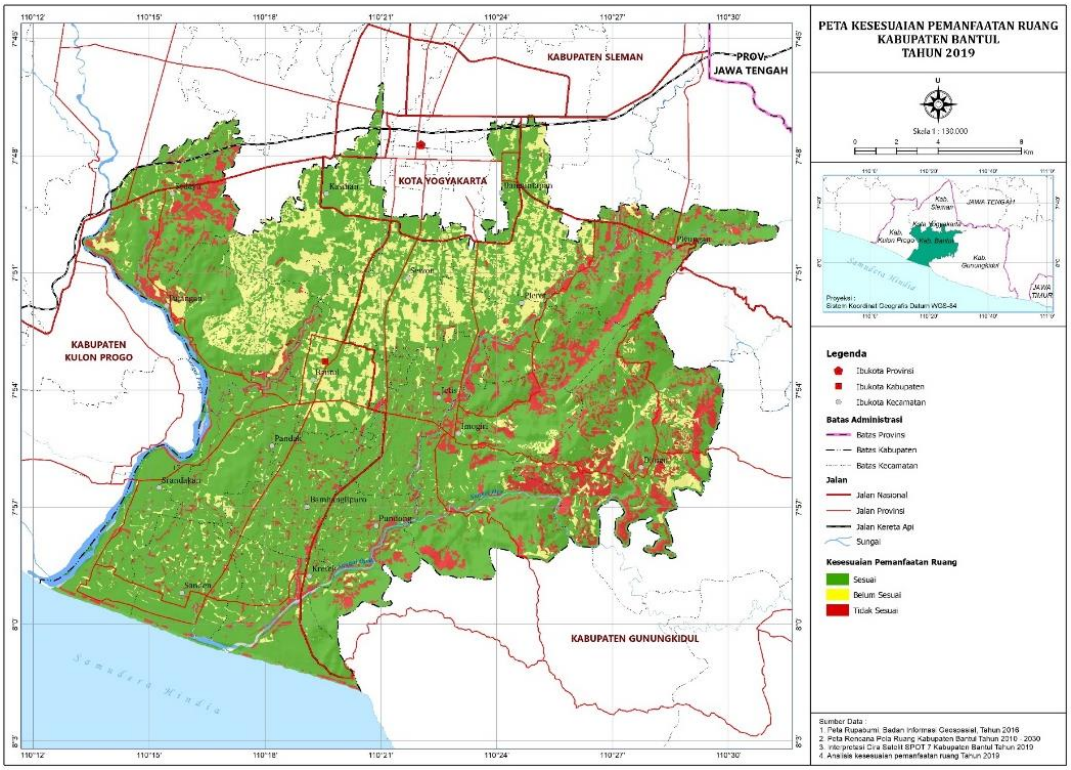

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019

g. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis RTH, yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan.

Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
1	BANGUNAN	Perumahan	132,61
		Perkantoran (pemerintah dan swasta)	26,05
		Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	113,42
		Sub total	**272,08**
2	LINGKUNGAN	Lapangan	32,03
		Pemakaman	81,93
		Taman Kelurahan	230,63
		Taman Kapanewon	9,58
		Taman Kota	1,51
		Wanadesa	5,51
		Sub total	**361,2**
3	PERKOTAAN	Sempadan Jalan	630,43
		Taman/jalur hijau	3,86
		Sub total	**634,3**
4	FUNGSI TERTENTU	Sempadan SUTT	107,09
		Sempadan Rel	1,12
		Sempadan Sungai	254,88
		Sempadan Irigasi	88,92
		Sempadan Danau/Telaga Desa	3,63
		Pariwisata	15,19
		Sempadan Pipa Pertamina	14,03
		Cagar Budaya	11,87
		Gardu Induk PLN	3,1
		Hankam	23,86
		IPAL	7,39
		TPST	0,17
		Sub total	**531,25**
Total Luas RTH			**1.798,83**
Luas Wilayah			**19.873,00**
Luas Kawasan Perkotaan			**12.544,00**
% Luas Kawasan PerkotaaN			**63,12**
RTH Kawasan Perkotaan (%)			**14,34**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021 , diolah

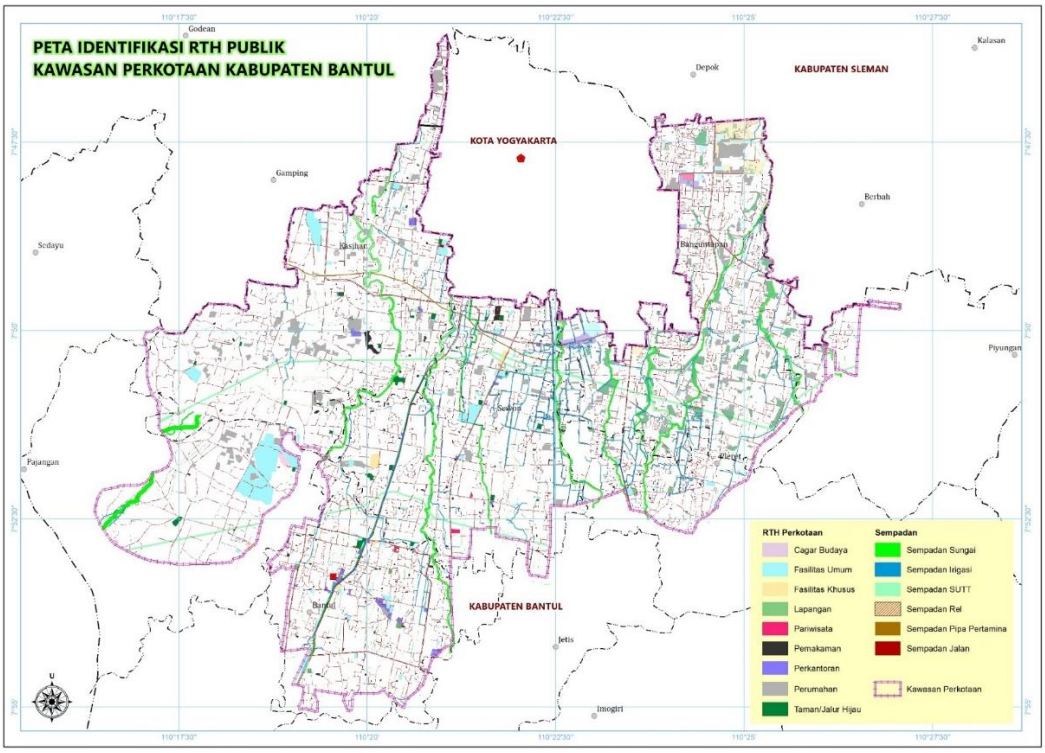

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020

Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019

h. Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan,

sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT : kapasitas	m3/hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/ 12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2020 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu :

(1) Risiko Sangat Tinggi (skala 4) , yang meliputi Kalurahan Srihardono, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Temuwuh,

Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Sendangsari

(2) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan, Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Karang Talun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Wonolelo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Guwosari, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argomulyo.

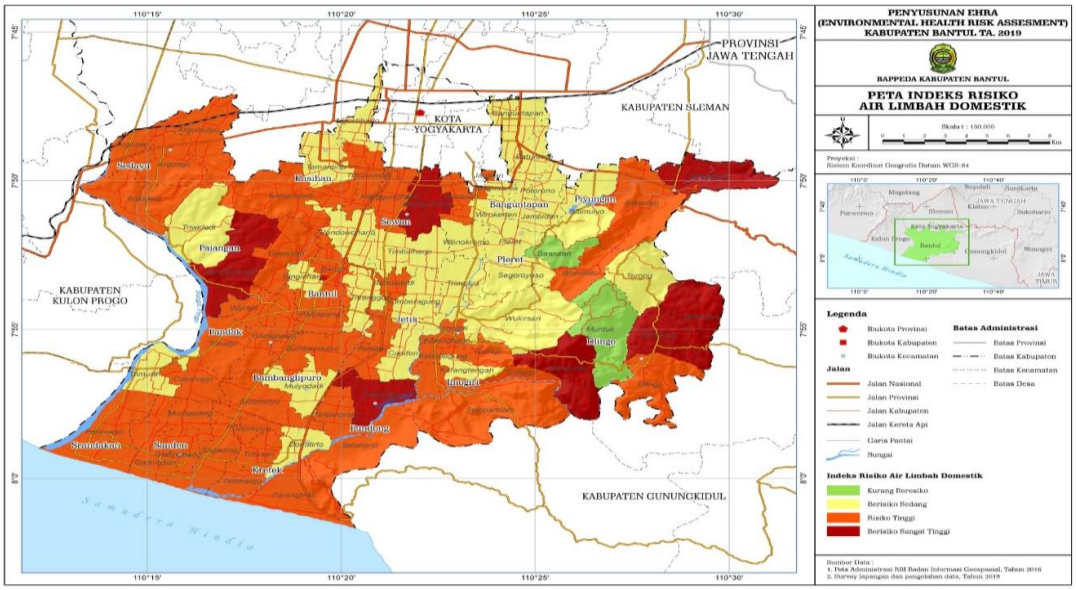

Sumber: Studi EHRA, Bappeda, 2019

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	82,79	74,18	74,58	75,10	75.42
Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	80	80	84	84	84
Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	80,44	82,19	80,01
Persentase Penanganan Banjir (%)	20,30	24,90	28,84	34	41,31
Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	-	2	2	2	2
Persentase Cakupan Pengendalian Tata (%)	-	71	70,35	72,5	75,01

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2019 mencapai 96,81% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kab. Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu

upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM sebanyak 33.886 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

b. Lingkungan Permukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggungharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Padukuhan Jaranan Banguntapan sehingga total peanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%. Terdapat kekurangan penanganan di Padukuhan Deresan Kalurahan Ringinharjo, Padukuhan Mandingan Kalurahan Ringinharjo dan Padukuhan Kweden Kalurahan Trirenggo.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan dengan lokasi Kawasan kumuh. Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26Ha.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber Anggaran RTLH	2016	2017	2018	2019	2020
BSPS (Unit)	652	365	959	1365	1577
DAK (Unit)	-	-	150	176	139
APBD I (Unit)	-	582	517	443	-
APBD II (Unit)	-	-	171	83	-
Total	**652**	**947**	**1794**	**2067**	**1716**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020.

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% namun menurun di tahun 2020. Sampai tahun 2020 ini realisasi kurang lebih hampir di angka 59%. Akan tetapi berjalannya waktu, karena pandemi, masuk dalam anggaran refocusing. Pada APBD II di refocusing untuk penanganan Covid-19. Dan pada APBD I tidak dianggarkan.

d. Fasilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Padukuhan Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Padukuhan Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian pelayanan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum) di Kabupaten Bantul telah mencapai target, namun demikian Kabupaten Bantul masih memiliki masalah terkait urusan trantibum pada penegakan perda yang baru mencapai 70%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Sementara itu dari aspek kebencanaan belum semua Desa Tangguh Bencana yang dibentuk yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Desa Tanggap Bencana.

2.3.1.5.1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi dan pencegahan miras dan Napza.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda melalui 406 kali operasi yustisi dan non yustisi. Program ini juga didukung dengan kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian serta Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Berijin	9	21	30	17	77
2	Proses Hukum	8	12	25	31	76
3	Pembinaan	53	49	45	47	193
4	Panggilan PPNS	3	-	-	22	25
5	Bukti Pelanggaran Perda	8	-	-	-	8
6	Membuat Surat Pernyataan	-	-	1	3	4
7	Pembongkaran Pribadi	1	3	-	-	4
8	Tidak Memenuhi Panggilan	4	1	-	-	5
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	-	14	-	-	14
	Jumlah	86	99	101	120	406

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing, sementara pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi semua ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan, pemanggilan, serta untuk kasus tertentu dilakukan penyidangan.

Dari keseluruhan jumlah pengaduan masyarakat semuanya telah ditindaklanjuti sesuai kasus masing-masing. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tercapai 100%.

c. Rasio Jumlah Linmas

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum diketahui belum baik. Hal tersebut ditandai dengan belum semua padukuhan memiliki jaga warga.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT pada

tahun 2020, tercapai 95,3 %, yaitu jumlah Linmas 5.501 dan jumlah RT 5.775.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penegakan PERDA (%)	57	77,7	95,3	66	70
Persentase Penyelesaian K3	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021.

2.3.1.5.2. Sub-Urusan Bencana Daerah

a. Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Capaian nilai risiko bencana tahun 2020 adalah 187,200 atau masuk dalam kategori tinggi. Tingginya indeks risiko ini disebabkan masih tingginya ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul dan masih tingginya tingkat kerentanan

yang disebabkan pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, dan belum optimalnya integrasi tata ruang dengan mitigasi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 23 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) atau sebesar 4,51%, dibawah target yang ditetapkan yaitu 4,7%.

Capaian persentase Desa Tangguh Bencana yang terbentuk adalah 46,67% (35 Kalurahan) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 38,66 % (28 Kalurahan). Pada tahun 2019 dilaksanakan pembentukan 4 Desa Tangguh Bencana yaitu Kalurahan Terong, Temuwuh, Dlingo, dan Guwosari. Pada tahun 2020 pembentukan maupun pengembangan Desa Tangguh Bencana tidak bisa dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan corona virus 19.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

No	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	58	111	208	227	130
2	Banjir	7	4	0	8	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0
4	Gempa *	11	27	7	6	13
5	Tanah Longsor	77	319	23	176	85
6	Kekeringan	0	0	0	0	0
7	Abrasi danGelombang Pasang	0	1	2	0	1
8	Cuaca Ekstrim : Angin Kencang	39	3	22	16	22
	Pohon Tumbang	52	63	80	105	115

No	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Epidemi penyakit	0	0	0	0	1

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021
Keterangan : * dirasakan di Bantul

Sepanjang tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2017 dan tahun 2019 berupa siklon tropis cempaka, siklon tropis Dahlia dan siklon tropis savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

Tahun	Bencana non Pandemi Covid-19			Covid 19 (Pandemi)	
	Estimasi kerusakan	Jumlah Korban			
		Luka	MD	Confirm	MD
2016	Rp 5.486.054.889,00	5	1		
2017	Rp 298.836.444.366,00	5	3		
2018	Rp 2.667.930.000,00	7	4		
2019	Rp 95.675.921.376,00	7	7		
2020	Rp 14.576.944.000,00	4	2	3163	90

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan alat *Early Warning System*. EWS yang ada di Kabupaten Bantul adalah EWS Tsunami.

Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul

No	Lokasi
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek

No	Lokasi
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Bencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Relokasi Warga	9,09	27,28	36,36	89,09	132
Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,69	3,19	3,97	4,12	4,51

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

c. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Awal wabah ini terjadi di China berdasarakan laporan WHO *China Country Office* yang melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Selanjutnya, *World Health Organization*

(WHO) telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari penyebaran *corona virus-disease (Covid-19)* sebagai isu pandemik dunia, maka perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, kemudian ditetapkan status tanggap darurat Covid-19 dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 tahun 2020 pada 20 Maret 2020

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Juli 2021 belum menunjukkan kecenderungan menurun, namun yang terjadi sebaliknya.

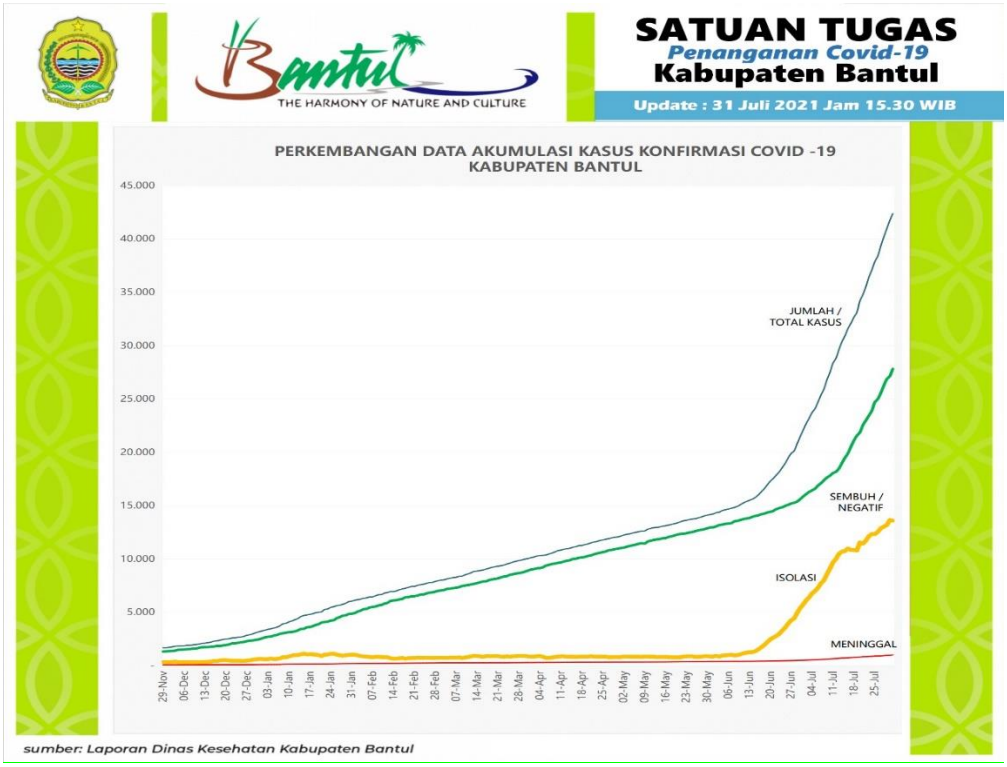

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

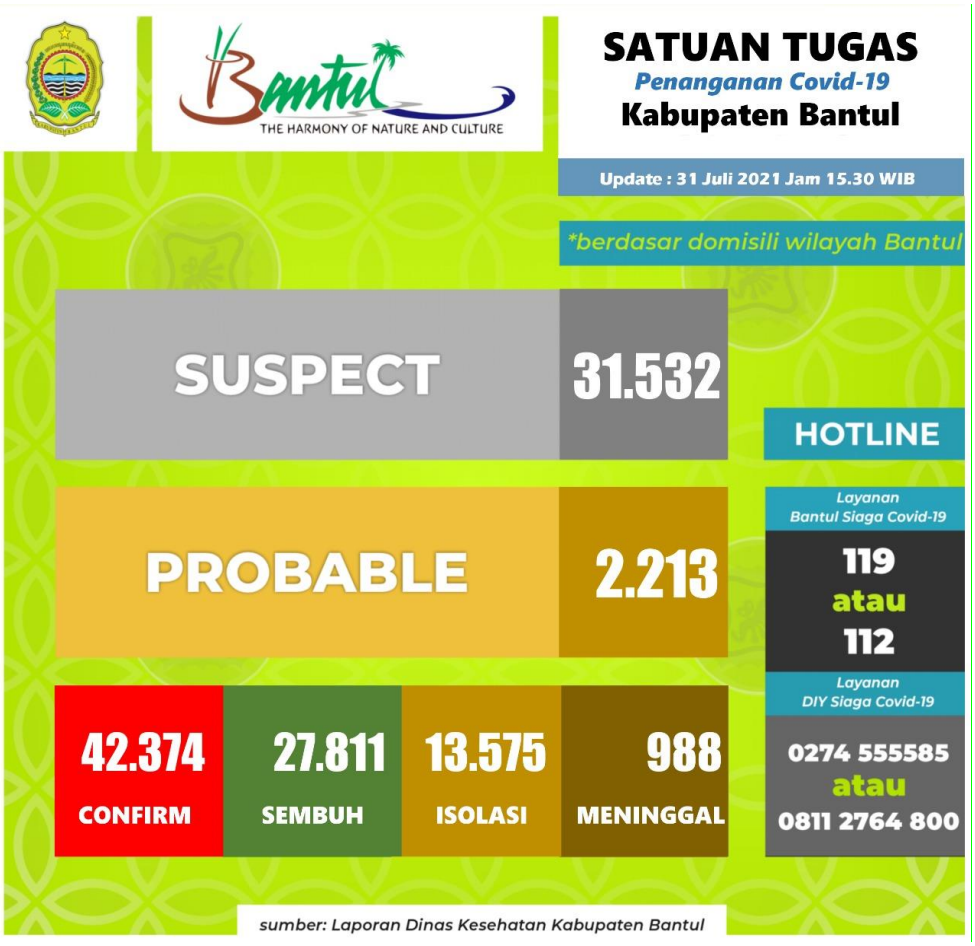

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (sampai dengan per 31 Juli 2021) menyatakan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 42.374 kasus, 27.811 pasien dinyatakan sembuh dan 988 meninggal dunia. Selanjutnya jumlah pasien dalam isolasi sebanyak 13.575 orang.

Upaya penanganan pasien Covid-19 dengan penyediaan Rumah Sakit Rujukan, RSLKC dan Shelter, sebagai berikut:

- RS rujukan COVID ada16 RS dengan rincian kamar : R. Isolasi: 187 ruang, R. ICU tanpa tek. negative: 5 ruang, R. ICU dengan tek. negative: 9 ruang, R. NICU: 5 ruang
- Shelter Kabupaten: Semaul: 15 kamar, Niten: 88 kamar dan Patmasuri: 60 kamar

Upaya Disinfeksi Ruang dan Lingkungan, sebagai berikut:

- 47 kali disinfeksi Fasilitas Umum
- 161 kali disinfeksi Rumah dan Lingkungan warga Terkonfirmasi Positif Covid-19
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul – TNI – POLRI – PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul – FPRB Kalurahan – Relawan
- Pelatihan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Upaya penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19:

- 50 kali penanganan
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul - PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul
- Pelatihan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Selain upaya di atas, ada beberapa upaya lain yang telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik
2. Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan, petugas yang melayani masyarakat.
3. Skrining swab / RT-PCR secara langsung pada karyawan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan, serta swab massal pada populasi berisiko (pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positip) yang dijaring melalui aplikasi
4. Penguatan Laboratorium untuk COVID : yaitu E. Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR

5. Penegakaan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegkan hukum
6. Sosialisasi protokol kesehatan kepada instusi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren
7. Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan namun juga berpengaruh pada sektor lainnya. Secara umum sangat dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah. Adanya beberapa kebijakan untuk mencegah penularan wabah virus corona, antara lain penerapan *social distancing* dan pengaturan jadwal kerja dari rumah (*work from home*), mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pegawai di perusahaan/pabrik, UMKM dan pedagang kaki lima tidak bisa berjualan dengan normal, jasa ojek *online* tidak bisa beroperasi seperti biasa sebab orderan yang menurun. Kondisi ini menyebabkan perekonomian melemah.

Dampak pandemi covid-19 terkadap makro ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2020 menurut BPS adalah pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -1,66, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar -2,76, persentase penduduk miskin sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,06

Pengaruh ekonomi di Kabupaten Bantul ditunjukan dengan adanya trend menurun pada sektor:belanja, industry, pariwisata dan keuangan.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap perusahaan di Kabupaten Bantul, sebanyak 42% perusahaan mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 26-50% perusahaan mengalami penurunan pendapatan 32 %, 25 % perusahaan mengalami penurunan pendapatan 22%. dan sebanyak 43 % mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UKM di Kabupaten Bantul, sebanyak 43 % UKM mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 32 %UKM mengalami penurunan pendapatan antara 26-50%, 21% UKM mengalami penurunan pendapatan hingga 25 % dan UKM yang pendapatannya naik sebesar 4%.

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	106.419	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD	17.886	APBDES

Sumber : Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Kalurahan (Muskal). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilakasanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa/Kalurahan

2.3.1.5.3. Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat *(Response Time)* penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	39	93	175	203	114
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	39	93	175	193	114
3	Jumlah total terjadi kebakaran	48	111	208	227	130
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	9	18	34	34	16
5	Tingkat waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pada tahun 2020 luas WMK adalah 176,62 Ha, di tahun 2019 adalah 353,35 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter yang dimiliki pada Tahun 2020 sebanyak 8 unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, pada Tahun 2020 sudah terdapat 7 pos pemadam yaitu pos induk BPBD, pos di Kapanewon Kasihan, Banguntapan dan Imogiri, Piyungan, Pundong dan Sedayu.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja utama Kebakaran Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit (%)	94	97	100	100	100

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja BPBD, Bappeda 2021

2.3.1.6. Sosial

a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)

Sarana sosial yang dimiliki Kabupaten Bantul adalah panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	27
2	2017	26
3	2018	26
4	2019	43
5	2020	52

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

Jenis PMKS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Balita Terlantar	n/a	110	74	65	34
Anak Terlantar	n/a	2094	1862	1731	1475
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	n/a	63	87	124	121
Anak Jalanan	n/a	56	14	12	5
Korban Tindak Kekerasan	n/a	163	210	229	231
Lanjut Usia Terlantar	n/a	9278	8971	8085	7684
Penyandang Cacat	n/a	5900	6324	6137	6535
Tuna Susila	n/a	83	71	46	24

Jenis PMKS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengemis	n/a	25	25	22	25
Gelandangan	n/a	29	38	35	12
Korban Penyalahgunaan Napza	n/a	101	100	97	21
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	n/a	54	69	57	30
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	n/a	2771	3068	2991	2865
Orang dengan HIV/AIDS	n/a	n/a	184	127	103
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	n/a	1185	1329	1319	1228
Keluarga Fakir Miskin	n/a	57.210	57.022	52.509	50.609
Korban Trafficking	n/a	1	2	1	0
Korban Bencana Sosial	n/a	n/a	0	0	0
Korban Bencana Alam	n/a	n/a	61	21	405
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	n/a	107	155	151	47
Anak dengan Kedisabilitasan	n/a	625	446	450	353
Anak dengan Korban Tindak Kekerasan	n/a	54	81	115	114
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	n/a	54	81	115	114
Pemulung	n/a	153	156	154	66
Korban Minoritas	n/a	0	0	0	0
Jumlah	n/a	80116	80430	74593	72101

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

Data tabel menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PMKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PMKS karena tidak adanya jenis PMKS Komunitas Adat Terpencil.

Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain :

a. meningkatkan mentalitas anak yatim,
b. meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial,
c. penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar,
d. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak,
e. mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY,
f. pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti,
g. perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, dan
h. sosialisasi peduli PMKS

Selain itu dilakukan razia anak gelandangan dan pengemis dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut.

Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Jalanan	12 orang
2	Gelandangan/Pengemis	57 orang
3	Psikotik	- orang
Total		**69 orang**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

c. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang ada membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan

rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat Kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2018 perkembangan SLRT masih berupa embrio dengan *pilot project* dua puskesos, 21 puskesos penumbuhan, 75 fasilitator dan 34 supervisor. Tahun 2019 untuk mendukung pengembangan SLRT dan Puskesos telah disusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, selain itu 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul sudah memiliki SK kelembagaan Puskesos. Tahun 2020 Puskesos mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan berinovasi serta berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19 antara lain Ambulance standby, CSR puskesos, Kerjasama baznas, lazizmu, dan lain lain, Layanan antar SEP, Gojek puskesos, Registrasi KIS, KIP. Puskesos juga menjadi mitra penting Kalurahan dalam menanggulangi Covid-19.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang sosial Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan NAPZA	4	5	NA	NA	NA
Persentase PMKS	13,5	13,25	7,29	7,29	7,29

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

a. Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	67,84
2	2017	72,21
3	2018	73,87
4	2019	73,18
5	2020	74,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2016-2020 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.107	2.650	3.230	3.329	3.305
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	2.797	4.188	3.772	3.828	4.816
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75,3%	63,27%	85,63%	86,96%	86,62%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 86,62% atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 86,96%.

c. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	25.325	23.753	26.664	28.666	26.664
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	40.484	42.842	48.908	49.036	44.263
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	62,00%	55,44%	54,73%	58,61%	60,24%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 mencapai 60,24%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial
yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Besaran sengketa yang terselesaikan	97%	97%	95%	94%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Kasus yang terselesaikan tahun 2020 mencapai 100% dari jumlah kasus yang ada, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Tenaga Kerja Bantul tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka pengangguran(%)	3,12	3,12	3,12	3,06	4,06
Upah Minimum Kabupaten(Rp.)	1.297.700	1.404.760	1.404.760	1.649.800	1.842.460

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

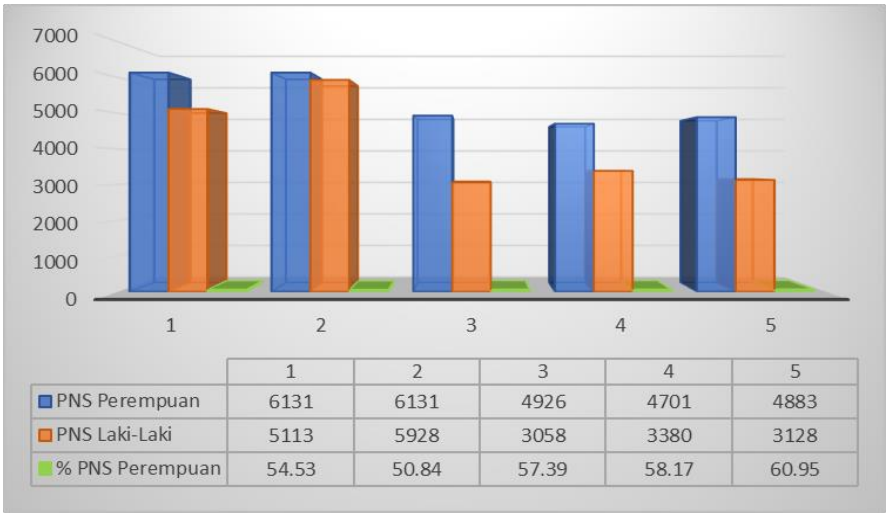

	1	2	3	4	5
PNS Perempuan	6131	6131	4926	4701	4883
PNS Laki-Laki	5113	5928	3058	3380	3128
% PNS Perempuan	54.53	50.84	57.39	58.17	60.95

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Berdasar data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diketahui tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	4	4	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	37	43	46	37
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	223	223	231	250	277
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	273	263	278	300	317
5	Jumlah PNS perempuan	6.131	5.928	4.701	4883	3592
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	4.45	4.44	5,91	6,14	8,83

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Tabel di atas menunjukkan dari jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019, sejumlah 300 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV.

b. Partisipasi Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Aktivis P2WKSS	300	300	300	360
2	Pengurus harian Parpol	75	76	76	120
3	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	101	101	101	101
4	Lembaga Legislatif Daerah	3	3	3	4
5	Pekerja Sektor Informal	128.958	206.055	206.055	131.110

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psycological violence*),

pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking)*, dan penelantaran (*neglect*).

Kasus KDRT dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase Kasus Tertangani
1	2017	186 Kasus	100%
2	2018	210 Kasus	100%
3	2019	229 Kasus	100%
4	2020	224 Kasus	100%

Sumber : UPT PPA, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak 2021

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

d. Pernikahan Dini

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Rumah tangga pasangan pernikahan dini dapat mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan berlanjut pada generasi yang akan datang. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jumlah pernikahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia dini	95	83	81	74	56
2	Semua usia	11.528	12.359	12.604	12.927	6.232
	Persentase pernikahan dini	0,82	0,67	0,64	0,57	0,90

Sumber: Kementrian Agama Bantul, 2021

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partispasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	**Tahun**	**Angkatan Kerja**		**Total**	**Prosentase Angkatan Kerja Perempuan**
		Laki-laki	**Perempuan**		
1	2016	Na*	Na*	Na*	Na*
2	2017	313.139	25.839	558.978	46,22%
3	2018	323.287	254.243	577.530	44,02%
4	2019	319.784	259.445	579.229	44,79%
5	2020	339.974	269.969	609.943	44,26%

Sumber: Sakernas, BPS, 2021
Keterangan : *tidak terdapat data dikarenakan tidak diakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

Jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari tingkat persentasenya maka dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari 46,22% di tahun 2017 menjadi 44,02%, 44,79% dan terakhir 44,26% di tahun 2020.

f. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

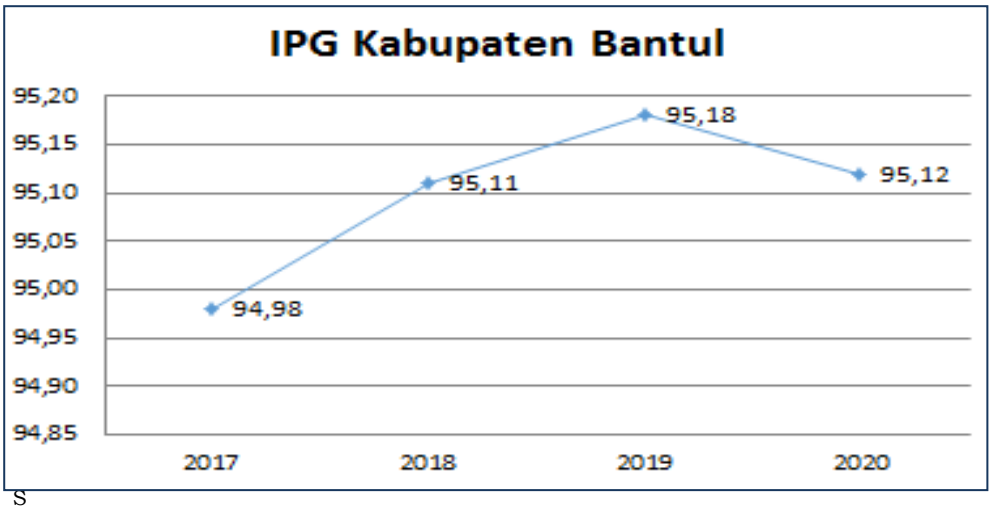

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada kurun waktu 2017-2019 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,06 dibandingkan tahun sebelumnya.

g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

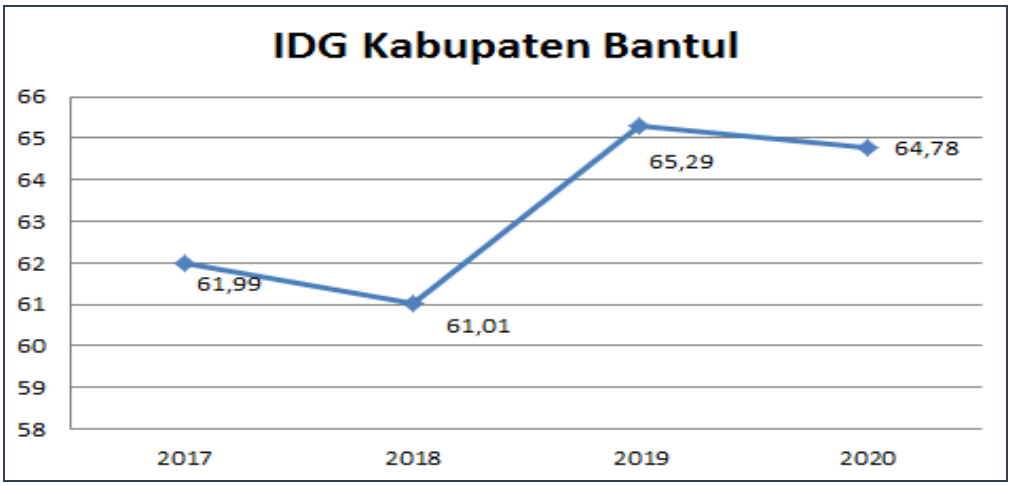

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,01 menjadi 65,29, sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,51 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

h. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Ada lima kategori dalam KLA yaitu:

1. Pratama (500-600)
2. Madya (600-700)
3. Nindya (700-800)

4. Utama (800-900)
5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (>900).

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul masih termasuk dalam kategori 'Pratama', dan tahun 2018-2020 masuk dalam kategori 'Madya'.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA, Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA. Selain adanya dukungan regulasi, di kabupaten Bantul juga sudah terbentuk 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana), dan 11 Forum Anak tingkat kecamatan/kapanewon.

i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	0,73	0,73	0,18

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021.

2.3.1.2.3. Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan

keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr.

Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)		
				Nabati	Hewani	Total
1	2016	3.072	142.88	54,61	23,20	77,80
2	2017	3.079	143.21	56,93	18,80	75,73
3	2018	2.993	139.21	66,73	11,63	78,36
4	2019	3.123	130.13	75,10	14,86	89,95
5	2020	3.092	100	71,28	11,62	82,90

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ketersediaan energi dan protein di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 ketersediaan energi mencapai 3.092 kal/kap/hr, atau 28,83% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Ketersediaan protein mencapai 82,90 gr/kap/hr atau 45,43% di atas rata-rata kecukupan protein penduduk Indonesia.

b. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan

kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan dan mengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan UU no. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana pemerintah bertanggungjawab dalam peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraan cadangan pangan.

Pada tahun 2017 cadangan pangan Kabupaten Bantul sebesar 3 ton lebih besar dibanding tahun 2016 (267 kg). Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,036 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 20 lumbung pangan dan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak. Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan 2020 adalah 5,036 ton beras.

Mulai tahun 2018 dilaksanakan analisis cadangan pangan rumah tangga, dengan tujuan untuk mengetahui situasi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tahun 2018 dilaksanakan di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan

rumah tangga di Kapanewon Bambanglipuro: 12,20%, Bantul: 17,29%, Kasihan: 6,32%, Imogiri: 5,08%, Srandakan: 9,34%, dan Pleret: 5,44%. Rata-rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kapanewon tersebut 9,28%.

Tahun 2019 lanjutkan analisis cadangan pangan rumah tangga di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kapanewon Pajangan: 8,12%, Kapanewon Piyungan: 12,04%, Kapanewon Kretek: 11,46%, Kapanewon Pundong: 11,07%, Kapanewon Dlingo: 4,82% dan Kapanewon Banguntapan: 2,93%. Rata - rata cadangan pangan rumah tangga di 6 Kapanewon tersebut adalah 8,41%.

Pada tahun 2020 cadangan pangan pemerintah masih tetap yaiti 5,036 ton masih jauh dari target yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu 283 ton.

c. Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola PanganHarapan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,0	21,7	25.0	25.0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,7	1.4	1.3	2,0
3	Pangan hewani	24,0	24	24.0	24.0	22,4
4	Minyak dan lemak	2,8	3,1	1.5	1.8	1,2
5	Buah/biji berlemak	0,7	0,9	0.6	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10.0	10.0	10,0

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola PanganHarapan				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Gula	1,1	1,4	0.4	0.6	0,3
8	Sayur dan buah	27,5	28,0	28.8	30.0	30,0
9	Lain-lain	0	0,0	0.0	0.0	0.0
	Total	92,6	90,8	91,7	93,7	91.4

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Tahun 2020 Skor PPH menurun menjadi 91,4 dibandingkan tahun 2019. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama. Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.50.

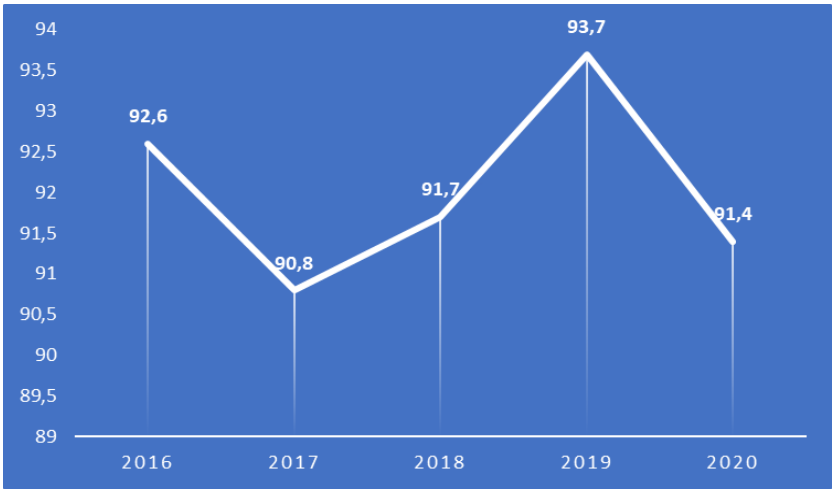

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2021

Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada 2017, namun meningkat di tahun 2018 dan 2019 kemudian menurun kembali pada 2020.

d. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sbagai berikut :

1. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

   Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu:

   1) Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan;
   2) Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera;
   3) Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

   Berdasarkan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

   1) Tidak ada Kalurahan yang masuk kategori rawan pangan (Merah);
   2) Hanya ada 1 Kalurahan yang masuk kategori Waspada Pangan (Kuning) yaitu Kalurahan Wonolelo.

2. Analisis *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA)/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

   Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

   a) Aspek Ketersediaan Pangan
      1) Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan;
      2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.
   b) Aspek Akses terhadap Pangan
      1) Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan;
      2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan;
2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2020 terdapat 18 Desa Rentan Pangan, sebagai berikut :

1) Desa Rentan Pangan Prioritas 1, ada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi.
2) Desa Rentan Pangan Prioritas 2, ada 1 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Dlingo
3) Desa Rentan Pangan Prioritas 3, ada 12 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari dan Argodadi.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.079	2.993	3.121	3.123	3.092
Ketersediaan Protein (kkal/kapita/hari)	75	78,36	87,23	89,95	82.90
Skor Pola Pangan Harapan	92,60	90,80	91,7	93,7	91,4
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	27	29	69	16	19

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

.

2.3.1.2.4. Pertanahan

a. Luas Lahan Bersertifikat

Pada tahun 2020 dilakukan pensertifikatan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m^2)	Bidang	Luas (m^2)
A	Kabupaten Bantul	634.314	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar*				
	- Hak milik (HM)	637.682	353.647.046	96,099	69,773
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	19.889	7.204.828	3,997	1,421
	- Hak Pakai (HP)	3.461	9.394.135	0,54	1,85
	- Wakaf	1.932	580.979	0,291	0,115
	- Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806.761	0,006	0,159
	Jumlah	663.567	373.572.020		73.704
C	Tanah belum terdaftar		133.277.980		26,29

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Bantul, 2021
Keterangan : *Sudah bersertifikat

b. Konflik Pertanahan

Konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga terjadi di 34 Kalurahan selama tahun 2017 – 2020, sebagai berikut :

Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
1	Kalurahan Selopamioro	2	Tukar guling tanah	2017
2	Kalurahan Argorejo	1	Tukar guling tanah	2017
3	Kalurahan Poncosari	1	Tukar guling tanah	2017
4	Kalurahan Sriharjo	1	Tukar guling tanah	2017
5	Kalurahan Sendangsari	1	Warisan	2017
6	Kalurahan Bangunjiwo	1	Tukar guling tanah	2018
7	Kalurahan Selopamioro	1	Tukar guling tanah	2018
8	Kalurahan Sitimulyo	1	Tukar guling tanah	2019
9	Kalurahan Bangunharjo	1	Tukar guling tanah	2019
10	Kalurahan Triwidadi	1	Tukar guling tanah	2019
11	Kalurahan Argomulyo	1	Tukar guling tanah	2019
12	Kalurahan Tamantirto	1	Tukar guling tanah	2019
13	Kalurahan Srimulyo	1	Tukar guling tanah	2019
14	Kalurahan Bantul	1	Tukar guling tanah	2019
15	Kalurahan Sumberagung	1	Tukar guling tanah	2019
16	Kalurahan Sriharjo	5	Tukar guling tanah	2019
17	Kalurahan Tirtonirmolo	1	Tukar guling tanah	2019
18	Kalurahan Murtigading	1	Tukar guling tanah	2020
19	Kalurahan Sumberagung	1	Tukar guling tanah	2020

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
20	Kalurahan Canden	1	Tukar guling tanah	2020
21	Kalurahan Tirtohargo	2	Tukar guling tanah	2020
22	Kalurahan Poncosari	1	Tukar guling tanah	2020
23	Kalurahan Terong	1	Tukar guling tanah	2020
24	Kalurahan Pleret	1	Tukar guling tanah	2020
25	Kalurahan Mangunan	1	Tukar guling tanah	2020
26	Kalurahan Srigading	1	Tukar guling tanah	2020
27	Kalurahan Tamantirto	1	Tukar guling tanah	2020
28	Kalurahan Patalan	1	Tukar guling tanah	2020
29	Kalurahan Segoroyoso	1	Tukar guling tanah	2020
30	Kalurahan Tirtonirmolo	1	Tukar guling tanah	2020
31	Kalurahan Argomulyo	1	Tukar guling tanah	2020
32	Kalurahan Temuwuh	1	Tukar guling tanah	2020
33	Kalurahan Bawuran	1	Tukar guling tanah	2020
34	Kalurahan Timbulharjo	1	Penyalahgunaan tanah SG	2020

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Tabel di atas menunjukkan antara tahun 2017-2020 terdapat konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga di 34 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dan sebagian besar mengenai tukar guling tanah. Penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan adalah melalui fasilisasi dan mediasai pihak-pihak yang bermasalah khususnya untuk tanah desa dan SG. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut sertifikasi di BPN.

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar. Untuk tahun 2020 jumlah permohonan izin lokasi sebanyak 10 izin dengan jumlah izin lokasi yang diberikan sebanyak 8 izin lokasi.

Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	Persentase (%)
2016	6	5	83,33
2017	2	2	100,00
2018	6	4	66,66
2019	5	5	100,00
2020	10	8	80,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Sertifikasi Tanah	NA	100	93,16	99,37	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021.
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

	Indeks Kualitas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	24	34,67	39,63	51,80
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,76	90,9	85,66	90,9	85,18
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		47,53	45,50	53,36	60,40	63,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL di atas memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,2 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2019 sebesar 60,4. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH tidak semakin buruk.

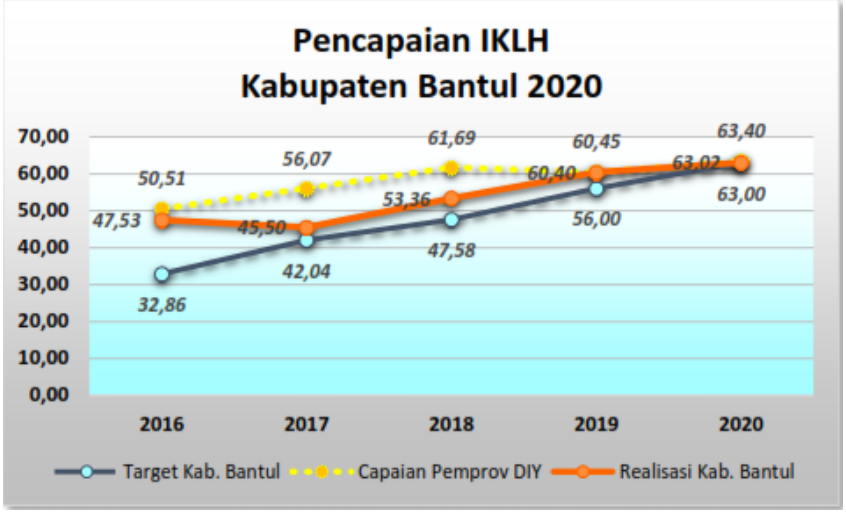

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Keterangan :
Sangat baik (IKLH>80), Baik (70<IKLH≤80), Cukup Baik (60<IKLH≤70), Kurang Baik (50<IKLH≤60), Waspada (40<IKLH≤50)

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan Peraturan Gubenur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode (penghujan dan kemarau).

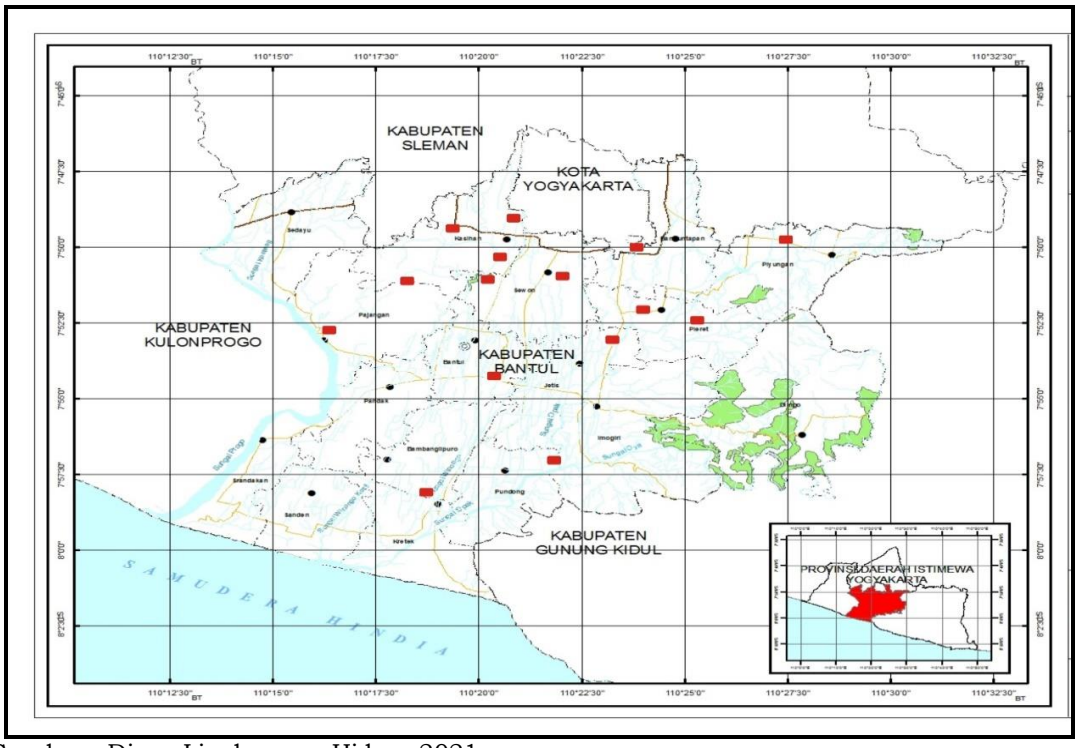

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai

Kabupaten Bantul berdasarkan parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik, selanjutnya dianalisa untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Winongo	32,500	33,334	37,500	43,333	53,330
Code	35,832	33,334	41,666	42,500	50,830

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Pada Tahun				
Gajahwong	33,334	31,666	38,334	30,000	43,330
Bedog	27,334	31,334	43,332	40,667	48,180
Oyo	28,334	28,334	33,334	41,667	37,500

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2020 sebesar 51,8 meningkat dibandingkan pada tahun 2019. IKA dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan.

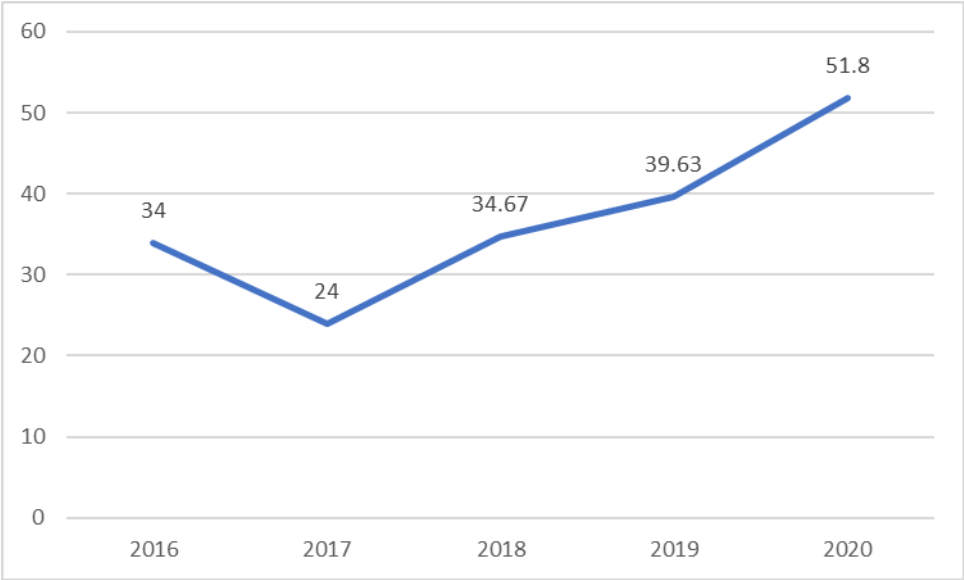

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara ambient dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Pemantauan udara ambient dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argoindustri, wilayah pemukiman, dan wilayah perkantoran/ komersial.

Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020

Parameter	Rerata (µg/Nm3)	EU	IEU
NO2	13,97	40,00	0,34925
SO2	7,68	20,00	0,384
Rerata			0,3666
Indeks Kualitas Udara			85,18

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2020 sebesar 80. Indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain.

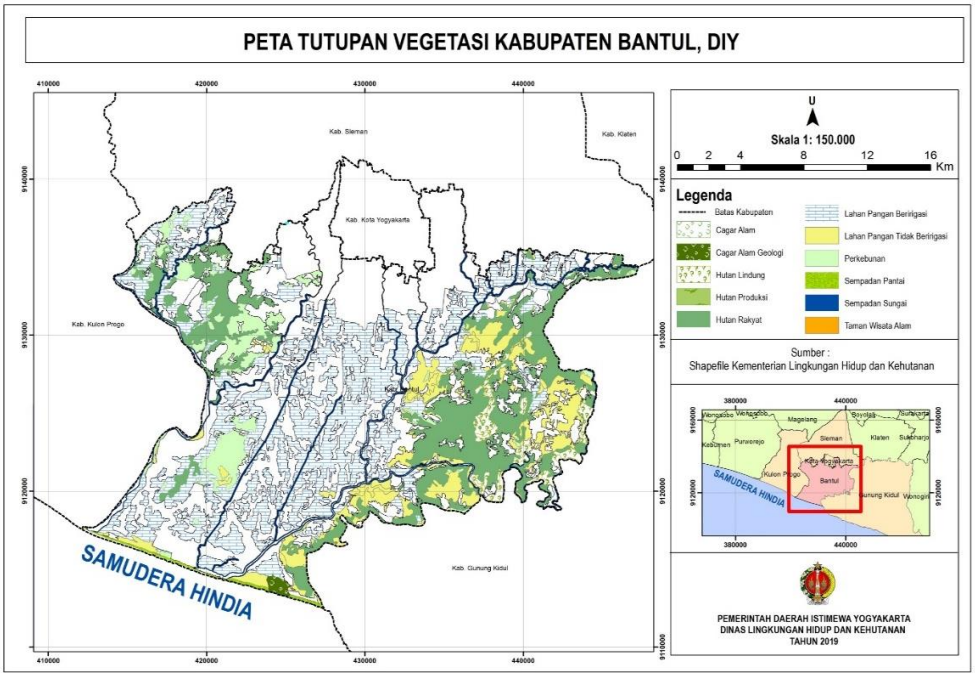

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020

No.	Jenis Tutupan Vegetasi	Luasan (km²)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penghijauan lingkungan	0,462	0,0125	0,12885	12	9,53125
2	Mangrove	0,02	0,0125	0,012	0,012	0,01
3	Reklamasi bekas tambang	0	0	0,0379	0,021	0,001
4	Hutan rakyat	0	0,0105	85,95	42,65	0
5	RTH/TAMAN	0	0,00101	0	0	0,0016
	Total penambahan	0,482	0,03651	86,12875	54,683	9,54385

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2020 ada penambahan tutupan lahan sebesar 9,54385 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2020 menjadi 178,60 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 54,82 atau naik sebesar 1,73 poin

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan keseluruhan luas tutupan lahan Kabupaten Bantul mencapai 178,60 km2.

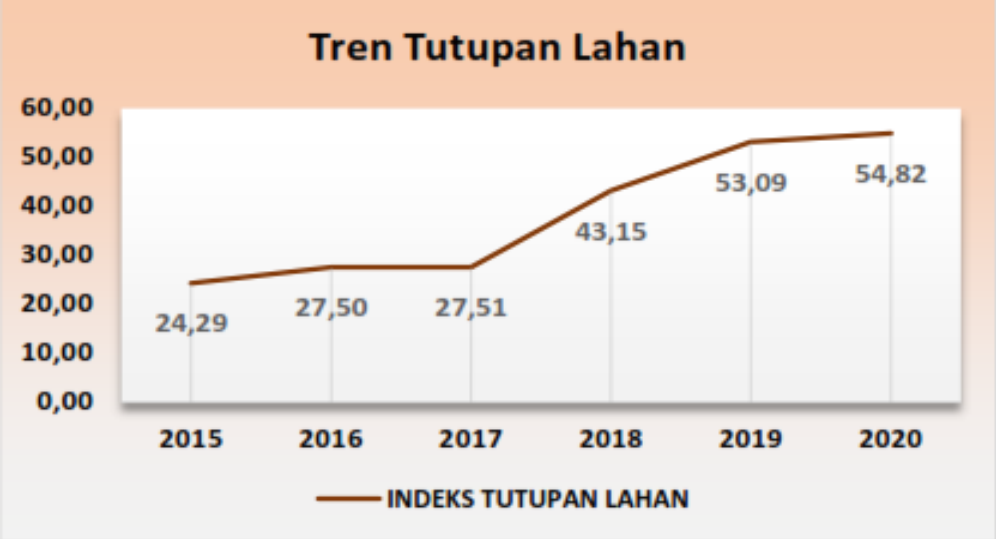

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas, secara keseluruhan dari tahun 2015 – 2020 terdapat kenaikan IKTL yang sangat signifikan pada tahun 2018 dibandingkan capaian pada tahun 2017 yang dipengaruhi oleh adanya penambahan komponen Hutan Rakyat yang sebelumnya tidak diperhitungkan, dengan luasan Hutan Rakyat tahun 2018 sebesar 8.595 Ha atau 85,95 km2.

e. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Linkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pemberian Izin Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Mulai tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa ijin lingkungan hanya untuk kantor

pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH merupakan persyaratan permohonan Izin Lingkungan. Berikut data Dokumen Lingkungan Hidup yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat pengurusan Izin Lingkungan.

Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

NO	TAHUN	DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP			Izin Lingkungan	KETERANGAN
		DPLH	UKL-UPL	JUMLAH		
1	2017	342	29	371	371	Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor
2	2018	95	33	128	128	Perumahan, kantor, sekolah, rumah makan, SPBE, SPBU, pasar, klinik
3	2019	1	66	67	67	OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja
		54	17	71	71	DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir
4	2020	N/A	62	62	62	Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, pemakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional)
		10	14	24	24	Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data di atas, Ijin Lingkungan yang diterbitkan tahun 2020 sejumlah 86 ijin, lebih rendah dari 2019 yaitu 138 ijin.

Terdapat 15 Usaha/kegiatan yang membuang limbah ke sungai yaitu PG Madukismo, PT ASA, PT Samitex, PT Dagsap Endura Eatore, PT Cahaya Mulia Persada, Ros In Hotel, Dafam Rohan Hotel, Balai Pialam, RS Paru Respira, RSUD Panembahan Senopati, RS Santa Elisabeth, RS Khusus Bedah, RSU PKU Muh Bantul, RS KIA Ummi Khasanah, RSPAU Harjolukito, RS UII Pandak, PT Pertamina.

Tingkat ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan insidentil. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tindak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung

Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi

No	Tahun	Dokumen Lingkungan Hidup			Izin Lingkungan	Yang Diawasi	Yang Taat	Yang Tdk Taat	Keterangan
		DPLH	UKL-UPL	Jumlah					
1	2017	342	29	371	371	NA	NA	NA	Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor
2	2018	95	33	128	128	11	0	11	Perumahan, kantor, sekolah, rumah makan, SPBE,

No	Tahun	Dokumen Lingkungan Hidup			Izin Lingkungan	Yang Diawasi	Yang Taat	Yang Tdk Taat	Keterangan
		DPLH	UKL-UPL	Jumlah					
									SPBU, pasar, klinik
3	2019	1	66	67	67	24	13	11	OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja
		54	17	71	71				DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir
4	2020	N/A	62	62	62	19	12	7	Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, pemakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional)
		10	14	24	24				Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2018, dari 11 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan semuanya belum memenuhi ketentuan izin lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2019, dari 24 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 13 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat. Untuk tahun 2020, dari 19 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 12 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat.

Tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Pada tahun 2021, DLH Bantul melakukan inovasi terkait pengawasan tidak langsung melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan mengirimkan hasil penelaahan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat dipergunakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perbaikan pengelolaan lingkungannya

2) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Bupati tersebut masih relevan dengan Permen LHK di atas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pokok aduan antara lain tentang gangguan kebisingan, pencemaran air, dan gangguan limbah cair. Setiap aduan yang masuk diverifikasi oleh DLH Kabupaten Bantul bekerjasama dengan instansi terkait. Verifikasi yang dilakukan berupa peninjauan langsung ke lokasi kejadian, pengambilan dan analisa sampel jika dianggap perlu. Jika hasil analisa laboratorium menunjukkan adanya pencemaran yang

ditunjukkan dengan telah terlampauinya baku mutu, maka DLH Kabupaten Bantul akan memberikan rekomendasi teknis terkait penanggulangan pencemaran yang terjadi. Sebagian besar kasus diselesaikan dengan cara mediasi antara pihak pelapor dan terlapor oleh DLH Kabupaten Bantul. Beberapa kasus setelah diverifikasi dan ditemukan terjadi pelanggaran peraturan daerah akan ditinjaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

No	Pokok Aduan	2018	2019	2020
1	Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara	10	11	17
2	Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair	6	27	8
	Total	16	38	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat jumlah aduan meningkat tahun 2020 sejumlah 25 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 25 aduan, penurunan jumlah aduan disebabkan pengaruh adanya pandemi covid 19 berpengaruh pada penurunan jumlah kegiatan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan berkurang. Semua aduan yang masuk sudah diselesaikan dengan baik.

f. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018
Total sampah yang terkelola (a)	441.000	486.784
Volume timbulan sampah (b)	715.400	726.543
Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100%	72,42%	72,50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

JAKSTRADA disahkan Desember 2018, pengelolaan sampah pada tahun 2017-2018 belum dihitung secara rinci. Pengelolaan sampah pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019

No	Uraian	m3/tahun
1	Volume timbulan sampah	608.731.643
2	Volume sampah yang terangkut ke TPS Piyungan	82.380.960
3	Volume sampah yang terolah ke TPS3R, Bank Sampah (Anorganik)	36.523.899
4	Volume sampah organic yang terkelola di pedesaan	271.646.495
5	Volume sampah organic yang terkelola di KPY	61.634.079
6	Total volume sampah tertangani	452.185.433

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan sampah pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020

No	Uraian	ton / th	m3/tahun
1	Pengurangan sampah	83.069.71	324.841.87
	Jumlah pembatasan timbulan sampah	56.376,28	220.282.47
	Jumlah sampah terdaur ulang	26.693,43	104.559.40
2	Penanganan sampah	34.373.91	134.644,21
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	1.626.61
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	33.958,65	133.017.60
3	Jumlah sampah terkelola	117.443,63	460.032.08
4	Timbulan sampah	192.020,7442	752.154,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah TPS (unit)	231	245	275	334	350
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	1.386	1.470	1.650	2.668	3.088
Jumlah Penduduk (Jiwa)	968.632	927.181	939.718	945.441	954.706
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	1,43	1,59	1,76	2,82	3,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah TPS sebanyak 350 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,253 m3. Masih sangat kecil namun ada peningkatan dibanding tahun 2019.

g. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	34,00	31,33	34,67	39,63	51,80
Indeks Kualitas Udara	87,76	82,31	85,66	90,90	85,25
Indeks Tutupan Lahan	27,50	27,50	43,15	53,09	54,82
Volume sampah yang tertangani	420.000m^3	441.000m^3	486.784m^3	452.185m^3	460.032m^3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan standar pelayanan administrasi kependudukan tahun 2019 meliputi Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan KK, Penerbitan KTP elektronik, Penerbitan KIA, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Penerbitan Akta Kelahiran, Pencatatan Lahir Mati, Penerbitan Akta Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, Pencatatan Pembetulan Akta, Pencatatan Pembatalan Akta, Pencatatan Penerbitan Kutipan II, Legalisir Fotocopi Dokumen Adminduk. Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poin utama pengelolaan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
2. Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat keterangan terkait lainnya;
3. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Kartu Keluarga (KK)		
		Jumlah KK	Kepemilikan KK	Prosentase
1	Srandakan	10.929	10.929	100
2	Sanden	11.524	11.524	100
3	Kretek	11.083	11.083	100
4	Pundong	12.648	12.648	100
5	Bambanglipuro	15.023	15.023	100
6	Pandak	18.261	18.261	100
7	Bantul	22.709	22.709	100
8	Jetis	20.596	20.596	100
9	Imogiri	22.358	22.358	100
10	Dlingo	13.984	13.984	100
11	Pleret	16.252	16.252	100
12	Piyungan	17.940	17.940	100
13	Banguntapan	37.647	37.647	100
14	Sewon	34.409	34.409	100
15	Kasihan	35.548	35.548	100
16	Pajangan	12.161	12.161	100
17	Sedayu	16.544	16.544	100
Total		**329.616**	**329.616**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

b. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap anak Indonesia perlu memiliki KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Identitas Anak. KIA bertujuan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak

konstitusional anak. KIA menjadi bukti identitas resmi anak yang umurnya 0-17 tahun, kartu ini berlaku layaknya KTP.

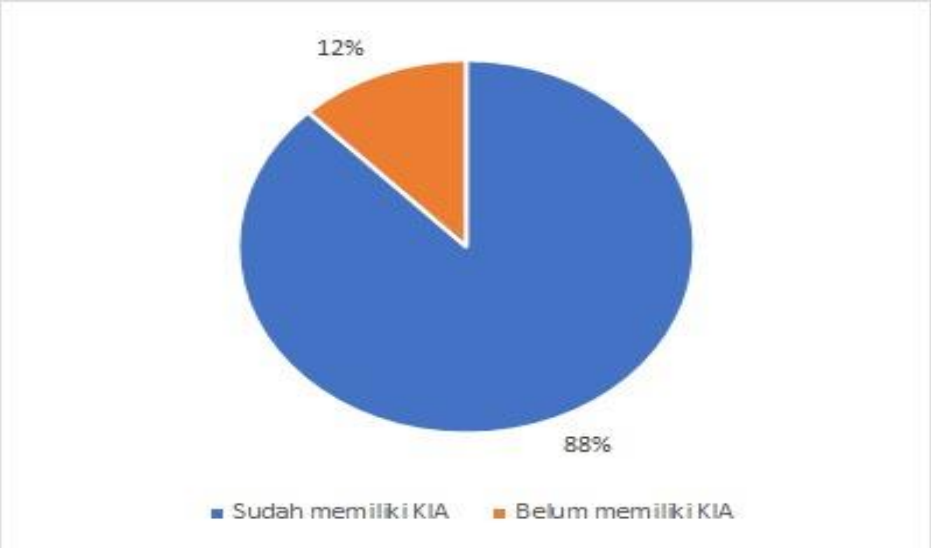

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, 2021

Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah anak yang belum memiliki KIA mencapai 12%, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

c. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)		
	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-El	Persentase
Srandakan	24.060	24.002	99,76
Sanden	25.056	24.988	99,73
Kretek	24.198	24.134	99,74
Pundong	27.601	27.508	99,66
Bambanglipuro	32.258	32.174	99,74
Pandak	40.280	40.176	99,74
Pajangan	27.781	27.675	99,61
Bantul	49.295	49.132	99,66
Jetis	44.706	44.588	99,73
Imogiri	48.508	48.320	99,61
Dlingo	31.021	30.890	99,57
Banguntapan	84.376	84.110	99,68
Pleret	35.746	35.596	99,58
Piyungan	39.633	39.498	99,65
Sewon	76.331	76.047	99,62
Kasihan	79.240	78.982	99,67
Sedayu	36.740	36.618	99,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	677.425	703.660	713.078	718.179	724.438
2	Jumlah PendudukWajib KTP	704.074	710.225	714.518	721.687	726.830
3	Persentasependuduk yang memiliki KTP ber-NIK	96,21%	99,07%	99,79%	99,51	99,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

d. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk

registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020

KAPANEWON	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	PERSENTASE
Srandakan	31.082	19.448	62,57
Sanden	31.810	18.875	59,34
Kretek	30.764	17.593	57,19
Pundong	35.666	19.347	54,24
Bambanglipuro	41.706	22.807	54,69
Pandak	52.036	30.864	59,31
Bantul	64.652	41.430	64,08
Jetis	58.631	35.760	60,99
Imogiri	63.835	35.926	56,28
Dlingo	39.998	19.976	49,94
Pleret	48.497	26.925	55,52
Piyungan	52.862	30.056	56,86
Banguntapan	113.298	64.961	57,34
Sewon	100.563	58.306	57,98
Kasihan	104.599	57.018	54,51
Pajangan	36.551	22.531	61,64
Sedayu	48.156	29.911	62,11
Srandakan	31.082	19.448	62,57
Total	954.706	551.734	57,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	10.127	10.949	10.000	9.928	9.038
Jumlah kelahiran di tahun N	10.516	11.056	10.900	9.938	9.075
Persentase penerbitan akta kelahiran	96,30	99,85	99,88	99.90	99.59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

e. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon, dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
1	2016	10.817
2	2017	15.653
3	2018	20.672
4	2019	12.245
5	2020	10.006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari uraian di atas, secara keseluruhan penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020

NO	KAPANEWON	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH KEPEMILIKAN KK	JUMLAH WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP-EL	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN
1	Srandakan	31.082	10.929	10.929	24.060	24.002	19.448
2	Sanden	31.810	11.524	11.524	25.056	24.988	18.875
3	Kretek	30.764	11.083	11.083	24.198	24.134	17.593
4	Pundong	35.666	12.648	12.648	27.601	27.508	19.347
5	Bambanglipuro	41.706	15.023	15.023	32.258	32.174	22.807
6	Pandak	52.036	18.261	18.261	40.280	40.176	30.864
7	Bantul	64.652	22.709	22.709	49.295	49.132	41.430
8	Jetis	58.631	20.596	20.596	44.706	44.588	35.760
9	Imogiri	63.835	22.358	22.358	48.508	48.320	35.926
10	Dlingo	39.998	13.984	13.984	31.021	30.890	19.976
11	Pleret	48.497	16.252	16.252	35.746	35.596	26.925
12	Piyungan	52.862	17.940	17.940	39.633	39.498	30.056
13	Banguntapan	113.298	37.647	37.647	84.376	84.110	64.961
14	Sewon	100.563	34.409	34.409	76.331	76.047	58.306
15	Kasihan	104.599	35.548	35.548	79.240	78.982	57.018
16	Pajangan	36.551	12.161	12.161	27.781	27.675	22.531
17	Sedayu	48.156	16.544	16.544	36.740	36.618	29.911
Total		**954.7066**	**329.6166**	**329.616**	**726.8300**	**724.438**	**551.7344**

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri,2021

f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	97,45	97,83	99,55	99,63
Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	NA	91,74	85	85	78,05
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,18	80,20	83,90	92,3	90,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Dari data diketahui rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 4,17, dalam arti rata-rata

satu LPMD membina sekitar 4 kelompok. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD tersebut menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK Kalurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Kelompok binaan PKK di Kabupaten Bantul sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	JUMLAH				
	PKK Kapanewon	Kelompok PKBN	Kelompok Kadarkum	Kelompok Pola Asuh	Kelompok PKK Padukuhan
2016	17	325	339	402	933
2017	17	325	339	402	933
2018	17	-	-	-	933
2019	17	-	-	-	933
2020	17	-	-	-	933

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

c. Pemberian Bantuan Khusus P2MD dan BKK

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kalurahan khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik diberikan bantuan khusus dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan. Bantuan Keuangan P2MD tahun 2020 dialokasikan sebesar 24,96 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 24,96 milyar rupiah. Sedangkan untuk Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) dialokasikan sebesar 28,94 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 28,94 milyar. Tahun 2020 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik, kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kulin. Untuk penanganan covid, ada BKK khusus covid bagi 75 Kalurahan masing masing dialokasikan berkisar 1,3 milyar.

Adapun output dari BKK dan P2MD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Proposal	Kegiatan	Jumlah (%)	Jumlah proposal	Jumlah Alokasi
1	**BKK**	Corblok, (Perbaikan Jalan)	43,60%	320	11.193.000.000
		Bangket, Talud	14,44%	106	3.918.000.000
		Drainase, Irigasi dll	5,99%	44	1.709.000.000
		Masjid / Rumah Ibadah	14,58%	107	4.658.000.000
		Penerangan Jalan	11,58%	85	2.315.000.000
		TK / PAUD	0,95%	7	420.000.000
		Gedung (pertemuan, Olahraga, serbaguna)	4,09%	29	2.235.000.000
		Lain- lain	4,77%	35	2.499.000.000
		Total	**100%**	**733**	**28.947.000.000**
2	**P2MD**	Corblok, (Perbaikan Jalan)	51,89%	385	13.525.000.000
		Bangket, Talud	20,49%	152	5.465.000.000
		Drainase, Irigasi dll	9,84%	73	2.995.000.000
		Penerangan Jalan	16,98%	126	2.520.000.000
		Lain - lain	0,81%	6	455.000.000
		Total	**100%**	**742**	**24.960.000.000**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Mandiri	14	16	22	24	27
Indeks Desa Membangun (%)	NA	NA	22	24	36

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, tampak pada tabel berikut.

Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	154,202	-	143,861	-	141,317	-	139,938	-	140,324	-
2	Peserta KB Aktif	121,764	78,96	109,257	75,95	103,912	73.53	101,691	72.67	102,751	73.22
3	Peserta KB MKJP	42,308	34,75	37,453	34,28	36,454	35,08	35,850	35.25	36,934	29.62
4	Peserta KB Pria	9,543	7,84	9,308	8,52	9,651	9,29	11,472	11.28	991	0.96
5	Peserta KB Baru	13,837	100,45	11,801	85,36	17,686	44,42	9,473	53.54	9730	34.74
6	PUS *Unmetneed*	9,058	5,87	12,118	8,42	14,226	10,07	14,757	10.55	13,975	9.96

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur disebabkan oleh banyaknya pasangan yang telah memasuki lansia. Hal ini juga diikuti oleh penurunan jumlah peserta keluarga berencana aktif maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun untuk kepesertaan KB pria dan peserta KB baru mengalami peningkatan. Hal ini berarti tingkat kesadaran dari pasangan usia subur yang belum mengikuti program KB mengalami peningkatan.

b. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih pasangan usia subur untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Cakupan anggota BKB ber-KB	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	91,88	94,50	91.04	93.02	90.79

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kategori keluarga kurang sejahtera (%)	13,49	11,94	12	NA	NA
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,29	3,12	3,12	NA	NA
Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	NA	1,67	1,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.9. Perhubungan

a. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.

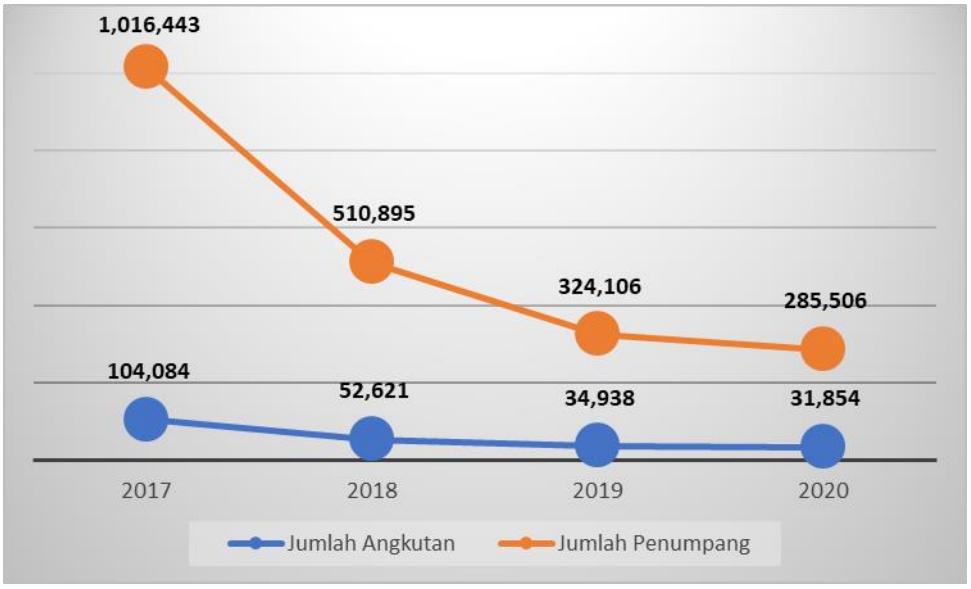

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum

pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

b. Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk kalurahan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima Kapanewon yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
1	2016	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
2	2017	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
3	2018	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
4	2019	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
5	2020	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

c. Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	Jumlah Uji Kir				
	2016	2017	2018	2019	2020
Uji kir kendaraan umum	17.810	18.730	20.923	19.131	11.762

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji KIR di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018, namun terjadi penurunan di tahun 2019 yang dikarenakan mutasi keluar dan beberapa kendaraan yang melakukan uji KIR di luar Kabupaten Bantul. Hal lain yang juga mempengaruhi penurunan jumlah uji kir adalah karena *brake tester* yang mengalami kerusakan. Sementara untuk tahun 2020 juga terjadi penurunan jumlah uji KIR yang disebabkan kuota yang dikurangi hingga 50% sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 (*social distancing*) sebagaimana

dianjurkan oleh kemenhub. Alasan lain adalah masih sama dengan tahun 2019 yaitu karena *brake tester* yang rusak sebanyak 4 kali dalam setahun sehingga menghambat pengujian KIR.

d. Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

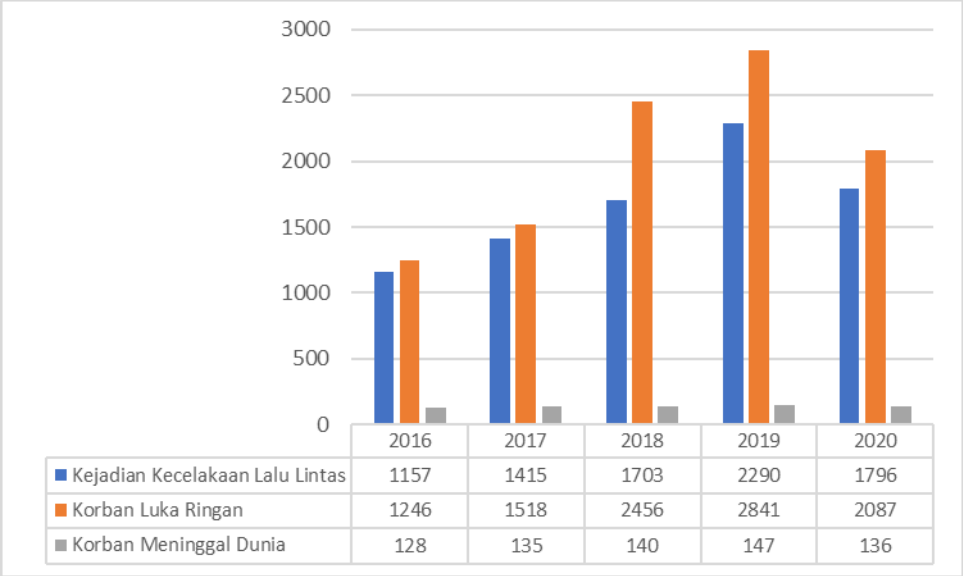

	2016	2017	2018	2019	2020
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	1157	1415	1703	2290	1796
Korban Luka Ringan	1246	1518	2456	2841	2087
Korban Meninggal Dunia	128	135	140	147	136

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan kejadian pada tahun 2019. Meskipun jumlah kecelakaan lalulintas menurun, masih perlu upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dengan

melakukan sosialisasi *safety riding,* memberlakukan batas kecepatan kendaraan dan melengkapi rambu-rambu lalu lintas.

Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan *Ringroad* Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan yang padat di pagi hari dan sore hari.

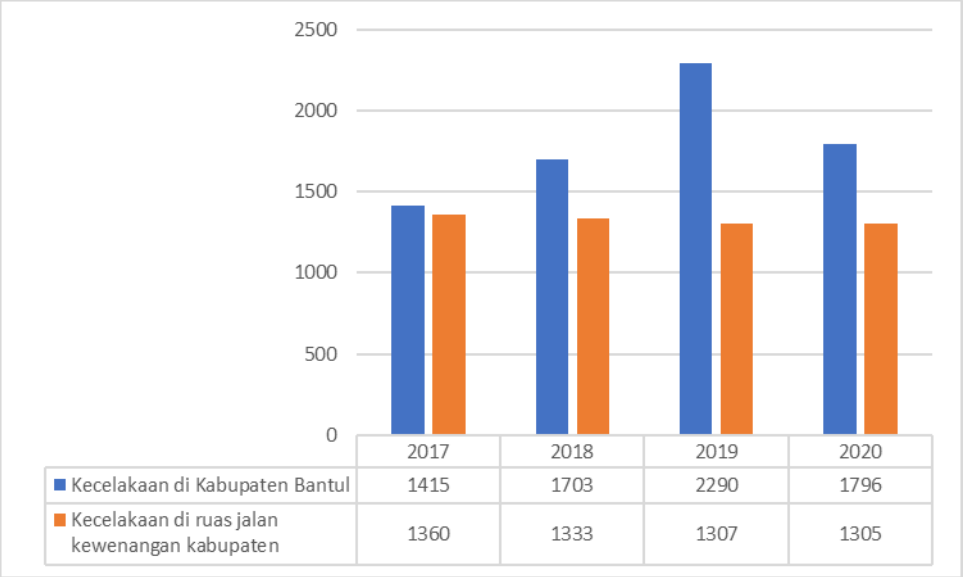

	2017	2018	2019	2020
Kecelakaan di Kabupaten Bantul	1415	1703	2290	1796
Kecelakaan di ruas jalan kewenangan kabupaten	1360	1333	1307	1305

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas, kecelakaan yag terjadi di ruas jalan kewenangan kabupaten cukup tinggi antara 57% sd 96%.

e. Terminal Bus

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Selama kurun waktu 5

tahun tidak mengalami pertambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

1) terminal penumpang tipe C di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul;
2) terminal angkutan barang di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu;
3) stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
4) terminal angkutan barang di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuangin, dan halte Bandung. Tahun 2018 sebanyak lima unit halte terpasang di halte sebelah Utara *Traffic Light* S4 Kasongan, sebelah Utara *Traffic Light* S4 Palbapang, depan SMP 2 Bantul, dan dua di depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA).

f. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih

menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Angkudes					
1	Ps.Bantul-Imogiri	10	10	0	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	3	0	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Seropan)	4	4	0	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0		0	0	0
	Jumlah	17	14	0	0	0
	Angkutan Perbatasan					
1	Yogya- Parangtritis	29	29	21	15	15
2	Yogya- Samas	7	7	5	5	5
3	Yogya- Sorobayan	8	8	3	3	3
4	Yogya-Srandakan	6	6	3	2	2
5	Dlingo - Terminal Giwangan	16	16	14	13	13
6	Yogyakarta – Petoyan	7	7	15	6	6
7	Trisik - Giwangan	16	16	14	12	12
	Jumlah	89	89	75	56	56
	AKDP					
1	Yogya- Panggang GK	17	18	13	13	0
2	Yogya- Parangtritis	26	26	26	26	0
3	Yogya- Samas	14	14	14	14	0
4	Yogya- Pandansimo	13	13	13	13	0
5	Yogya- Wates	16	16	17	17	0
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	8	8	0
	Jumlah	105	94	91	91	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

g. Rasio Konektivitas dan V/C Ratio

1) Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2016 - 2018 sebagai berikut.

Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

URAIAN	2016	2017	2018
Jumlah Angkutan Darat	109.018	104.084	52.621
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	1.089.241	1.016.443	610.895
Rasio Konektivitas (%)	10,1	10,24	10,30

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ ANGKUTAN\ DARAT}{JUMLAH\ PENUMPANG\ ANGKUTAN\ DARAT}\ X\ 100\%$$

Pada tahun 2019 – 2020 terdapat perubahan perhitungan rasio konektivitas menyesuaikan manual Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019 -2020 sebagai berikut :

Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23
Bobot Trayek	1	1
Bobot Angkutan Jalan	100	100
Rasio Konektivitas (%)	30,34	30,34

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ TRAYEK\ YANG\ DILAYANI\ PADA\ KAB\ x\ BOBOT\ TRAYEK}{JUMLAH\ KEBUTUHAN\ TRAYEK\ PADA\ KABUPATEN}\ X\ BOBOT\ ANGKUTAN\ JALAN$$

2) V/C Ratio

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 dijelaskan bahwa nisbah volume/kapasitas atau (V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. V/C

rasio sendiri berfungsi untuk mengetahui nilai tingkat pelayanan dari ruas jalan di suatu wilayah. Data V/C Ratio Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Ruas Jalan	V/C Ratio
1	2017	Jalan Parangtritis	0,31
		Jalan Bantul	0,27
2	2019	Jalan Srandakan	0,39
		Jalan Parangtritis	0,45
3	2020	Jalan Dr. Wahidin S	0,17
		Jalan Jend Sudirman	0,39

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

h. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perhubungan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas (%)	5	6	1,99	1,95	1,83

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelengaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum

terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

b. Penerbitan Informasi Media Cetak

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Buletin Sejada yang penyebarannya sampai ke tingkat padukuhan melalui kapanewon. Tujuan utama penerbitan buletin ini adalah: sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta sebagai sarana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemerintah. Penerbitan buletin ini dilakukan empat kali/edisi dalam setiap tahunnya.

c. Penyiaran Radio/TV

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interatif dengan pemirsa di luar studio.

d. *Website* Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat http://www.bantulkab.go.id, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah http://hukum.bantulkab.go.id dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Instansi	Subdomain
	Dinas	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	sosial.bantulkab.go.id
3	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	diperpautkan.bantulkab.go.id
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	pu.bantulkab.go.id
6	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.bantulkab.go.id
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	diskukmp.bantulkab.go.id
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dppkbpmd.bantulkab.go.id
12	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	disbud.bantulkab.go.id
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana),	dptr.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.bantulkab.go.id
16	Satpol PP	satpolpp.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	dpmpt.bantulkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
19	Dinas Perdagangan	perdagangan.bantulkab.go.id
	Badan	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.bantulkab.go.id
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.bantulkab.go.id
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.bantulkab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
5	Inspektorat	inspektorat.bantulkab.go.id
6	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.bantulkab.go.id
	PD	
1	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	dprd.bantulkab.go.id
3	RSUD Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	ulp.bantulkab.go.id
	Kapanewon	
1	Kapanewon Bambanglipuro	Kapanewon-bambanglipuro.bantulkab.go.id
2	Kapanewon Banguntapan	Kapanewon-banguntapan.bantulkab.go.id
3	Kapanewon Bantul	Kapanewon-bantul.bantulkab.go.id
4	Kapanewon Dlingo	Kapanewon-dlingo.bantulkab.go.id
5	Kapanewon Imogiri	Kapanewon-imogiri.bantulkab.go.id
6	Kapanewon Jetis	Kapanewon-jetis.bantulkab.go.id
7	Kapanewon Kasihan	Kapanewon-kasihan.bantulkab.go.id
8	Kapanewon Kretek	Kapanewon-kretek.bantulkab.go.id
9	Kapanewon Pajangan	Kapanewon-pajangan.bantulkab.go.id
10	Kapanewon Pandak	Kapanewon-pandak.bantulkab.go.id
11	Kapanewon Piyungan	Kapanewon-piyungan.bantulkab.go.id
12	Kapanewon Pleret	Kapanewon-pleret.bantulkab.go.id
13	Kapanewon Pundong	Kapanewon-pundong.bantulkab.go.id
14	Kapanewon Sanden	Kapanewon-sanden.bantulkab.go.id
15	Kapanewon Sedayu	Kapanewon-sedayu.bantulkab.go.id
16	Kapanewon Sewon	Kapanewon-sewon.bantulkab.go.id
17	Kapanewon Srandakan	Kapanewon-srandakan.bantulkab.go.id
	Kalurahan	
1	Kalurahan : Argodadi	http://argodadi.bantulkab.go.id
2	Kalurahan : Argomulyo	http://argomulyo.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
3	Kalurahan : Argorejo	http://argorejo.bantulkab.go.id
4	Kalurahan : Argosari	http://argosari.bantulkab.go.id
5	Kalurahan : Bangunharjo	http://bangunharjo.bantulkab.go.id
6	Kalurahan : Bangunjiwo	http://bangunjiwo.bantulkab.go.id
7	Kalurahan : Banguntapan	http://banguntapan.bantulkab.go.id
8	Kalurahan : Bantul	http://bantul.bantulkab.go.id
9	Kalurahan : Baturetno	http://baturetno.bantulkab.go.id
10	Kalurahan : Bawuran	http://bawuran.bantulkab.go.id
11	Kalurahan : Canden	http://canden.bantulkab.go.id
12	Kalurahan : Caturharjo	http://caturharjo.bantulkab.go.id
13	Kalurahan : Dlingo	http://dlingo-bantul.desa.id
14	Kalurahan : Donotirto	http://donotirto.bantulkab.go.id
15	Kalurahan : Gadingharjo	http://gadingharjo.bantulkab.go.id
16	Kalurahan : Gadingsari	http://gadingsari.bantulkab.go.id
17	Kalurahan : Gilangharjo	http://gilangharjo.bantulkab.go.id
18	Kalurahan : Girirejo	http://girirejo.bantulkab.go.id
19	Kalurahan : Guwosari	http://guwosari.bantulkab.go.id
20	Kalurahan : Imogiri	http://imogiri.bantulkab.go.id
21	Kalurahan : Jagalan	http://jagalan.bantulkab.go.id
22	Kalurahan : Jambidan	http://jambidan.bantulkab.go.id
23	Kalurahan : Jatimulyo	http://jatimulyo.bantulkab.go.id
24	Kalurahan : Karangtalun	http://karangtalun.bantulkab.go.id
25	Kalurahan : Karangtengah	http://karangtengah.bantulkab.go.id
26	Kalurahan : Kebonagung	http://kebonagung.bantulkab.go.id
27	Kalurahan : Mangunan	http://mangunan.bantulkab.go.id
28	Kalurahan : Mulyodadi	http://mulyodadi.bantulkab.go.id
29	Kalurahan : Muntuk	http://muntuk.bantulkab.go.id
30	Kalurahan : Murtigading	http://murtigading.bantulkab.go.id
31	Kalurahan : Ngestiharjo	http://ngestiharjo.bantulkab.go.id
32	Kalurahan : Palbapang	http://palbapang.bantulkab.go.id
33	Kalurahan : Panggungharjo	http://panggungharjo.desa.id
34	Kalurahan : Panjangrejo	http://panjangrejo.bantulkab.go.id
35	Kalurahan : Parangtritis	http://parangtritis.bantulkab.go.id
36	Kalurahan : Patalan	http://patalan.bantulkab.go.id
37	Kalurahan : Pendowoharjo	http://pendowoharjo.bantulkab.go.id
38	Kalurahan : Pleret	http://pleret.bantulkab.go.id
39	Kalurahan : Poncosari	http://poncosari.bantulkab.go.id
40	Kalurahan : Potorono	http://potorono.bantulkab.go.id
41	Kalurahan : Ringinharjo	http://ringinharjo.bantulkab.go.id
42	Kalurahan : Sabdodadi	http://sabdodadi.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
43	Kalurahan : Segoroyoso	http://segoroyoso.bantulkab.go.id
44	Kalurahan : Seloharjo	http://seloharjo.bantulkab.go.id
45	Kalurahan : Selopamioro	http://selopamioro.bantulkab.go.id
46	Kalurahan : Sendangsari	http://sendangsari.bantulkab.go.id
47	Kalurahan : Sidomulyo	http://sidomulyo.bantulkab.go.id
48	Kalurahan : Singosaren	http://singosaren.bantulkab.go.id
49	Kalurahan : Sitimulyo	http://sitimulyo.bantulkab.go.id
50	Kalurahan : Srigading	http://srigading.bantulkab.go.id
51	Kalurahan : Srihardono	http://srihardono.bantulkab.go.id
52	Kalurahan : Sriharjo	http://sriharjo.bantulkab.go.id
53	Kalurahan : Srimartani	http://srimartani.bantulkab.go.id
54	Kalurahan : Srimulyo	http://srimulyo.bantulkab.go.id
55	Kalurahan : Sumberagung	http://sumberagung.bantulkab.go.id
56	Kalurahan : Sumbermulyo	http://sumbermulyo.bantulkab.go.id
57	Kalurahan : Tamanan	http://tamanan.bantulkab.go.id
58	Kalurahan : Tamantirto	http://tamantirto.bantulkab.go.id
59	Kalurahan : Temuwuh	http://temuwuh.bantulkab.go.id
60	Kalurahan : Terong	http://terong.bantulkab.go.id
61	Kalurahan : Timbulharjo	http://timbulharjo.bantulkab.go.id
62	Kalurahan : Tirtohargo	http://tirtohargo.bantulkab.go.id
63	Kalurahan : Tirtomulyo	http://tirtomulyo.bantulkab.go.id
64	Kalurahan : Tirtonirmolo	http://tirtonirmolo.bantulkab.go.id
65	Kalurahan : Tirtosari	http://tirtosari.bantulkab.go.id
66	Kalurahan : Triharjo	http://triharjo.bantulkab.go.id
67	Kalurahan : Trimulyo	http://trimulyo.bantulkab.go.id
68	Kalurahan : Trimurti	http://trimurti.bantulkab.go.id
69	Kalurahan : Trirenggo	http://trirenggo.bantulkab.go.id
70	Kalurahan : Triwidadi	http://triwidadi.bantulkab.go.id
71	Kalurahan : Wijirejo	http://wijirejo.bantulkab.go.id
72	Kalurahan : Wirokerten	http://wirokerten.bantulkab.go.id
73	Kalurahan : Wonokromo	http://wonokromo.bantulkab.go.id
74	Kalurahan : Wonolelo	http://wonolelo.bantulkab.go.id
75	Kalurahan : Wukirsari	http://wukirsari.bantulkab.go.id
	Lembaga lain	
1	PPID utama	ppid.bantulkab.go.id
2	KIM Kabupaten Bantul	kim.bantulkab.go.id
3	Karang Taruna Kabupaten Bantul	karangtaruna.bantulkab.go.id
4	Ikatan Bidan	ibi.bantulkab.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul hingga saat ini meliputi 202 titik. Dari jumlah tersebut 70 titik telah menggunakan jaringan *fiber optic* (FO) dan 132 titik lainnya menggunakan radio nirkabel. Guna melayani penggunaan internet, telah dialokasikan bandwith 500 MB.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	60	70,33	77,70	80,69	101,49
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	-	75,23	75,33	78,56	100,04

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi Berbadan Hukum

Pada tahun 2016 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang: Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi. Jumlah koperasi berbadan hukum sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan

dibanding tahun 2018. Jumlah koperasi berbadan hukum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasihan	10	35	28	28	27
2	Sewon	62	51	43	42	44
3	Banguntapan	42	34	25	25	24
4	Pundong	12	6	8	9	9
5	Dlingo	20	19	16	16	16
6	Piyungan	23	21	17	16	17
7	Pajangan	10	9	8	8	8
8	Bantul	92	86	69	69	70
9	Srandakan	18	16	10	11	11
10	Pandak	17	15	13	13	14
11	Imogiri	31	30	24	25	25
12	Sanden	23	22	19	19	19
13	Kretek	10	9	10	10	10
14	Sedayu	18	16	15	15	15
15	Jetis	31	26	17	18	17
16	Pleret	23	17	10	10	10
17	Bambanglipuro	21	21	15	15	15
Jumlah		**493**	**433**	**347**	**349**	**351**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 202i

b. Perkembangan UKM

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 49.801 unit, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2019.

Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	27.708	27.828	28.384	29.098	30.468
2.	Usaha Kecil	11.544	11.594	11.768	11.992	12.201
3.	Usaha Menengah	6.926	6.956	6.991	7.058	7.114
	Jumlah	46.178	46.378	47.143	48.148	49.801

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	55.416	55.656	56.768	58.225	59.890
2.	Usaha Kecil	34.632	34.782	35.130	36.048	36.925
3.	Usaha Menengah	6.926	6.956	111.856	112.977	113.884
	Jumlah	200.864	201.734	203.754	207.250	210.699

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM.

Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah
1	2016	4.674
2	2017	2.749
3	2018	4.996
4	2019	6.864
5	2020	Melalui OSS
Jumlah		23.814

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	192	183	185	185
Peningkatan Kesehatan Koperasi	10	10	10	12	8

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021.

Peningkatan kesehatan koperasi turun pada tahun 2020 karena dipengaruhi oleh salah satu unsur penilaiannya, yaitu penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT). Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan berkumpul dibatasi sehingga koperasi ada yang tidak menyelenggarakan RAT.

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

a. Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Bantul kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2016	37	5	42
2	2017	46	15	61
3	2018	47	47	94
4	2019	41	64	105
5	2020	77	56	133

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Data di atas menunjukkan jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 28 investor dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya jumlah investor tentunya berdampak pula pada nilai investasi yang ditanamkan. Nilai investasi PMA/PMDN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	*Jmlh Proyek PMDN*	*Jmlh Proyek PMA*	*Jmlh Proyek PMDN+ PMA*	*Nilai Investasi PMDN*	*Nilai Investasi PMA (Rp)*	*Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)*	*Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)*	*Pertum-buhan (%)*
s.d 2016	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,	142.143.455.561,11	14,60
s.d 2017	15	46	61	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.596,	141.917.800.000,00	12,72
s.d 2018	47	47	94	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,	149.052.000.000,00	11,85
s.d 2019	103	106	209	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,	130.897.300.000,00	9,31
s.d.2020	338	96	434	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,	57.500.940.000,00	3,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021
Catatan:
- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situshttps://lkpmonline.bkpm.go.id
- 2016 , kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P2016
- 2017 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-P2017
- 2018 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-2018
- 2019 , kurs US$ 1 = Rp15.000 sesuai APBN-2019

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi

pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai nilai Rp1.594.746.877.696 meningkat bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.587.245.987.696 . Jika dilihat dari nilai investasi, PMDN lebih besar dibanding PMA. Nilai investasi PDMN tahun 2020 sebesar Rp808.479.481.996,00, sementara nilai investasi PMA sebesar Rp786.267.895.780.

b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76
2	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51
3	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39
4	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138,66
5	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 hanya mencapai 67,86 hal ini berarti satu perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 67 sampai 68 tenaga kerja, menurun jauh bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 138,66 yang berarti satu

perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 138 sampai 139 tenaga kerja.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan perijinan tepat waktu	81,60	70,98	83,87	83,80	96,92
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,99	83,08	83,29	85,89	87,89
Pertumbuhan realisasi investasi	12,20	12,72	11,85	9,30	3,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul bisa dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh dalam setiap event pertandingan olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasinal yang sangat bagus dan membanggakan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bantul lebih serius menangani bidang kepemudaan baik dari segi pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemudaan dan kemitraan serta kelembagaan pemuda, maupun pembinaan olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

a. Kepemudaan

Ada banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang kepemudaan dengan tujuan untuk melatih kemandirian pemuda, meningkatkan keperdulian pada lingkungan serta meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah.

Berbagai kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda	(1) Lomba Wirausaha Muda Bantul; (2) MTQ Pelajar Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten, dilaksanakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolalan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi dan dari hasil seleksi ditentukan perwakilan untuk mengikuti seleksi di tingkat DIY pada tahun 2021
	b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda	(1) Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; Sesuai instruksi presiden terkait adanya Pandemi Covid 19 maka perwakilan, pengiriman petugas Paskibraka tidak dilaksanakan. (2) Pelatihan Tallent Mapping (pemetaan potensi pemuda); (3) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul (peran aktif pemuda di masyarakat dalam kegiatan rehab rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah); (4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; (5) Pelatihan Bela Negara Pemuda (terutama pelajar sekolah menengah untuk menangkal aliran radikal dan mengembangkan budaya disiplin); (6) Seminar NAPZA (bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bantul dan LSM);
3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (termasuk kemampuan *public speaking)*
4) Program Pengembangan Kebijakan dan Menajemen Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	(1) Pelatihan Wasit Tenis Lapangan, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket. (2) Pelatih Sepak Takraw, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket.
5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	(1) Car Free Day (hanya dilaksanakan pada Januari dan Februari selanjutnya dihentikan

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
Olahraga		karena adanya pembatasan kegiatan masyarkat akibat pandemi Covid 19); (2) Olahraga Tradisional (penyelenggaraan lomba untuk melestarikan nilai-nilai pembentukan karakter yang terkandung dalam permainan tradisional warisan leluhur); (3) Pemassalan Olahraga.
	b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	(1) Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul; (2) Pekan Olahraga Daerah (POPDA) (3) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Kab. Bantul (POSPEDA); (4) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA); (5) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC; (6) Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul; (7) Pembinaan Atlet Berprestasi (90 atlet dari 10 cabang olahraga unggulan); (8) Reward / Bonus Atlet Berprestasi POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA (549 atlit dan 95 pelatih);
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	(1) Pengadaan peralatan E Sport (2) Program Perisai, Penambahan fasilitas kebersihan SSA dan Dwi windiu (3) Pemeliharaan rutin/berkala sarpras olahraga

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Unsur penilaian kegiatan lomba Wirausaha Muda Bantul sebagaimana tersebut dalam tabel di atas diantaranya meliputi kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan wirausaha muda dalam penguasaan teknologi informasi melalui media, terutama dalam hal promosi dan kemasan publikasi yang menarik, akurat dan inovatif. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan potensi anak muda dibidang kewirausahaan dapat berkembang dengan baik.

Selain berbagai macam kegiatan kepemudaan sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, di Kabupaten Bantul juga ada wadah pengembangan potensi anak muda antara lain: Rumah milenial dan kegiatan forum anak bantul.

b. Olahraga

1) Organisasi Olahraga

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki 71 organisasi induk cabang olahraga. Sebagai anggota KONI, Kabupaten Bantul telah memiliki 43 organisasi cabang olahraga seperti Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) dan sebagainya, dari berbagai macam cabang olahraga tersebut masing-masing membina beberapa klub yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

2) Prestasi dalam Bidang Olahraga

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi pelajar difabel dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit pelajar berprestasi, sementara POSPEDA merupakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pasantren Tingkat Daerah dan merupakan salah satu ruang kreasi dan prestasi bagi santriwan dan santriwati di bidang olahraga dan seni Islami.

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2020, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestas sebagai juara umum dengan memperoleh medali emas 96, perak 77 dan perunggu 72 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	96	77	72	246	1
2	Kab. Sleman	67	61	97	225	2
3	Kota Yogyakarta	45	41	63	149	3
4	Kab. Kulonprogo	18	34	51	103	4
5	Kab. Gunungkidul	14	27	53	94	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Sementara dalam Pekan Paralimpic Nasional, berbagai macam kejuaraan cabang olahraga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga diraih oleh Kabupaten Bantul. Daftar prestasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis kursi roda	Ganda Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
2	Tenis kursi roda	Tunggal Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
3	Tenis kursi roda	Ganda Campuran (Quad dan pemula putri)	Tuna Daksa Bawah	Emas
4	Tenis kursi roda	Ganda Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
5	Tenis kursi roda	Tunggal Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
6	Tenis kursi roda	Ganda Quad dan Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
7	Atletik	Lari 100 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
8	Atletik	Lari 200 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
9	Atletik	Lompat jauh T.F 54 Putri	Tuna Rungu Wicara	Perak
10	Atletik	Lempar lembing F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perak
11	Tenis Meja	Ganda Mix Class 9	Tuna Daksa Bawah	Perak
12	Bulutangkis	Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
13	Bulutangkis	Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak
14	Bulutangkis	Tunggal Putri Wch Open	Tuna Daksa Bawah	Perak
15	Atletik	Lempar Cakram F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
16	Atletik	Lempar Peluru F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
17	Atletik	Lompat Jauh T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perunggu
18	Atletik	Lari 800 m T/F. 37 (CP) Putra	CP	Perunggu
19	Tenis Meja	Tunggal Kelas Tuna Netra Putra	Tuna Netra	Perunggu
20	Tenis Meja	Ganda Mix Kelas 11	Tuna Grahita	Perunggu
21	Tenis Meja	Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
22	Tenis Meja	Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
23	Tenis kursi roda	Beregu Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
24	Bulutangkis	Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
25	Bulutangkis	Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis Meja	Tunggal	Tuna Netra	Emas
2	Tenis Meja	Tunggal	TT4	Perak
3	Tenis Meja	Beregu	TT3-TT5	Perak
4	Tenis Meja	Tunggal	Tuna Netra	Perunggu
5	Tenis Meja	Tunggal	TT3-TT5	Perunggu
6	Bocia	Tunggal	BC 5	Perak
7	Basket Kursi Roda	Beregu 3x3	Wheelchair	Perunggu
8	Angkat Berat	49 Kg	Daksa	Emas
9	Atletik	T. Peluru	F11	Perak
10	Atletik	L. Cakram	F11	Emas
11	Atletik	200 M	T37	Perunggu
12	Atletik	400 M	T37	Perunggu
13	Atletik	200 M	T11	Perak
14	Atletik	L. Jauh	F11	Emas
15	Atletik	100 M	T11	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020"

No	CABANG OLAHRAGA	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis Kursi Roda	Beregu	Main Draw	Emas
2	Tenis Kursi Roda	Beregu	Second Draw	Emas

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat prestasi yang diraih kontingen Kabupaten Bantul dari tahun 2018 sampai 2020.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut	32,00	31,40	34,21	32,18	40,33
Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.1.2.14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir,

terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2016 – 2019, urusan statistik belum dilaksanakan melalui program tersendiri. Setelah perubahan RPJMD 2016-2021, pada tahun 2020, urusan statistik dilaksanakan melalui Program Penyajian Data Statistik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	
								Target	Capaian
1	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Data statistik acuan perencanaan pembangunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	7	1
2	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
		Portal data terkelola	Portal	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal

nasional https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional https://data.go.id/. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (*resource*) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu Kalurahan (Kalurahan Panggungharjo). Kalurahan Panggungharjo menjadi *pilot project* nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat Kalurahan. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (*resource*) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 157 layer data spasial.

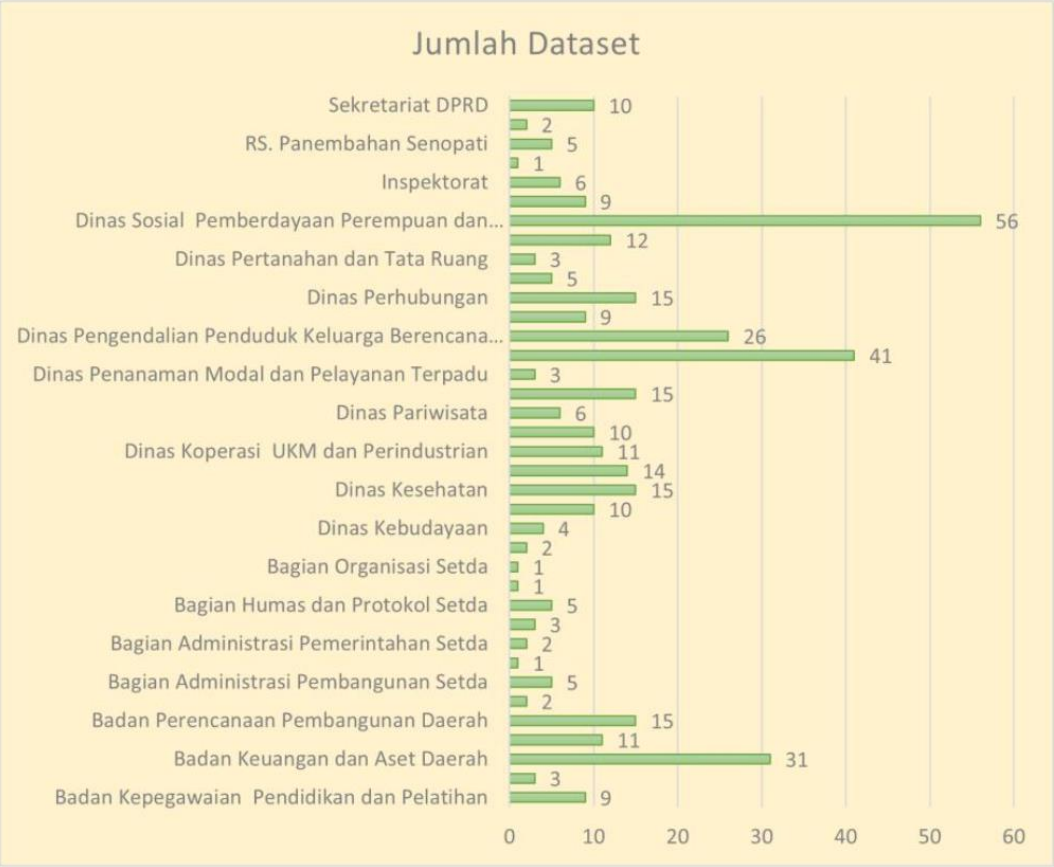

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaran SDI, diantaranya sesuai permendagri 18/2020 dan permendagri 86/2017, sebagai berikut :

Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380
Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18
Jumlah *resource* yang dipublikasi	*resource*	0	712
Jumlah *resource* yang berstatus privat	*resource*	0	27
Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	Layes spasial	0	157
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58.15
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95.48
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83.75	100
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83.75	100
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43
jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37
jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Survey	0	0
jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Dalam hal penyelenggaran simpul jaringan, Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten, diterima pada tanggal 27 November 2020.

Kabupaten Bantul dinilai telah berhasil mengembangkan Simpul Jaringan dalam waktu relatif cepat. Kebijakan Satu Data

Indonesia juga telah dimasukkan dalam simpul jaringan Kabupaten Bantul sesuai Perpres 39/2019. Disamping itu Kabupaten Bantul diapresiasi melibatkan seluruh perangkat daerah dalam memperkaya data yang ada di geoportal. Studio untuk pengolahan informasi geosoasial dan ruang pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan nilai lebih simpul jaringan Kabupaten Bantul. Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

2.3.1.2.15. Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan, diantaranya adalah pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Pengamanan persandian pada hakekatnya merupakan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Pengamanan persandian meliputi:

- naskah dinas berklasifkasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi;
- komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail.

- informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*.
- pengiriman informasi digital, kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan.
- pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Dalam operasional kegiatannya pengamanan persandian melaksanakan:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

Program ini bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul. Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan

Bertujuan untuk melakukan deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara menanam peralatan penyadap

di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap

NO	TAHUN		
	2018	2019	2020
1.	Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati	Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas PUPR
2.	Ruang Kerja dan Ruang Rapat Wakil Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Dinas Kesehatan
3.	Ruang Kerja Sekretaris Pribadi upati dan Wakil Bupati	Ruang Kerja Staff Ahli	Ruang kerja dan ruang rapat Inspektur Bantul
4.	Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah	Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah	Ruang kerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5.			Ruang kerja Kasubag Teknologi Informasi Pengadaan, Ruang Kerja Kassubag Pengadaan Barang dan Jasa, Ruang Rapat Madya, Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Pratama
6.			Ruang kerja Ketua DPRD Bantul
7.			Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

3) Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemerintah Kabupaten Bantul

Dilakukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting yang dihadiri pejabat tinggi, seperti kegiatan Syawalan Gubernur DIY di Kabupaten Bantul tahun 2020, Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul tahun 2020.

4) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemeritah Daerah

Jumlah sambungan telepon *extention* baik analog maupun IPPhone pada tahun 2020 mencapai 238 sambungan, sementara itu untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frequensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup.

5) Gelar Jaring Persandian Daerah

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY(Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY,Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas,Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Sebagai UPT Teknis Persandian, di Pemkab. Bantul, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian tergabung dalam Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY. Forkomsanda menjadi media komunikasi dan koordinasi di tingkat Daerah DIY, dengan tujuan untuk menyatukan pola pikir, pola tindak dan pola sikap petugas sandi di Lingkungan Pememerintah Daerah DIY.

6) Penyediaan Filter *Repeater* RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh, atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi.

7) Layanan Call Center 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, *call center* atau panggilan darurat di tingkat nasional dan daerah yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal harus menggunakan nomor 112, integrasi panggilan paling lambat sudah dilaksanakan pada tahun 2022. *Call Centre* 112 merupakan suatu inovasi sistem pelayanan pengaduan kepada masyarakat secara terpadu yang dapat diakses selama 24. *Call Centre* 112 dibentuk dan diresmikan oleh Bupati Bantul pada tanggal 18 November 2019.

Data panggilan darurat masuk sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020

Jumlah Panggilan Masuk dari Bulan Januari – November 2020	
Bulan	**Jumlah Panggilan**
Januari	41.852
Februari	28.915
Maret	42.168
April	31.849
Mei	34.385
Juni	30.899
Juli	25.124
Agustus	27.608
September	27.982
Oktober	29.069
November	16.133
Total	**335.984**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi dalam penerapan *Digital Government Service.*

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal

Kegiatan ini berupa pemanfaatan radio komunikasi internal untuk mendukung komunikasi di beberapa Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta *repeater*-nya.

2) Penambahan Saluran Telepon

Saluran telepon kini telah menjangkau seluruh perangkat daerah dan kapanewon.

3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2021. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Berikut pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik

No	Domain	Nama Sistem	PD Pengampu	Pelaksanaan Penilaian
1	https://sipentol.bantulkab.go.id/	Sistem Pendaftaran Online Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan	19-24 Mei'21
2	https://sidakui.bantulkab.go.id/	Aplikasi Sistem Informasi Data Koperasi UMKM dan Industri (SIDAKUI)	DKUKMP	29 Mar - 1 Apr'21 7 - 9 Apr'21 26 - 29 Apr'21
3	https://simponi.bantulkab.go.id/	Sistem Informasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terkini Kabupaten Bantul	Disdikpora	15-16 Sep'20 22-23 Sep'20 16-21 Okt'20 25-29 Jan'21
4	https://bkk.bantulkab.go.id/	Aplikasi BKK Disnakertrans	Disnakertrans	16-25 Mar'21
5	simelog.*	Sistem Manajemen Logistik Obat	Dinkes	8-10 Mar'21 21-23 Apr'21

No	Domain	Nama Sistem	PD Pengampu	Pelaksanaan Penilaian
				24-27 Mei'21
6	https://sisklb.bantulkab.go.id/	Sistem Informasi Kejadian Luar Biasa	Dinkes	22 Okt'20 4-6 Nov'20 16-19 Nov'20 1-3 Mar'21
7	https://smartcity.bantulkab.go.id/	Profil *Smart City* Pemkab Bantul	Diskominfo	1-5 Feb'21
8	https://simpatik.bantulkab.go.id/	Aplikasi SIM Data Pariwisata	Dinpar	14-15 Sept'20 12-13 Apr'21
9	bukutamudiskominfo.kab-bantul.id	Aplikasi Buku Tamu	Diskominfo	12-21 Apr'21

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 diolah

Pelaksanaan asesment dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen selama periode tahun 2021 sampai dengan 1 Juni 2021 sebagai berikut:

Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah Aplikasi
1.	Aplikasi Baru		18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2.	Aplikasi Lama		3
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	0
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	3
	Total Aplikasi yang dinilai		21

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

4) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap

suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data-data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa:

1. Layanan penanggulangan dan pemulihan
2. Layanan penanganan kerawanan
3. Layanan penanganan artifak.

Selama tahun 2020 terjadi 12 insiden dengan rincian dan masing-masing penanganannya sebagai berikut:

Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020

No.	Jenis Aplikasi	Tanggal Laporan	Jenis Serangan	Penanganan
1.	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	31 Maret 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* sementara selama upgrade aplikasi; Perbaikan selesai pada akhir tahun 2020
2.	Sistem Informasi	24 Maret 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	Perbaikan
3.	Sistem Informasi	5 Mei 2020	Akses server via web menggunakan *backdoor* yang ditanamkan di server	Perbaikan
4.	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	19 Juni 2020	Ransomware	*Recovery* menggunakan data backup
5.	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	27 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* sementara, perbaikan menunggu anggaran tahun depan
6.	Sistem Informasi dan layanan	27 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* permanen sudah tersedia aplikasi pengganti
7.	Sistem Informasi	28 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan

No.	Jenis Aplikasi	Tanggal Laporan	Jenis Serangan	Penanganan
8.	Sistem Informasi	29 Juli 2020	Terdeteksi Malware/ *Backdoor* di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
9.	Sistem Informasi dan Web Profil	9 September 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	Perbaikan
10.	Sistem Informasi	30 September 2020	Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
11.	Sistem Informasi	5 Oktober 2020	Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
12.	*Abuse Report*	21 Desember 2020	Malware pada perangkat end point (pc/ laptop)	*Tracing* dan blok ke ip tujuan serangan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

c. Capaian Indikator Kegiatan

Capaian indikator persandian tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	NA	NA	NA	10	15
2.	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	NA	NA	NA	43	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Kebudayaan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan di Indonesia, tidak hanya memunculkan bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang dalam masyarakat namun sebagai modal pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa konsep. kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni.

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

Kabupaten Bantul memiliki setidaknya tiga jenis kelompok seni dan budaya yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul, yaitu seni musik, seni tari dan seni teater.

Dengan berkembangnya kelompok seni maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasikan karya-karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang

merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) melaksanakan program kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana APBD dan Dana Keistimewaan DIY melalui mekanisme BKK.

a. Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Budaya

Dinas Kebudayaan (Kunda Kabudayan) mulai tahun 2017 mendapat Dana Keistimewaan dari Provinsi DIY. Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai tahun 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk membina dan memberi ruang berekspresi seni dan budaya, serta pemeliharaan warisan budaya.

Sumber Data Nomor Induk Kesenian (NIK) pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2020 menunjukkan sejumlah 1.156 kelompok seni yang memiliki register kesenian berupa NIK, namun hanya 1.106 kelompok seni yang aktif. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya berupa :

a. Festival : Jathilan, Wayang, Reog, Dolanan Anak, Hadroh, Musik Religi, Teater, Tari, Koes Plus-an, Campursari, Gejog Lesung, Montro, Bergodo;
b. Pentas seni : Pentas Wayang, Kethoprak, Jathilan, Reyog, Tari, Hadroh, Musik Religi, Campursari dan Koes Plus-an.

Tabel berikut ini adalah fasilitasi kelompok seni yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menggunakan anggaran Dana Keistimewaan DIY.

Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Fasilitasi Kelompok Seni	488	498	228	239

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pada masa pandemi Covid-19 yang dirasakan pada tahun 2020, fasilitasi pertunjukan kelompok seni dilakukan secara daring, di gedung tertutup, tanpa penonton dan hanya untuk kesenian yang tidak terlalu banyak melibatkan peserta. Pertunjukan seni tetap dilaksanakan meskipun secara daring untuk selalu meningkatkan produktivitas pekerja seni. Kegiatan Gelar Budaya Jogya di Propinsi DIY, juga dikemas secara daring yaitu Festival Kethoprak, Festival Sendra Tari, dan Festival Teater.

Program kegiatan untuk pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda berupa pelestarian cagar budaya. Kabupaten Bantul memiliki 126 cagar budaya yang tersebar hampir di seluruh kapanewon, dengan kepemilikan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan. Terdapat 126 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 disajikan secara terperinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
1	Kompleks Makam Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Tempat wisata religi	Keraton
2	Kompleks Makam Banyusumurup	Girirejo, Imogiri	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Tempat wisata religi	Keraton
3	Monumen Bibis	Bangunjiwo, Kasihan	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
4	Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Gubernur DIY	Kantor Sekretariat Juru Kunci Purloyo	Keraton
5	Bangunan Cagar Budaya Joglo R. Ngt. Hadi Puspito	Sumberagung, Jetis	SK Gubernur DIY	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
6	Bangunan Cagar Budaya Gereja Ganjuran	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Gubernur DIY Tahun 2000	Tempat ibadah dan wisata religi	Swasta
7	Bangunan Cagar Budaya Joglo Bp. Miji Yuwono	Trienggo, Bantul	SK Gubernur DIY Tahun 2002	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
8	Bangunan Cagar Budaya Joglo Broto Sudarmo	Gilangharjo, Pandak	SK Gubernur DIY Tahun 2002	Masih ditempati sebagai rumah tinggal	Pribadi
9	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening	Wukirsari, Imogiri	SK Gubernur DIY Tahun 2004	Bangunan tempat tinggal dan Museum Batik	Pribadi
10	Struktur Cagar Budaya Saluran air PG Pajangan	Sendangsari, Pajangan	SK Gubernur DIY Tahun 2008	Sarana irigasi	PSDA DIY
11	Bangunan Cagar Budaya Joglo Yusuf Sudirman	Jambidan, Banguntapan	SK Gubernur DIY Nomor 210/KEP/2010	Bangunan tempat tinggal	Pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
12	Kawasan Cagar Budaya Kotagedhe	Banguntapan	SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	Tempat wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
13	Kawasan Cagar Budaya Imogiri	Imogiri	SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	Tempat wisata religi	Keraton
14	Kawasan Cagar Budaya Kerta - Plered	Pleret	SK Gubernur DIY Nomor 211/KEP/2019	Tempat wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
15	Bangunan Kompleks Masjid Mataram Kotagede	Jagalan, Banguntapan	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - SK Bupati No. 458 Th 2016	Tempat ibadah dan wisata religi	Keraton
16	Kompleks Makam Imogiri	Girirejo, Imogiri	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - SK Bupati No. 458 Th 2016	Tujuan wisata religi segala umat beragama	Keraton
17	Bangunan Cagar Budaya Panggung Krapyak	Panggungharjo, Sewon	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2020 - SK Bupati No. 458 Th 2016	Bangunan monumental	Keraton
18	Struktur Cagar Budaya Dam Kamijoro	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
19	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Palbapang	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan sebagai kantor terminan Palbapang oleh Dinas Perhubungan Bantul	KAI
20	Bangunan Cagar Budaya Cagak ANIEM Palbapang	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 458 Th 2016	Tinggalan Tiang Listrik Peninggalan Kolonial masa Hindia Belanda	PLN DIY
21	Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan sebagai tempat tinggal	Pribadi
22	Situs Cagar Budaya Candi Gampingan	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
23	Situs Cagar Budaya Candi Mantup	Baturetno, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
24	Situs Cagar Budaya Petirtaan Payak	Srimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
25	Benda Cagar Budaya Watu Gilang Baturetno	Baturetno, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
26	Situs Cagar Budaya Gua Siluman	Banguntapan, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan tempat untuk menepi atau bersemedi	Keraton
27	Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang	Seloharjo, Imogiri	SK Bupati No. 458 Th 2016	Wisata Sejarah	BPCB DIY
28	Benda Cagar Budaya Stoomwals PU	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 416 Th 2017	Tinggalan masa Kolonial Hindia-Belanda	DPUPKP BANTUL
29	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
30	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Sonopakis	Ngestiharjo, Kasihan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Perlu tindakan penyelamatan dari pembangunan rumah warga sekitar	Keraton
31	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Ambarbinangun	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Wisma atlet oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY	Keraton
32	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo	Tirtohargo, Kretek	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
33	Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
34	Struktur Cagar Budaya Dam Makam Mbulan	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
35	Benda Cagar Budaya Arca Hayasya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
36	Benda Cagar Budaya Arca Mukunda	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
37	Benda Cagar Budaya Arca Muraja	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
38	Benda Cagar Budaya Arca Sukarasya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
39	Benda Cagar Budaya Arca Vajrabhasa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
40	Benda Cagar Budaya Arca Vajradhupa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
41	Benda Cagar Budaya Arca Vajragantha	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
42	Benda Cagar Budaya Arca Vajragiti	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
43	Benda Cagar Budaya Arca Vajrakarma	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
44	Benda Cagar Budaya Arca Vajralasi	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
45	Benda Cagar Budaya Arca Vajraloka	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
46	Benda Cagar Budaya Arca Vajranrtya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
47	Benda Cagar Budaya Arca Vajrapani	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
48	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraga	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
49	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraksa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
50	Benda Cagar Budaya Arca Vajrasphota	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
51	Benda Cagar Budaya Arca Vamsa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
52	Benda Cagar Budaya Arca Vinayaka	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
53	Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit	Pleret, Pleret	SK Bupati N0. 595 Th 2018		Pribadi
54	Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 596 Th 2018	Tempat wisata religi	BPCB DIY
55	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kretek Abang Madukismo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No.597 Th 2018	Digunakan untuk jembatan oleh warga	DPUPKP BANTUL
56	Struktur Cagar Budaya Sendang Kasihan	Tamantirto , Kasihan	SK Bupati No. 598 Th 2018	Tempat wisata religi	Keraton
57	Bangunan Cagar Budaya Masjid Wonokromo	Wonokromo, Pleret	SK Bupati No.599 Th 2018	Tempat ibadah	Keraton
58	Benda Cagar Budaya Mushaf Bejen	Bantul, Bantul	SK Bupati No. 600 Th 2018	Koleksi pribadi oleh pemilik	Pribadi
59	Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Stasiun Sedayu	Argosari, Sedayu	SK Bupati No. 601 Th 2018	Aset KAI yang tidak terpelihara	KAI

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
60	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 602 Th 2018	Pembatas wilayah sendang	BPCB DIY
61	Benda Cagar Budaya Arca Agastya di Kompleks Sendang Kasihan	Tamantirto , Kasihan	SK Bupati No. 603 Th 2018		BPCB DIY
62	Bangunan Cagar Budaya Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Tirtonirmolo, Kasihan	SK. Bupati No. 604 Th 2018	Tempat ibadah	Keraton
63	Struktur Cagar Budaya Sumur Gumiling Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 605 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
64	Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 606 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
65	Benda Cagar Budaya Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 607 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
66	Batu Balok Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No.608 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
67	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Winongo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 609 Th 2018	Gudang oleh warga	KAI
68	Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 610 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
69	Benda Cagar Budaya Umpak Kerto	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 611 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
70	Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 612 Th 2018	Tempat wisata religi semua umat beragama	BPCB DIY
71	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Bantul	Bantul, Bantul	SK Bupati No. 613 Th 2018	Dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh masyarakat	KAI
72	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 614 Th 2018	Tembok pembatas atau benteng makam	BPCB DIY
73	Struktur Cagar Budaya Sendang Banyuurip	Jatimulyo, Dlingo	SK Bupati No. 615 Th 2018	Tempat wisata religi semua umat beragama	Keraton
74	Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 616 Th 2018	Tujuan wisata religi segala umat beragama	BPCB DIY
75	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api Winongo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 617 Th 2018	Jembatan penyebrangan warga	KAI
76	Benda Cagar Budaya Arca Ganesha di Kompleks Sendang Kasihan	Tamantirto, Kasihan	SK Bupati No. 618 Th 2018		BPCB DIY
77	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Dwiningsih	Canden, Ketis	SK Bupati No. 619 Th 2018	Bangunan tempat tinggal dan perkumpulan masyarakat	Pribadi
78	Struktur Cagar Budaya Gua Surocolo	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 517 Th 2019	Tempat wiata	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
79	Benda Cagar Budaya Yoni Sembungan	Bangunjowo, Kasihan	SK Bupati No. 518 Th 2019		
80	Bangunan Masjid Pathok Negoro Babadan	Banguntapan, Banguntapan	SK Bupati No. 519 Th 2019	Tempat ibadah	Keraton
81	Bangunan Cagar Budaya Pasar Angkruksari	Donotirto, Kretek	SK Bupati No. 520 Th 2019		Dinas Perdagangan
82	Bangunan Cagar Budaya Bale palereman (Transit Jenazah Raja-raja Mataram)	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 521 Th 2019		
83	Bangunan Cagar Budaya Langgar Dhuwur	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 522 Th 2019		
84	Banguna Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Mojosari	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 523 Th 2019	Aula, gedung TK ABA Mojosari	Pemerintah Kalurahan Sitimulyo
85	Bangunan Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Madigondo	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 524 Th 2019	Sebagai Persatuan PAUD	Pemda Bantul
86	Banguna Cagar Budaya Rumah Tradisional Dinas kebudayaan DIY (Bekas Milik Bu Nur Johan)	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 525 Th 2019	Sebagai Sarana untuk masyarakat	Dinas Kebudayaan DIY
87	Struktur Cagar Budaya Makam Syeh Maulana Maghribi	Parangtritis, Kretek	SK Bupati No. 526 Th 2019	Tempat wisata religi	Keraton

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
88	Situs Cagar Budaya Gunung Mungker	Srigading, Sanden	SK Bupati No. 527 Th 2019		Tanah milik warga
89	Bangunan Cagar Budaya Candi Gereja Hati Kuds Tuhan Yesus	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Bupati No. 528 Th 2019	Wisata Religi	Pengurus Gereja Papa Miskin
90	Struktur Cagar Budaya Cepuri Parangkusumo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 529 Th 2019	Wisata Sejarah dan Religi	Keraton
91	Bangunan Cagar Budaya Pasar Sangkeh	Srigading, Sanden	SK Bupati No. 530 Th 2019	Pasar	Pemerintah Kalurahan Srigading
92	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 531 Th 2019	Tempat tinggal dan kantor juru kunci	Keraton Surakarta
93	Struktur Cagar Budaya Makan Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 532 Th 2019	Wisata Religi	Keraton
94	Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 533 Th 2019	Tempat Ibadah	Keraton
95	Struktur Cagar Budaya Jagang Cepori Keraton Koragede	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 534 Th 2019		BPCB DIY
96	Bangunan Cagar Budaya Pasar Gatak	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Bupati No. 535 Th 2019	Los Pasar	Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
97	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik UGM	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 536 Th 2019	Tempat tinggal dan wisata edukatif	UGM
98	Bangunan Cagar Budaya Monumen Segoroyoso	Segoroyoso, Pleret	SK Bupati No. 537 Th 2019		Dinas Sosial Bantul
99	Bangunan Cagar Budaya Rumah Singgah Gerilya Jenderal sudirman	Parangtritis, Kretek	SK Bupati No. 538 Th 2019	Pos Napak tilas Rute Gerilya oleh Taruna Akmil	Pribadi
100	Struktur Cagar Budaya Sendang Seliran	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 539 Th 2019	Tempat wisata religi semua umat beragama	Kraton
101	Omah Demamit	Seloharjo, Pundong	No. 688 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Gudang	pribadi
102	Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 689 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Kolam renang umum	pribadi
103	Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 690 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Kamar mandi	pribadi
104	Pagar Komplek Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 691 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Pembatas tegalan	pribadi
105	SDN 1 Pundong	Srihardono, Pundong	No. 692 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Sarana pendidikan	Disdikpora Bantul
106	Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto	Argodadi, Sedayu	No. 693 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	Pribadi
107	Song Kamal	Srimulyo, Piyungan	No. 694 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tirakat	Di atas Tanah Sultan Ground
108	Rumah Tradisional Jawa milik Cokro	Srimulyo, Piyungan	No. 695 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
	Subroto				
109	Makam Sunan Geseng	Srimulyo, Piyungan	No. 696 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat wisata religi	Kraton
110	Rumah Singgah Soedirman	Srimartani, Piyungan	No. 697 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi
111	Makam KRT Mangunegoro Bupati Bantul I	Sitimulyo, Piyungan	No. 698 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat wisata religi	Pemerintah Kalurahan Sitimulyo
112	Arca Agastya Nomor Inventaris BG. 1815	Guwosari, Pajangan	No. 703 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
113	Arca Bodhisattwa Padmapani BG. 575	Argodadi, Sedayu	No. 704 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
114	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.b	Sitimulyo, Piyungan	No. 705 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
115	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.c	Sitimulyo, Piyungan	No. 706 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
116	Arca Bodhisattwa Candralokeswara Nomor Inventaris BG.1469	Sitimulyo, Piyungan	No. 707 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
117	Arca Jembhala Nomor Inventaris BG. 1474	Sitimulyo, Piyungan	No. 708 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
118	Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475	Sitimulyo, Piyungan	No. 709 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
119	Arca Siwa dan Parwati Nomor Inventaris BG. 1252	Baturetno, Banguntapan	No. 710 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
120	Arca Siwa Nomor Inventaris BG. 349	Sitimulyo, Piyungan	No. 711 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
121	Koleksi Emas Nomor Inventaris BG. 1471 a-i	Sitimulyo, Piyungan	No. 712 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
122	Pasar Sungapan	Argodadi, Sedayu	No. 713 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Los pasar	Dinas Perdagangan Bantul
123	Rumah Indis milik Bapak Muhadi Djajus	Sitimulyo, Piyungan	No. 714 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi
124	SD Kanisius Ganjuran	Sumbermulyo, Bambanglipuro	No. 715 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Sarana pendidikan	Yayasan Kanisius
125	Penginapan John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 716 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Penginapan	pribadi
126	Rumah Tradisional milik Bapak Raditya Wahyu Kumara	Srigading, Sanden	No. 717 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Data Budaya Tak Benda yang merupakan potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2019 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ada 18 jenis, disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul

NO	DATA BUDAYA TAK BENDA (POTENSI WBTB) DI BANTUL	DOMAIN / OBJEK YANG DIKAJI	DITETAPKAN	
			Register	SK Kemendikbud
1	Nama INDUSTRI GERABAH KASONGAN Lokasi Kalurahan Kasongan, Kasihan, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 192864/MPK.F /DO/2013 16 Desember 2013	No. 238 / M / 2013 13 Desember 2013
2	Nama BLANGKON YOGYAKARTA Lokasi Pathen, Sumberagung, Jetis, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 60085/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
3	Nama MONTRO Lokasi Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul	Seni Pertunjukan	No. 60075/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
4	Nama WEDANG UWUH IMOGIRI Lokasi Kalurahan Imogiri, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 60087/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
5	Nama SRANDUL	Seni Pertunjukan	No. 60077/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
6	Nama REBO PUNGKASAN Lokasi Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	No. 65675/MPK.E/ KB/ 2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
8	Nama NINI THOWONG YOGYAKARTA Lokasi Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Bantul	Seni Pertunjukan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
9	Nama BATIK NITIK YOGYAKARTA Lokasi Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
10	Nama GEJOG LESUNG YOGYAKARTA Lokasi Padukuhan Bendo, Imogiri, Imogiri	Seni Pertunjukan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
11	Nama BENTHIK YOGYAKARTA Lokasi Kampung dolanan, Panggungharjo	Tradisi dan Ekspresi Lisan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
12	Nama ANDONG YOGYAKARTA	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 103617/MPK.E/	No. 362 /M/ 2019

NO	DATA BUDAYA TAK BENDA (POTENSI WBTB) DI BANTUL	DOMAIN / OBJEK YANG DIKAJI	DITETAPKAN	
			Register	SK Kemendikbud
	Lokasi Bengkel Pendowo Limo, Pandeyan, Patalan, Jetis		KB/2019 8 Oktober 2019	24 September 2019
13	Nama MIE LETHEK Lokasi Srandakan, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
14	Nama SHOLAWAT MAULUD JAWI Lokasi Jejeran, Wonokromo, Pleret	Tradisi dan Ekspresi Lisan	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
15	Nama CEMBENGAN YOGYAKARTA Lokasi Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul PT Madu Baru	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
16	Nama SATE KLATAHAK Lokasi Jejeran, Pleret, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
17	Nama KERAJINAN KULIT TATAH SUNGGING YOGYAKARTA Lokasi Pucung, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
18	Nama PEWARNA ALAMI YOGYAKARTA Lokasi Giriloyo,Wukirsari, Imogiri,Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan di tingkat desa/kalurahan Desa/Kalurahan adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimiliki.

Perkembangan desa/ kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 Kalurahan telah ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan

budaya melalui rintisan desa/kalurahan budaya. Data rintisan desa/kalurahan budaya yang berpotensi naik status jadi desa/kalurahan budaya terdapat Sembilan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020. Adapun Sembilan rintisan desa/kalurahan budaya yaitu Kalurahan Gadingsari (Sewon), Parangtritis (Kretek), Girirejo dan Sriharjo (Imogiri), Srimulyo (Piyungan), Muntuk (Dlingo), Sendangsari (Pajangan), Tamantirto (Kasihan), dan Argodadi (Sedayu).

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dengan adanya UU Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, menjadi tampak jelas bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam segala lini pembangunan. Undang-Undang ini mengamanatkan agar kebudayaan yang ada diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui tindakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasar Undang-Undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapatkan apresiasi. Salah satu dukungan Pemerintah dalam mengapresiasi daerah dalam mengelola kebudayaannya tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang telah dikembangkan oleh UNESCO yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Indeks ini bukan mengukur nilai budaya, namun diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. IPK dapat menjadi data dasar yang informatif dalam memonitor dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan, selain itu dapat menjadi suatu tolok ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan, sebagaimana Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan IPK untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya pencapaian pembangunan kebudayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun IPK dengan menggunakan pendekatan metode survey dan kuisioner untuk mengukur 7 dimensi pembangunan kebudayaan.

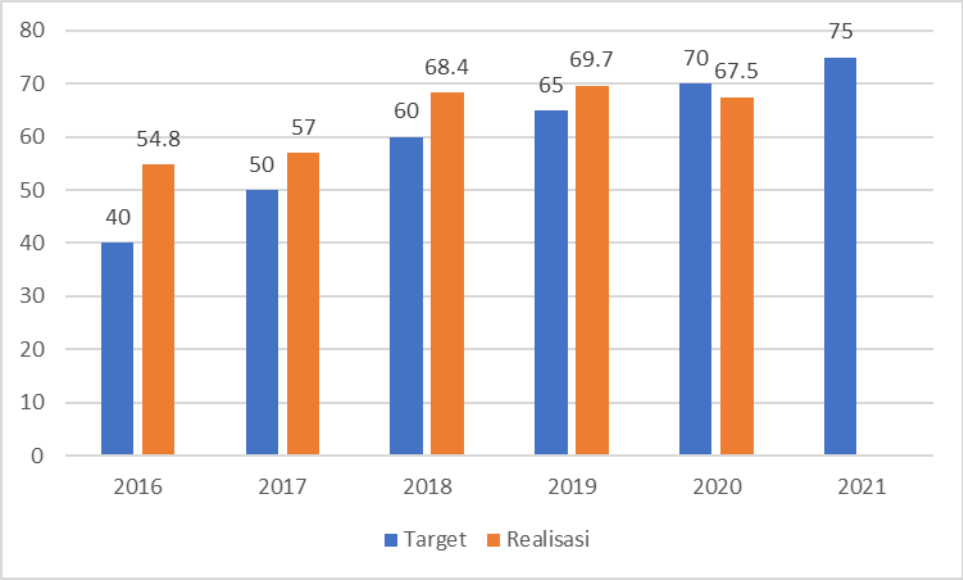

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Capaian kinerja Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul, terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 telah melampaui target capaian. Pada tahun 2020 IPK Kabupaten Bantul dibawah target yaitu 67,5. Kabupaten Bantul telah berusaha memetakan capaian kinerja pembangunan kebudayaan sejak tahun

2016, langkah tersebut diperkuat dengan kegiatan inventarisasi objek-objek kebudayaan serta menggali hambatan serta dukungan dalam pembangunan kebudayaan di wilayah ini. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY tertinggi Nasional yaitu sebesar 73,79.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Desa/Kalurahan Budaya	9	10	10	12	12
Cakupan Perlindungan Warisan Budaya (%)	NA	NA	-	24	24

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021.

2.3.1.2.17. Perpustakaan

a. Jumlah Perpustakaan

Budaya literasi (baca,tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpusatakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling sebanyak 192 lokasi, antara lain di sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Selain itu layanan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis di lokasi wisata dan *event-event* tertentu seperti *Car Freeday*. Layanan mandiri dilakukan di 57 lokasi dan

pelayanannya dilakukan selama 7 hari kerja. Semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kapanewon dan 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Pelayanan perpustakaan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dan Jum'at. Untuk Senin – Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 dan Jumat dari pukul 08.00 – 14.30 sedangkan untuk hari Sabtu - Minggu dilayani dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, dan pelayanan diliburkan pada saat hari libur nasional dan cuti bersama. Namun pada masa pandemi ini perpustakaan hanya melayani pengunjung pada hari Senin sampai Jumat pada jam 07.30-14.30 WIB, namun untuk layanan keliling dihentikan sementara.

Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Kalurahan	75
3	Perpustakaan SD	395
4	Perpustakaan SMP	116
5	Perpustakaan SMA/SMK	99
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
	Jumlah	864

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 75 kalurahan yang ada di Bantul seluruhnya sudah mempunyai perpustakaan. Perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dari 395 SD/MI di Bantul seluruhnya mempunyai perpustakaan sekolah. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari 116 sekolah seluruhnya mempunyai perpustakaan.

Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca

No	Tahun	Jumlah
1	2017	3
2	2018	10
3	2019	17

No	Tahun	Jumlah
4	2020	0
	Jumlah	30

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 telah terbangun 30 pojok baca. Sedangkan tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan pojok baca karena anggaran *direfocusing* untuk penanganan Covid-19.

Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi

No	Perpustakaan yang Terakreditasi	Jumlah s.d Th. 2020
1	Perpustakaan Desa/Kalurahan	2
2	Perpustakaan SD	12
3	Perpustakaan MI	0
4	Perpustakaan SMP	7
5	Perpustakaan MTs	3
7	Perpustakaan Khusus	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan sehingga dengan semakin banyak perpustakaan di Bantul yang terakrediatsi semakin baik kinerja layanan yang pada akhinya akan semakin banyak siswa dan masyarakat yang berkunjung. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang ada, masih sedikit perpustakaan yang terakreditasi. Untuk perpustakaan desa/kalurahan baru 2,67% yang terakreditasi, 3,03% untuk jenjang SD, 0% MI, 7,6% SMP dan 12,5% MTs. Untuk mendukung akreditasi dilaksanakan dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau

berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	345.368	518.693	732.826	841.154	140.366

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 345.368 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 menjadi 841.154 orang pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

Pada tahun 2020 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 140.366, jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2019. Penurunan ini disebabkan pandemi covid. Untuk mengurangi risiko penularan covid, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan dengan mewajibkan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk perpustakaan.

Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020

Jenis Pemustaka	Usia	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		Jumlah Pengunjung Perpustakaan
		Laki-laki	Perempuan	
Paud/TK	3-6 th	672	1.163	1.835
SD	7-12 th	45.424	63.829	109.253

Jenis Pemustaka	Usia	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		Jumlah Pengunjung Perpustakaan
		Laki-laki	Perempuan	
SMP	13-15 th	1.111	2.392	3.503
SMA	16-18 th	1.545	2.755	4.300
Mahasiswa	>18 th	852	1.692	2.544
Pegawai	>18 th	3.226	6.895	10.121
Umum/lain-lain	>18 th	3.038	5.772	8.810
Jumlah		55.868	84.498	140.366

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa 83,48% pengunjung perpustakaan adalah yang masih bersekolah. Bila dilihat dari jenjang pendidikan, siswa sekolah dasar merupakan pengunjung paling banyak, yaitu 109.253 (77,83%). Hal ini akuimerupakan hal yang menggembirakan, karena dapat menjadi adanya petunjuk minat baca. Sayangnya, data pengunjung SMP, SMA dan mahasiswa masih jauh selisihnya. Diharapkan apabila pandemi covid berakhir pemustaka yang datang ke perpustakaan meningkat kembali. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat, menambah inovasi layanan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan *online*.

c. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 107.360 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 39.040 judul. Hal ini sudah memenuhi standar perpustakaan tipe A dengan koleksi sebanyak 17.000 judul. Selain itu, juga terdapat koleksi digital melalui *e-book* sebanyak 263 judul, masing-masing judul ada 8 buah, sehingga jumlah sebanyak 2.104 buah. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Judul	38.782	40.300	39.040	39.547	39.812
Buku	102.292	104.300	107.360	113.897	114.162
e-book	0	0	2.104	2.104	3.372

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan
Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%)	28,5	29	37,72	31	-83,3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021

2.3.1.2.18. Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan

manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 16 orang tenaga arsiparis dan 156 orang pengelola kearsipan dengan jumlah arsip yang dikelola sebanyak 2.649 dokumen arsip statis. Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengusulkan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia(ANRI) berupa arsip Eks Keuangan kelompok B sebanyak 3.176 nomorberkas, dan arsip permanen sebanyak 375 nomorberkas.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

a. Pengawasan dan Penilaian arsip

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 52 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH PD	
		2019	2020
1	Memuaskam	0	2
2	SangatBaik	5	3
3	Baik	14	30
4	Cukup	7	4

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH PD	
5	Kurang	26	15
	Jumlah	52	54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 baru sebanyak 5 perangkat daerah yang pengelolaan arsipnya dalam kategori sangat baik, 14 PD kategori baik, sementara 33 PD lainnya dalam kategori cukup dan kurang, sementara untuk tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah PD. yang pengelolaan arsipnya masuk dalam kategori sangat baik dan baik, yaitu menjadi sejumlah 33 PD.

b. Akuisisi Arsip

Selain melakukan pengawasan dan penilaian pengelolaan kearsipan, sejak tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
1.	2017	Tokoh keris	Mbah Djiwodiharjo
2.	2017	Pelukis	Ki Joko Pekik
3.	2018	Tokoh dalang	Ki Timbul Hadiprayitno
4.	2018	Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan	-
5.	2019	Tokoh batik “Jogo Pertiwi”	-
6.	2020	Tokoh “seniman dagelan	Ki Ngabdul

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan akuisisi sebanyak 6 arsip.

c. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi acuan dalam pengelolaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 4.427 penomoran arsip, secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020

No	Jenis Arsip	Sudah dibuat daftar arsip/ temubalik	Belum dibuat daftar arsip/ temubalik	Jumlah
1.	Arsip Aktif	359	101	460
2.	Arsip Inaktif	872	339	1211
3.	Arsip Statis	937	384	1321
4	Arsip yang Dialih mediakan	1346	89	1435
	Jumlah Total	3514	913	4427

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 359 arsip (78,04 %), Arsip in aktif sebanyak 872 arsip (72 %), Arsip statis sebanyak 937 arsip (70,93 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 1346 arsip (93,73 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.427 nomor arsip.

d. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik (%)	27	33	46,2	52	64,8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas diketahui bahwa semakin banyak perangkat daerah mampu menyelenggarakan kearsipan sesuai standar. Dari 54 perangkat daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 27% perangkat daerah telah menyelenggarakan kearsipan sesuai standard dan pada tahun 2020 menjadi 35 perangkat daerah atau sebanyak 64,8%.

2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

a. Produksi Perikanan Budidaya

Terdapat 7 jenis ikan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Bantul, yaitu gurami, nila, lele, bawal, patin, mas dan udang vanamei. Lele, nila dan gurami merupakan jenis ikan yang sangat diminati untuk dibudidayakan.

Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas	Produksi (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020**
1	Gurami	1.860.867	2.028.830	2.164.370	1.723.948	1.672.601
2	Nila	1.924.565	2.114.000	2.567.437	2.618.329	2.482.902
3	Lele	6.738.202	7.094.430	7.028.122	7.425.503	7.498.039
4	Bawal	258.883	282.250	179.914	218.661	236.653
5	Patin	40.150	29.370	21.421	36.828	103.535
6	Mas	34.018	37.450	37.444	42.888	35.876
7	Udang Vanamei	507.038	440.890	292.292	374.440	599.444
JUMLAH		**11.363.724**	**12.027.236**	**12.291.000**	**12.440.597**	**12.629.050****

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,51 % atau 188.453 kg dari 12.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Produksi pada 6 jenis ikan mengalami peningkatan dan didominasi lele. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat yaitu teknologi Matlair (hemat lahan dan air), berupa kolam bulat dengan *inlet outlet* dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Penurunan produksi ikan budidaya terjadi pada gurami, karena langkanya ketersediaan bibit gurami dan adanya penyakit ikan yang menyebabkan kematian gurami.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya. Pada tahun 2020 terdapat penambahan

RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Adanya teknologi Matlair menjadi daya tarik tersendiri karena mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas, dapat diusahakan di pekarangan.

Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	RTP Budidaya (unit)
1	2016	5.176
2	2017	5.176
3	2018	5.176
4	2019	5.216
5	2020	5.416

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pengembangan budidaya perikanan didukung dengan pengembangan benih ikan melalui Balai Budidaya Ikan (BBI) yang berlokasi di Barongan, Sanden, Gesikan, Krapyak dan Pundong.

Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Produksi Benih Ikan (ekor)
1	2016	2.600.854
2	2017	3.378.975
3	2018	4.629.118
4	2019	4.530.470
5	2020	4.118.504

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan di atas pada tahun 2020 diproduksi 4,11 juta ekor benih ikan dari BBI. Jika sandingkan dengan produksi perikanan budidaya (II.3-141) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 produksi ikan khususnya gurami, nila dan lele berkisar 10 juta s.d 11 juta kg. Artinya BBI belum mampu memenuhi kebutuhan benih dan kekurangan benih ini dipenuhi dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas pada UPR, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasarana pembesaran ikan maupun perbenihan ikan. Selain itu juga

dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan.

b. Produksi Perikanan Tangkap

Kabupaten Bantul memiliki pantai sepanjang 13,5 km dan terdapat usaha perikanan tangkap yang beraktifitas pada 5 unit TPI yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tangkap laut	234,30	624,75	473,01	497,77	470,14
2	Produksi tangkap perairan umum	282,20	260,60	295,43	305,08	354,73
Jumlah		516,50	885,35	768,44	802,85	824,87

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar -27,63 ton atau -5,5%. Sedangkan produksi tangkap perairan umum mengalami peningkatan 49,65 ton atau 16,2%. Walaupun terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut, namun jenis ikan tangkap laut yang ada di Bantul tergolong dalam ikan ekonomis penting, antara lain ikan bawal dan ikan layur.

Peningkatan produksi ikan di perairan umum didukung program restocking ikan yang pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

c. Potensi Pengembangan Produksi Garam

Pantai selatan Bantul selain kaya dengan potensi ikan, ternyata menyimpan kekayaaan alam yang bisa dijadikan komoditas unggulan salah satunya produksi garam kristal, dengan memanfaatkan air laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi dapat dikembangkan usaha produksi garam. Kegiatan produksi

garam di Bantul berawal dari pelatihan dan bantuan peralatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019.

Produksi garam baru terealisasi pada semester kedua tahun 2020, sejumlah 4.400 kg, dengan luas tambak garam 240 m^2. Lokasi produksi garam berada di Pantai Pandansari Wonoroto, Gadingsari, Sanden. Pada saat ini produksi garam berhenti karena peralatan mengalami rusak. Kegiatan memproduksi garam hanya menjadi usaha sampingan selain mengurus lahan dan sebagai nelayan.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (Ton)	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.453,92

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

2.3.2.2. Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2.	2017	3.711.384	17.090.253.000,00
3.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00
4.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
5.	2020	2.348.313	16.954.700.250,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2020 mencapai Rp16.954.700.250,00. Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
A.	**Daya Tarik Wisata**							
1	Alam	20	20	25	32	55	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	54	59	59	84	129	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Kalurahan Kalurahan Wisata
B.	**Usaha Pariwisata**							
1	Hotel bintang	1	1	3	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	94	117	56	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah	199	225	142	142	142	Unit	

No.	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
A.	**Daya Tarik Wisata**							
	makan							
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	33	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu padusan di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru; dan malam tahun baru di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai macam *event* sebagai berikut:

Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019

NO.	JENIS EVENT
1	Festival Makanan Tradisional
2	Festival Ingkung
3	Festival Mie
4	Festival Lampion
5	Festival Fashion Street
6	Festival Dayung
7	Festival Jogja Air Show (JAS)
8	Festival Malam 1 Syuro
9	Festival Malam 15 Syuro
10	Pentas Jathilan
11	Pentas Campursari
12	Pentas Koes Plus
13	Pentas Akhir Tahun
14	Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis
15	The Harmony Nature dan Culture Orchestra
16	Syimphoni Orkestra
17	Surving Kompetisi

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Namun masih ada ketimpangan jumlah pengunjung yang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Nama Destinasi Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Pantai Parangtritis	2.229.125	2.996.204	2.895.187	2.808.134	1.457.400
Pantai Samas	247.293	668.740	730.875	539.073	237.150
Goa Cemara	84.687				
Pandansimo	140.050				
Kwaru	49.307				
Goa Selarong	36.818	36.652	37.847	38.700	20.130
Goa Cerme	13.520	9.788	7.924	6.828	3.403

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mulai tahun 2017 untuk masuk obyek wisata Pantai Samas, Goa Cemara, Patehan, Kwaru, Pandansimo Baru dan Pandansimo dikenakan satu kali retribusi. Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat ketimpangan kunjungan wisatawan yang signifikan antara Pantai Parangtritis dan pantai lainnya. Kunjungan wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan misalnya di Pantai Parangtriris berkurang 50,06% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarna alami	Maju
2	Kakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
3	Kampungsantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
4	Krebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan Batik Kayu	Maju
5	Tembi	Timbulharjo, Sewon	Kerajinan, Outbond	Maju
6	Karangtengah	Karangtengah, imogiri	Alam, Kerajinan	Maju
7	TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
8	Kebonagung	Kebonagung,	Wisata Pendidikan	Maju

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
		Imogiri	Pertanian	
9	Manding	Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
10	Candran	Kebonagung, Imogiri	Museum tani, Kesenian	Maju
11	Lopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
12	Karangasem	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan	Berkembang
13	Jipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
14	Kiringan	Canden, Jetis	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
15	Puton	Trimulyo, Jetis	Alam	Berkembang
16	Kalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kuliner Ingkung	Embrio
17	Mangrove	Tirtohargo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
18	Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner	Embrio
19	Ngringinan	Palbapang, bantul	Museum, Kuliner	Embrio
20	Mangir	Sendangsari, Pajangan	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Embrio
21	Trimulyo	Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya, Batik	Embrio
22	Jagalan	Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya, Kuliner	Embrio
23	Kampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	Cagar Budaya, Budaya	Embrio
24	Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan	Embrio
25	Juron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan	Embrio
26	Ngembel Mbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya	Embrio
27	Gunung Cilik	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
28	Bendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Embrio
29	Kajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah	Embrio
30	Songgo Langit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
31	Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah	Embrio
32	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam	Embrio
33	Guwosari Selarong	Guwosari, Pajangan	Cagar Budaya, Kerajinan	Embrio
34	Gilangharjo	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya	Embrio
35	Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Embrio
36	Pucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinan Kulit	Embrio

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
37	Imogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
38	Srikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya	Embrio
39	Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah	Embrio
40	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya	Embrio
41	Pandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
42	Kalibuntung	Srihardono, Pundong	Out Bond Pendidikan	Embrio
43	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Kiliner, Seni Budaya	Embrio

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul perlu untuk terus ditingkatkan, terutama di Kawasan Pantai Selatan, sehingga kunjungan wisata tidak hanya terfokus di Pantai Parangtritis. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan dapat dijadikan peluang pengembangan destinasi wisata dengan tetap memperhatikan ciri khas Kabupaten Bantul.

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pariwisata Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.800.800	3.711.384	4.204.422	5.166.615	2.348.313
Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,6	1,8	1,9	2	1,56

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021.

2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB

meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Data Kelompok tani Kabupaten Bantul kurang lebih 850 kelompok tani, 1250 kelompok peternak, dan 500 kelompok perikanan.

a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Komoditas		Tahun				Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi Sawah						
	Luas Panen	29.944,00	30.376,40	31.182,30	29.524	30.077	ha
	Produktivitas (GKG)	61,11	62,60	60,06	63,56	63,29	ku/ha
	Produksi (GKG)	183.980,00	190.144,00	187.280,89	187.655	190.357	ton
	Produksi beras	116.275,00	119.790,67	119.899,86	120.099	121.867	ton
2	Jagung						
	Luas Panen	3.647,00	3.283,00	3.565,10	4.934	3.452	ha
	Produktivitas	69,63	73,78	73,17	70,74	100,18	ku/ha
	Produksi (pipilan kering)	25.394,06	24.221,97	26.085,84	34.903	34.583	ton
3	Kedelai						
	Luas Panen	980,40	969,00	1.213,60	909	616	ha
	Produktivitas	12,87	13,67	15,52	15,90	17,63	ku/ha
	Produksi (wose kering)	1.261,77	1.324,62	1.883,51	1.445	1.086	ton

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 1,21 % atau naik sebesar 2.275 ton dibandingkan tahun 2019. Dari produksi padi sebesar 188.089 ton gabah kering giling (GKG) pada

tahun 2019 menjadi 190.364 ton GKG pada tahun 2020. Peningkatan produksi padi tahun 2020 ini disebabkan kondisi iklim yang kondusif (curah hujan normal), distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya gerakan-gerakan pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan 50.000 kg benih untuk 206 kelompok tani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 2000 ha.

Produksi jagung pada tahun 2020 adalah 34.583 ton sedangkan tahun 2019 adalah 34.903 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,9 % atau turun sebesar 320 ton dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (*Spodotera litura*/exigua) pada fase vegetatif. Ditambah lagi dengan mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Di sisi lain, produktivitas jagung meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 30,06 ku/ha pada tahun 2020. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh penggunaan kualitas unggul benih hibrida bantuan pemerintah dan budidaya yang lebih intensif. Bantuan berupa benih jagung dari pemerintah ini sebesar 15.000 kg diperuntukan kepada 134 kelompok petani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 1000 ha.

Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunanan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan

harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit. Disisi lain, produktivitas kedelai mengalami peningkatan sebesar 1,73 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan produktivitas ini juga berupa dukungan pemerintah berupa bantuan benih dan pupuk. Bantuan pupuk yang diberikan berupa pupuk hayati sebesar 2.100 liter, rhizobium sebesar 175.000 gram, serta herbisida sebesar 2.100 liter yang diberikan kepada 113 kelompok tani.

b. Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas /uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bawang Merah						
	Luas Panen	765	830	835	893	860	Ha
	Produksi	7.859,40	7.910,2	7.979,8	9.427	9.487,6	Ton
	Produktivitas	10,29	9,53	9,61	10,56	11,03	ton/ha
2	Cabai Merah						ket
	Luas Panen	116	366	402	298	561,5	Ha
	Produksi	409,25	1.497,6	1.925,6	1.166,4	1.667,7	Ton
	Produktivitas	3,52	4,09	4,79	3,91	2,97	Ton/Ha
3	Pisang						Ket
	Produksi	6.095	6.095,9	5.902,90	6.727,8	5.109,00	Ton

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 60 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan luas tanam 58 ha dan peningkatan produktifitas sebesar 9,9% dikarenakan adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat.

Produksi cabai merah mengalami penurunan dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019 dan

kemabli meningkat menjadi 1.6677,7 ton di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan penurunan luas panen seluas 104 ha dan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air menjadi terbatas ini, petani mengurangi luas tanam cabenya. Tanaman cabe butuh air yang cukup agar pertumbuhanya optimum.

Pisang juga mengalami peningkatan produksi sebesar 13.97 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 6.727,8 ton pada tahun 2019. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi.

c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas/ Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tembakau Rakyat						
	Luas Panen	172,00	316,00	305,00	175	174	ha
	Produksi	1.023,50	3.044	2.893,00	1.321,3	1.341,5	ku
							(rajang kering)
	Produktivitas	5,95	9,63	9,49	7,64	7,7	ku/ha
							(rajang kering)
2	Tebu						
	Luas Panen	1.174,32	1.207,69	1.022,89	1.042,67	1.096	Ha
	Produksi	41.021,95	29.186,75	38.430,00	39.971,17	43.881,75	ku (hablur)
	Produktivitas	34,93	26,76	37,57	38,33	40,04	ku/ha (hablur)
3	Kelapa						
	Luas Panen	7.064,07	10.464,73	7.050,03	7.107,81	7.120	Ha
	Produksi	91.342,50	112.677	103.931,80	104.794,70	105.836,9	ku (kopra)
	Produktivitas	12,93	15,87	14,74	14,74	14,9	ku/ha (kopra)
4	Kakao						
	Luas Panen	N/A	N/A	7,2	18,1	18,3	Ha
	Produksi	N/A	N/A	28,34	65,18	162	Ku
	Produktivitas	N/A	N/A	3,94	15,16	8,9	Ku/Ha

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 produksi tembakau mengalami peningkatan sebesar 2,28 % atau 30,2 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,18 ku/ha dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen pada tahun 2020 sebanyak 33 Ha.

Produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 173 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,17 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2020.

Produksi tebu tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 9,78 % atau 3.910,31 ku dibanding tahun 2019. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca cukup kondusif untuk budidaya tebu pada tahun 2020.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao mengalami peningkatan dari 153,69 kwintal menjadi 162 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 %. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 7,1 Ha pada tahun 2020 menjadi 18,3 Ha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tanaman kakao yang mulai produktif berbuah.

d. Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak Kecil, dan unggas.

Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis ternak	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
1	Sapi Potong	56.799	56.139	58.895	62.582	66.098	Ekor
2	Sapi Perah	284	80	72	68	68	Ekor
3	Kerbau	544	248	206	218	217	Ekor
4	Kuda	1.977	1.258	1564	1.631	1.583	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi sapi potong tahun 2020 mengalami kenaikan 5,61% atau sebanyak 3.516 ekor dibanding tahun 2019. Peningkatan jumlah populasi sapi potong tidak terlepas dari keberhasilan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang ada di tahun 2018-2019. Jumlah ini diharapkan masih akan terus meningkat mengingat masih berlangsungnya program tersebut.

Sapi perah mengalami penurunan populasi, sedangkan kerbau dan kuda mengalami sedikit peningkatan populasi. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya khusus dalam peningkatan populasi jenis ternak ini.

Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
1	Kambing	108.199	87.195	94.332	95.467	95.104	Ekor
2	Domba	83.790	74.955	77.197	74.441	74.577	Ekor
3	Babi	5.329	3.544	5.024	5.136	4.512	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi kambing sebesar 0,4%, hal ini dikarenakan adanya program Inseminasi Buatan Kambing/Domba bersubsidi. Populasi domba mengalami kenaikan sebesar 0,2%.

Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	**Unggas**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Ket.**
1	Ayam buras	1.019.461	792.862	829.916	966.371	975.546	Ekor
2	Ayam ras petelur	821.587	712.307	759.199	765.137	765.126	Ekor
3	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	1.093.222	1.128.489	1.127.715	Ekor
4	Itik	222.265	163.528	184.978	201.805	202.180	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2020 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit

menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak Kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Daging	14.742.55	14.751.00	14.855.72	15.088.31	15.228.52	Kg
2	Telur	8.072.166	7.184.368	7.329.945	7.789.187	7.782.977	Kg
3	Susu	365.127	184.777	102.484	80.541	82.625	Kg

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Kenaikan produksi daging pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 0,9% dari tahun 2019. Produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang disebabkan karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

e. Jenis Penyakit Hewan Ternak

Jenis penyakit hewan ternak pada tahun 2020 sebanyak 4.984 kasus menurun dari tahun 2019 sebesar 6.209 kasus, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies.

Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Nama Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
1	Helmithosis	2.256	3.221	4.344	4.182	2.809
2	Avitaminosis	221	827	1.301	1.504	724
3	Scabies	173	412	564	723	1.451
	Total	2.650	4.460	6.209	6.409	4.984

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanian Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	9,94	0,113	0,13	1,57	0,71
Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	14,09	7,94	0,85	3,83	2,91
Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	7,8	0,17	0,24	1,09	2,80
Pertumbuhan Produksi Daging	4,24	20,52	0,71	0,57	0,93

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

2.3.2.4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek, hasil kajian menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

2.3.2.6. Perdagangan

a. Pasar Rakyat

Penyebutan pasar rakyat sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tipe Kelas Pasar.

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 7.962 pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 11,52% dari jumlah pedagang yang ada.

Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
1	Pasar Imogiri	A	Harian	99	759	142
2	Pasar Bantul	A	Harian	185	525	114
3	Pasar Piyungan	A	Harian	84	641	78
4	Pasar Niten	A	Harian	119	450	94
5	Pasar Klitikan Niten	B	Harian	-	172	-
6	Pasar Ngipik	B	Harian	20	144	18
7	Pasar Pundong	B	Harian	-	82	51
8	Pasar Celep	B	Harian	17	139	4
9	Pasar Gatak	B	Harian	-	192	10
10	Pasar Jodog	B	Harian	23	118	15

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
11	Pasar Barongan	B	Harian	43	135	63
12	Pasar Pijenan	B	Harian	30	140	15
13	Pasar Dlingo	B	2x dalam 5 hari	18	170	20
14	Pasar Panasan	B	4x dalam 5 hari	24	171	28
15	Pasar Pleret	B	2x dalam 5 hari	71	497	70
16	Pasar Jejeran	B	3x dalam 5 hari	71	497	45
17	Pasar Angkruksari	B	4x dalam 5 hari	46	498	56
18	Pasar Turi	B	1x dalam 5 hari	-	432	27
19	Pasar Sorobayan	B	2x dalam 5 hari	9	138	17
20	Pasar Mangiran	B	2x dalam 5 hari	-	252	19
21	Pasar Gumulan	B	1x dalam 5 hari	-	269	3
22	Pasar Sungapan	B	2x dalam 5 hari	6	88	3
23	Pasar Semampir	B	2x dalam 5 hari	12	233	19
24	Pasar Hewan Pandak	B	2x dalam 5 hari	-	13	-
25	Pasar Hewan Imogiri	B	1x dalam 5 hari	-	-	-
26	Pasar Janten	C	Harian	-	52	-
27	Pasar Grogol	C	Harian	-	29	4
28	Pasar Jragan	C	3x dalam 5 hari	-	43	1
29	Pasar Koripan	C	2x dalam 5 hari	-	53	-
30	Pasar Bendosari	D	2x dalam 5 hari	-	23	-
31	Pasar Sangkeh	D	2x dalam 5 hari	-	4	1
32	Pasar Unggas Bantul	-	1x dalam 5 hari	12	56	-
33	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	58	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Data jumlah pedagang pasar yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 6.718 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran / hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar

Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran. Dinas Perdagangan telah melakukan validasi data pedagang berdasarkan NIK sebanyak 6.152 pedagang, sedangkan sisanya masih dalam proses input.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume ekspor	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06	6.645.724,59	15.841.100
2	Nilai ekspor (US$)	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.454	151.040.882,38	122.334.077,34
3	Jumlah Negara	42	77	83	79	77
4	Macam komoditi	36	34	43	39	49

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021, diolah

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2020 mencapai US$122.334.077,34 turun US$21.600.000 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa, sedangkan negara tujuan ekpor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda

Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurun sebesar 4,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.	2016	1.401,61
2.	2017	1.482,8
3.	2018	1.565,67
4.	2019	1.645,73
5.	2020	1.576,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekspor	7	7	13,96	14,61	-1,3
Jumlah Pasar Tipe A	1	1	1	4	4
Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	6,54	5,79	5,59	5,11	-4,2

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan menurun sangat drastis. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, termasuk menurunnya jumlah permintaan ekspor barang ke luar negeri maupun perdagangan di dalam negeri.

2.3.2.7. Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri Kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785	9.712	31.267	9.824	31.375
2.	Sandang dan Kulit	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175	1.092	8.228	1.186	8.295
3.	Kerajinan Umum	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074	8.574	30.875	8.702	30.920
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057	3.488	30.124	3.520	30.176
5.	Logam dan Jasa	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373	1.493	3.403	1.545	3.456
Jumlah		**21.567**	**95.164**	**22.310**	**99.008**	**23.089**	**102.464**	**24.359**	**103.897**	**24.777**	**104.222**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 335,916 Hektar), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 207,34 Hektar), dan Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 71,51 Hektar). Kawasan Peruntukan Industri Piyungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 261 tahun 2015 ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang berlokasi di Kalurahan Srimulyo dengan pengelola PT. Yogyakarta Isti Parama. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemda sudah menyiapkan dokumen (Masterplan dan FS), selain itu akan dibuat sistem informasi pengembangan industry dimana sistem informasi itu sudah berbasis bidang, termasuk nilai tanah dan lokasi peta bidangnya. Sistem ini diharapkan dapat membantu calon investor untuk menentukan atau memilih lokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu Pajangan. Kemudian akan diprioritaskan

untuk kemudahan pembuatan ijin untuk industri di lokasi KPI Sedayu Pajangan.

b. Industri Kreatif

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50%
2.	2017	41,11%
3.	2018	42.90%
4.	2019	46,20%
5	2020	46,20%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perindustrian di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri	2	3,4	3,49	3,5	1,8

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustian, 2021.

Pertumbuhan industri yang menurun pada tahun 2020 dari 3,5% menjadi 1,8% merupakan cakupan industri kreatif, dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan menurun, demikian juga pasokan bahan baku yang sulit diperoleh.

2.3.2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa
2015	40	131
2016	50	150
2017	12	38
2018	28	94
2019	20	54
2020	20	54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Jumlah KK transmigran pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2020 masih tetap sama dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 20 KK. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran sebagai berikut:

Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Lokasi	Kuota (KK)
1	UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	5
2	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2
3	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	5
4	UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3
5	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara	5
	Jumlah	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Adanya pandemi Covid 19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2021.

2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

2.3.3.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.3.1.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut

Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Evaluasi Kinerja PD	65	70	76,19	76,16	76
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,78	87,57	88,70	86,97	87,89
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4478* (Sangat Tinggi)	3,4
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	73,66 (BB)	77,90 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,85
Persentase Belanja Pegawai	55	52	43,46	47,37	47

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021.

2.3.3.1.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, sekretariat Dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Bantul.
2) Integrasi program kerja DPRD dengan RPJM dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
3) Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	94%	94%	100%	82%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang telah disesuaikan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengalami perubahan target pada awal tahun. Hal ini sebagai dampak realokasi anggaran karena pandemi Covid-19 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga beberapa Raperda perlu dilakukan penyesuaian.

2.3.3.2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.2.1. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka

dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-*Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja utama bidang perencanaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	NA	94,35	105,46	107,31	98,77
Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD	NA	90	106,57	99,40	98,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021
Keterangan: Data “NA” pada 2016 disebabkan adanya perubahan IKU Bappeda.

2.3.3.2.2. Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukan kinerja yang semakian baik. Hal ini ditunjukkan dengan Persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Proporsi Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan untuk Realisasi pendapatan dan Belanja yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.105.405.470.000,00 tidak dicatat dalam LRA TA 2020. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 serta berdasarkan Rekomendasi dari BPK RI. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

No	Bidang Urusan/ Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
2	Persentase SILPA terhadap APBD	14,04%	12,27%	11,41%	12,22%	10,15%
3	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	38,95%	31,92%	31,11%	30,20%	27,09%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,14%	17,76%	18,66%	17,25%	18,23%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	37,22%	45,46%	47,25%	48,32%	41,96%*)
		62,78%	54,54%	52,75%	51,68%	58,04%*)

No	Bidang Urusan/ Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,62%	0,69%	0,82%	0,98%	0,98%
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

*)Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui

efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;

8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online, leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.3.2.3. Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Bantul semakin berkurang. Kondisi tersebut dikarenakan karena banyak PNS di Kabupaten Bantul yang memasuki masa purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan rekruitmen PNS di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarehakan karena proses rekruitmen PNS saat ini sangat tergantung dari persetujuan formasi dari Pemerintah Pusat.

Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	126	7	133	880	478	1358	2006	2781	4787	1801	2662	4463
2017	102	6	108	781	389	1170	1464	2290	3754	1311	2241	3552
2018	93	6	99	709	263	972	1456	2493	3949	1059	1939	2998
2019	86	5	91	664	360	1024	1446	2754	4200	932	1764	2696
2020	77	5	82	613	331	944	1297	2546	3843	824	1671	2495

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pemenuhan kompetensi aparatur dan indeks kepuasan aparatur di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul semakin mendukung bidang tugasnya.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	84	89	89,03	90,14	92,38
Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73,55	81,32	82,44	87,24	88,33

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

2.3.3.2.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan

tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan**.**

Menindaklanjuti *Roadmap* SIDa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” (UPN) Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik (tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain UPN Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan Desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat),

telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penelitian/Validitas/Survei oleh:					
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463	3.310	2.453	152
	- Lembaga Survei	142	39	16	14	22
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:					
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281	318	106	43
Jumlah		4.781	3.783	3.644	2573	217

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.3.3.3 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.3.3.1. Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai

perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
(5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)Internal dan Eksternal	89,5%	90,50%	90,00%	91,78%	90,50%	90,49%	91,00%	91,73%	91,50%	91,5%

Sumber : Inspektorat, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 82 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut

Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Inspektur Pembantu	4	5	1
	Kasubag	3	3	0
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	18	58	40
	P2UPD	10	48	38
	Auditor Kepegawaian	1	5	3
Jumlah		**39**	**121**	**82**

Sumber: Inspektorat, 2021

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Maturitas SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1,92	2	3,075	3,18	3,075

Sumber: Inspektorat, 2021

2.3.3.4. Unsur Kewilayahan

2.3.3.4.1. Kapanewon

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon. Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2020, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (98,48) sedangan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,99).

Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020

No	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rerata IKM
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pundong	85,1	96,9	97,1	90,6	93.74	91,55
2	Sanden	80,2	96,9	95,7	96,0	98.48	89,77
3	Pleret	81,9	96,6	96,8	89,7	95.82	89,00
4	Kretek	80,8	94,8	96,3	91,7	92.29	88,75
5	Bambanglipuro	77,8	97,1	97,4	90,2	95.73	88,22
6	Piyungan	80,2	93,8	95,6	91,6	93.67	88,08
7	Dlingo	77,6	95,1	95,2	91,3	95.96	88,00
8	Imogiri	80,0	89,8	97,2	91,2	92.15	87,64
9	Bantul	77,2	93,2	99,0	91,9	95.70	87,63
10	Pajangan	81,8	94,2	87,4	90,6	95.78	87,31
11	Sedayu	79,0	93,1	95,5	88,0	95.61	87,17

No	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rerata IKM
		2016	2017	2018	2019	2020	
12	Jetis	79,1	94,7	94,8	89,1	92.77	87,13
13	Sewon	76,9	96,1	95,4	88,5	98.48	86,42
14	Kasihan	81,7	83,7	94,9	89,0	94.26	85,69
15	Srandakan	81,6	81,9	86,3	90,3	92.58	84,40
16	Pandak	79,5	82,9	84,6	92,2	92.45	82,50
17	Banguntapan	80,1	80,5	79,8	89,7	92.21	82,01
Rerata IKM		80,0	91,8	93,5	96,17	94,13	87,13

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

2.3.3.5. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.3.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu PILKADA tahun 2020 mencapai 80,32% menurun dibanding PILPRES 2019 mencapai 87,9%, Penurunan disebabkan PILKADA diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19.

b. Potensi Intoleransi

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah intoleransi di masyarakat (%)	0	0	0	2	0
Persentase Pemilih yang Berpartisipasi (%)	0	0	0	87,89	80,32

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021
Keterangan : 2016-2018 tidak diselenggarakan pemilu

2.3.4. Layanan Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada

Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun n+2.

a. Kelembagaan

Urusan keistimewaan di bidang kelembagaan dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *kalurahan*. Penciri keunikan lainnya dilakukan melalui penyelarasan terhadap ketatalaksanaannya. Mendukung pelaksanaan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

b. Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. *Event* kebudayaan berskala nasional di Kabupaten Bantul bertajuk "Festival Segoro Kidul" dimulai pada tahun 2022.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan urusan kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Perkembangan kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 kalurahan ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, terdapat 9 (Sembilan) Rintisan Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020.

Desa/Kalurahan Budaya adalah Desa/Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara,

kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan. Sementara itu aspek pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa *Preneur*, dan Desa Mandiri Pangan.

1) Desa/Kalurahan Budaya

Kabupaten Bantul memiliki duabelas (12) Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016, yaitu :

Tabel 2 205 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Sabdodadi	Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul
2	Bangunjiwo	Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
3	Dlingo	Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo
4	Gilangharjo	Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
5	Mulyodadi	Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
6	Panggungharjo	Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
7	Seloharjo	Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong
8	Selopamioro	Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri
9	Sitimulyo	Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan
10	Srigading	Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden
11	Trimurti	Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
12	Triwidadi	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan budaya melalui rintisan kalurahan budaya yang saat ini telah ditetapkan sembilan (9) kalurahan. Penetapan rintisan kalurahan budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Gadingsari	Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden
2	Parangtritis	Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek
3	Girirejo	Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri
4	Srimulyo	Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan
5	Muntuk	Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo
6	Sendangsari	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
7	Tamantirto	Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan
8	Sriharjo	Kalurahan Sriharji Kapanewon Imogiri
9	Argodadi	Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

2) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Kalurahan wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur

tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Kalurahan Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul, sebagai berikut:

Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
1	Sabdodadi	Manding	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
2	Timbulharjo	Tembi	Kerajinan, Outbond	Maju
3	Karangtengah	Karangtengah	Alam, Kerajinan	Maju
4	Kebonagung	Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju
		Candran	Museum Tani, Kesenian	Maju
5	Wukirsari	Wukirsari	Batik pewarna alami	Maju
		Pucungrejo	Kerajinan Kulit	Embrio
		Bendo	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Embrio
6	Mangunan	Kakilangit	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
		TTSA	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
		Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
		Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Embrio
7	Guwosari	Kampungsantan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
		Kalakijo	Budaya, Kuliner Ingkung	Embrio
		Guwosari Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Embrio
8	Sendangsari	Krebet	Kerajinan Batik Kayu	Maju
		Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Embrio
		Ngembel Beji	Alam, Budaya	Embrio
9	Canden	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
10	Trimurti	Lopati	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
11	Muntuk	Karangasem	Alam, Kerajinan	Berkembang
12	Bangunjiwo	Jipangan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
		Kajigelem	Budaya, Gerabah	Embrio

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
13	Trimulyo	Puton	Alam	Berkembang
		Trimulyo	Cagar Budaya, Batik	Embrio
		Dewa Batu	Alam, Budaya	Embrio
14	Jagalan	Kampung Gurami	Pertanian, Perikanan	Embrio
15	Tirtohargo	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
16	Tirtomulyo	Ngemel Benji	Alam, Budaya	Embrio
17	Parangtritis	Laguna Depok	Outbond, Kuliner	Embrio
18	Palbapang	Ngringinan	Museum, Kuliner	Embrio
19	Seloharjo	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Budaya	Embrio
		Juron	Kerajinan	Embrio
20	Panjangrejo	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Embrio
21	Srihardono	Kalibuntung	Outbond, Pendidikan	Embrio
22	Pendowoharjo	Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
23	Gilangharjo	Gilangharjo	Alam, Budaya	Embrio
24	Gadingsari	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Embrio
		Pandansari	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
25	Imogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
26	Sriharjo	Srikeminut (wunut)	Alam, Budaya	Embrio
27	Terong	Banyu Nibo Rejosari	Pertanian, Alam	Embrio
28	Mulyodadi	Mulyodadi	Kuliner, Seni budaya	Embrio

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

3) Desa *Prenuer*

Desa *Preneur* adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha milik kalurahan, unit usaha yang berada dalam lingkup kalurahan yang diusahakan oleh warga kalurahan itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian kalurahan dan tercapainya kesejahteraan hidup

warga. Desa *Preneur* di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sejumlah 7 kalurahan, yaitu: Trimurti, Mulyodadi, Gilangharjo, Sabdodadi, Panggungharjo, Bangunjiwo dan Dlingo.

4) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa Prima merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Desa Prima yang telah terbentuk di Kabupaten Bantul mencakup 26 kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019

No.	NAMA KELOMPOK PRIMA	ALAMAT	TAHUN DIBENTUK	JUMLAH HIBAH DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA SEKARANG (Rp)	JUMLAH ANGGOTA		PRODUK UNGGULAN
						AWAL	SEKARANG	
1	SEJAHTERA	SRIHARJO, IMOGIRI	2009	37,500,000	83,112,000	24	53	PEYEK, KACANG DAN KERIPIK SAGU
2	GADINGSARI MAKMUR	GADINGSARI, SANDEN	2012	37,000,000	55,150,000	25	29	PEYEK DAN UBI UNGU
3	MUKTI REJEKI	NITIPRAYAN DK VII NGESTIHARJO, KASIHAN	2013	37,000,000	66,739,500	22	32	TEMPE, TAS PERCA DAN DOMPET BATIK
4	ANYELIR	IMOGIRI, IMOGIRI	2014	37,000,000	48,000,000	24	32	SNACK DAN CEMILAN KRIPIK
5	TIMBUL REJEKI	TIMBULHARJO, SEWON	2015	37,000,000	49,044,000	25	32	KRIPIK GEMBUS
6	SELOMAJU	SELOPAMIORO, IMOGIRI	2016	37,000,000	54,834,000	24	25	KRIPIK TEMPE, KRIPIK DAUN TALOK, KRIPIK PARE, DAUN KRIKIL DAN DAUN KELOR
7	GIRI PRIMA TAMA	DLINGO, DLINGO	2017	37,000,000	44,709,000	25	25	WEDANG KEKEP S. BUNGA, TAS, MENGGLENG DAN EMPING GARUT
8	SEJAHTERA TERONG	TERONG, DLINGO	2017	37,000,000	51,700,000	25	28	PANGSIT DAUN KELOR
9	NIAGA PATALAN JETIS	PATALAN, JETIS	2017	37,000,000	40,000,000	25	25	KERAJINAN TAS
10	MANDIRI	NOGOSARI II, WUKIRSARI, IMOGIRI	2017	37,000,000	51,224,000	25	25	USAHA BOGA
11	AGUNG MANDIRI	KEBON AGUNG, IMOGIRI	2018	37,000,000	45,098,700	25	25	TELUR ASIN, ANEKA KRIPIK DAN KEMBANG GOYANG
12	MAJU MULYO	MULYODADI BAMBANGLIPURO	2018	37,000,000	42,000,000	25	25	TELUR ASIN, KRIPIK BAYAM, TAS DARI KAIN PERCA
13	SUMBER REJEKI	PAJANGAN, TRIWIDADI, PAJANGAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	25	EMPING MELINJO, EMPING JAGUNG DAN EMPING GARUT

No.	NAMA KELOMPOK PRIMA	ALAMAT	TAHUN DIBENTUK	JUMLAH HIBAH DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA SEKARANG (Rp)	JUMLAH ANGGOTA		PRODUK UNGGULAN
						AWAL	SEKARANG	
14	WANUDYOTOMO	KAL TAMANAN BANGUNTAPAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	27	ANEKA OLAHAN KUE
15	MURTI MANDIRI	TRIMURTI, SRANDAKAN	2018	37,000,000	48,100,000	25	25	CRIPING, AMPAS TAHU, BAKPIA PISANG
16	OPTIMIS "SELOHARJO"	SELOHARJO, PUNDONG	2018	37,000,000	45,895,000	25	39	BAKPIA
17	NGUDI REJEKI	BANGUNHARJO SEWON	2012	37,000,000	59,918,000	25	26	BAKPIA, TEMPE
18	PANGGUNG MAKMUR	JL. KH. ALI MAKSUM PANGGUNGHARJO, SEWON	2019	25,000,000	30,778,424	25	25	ANEKA KUE, EMPING, ABON
19	GILANG LESTARI	GILANGHARJO, PANDAK	2019	25,000,000	28,316,500	25	25	JAMUR CRISPY
20	GADINGMAS	SRIGADING, SANDEN	2019	25,000,000	30,280,200	25	25	TELUR ASIN, TAHU WALIK, BATIK, KUE KERING, OLAHAN GULA KELAPA, KACANG-KACANGAN, DAN KUE BASAH
21	PRIMA JATI	JATIMULYO, DLINGO	2019	25,000,000	30,103,000	25	25	KUE KACANG
22	DULLOR SUBUR NECO	SABDODADI	2019	25,000,000	26,175,000	25	25	JUSSER, OKRA, DAN KENIKIR
23	NGUDI MUKTI	KARANGTENGAH, IMOGIRI	2019	25,000,000	31,773,000	25	25	METE, BUMBU PAWON, EMPING
24	SEKARNINGTYAS	BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN	2012	37,000,000	57,216,000	25	36	MAKANAN KERING
25	BANGKIT MANDIRI	CANDEN, JETIS	2012	37,000,000	50,787,000	25	24	JAMU GENDONG
26	SUMBER MAKMUR	SUMBERAGUNG, JETIS	2018	37,000,000	48,265,000	25	22	OLAHAN HASIL PERIKANAN

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

5) Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan yang dikenali dengan istilah "Demapan" adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program
6	Wukirsari	Exit Program
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021
Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan

c. Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadan tanah Kasultanan dan

Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarisasi Sultan Ground 3.432	300	350	400	500	500

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

d. Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada Tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon. SRS Kasultanan yang terletak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	PENANDA SRS
A.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon**	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggungharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis
B.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon**	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Non Makanan	58.44	56.94	60,60	58,65	57,53
2.	Makanan	41,56	43,06	39,40	41,35	42,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung stabil. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana lt menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikomsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

NTP tidak relevan sebagai alat ukur kesejahteraan petani, karena NTP mengasumsikan tingkat produksi yang tetap dan tidak mengakomodir kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Oleh karena itu, NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. NTP bukan mutlak

sebagai kesejehateraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga, namun belum tentu NTP meningkat karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani

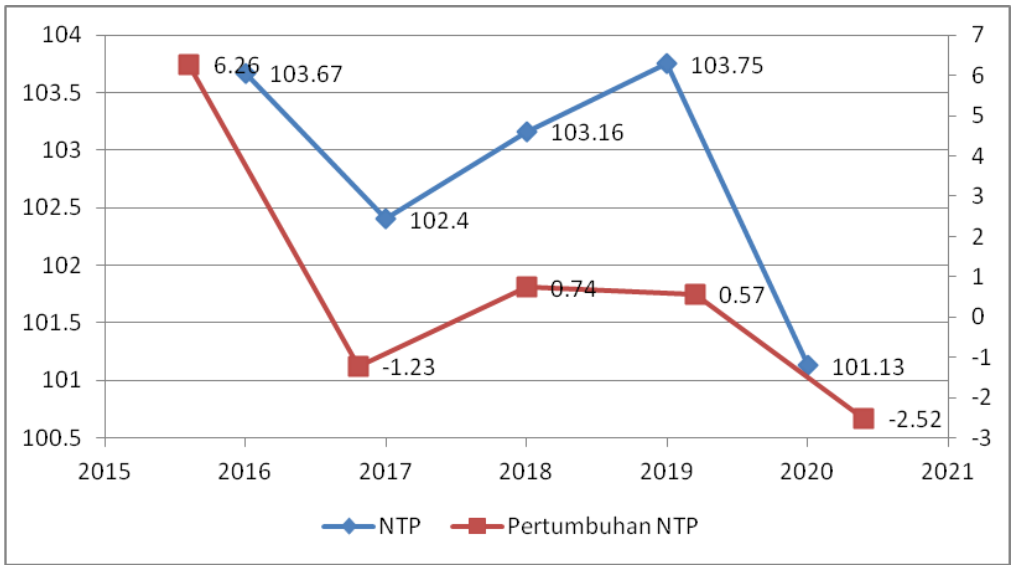

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai tukar petani dari tahun 2015-2020 menggambarkan tren yang fluktuatif. NTP Kabupaten Bantul tahun 2020 memiliki indeks sebesar 101,13, lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 103,75. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur

a. Fasilitas Perbankan.

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank BPR.

Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Kantor Pusat	0	17	0	17	0	17	0	16	0	16
Kantor Cabang	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
Cabang Pembantu	34	0	34	0	33	0	35	0	35	0

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Kantor Kas	25	35	25	36	25	38	23	36	23	37
Jumlah Bank	61	54	61	55	60	48	60	55	60	56
	115		116		118		115		116	
Jumlah Penduduk	928.676		927.181		939.718		949.325		954.706	
Rasio Pelayanan per 1000 Penduduk (%)	12,38		12,51		12,55		12,11		12,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah kantor bank umum di Kabupaten Bantul sebanyak 60, terdiri dari 2 kantor cabang, 35 cabang pembantu dan 23 kantor kas sedangkan jumlah kantor bank BPR sebanyak 56, terdiri dari 16 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 37 kantor kas.

Rasio pelayanan perbankan di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dengan rata-rata di atas 12% per 1000 penduduk, artinya dalam 1000 penduduk terdapat 120 orang terlayani oleh perbankan. Pada tahun 2020, jumlah kantor bank bertambah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penambahan jumlah kantor kas bank BPR.

b. Penggunaan Listrik Rumah Tangga.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

Realisasi	Jumlah KK	Jumlah PLG RMH Tangga PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Non PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Total	REPLN(%)	RE Total (%)
2017	312.530	282.357	57	282.414	90.35	90.36
2018	319.033	297.675	6.863	304.538	93.31	95.46
2019	325.082	313.194	6.553	319.747	96.34	98.36

Sumber: Dinas DPU ESDM DIY, 2021

Persentase RE total di Kabupaten Bantul tahun 2019 yaitu sebesar 98.36% dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah menerima aliran listrik.

c. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

E-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Membangun Bantul *Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS).

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengembangkan aplikasi sebanyak 79 aplikasi, baik yang berbasis *dekstop* atau *android*, *online* maupun *offline*. Untuk mendukung pelayanan *Digital Government Services* di Kabuaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun infrastruktur jaringan utama (*backbone*) *fiber optic* sepajang 135,241 Km, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Jaringan utama ini memenuhi kebutuhan jaringan internet dan intranet seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan sebagian kantor pemerintah kalurahan dengan kualitas jaringan *fiber optic* yang baik.

Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	3
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	2
7	Bantul	4
8	Jetis	4
9	Imogiri	5
10	Dlingo	4
11	Pleret	3

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
12	Piyungan	2
13	Banguntapan	4
14	Sewon	1
15	Kasihan	4
16	Pajangan	2
17	Sedayu	3
Jumlah		53

Sumber : *https://data.bantulkab.go.id/dataset/fasilits-wifi-desa-di-kabupaten-bantul, 2021*

Hingga tahun 2019 jumlah kantor pemerintah kalurahan yang tidak tersambung jaringan *fiber optic* sebanyak 72 titik karena tidak dilalui jalur utama *fiber optic*. Untuk kantor pemerintah kalurahan yang tidak dilalui jalur utama (*backbone*) *fiber optic*, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memberikan fasilitas jaringan internet dan intranet melalui sambungan udara. Untuk itu dibangun infrastruktur tower internet dan intranet milik pemerintah sebanyak 135 tower yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan *Digital Government Services* di kantor pemerintah kalurahan juga difasilitasi wifi publik sebanyak 53 titik yang dapat diakses juga oleh masyarakat kalurahan.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Tahun 2020 melalui SK Bupati Bantul Nomor 198 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul Tahun 2020. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016-2019 sebagai berikut :

Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2016	Nilai Thn 2017	Nilai Thn 2018	Nilai Thn 2019
	Komponen Pengungkit					
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	15	6.79	9.67	10.95	12.95
2.	Penguatan pengawasan	12	6.04	6.27	6.73	7.16
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.71	2.71	2.71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	6	3.84	3.84	3.84	3.89
5.	Manajemen perubahan	5	3.37	3.45	3.44	3.53
6.	Penguatan akuntabilitas	6	4.10	4.34	4.37	4.38
7.	Penataan tatalaksana	5	3.47	3.50	3.30	3.47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	6	4.33	4.53	4.51	4.52
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	34.64	38.31	39.85	42.11
	Komponen Hasil					
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	14.0	9.84	10.31	10.91	11.39
2.	Survey internal integritas organisasi	6.0	3.88	3.58	4.45	4.47
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	7.0	6.49	5.90	6.30	6.06
4	Opini BPK	3.0	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Survey eksternal pelayanan public	10.0	9.60	8.14	9.10	9.33
	Total Komponen Hasil (B)	40	32.79	30.93	33.76	34.25
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	67.43	69.25	73.61	76.36
	Kategori		**B**	**B**	**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah 76,43 dengan kategori B, sebagai berikut :

Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2020
A	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20	14,73
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93
3.	Reform	30	20,74
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	42,40
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28
4	Kinerja Organisasi	10	6,99
	Total Komponen Hasil (B)	40	34,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	76,43
	Kategori		**BB**

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

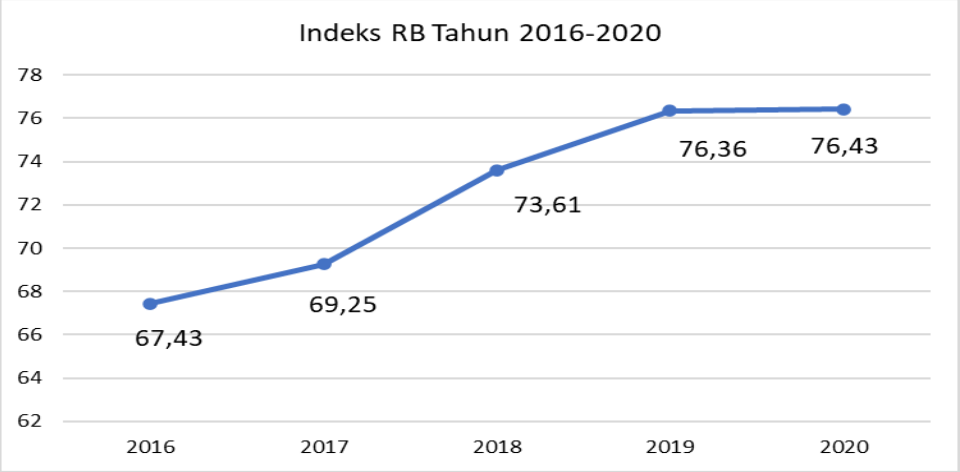

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah 76,43 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 yaitu 67,43. Meningkat dari kategori B (Cukup Baik) menjadi BB (Baik). Kategori B memiliki interprestasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, sedangkan Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

b. Angka Kriminalitas.

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus Narkoba	45	46	78	95	109
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	0	2	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	4	29	15	41	32
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	135	81	85	238
5	Jumlah kasus Pencurian	345	395	281	362	407
6	Jumlah kasus Penipuan	88	76	94	122	139
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	2	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	567	683	551	707	927
9	Jumlah Penduduk	928.676	927.181	939.718	945.441	954.706
10	Angka Kriminalitas	0,061	0,074	0,055	0,074	0,097

Sumber: Satpol PP, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 0,097 artinya bahwa dalam setiap 1000 penduduk terdapat lebih dari 9 kasus kriminalitas.

Dilihat dari jenis kriminal yang mengalami peningkatan adalah kasus penganiyaan, penipuan, pencurian dan kasus narkoba. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut antara lain tekanan ekonomi yang cukup tinggi akibat pandemic covid-19, pengaruh media sosial/pergaulan.

c. Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Ekonomi		1	2	5
2	Bidang Politik	1		1	
3	Bidang Lainnya	3	2	4	1
4	Mogok Kerja		6		2
Jumlah Demonstrasi		4	9	7	8

Sumber: Satuan Pol PP, 2021

Jumlah demonstrasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9 demonstrasi dibanding tahun 2017 yang hanya ada 4 demonstrasi, untuk selanjutnya bersifat fluktuatif, dalam arti terjadi penurunan jumlah demonstrasi, terutama untuk kasus pemogokan kerja pada tahun 2019 menjadi 7 demonstrasi, namun naik lagi di tahun 2020 menjadi 8 demonstrasi.

d. Kemudahan Perijinan.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkanlah Keputusan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang bertugas mengawal dan membantu peningkatan pelayanan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan atas izin berusaha,pengidentifikasian perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi) dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPT untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS).

Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2020 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020

Perizinan OSS		
No	Nama Perizinan	Jumlah Jenis Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1
2.	Perizinan Perdagangan	2
3.	Perizinan Perindustrian	2
4.	Perizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2
5.	Perizinan Pekerjaan Umum Peruamahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Pertahanan	3
6.	Perizinan Perhubungan	2
7.	Perizinan Peternakan	1
8.	Perizinan Kesehatan	8
9.	Perizinan Usaha Pariwisata	1
10.	Perizinan Tenaga Kerja	1
Perizinan Non OSS		
1.	Perizinan Dasar	3
2.	Perizinan Kesehatan	27
3.	Perizinan Usaha Perikanan	1
4.	Perizinan Reklame	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Selain adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu di mana proses penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar, maka pengurusan izin juga dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama). Waktu yang diperlukan bagi pelayanan perizinan secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nomor Induk Berusaha (NIB)						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya

Perdagangan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan Umum = - Toko Swalayan = 35 Pusat Perbelanjaan = 35	3	5	Umum = - Swalayan berdiri sendiri = 3 Swalayan terintegrasi = 1 Pusat Perbelanjaan = 4	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya
4.	SIUP Mihol	35	5	11	Pengecer Gol B dan C = 3 Penjual Gol B dan C = 3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	• SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)	20	5	4	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
8.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP dan Pertanahan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
10.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
11.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Adminis-trasi	Teknis	
12.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
13.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
      a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
   2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
      a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 perizin;
      b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 perIzin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
14.	Pendaftaran Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
15.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
16.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
17.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
18.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya
21.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
22.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata					
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
23.	Tanda Daftar Usaha Pariwista	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
24.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut.

Dari keseluruhan proses perizinan yang dikelola oleh DPMPT dari rekapitulasi dari permohonan izin tahun 2016 -2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah			
	Permohonan izin	Izin diterbitkan	Izin ditolak	Izin dalam proses
2016	6807	6021	165	621
2017	6165	5986	177	2
2018	5664	5502	148	14
2019	3793	2784	929	80
2020	5487	2827	2611	49

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

e. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan.

Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

Jenis Perda
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Jenis Perda
dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038; 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 11. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sumber: Bagian Hukum, 2021

f. Perkembangan Kemajuan Kalurahan

Kalurahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten IDM, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul
Menurut IndeksDesa Membangun (IDM) Tahun 2020

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
1	Srandakan	0.8374	Poncosari	0,793	MAJU
			Trimurti	0,8817	MANDIRI
2	Sanden	0.8122	Srigading	0,8133	MAJU
			Gadingsari	0,8133	MAJU
			Gadingharjo	0,8094	MAJU
			Murtigading	0,8149	MAJU
3	Kretek	0.8165	Tirtohargo	0,7571	MAJU
			Donotirto	0,8178	MAJU

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
			Parangtritis	0,8827	MANDIRI
			Tirtosari	0,8149	MAJU
			Tirtomulyo	0,8102	MAJU
4	Pundong	0.7760	Seloharjo	0,7229	MAJU
			Srihardono	0,8462	MANDIRI
			Panjangrejo	0,759	MAJU
5	Bambanglipuro	0.8477	Sumbermulyo	0,8787	MANDIRI
			Sidomulyo	0,8302	MANDIRI
			Mulyodadi	0,8343	MANDIRI
6	Pandak	0.8105	Caturharjo	0,8041	MAJU
			Wijirejo	0,8083	MAJU
			Triharjo	0,8143	MAJU
			Gilangharjo	0,8154	MAJU
7	Pajangan	0.7722	Guwosari	0,7708	MAJU
			Triwidadi	0,7624	MAJU
			Sendangsari	0,7833	MAJU
8	Bantul	0.7925	Sabdodadi	0,766	MAJU
			Palbapang	0,814	MAJU
			Ringinharjo	0,7432	MAJU
			Bantul	0,8105	MAJU
			Trirenggo	0,8287	MAJU
9	Jetis	0.8395	Patalan	0,8362	MANDIRI
			Trimulyo	0,8376	MANDIRI
			Canden	0,8456	MANDIRI
			Sumberagung	0,8384	MANDIRI
10	Imogiri	0.8067	Selopamioro	0,7611	MAJU
			Kebonagung	0,8132	MAJU
			Sriharjo	0,8138	MAJU
			Karangtalun	0,81	MAJU
			Karangtengah	0,7644	MAJU
			Imogiri	0,8987	MANDIRI
			Wukirsari	0,7767	MAJU
			Girirejo	0,8154	MAJU
11	Dlingo	0.8116	Mangunan	0,754	MAJU
			Dlingo	0,8148	MAJU
			Muntuk	0,8059	MAJU
			Temuwuh	0,8046	MAJU
			Jatimulyo	0,7929	MAJU
			Terong	0,8971	MANDIRI
12	Banguntapan	0.8323	Tamanan	0,8529	MANDIRI
			Baturetno	0,8879	MANDIRI
			Jagalan	0,7798	MAJU
			Banguntapan	0.9216	MANDIRI
			Singosaren	0,7524	MAJU
			Wirokerten	0,8324	MANDIRI
			Jambidan	0,8062	MAJU
			Potorono	0,8248	MANDIRI

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
13	Pleret	0.8195	Bawuran	0,7521	MAJU
			Wonokromo	0,8916	MANDIRI
			Wonolelo	0,8005	MAJU
			Segoroyoso	0,7838	MAJU
			Pleret	0,8694	MANDIRI
14	Piyungan	0.8488	Sitimulyo	0,8137	MAJU
			Srimulyo	0.9195	MANDIRI
			Srimartani	0,8132	MAJU
15	Sewon	0.8244	Pendowoharjo	0,8121	MAJU
			Bangunharjo	0,8098	MAJU
			Timbulharjo	0,8116	MAJU
			Panggungharjo	0,864	MANDIRI
16	Kasihan	0.8254	Tamantirto	0,8138	MAJU
			Tirtonirmolo	0,8565	MANDIRI
			Ngestiharjo	0,8138	MAJU
			Bangunjiwo	0,8176	MANDIRI
17	Sedayu	0.8235	Argodadi	0,791	MAJU
			Argosari	0,786	MAJU
			Argomulyo	0,8829	MANDIRI
			Argorejo	0,834	MANDIRI

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 2.208 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Tidak ada satupun kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapat status 'Desa Sangat Tertinggal', 'Desa Tertinggal' dan "Desa Berkembang";
2) Menurut IDM, terdapat sejumlah 25 kalur dengan kriteria 'Desa Mandiri' dan 50 'Desa Maju';
3) Menurut *ranking* IDM, tiga kalurahan dengan skor tertinggi adalah Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan (0,9216); Kalurahan Srimulyo di Kapanewon Piyungan (0,9195); dan Kalurahan Imogiri di Kapanewon Imogiri (0,8987);
4) Adapun kalurahan dengan nilai terendah adalah Kalurahan Bawuran di Kapanewon Pleret (0,7521); Kalurahan

Ringinharjo di Kapanewon Bantul (0,7432); dan Kalurahan Seloharjo di Kapanewon Pundong (0,7229).

2.4.4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai tehnologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi

tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 269.908 jiwa atau 27.82%, kemudian lulusan SD/sederajat menempati peringkat kedua sebesar 20%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

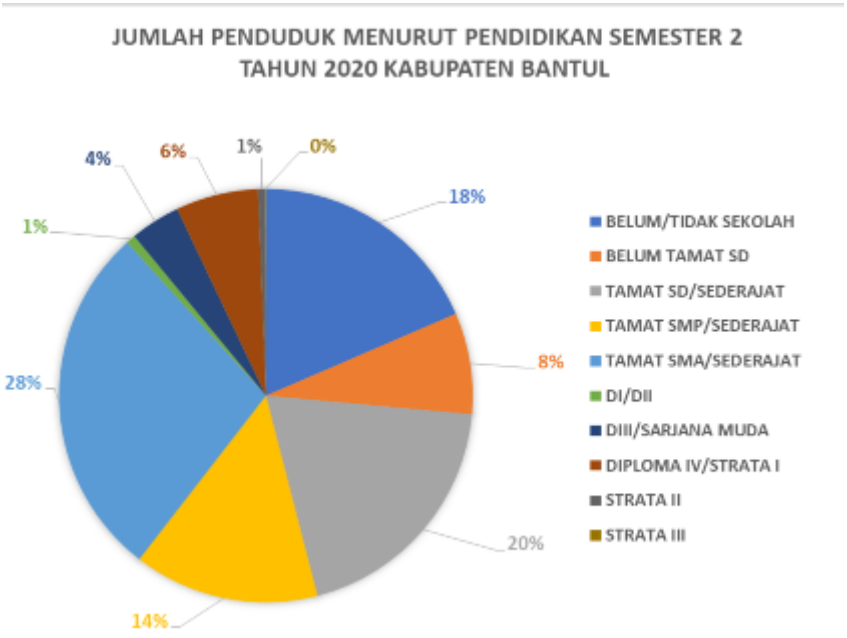

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap

tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 44,20. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (45,08) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	197.308	196.441	198.537	200.936	201.101
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	90.550	92.668	91.837	94.029	91.539
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	287.858	289.109	290.374	294.965	292.640
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	640.818	638.072	649.344	654.360	662.066
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,92	45,31	44,72	45,08	44,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Angka Kemiskinan	Persen	14.55	14.07	13.43	12.92	13.5	13.94	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.05	5.1	5.47	5.53	-1.66	-0.13	Belum tercapai (<)
	Gini Ratio	Angka	0.397	0.413	0.448	0.428	0.418	0.38	Belum tercapai (<)
	Laju inflasi	Persen	2.26	3.96	2.61	2.71	1.4	Menurun/stabil	Belum tercapai (<)
	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	3	2.87	2.72	3.06	4.06	2.9	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78.42	78.67	79.45	80.01	80.01	Meningkat	Sesuai (=)
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	9.09	9.2	9.35	9.54	9.55	9	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
II	**Aspek Pelayanan Umum**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	98.7	98.75	108.41	106.24	97.7	98.9	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Persen	96.12	98.2	98.45	95.26	92.77	96.4	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	Persen	95	99.23	97.83	101.38	97.23	95.3	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	84.1	88.68	89.55	85.86	86.55	84.65	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	71.09	76.6	77.33	76.8	76.31	68.2	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	109.61	108.56	101.27	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan	Persen	100	100	108.54	111.18	105.93	100	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA								
	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0.02	0.02	0.01	0.004	0.004	0.02	Melampaui (>)
	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0.02	0.02	0.02	0.01	0.004	0.02	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	96.77	72.8	108.3	99.49	157.6	157.6	Sesuai (=)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7.65	8.74	8.28	8.33	6.93	6.93	Sesuai (=)
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.4	0.41	0.41	0.41	0.31	0.31	Sesuai (=)
	Prevalensi Penderita HIV (Angka)	Persen	0.083	0.09	0.19	0.12	0.01	0.01	Sesuai (=)
	Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD)	per 100.000 Penduduk	237.75	57.98	19.52	140	128	110	Belum tercapai (<)
	Net Death Rate	per 1000 pasien	18.69	16.98	22.62	18.7	21.17	16.6	Belum tercapai (<)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam	Persen	82.79	74.18	74.58	75.1	75.42	75.58	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kondisi Mantap								
	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	Persen	80	80	84	84	84	84	Sesuai (=)
	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	81.12	81.16	80.44	82.19	80.01	82.66	Belum tercapai (<)
	Persentase Penanganan Banjir	Persen	20.3	24.9	28.84	34	41.31	40.9	Melampaui (>)
	Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	Jumlah	-	2	2	2	2	4	Belum tercapai (<)
	Persentase Cakupan Pengendalian Tata Ruang	Persen	-	71	70.35	72.5	75.01	77	Belum tercapai (<)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	Persen	50.13	79.69	92.06	92.49	92.49	92.49	Sesuai (=)
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	MASYARAKAT								
	Persentase penegakan PERDA	Persen	57	77.7	95.3	66	70	69	Melampaui (>)
	Persentase Penyelesaian K3	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	Persen	94	97	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase Relokasi Warga	Persen	9.09	27.28	36.36	89.09	132	81.82	Melampaui (>)
	Persentase Sekolah Siaga Bencana	Persen	2.69	3.19	3.97	4.12	4.51	4.2	Melampaui (>)
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
	Penanganan NAPZA	Jumlah	4	5	NA	NA	NA	Menurun	Belum tercapai (<)
	Persentase PMKS	Persen	13.5	13.25	7.29	7.29	7.29	12.75	Belum tercapai (<)
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	1,297,700.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,649,800.00	1,842,460.00	1,679,093.00	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	Angka	0.38	0.38	0.73	0.73	0.18	0.38	Melampaui (>)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
	Ketersediaan Energi	(kkal/kapita/hari)	3079	2993	3121	3123	3092	3095	Belum tercapai (<)
	Ketersediaan Protein	(kkal/kapita/hari)	75	78.36	87.23	89.95	82.9	72.8	Melampaui (>)
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	92.6	90.8	91.7	93.7	91.4	93.6	Belum tercapai (<)
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Jumlah	27	29	69	16	19	35	Belum tercapai (<)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
	Cakupan Sertifikasi Tanah	Persen	NA	100	93.16	99.37	100	96	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	34	24	34.67	39.63	51.8	50	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Indeks	87.76	90.9	85.66	90.9	85.18	80	Melampaui (>)
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	27.5	27.51	43.15	53.09	54.82	52.93	Melampaui (>)
	Volume sampah yang tertangani	(ribu/m3)	NA	441	486.784	452.185	460.032	460	Melampaui (>)
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	NA	97.83	97.83	99.55	99.63	91	Melampaui (>)
	Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	Persen	NA	91.74	85	85	78.05	90	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan	Indeks	80.18	80.2	83.9	92.3	90.01	80.35	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Masyarakat								
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	14	16	22	24	27	22	Melampaui (>)
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	Persen	13.49	11.94	12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	Rata-rata	3.29	3.12	3.12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	NA	NA	1.67	1.67	1.83	Belum tercapai (<)
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	Persen	5	6	1.99	1.95	1.83	1.83	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	Persen	60	70.33	77.7	80.69	101.49	85	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	-	75.23	75.33	78.56	100.04	83	Melampaui (>)
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Jumlah	10	10	10	12	8	10	Belum tercapai (<)
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah	0	192	183	185	185	180	Melampaui (>)
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
	Layanan perijinan tepat waktu	Persen	81.6	70.98	83.87	83.8	96.92	83	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.99	83.08	83.29	85.89	87.89	80	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	12.2	12.72	11.85	9.3	3.74	9,25	Belum tercapai (<)
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut	Persen	32	31.4	34.21	32.18	40.33	29	Melampaui (>)
	Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah	4	4	5	5	5	5	Sesuai (=)
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	Persen	NA	NA	NA	10	15	28	Belum tercapai (<)
	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	Persen	NA	NA	NA	43	47	45	Melampaui (>)
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
	Kalurahan Budaya	Jumlah	9	10	10	12	12	16	Belum tercapai (<)
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	NA	NA	NA	24	24	27	Belum tercapai (<)
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
	Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%)	Persen	28.5	29	37.72	31	-38.3	32	Belum tercapai (<)
18	**URUSAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Persentase SKPD yang menyeleng-garaan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	Persen	27	33	46.2	52	64.8	61	Melampaui (>)
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0.697	5.92	1.14	1.41	1.59	1.45	Melampaui (>)
	Produksi Perikanan	Ton	12191.22	12912.57	13059.44	13243.45	13453.92	13383	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32.51	32.51	22.89	-54.55	-67	Melampaui (>)
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2800800	3405685	4204422	5166615	2348313	5486311	Belum tercapai (<)
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.6	1.8	1.9	2	1.56	2.1	Belum tercapai (<)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	BIDANG PERTANIAN								
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Persen	9.94	0.113	0.13	1.57	0.71	0.1025	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	14.09	7.94	0.85	3.83	2.91	1.1	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	Persen	7.8	0.17	0.24	1.09	2.8	0.3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Daging	Persen	4.24	20.52	0.71	0.57	0.93	0.9	Melampaui (>)
	Produksi Daging	Ton	14742.55	14751	14855.725	15088.317	15228.523	14644.26	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	215622.67	215867	216152	216152	226033.2	232034	Belum tercapai (<)
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	14363.65	15503.7	15635.3	15635.3	16264.3	6697.25	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14466.77	14490.78	145255.81	145255.81	15122.22	14604.08	Melampaui (>)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								
	-								
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	-		-	-	-	-	-	-	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
	Pertumbuhan Ekspor	Persen	7	7	13.96	14.61	-1.3	7	Belum tercapai (<)
	Jumlah Pasar Tipe A	Jumlah	1	1	1	4	4	3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	Persen	6.54	5.79	5.59	5.11	-4.2	5.62	Belum tercapai (<)
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
	Cakupan industri kreatif	Persen	39.95	41.11	41.11	46.2	46.2	47	Belum tercapai (<)
	Pertumbuhan Industri	Persen	2	3.4	3.49	3.5	1.8	3	Belum tercapai (<)
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
	Jumlah KK Transmigran	Jumlah	50	12	28	20	20	50	Belum tercapai (<)
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
1	**SEKRETARIAT**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	DAERAH								
	Nilai Evaluasi Kinerja PD	Angka	65	70	76.19	76.16	76	71	Melampaui (>)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.78	87.57	88.7	86.97	87.89	83	Melampaui (>)
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4478 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	Belum tercapai (<)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka	73,66 (BB)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,85 (A)	82 (A)	Belum tercapai (<)
	Persentase Belanja Pegawai	Persen	55	52	43.46	47.37	47	45	Melampaui (>)
2	**SEKRETARIAT DEWAN**								
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	94	94	100	82	100	100	Sesuai (=)
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
1	**PERENCANAAN**								
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	Persen	NA	94.35	105.46	107.31	98.77	94.9	Melampaui (>)
	Persentase rata-rata Pencapaian Target	Persen	NA	90	106.57	99.4	98.81	91.1	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kinerja OPD								
2	**KEUANGAN**								
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai (=)
	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	14.04	12.27	11.41	12.22	10.15	Menurun	Sesuai (=)
	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	38.95	31.92	31.11	30.2	27.09	20	Melampaui (>)
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	18.14	17.76	18.66	17.25	18.23	10	Melampaui (>)
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	37.22	45.46	47.25	48.32	44.09	Menurun	Sesuai (=)
		Persen	62.78	54.54	52.75	51.68	55.91	Meningkat	Sesuai (=)
	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	Persen	0.62	0.69	0.82	0.98	0.98	Meningkat	Sesuai (=)
	Penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai (=)
3	**KEPEGAWAIAN**								
	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Persen	84	89	89.03	90.14	92.38	91	Melampaui (>)
	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	81.8	Melampaui (>)
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
	Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian	Jumlah	4781	3783	3644	2573	217	Meningkat	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	kepada Masyarakat								
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
	INSPEKTORAT DAERAH								
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	Persen	90.5	91.78	90.49	91.73	91.5	91,5	Sesuai (=)
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
	KECAMATAN								
	Rerata IKM	Indeks	80	91.8	93.5	96.17	94.13	90	Belum tercapai (<)
G	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Jumlah intoleransi di masyarakat	Persen	0	0	0	2	0	0	Sesuai (=)
	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi	Persen	0	0	0	87.89	80.32	70	Melampaui (>)
III	**Aspek Daya Saing**								
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia	Klasifikasi	62.9	75	75	7.72	7.7	8	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Governance Index/IGI)								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Angka	NA	71.57	74.36	76.77	76.77	78	Belum tercapai (<)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47.53	45.5	53.36	60.4	63.02	63	Melampaui (>)
	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29.33	37.33	46.67	46.67	45.33	Melampaui (>)
	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70.12	70.42	70.45	72.5	75.01	75	Melampaui (>)
	Angka Kriminalitas	Angka	0.061	0.074	0.055	0.074	0.076	0.065	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54.8	57	68.4	69.7	67.52	70	Belum tercapai (<)
	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	103.67	102.4	103.16	103.75	101.13	101.9	Belum tercapai (<)

Sumber: Bappeda, 2021

2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, perubahan substansi dan sistematika RPJMD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan perubahan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018. Perubahan ini tidak mencakup indikator sasaran daerah, namun dilakukan penyesuaian target capaiannya. *Cascading* dokumen lima tahunan beserta target kinerja sasaran daerah periode kemarin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)														
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	
							Realisasi	N/A	74,5 (Baik)	75 (Baik)	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	8,5 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	RPJMD 11/2016		73,26	73,28	73,3	73.31	73.32	73.33	
							Realisasi	73,24	73,44	73,47	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	73,6	73,65	73,70	73,70
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	RPJMD 11/2016		15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9	
							Realisasi	15	13,55	14,73	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	15,23	15,38	15,54	15,54
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016		14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66	
							Realisasi	15,16	14,55	14,07	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	12,13	10,86	9,59	8,32	8,32
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	RPJMD 11/2016		5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6	
							Realisasi	5,1	5,06	5,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	5,45	5,5	5,6	5,6
					Gini Ratio	Angka	RPJMD 11/2016		0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025	
							Realisasi	0,3177	0,3967	0,41	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,39	0,38	0,37	0,37
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	RPJMD 11/2016		5	6	7	8	9	10	10
							Realisasi	4,85	12,03	21,59	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	22	23	24	24

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	RPJMD 11/2016		25	30	35	40	45	50	
							Realisasi	22	39	41,11	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	45	47	50	50
				Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	RPJMD 11/2016		0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103	
							Realisasi	0,1001	9,94	0,1133	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,1020	0,.1025	0,1030	0,1030
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	RPJMD 11/2016		1,00	1,025	1,05	1,08	1,10	1,125	
							Realisasi	0,75	14,09	7,94	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,08	1,10	1,125	1,125
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	RPJMD 11/2016		0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
							Realisasi	0,09	7,8	0,17	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,25	0,3	0,35	0,35
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	RPJMD 11/2016		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
							Realisasi	0,45	4,24	20,52	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,8	0,9	1	1
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	RPJMD 11/2016		1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
							Realisasi	1,20	0,35	5,92	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,40	1,45	1,50	1,50
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		N/A	72	74	76	78	80	
							Realisasi	N/A	N/A	71,57	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	76	78	80	80
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	RPJMD 11/2016		39	45	50	56	63	72	
							Realisasi	38	31,35	45,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	56	63	72	72
				Terciptanya kesadaran masyarakat	Desa Tangguh Bencana	Persen	RPJMD 11/2016		20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	
							Realisasi	18	15	29,33	-	-	-	-	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				dalam kesiap-siagaan bencana			Perubahan RPJMD		-	-	-	38,66	45,33	52	52
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016		80	81	70,35	83	84	85	
							Realisasi	79	70	70,24	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	72,5	75	80,0	80,0
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
							Realisasi	0,04	0,061	0,074	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,070	0,065	0,060	0,060
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016		40	50	60	70	80	90	
							Realisasi	35	54,8	57,01	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	65	70	75	75

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Capaian kinerja pada Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	62,9	75	75	7,72	8,0	7,70	96,25	8,50	90,59
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,5	73,56	73,66	73,77	73,65	73,86	100,29	73,70	100,22
Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,73	14,74	15,03	15,15	15,38	15,17	98,63	15,54	97,62
Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	14,55	14,07	13,43	12,92	9,59	13,50	59,22	8.32	37,74
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,1	5,47	5,53	5,50	-1,66	-30,18	5,6	-29,64
	Gini Ratio	Angka	0,397	0,413	0,448	0,428	0,38	0,418	99,74	0,37	97,03
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32,51	32,51	22,89	23	-54,55	-237,17	24	-227,29

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	39,95	41,11	41,11	46,20	47	46,20	98,30	50	92,40
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,074	0,1133	0,13	3,83	1,10	0,71	64,40	0,10	689,63
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	14,09	36,974	0,85	1,09	1,10	2,91	264,55	1,125	258,67
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,054	0,166	0,24	0,57	0,30	2,80	933,33	0,35	800,00
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	4,24	20,52	0,71	1,57	0,90	0,93	103,33	1	93,00
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0,697	5,92	1,14	1,41	1,45	1,59	109,66	1,50	106,00
Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Angka	NA	71,57	74,36	76,77	78,00	76,77	98,42	80,00	95,96

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
masyarakat	Layanan Infrastruktur										
Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,53	45,5	53,36	60,40	63,00	63,02	100,03	72,00	87,53
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29,33	37,33	46,67	45,33	46,67	102,93	52,00	89,73
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70,12	70,42	70,45	72,50	75,00	75,01	100,01	80,00	93,76
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	0,061	0,074	0,055	0,074	0,065	0,076	83,080	0,060	73,33
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,8	57	68,4	69,70	70,00	67,52	96,46	70,00	96,46

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Dari 13 sasaran daerah dengan 19 indikator sasaran, capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD diperoleh nilai terendah minus 227,29% untuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai tertinggi 800% untuk pertumbuhan produksi tanaman perkebunan.

2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

   Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

   Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

   Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

   Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

   Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemenuhan SPM pada masing-masing bidang dapat menggunakan indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang.

2.7.1. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan

(Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	Bidang Urusan Pendidikan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PAUD	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	27.060	100	25.029	25.029	100
2	SD	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	81.294	100	82.166	82.166	100
3	SMP/MTs	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 – 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	39.578	100	41.006	41.006	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.373	1.373	100	2.046	2.046	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.7.2. Bidang Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	14.312	13.848	97	12.708	12.088	95,12	2019: Beberapa ibu hamil belum melaksanakan K4 pada trimester 3 karena adanya mobilisasi penduduk atau pindah daerah 2020: Ada ibu hamil kunjungan K1 sudah lewat dan tidak terpantau
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	13.088	13.072	99,8	12.708	12.697	99,91	2019: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes walaupun dilayani oleh nakes 2020: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.072	10.998	84,1	12.624	10.680	84,60	2019: Beberapa bayi gagal IMD 2020: - Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). - Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60.005	42.135	70,2	53.647	39.055	72.80	2019: Masih ada balita yang belum tercatat ditimbang secara rutin 2020: Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi COVID-19
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.861	27.861	100	113.058	106.072	93,82	2020: -screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19 -aplikasi mobscreen penjarkes belum optimal
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	98.438	98.438	100	584.084	407.090	69.70	2020: screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	49.942	41.063	82,2	121.619	35.247	28.98	2019: Keterbatasan lansia mengisi form skrining 2020: Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.337	29.337	100	60.204	36.777	61.09	2020: penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.954	11.954	100	21.138	13.584	64.26	2020: penderita yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.999	2.999	100	2.353	2.178	92.56	2020: kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan peayanan TBC sesuai standar	9.224	9022	98	4.438	4.438	100	2019: Orang terduga tuberculosis, disebabkan penderita TB tidak taat minum obat secara rutin
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	12.787	12.787	100	16.101	16.101	95.60	2020: Pandemi Covid-19 menyebabkan: - Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil - Layanan VCT mobile berhenti

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain beberapa sebab di atas, capaian pelayanan tidak mencapai 100% juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya kunjungan karena ketakutan masyarakat periksa di fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{10}{10} x\ 100\ \% = 100\ \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{0}{0} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..

Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%	0	0	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2021

2.7.6 Bidang Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{6535}{6535} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{1475}{1475} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	$\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{7684}{7684} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)	$\frac{57}{57} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{40}{40} x\ 100\% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock)	$\frac{92}{92}\ x\ 100\% = 100\%$	$\frac{405}{405}\ x\ 100\% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan}\ x\ 100\ \%$

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, 2021

2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana *CSR* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul pada tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
1	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL	Pariwisata, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan	1.146.105.000
2	BANK BRI KC BANTUL	Kesehatan	25.000.000
3	BANK BUKOPIN KCP BANTUL	Kesehatan	19.000.000
4	BANK MUAMALAT INDONESIA	Sosial, Pendidikan	167.000.000
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Sosial	1.000.000
6	BANK MANDIRI TASPEN YOGYAKARTA	Sosial, Kesehatan	24.925.000
7	BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA	Sosial	381.967.600
8	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC BANTUL	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup	63.984.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
9	KSU AMANAH INSANI MAKMUR	Sosial	9.860.000
10	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	2.178.177.225
11	KSPPS BMT ASSALAM	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	106.327.000
12	KSPPS BMT AD DA'WAH	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	55.393.900
13	KSPPS BMT INTI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	82.799.865
14	KSPPS BMT MITRAMA	Sosial, Kesehatan	68.897.500
15	KOPWAN BMT AN-NISA'	Sosial	900.000
16	PT. PLN (PERSERO) UP3 YOGYAKARTA	Sosial	165.000.000
17	PT. TELKOM INDONESIA	UMKM dan Ekonomi Kreatif	508.000.000
18	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	14.070.000
19	PT. IDE STUDIO INDONESIA	Sosial, Pendidikan	9.500.000
20	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)	Sosial	1.500.000
21	PT. MADUBARU	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	978.125.000
22	AGUNG SWALAYAN	Kesehatan	1.520.000
23	KSP KOPERASI KREDIT ADIL DLINGO	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	25.975.000
24	PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	47.322.000
25	PT. SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	239.500.000
26	BANK INDONESIA PERWAKILAN DIY	UMKM dan Ekonomi Kreatif	320.000.000
27	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Kesehatan	8.140.000
28	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Kesehatan	45.588.000
29	BANK TABUNGAN NEGARA KC YOGYAKARTA	Sosial	60.000.000
30	BANK TABUNGAN NEGARA KC BANTUL	Kesehatan	3.777.500
31	GAPENSI KABUPATEN BANTUL	Kesehatan	28.500.000
32	KELUARGA ALUMNI UGM (KAGAMA)	Kesehatan	24.492.000
33	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) BANTUL	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
34	PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA	Kesehatan	60.000.000
35	YAYASAN WAHANA MANDIRI INDONESIA (YWMI)	Sosial, Lingkungan Hidup	1.108.723.000
36	PT. OUT OF ASIA	Sosial, LIngkungan HIdup, Pendidikan	96.330.000
37	PT. SAMITEX SEWON	Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup	16.200.000
38	PERTAMINA TBBM REWULU	UMKM dan Ekonomi	601.775.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
		Kreatif, Kesehatan, Lingkungan Hidup	
39	KSPPS BMT EL BUMMI 381	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	182.931.000
40	KSPPS BMT RIZQI BAROKAH	Pendidikan	15.236.600
41	KSPPS BMT SABIBUL MUHTADIN	Sosial, Kesehatan	21.636.300
42	KSPPS BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial	47.155.000
43	KOPPONTREN AL-MUHSIN	Sosial	6.033.000
44	REAL ESTATE INDONESIA (REI) DPD DIY	Kesehatan	22.505.000
45	ASTRA MOTOR YOGYAKARTA	Kesehatan	20.000.000
46	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	126.790.500
47	KSPPS BMT ARTHA AMANAH SANDEN	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan	474.660.750
48	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KC YIA	Sosial, Lingkungan Hidup	116.112.400
49	ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)	Kesehatan	8.500.000
50	PAGUYUBAN SUGENG REGIONAL DIY	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
51	CABANG MUHAMMADIYAH KAPANEWON DLINGO	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
52	KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU) MALAYSIA	Kesehatan	2.550.000
53	PT. ADI SATRIA ABADI (ASA)	Sosial	47.060.000
54	ROS IN HOTEL	Sosial	19.300.000
55	PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO	Sosial	40.000.000
56	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Sosial	40.000.000
			9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Dari sisi pendapatan dan belanja, Pada tahun 2016-2019 pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi Covid-19.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan dalam rencana dan program kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan pada upaya mengatasi permasalahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja APBD merupakan gambaran singkat kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul meliputi perkembangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	**PENDAPATAN**	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	Pendapatan Asli Daerah	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:02	Dana Perimbangan	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:03:00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
5	**BELANJA**	2,016,544	2,076,742	2,165,652	2,283,585	2 .199.124	2,25%
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.890	1.116.642	1.142.422	1.180.251	1.276.279	0,49%
5:02	BELANJA LANGSUNG	750.654	960.100	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
	Surplus (Defisit)	-16,209	10,137	62,101	-14,046	11.121	12,07%
6	**PEMBIAYAAN**	-	-	-	-		
6:01	PENERIMAAN DAERAH	293,078	261,454	256,630	296,985	238.679	-4,14%
6:02	PENGELUARAN DAERAH	24,752	24,365	39,573	48,892	11.599	2,03%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	268,326	237,089	217,057	248,093	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252,117	247,226	279,158	234,047	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016-2020, sebesar 2,59% pertahun, sedangkan pertumbuhan rerata belanja daerah sebesar 2,25% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin meningkat. Ditinjau dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan cenderung lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA, sedangkan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran pembiayaan adalah dari penyertaan modal.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 4,99% pertahun atau melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya berada pada kisaran 3-4% pertahun. Tahun 2017 pada komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi hal ini disebabkan adanya Pendapatan Hibah dari BOS, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pos PAD menurun dari tahun sebelumnya, hal ini karena ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan komponen PAD dari pajak daerah mencapai sebesar 12,56% pertahun, retribusi tumbuh

8,11% pertahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 4,85% pertahun, dan Lain-lain PAD yang sah tumbuh 1,37% pertahun;

- Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,12%, Bagi Hasil Pajak mengalami pertumbuhan rerata sebesar 8,83%, Bagi Hasil SDA mengalami penurunan rerata sebesar 16,33%, DAU mengalami penurunan sebesar 1,87%, dan DAK mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,30%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh 15,59% pertahun.

Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	**PENDAPATAN**	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	**Pendapatan Asli Daerah**	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	133,475	165,562	182,127	213,629	200.826	12,56%
4:01:02	Hasil Retribusi Daerah	26,613	31,576	46,053	48,278	30.466	8,11%
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,068	20,130	19,653	21,945	25.138	4,85%
4:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223,299	276,911	214,821	222,077	223.181	1,37%
4:02	**Dana Perimbangan**	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:02:01	Bagi Hasil Pajak	34,633	30,048	29,871	19,355	35.645	8,83%
4:02:02	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4,706	4,823	714	592	11.121	-16,33%
4:02:03	Dana Alokasi Umum	999,814	982,251	982,251	1,015,303	923.214	-1,87%
4:02:04	Dana Alokasi Khusus	292,200	270,134	342,621	315,907	308.644	2,30%
4:03:00	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
4:03:01	Pendapatan Hibah	6,149	10,599	139,342	77,281	83.860	312,75%
4:03:02	Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda lainya	137,137	145,069	155,587	164,966	159.399	3,92%
4:03:03	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	99,913	131,691	113,326	165,850	191.989	19,99%
4:03:04	Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lainnya	21,328	18,085	1,387	4,356	27.050	156,88%
4:03:04	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016–2020, diolah

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

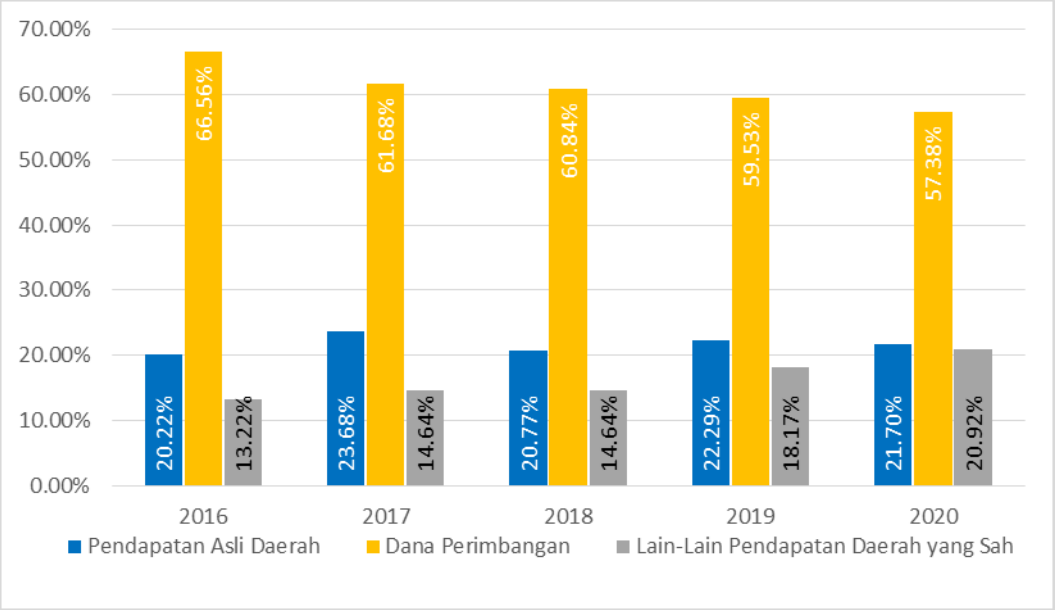

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD selalu meningkat namun pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 target yang telah disusun pada awal tahun dilakukan penyesuaian dan *refocusing* pada Perubahan APBD Tahun 2020.

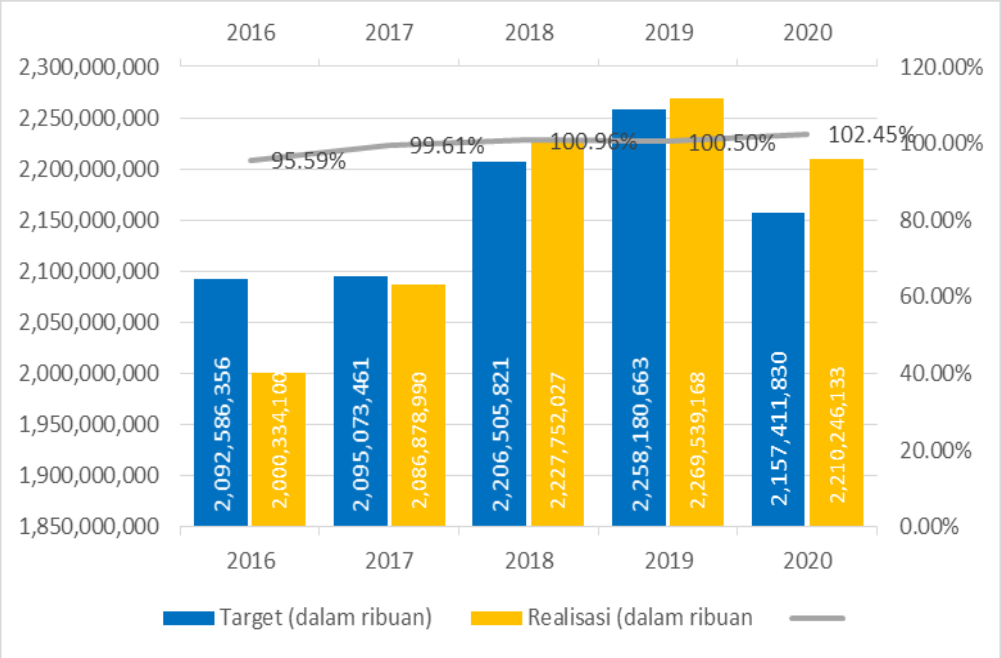

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 target pendapatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 ada penundaan dana transfer oleh pemerintah pusat pada DAK Non Fisik.

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, target pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1, berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,124 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 1,107 pada tahun 2020. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) menyusun *readiness criteria* untuk mencari dana APBN, DAK, dan Dana Keistimewaan; (2) opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (3) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; (4) Pinjaman baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri; dan (4) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.

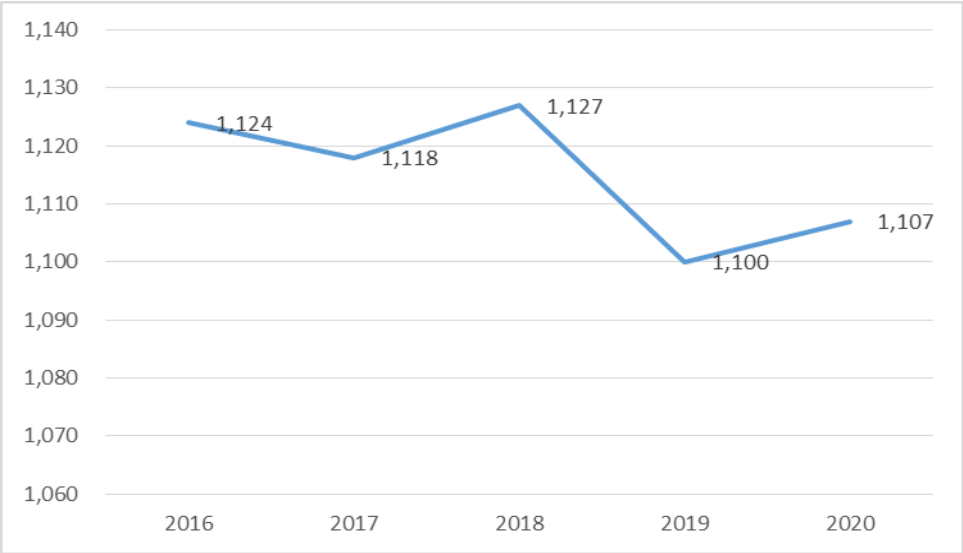

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah

Sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Pemerintah Daerah telah berupaya dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR), dan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tidak berlaku lagi. Pembiayaan CSR lebih dipertegas untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Berikut tabel yang menunjukan realisasi CSR dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang menunjukkan tingkat pertumbuhan rerata 59,98% per tahun, sedangkan jumlah perusahaan yang memberikan CSR bersifat fluktuatif.

Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	perusahaan	Realisasi
1	2016	62	3.218.324.974
2	2017	41	10.550.863.240
3	2018	54	6.378.310.667
4	2019	61	8.629.852.289
5	2020	56	9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dicerminkan dengan peran PAD terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat salah satu dimensi yang diukur yaitu kondisi keuangan daerah yang terdiri dari beberapa indikator maka perlu disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemandirian Keuangan	0,2022	0,2033	0,2077	0,2230	0,2170
2	Fleksibilitas Keuangan	1,573	1,998	1,976	1.974	1,972
3	Solvabilitas Operasional	0,9732	1,0148	0,9269	0,9451	0,8809
4	Solvabilitas Jangka Pendek	32,7679	17,7492	8,4630	6,2744	6,1438
5	Solvabilitas Layanan	2.564.950	2.606.274	2.742.242	2.852.578	2.866.769

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam indikator kemandirian keuangan pemerintah kabupaten bantul berkisar di angka 0,20 sampai dengan 0,22 hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bantul masuk dalam katagori belum mandiri yang artinya masih sangat tergantung dengan dana transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai sebesar 22 persen belanja daerah.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting , karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan daerah lain di DIY dan nasional tahun 2016-2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul

mencapai kisaran angka 20 % sampai dengan 22 %. Pada tahun 2020, Kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja masih berada di bawah capaian Kabupaten/Kota di DIY dan capaian daerah kabupaten/kota lain secara nasional.

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio PAD Terhadap Pendapatan			Rasio PAD Terhadap Belanja		
	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional
2016	20,2%	29,0%	22,9%	20,0%	28,5%	22,9%
2017	20,3%	29,6%	25,4%	20,4%	30,5%	25,9%
2018	20,8%	29,0%	24,6%	21,4%	30,1%	25,0%
2019	22,3%	29,0%	24,5%	22,2%	29,4%	24,7%
2020	21,7%	26,7%	24,1%	21,8%	27,5%	24,4%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, DJPK Kemenkeu RI, 2016-2020 (data per 16 Maret 2021, diolah)

Beberapa permasalahan optimalisasi pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Belum optimalnya pemutahiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sistem administrasi pencatatan penerimaan pembayaran daerah dengan memanfaatkan tehnologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum dikelola secara optimal.

- Masih terbatasnya ruang gerak BUMD dalam melakukan ekspansi bisnis.
- Ketergantungan penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih cukup tinggi.

3.1.3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas riil keuangan daerah. Tabel 3.6 berikut menunjukkan jumlah nominal dan Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 2,02 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 2,20 triliun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rerata sebesar 2,25% pertahun.

Dari sisi komponen belanja, belanja tidak langsung rerata mengalami penurunan sebesar 0,49%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,49% per tahun. Pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dari pertumbuhan belanja tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja

Pemerintah Kabupaten Bantul semakin besar untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Sebagian besar pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, kecuali belanja pegawai. Pos belanja pegawai mengalami penurunan rerata sebesar 5,78% per tahun, terutama terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke Pemerintah DIY yang berimplikasi terhadap pemindahan belanja pegawai guru sekolah tingkat menengah ke Pemerintah DIY dan pada tahun 2020 belanja tunjangan profesi guru tidak dapat sepenuhnya terealisasi karena ada banyak guru yang pensiun, dan tidak terealisasinya tambahan penghasilan guru karena banyak guru yang sudah bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi selain itu juga adanya penurunan insentif pemungutan pajak daerah dikarenakan adanya penurunan dari target pendapatan pajak daerah akibat pandemi Covid-19.

Untuk belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan disebabkan pada tahun 2020 banyak alokasi anggaran belanja langsung yang direfocusing dan dialihkan ke belanja tidak terduga dalam rangka penangan covid-19.

Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	**BELANJA**	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124	2,25%
05.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.265.890	1.116.642	1.142.423	1.180.250	1.276.279	0,49%
05.01.01	Belanja Pegawai	1.032.505	825.306	826.969	838.872	799.455	-5,78%
05.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	39		
05.01.03	Belanja Hibah	31.862	50.474	44.796	59.646	84.738	30,60%
05.01.04	Belanja Bantuan Sosial	3.267	1.650	7.852	6.920	760	56,37%
05.01.05	Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	12.430	14.330	17.799	22.291	22.871	16,83%
05.01.06	Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	185.305	222.760	244.601	251.171	266.883	9,74%
05.01.07	Belanja Tidak Terduga	521	2.121	406	1.312	101.572	2022,79%
05.02	**BELANJA LANGSUNG**	750.654	960.099	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
05.02.01	Belanja Pegawai	44.679	69.976	93.830	113.645	126.114	30,70%
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	421.914	557.504	591.238	652.975	580.329	9,38%
05.02.03	Belanja Modal	284.061	332.619	338.160	336.714	216.401	-4,35%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Pengalokasian anggaran belanja APBD mencakup penyediaan alokasi belanja Pendidikan sebesar 20%, belanja Kesehatan 10% diluar gaji, belanja infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 51% sampai dengan 63%, sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 37% sampai dengan 48%.

Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

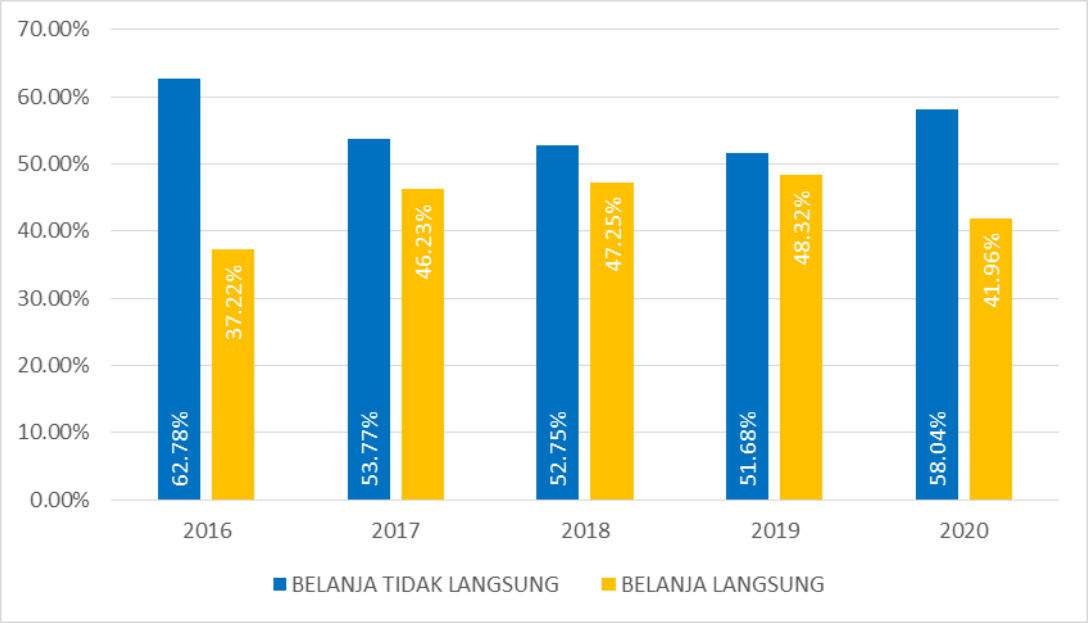

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020

Selama periode tahun 2016-2020, realisasi belanja belum sesuai rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah yang mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 91%, sebagaimana pada gambar berikut:

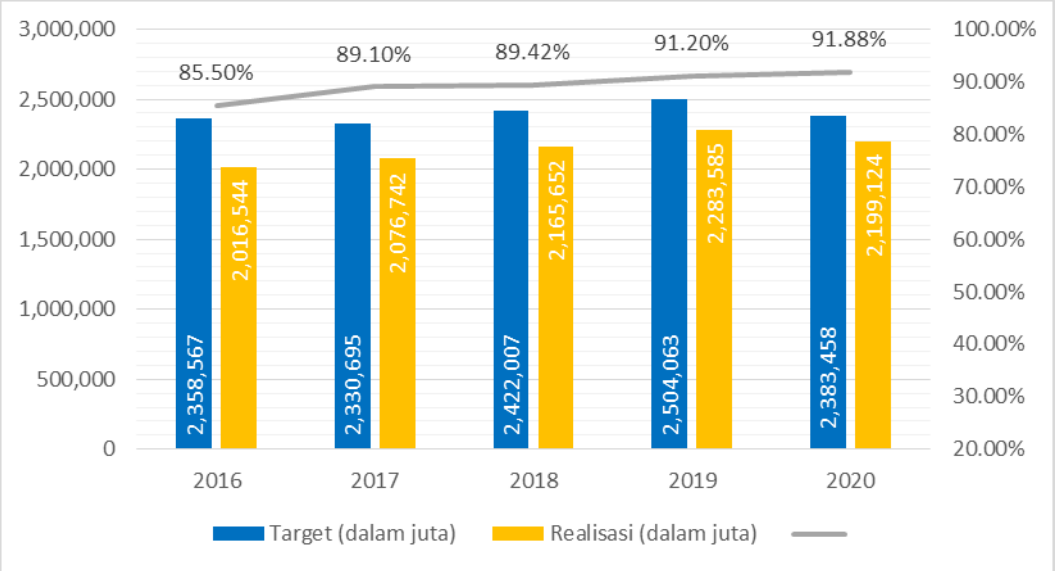

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020

Beberapa permasalahan utama perencanaan dan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Bantul antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang diindikasikan oleh relatif besarnya jumlah belanja yang tidak terserap. Selain itu adanya peraturan dan kebijakan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus diacu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum optimalnya pengendalian belanja daerah sehingga masih terdapat inefisiensi belanja daerah, karena belum semua instrumen pengendalian belanja yang ada seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) di implementasikan pada penganggaran.

3. Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan,pelaksanaan dan pencairan anggaran.

3.1.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir.

Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Surplus (Defisit)	-16.210	10.137	62.100	-14.046	11.121	12,07%
6	**PEMBIAYAAN**	-	-	-	-		
06.01	**PENERIMAAN DAERAH**	293.078	261.454	256.630	296.985	238.679	-4,14%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026	254.842	247.145	279.158	234.048	-4,05%
06.01.02	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.01.03	Penerimaan Piutang Daerah	8.711	6.613	9.486	7.853	3.918	-11,99%
06.01.04	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	7.000	0	-100,00%
06.01.05	Penjualan aset daerah yang dipisahkan	1.342	-	-	2.974	713	-76,03%
06.02	**PENGELUARAN DAERAH**	24.752	24.365	39.573	48.892	11.599	2,03%
06.02.01	Transfer Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.02.02	Penyertaan Modal	16.045	17.150	31.500	34.300	8.001	5,69%
06.02.03	Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo	-	-	-	7.000		-100,00%
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.707	7.215	8.073	7.592	3.598	-15,95%
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	268.326	237.089	217.058	248.094	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252.117	247.226	279.158	234.048	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyertaan Modal merupakan suatu upaya dalam penguatan modal untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Penyertaan modal diberikan kepada 4 (empat) BUMD, yaitu : PT. Bank BPD DIY, Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini digunakan untuk modal tetap dan modal kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD serta melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)
1	PT BPD DIY	10.045	17.151	7.500	16.442	23.000	15.247	23.000	17.353	-	20.154
2	Perumda Aneka Dharma	-	24	1.900	-	500	-	1.800	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	4.500	296	5.500	325	4.500	408	5.000	514	6.000	688
4	PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)	1.500	3.386	2.250	3.173	3.500	3.657	4.500		2.001	4.025
JUMLAH		16.045	20.858	17.150	19.939	31.500	19.312	34.300	21.684	8.001	24.867

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi penyertaan modal dan bagian laba atas penyertaan modal Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.7. Pada periode tahun 2017-2020 hanya 3 (tiga) BUMD yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk deviden (pembagian atas laba yang dibagi) dan telah disetorkan sebagai PAD. Selama periode tersebut Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD . Secara umum kontribusi BUMD pada periode tahun 2016-2020, mengalami pertumbuhan pembagian laba rerata sebesar 4,85%.

Adapun kinerja dari PT BPD DIY dan tiga BUMD Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. PT. BPD DIY

PT Bank BPD DIY adalan bank umum yang kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dan 4 (empat) Kabupaten se DIY dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 dan dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan setoran modal sebesar Rp.98.200.000.000,00, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Keptusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017 telah disepakati untuk meningkatkan modal PT Bank BPD DIY. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.392.800.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan memperluas kelembagaan, memperluas ruang gerak bank dalam

melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Perumda Aneka Dharma

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Daerah ini bergerak di bidang perdagangan umum, pelayanan jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan dan pariwisata. Perumda Aneka Dharma dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 berubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.9.015.063.051,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp10.984.936.949,00 dan diharapkan kekurangan tersebut dapat segera terpenuhi untuk pengembangan Perumda Aneka Dharma. Sampai dengan saat ini, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala hal ini dapat terlihat masih rendahnya laba yang diperoleh bahkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kerugian sehingga Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya penyehatan dan pengembangan Perumda Aneka Dharma baik dari Perumda Aneka Dharma maupun dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Aneka Dharma melalui penyertaan modal dengan tujuan untuk melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut tahun 2021 Perumda Aneka Dharma menyusun Rencana Bisnis Aneka Dharma Tahun 2022 – 2026 yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan operasionalisasi Perumda Aneka Dharma pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Di dalam rencana bisnis tersebut tertuang perencanaan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis inti yang saat ini digeluti dan berusaha mengembangkan bidang usaha baru yang lebih prospektif. Sampai saat ini beberapa progress perbaikan mulai dari sisi organisasi, pelaporan keuangan, Sumber Daya Manusia, operasional, sarana dan prasarana sudah dilakukan untuk memperbaiki citra dan kinerja Perumda Aneka Dharma.

Saat ini Perumda Aneka Dharma lebih fokus pada kegiatan kegiatan usaha inti, dalam hal ini usaha percetakan dan fotokopi. Perbaikan dan pengembangan melalui pembelian mesin dan peralatan baru perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayaanan sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu juga mengembangkan bidang usaha baru yang prospektif sehingga meningkatkan citra dan kinerja perusahaan. Perbaikan dan pengembangan bidang usaha inti dan bidang usaha baru dilakukan melalui penyusunan rencana bisnis yang baik melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Analisis internal mempertimbangkan kondisi Teknis dan Non Teknis, sedangkan analisis eksternal menggunakan analisis PEST (*Political, Economic, Social, Technological*). Adapun pengembangan usaha yang dilakukan diantaranya:

1. Pendirian Apotek Dharma Bhakti Farma untuk mendukung PPBMP
2. Peternakan Kambing dan/atau domba
3. Pengembangan usaha Digital Printing Indoor Dharma Cetak
4. Perdagangan air kemasan Banew Dharma Tirta (distribrutor).

c. Perumda Air Minum Tirta Projotamansari

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 dan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp40.450.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp59.550.000.000,00. Penyertaan Modal yang selama ini diterima oleh Perumda Air Minum Tirta Projotamansari adalah untuk penyambungan saluran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana nantinya akan diganti oleh Pemerintah. Hal ini tentunya masih belum mencukupi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang masih belum memadai utamanya untuk pembangunan kantor pusat sebagai salah satu upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu tambahan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirto Projotamansari.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menambah cakupan pelayanan agar kebutuhan air minum masyarakat terpenuhi maka Perumda Air Minum Tirta Projotamansari mempunyai rencana pengembangan usaha:

1. Pemanfaatan Air SPAM Regional
2. Memaksimalkan kapasitas produksi
3. Menambah kapasitas Instalansi Pengolahan Air (IPA)
4. Rencana Pengamanan Air Minum dan memastikan keakuratan Water Meter Pelanggan
5. Peremajaan pipa pada jaringan pipa tua
6. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW/Non Revenue Water)

7. Pembuatan Zona Air Minum Prima dilingkungan kantor pusat PDAM Bantul
8. Peningkatan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Banew”
9. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
10. Peningkatan SDM yang profesional
11. Peningkatan perfoma perusahaan.

d. PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)

Bank Bantul merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bentuk badan hukum Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Bank Bantul dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Adapun modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp79.029.999.525,00 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.970.000.475,00. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pembagian laba dibagi 55% untuk PAD. Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Bantul sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan untuk memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pengembangan PT BPR Bank Bantul :

1. Pengembangan dan peningkatan layanan dan akses pasar bisnis
2. Mengembangkan produk kredit yang kompetitif
3. Pengadaan dan pengembangan tehnologi informasi
4. Memperkuat kelembagaan dan permodalan.
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dan profesional

3.1.4. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp3,03 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 3,48 triliun pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan.

Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	**296.308.785.282**	**247.225.967.225**	**279.201.069.180**	**234.221.742.887**	**238.201.393.766**	**-4,51%**
Kas Di Kas Daerah	221.268.668.754	229.851.336.933	262.466.433.454	209.212.057.577	200.803.065.465	**-1,56%**
Kas Di Bendahara Pengeluaran	74.654.448	833.005.672	895.288.887	517.382.679	577.835.200	**248,19%**
Kas Di Bendahara Penerimaan	460.910.384	713.824.537	202.892.821	144.893.486	114.418.736	**-16,58%**
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	30.269.625.120	13.541.504.539	13.932.533.084	18.688.863.886	29.197.443.270	**9,50%**
Kas di Pengelola Dana Bergulir	43.932.000	4.710.000				**-94,64%**
Kas di Bendahara BOS	17.353.282.450	2.281.585.544	1.703.920.935	5.658.545.258	7.508.631.095	**38,15%**
Kas di Bendahara Blockgrant	26.837.712.126	-			-	
Kas di KPU dan Panwas	-	-			-	
Piutang	**49.605.707.271**	**64.302.519.439**	**66.825.617.211**	**79.054.966.424**	**63.139.859.320**	**7,93%**
Piutang Pajak	85.821.335.423	97.093.170.135	106.385.740.777	120.990.006.411	130.486.662.479	**11,07%**
Penyisihan Piutang Pajak	(49.426.187.389)	(58.055.308.123)	(65.663.925.171)	(73.764.443.405)	(83.337.103.485)	**13,97%**
Piutang Pajak Neto	36.395.148.035	39.037.862.013	40.721.815.606	47.225.563.006	47.149.558.994	**6,85%**
Piutang Retribusi	2.087.948.332	2.336.181.964	1.162.781.234	965.762.321	1.229.028.167	**-7,01%**
Penyisihan Piutang Retribusi	(50.500.464)	(54.447.542)	(55.663.242)	(81.290.252)	(68.504.614)	**10,09%**
Piutang Retribusi Netto	2.037.447.868	2.281.734.422	1.107.117.992	884.472.069	1.160.523.553	**-7,10%**
Piutang Lain-lain PAD	35.055.495.307	50.808.323.947	56.653.223.726	66.623.914.285	55.014.174.115	**14,15%**
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	(23.882.383.938)	(27.825.400.943)	(31.656.540.112)	(35.678.982.936)	(40.184.397.341)	**13,90%**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Piutang Lain-lain PAD Netto	11.173.111.368	22.982.923.004	24.996.683.613	30.944.931.349	14.829.776.774	**21,54%**
Belanja Dibayar Dimuka	**969.489.397**	**375.616.706**	**1.286.866.565**	**1.155.845.948**	**1.353.626.879**	**47,07%**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	**46.302.100**	**23.125.600**	**4.989.600**	-	-	-64,24%
Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	**14.204.551.854**	**14.776.862.986**	**13.340.761.956**	**13.043.382.057**	**12.713.282.011**	**-2,61%**
Penyisihan Piutang Lainnya	(8.793.485.753)	(9.264.018.934)	(9.673.315.403)	(9.961.494.004)	(10.177.475.432)	**3,73%**
Piutang Lainnya Netto	5.411.066.101	5.512.844.052	3.667.446.553	3.081.888.053	2.535.806.579	**-16,32%**
Piutang Lain-lain	**1.420.076.050**	**2.699.133.341**	-	**4.565.313.667**	**5.230.278.485,00**	**52,32%**
Persediaan	**48.774.707.770**	**49.634.079.007**	**30.712.021.915**	**53.729.871.567**	**62.671.691.153**	**13,81%**
Jumlah Aset Lancar	**402.536.133.971**	**369.773.285.370**	**381.698.011.024**	**375.809.628.546**	**373.132.656.182**	**-1,79%**
Investasi Jangka Panjang						
Investasi Nonpermanen						
Pinjaman Jangka Panjang						
Investasi dalam SUN						
Investasi Nonpermanen lainnya						
Jumlah Investasi nonpermanen						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	117.590.549.808	129.528.808.610	141.614.648.648	192.310.420.018	201.398.147.561	**15,00%**
Investasi Permanen Lainnya	111.561.713.151	119.040.767.501	148.337.286.340	157.901.380.798	159.601.719.394	**9,71%**
Jumlah Investasi permanen	**229.152.262.959**	**248.569.576.111**	**289.951.934.988**	**350.211.800.816**	**360.999.866.955**	**12,25%**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**229.152.262.959**	**248.569.576.111**	**289.951.934.988**	**350.211.800.816**	**360.999.866.955**	**12,25%**
Aset Tetap						
Tanah	535.067.314.152	517.919.614.242	517.793.609.992	518.697.554.092	528.259.669.252	**-0,30%**
Peralatan dan Mesin	514.461.731.544	561.102.664.151	697.431.861.950	795.637.620.716	857.132.572.730	**13,79%**
Gedung dan Bangunan	1.261.647.454.205	1.194.597.731.232	1.249.672.267.650	1.322.393.411.270	1.347.477.527.788	**1,75%**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.821.460.231.355	1.973.041.023.200	2.107.565.021.860	2.279.618.395.259	2.418.835.722.267	**7,35%**
Aset Tetap Lainnya	73.057.689.969	65.734.074.972	72.473.448.275	76.633.860.414	74.559.439.255	**0,82%**
Konstruksi dalam Pengerjaan	644.050.000	-	-	-	-	
Akumulasi Penyusutan	(1.824.330.894.619)	(1.895.906.957.058)	(2.068.002.225.876)	(2.284.957.635.304)	(2.489.343.832.342)	**8,11%**
Jumlah Aset Tetap	**2.382.007.576.606**	**2.416.488.150.739**	**2.576.933.983.851**	**2.708.023.206.447**	**2.736.921.098.950**	**3,56%**
Dana Cadangan						
Dana Cadangan						
Jumlah Dana Cadangan						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Aset Lainnya						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tagihan Jangka Panjang	764.419.414	742.769.414	15.311.414	15.311.414	15.311.414	**-25,19%**
TGR						
Aset Tak berwujud	17.412.173.338	19.945.487.938	18.926.953.566	28.169.681.590	24.725.518.327	**11,51%**
Aset Lain-lain	6.350.410.718	-	-			
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	238.727.239	229.284.603	238.882.149	795.205.530	1.501.519.876	**80,48%**
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(7.914.273.215)	(10.110.558.975)	(12.744.973.240)	(16.605.092.564)	(14.783.929.410)	**18,28%**
Jumlah Aset Lainnya	**16.851.457.495**	**10.806.982.981**	**6.436.173.889**	**12.375.105.970**	**11.458.420.208**	**2,14%**
JUMLAH ASET	**3.030.547.431.031**	**3.045.637.995.200**	**3.255.020.103.753**	**3.446.419.741.778**	**3.482.512.042.295**	**3,58%**
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.161.600	-	42.820.164	29.213.107	-	**-65,89%**
Utang Bunga	-	-	-			
Bagian Lancar Utang Jangka panjang	-	-	-			
Pendapatan Diterima Dimuka	54.070.543	211.677.622	2.358.808.158	2.097.987.840	1.920.229.253	**321,57%**
Utang Belanja	8.987.426.141	13.717.202.977	30.589.186.848	35.202.753.758	36.850.544.830	**48,85%**
Utang Jangka Pendek	-	-	-			

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**9.042.658.284**	**13.928.880.599**	**32.990.815.170**	**37.329.954.705**	**38.770.774.084**	**51,97%**
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan						
Utang Dalam Negeri-Obligasi						
Premium (diskonto) obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-			
JUMLAH KEWAJIBAN	**9.042.658.284**	**13.928.880.599**	**32.990.815.170**	**37.329.954.705**	**38.770.774.084**	**51,97%**
EKUITAS						
Ekuitas	**3.021.504.772.747**	**3.031.709.114.602**	**3.222.029.288.583**	**3.409.089.787.073**	**3.443.741.268.211**	**3,36%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.030.547.431.031**	**3.045.637.995.200**	**3.255.020.103.753**	**3.446.419.741.788**	**3.482.512.042.295**	**3,58%**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	402.536,00	369.773,00	381.698,00	375.809,00	373.133,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Lancar	44,52	26,55	11,57	10,07	9,62
	Aset Lancar Persediaan	353.761,00	320.139,00	350.986,00	322.080,00	310.461,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Cepat	39,12	22,98	10,64	8,63	8,01
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Aset	3.030.547,00	3.045.638,00	3.255.020,00	3.446.420,00	3.482.512,00
	Rasio Total Hutang (%)	0,30%	0,46%	1,01%	1,08%	1,11%
	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Ekuitas	3.021.505,00	3.031.709,00	3.222.029,00	3.409.090,00	3.443.741,00
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,30%	0,46%	1,02%	1,10%	1,13%
	Pendapatan Daerah	2.000.334,00	2.086.879,00	2.227.752,00	2.269.539,00	2.210.246,00

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Aktivitas	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	36.482,00	39.876,00	41.574,00	44.969,00	48.210,00
	Rata-rata Umur Piutang	6,66	6,97	6,81	7,23	7,96

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, iolah

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 semakin menurun, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo semakin turun. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak

kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin Kecil rasio ini berarti semakin Kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 1,09% artinya sebesar Rp1,09 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rerata umur piutang dan rerata umur persedian. Rasio rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Rumus perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Dari data tabel 3.10 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 8 hari pada tahun 2020. Melihat Analisis Rasio Neraca Daerah maka perlu pencermatan dan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan piutang upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya :

- Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan penerbitan surat tagihan pajak daerah atas piutang pajak yang masih menunggak untuk ketetapan pajak tahun 2013 - 2020;
- Pelaksanaan pelayanan pembayaran melalui mobil keliling untuk mengurangi pembayaran kolektif melalui dukuh;
- Penyusunan perbikan pada kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- Perbaikan pada penatausahaan piutang pajak daerah;
- Pelaksanaan sunset policy untuk memutus mata rantai tunggakan PBB dari Tanah Kas Desa.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul cukup tinggi yang mencapai rerata sebesar 89,42% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja langsung yang mencapai rerata sebesar 89,50%, sedangkan belanja tidak langsung mencapai rerata sebesar 89,75%.

Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
Belanja Tidak Langsung	84,54%	86,85%	91,52%	93,96%	91,88%	89,75%
Belanja Pegawai	84,27%	87,20%	93,40%	95,12%	92,47%	90,49%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%		9,83%		3,28%
Belanja Hibah	91,72%	90,60%	78,41%	86,49%	96,38%	88,72%
Belanja Bantuan Sosial	58,57%	42,30%	86,11%	76,49%	26,80%	58,05%
Belanja Bagi Hasil kepada Pem.Prop, Pemda dan Pem. bawahan	98,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pem.Prop,Pemda dan Pem.bawahan	94,84%	96,10%	99,47%	97,80%	99,53%	97,55%
Belanja Tidak Terduga	2,19%	6,18%	1,23%	7,87%	71,15%	17,72%
Belanja Langsung	87,16%	91,97%	87,18%	88,41%	92,80%	89,50%
Belanja Pegawai	87,92%	95,10%	94,29%	94,99%	97,34%	93,93%
Belanja Barang dan Jasa	87,58%	91,03%	90,61%	95,17%	92,01%	91,28%
Belanja Modal	86,44%	92,89%	80,19%	76,15%	92,44%	85,62%
Total Jumlah Belanja	85,50%	89,10%	89,42%	91,20%	91,88%	89,42%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada

berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul, 2016-2020

No.	Tahun	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2016	1.131.440.506.084	2.041.295.978.974	55,43%
2.	2017	968.394.279.891	2.101.106.963.062	46,09%
3.	2018	981.014.504.512	2.205.224.260.352	44,49%
4	2019	1.042.226.986.512	2.332.476.537.902	44,68%
5	2020	913.904.940.061	2.210.723.452.965	41,34%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan terdapat penurunan belanja aparatur tahun 2016-2020, namun terjadi peningkatan pada tahun 2019 karena ada kenaikan belanja antaa lain belanja gaji dan tunjangan, belanja makanan dan minumam pegawai tertentu dan belanja modal. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.037.520.841.483**	**825.306.291.768**	**826.974.448.856**	**838.871.806.847**	**799.455.130.819**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	714.667.286.650	663.489.993.481	728.708.331.992	736.474.607.351	694.559.843.827
2	Belanja Tambahan Penghasilan	308.820.477.912	148.260.815.093	79.000.640.426	78.600.404.750	81.681.945.062
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.001.999.949	5.941.836.000	11.439.120.000	13.866.000.000	14.463.480.000
4	Belanja pemungutan Pajak dan retribusi Daerah (insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah)	5.015.538.486	6.410.647.194	7.826.356.438	9.930.794.746	8.749.861.930
5	Tunjangan Uang Makan	5.015.538.486	1.203.000.000			
B	**Belanja Langsung**	**93.919.664.601**	**143.087.988.123**	**154.040.055.656**	**202.355.179.665**	**114.439.681.242**
1	Belanja Honorarium PNS	5.153.557.350	5.315.219.200	7.190.335.700	6.613.266.900	5.698.408.600
2	Belanja Uang Lembur	158.364.250	105.595.003	94.741.201	112.645.000	45.526.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	213.500.000	420.000.000	103.500.000	49.750.000	34.500.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.275.132.200	2.320.355.900	3.390.889.800	8.124.762.500	1.665.801.383
5	Belanja Premi Asuransi	14.859.650	6.567.897.370	10.847.352.364	20.755.630.871	21.291.371.178
6	Belanja makanan dan minuman pegawai tertentu	23.450.786.561	29.167.294.676	38.769.767.741	51.664.012.196	33.617.686.430
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	295.939.899	4.371.452.625	404.910.100	523.689.500	538.887.000
8	Belanja Pakaian Kerja	1.079.931.264	1.503.899.200	1.452.509.451	1.717.830.941	834.556.535
9	Belanja perjalanan dinas	27.795.508.307	35.352.013.236	37.088.865.955	32.100.809.618	11.728.590.921
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dan lain lainl)	32.482.085.120	57.964.260.913	54.697.183.344	80.692.782.139	38.994.481.195
	Total Belanja Aparatur	**1.131.440.506.084**	**968.394.279.891**	**981.014.504.512**	**1.042.226.986.512**	**913.904.940.061**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Belanja wajib ini digunakan untuk urusan wajib dan mengikat terkait kelangsungan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan kebutuhan.

Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	2018 (Rp.juta)	2019 (Rp.juta)	2020 (Rp.juta)
I.	**BELANJA**	**1,277,096**	**1,151,575**	**1,170,066**	**1,215,009**	**1,129,996**
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,247,923**	**1,108,512**	**1,116,398**	**1,147,678**	**1,037,680**
1	Gaji Dan Tunjangan	714,667	663,490	728,708	737,475	694,560
2	Tambahan Penghasilan PNS	308,820	148,261	79,001	78,600	81,682
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,002	5,942	11,440	13,866	14,463
4	Belanja Hibah	31,862	66,409	44,796	59,646	84,738
5	Belanja Bantuan Sosial	3,267	1,650	7,852	6,920	759
6	Belanja Bantuan Keuangan	185,305	222,760	244,601	251,171	161,478
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**29,173**	**43,063**	**53,668**	**67,331**	**92,316**
1	Belanja Jasa Kantor	28,944	36,075	42,717	46,525	70,989
2	Belanja Premi Asuransi	15	6,568	10,847	20,756	21,292
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	214	420	104	50	35
II.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**16,045**	**17,150**	**31,500**	**34,300**	**8,000**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16,045	17,150	31,500	34,300	8,000
2	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
JUMLAH (I + II)		**1,293,141**	**1,168,725**	**1,201,566**	**1,249,309**	**1,137,996**
Jumlah Total Belanja		**2,016,544**	**2,076,742**	**2,165,652**	**2,283,585**	**2,094,142**
Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Terhadap Total Belanja		**64.13%**	**56.28%**	**55.48%**	**54.71%**	**54.34%**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel di atas Periode tahun 2017-2020 terdapat kecenderungan menurun dan mencapai 54,34% pada tahun 2020.

Mencermati rincian belanja, pada tahun 2017 dan 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada belanja hibah karena adanya kenaikan Belanja Operasional Pendidikan (BOP), dan premi asuransi karena adanya kebijakan terkait pemberian jaminan kesehatan, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan *refocusing* anggaran diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19

3.2.2. Analisis Pembiayan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.000.335	2.086.879	2.227.753	2.269.539	2.210.246
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.752	24.365	39.573	48.892	11,599
	Surplus/Defisit Riil	**(40.962)**	**(14.228)**	**22.527**	**(62,938)**	**(477)**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	283,026	254,842	247,145	279,158	234,048
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,342	-	-	2,974	713
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	7,000	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	8,711	6,613	9,486	7,853	3,918
	Jumlah penerimaan daerah	293,078	261,454	256,630	296,985	238,678

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapaiya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan dalam rangka investasi daerah, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	283,026		254,842		247,145		279,158		234,048	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	54,827	19.37%	31,213	12.25%	36,137	14.62%	30,108	10.79%	26.678	11,40%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-12,367	-4.37%	-135,427	-53.14%	-51,893	-21.00%	-21,898	-7.84%	-	
4	Pelampauan Penerimaan lan-lain Pendapatan Daerah yg sah	-5,296	-1.87%	11,962	4.69%	7,562	3.06%	13,036	4.67%	-	
5	Sisa Penghematan Belanja	245,955	86.90%	342,024	134.21%	253,954	102.76%	256,355	91.83%	207.370	88,60%
6	Kewajiban kepada Pihak III yang belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	
8	Koreksi SiLPA	-	-	2.725	1,07%	(18)	-0,03%	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

SiLPA yang tinggi menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan belanja daerah yang meningkat cukup signifikan tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga menyebabkan SiLPA yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ada empat hal yang menyebabkan terjadinya SiLPA yaitu :

1. Pelampauan Target Pendapatan

   SiLPA terjadi karena adanya pelampauan target dari pendapatan, bila pelampauan PAD maka dapat memperbesar ruang fiskal dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah tetapi apabila sebaliknya maka justru mengindikasikan penurunan dalam kemandirian daerah.

2. Efisiensi Belanja

   SiLPA di Kabupaten Bantul juga terjadi karena adanya efisiensi belanja program kegiatan sehingga terjadi penghematan belanja dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas lainnya.

3. Target belanja tidak tercapai

   SiLPA karena tidak terpenuhinya target belanja akan menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya dan hal tersebut menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, antara lain karena tata kelola keuangan yang tidak tertib seperti lemahnya perencanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan lambatnya penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga.

3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19)

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dampak Pandemi tersebut mengharuskan Pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelamatan baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 diantaranya adalah untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dana dan penggunaan APBD yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada triwulan II Tahun 2020 Pemerintah Bantul mulai melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja.

3.2.3.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2,31 trilyun, karena ada pandemi maka target tersebut dikoresi pada perubahan APBD 2020 menjadi Rp2,08 trilyun atau turun sebesar 10,05%. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada hampir semua komponen pendapatan. Namun demikian masih ada

beberapa pendapatan yang mengalami kenaikan yaitu sumber pendapatan dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 4,21%; Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak naik sebesar 8,60% peningkatan ini berasal dari komponen pajak penghasilan; dan pendapatan hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 33,33% dimana kenaikan tersebut berasal dari Hibah kepada PDAM.

abel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PENDAPATAN DAERAH	**2.313.851.073.116,50**	**2.081.194.441.954,19**	**(232.656.631.162)**	**-10,05%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**469.798.331.294,00**	**420.780.615.321,87**	**(49.017.715.972)**	**-10,43%**
Pajak Daerah	195.000.000.000,00	175.265.482.000,00	(19.734.518.000)	-10,12%
Retribusi Daerah	46.832.583.434,00	24.354.322.386,00	(22.478.261.048)	-48,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	23.707.166.955,00	24.704.142.455,07	996.975.500	4,21%
Lain-lain PAD Yang Sah	204.258.580.905,00	196.456.668.480,80	(7.801.912.424)	-3,82%
DANA PERIMBANGAN	**1.393.629.940.890,50**	**1.279.745.464.554,00**	**(113.884.476.337)**	**-8,17%**
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	28.634.067.890,50	31.097.246.000,00	2.463.178.110	8,60%
Dana Alokasi Umum	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00	(93.874.919.000)	-9,15%
Dana Alokasi Khusus	339.124.949.000,00	316.652.213.554,00	(22.472.735.446)	-6,63%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**450.422.800.932,00**	**380.668.362.078,32**	**(69.754.438.854)**	**-15,49%**
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000	33,33%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.733.524.432,00	152.621.840.588,32	(15.111.683.844)	-9,01%
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	192.493.982.000,00	191.989.028.000,00	(504.954.000)	-0,26%
- Dana Insentif Daerah	86.277.987.000,00	86.583.558.000,00	305.571.000	0,35%
- Dana Desa	106.215.995.000,00	105.405.470.000,00	(810.525.000)	-0,76%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.695.294.500,00	30.057.493.490,00	(55.637.801.010)	-64,93%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.3.2. Belanja Daerah

Dengan penurunan target pendapatan daerah pada APBD 2020 maka belanja daerah pada perubahan APBD juga mengalami

penurunan sebesar 3,70%. Penurunan belanja tersebut terjadi pada semua mata anggaran belanja daerah, kecuali belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dan pegawai serta belanja barang dan jasa pada belanja langsung.

Belanja Tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 797,81%, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan dan penataan ulang dengan memperhatikan kebijakan dan instruksi pemerintah pusat yang ditekankan pada penanganan dampak pandemi Covid19 yang meliputi aspek kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial.

Tabel.3.19 Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
BELANJA DAERAH	**2.474.907.091.918,14**	**2.383.458.652.405,17**	**(91.448.439.512,97)**	**-3,70%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.334.474.653.321,04**	**1.389.050.261.074,07**	**54.575.607.753**	**4,09%**
Belanja Pegawai	917.865.137.233,00	864.539.520.207,34	(53.325.617.026)	-5,81%
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	90.916.212.000,00	87.919.851.200,00	(2.996.360.800)	-3,30%
Belanja Bantuan Sosial	6.810.000.000,00	2.835.000.000,00	(3.975.000.000)	-58,37%
Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40	-	0,00%
Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	280.110.271.960,00	268.118.528.110,00	(11.991.743.850)	-4,28%
Belanja Tidak Terduga	15.901.514.534,64	142.765.843.963,33	126.864.329.429	797,81%
BELANJA LANGSUNG	**1.140.432.438.597,10**	**994.408.391.331,10**	**(146.024.047.266)**	**-12,80%**
Belanja Pegawai	121.493.996.828,00	129.562.208.540,00	8.068.211.712	6,64%
Belanja Barang dan Jasa	625.601.960.111,10	630.734.900.915,10	5.132.940.804	0,82%
Belanja Modal	393.336.481.658,00	234.111.281.876,00	(159.225.199.782)	-40,48%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan didominasi dari

SilPA yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi kegiatan tahun 2020. SilPA mengalami kenaikan sebesar 41,37% dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada sisi penerimaan penerimaan pinjaman daerah pada perubahan APBD 2020 diperhitungkan dalam rangka untuk biaya operasional RSUD dikarenakan klaim dari BPJS sering mengalami keterlambatan namun pelaksanaan pinjaman sampai akhir 2020 tidak direalisasikan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 138,70%. Pengeluran pembiayaan didominasi dari penyertaan modal yang mengalami kenaikan sebesar 77,76% karena adanya tambahan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang semula sebesar Rp4.5 milyar menjadi Rp6 milyar.

Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**176.556.833.064,26**	**263.047.636.293,60**	**86.490.803.229**	**48,99%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	165.556.833.064,26	234.047.636.293,60	68.490.803.229	41,37%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PENGELURAAN PEMBIAYAAN	**15.500.814.262,62**	**37.000.814.262,62**	**21.500.000.000**	**138,70%**
Penyertaan Modal	4.500.814.262,62	8.000.814.262,62	3.500.000.000	77,76%
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	161.056.018.801,64	**226.046.822.030,98**	**64.990.803.229,34**	40,35%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 dihitung hingga tahun 2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Bantul tahun 2007-2020. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal DIY maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

3. 3. 1. 1 **Pendapatan Daerah**

a. Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan sebesar 3,42% pertahun. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi pajak maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 akan memproses perubahan peraturan daerah terkait dengan pajak daerah. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
   1) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
   2) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
   3) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   4) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
   5) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
   6) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
   7) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
   8) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
   9) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak; dan
   10) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.

b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru.
c. Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
d. Dengan sudah disusunnya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul sementara pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbatas maka diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya dengan cara menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta swasta melalui CSR, kemitraan, kerjasama, KPBU, filantropi dan sebagainya.

3. 3. 1. 2 **Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada:

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

1. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan
6. Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
8. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);

9. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
10. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
11. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:

1) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial. Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. 3. 1. 3 **Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan:

1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	**2.121.698.479.000**	**2.025.812.431.000**	**2.272.219.790.000**	**2.213.997.734.000**	**2.246.435.909.000**	**2.306.150.935.000**	**1,84%**
4,01	**Pendapatan Asli Daerah**	**495.767.307.000**	**493.854.008.000**	**520.280.302.000**	**535.634.373.000**	**551.833.901.000**	**585.897.304.000**	**3,42%**
04,01,01	Hasil Pajak Daerah	221.912.299.000,00	221.979.000.000	246.313.246.000	259.002.532.000	272.352.367.000	303.021.040.000	**6,51%**
04,01,02	Hasil Retribusi Daerah	39.446.673.000,00	39.631.673.000	40.645.490.000	41.653.992.000	42.681.385.000	43.734.117.000	**2,09%**
04,01,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.167.000,00	23.707.167.000	24.271.398.000	25.727.681.000	27.399.981.000	29.591.979.000	**4,58%**
04,01,04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.701.168.000,00	208.536.168.000	209.050.168.000	209.250.168.000	209.400.168.000	209.550.168.000	**-0,11%**
4,02	**Pendapatan Transfer**	**1.619.931.172.000**	**1.531.958.423.000**	**1.751.939.488.000**	**1.678.363.361.000**	**1.694.602.008.000**	**1.720.253.631.000**	**1,44%**
04,02,01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.343.338.184.000**	**1.343.338.184.000**	**1.377.511.321.000**	**1.402.550.118.000**	**1.425.711.264.000**	**1.451.851.970.000**	**1,57%**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.153.018.000,00	29.153.018.000	30.610.669.000	32.141.202.000	33.748.262.000	35.435.675.000	**4,00%**
	Dana Alokasi Umum	941.315.965.000,00	941.315.965.000	959.200.968.000	978.384.988.000	995.506.725.000	1.015.416.859.000	**1,53%**
	Dana Alokasi Khusus	233.146.510.000,00	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000	**1,46%**
	DID	**30.323.619.000,00**	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	
	Dana Desa	**109.399.072.000,00**	109.399.072.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	**1,94%**
04,02,02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**276.592.988.000**	**188.620.239.000**	**374.428.167.000**	**275.813.243.000**	**268.890.744.000**	**268.401.661.000**	**7,53%**
	Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	152.713.899.000,00	158.913.899.000	166.065.025.000	173.537.951.000	181.347.159.000	189.507.781.000	**4,41%**
	Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya	123.879.089.000,00	29.706.340.000	208.363.142.000	102.275.292.000	87.543.585.000	78.893.880.000	**90,04%**
4,03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**6.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
04,03,01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000						
5	**BELANJA DAERAH**	**2.267.724.883.000**	**2.141.090.935.000**	**2.393.621.289.000**	**2.335.645.090.000**	**2.369.372.795.000**	**2.433.607.603.000**	**1,59%**
5,01	**Belanja Operasi**	**1.713.809.666.000**	**1.664.248.301.000**	**1.748.842.898.000**	**1.788.661.823.000**	**1.825.402.113.000**	**1.874.727.528.000**	**1,84%**
05,01,01	Belanja Pegawai	951.471.887.000	976.142.986.000	992.330.204.000	1.009.871.614.000	1.027.786.933.000	1.046.916.030.000	**1,93%**

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05,01,02	Belanja Barang dan Jasa	634.395.529.000	626.235.407.000	693.173.694.000	706.280.209.000	734.916.180.000	764.904.498.000	**3,89%**
05,01,05	Belanja Hibah	122.107.250.000	55.601.908.000	57.339.000.000	66.510.000.000	56.699.000.000	56.907.000.000	**-9,95%**
05,01,06	Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000	6.268.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	**0,63%**
5,02	**Belanja Modal**	**242.068.319.000,00**	**135.929.147.000**	**295.684.951.000**	**194.601.647.000**	**188.439.165.000**	**198.185.404.000**	**8,30%**
5,03	**Belanja Tidak Terduga**	34.055.411.000,00	**22.686.428.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**-9,05%**
5,04	**Belanja Transfer**	**277.791.487.000**	**318.227.059.000**	**329.093.440.000**	**332.381.620.000**	**335.531.517.000**	**340.694.671.000**	**4,29%**
05,04,01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.000,00	26.103.398.000	28.695.874.000	30.065.652.000	31.503.375.000	34.675.516.000	**5,91%**
05,04,02	Belanja Bantuan Keuangan	251.688.089.000,00	292.123.661.000	300.397.566.000	302.315.968.000	304.028.142.000	306.019.155.000	**4,15%**
Surplus (Defisit)		**146.026.404.000**	**115.278.503.000**	**121.401.499.000**	**121.647.356.000**	**122.936.886.000**	**127.456.668.000**	**-2,16%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6,01	**Penerimaan Pembiayaan**	**182.026.404.000**	**151.278.503.000**	**158.401.499.000**	**158.647.356.000**	**159.936.886.000**	**164.456.668.000**	**-1,68%**
06,01,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000	**-1,90%**
06,01,02	Penerimaan Piutang Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	**1,82%**
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
6,02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**36.000.000.000**	**36.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**0,56%**
06,02,01	Penyertaan Modal	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	**0,00%**
06,02,02	Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	**1,82%**
			-					
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	**146.026.404.000**	**115.278.503.000**	**121.401.499.000**	**121.647.356.000**	**122.936.886.000**	**127.456.668.000**	**-2,16%**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pendapatan daerah diperkirakan rerata tumbuh sebesar 1,84% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai sebesar Rp.2,12 triliun. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, diasumsikan pandemi Covid sudah dapat diatasi, total pendapatan daerah diperkirakan kembali tumbuh mencapai sebesar Rp.2,03 triliun dan meningkat menjadi Rp.2,31 triliun pada tahun 2026.

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 1,59%. Pada tahun 2021, belanja daerah dalam APBD mencapai nilai nominal sebesar Rp.2,27 triliun yang kemudian diperkirakan menjadi sebesar Rp.2,14 triliun pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp.2,43 triliun pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rerata pertahun sebesar 1,81%. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami peningkatan rerata sebesar 8,30% pertahun

Selanjutnya berdasarkan perimbangan pendapatan dan belanja daerah maka dapat ditemukan selisih defisit APBD Kabupaten Bantul yang akan ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2021-2026, SiLPA diperkirakan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dari sebesar Rp. 171,03 milyar pada tahun 2021 dan tahun 2026 mencapai sebesar Rp.152,46 milyar.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu peningkatan modal BUMD melalui penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyertaan Modal pada BUMD di proyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026

BUMD	PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Rp.JUTA)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PT. BPD DIY	15.000	13.200	13.200	13.200	12.230	15.200
PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.970	2.000
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PERUMDA ANEKA DHARMA		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
JUMLAH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3. 3. 1. 4 Penjelasan Proyeksi masing-masing Pos Pendapatan dan Belanja Daerah

Metode yang digunakan dalam memproyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah terdiri dari expert judgement dan teknik forecasting trend linear. Gambaran proyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Proyeksi Pajak Daerah tahun 2021-2026, berdasarkan penilaian kecenderungan data realisasi berbagai jenis pajak daerah selama periode 10 tahun terakhir, maka secara keseluruhan pos pajak

daerah mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,51% selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dari sebesar Rp.221,91 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.303,02 milyar pada tahun 2026. Pertumbuhan pajak daerah cukup signifikan, didasari oleh perkiraan akan terjadinya kondisi kenormalan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Perekonomian daerah Kabupaten Bantul akan tumbuh ditandai dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif, pariwisata dan usaha Kecil dan menengah yang selama ini telah banyak memberi kontribusi terhadap realisasi pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan seterusnya. Adapun proyeksi rincian pajak daerah tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Hotel diperkirakan pulih kembali pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 5%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,11 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos.
- Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadi 7 % pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026.
- Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya

pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan, adapun rerata pertumbuhan pajak hiburan sebesar 5,25% pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.876 Juta, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1,15 milyar pada tahun 2026. Prediksi pertumbuhan ini optimis dapat tercapai karena didukung pulihnya kegiatan pariwisata pada tahun 2023.

- Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah dan ditahun 2026 mencapai sekitar Rp.3,03 milyar. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu. Namun pendapatan pajak reklame dapat dioptimalkan dengan menempatkan reklame ditempat yang strategis selain lokasi yang ada pembatasan jumlah titik reklame.
- Pajak Penerangan Jalan mulai tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun sesuai dengan perkembangan data realisasi pada 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp.47,51 milyar dan terus meningkat sampai tahun 2026 mencapai sebesar Rp.57,74 milyar.
- Pajak Parkir diperkirakan mulai pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh mencapai 7%. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp.260 juta pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.337 juta pada tahun 2026.

- Pajak air bawah tanah diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 4,01% pertahun. Pada tahun 2021 mencapai kisaran Rp.781 juta kemudian meningkat menjadi Rp.949 juta pada tahun 2026. Hambatan dalam pengembangan sumber pendapatan dari pajak air bawah tanah ini adalah adanya potensi perusakan lingkungan hidup akibat terlalu dieksploitasi. Perlu dicarikan solusi agar pajak air bawah tanah tetap optimal dan lingkungan hidup tetap terpelihara.
- Pajak sarang burung walet setiap tahun hanya ditarget sebesar Rp2.000,000 karena potensi Kecil dan semakin hilang, selayaknya pos ini dipertimbangkan terkait dengan efisien pendapatan dan belanja sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat(4) yang mana menyebutkan bahwa apabila potensi jenis pajak kurang memadai dapat tidak dipungut.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.938 juta pada tahun 2026. Rerata pertumbuhan pajak mineral bukan logam sebesar 5% pertahun.
- Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5%, dengan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) setiap 3(tiga) tahun sekali. Pada tahun 2021 PBB P2 ditarget sebesar Rp.55,13 milyar dan meningkat sebesar Rp.55,68 milyar dan seterusnya menjadi Rp.87,52 milyar pada tahun 2026.
- BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5 % dikarenakan adanya efek kenaikan NJOP setiap 3(tiga) tahun sekali. Pajak ini ditarget sebesar Rp.93,71 milyar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp.92,78 milyar pada tahun 2022 dan seterusnya meningkat menjadi Rp.125,02 milyar pada tahun 2026.

Selanjutnya beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang antara lain:

- Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos.
- Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya.
- Pajak hiburan perlu didorong dengan meningkatkan atraksi seni dan budaya di Bantul seiring dengan pengembangan objek dan destinasi pariwisata.
- Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
- Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.
- Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan, namun demikian perlu ada kordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya.

Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.01	Pajak Hotel	4.034	4.115	4.236	4.448	4.670	4.903	Pajak Hotel diperkirakan baru awal masa pemulihan pada tahun 2022 dan mulai dengan tingkat pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan rerata pertahun sebesar 5% mulai tahun 2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,12 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos
01.02	Pajak Restoran	16.348	16.675	17.492	18.717	20.027	21.429	Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadai rerata pertahun mencapai sebesar 7%. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026
01.03	Pajak Hiburan	876	876	938	1.003	1.073	1.149	Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul.

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
								Cukup optimisnya pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan
01.04	Pajak Reklame	2.499	2.524	2.624	2.755	2.893	3.038	Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
01.05	Pajak Penerangan Jalan	47.506	47.506	49.882	52.376	54.995	57.744	Pajak ini diperkirakan tumbuh sebesar 5 % pertahun mulai tahun 2023.
01.06	Pajak Parkir	257	260	275	294	315	337	Pajak Parkir diperkirakan masuk awal pemulihan pada tahun 2022 Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 7 %.
01.07	Pajak Air Bawah Tanah	781	789	820	861	904	949	Pajak air bawah tanah ditargetkan sebesar Rp.781 juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan tumbuh sebesar 4,01% pertahun

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.08	Pajak Sarang Burung Walet	2	2	2	2	2	2	Potensi Kecil dan target yang dipatok tetap sebesar Rp2.000,000 pertahun
01.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	772	780	810	851	893	938	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5%.
01.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	55.125	55.676	66.150	69.458	72.930	87.516	Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5 % pertahun, dengan penyesuaian NJOP setiap 3 tahun.
01.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	93.713	92.776	103.084	108.238	113.650	125.015	BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5% dan terdapat efek kenaikan NJOP PBB setiap 3 tahun.
J U M L A H		221.912	221.979	246.313	259.003	272.352	303.021	Rerata Pertumbuhan 6,%1%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2. Proyeksi retribusi daerah tahun 2021-2026 akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% pertahun. Hal ini dihitung berdasarkan justifikasi pola data realisasi masing-masing pos retribusi daerah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, perolehan retribusi daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp.39,45 milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp.39,63 milyar pada tahun 2022, dan mencapai sebesar Rp.43,73 milyar pada tahun 2026. Lima pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta retribusi parkir.

Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
1	RETRIBUSI JASA UMUM	7.502.283.120	7.502.283.120	7.739.885.860	8.017.680.724	8.215.717.438	8.418.645.659	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.799.855.120	1.799.855.120	1.880.848.600	1.915.486.787	1.962.799.311	2.011.280.454	DLH Dinas perdagangan
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	330.750.000	330.750.000	345.633.750	361.187.269	370.108.595	379.250.277	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	3.173.092.000	3.173.092.000	3.215.881.140	3.365.095.791	3.448.213.657	3.533.384.534	Dinas perdagangann
	Retribusi PKB - Buku Uji	1.203.247.500	1.203.247.500	1.257.393.638	1.288.976.351	1.320.814.067	1.353.438.174	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	8.000.000	8.000.000	8.360.000	8.736.200	8.951.984	9.173.098	Dinas Kesehatan
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	535.500.000	535.500.000	559.597.500	584.779.388	599.223.439	614.024.258	Dinas KOMINFO
	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	21.602.500	21.602.500	22.574.613	23.590.470	24.173.155	24.770.232	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	224.400.000	224.400.000	234.498.000	245.050.410	251.103.155	257.305.403	DPPPKP
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000	112.200.000	117.249.000	122.525.205	125.551.578	128.652.702	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	93.636.000	93.636.000	97.849.620	102.252.853	104.778.498	107.366.527	Dinas Perdagangan
2	RETRIBUSI JASA USAHA	29.275.889.984	29.295.889.984	30.117.021.171	30.772.242.728	31.530.855.896	32.309.668.037	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.241.595.000	1.261.595.000	1.297.466.775	1.355.852.780	1.389.342.344	1.423.659.100	DPUPKP' DPPKP; Dinas Perhubungan; DLH

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	86.700.000	86.700.000	90.601.500	94.678.568	97.017.129	99.413.452	DPPKP
	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	122.173.000	122.173.000	127.670.785	133.415.970	136.711.344	140.088.115	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	192.710.000	192.710.000	201.381.950	210.444.138	215.642.108	220.968.468	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000	5.000.000	5.225.000	5.460.125	5.594.990	5.733.186	Bagian Umum
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.200.875.000	25.200.875.000	25.858.630.513	26.322.224.490	26.970.922.208	27.637.103.986	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.316.586.984	2.316.586.984	2.420.833.398	2.529.770.901	2.592.256.242	2.656.284.971	DPPKP
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.250.000	110.250.000	115.211.250	120.395.756	123.369.531	126.416.759	DPPKP
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2.668.500.000	2.668.500.000	2.788.582.500	2.864.068.713	2.934.811.210	3.005.803.778	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.205.000.000	2.205.000.000	2.304.225.000	2.357.915.125	2.416.155.629	2.474.337.404	DPUPKP
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	463.500.000	463.500.000	484.357.500	506.153.588	518.655.582	531.466.374	Dina Tenaga Kerja
JUMLAH		39.446.673.104	39.466.673.104	40.645.489.532	41.653.992.164	42.681.384.544	43.734.117.474	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3. Untuk proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan dengan metode forecasting trend linear. Selama periode tahun 2021-2026, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 4,58% pertahun, dari sebesar Rp.23,7 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.29,59 milyar pada tahun 2026. Peningkatan perolehan pendapatan daerah dari pos ini didasari oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan regional DIY yang akan berdampak pada semakin meningkatnya laba bersih sektor usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti BPD DIY dan PD BPR Bank Bantul, PD Aneka Dharma, PDAM dan BUKP.

4. Lain-lain PAD tidak dilakukan estimasi karena pos ini hanya bersifat insidentil menampung berbagai kemungkinan adanya dana pendapatan daerah. Beberapa pos yang dominan dari pendapatan ini berasal dari pendapatan BLUD, deposito, dana bergulir, denda, pengembalian kerugian dan beberapa pos lainnya. Berdasarkan angka realisasi yang ada diperkirakan sepanjang tahun 2021-2026, pendapatan dari lain-lain PAD lebih kurang sebesar Rp209,55 milyar pertahun.

5. Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata yang berkisar antara 4 - 5% pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Perkiraan dan justifikasi tersebut dilakukan karena forecasting yang dilakukan atas data realisasi tahun 2007-2019 menghasilkan model estimasi dan angka perkiraan yang fluktuatif.
Sesuai dengan meningkatnya iklim investasi yang makin kondusif di Kabupaten Bantul maka jumlah realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga akan terus meningkat, hal ini akan

berdampak pada meningkatnya pembayar pajak penghasilan pasal 21 di Kabupaten Bantul yang otomatis akan menjadi potensi Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2015-2020 terlihat adanya peningkatan jumlah investasi PMA dan PMDN serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja		
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah
1	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730
2	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760
3	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921
4	2019	106	103	209	17.146	11.834	28.980
5	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

6. Dana Alokasi Umum diestimasi dengan menggunakan justifikasi pertumbuhan realisasi beberapa tahun belakangan, hal ini dilakukan akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan. Selama periode tahun 2021-2026, DAU diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 1,53% pertahun yaitu berada pada kisaran tingkat pertumbuhan DAU periode 2014-2019. Pada tahun 2021, DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp.941.3 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1.015,4 milyar pada tahun 2026.

7. Dana Alokasi Khusus hanya diprediksi DAK Non Fisik saja terutama untuk DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tersebut mengalami pertumbuhan rerata 1,46% dengan asumsi adanya kenaikan gaji pokok. Sementara untuk alokasi DAK yang lain tidak dapat diprediksi hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, sebelum ada informasi dari Pemerintah maka tidak bisa mencantumkan prediksi dari Dana Alokasi Khusus tersebut.

8. Dana Insentif Daerah tidak dilakukan proyeksi karena pendapatan tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dan diasumsikan tetap selama periode 2021 - 2026.

9. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dengan menggunakan metode forecasting linear terhadap data Bagi Hasil Pajak Provinsi pada periode tahun 2007-2019. Dari hasil perhitungan ditemukan rerata pertumbuhan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 4,41% pertahun selama periode tahun 2021-2026.

10. Proyeksi belanja Operasi tahun 2021-2026 menggunakan metode forecasting linear dan justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,84%. Belanja operasi lebih di dominasi dari belanja pegawai yang mencapai 56% sampai 59% dari pos belanja lainnya. Adapun penjelasan proyeksi masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

a. Pos belanja pegawai diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,93% pertahun, dari sebesar Rp.951,47 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1,05 triliun pada tahun 2026. Kenaikan belanja tersebut digunakan mendukung belanja kepegawaian berupa gaji, tunjangan, insentif serta belanja-belanja yang terkait dengan dukungan pelaksanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Anggaran belanja pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2022-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sedangkan pengelolaan gaji tetap dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah

b. Belanja barang dan jasa diperkirakan sedikit mengalami peningkatan rerata sebesar 3,89% sepanjang periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai sebesar Rp634,40 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp626,24 milyar pada tahun 2022 dan kembali mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp.762,08 milyar pada tahun 2026. Justifikasi pertumbuhan belanja barang dan jasa tersebut didasarkan pada kisaran angka pertumbuhan yang dapat mempertahankan proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah yang pada periode 2014-2019 berada pada kisaran angka 18 - 28%.

c. Belanja Hibah menggunakan metode forecasting trend linear. Belanja hibah diproyeksikan tidak sepenuhnya mengikuti hasil forecasting namun juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp.122,11milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.55,60 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2024 megalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.66,51 milyar dikarenakan adanya PILKADA serentak.

d. Belanja Bantuan Sosial dilakukan justifikasi nilai berdasarkan nilai median. Hal tersebut disebabkan oleh variasi data antar tahun yang sangat berbeda yang menghasilkan estimasi dan angka perkiraan yang tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Proyeksi Belanja Modal untuk tahun 2021 - 2026 menggunakan metode justifikasi akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan, Pada tahun 2021 belanja modal mencapai Rp242,07 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp135,93 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 mencapai sebesar Rp198,18 milyar, Selama periode 2022-2026 belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan pada periode tersebut tidak memprediksi belanja yang berasal dari sumber dana DAK Fisik,

12. Belanja tidak terduga tidak dilakukan proyeksi karena sifatnya untuk keperluan darurat dan tidak bisa diprediksi sehingga diasumsikan tetap dalam kisaran angka sebesar Rp20 milyar pertahun.

13. Proyeksi Belanja Transfer tahun 2021-2026 menggunakan metode justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. Hasilnya pos ini diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 4,29% pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp.277,79 milyar kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.318,23 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp.340.69 milyar.

14. Belanja Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk setiap Kalurahan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Selama periode tahun 2021-2026, belanja bagi hasil mengalami pertumbuhan rerata sebesar 5,91% pertahun, dari sebesar Rp26,10 milyar pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp34,68 milyar pada tahun 2026.

15. Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan mengalami peningkatan rerata sebesar 4,15 % pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 jumlah belanja bantuan keuangan mencapai sebesar Rp251,12 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp292,67milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp306,09 milyar pada tahun 2026.

3. 3. 2 **Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan dalam RPJMD bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja

dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earkmark) dan belanja tertentu.Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam penghitungan Kapasitas Riil Keuangan daerah adalah

- Langkah pertama: menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
- Langkah kedua: menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiiki daerah yaitu pendapatan DAK dan Dana penyesuaian dan Otsus. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tersedia,
- Langkah Ketiga: Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji, tunjangan pegawai dan belanja transfer, juga termasuk dalam belanja mengikat yaitu belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah.
- Langkah Keempat: menghitung jumlah belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, diantaranya belanja untuk mendukung program pendidikan yang mencapai 20% dari alokasi belanja, kemudian belanja untuk kesehatan yang mencapai 10% dari belanja

daerah, dan kebutuhan belanja BLUD pada beberapa perangkat daerah.

- Langkah Kelima: menghitung Kapasitas riil keuangan daerah dengan rumus berikut Kapasitas Riil Keuangan Daerah = Kapasitas riil penerimaan daerah – (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat + Belanja Wajib Daerah).

Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL PENERIMAAN DAERAH	**2.292.724.883.000**	**2.166.090.934.000**	**2.418.621.289.000**	**2.360.645.090.000**	**2.394.372.795.000**	**2.458.607.603.000**
PENDAPATAN DAERAH	2.121.698.479.000	2.025.812.431.000	2.272.219.790.000	2.213.997.734.000	2.246.435.909.000	2.306.150.935.000
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000
PENDAPATAN MENGIKAT	**372.869.201.000**	**372.869.201.000**	**387.699.684.000**	**392.023.928.000**	**396.456.277.000**	**400.999.436.000**
DAK	233.146.510.000	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000
Dana Penyesuaian	139.722.691.000	139.722.691.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000
BELANJA MENGIKAT	**1.051.272.293.000**	**1.099.234.070.000**	**1.145.461.299.000**	**1.148.770.127.000**	**1.168.774.017.000**	**1.194.483.293.000**
Belanja Pegawai	781.733.920.000	806.405.019.000	818.373.462.000	831.590.629.000	845.073.598.000	859.659.537.000
Belanja Transfer	138.068.796.000	178.504.368.000	178.759.040.000	182.047.220.000	185.197.117.000	190.360.271.000
Belanja yang terkait dengan biaya Rutin PD	131.469.577.000	114.324.683.000	148.328.797.000	135.132.278.000	138.503.302.000	144.463.485.000
BELANJA WAJIB	**477.592.573.000**	**461.539.015.000**	**481.026.448.000**	**496.847.006.000**	**504.570.398.000**	**519.426.959.000**
Belanja Pendidikan(20% dari belanja barang dan jasa + modal)	194.010.988.000	184.202.298.000	196.961.171.000	209.033.223.000	213.328.981.000	222.738.493.000

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	103.581.585.000	97.386.717.000	104.115.277.000	107.863.783.000	111.291.417.000	116.738.466.000
BLUD	180.000.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT	**1.926.734.067.000**	**1.958.642.286.000**	**2.039.187.431.000**	**2.062.641.061.000**	**2.094.800.692.000**	**2.139.909.688.000**
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	**365.990.816.000**	**207.448.648.000**	**379.433.858.000**	**298.004.029.000**	**299.572.103.000**	**318.697.915.000**
%tase	**15,96%**	**9,58%**	**15,69%**	**12,62%**	**12,51%**	**12,96%**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Keterangan : Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp207,45 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dan mencapai Rp318,70 milyar pada tahun 2026, dengan asumsi adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin PD agar lebih efektif dan efisien.

Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Pendapatan daerah	2.121.698	2.025.812	2.272.220	2.213.998	2.246.436	2.306.151
Pencairan Dana Cadangan (sesuai peraturan daerah)	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran	171.026	140.279	146.401	146.647	147.937	152.457
Total penerimaan	2.292.725	2.166.091	2.418.621	2.360.645	2.394.373	2.458.608
Dikurangi	-	-	-	-	-	-
Belanja Wajib Mengikat	1.901.734	1.933.642	2.014.187	2.037.641	2.069.801	2.114.910
Pengeluaran Pembiayaan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	-	-	-	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	365.991	207.449	379.434	298.004	299.572	318.698
%tase	15,96%	9,58%	15,69%	12,62%	12,51%	12,96%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
Keterangan: Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%
Prioritas I	1.926.734	84,04%	1.958.642	90,42%	2.039.187	84,31%	2.062.641	87,38%	2.094.801	87,49%	2.139.910	87,04%
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	365.991		207.449		379.434		298.004		299.572		318.698	
Prioritas II	227.049	9,90%	134.579	6,22%	304.095	12,58%	213.494	9,04%	224.873	9,39%	243.791	9,92%
Prioritas III	138.942	6,06%	72.870	3,36%	75.339	3,11%	84.510	3,58%	74.699	3,12%	74.907	3,04%
Jumlah	2.292.725	100%	2.166.091	100%	2.418.621	100%	2.360.645	100%	2.394.373	100%	2.458.608	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

3.3.2.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program Program yang telah disusun oleh Pemerintah Ka bupaten Bantul sementara ada keterbatasan anggaran dalam APBD maka tidak semua program-program dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten Bantul. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kemitraan, pinjaman dan TSLP/CSR. Selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 TSLP/CSR dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tahun	Nominal (Rp)
2021	8.348.811.699
2022	8.941.577.329
2023	9.685.456.452
2024	10.513.191.039
2025	11.407.144.393
2026	12.372.614.015

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Metode yang digunakan untuk memproyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu teknik *forecasting Moving Average* dengan menggunakan data Realisasi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp8,94 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan mencapai Rp.12,37 milyar pada tahun 2026, Pertumbuhan CSR/TLSP diperkirakan sebesar 8,19% dengan asumsi adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan tingkat inflasi sebesar 3%.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

4.1.1.1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

(1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.

(2) Adanya peserta didik putus sekolah.
Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.

(3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.

(4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.

(6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

(1) Adanya kasus balita gizi buruk yang dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

(2) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular.
Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB. Diperparah dengan adanya pandemic Covid-19.

(3) Adanya kematian ibu melahirkan.
Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

(4) Adanya kematian bayi.
Nilai AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 sebesar 6,93.

(5) Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(6) Capaian tatanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah. Capaian PHBS di lingkup rumah tangga baru mencapai 53%.

(7) Belum optimalnya fasilitas layanan bidang Kesehatan.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Adanya jaringan jalan yang mengalami kerusakan.
Terdapat 24,58% jalan kabupaten dalam kondisi belum mantap.

(2) Adanya kejadian banjir disebagian wilayah.
Persentase penanganan banjir luapan baru mencapai 40,9% (365,47ha) dari luas daerah rawan banjir luapan 893.56 ha.

(3) Adanya Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang belum terlayani/tercukupi air dengan baik sebesar 19,09%.

(4) Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%. Akses terhadap air minum yang layak baru 96,81%. Di beberapa wilayah belum memiliki akses air minum yang layak.

(5) Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%.
Akses sanitasi yang layak baru 84,83%.

(6) Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang.
Kesesuaian pola ruang tahun 2020 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,01%; 'belum sesuai' sebesar 14,05%; dan 'tidak sesuai' sebesar 10,94%. Ketidaksesuaian terbesar adalah pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

(1) Adanya RTLH yang belum tertangani.

(2) Adanya Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul.
Penanganan kumuh sesuai Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 mencapai 92,49%.

(3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman.

5. Urusan Pemerintah Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

(1) Belum optimalnya penegakan perda.
Persentase penegakan perda sebesar 70% pada tahun 2020.

(2) Sebagian masyarakat belum sadar hukum.

(3) Tingkat risiko bencana tinggi.
Indeks Risiko Bencana tahun 2020 adalah 187,2 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Bantul yang berada pada daerah rawan bencana.

(4) Tingkat kerentanan bencana masih tinggi.

(5) Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Belum semua Kalurahan ditetapkan sebagai Kalurahan Tanggap Bencana, baru mencapai 35 Kalurahan (46,67%). Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baru mencapai 23 SPAB (4,51%).

(6) Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

(1) Tingkat kemiskinan masih tinggi.
Angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 13,5 %.

(2) Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(3) Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penangan korban bencana.

(4) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

(5) Sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik belum ramah difabel.

4.1.1.2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

(1) Kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
Pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

(2) Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

(3) Informasi pasar kerja yang belum optimal.

(4) Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Belum efektifnya peran satuan tugas perlindungan.

(2) Belum efektifnya pemenuhan hak-hak perempuan.

(3) Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Kasus KDRT mencapai 200 kasus.

(4) Belum efektifnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG).

(5) Belum optimalnya peran Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

(6) Adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun).

(7) Persentase sekolah ramah anak masih rendah.

(8) Belum optimalnya peran Forum Anak dalam proses pembangunan lima klaster KLA.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

(1) Kurangnya cadangan pangan pemerintah.
Cadangan pangan daerah Kabupaten Bantul baru mencapai 5,036 ton dari target 283 ton.

(2) Adanya kalurahan rentan pangan.
Menurut Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul terdapat 18 kalurahan rentan pangan.

4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

(1) Pendataan tanah belum optimal.

Masih terdapat 26,29% tanah yang belum terdaftar pada tahun 2020.

(2) Adanya konflik kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah. Konflik yang terjadi didominasi kasus tukar guling tanah.

5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

(1) Kualitas lingkungan hidup belum baik.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 atau kategori cukup baik (60<IKLH≤70).

(2) Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Ruang terbuka hijau perkotaan baru mencapai 14,34%.

(3) Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

(4) Penanganan hutan mangrove belum berkelanjutan.

Luasan Kawasan Hutan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul mencapai 14 Ha dengan Luas Lahan Konservasi Aktif sebesar 6 Ha.

(5) Belum maksimalnya pengelolaan sampah.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m^3/th, sementara jumlah yang tertangani baru sebanyak 452.185,43 m^3/th atau 74,28%.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

(1) Banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid.

(2) Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk *update* data base.

(3) Belum semua anak usia 0 – 16 tahun memiliki KIA.

(4) Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah (57,79%).

(5) Pemuthakiran data kependudukan belum optimal.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Sebagian aparatur kalurahan belum memenuhi standar kompetensi.
(2) Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan kalurahan.
(3) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir.
(4) Belum optimalnya peran PKK dalam gerakan pembangunan masyarakat.
(5) Masih kecilnya jumlah Desa Mandiri (25 kalurahan dari 75 kalurahan yang ada).
(6) Belum semua kalurahan memiliki BUMDes.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1) Angka Pasangan Usia Subur (PUS) *unmet need* menunjukkan tren meningkat.
(2) Semakin menurunnya persentase jumlah peserta KB baru.
(3) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

(1) Tingkat pelanggaran lalulintas masih tinggi.
(2) Tingkat kepadatan lalu lintas tidak merata.
V/C rasio Kabupaten Bantul bervariasi antara 0,17 – 0,45.
(3) Belum meratanya lampu penerangan jalan.
(4) Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan.
(5) Adanya pemanfaatan ruang milik jalan yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

(2) Belum efektifnya pemanfaatan sarana prasarana Teknologi Informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

(3) Infrastruktur Teknologi Informasi belum menjangkau semua tempat layanan publik.

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada tahun 2019 mencapai 78,56.

11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

(1) Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%).

(2) Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha.

12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

(1) Iklim investasi belum mampu menarik investor.

(2) Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.

(3) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Perizinan Online Daerah.

13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

(1) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.

(2) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.

(3) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

(1) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral.

Penyediaan data statistik beberapa indikator strategis belum bisa disediakan dalam skala kabupaten, diantaranya nilai inflasi, nilai tukar petani, ICOR, PDRB triwulan, dan indikator SDG's seperti jumlah pengguna telepon, internet, dan sebagainya yang memerlukan survei.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Jumlah pemanfaatan data geospasial sebanyak 1 aplikasi yaitu sistem informasi dashboard Portal Satu Data Bantul (https://data.bantulkab.go.id/), belum dimanfaatkan pada aplikasi di sektor lainnya.

15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

(1) Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi.

(2) Kurangnya peralatan persandian yang memenuhi standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

(1) Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal.

(2) Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal.

(3) Belum terbangunnya Taman Budaya Bantul.

17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

(1) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi.

(2) Rendahnya minat dan budaya baca sebagian masyarakat.

(3) Terbatasnya jumlah pustakawan.

(4) Kurangnya koleksi pustaka yang berkualitas dan terbaru.

(5) Masih minimnya jumlah dan variasi *e-book.*

(6) Belum adanya akses layanan perpustakaan *online*.

18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

(1) Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip. Sebanyak 15 perangkat daerah termasuk dalam kategori kurang dalam pengelolaan arsip.

(2) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

4.1.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

(1) Tidak ada regenerasi menjadi nelayan.

(2) Belum optimalnya produksi ikan tangkap.

(3) Menurunnya produksi perikanan budidaya, terutama komoditas gurami.

(4) Belum tersentra dan terkelolanya dengan baik budidaya perikanan.

(5) Terbatasnya ketersediaaan bibit, pakan dan air dalam jumlah dan kualitas.

(6) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

(1) Kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi.

(2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat.

(3) Belum optimalnya SDM pengelola wisata.

(4) Kurangnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari.

(5) Belum optimalnya promosi wisata.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

(1) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan marginal dan lahan pekarangan.
(3) Semakin menipisnya ketersediaan air dan distribusi belum merata.
(4) Semakin menurunnya minat menjadi petani.
(5) Belum optimalnya pengelolaan peternakan secara profesional.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

(1) Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana pasar rakyat.
(2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar rakyat.
(3) Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik.

5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

(1) Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
(2) Masih kecilnya pertumbuhan industri manufaktur.
(3) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.

6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

(1) Kurang sesuainya lokasi yang tersedia dengan minat calon transmigran.
(2) Terbatasnya kuota transmigran.

4.1.1.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

(1) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 76,43 (BB) kategori Baik, dengan interprestasi: secara instansional mampu

mewujudkan sebagian besar sasaran reformasi birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

(2) Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan daerah.

(3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

b) Sekretariat DPRD

Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Perencanaan

(1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data.

(2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.

(3) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan.

b) Keuangan

(1) Belum efektifnya manajemen keuangan daerah.

(2) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

(3) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(1) Belum terpenuhinya formasi ASN.

(2) Belum optimalnya penataan PNS sesuai dengan formasi.

(3) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat.

d) Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

3. Unsur Pengawasan

Inspektorat Daerah

(1) Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

(2) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

4. Unsur Kewilayahan

Kapanewon

(1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

(2) Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

(3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan, terkait penyusunan Peraturan Kalurahan/Lurah, pengelolaan keuangan kalurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kalurahan.

5. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(1) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

(2) Adanya kenakalan remaja.
(3) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama.
(4) Belum terkoordinirnya pemantauan aktivitas WNA.

4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPJMD, yaitu :

(1) Belum optimalnya pertumbuhan PDRB per kapita.
(2) Tingginya angka kemiskinan.
(3) Adanya ketimpangan pendapatan.
(4) Adanya ketimpangan wilayah.
(5) Adanya dampak pandemi Covid-19 pada sebagian besar sektor kehidupan masyakat.
(6) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
(7) Belum terpenuhinya kualitas tenaga kerja yang kompeten.
(8) Masih terjadinya kematian ibu dan bayi.
(9) Masih adanya balita stunting.
(10) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
(11) Masih adanya kenakalan remaja
(12) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama
(13) Belum terpenuhinya cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi.
(14) Adanya RTLH yang belum tertangani.
(15) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel.
(16) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
(17) Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup.
(18) Belum optimalnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
(19) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.
(20) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.

4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator makro daerah merupakan cerminan aspek kesejahteraan masyarakat.

1) PDRB

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besaran peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen, stabil pada rentang waktu 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66.

2) PDRB per kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun selanjutnya.

3) Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan besarnya persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 adalah 14,55% sampai dengan 2019 mengalami penurunan mencapai 12,92%, tetapi tahun 2020

pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali menjadi 13,50%.

4) Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik, meningkat kemudian menurun. Pada tahun 2020 Indeks Gini membaik pada 0,418, dan diharapkan pada tahun 2021 dan seterusnya Indeks Gini ini akan semakin turun (membaik). Indeks Gini Bantul masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada periode 2016-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 TPT cenderung menurun kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga perlu tindakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal

yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1. Telaah Isu Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Develoment Goals* (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Develoment Goals* (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's.

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. 17 tujuan adalah:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

2. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to- machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

3. Pandemi Covid-19

WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi dikarenakan penyebarannya yang meluas.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2O2O, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses tranformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

4.2.2. Telaah Isu Nasional

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa Isu Nasional sebagai berikut :

1. Undang Undang Cipta Kerja

Keberadaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Teknis penyusunan UUCK menggunakan model Omnibus Law mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut: (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (2) Ketenagakerjaan (3) Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (4) Kemudahan berusaha (5) Dukungan riset dan inovasi (6) Pengadaan tanah (7) Kawasan Ekonomi (8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek

Strategi Nasional (9) Pelaksanaan administrasi pemerintah (10) Pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Terdapat 49 Peraturan pelaksana turunan UUCK. 49 Peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

2. Pandemi Covid-19

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new norrna*[], yang proses tranformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-l9.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produk yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak

relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*) sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing,* dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, dan belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid- 19.

3. Reformasi Ekonomi

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3)

memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

4. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat (Germas), kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

5. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error,* terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi Covid-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui

peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

6. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana non alam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan.

Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (Kalurahan/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancarnan bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit).

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pangan di wilayah yang

memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan

4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.3.1. Telaah RPJPD DIY

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025 memuat Visi: ***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD DIY sebagai berikut:

Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025

MISI	Tahapan	Prioritas
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.	a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara,	Pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan.
	b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya,	Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
	c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin,manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator),	Pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.
	d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing,	Peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.
	e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama,	Pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.
	f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha,	Penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.
	g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional,	Upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.
	h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan	Perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.

MISI	Tahapan	Prioritas
	(*knowledge society*),	
	i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan,	Penciptaan *research research* unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
	j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan,	Pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip "pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua".
	k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman,	Perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
	l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,	Penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.
	m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana,	Pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.
	n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan,	Pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.	a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada:	1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;
		2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
	b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang	1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
		2) Mempertahankan dan mengembangkan "kantong-kantong"

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh,	kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
		3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event-event budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman,	1) Fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
		2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu;
		3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional;
		4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;
		5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.
	b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian,	1) Pengembangan produk Pariwisata;
		2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat
		3) Pengembangan usaha pariwisata
		4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat : a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan informasi pasar wisatawan;

MISI	Tahapan	Prioritas
	industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,	c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.
		5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat : a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan; b) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata.
		6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titikberat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata;
		7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat : a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.	a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial	1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
		2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
		3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;
		4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
	b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan,	1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;
		2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga Kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;
		3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.
	c. Menyediakan tenaga kerja yang	peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis

MISI	Tahapan	Prioritas
	memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya,	kultural, standarisasi, kompentensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional.
	d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif,	pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.
	e. Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender,	peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.
	f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat,	Penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.
	g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya	1) Pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi,	2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar
	h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan,	Perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.
	i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan,	Pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.
	j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:	1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;
		2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.
	k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis	1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan;

MISI	Tahapan	Prioritas
	dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,	2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;
		3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat;
		4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;
		5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat : a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang porfesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya; b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima.
		8) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;
		9) Membudayanya manajeman penanggulangan dan pencegahan bencana.

4.2.3.2. Telaah RTRW DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. RTRW DIY memuat rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Sistem Perkotaan

1) Sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi sebagian Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan;
2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah Bantul;
3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) terdiri atas ibu kota kapanewon dan satuan permukiman yang meliputi: ibu kota Kapanewon Piyungan, ibu kota Kapanewon Kretek, ibu kota Kapanewon Imogiri, ibu kota Kapanewon Sedayu.

b. sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana terdiri atas: sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1) Sistem Jaringan Transportasi, Sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan sistem jaringan kereta api.
   a) Sistem jaringan jalan terdiri atas: jaringan jalan nasional; jaringan jalan provinsi; terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

(1) Jaringan jalan nasional terdiri atas:
   (a) Jalan arteri primer terdiri atas: peningkatan dan atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi Sentolo-Imogiri; Imogiri-Piyungan; dan Piyungan-Prambanan.
   (b) Jalan kolektor primer terdiri atas Yogyakarta – Piyungan; Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul; Yogyakarta – batas kota Bantul; Jalan Pemuda Bantul; Jalan Kolonel Sugiyono Bantul; Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul; Jalan Panembahan Senopati Bantul; Bantul – Simpang Kweden; Simpang Kweden – Bakulan; Bakulan – Kretek; Kretek – Parangtritis.

(2) Jaringan jalan provinsi terdiri atas:
   (a) Jalan kolektor primer dua yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong.
   (b) Jalan kolektor primer tiga yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan.
   (c) Jalan strategis provinsi (1) Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Prambanan – Piyungan; (2) Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1.

b) Sistem jaringan kereta api, jaringan jalur kereta api umum terdiri atas jalur kereta api Samas – Yogyakarta –

Borobudur dan jalur kereta api bandar udara baru Kapanewon Temon – Samas – Parangtritis.

2) Sistem Jaringan Energi.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi listrik tenaga hibrid dan pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY.

3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: sistem jaringan pengolahan air limbah; sistem jaringan persampahan; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana.

a) Sistem jaringan pengholahan air limbah terdiri atas: (1) pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di: Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; dan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul; (2) pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kapanewon Bambanglipuro.

b) Sistem jaringan persampahan terdiri atas (1) pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan; (2) pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce,reuse, recycle)*, dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle)*; (3) pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kapanewon Piyungan.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah

a. Kawasan lindung

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri atas:

a) Kawasan hutan lindung meliputi Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar;
b) Kawasan resapan air meliputi Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.

2) Kawasan Konservasi

Cagar Alam Imogiri di Kapanewon Imogiri dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.

3) Kawasan Lindung Geologi

a) Kawasan cagar alam geologi

Gumuk Pasir Parangtritis di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.

b) Kawasan perlindungan air tanah

Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan luas 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar.

c) Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air meliputi Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu.

4) Kawasan Terbuka Hijau

   Terdapat di Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul.

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

   a) Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek;
   b) Kawasan rawan tsunami di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   c) Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   d) Kawasan rawan banjir meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   e) Kawasan rawan gempa bumi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   f) Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo.

6) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan cagar budaya Imogiri dan Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret.

b. Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Rencana pola ruang Kawasan budi daya terdiri atas: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pertahanan dan keamanan; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, terdapat di Kapanewon Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, terdapat di Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
3) Kawasan Peruntukan Pertanian, terdiri atas kawasan budi daya tanaman pangan; dan kawasan budi daya perkebunan.
    a) Kawasan budi daya tanaman pangan terdiri atas kawasan lahan pangan beririgasi; kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
        (1) Kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis,

Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;

(2) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar.

(3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:

(a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;

(b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar.

b) Kawasan budi daya perkebunan terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon

Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap; dan kawasan perikanan budi daya.
   a) Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Depok; Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru; Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo; Pangkalan Pendaratan Ikan Samas; Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan.
   b) Kawasan perikanan budi daya terdapat di kawasan minapolitan Kapanewon Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kapanewon Sanden.
5) Kawasan Peruntukan Pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
   a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar;
   b) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret,

Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;

c) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar.

6) Kawasan Peruntukan Industri

a) Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri di Kapanewon Piyungan dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Sedayu dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;

b) Sentra industri kecil menengah terdapat di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Sewon, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Piyungan.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa

wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar.

a) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;

b) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri,

Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, dan Kapanewon Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi meliputi pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan dan pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

3. Kawasan strategis provinsi di wilayah DI

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri dari: Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten; Di Bantul hanya ada Kawasan Strategis Kasultanan antara lain:

1) Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
3) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) Masjid Pathok Nagoro;
5) Pantai Samas – Parangtritis;
6) Kerto – Pleret;
7) Karst Gunungsewu.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
2) Kawasan Temon – Prambanan, terdiri atas Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

3) Kawasan Tempel – Parangtritis, terdiri atas Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
4) Kawasan Pantai Selatan DIY terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
   1) Kawasan Bentang Alam Karst terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul.
   2) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terdapat di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

4.2.3.3. Telaah Keistimewaan DIY

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul terkait erat dengan predikat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai

baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 'keistimewaannya" menyusuri lorong sejarah. Dengan demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang tersusun nanti harus memiliki kapasitas "mendukung" dan "menguatkan" keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terdapat keterkaitan dengan Kraton dan Pakulaman yang dipercaya mempunyai makna simbolik, penuh dengan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan pemimpinnya, dan antara manusia dengan manusia lainnya perlu dipertahankan dan dilestarikan atas dasar filosofi tradisional di bawah ini:

1) Hamemayu Hayuning Bawana

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental.

2) Sangkan Paraning Dumadi

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (Sangkan Paraning Dumadi). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya

(jagad gedhé; makrokosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni).

Sangkan Paraning Dumadi menjadi landasan tata ruang dalam konsep berpikir Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB-I) ketika wilayah kerajaannya. Konsep Sangkan Paraning Dumadi terungkap pada pola tata ruang berupa sumbu imajiner yang menjadi salah satu nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menonjol dalam bentuk fisik sebagai warisan budaya, yaitu berupa pola kota atau tata kota yang mengikuti sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Selatan.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantul nantinya ada aspek melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan ruang dan tata ruang berbasis budaya untuk turut serta dalam mengungkapkan nilai-nilai dan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tata ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

3) Manunggaling Kawula lan Gusti

Ditinjau dari aspek tata ruang wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta ditata secara istimewa oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan konsep yang tinggi dan sarat makna yang divisualisasikan dalam Warisan Budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan (Samudra Indonesia). Warisan Budaya ini menggambarkan Sumbu Imajiner yang selaras dengan konsep Tri

Hita Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palemahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha). Konsep Tri Hita Karana, ada tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga, dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofi sumbu imajiner tersebut. Konsep kosmogoni yang Hinduistis ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I diubah menjadi Konsep Islam-Jawa Manunggaling Kawula Gusti (Jagad Gedhe dan Jagad Cilik).

4) Sumbu Imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi (asas harmonisasi lingkungan)

Kabupaten Bantul dilewati oleh sumbu imajiner yaitu Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara filosofi sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun min Allah), manusia dengan manusia (hablun min Annas), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (tirta) dari laut Selatan, angin (maruta) dan angkasa (eiter).

5) Catur Gatra Tunggal

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan konsep dasar pembentukan Inti Kota. Catur Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas: kraton, masjid, alun-alun, dan pasar adalah elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dalam perkembangannya konsep ini dimaknai dengan elemen identitas berupa tempat ibadah, kantor pemerintahan, alun-alun dan pasar.

Catur Gatra Tunggal sebagai konsep filosofis merupakan salah satu konsep inti yang mendasari keberadaan identitas Kabupaten Bantul. Artinya konsep yang bersifat makro-filosofis dan konsep mikro-filosofis merupakan konsepsi bagi tata ruang Kabupaten Bantul.

4.2.3.4. Telaah RPJMD DIY

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".**

Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1) **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan.
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM

aparatur sipil negara, melalui "Silang Belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Etos, dalam konteks Trilogi SDM DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan- penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh

negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Isu strategis berdasarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima)tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

Jika dilihat perkembangan pengurangan kemiskinan terdapat perbedaan karakter antar kabupaten/kota. Berdasarakan kajian dari BPS, Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

2. Tingginya Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Komposisi struktur ekonomi tiap Kabupaten/kota menarik untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Bantul penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut kebutuhan investasi di Kabupaten/kota, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/kota tereliminir.

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari masing-masing Kabupaten-kota. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Jika dilihat ketimpangan di dalam masing-masing Kabupaten/kota, Bantul angka indeks gini tinggi. Jika dicermati, struktur ekonomi di kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Risiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan hidup mencakup antara lain pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), dampak pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan sumber daya air.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai ISPU DIY sebesar 30,5 yang berada dalam kategori relatif sehat/baik.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 diketahui bahwa kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolved Oxygen* (DO), kadar residu terlarut/*Total Dissolved Solid* (TDS), dan kandungan bahan kimia lain yang terkandung di air Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik, Sungai Bedog, Sungai Gadjahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo telah melampaui ambang batas Baku Mutu kualitas air. Nilai BOD di sembilan sungai tersebut hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir. Nilai COD sebagian besar sungai juga sudah melampaui ambang batas, namun nilai DO di semua bagian di sembilan sungai masih memenuhi standard baku mutu. Begitu pula untuk parameter TDS (zat padat terlarut), semua sampel air sungai masih berada di bawah baku mutu maksimum yang ditentukan.

Masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air dan sebaliknya kebanjiran yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar Samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.
Permasalahan di DIY dalam penanggulangan bencana adalah:

1) Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman bencana di 301 kalurahan rawan bencana dari 438 kalurahan se-DIY).

2) Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan masih perlu diterjemahkan secara lebih jelas dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
3) Kapasitas kelembagaan yang kurang, yaitu masih rendahnya kapasitas dalam pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pemahaman strategi dan kebijakan pada pra, saat dan setelah bencana.
4) Suprastruktur/budaya penyelenggara pemerintahan dan masyarakat belum pro- Pengurangan Risiko Bencana, paradigma masih didominasi dengan tanggap darurat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya data dan pemanfaatan data.
5) Jejaring potensi penanggulangan bencana belum optimal, koordinasi antara *stakeholder* belum padu di dalam penanggulangan bencana, peran swasta masih di tanggap darurat dan akademisi (kampus) masih lebih dominan dalam posisi sebagai menara gading dalam penanggulangan bencana.

4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74 %. Sementara itu, kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan budidaya adalah sebesar 66,51 %. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan

dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 2014- 2015, lahan pertanian mengalami penurunan dari 76.26 % menjadi 76.04 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanfaatannya (lahan-lahan produktif harus dilindungi fungsi dan pemanfaatannya melalui program PLP2B).

Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal dan apartemen berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun akan meningkatkan koefisien dasar bangunan (KDB) sehingga berpotensi mengakibatkan genangan dan banjir. Urbanisasi (proses perubahan suatu kawasan menjadi kota) juga turut mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DIY. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan persentase lahan terbangun dari 23.75 % menjadi 23.96%.

5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar

wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, jalur kereta api penghubung dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Salah satu penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan yaitu Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar.

Pembangunan infrastruktur strategis lain di kawasan pesisir selatan DIY adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya transportasi ini memerlukan dukungan dari infrastruktur yang ada berupa jalan.

6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan

ajaran moral nilai luhur Budaya. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai peningkatan taraf pendidikan melalui revolusi karakter siswa melalui pendidikan karakter dan perluasan pendidikan berbasis ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan atau vokasi.

7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama seusai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Hingga tahun 2017 Cagar Budaya dan warisan budaya yang terdiri dari benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan cagar budaya berjumlah 2.239 buah, yang sudah mendapatkan SK sejumlah 1331, baru sejumlah 492 yang dilestarikan. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional sejumlah 40 buah dari 911 ragam budaya tak benda, sedangkan yang sudah masuk database Warisan Budaya tak benda di tingkat pusat berjumlah 246 buah. Organisasi seni dan budaya berjumlah 6293, yang dinilai telah maju karena managemen dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional berjumlah 93 organisasi.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang

menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya.

Upaya-upaya pelestarian budaya yang mencakup legalitas dan pelindungan fisik, penguatan, serta pemanfaatan akan terus ditingkatkan untuk mencapai Visi RPJPD mendatang.

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance)*

Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing- masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan

kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

4.2.4. Telaah Isu Daerah

4.2.4.1. Telaah RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuputen Bantul Tahun 2006- 2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Penekanan pada lima tahun keempat adalah pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	• Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkataan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. • Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas pendidikan. • Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. • Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan pekembangan ilmu dan teknologi. • Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;	• Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. • Penerapan budaya hidup sehat dan bersih. • Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. • Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu. • Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. • Peningkaan manajemen kesehatan. • Peningkatan pemakaian obat tradisional.
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja,	• Penciptaan wirausaha baru. • Pemantapan sistem rekruitmen tenaga kerja.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;	• Peningkatan sarana dan cakupan permodalan • Pemantapan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi dan kerjasama di tingkat internasional. • Peningkatan tenaga trampil dan produktif. • Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. • Terpenuhinya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mncapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.	• Kemandirian unit-unit usaha industri kecl da kerajinan rakyat. • Terpenuhinya bahan baku secara mandiri. • Perluasan jangkauan pemasaran • Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. • Pengembangan sistem industri, yang ramah lingkungan, dan kemantapan koperasi. • Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai. • Terpenuhinya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengganggguran. • Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. • Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.
	Peningkatan jaringan infrasruktur yang	• Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelyanan dasar di diseluruh

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	handal, guna meningkatkan aksebilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. • Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksebilitas wilayah. • Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. • Pemenuhan teknologi informasi ke seluruh wilayah. • Terbangunnya JJLS.
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;	• Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. • Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. • Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada.
	Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.	• Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lngkungan dan penegakan hukum. • Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lidung. • Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam; • Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	Pengurangan risiko bencana alam melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	• Penataan dan pembangunan permukiman berbasis bencana. • Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. • Penangana korban bencana alam yang cepat dan responsif. • Pemenuhan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana.
	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.	• Pemanyapan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam sustu suanan yang agamis dan dmokratis. • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dareh, membina akhlak yan mulia dan memupuk etos kerja. • Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meingkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. • Pemantapan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehataan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak. • Terpenuhinya sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.
	Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	• Terpenuhinya kualitas yang baik, sarana prasarana penunjang olahraga. • Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat. • Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan RI. • Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, beraklaq mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yag dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beerbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	• Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. • Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang mah Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatnya rasa salin percaya, toleransi dan harmonis antar kelompok masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	• Aparat pemerinah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap denan berdasarkan tata kelola pememrintah yang peduli pada kepentingan rakyat. • Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. • Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah. • Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha. • Mewujudkan kepastian perlindungan, penegakkan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. • Kemantapan etika birokrasi, budaya kerja, penetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.
	Peningkatan	2. Pemantapan teknologi informasi

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	kualitas pelayanan kepada masyarakat	dalam pelayanan public 3. Pemantapan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar mutu pelayanan. 4. Pemenuhan srana dan prasarana publik yang berkualitas.
	Mewujudkan ketertiban masyarakat	• Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat • Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana • Terciptanya kondosi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
	Menjujung tinggi HAM yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.	Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

4.2.4.2. Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

a. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan

f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
1	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemantapan fungsi dan peranan Kota PKN dan PKW	Pemantapan fungsi pengembangan wilayah pada PKN, PKW dan PKL	Kapanewon Bantul, Banguntapan, Kasihan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Imogiri, Kretek, Srandakan, Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Dlingo, Pajangan, Pandak, Pundong dan Sanden		
		Pengembangan fungsi dan peranan Kota PKL, PPK dan PPL	Peningkatan fungsi pengembangan wilayah pada PKL, PPK dan PPL			
		Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	1. Pemantapan sistem pelayanan lembaga keuangan, terutama bank dan koperasi/lemba ga perkreditan	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			2. Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana Perkantoran	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			3. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan		
			4. Pengembangan dan pemantapan fungsi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, lab. klinik dan fasilitas pendukung)			
			5. Pemantapan fungsi fasilitas perdagangan (pasar harian, mingguan, toko dan warung)			
			6. Pemantapan fasilitas komunikasi (kantor pos dan fasilitas telekomunikasi lainnya)			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
		Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan		
		Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa	Pengembangan Jaringan Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Bintek dan Pendampingan)	Seluruh wilayah Tingkat Desa/Kalurahan Kabupaten Bantul		
		Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan	Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Kapanewon Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro		
				Kapanewon Pundong, Jetis dan Pleret,Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro		
				Kapanewon Pajangan, Sanden, Pleret		
2	Jaringan Sarana Prasara dan Utilitas Daerah	Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat	1. Peningkatan jalan lokal-kolektor primer	Kapanewon Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden, Pleret		
			2. Peningkatan jalan kolektor–arteri pada ruang Nglebeng- RSU Kodya			
			3. Pembangunan jalan arteri . primer Ring Road			
			4. Pembangunan jalan arteri . primer Pantai Selatan	Pantai Selatan		
			5. Pengembangan terminal Tipe B			
			6. Peningkatan Keselamatan LL Jalan Lokal	Se Kabupaten Bantul		
			7. Pemasangan Prasarana APILL	Se Kabupaten Bantul		
			8. Pengembangan Terminal Barang	Piyungan		
			9. Pemasangan Prasarana Rambu Jl. Kolektor Sekunder	Se Kabupaten Bantul		
		Pengembangan jaringan energi	Peningkatan pelayanan jaringan listrik perkotaan dan pengembangan cakupan jaringan listrik perdesaan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan jaringan telekomunikasi	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi satelit maupun terestrial	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Pengembangan Jaringan pusat komunikasi dan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan dan pengembangan informasi pembangunan daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan dan pengembangan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan struktur jaringan irigasi	1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan jaringan drainase perkotaan	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Peningkatan jaringan air minum	Se-Kabupaten Bantul		
			3. Pengembangan sistem persampahan	Se- Kabupaten Bantul		
			4. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpusat	Se- Kabupaten Bantul		
			5. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pemakaman	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			6. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan jaringan penerangan jalan dan lingkungan	1. Penambahan jaringan penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			2. Pengembangan jaringan penerangan lingkungan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

b. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
1	Kawasan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	Hutan Lindung	1 Pengendalian kegiatan dalam hutan lindung	Kec. Dlingo, Imogiri dan Sanden (hutan bakau)		
		Kawasan Konservasi dan resapan air	1. Pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air, Sumur Resapan	Kec. Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek		
			2 . Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan konservasi			
2	Kawasan lindung setempat	Kawasan sempadan sungai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kawasan sempadan pantai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek		
		Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan		
		Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	1 Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Piyungan dan Bantul.		
			2 Peningkatan kuantitas jumlah dan luasan RTH			
			3 Peningkatan kualitas RTH melalui penataan dan penggalakan penanaman pohon pada RTH			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
			4 Penunjukan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota			
3	Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1 Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pajangan, Pundong, Pleret, Sewon, Pandak		
			2 Pemeliharaan, perawatan dan dan perlindungan Cagar Budaya			
			3 Kerjasama perlindungan Cagar Budaya di Kotagede	Kapanewon Banguntapan		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
1	Kawasan peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Pengembangan Pertanian pangan			
		Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Peningkatan ketahanan pangan			
			Pengembangan pertanian perkebunan			
			Pengembangan hutan rakyat			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kec. Pandak, Kec. Pundong, Kec. Sedayu, Kec. Piyungan, Kec. Banguntapan Kec. Sanden		
			Pengembangan SDM Perikanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
2	Kawasan peruntukan industri	Penetapan peraturan pengendalian untuk kegiatan industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah	Penyusunan perda tentang peraturan pengendalian industri kecil dan menengah			
		Pengembangan dan peningkatan kawasan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Kec. Sedayu dan Piyungan		
			Penyusunan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri			
			Konsolidasi pelaku industri pada kawasan industri			
			Promosi dan Penjaringan investor baru			
			5 Pembangunan dan peningkatan kawasan industri			
		Pengembangan industri kecil	1 Penataan Struktur IKM			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
		dan menengah	2 Pengembangan IKM			
			3. Pengembangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang melayani KUKM yang ada di wilayah itu	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
3	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan			
			2 Pengembangan tujuan wisata baru			
			3 Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah			
			4. Pelestarian dan Pengelolaan Benda dan Cagar Budaya			
		Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	1. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Kec. Banguntpan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan		
			2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana			
4	Kawasan peruntukan permukiman	Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman	1. Penyusunan rencana pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan	Seluruh Wilayah Kab. Bantul di luar kawasan lindung		
			2. Pengembangan permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			3. Pengembangan permukiman khusus seperti perumahan nelayan, perumahan buruh industri dan perumahan			
			4. Pengembangan dan pengendalian perumahan formal			
			5. Pengembangan dan fasilitasi perumahan swadaya			
			- Jalan Lingkungan			
			- Drainase			
			6. Pembangunan BKM sebagai permukiman strategis	Kec. Pajangan dan Kec. Kasihan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

c. Telaah terhadap Rencana Kawasan Strategis

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:
   a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
   b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
   c) Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan;
   d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
   e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
   f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.
b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
   a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
   b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
   a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kapanewon Dlingo dan Agropolitan di Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, KapanewonPundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan
   b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis

No.	Fungsi	Indikasi Program	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
				Periode III	Periode IV
				2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan Strategis Ekonomi	Pengembangan Kawasan KonvensiPameran (MICE) Skala Internasional di kawasan JEC	KapanewonBanguntapan		
		Pengembangan Perumahan dan Permukiman berbentuk kota satelit	Kapanewon Banguntapan, Sewon dan Kasihan		
		Pengembangan kawasan industri	Kapanewon Sedayu dan Piyungan		
		Pengembangan Bantul Kota Mandiri	Kapanewon Kasihan dan Pajangan		
		Pengembangan Wisata Bahari di sepanjang pantai selatan	Kapanewon Kretek, Sanden dan Srandakan		
		Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut	Kapanewon Kretek, Sanden, Srandakan		
2	Kawasan Strategis Sosio-Kultural	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan – Manding – Tembi	Kapanewon Bantul, Sewon		
		Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi)	Kapanewon Kasihan, Pajangan		
		Pelesatarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan,		
3	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Pengembangan Agrowisata	Kapanewon Dlingo, Sanden		
		Konservasi gumuk pasir	Kapanewon. Kretek, Sanden dan Srandakan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan

penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam progam daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tembahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataanannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a. Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%.

Sementara itu, untuk produk limbah yang dihasilkan yang tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumput Tinja (IPLT).

Atas dasar hal tersebut, permasalahan kualitas air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius karena membawa dampak secara luas dan mengancam keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

b. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,02. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat, dengan jumlah korban akibat bencana mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kesiapsiagan dan upaya penyiapan dan pengurangan risiko yang terjadi. Upaya ini menjadi penting karena dampak bencana dimaksud sangat besar dan mengancam banyak orang.

c. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70). IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk.

d. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir mencapai 34 Ha/tahun, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

e. Tingginya angka kemiskinan

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19

yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

f. Ketimpangan Pendapatan

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah.

Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

g. Ketimpangan Wilayah

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan.

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

KLHS RPJMD memberikan rekomendasi program agar penyusunan RPMJD sesuai dengan aspek pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi berupa program dalam Permendagri 90 tahun 2019.

Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) • Program Pengelolaan Persampahan
Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanggulangan Kebakaran • Program Penanganan Bencana
Penurunan kualitas lingkungan hidup	• Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Alih fungsi lahan	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tingginya angka kemiskinan	• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum • Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia • Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Ketimpangan Pendapatan	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Pemasaran Pariwisata • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Promosi Penanaman Modal • Program Hubungan Industrial • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	(Kerjasama Daerah) • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ketimpangan Wilayah	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Perlindungan Dan Jaminan • Program Pelatihan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja • Program Aplikasi Informatika • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah) • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Penempatan Tenaga Kerja

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
1	YOGYAKARTA 2017-2022 “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan	Meningkatkan Kesejahtaraan dan Keberdayaan Masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Keberhasilan kebijakan sektor pertanian Kabupaten Bantul dapat menyebabkan surpus pangan dan mempengaruhi ketahanan pangan daerah sekitar Bantul, termasuk Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta bisa dikatakan tidak memiliki lahan pertanian. Pasokan pangan berasal dari luar Kota Yogyakarta. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan ditempuh. Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kota Yogyakarta terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.
		Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bantul antara lain dengan strategi perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran melalui modernisasi pasar rakyat. Produk lokal yang dihasilkan UMK diharapkan mampu bersaing bahkan dapat memasuki pasar Yogyakarta, sedangkan modernisasi pasar rakyat diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta. Disamping itu,

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata. Kerjasama pariwisata dengan Kota Yogyakarta diharapkan agar ada sinergi pada pakert-paket kunjungan wisata lintas wilayah.
			Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Meningkatnya investasi di Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Banyak tenaga kerja dari Kab. Bantul yang bekerja di Kota Yogyakarta.
		Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	Gangguan trantibbum di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh pada daerah perbatasan, dan sebaliknya. Kejadian “klithih” sering terjadi di daerah perbatasan. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum .
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	Kualitas pendidikan meningkat	Peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi peningkatan daya saing pendidikan, agar mampu bersaing dengan kualitas pendidikan Kota Yogyakarta. Diharapkan masyarakat Bantul lebih memilih bersekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
			Harapan hidup masyarakat meningkat	Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga. Warga Kabupaten Bantul yang bertempat tinggal di perbatasan memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kota

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				Yogyakarta.
			Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Perlu upaya yang kuat untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kota Yogyakarta memiliki lahan yang sangat terbatas. Sehingga banyak pekerja Kota Yogyakarta memilih tempat tinggal di luar Kota Yogyakarta. Hal ini mengkhawatirkan keberadaan lahan pertanian terutama di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Diperlukan upaya yang kuat dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, agar tidak beralih ke fungsi yang lain.
			Kualitas lingkungan hidup Meningkat	Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Air dari Kota Yogyakarta mengalir menuju hilir yaitu wilayah Kabupaten Bantul. Apabila kondisi air sungai buruk mempengaruhi kondisi air di Kabupaten Bantul. Disamping itu, sampah dari Kota Yogyakarta dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di Kabupaten Bantul.

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				Diperlukan kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul
		Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Pembangunan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan diperlukan koordinasi lintas kabupaten/kota agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut. Kerjasama penanganan jalan, transportasi, penyediaan air bersih dan drainase difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Kartamantul.
2	KULON PROGO 2017-2022 "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kulon Progo dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo secara langsung maupun tidak langsung bagi Kabupaten Bantul. Pembangunan JJLS merupakan jalur alternative dari dan ke Bandara, wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul semakin terbuka.
3	SLEMAN	Membangun	Terkelolanya lingkungan	Di DIY, Sleman merupakan

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
	2020-2026 Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong	sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	hidup dalam rangka Pembangunan yang berkelanjutan	daerah hulu, yang banyak memiliki sumber mata air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Bantul merupakan daerah hilir, dimana air yang diterima dalam kualitas dan kuantitasnya sudah menurun. Hal ini menyebabkan kondisi sungai di wilayah Bantul memiliki kualitas yang tidak baik. Disamping itu, sampah dari Sleman dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di Kabupaten Bantul. Diperlukan kesadaran warga Sleman dalam menjaga tutupan lahan di daerah hulu agar smber mata air tetap terjaga. Disamping itu dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Prasarana olahraga di Kabupaten Sleman relative lebih banyak. Masyarakat Bantul di daerah perbatasan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan memilih mengikuti club olah raga Sleman.
		Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kabupaten Sleman sebagai daerah hulu terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya,

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.
		Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat sleman dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
4	GUNUNGKIDUL 2020-2026 Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	Gunung Kidul memiliki Pelabuhan Perikanan Sadeng. Aktivitas perikanan di Pelabuhan ini berjalan cukup baik mengingat lokasinya berada di teluk. Kapal-kapal nelayan Bantul mendarat di pelabuhan ini, mengingat Bantul tidak memiliki pelabuhan perikanan. Hanya perahu saja yang dapat mendarat di pantai Bantul. Disamping memiliki Pelabuhan Perikanan, Gunung Kidul juga memiliki wisata alam pantai yang indah dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Agar dapat bersaing dengan pantai Gunung Kidul, Bantul harus segera meningkatkan pengelolaan pantainya.

4.2.7.Isu Strategis Kabupaten Bantul

Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/ kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pertumbuhan jasmani, kemampuan intelektual dan mental spiritual. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan jasmani**

  Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Bantul masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

  Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

  Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020.

  Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan. Perhatian pada ibu, bayi dan balita perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi peran POSYANDU.

Disamping upaya kesehatan, anak membutuhkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terutama dari tindak kekerasan. Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun saat ini pada kategari madya, 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), dan 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana) dan terdapat 11 Forum anak tingkat kecamatan/kapanewon.

- **Kemampuan intelektual**

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul belum merata dilihat dari kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik.

Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD: 84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%.

Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Perlunya optimalisasi pelaksanaan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65%

sehingga rasio ketergantungannya 44,20. Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pemanfaatan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan prasyarat iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Namun kondisi saat ini kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Tahun 2020 pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

- **Kemampuan mental spiritual**

Kemampuan mental spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemampuan mental spiritual dapat dilihat dari:

- Ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
- Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

2) Masih Tingginya Ketimpangan

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

- **Ketimpangan pendapatan**

  Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik. Pada tahun 2020 angka indeks Gini membaik pada 0,418. Nilai ini masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

  Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 13,5% jumlah penduduk miskin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,92%. Hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

  Upaya peningkatan pelayanan bagi warga miskin perlu dilakukan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. Di tingkat desa, perlu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos). Integrasi SLRT dengan Puskesos bisa menjadi sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah pengembangan industri kreatif. Komoditas industri kreatif yang diproduksi antara lain *furniture,* gerabah, batik, tatah sungging, produk kulit, batik kayu, perak, anyaman, keris dan fashion. Produk-produk tersebut rata-rata dibuat oleh *home industry.* Kualitas industry kreatif Kabupaten Bantul belum optimal. Cakupan Industri kreatif baru mencapai 46,20 % pada 2020 meningkat dari 39,5% di tahun 2016.

Industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Industri kreatif dan sektor pariwisata telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme.

Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 2.348.313 wisatawan dari 5.166.615 wisatawan pada tahun 2019, akibad pandemic covid-19. Perlu upaya untuk memulihkan kunjungan wisatawan pada saat pandemic berakhir dengan menjadikan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif.

Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif, selain sektor industri dan sektor pariwisata di atas, sektor pertanian perlu dioptimalkan terutama dalam penyediaan bahan baku kuliner.

- **Ketimpangan wilayah**

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpotret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru,

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 bagian wilayah perkotaan, yaitu (1) Wilayah Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan sudah tergabung dalam sebuah Aglomerasi Perkotaan yang sangat terikat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Wilayah Pantai Selatan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata dan keistimewaan di Samas dan Parangtritis, terhubung dengan JJLS, (3) wilayah Bantul Barat dan (4) wilayah Bantul Timur.

Penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung 4 bagian wilayah perkotaan di atas perlu mendapat perhatian terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang.

Pada penyediaan infrastrukur pelayanan publik saat ini belum sepenuhnya ramah difabel, baru sedikit kantor pelayanan public sudah ramah difabel.

Dalam upaya terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Tahun 2021 terdapat 6.381 rumah masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, tersisa 2.589. Pembangunan RTLH harus berlanjut agar semua rumah layak huni.

3) Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup

- **Degradasi lingkungan,**

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis

seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa. Harapannya sampah selesai di tingkat desa.

- **Bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi

sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manageman bencana dalam hal ini *Respon Time* 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

4) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penerapan UUCK yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

5.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

⇩

Visi Pembangunan DIY 2017-2022:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

⇩

Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
	pada Seluruh Warga	Demokratis	Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia Dan Difabel
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Bantul dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

MISI RPJPD BANTUL UNTUK RPJMD KE-4 (2020-2025)	MISI RPJMD TAHUN 2021 - 2026
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik dan Bertanggung Jawab	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

MISI RPJPD BANTUL UNTUK RPJMD KE-4 (2020-2025)	MISI RPJMD TAHUN 2021 - 2026
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
				Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80.67	82	82.50	83.50	83.75	84	84.50	84.50
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	n/a	3.24	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.45
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.03	88.03	88.10	88.40	88.80	89.10	89.50	89.50

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.86	73.90	74.01	74.11	74.20	74.29	74.39	74.39
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.17	15.30	15.35	15.42	15.49	15.56	15.63	15.63
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	5	7	9	11	13	13
				Indeks Rasa Aman	Indeks	N/A	N/A	2.70	2.73	2.76	2.79	2.81	2.81
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.80	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12
			Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
	berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.06	4.06	3.9	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	75.13	76.90	78.68	80.46	82.24	82.24
				Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75.01	75.01	75.03	75.05	75.07	75.10	75.20	75.20
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63.02	63.01	62.75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
			Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187.20	181.26	175.51	169.94	164.55	159.33	154.27	154.27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	13.50	13.50	13.77	12.90	12.50	12.05	11.50	11.50
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.12	95.18	95.50	96	96.50	96.75	96.90	96.90

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.78	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

6.1.1. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif.
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi.
6. Banyaknya kelompok seni budaya.
7. Kuatnya tradisi/adat istiadat.
8. Keanekaragaman kuliner.
9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi.
10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah.
11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha.
12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat.

Kelemahan

1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat.
2. Pengangguran cukup tinggi.
3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif.
4. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.

5. Kualitas Pendidikan belum merata.
6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah.
7. Penanganan masalah Kesehatan belum optimal.
8. Ketimpangan infrastruktur wilayah.
9. Pemenuhan layanan dasar belum merata
10. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah.
11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik.
12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%.
13. Jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis Cukup tinggi
14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah.
15. Nilai-nilai budaya luhur daerah mulai hilang.
16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat.
17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi.
18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik.
19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk baru tertangani sebanyak 74,28%.
20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local.
22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola.
23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang).
24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020).

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri.
4. Kemajuan teknologi informasi.
5. Keberadaan Bandara YIA.
6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta.

Ancaman

1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan.
4. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
5. Wilayah rawan bencana.
6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial.
7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda.
8. Tingginya laju urbanisasi.
9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Tabel 6 1 Analisis SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	**KEKUATAN (STRENGTHS)**	**KELEMAHAN (WEAKNESSES)**
	1. Banyaknya destinasi wisata. 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparatur yang meningkat. 5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi 10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah 11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha 12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat	1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat 2. Pengangguran cukup tinggi 3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif. 4. Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel. 5. Kualitas Pendidikan belum merata 6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah 7. Penanganan masalah kesehatan belum optimal 8. Ketimpangan infrastruktur wilayah 9. Belum meratanya pemenuhan layanan dasar 10. perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah 11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik 12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,05% 13. Masih cukup tingginya jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosos 14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah 15. Nilai-nilai luhur budaya daerah mulai hilang 16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat 17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi 18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik 19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%, 20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda

		21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local 22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola. 23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang) 24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**Asumsi Strategi SO**	**Asumsi Strategi WO**
1. Kebijakan pengembangan Kawasan selatan DIY 2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 3. Pengembangan Kawasan peruntukan industri 4. Kemajuan Teknologi Informasi 5. Keberadaan Bandara YIA 6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR 7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat 8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta	1. S4,5 – O4: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2. S4,5-O4: Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum 3. S4,5-O4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 4. S4,5-O4: Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur 5. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah 6. S2,4,5-O4: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 7. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah 8. S4,5-O4: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 9. S4,5-O4: Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 10. S1,2,5,6,8 –O1,2,4,6,7: Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat 11. S3,5,10,11- O3,4,5: Meningkatkan pertumbuhan industri 12. S9,13-O4,7: Meningkatkan pola konsumsi pangan	1. W5,6,9– O4,6,7: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 2. W14-O4,6,7: Meningkatkan kualitas UMKM 3. W8,17,24 - O1,2,3,5:Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur 4. W11,18 – O1,2,3: Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 5. W4,10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif 6. W10 – O4,6: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 7. W10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 8. W20-O4,6,7: Meningkatkan prestasi olahraga 9. W20-O4,6,7: Meningkatkan kualitas pemuda 10. W2,3-O3,5:Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif 11. W2,25-O4,6: Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

	13. S13-O4,5,8 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 14. S9-O1,5,8: Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan 15. S11-O1,2,3,4:Mempermudah investasi dalam berbagai bidang. 16. S2,5-O4,6,7: Pengembangan Potensi Desa 17. S3,5,8,11-O2,4,6,7: Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif	
ANCAMAN (THREATS)	**Asumsi Strategi ST**	**Asumsi Strategi WT**
1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata. 2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. 3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup 5. Wilayah rawan bencana 6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial 7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda 8. Tingginya laju urbanisasi 9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY	1. S5,7,12-T5,6: Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana 2. S2-T7: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3. S3,11-T1Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 4. S10-T2,8: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. W1,23– T3,6: Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran 2. W19-T4,9: Meningkatkan kualitas Pengelolaan persampahan 3. W16-T7,8: Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama 4. W15,21 - T7,8: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 5. W7,12,13-T6:Menguatkan sistem Kesehatan 6. W7,12,13-T6:Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 7. W11-T6: Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Program Unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
   a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
   b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;
   c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
   a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa melalui peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
   b. Pengembangan kapasitas pendidikan dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal;
   c. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
   e. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;
   f. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga;

g. Optimalisasi peran Posyandu dan Posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif;
h. Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
i. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
j. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi;
k. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;
l. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah;
m. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;
n. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air
b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas
c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura
d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif
e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Modernisasi pasar rakyat
g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas

h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
   a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi
   b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman
   c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumberdaya ekonomi dan energi terbarukan
   d. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
   e. Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan
   f. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
   g. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
   a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
   b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial
   c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan
   d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
   e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.

Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Bantul selain mempertimbangkan program unggulan bupati terpilih,

juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah.

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	√√	√	√	√	√
			Pengaturan tata laksana perangkat daerah	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	√√	√√	√√	√	√
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangiunan daerah	√	√	√	√	√
			Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah					
		Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan inovasi pembangunan daerah	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
			Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
		Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pengamanan informasi	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Peningkatan tata kelola kearsipan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		kearsipan						
		Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	√	√	√	√	√
Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	√√	√√	√√	√√	√√
			Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	√√	√√	√√	√√	√√
	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,	√√	√√	√√	√√	√√
			Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	√	√	√	√	√√
		Meningkatkan prestasi olahraga	Fasilitasi minat dan bakat generasi muda	√	√	√	√	√√
			Pembangunan sarana prasarana olah raga	√	√	√	√	√
			Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	√	√	√	√	√√
		Meningkatkan kualitas pemuda	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	√	√	√	√	√√
			Peningkatan kapasitas kepemudaan	√	√	√	√	√√
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan	√	√	√	√	√√
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban	Peningkatan penegakan perda	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran serta	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		masyarakat	masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban					
		Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	√	√	√	√	√
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	√	√	√	√	√
			Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air	√	√	√	√	√
			Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak	√	√	√	√	√
			Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian	√	√	√	√	√
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkaan nilai tambah perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkatan pengawasan dan pengendalaian	√	√	√	√	√
		Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	√	√	√	√	√
			Peningkatan Promosi dan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Kerjasama pariwisata					
			Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata	√√	√	√	√	√
		Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar rakyat/ tradisional	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	√	√	√	√	√
		Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	√	√	√	√	√
		Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	√	√	√	√	√
			Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
			Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	√	√	√	√	√
		Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh kalurahan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro	√√	√√	√√	√√	√√
			Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan	√	√	√	√	√
			Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan	√	√	√	√	√
			Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif	√√	√√	√√	√√	√√
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	√	√√	√√	√	√
			Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang	√	√	√	√	√
			Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
	Terwujudnya lingkungan hidup yang	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan	Penanganan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√	√	√
			Pemulihan fungsi lingkungan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
	berkualitas	kerusakan lingkungan hidup	hidup dan ekosistem					
			Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	√	√	√	√	√
	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	√	√	√	√	√
			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	√	√	√	√	√
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	√	√	√	√	√
			Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	√	√	√	√	√
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√
			Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	√	√	√	√	√
			Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	√	√	√	√	√
Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	√√	√√	√√	√√	√√
			Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel	√	√	√	√	√
			Pembangunan infrastruktur ramah difabel	√	√	√	√	√
	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak	√	√	√	√	√
			Menyediakan Layanan Ramah Anak	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan Ketahanan dan kesejahtreraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√	√	√	√	√

Keterangan:

√√: program prioritas

√ : program reguler

Selanjutnya untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:

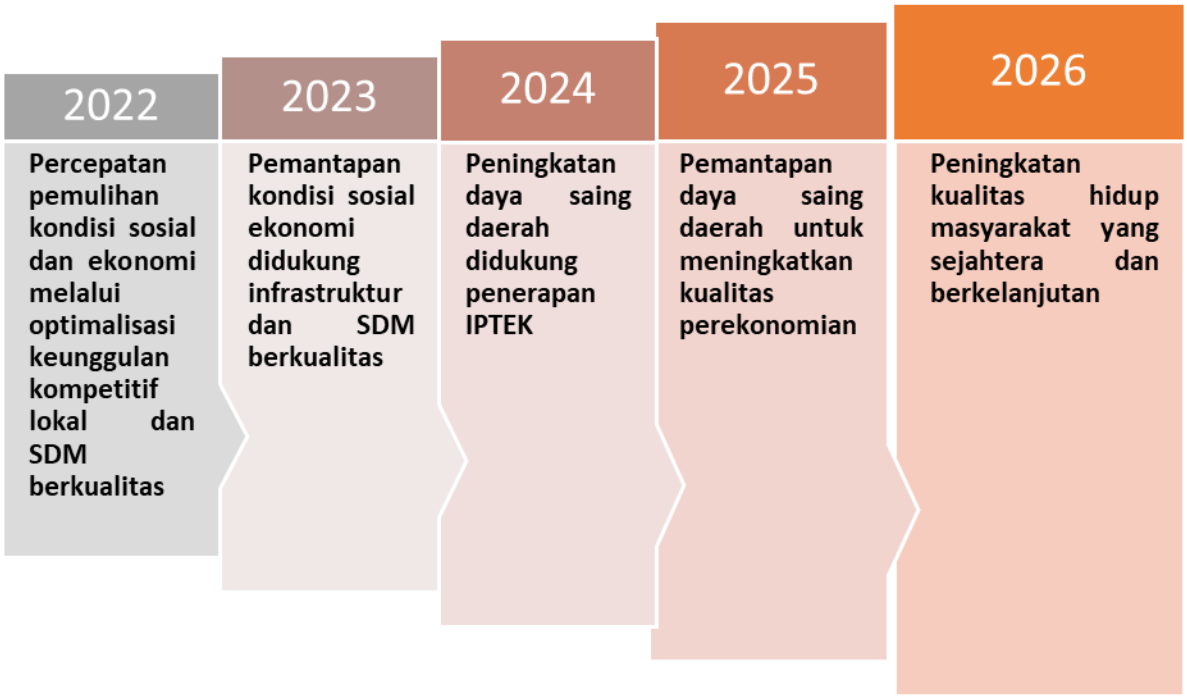

Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif

Konteks pembangunan Kota Kreatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dimana Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah :

a. Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas;
b. Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan
c. Rantai nilai kreasi-produksi-distribusi-konsumsi-konservasi.

Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
1	Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
2	Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
3	Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
4	Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
5	Mekanisme, kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif	v	v	v	v	v	Bimtek dan Pelatihan Industri Kreatif, ISI, Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY
6	Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Lokal Batik, Tatah Sungging, Memasak di Pendidikan Dasar, ISI, SMKI, SMSR, Akademi Teknologi Kulit, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
7	Pusat penelitian	v	v	v	v	v	ISI, Balai Besar

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian.						Batik dan Kerajinan DIY, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
8	Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat professional.	v	v	v	v	v	Gazebo Batik Giriloyo, Koperasi Setyo Bawono, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
9	Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.)	v	v	v	v	v	Giriloyo, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
10	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung.	v	v	v	v	v	Bantul Ekspo, Bantul Juoss, Pentas Wayang Kulit
11	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun	v	v	v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta, pencipta, masyarakat sipil, dan atau akademisi.						
12	Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Jagad, Komunitas Gerabah Bantul, Komunitas Ingkung, Persatuan Dalang Indonesia, Asosiasi Sate Klathak
13	Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	V	Indikasi Geografis Batik dan Gerabah
14	Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Sentra Industri Kecil Menengah, Pembangunan Rumah Produksi Tatah Sungging, Pembangunan Showroom Batik di Wijirejo dan Triharjo, Pembangunan Gazebo Batik Giriloyo, Land Mark Kasongan
15	Kerjasama internasional utama di bidang kreatif yang menjadi perhatian, dikembangkan dengan kota dari berbagai Negara dalam lima tahun			v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir.						
16	Mekanisme dukungan, program, dan proyek yang dilakukan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan mendirikan sinergi antara bidang kreatif yang menjadi perhatian dengan sedikitnya satu bidang kreatif lainnya yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)		v	v	v	v	Promosi/Pameran, PSWG
17	Inisiatif kerjasama internasional dan atau kemitraan yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan sedikitnya dua dari tujuh bidang kreatif yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)			v	v	V	
18	Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi			v	v	V	

Semua kota yang memenuhi indikator tersebut akan bergabung menjadi bagian dari anggota UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). Menurut *Mission Statement Bologna Creative Cities Meeting, Creative Cities Network* bertujuan untuk memperkuat kreasi, produksi, distribusi dan menikmati barang-barang dan layanan budaya pada level lokal, mempromosikan kreativitas dan ekpresi kreatif khususnya di tengah kelompok rentan, termasuk perempuan dan generasi muda; meningkatkan akses dan partisipasi dalam dan untuk kehidupan budaya sama baiknya dengan menikmati barang-barang budaya itu sendiri; serta mengintegrasikan budaya dan industri kreatif ke dalam rencana pembangunan lokal.

Pencapaian Kabupaten Kreatif di dukung oleh pembangunan sektor:

a. Pertanian

Salah satu Program Strategis Nasional bidang pertanian adalah *Food Estate. Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Program *food estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi bahan baku untuk menunjang industri kreatif Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi :

a) Rehabilitasi irigasi pertanian (irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam)
b) Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian
c) Sarana dan prasarana pasca panen
d) Renovasi Puskeswan
e) Pengembangan pakan konsentrat unggas.

Kegiatan di atas didukung rehabilitasi:

1) Bidang Irigasi,
   Rehabilitasi jaringan irigasi

2) Bidang Jalan:
   a) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan
   b) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas jalan.

b. Industri

Produk unggulan industri kreatif yang dimiliki Kabupaten Bantul:

- Kriya: Furniture, Batik, Gerabah, Batik Kayu, Tatah Sungging, Produk Kulit, Perak, Anyaman, Keris, Fashion
- Kuliner: Ingkung, Sate Klathak, Wedang Uwuh, Mie Lethek, Bakpia, Adrem, Peyek Tumpuk, Geplak, Mie Des.

Untuk mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner dilakukan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro, fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil, serta pengembangan klaster industri kreatif.

c. Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata
- pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata
- revitalisasi Daya Tarik Wisata
- akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah
- pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah(DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata desa/kalurahan budaya meliputi :
  a) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai kawasan wisata alam, budaya, pendidikan, dirgantara, religi dan olahraga;
  b) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, agro wisata, olahraga dan Industri;

c) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai kawasan wisata ekonomi kreatif, kerajinan, budaya, pendidikan, sejarah, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition(MICE);

d) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai kawasan wisata kerajinan, sejarah, budaya, kuliner dan epdesaan; dan

e) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai kawasan wisata alam, kuliner, budaya, olahraga, dan kerajinan.

2. Kabupaten Layak Anak :

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh Kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan Kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan dikatakan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Target pencapaian kategori Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak

No	Indikator	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA
2	Nilai KLA	n/a	730	830	890	910	950
3	Kapanewon Layak Anak	11	17	17	17	17	17
4	Kalurahan Layak Anak	n/a	15	30	45	60	75

Dalam upaya mewujudkan target di atas, maka dilakukan beberapa rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyusunan Perda KLA	v				
2	Sosialisasi Perda KLA		v			
3	Pengelolaan KLA Kapanewon dan Kalurahan	v	v	v	v	v
4	Pengelolaan Forum Anak Bantul	v	v	v	v	v
5	Bimbingan teknis administrasi KLA Perlindungan Anak	v	v	v	v	v
6	Monitoring Evaluasi	v	v	v	v	v

Pencapaian Kabupaten Layak Anak didukung :

a. Penyelenggaraan PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran penyelenggaraan PAUD adalah untuk menciptakan PAUD Holistik Integratif yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan.

PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan

kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Satuan PAUD merupakan wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan pengembangan PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kurasi PAUD	75 Lokus Lembaga PAUD	933 Lokus lembaga PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD
3	Penguatan dasar hukum PAUD	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
4	Penguatan kurikulum	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent
5		Penjalinan kemitraan dengan berbagai	Kemitraan PAUD dengan lembaga	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam pendampingan

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pihak	pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	pendampingan tumbuh kembang anak	pendampingan tumbuh kembang anak	tumbuh kembang anak
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
7		Inovasi PAUD	Inovasi PAUD			

b. Penyelenggaraan POSYANDU

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar terpadu yang bersumberdaya masyarakat, dalam arti diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan POSYANDU adalah Peningkatan mutu dan pelayanan Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sasaran Posyandu yang aman, bersih, sehat, nyaman, indah dan universal akses dengan layanan kesehatan, konseling, penganekaragaman pangan, peningkatan ekonomi keluarga.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM

Arah kebijakan pengembangan POSYANDU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Melakukan Kurasi	Penentuan 933 Lokus	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana
3	Penguatan dasar hukum	Peningkatan Sarana dan prasarana	Optimalisasi peran posyandu dalam pendataan dan pelayanan kesehatan	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
4	Penguatan SDM	Penguatan Anggaran	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO
5		Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu
7		Inovasi posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu
8			Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
9			Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan

c. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat

mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya mewujudkan Puskesos-SLTR, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dan SK Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM	v					
2	Advokasi anggaran: Kelengkapan kerja SDM dan insentif		v				
3	Inovasi : One Stop Service Best Practice Tanggul Bantul			v			
4	Festival Puskesos : replikasi model Puskesos 75 kalurahan				v		
5	Revitalisasi Puskesos: Bimbingan lanjut Puskesos, supervisi, evaluasi, inovasi berkelanjutan					v	v

3. Permukiman Bersih dan Sehat

Pembangunan sanitasi yang menyeluruh, berkualitas, dan berkelanjutan akan mewujudkan permukiman bersih dan sehat. Kegiatan pembangunan sanitasi dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
b. Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah;
c. Gerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat;
d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS;
e. Penggalangan dan upaya dukungan pendanaan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan sanitasi;

Pembangunan sanitasi meliputi : penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainasi.

Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
Penanganan Air Limbah Domestik	Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan	Tersusunnya regulasi pengelolaan air limbah
		Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL sebanyak 11 lokasi
Pengelolaan Sampah	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2025
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah	Meningkatnya Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2025

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
Penanganan Drainasi	Peningkatan kualitas pelayanan sub sektor drainase	Meningkatnya pelayanan drainase dengan mengurangi genangan pada daerah rawan sebesar 110 ha sampai tahun 2025
	Peningkatan pembiayaan melalui dana APBD (Kabupaten Bantul dan DIY) dan kemitraan	Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta/lembaga/masyarakat/ program pada tahun 2025
	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2025

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Dari tabel tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di atas, maka ditetapkan target penanganan air limbah domestik dan penanganan drainase sebagai berikut :

Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Air limbah domestic					
a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)	94.48%	94.11%	93.74%	93.37%	93.00%
b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T)	5.52%	5.89%	6.26%	6.63%	7.00%
2. Drainase (bebas genangan/ banjir)					
a. Risiko Sangat Tinggi	50%	62.5%	74.5%	87%	100%
b. Risiko Tinggi	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Target pengelolaan persampahan sesuai dengan Rencana Induk Persampahan sebagai berikut

Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persampahan					
a. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	20,91%	21,35%	21,78%	22,37%	22,81%
b. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	42,42%	44,16%	45,87%	46,86%	50,07%

Sumber : Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul, 2021

4. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 49 peraturan pelaksana turunannya yang terdiri dari 45 Peraturan pemerintah dan 4 Peraturan Presiden berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perbup yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perda atau Perbup yang disesuaikan antara lain:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) karena akan menimbulkan duplikasi perizinan pemanfaatan ruang.
2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa karena sudah tidak

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing karena sudah tidak relevan dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021
4. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
5. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Gudang
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah disiapkan untuk mengatur rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar.

Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							x											
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.0	DINAS

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	capaian SPM		indeks	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		00.000	KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp768.00 0.000	1 indeks	Rp785.00 0.000	1 indeks	Rp3.771.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.72 0.400	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp761.00 0.000	1 indeks	Rp2.901.4 17.064	1 indeks	Rp5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.0	DINAS

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	capaian SPM		indeks	0.000		0.000	indeks	0.000		0.000		0.000		00.000	KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tangga di seluruh kabupaten yang layak														
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)														
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL

6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan

Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu (1) Kelembagaan; (2) Kebudayaan; (3) Pertanahan; dan (4) Tata Ruang.

1. Kelembagaan

Implementasi kewenangan kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi - strategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

a) Mempedomani nilai–nilai luhur budaya DIY dan internalisasi keistimewaan setiap ASN sebagai penyelenggara pemerintahan;
b) Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memperkuat keistimewaan;
c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
d) Sinergitas dengan kelembagaan nasional;
e) Menerapkan prinsip *rightsizing*;
f) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
g) Mendesain lembaga dan ketatalaksanaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.

2. Kebudayaan

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tindak lanjut atas kewenangan urusan kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang bertujuan untuk:

a) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
b) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
c) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
d) mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, maka nomenklatur Kalurahan Budaya dimaknai sebagai Desa/Kalurahan Budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Dalam kerangka Kalurahan Mandiri, Kabupaten Bantul akan mewujudkan Kalurahan Pamor Budaya.

Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah

Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Kalurahan Pamor Budaya (versi Bantul) dimaknai sama dengan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya (versi DIY). Dengan demikian indikator yang dipergunakan serta PD pengampunya, meliputi:

a) Desa/Kalurahan Budaya : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
b) Desa Wisata : Dinas Pariwisata
c) Rintisan Desa Preneur : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
d) Desa Prima : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

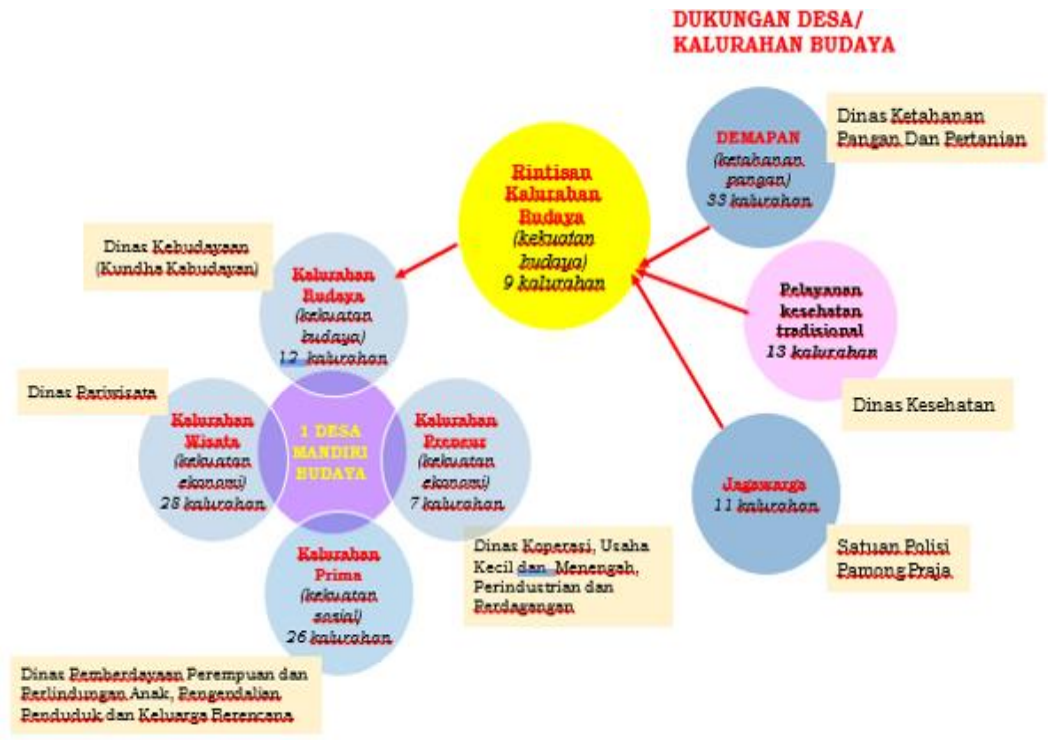

Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Desa/Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata dan ekonomi. Sementara itu aspek ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

a. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Demapan adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Demapan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
6	Wukirsari	Exit Program
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan
Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi : tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Di Kabupaten Bantul rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dengan anggaran Dana Keistimewaan Provinsi DIY telah digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di

puskesmas dan padukuhan percontohan. Pelayanan dalam gedung yang dikembangkan yaitu : (1) Akupuntur; (2) Akupresur; (3) Obat Tradisional; (4) Pijat Bayi/Balita, dan (5) Meditasi. Sedangkan untuk pelayanan luar gedung yang bersifat pemberdayaan masyarakat yaitu berupa Asuhan Mandiri Akupresur dan Asuhan Mandiri Ramuan Jamu. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2021 telah mencakup 7 puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, Imogiri I, Sedayu II, Jetis II, Pajangan dan Piyungan serta 12 padukuhan percontohan.

Rencana pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2026 mencakup 17 Puskesmas, dan satu Griya Sehat yang dibangun dengan sharing sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas

No	Tahun	Puskesmas	Keterangan
1	2022	1. Pajangan 2. Sewon II	
2	2023	1. Kasihan I 2. Dlingo II 3. Griya Sehat	Usulan pembebasan lahan Griya Sehat dengan Dana Keistimewaan Tahun 2023
3	2024	1. Dlingo I 2. Pandak II 3. Griya Sehat	Usulan pembangunan Griya Sehat dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024
4	2025	1. Imogiri II 2. Srandakan 3. Griya Sehat	Operasional Griya Sehat dengan anggaran APBD Kabupaten Bantul
5	2026	1. Sedayu II 2. Sanden 3. Griya Sehat	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

c. Jagawarga

Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019 menjelaskan definisi Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan

keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan jagawarga berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, sekelompok orang dapat membentuk Jaga Warga di tingkat padukuhan dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.

Fungsi jaga warga yaitu 1) mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; 2) melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan 3) melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan dan pengukuhan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021 telah mencakup 262 padukuhan, dan akan dilakukan pembentukan Jaga warga secara bertahap sehingga pada tahun 2026 di seluruh padukuhan telah terdapat Jaga Warga. Pemetaan pembentukan Jaga warga di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pembentukan Jaga Warga	20 padukuhan	150 padukuhan	200 padukuhan	200 padukuhan	109 padukuhan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

3. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan dinyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh

kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang ada di Kabupaten Bantul sudah selesai dilaksanakan yaitu sejumlah 4.088 bidang tanah. Sedangkan pendaftaran tanah desa yang sudah mendapatkan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan sebagai berikut:

Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
1	Sumberagung	Jetis	13 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 3 Tahun 2019
2	Imogiri	Imogiri	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 1 Tahun 2019
4	Potorono	Banguntapan	20 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
5	Terong	Dlingo	22 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
6	Wonokromo	Pleret	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 6 Tahun 2019
7	Trimurti	Srandakan	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 4 Tahun 2019
8	Mangunan	Dlingo	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
9	Kebonagung	Imogiri	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 4 Tahun 2019
10	Tirtonirmolo	Kasihan	20 Maret 2019	21 Mei 2019	No. 4 Tahun 2019
11	Guwosari	Pajangan	10 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
12	Tirtosari	Kretek	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
13	Muntuk	Dlingo	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 2 Tahun 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	13 Agustus 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2019
15	Argorejo	Sedayu	28 Agustus 2019	24/09/2019	No. 7 Tahun 2019
16	Tamanan	Banguntapan	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
17	Baturetno	Banguntapan	11 Oktober 2019	14 Oktober 2019	No. 7 Tahun 2019

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	18 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 8 Tahun 2019
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 11 Tahun 2019
20	Triwidadi	Pajangan	28 Agustus 2019	30 September 2019	No. 7 Tahun 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 5 Tahun 2019
22	Wukirsari	Imogiri	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 11 Tahun 2019
23	Karangtalun	Imogiri	24 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 05 Tahun 2019
24	Pleret	Pleret	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 8 Tahun 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	27 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 07 Tahun 2019
26	Argodadi	Sedayu	28 September 2019	31 Desember 2019	No. 07 Tahun 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 04 Tahun 2019
28	Panggungharjo	Sewon	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 5 Tahun 2019
29	Girirejo	Imogiri	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No.6 Tahun 2019
30	Parangtritis	Kretek	28 Agustus 2019	24 September 2019	No. 10 Tahun 2019
31	Srigading	Sanden	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 2 Tahun 2019
32	Gadingsari	Sanden	02 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 1 Tahun 2020 (4)
33	Tirtohargo	Kretek	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 04 Tahun 2020 (4)
34	Triharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
35	Jagalan	Banguntapan	11 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 06 Tahun 2020 (4)
36	Sriharjo	Imogiri	14 September 2020	24 September 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
37	Sendangsari	Pajangan	22 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
38	Temuwuh	Dlingo	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
39	Argomulyo	Sedayu	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
40	Poncosari	Srandakan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 2 Tahun 2020 (4)
41	Donotirto	Kretek	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
42	Panjangrejo	Pundong	29 September 2020	12 Oktober 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
43	Karangtengah	Imogiri	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
44	Ngestiharjo	Kasihan	14 September 2020	24 September 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
45	Srihardono	Pundong	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
46	Caturharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
47	Singosaren	Banguntapan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
48	Trirenggo	Bantul	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
49	Murtigading	Sanden	23 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
50	Segoroyoso	Pleret	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
51	Seloharjo	Pundong	14 September 2020	24 September 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
52	Bawuran	Pleret	18 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
53	Patalan	Jetis	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
54	Bangunjiwo	Kasihan	04 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
55	Tamantirto	Kasihan	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2021 (4)
56	Wijirejo	Pandak	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
57	Sabdodadi	Bantul	18 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 3 Tahun 2021 (4)
58	Palbapang	Bantul	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
59	Canden	Jetis	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2020 (4)
60	Srimulyo	Piyungan	14 September 2020	24 September 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
61	Argosari	Sedayu	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 02 Tahun 2021 (4)
62	Trimulyo	Jetis	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
63	Wonolelo	Pleret	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
64	Gadingharjo	Sanden	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
65	Bantul	Bantul	15 April 2020	06 Mei 2020	No. 4 Tahun 2020 (4)
66	Srimartani	Piyungan	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 4 Tahun 2021 (4)
67	Selopamioro	Imogiri	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
68	Pendowoharjo	Sewon	18 November 2020	09 Februari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
69	Timbulharjo	Sewon	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
70	Jambidan	Banguntapan	31 Desember 2020	22 Januari 2021	No. 01 Tahun 2021 (4)
71	Ringinharjo	Bantul	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 02 Tahun 2021 (4)
72	Dlingo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2020 (4)

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
73	Bangunharjo	Sewon	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
74	Gilangharjo	Pandak	05 September 2019	28 Oktober 2019	No. 2 Tahun 2021 (4)
75	Wirokerten	Banguntapan	15 April 2020	06 Mei 2020	*

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Sementara itu untuk tanah yang belum memiliki Peraturan Desa/ Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan akan dilakukan pendaftaran tanah. Rencana pendaftaran tanah kalurahan pada tahun 2021 – 2026 akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

Inventarisasi Tanah Kalurahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	1.500	500	500	500	500

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

4. Tata Ruang

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut SRS Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. SRS Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada tanah bukan Keprabon, yang terletak di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	PENANDA SRS
A.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon**	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggungharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis
B.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon**	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Pemanfaatan ruang pada SRS yang diperbolehkan meliputi :

Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
1.	Makam Raja-Raja di Imogiri	Zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya. Zona penyangga antara lain: 1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa.
2.	Sumbu filosofi	1. pemanfaatan ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan 2. pemanfaatan ruang pada satuan ruang Sumbu Filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi; b. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
		dari batas ruang milik jalan; dan c. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.
3.	Masjid dan makam Raja Mataram di Kotagede	1. kegiatan ekonomi skala kecil; 2. wisata budaya dan sejarah; 3. *home stay*; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4.	Masjid Pathok Negoro	1. kegiatan ekonomi skala masyarakat; 2. wisata budaya dan sejarah; dan 3. pendidikan dan pengembangan budaya
5.	Samas – Parangtritis	1. pembangunan pelindung pantai; 2. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas; 3. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; 4. penangkapan hasil laut; 5. pangkalan pendaratan ikan; 6. pengembangan energi terbarukan; 7. pendidikan dan penelitian; 8. pariwisata terbatas dan minat khusus; 9. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai; 10. pembangunan fasilitas umum; dan 11. pengembangan sistem mitigasi bencana.
6.	Kerto – Pleret	1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Sumber: RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2021

6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan pertengahan Juni 2021 belum ada

tanda pandemi akan berakhir. Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi.

Strategi ke depan yang dilakukan adalah dengan penguatan layanan Kesehatan, dengan arah kebijakan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga dan optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan.

Di tingkat kabupaten dengan meneruskan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keberhasilan mengatasi pandemi bertumpu pada masyarakat, maka secara preventif sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas akan terus dikampanyekan. Secara konsisten dilakukan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) pengetesan, pelacakan, isolasi/karantina, dan pengobatan, juga didorong semakin tinggi cakupan masyarakat yang mendapat suntikan vaksin covid.

Secara kuratif dengan penguatan sistem layanan kesehatan, layanan Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid(RSLKC) dan Shelter. Memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan, ketersediaan obat, sumberdaya manusia, dan alat pelindung diri.

Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi

Pemulihan perekonomian dilakukan dengan:

1. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas;
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan dengan arah kebijakan optimalisasi

pengelolaan Kawasan Industri Piyungan dan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;

3. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa, modernisasi pasar rakyat/ tradisional, peningkatan kualitas perkoperasian;
4. Mempermudah investasi dalam berbagai bidang dengan penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
5. Pengembangan SDM Industri Kreatif dengan penyiapan tenaga kerja kompetitif.

6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Kebijakan pembangunan/rehabilitasi gedung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pembangunan/ rehabilitasi gedung pada kurun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Shelter Kessos	1.700	-	-	-	-	-	- Dinsos P3A - Melanjutkan pembangunan tahun 2020
2	RS tipe D	5.000	-	10.000	-	-	-	- Dinas Kesehatan - Melanjutkan pembangunan tahun 2018
3	MPP	-	3000	-	-	-	-	DPMPT dan DPUPKP

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya	400	2000	2000	2000	2000	2000	- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Usul Dana Keistimewaan
5	Rumah Dinas Wabup	-	4.500	-	-	-	-	DPUPKP
6	Pembangunan Rumdin Kajari	-	1.500	-	-	-	-	DPUPKP
7	Pembangunan DPRD	-	-		-	60.000	60.000	DPUPKP
8	Rehabilitasi Kantor PDAM	-	-	4500	4000	-	-	DPUPKP
9	Pembangunan Gedung Metrologi	-	-	2000	-	-	-	DPUPKP
10	Pembangunan TPR	-	-	-	-	4000	-	DPUPKP
11	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	-	-	3000	-		-	DPUPKP
12	Pembangunan Kantor Baru 1 unit/tahun	-	-	10.000	10.000	-	10.000	DPUPKP
13	Intermediate Treatment Facility (ITF)	-	-	2500	-	-	-	DPUPKP
14	Kantor Baznas	-	-	1.000	-	-	-	DPUPKP
15	Taman Budaya	-	-	70.000	30.000	10.000	-	Disnas Kebudayaan dan DPUPKP
16	Rehabilitasi UPT DLLAJ	-	-	2.000	-	-	-	Dinas Perhubungan dan DPUPKP
17	Rumah Pemotongan Hewan	-	-	8.000	-	-	-	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Usul Dana Keistimewaan
18	Pelataran Bekas pasar lama Imogiri	-	-	-	13.500	-	-	- DPUPKP - Usul Dana Keistimewaan
19	Tempat Evakuasi Sementara Bulak Makbul	-	-	-	-	5.000	-	- BPBD - Usul Dana Keistimewaan
20	Pembangunan UPT Persampahan	-	-	-	2000	-	-	DLH
21	Balai Benih Ikan	-	-	-	2000	-	-	Dinas Kelautan
22	Laboratorium Pertanian	-	-	-	-	1500	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	-	6400	-	Dinas Kesehatan
	Jumlah	**7.100**	**11.000**	**115.000**	**65.500**	**88.900**	**72.000**	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

6.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi

acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Misi 1 : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima**															
			Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00 (BB)	80,00 (BB)		82,00 (BB)		82,5 (BB)		83,25 (BB)		83,75 (BB)		83,75 (BB)		
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315		4,1815		4,2315		4,2815		4,3315		4,3315		SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	Rp14.208.911.120	83 Angka	Rp10.249.528.900	83 Angka	Rp11.331.547.240	83 Angka	Rp10.800.822.664	83 Angka	Rp11.784.585.000	83 Angka	Rp58.375.394.924	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	92 Persen	92 Persen	Rp1.043.927.620	92 Persen	Rp1.151.371.000	92 Persen	Rp1.266.508.100,00	92 Persen	Rp1.393.158.910,00	92 Persen	Rp1.532.490.000,00	92 Persen	Rp6.387.455.630	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Daerah (EKPPD)														
				Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	Rp442.575.000	100 Persen	Rp550.000.000	100 Persen	Rp580.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp620.000.000	100 Persen	Rp2.787.575.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp3.723.619.270	100 Persen	Rp4.857.000.000	100 Persen	Rp5.342.700.000	100 Persen	Rp5.876.970.000	100 Persen	Rp5.375.000.000	100 Persen	Rp25.175.289.270	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp239.850.000	100 Persen	Rp553.207.500	100 Persen	Rp666.046.500	100 Persen	Rp714.387.650	100 Persen	Rp780.000.000	100 Persen	Rp2.953.491.650	SEKRETARIAT DAERAH
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 Persen	80 Persen	Rp1.095.088.990	80 Persen	Rp2.169.305.600	80 Persen	Rp2.386.236.160	80 Persen	Rp2.624.859.776	80 Persen	Rp2.663.111.000	80 Persen	Rp10.938.601.526	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	0 Persen	87,5 Persen	261.050.000	88 Persen	261.050.000	88,5 Persen	261.050.000	89 Persen	261.050.000	89,5 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89.50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80.5 Persen	81 Persen	150.000.000	82 Persen	200.000.000	83 Persen	230.000.000	84 Persen	245.000.000	85 Persen	250.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI	Nilai Akuntabilitas	83 angka	84 Angka	Rp28.007.830.550	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp34.625.814.130	85 Angka	Rp37.263.395.543	85 Angka	Rp40.989.735.097	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	80 Persen	82 Persen	Rp14.943.253.450	84 Persen	Rp13.013.911.337	86 Persen	Rp11.035.494.870	88 Persen	Rp8.316.640.457	90 Persen	Rp9.980.250.903	90 Persen	Rp57.289.551.018	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85,5 Angka	Rp1.595.755.060	86 Angka	Rp1.675.542.813	86,5 Angka	Rp1.759.319.954	87 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp1.759.319.954	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	90 Persen	95 Persen	Rp330.502.000	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp506.413.800	100 Persen	Rp554.065.000	100 Persen	Rp601.315.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	100 Persen	Rp2.351.135.980	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp3.475.219.775	100 Persen	Rp4.348.590.929	100 Persen	Rp4.646.105.575	100 Persen	Rp17.938.226.189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	95 Persen	95 Persen		96 Persen		96 Persen		97 Persen		97 Persen		97 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD	100 Persen	100 Persen	Rp1.572.022.220	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp8.339.577.877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMBANGUNAN DAERAH	bidang pemerintahan dan pembangunan manusia														
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	82,43 Angka	Rp98.789.110.760	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,55 Angka	Rp102.195.950.000	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	82,65 Angka	Rp105.113.512.700	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	7 Persen	20 Persen	Rp381.726.000	40 Persen	Rp741.084.500	60 Persen	Rp741.084.500	75 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	0 3	0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	n/a	30 Persen	Rp8.953.282.240	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp6.377.996.500	32 Persen	Rp6.426.537.800	32 Persen	Rp6.527.537.800	32 Persen	Rp34.814.116.440	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Peta Kompetensi ASN	n/a	6 Persen		9 Persen		12 Persen		15 Persen		18 Persen		18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		MANUSIA
				Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	n/a	100 Persen	Rp230.343.740	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp1.221.973.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	59 Persen	60 Persen	Rp215.832.480	61 Persen	Rp250.000.000	62 Persen	Rp300.000.000	63 Persen	Rp400.000.000	64 Persen	Rp700.000.000	64 Persen	Rp1.865.832.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 Persen	69 Persen	Rp19.236.000	70 Persen	Rp50.000.000	71 Persen	Rp1.133.865.000	72 Persen	Rp152.673.000	73 Persen	Rp167.080.000	73 Persen	Rp1.522.854.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,14 Angka	84,5 Angka	Rp684.327.504.740	85 Angka	Rp709.274.223.000	85 Angka	Rp716.438.030.000	85,5 Angka	Rp730.029.284.000	85,5 Angka	Rp737.972.504.000	85,5 Angka	Rp3.578.041.545.740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	80 Persen	Rp299.595.500	83 Persen	Rp500.000.000	85 Persen	Rp550.000.000	88 Persen	Rp605.000.000	90 Persen	Rp665.500.000	90 Persen	Rp2.620.095.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp342.169.016.830	Tepat Waktu	Rp324.547.097.500	Tepat Waktu	Rp325.811.451.000	Tepat Waktu	Rp318.197.011.000	Tepat Waktu	Rp323.284.972.890	Tepat Waktu	Rp1.634.009.549.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	87,84 Persen	89 Persen		89 Persen		90 Persen		90 Persen		91 Persen		91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	Rp1.262.739.710	100 Persen	Rp1.470.000.000	100 Persen	Rp1.542.000.000	100 Persen	Rp2.114.000.000	100 Persen	Rp1.692.000.000	100 Persen	Rp8.080.739.710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	Rp10.302.989.220	100 Persen	Rp12.193.391.500	100 Persen	Rp12.827.418.000	100 Persen	Rp13.430.197.000	100 Persen	Rp14.082.037.110	100 Persen	Rp62.836.032.830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Sasaran Daerah	Nilai Rata-Rata	82,00	82,50		83,50		83,75		84,00		84,50		84,50		INSPEKTORAT

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK														DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,93 angka	83 Angka	Rp2.141.908.600	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp3.695.858.239	83 Angka	Rp4.260.897.302	83 Angka	Rp5.176.587.857	83 Angka	Rp18.130.253.801	INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	0	0	0	38,89 Persen	219.857.000	44,44 Persen	241.842.700	50 Persen	266.026.970	55,56 Persen	292.629.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	n/a	12 Persen	Rp194.072.500	13 Persen	Rp303.445.378	14 Persen	Rp449.410.881	15 Persen	Rp643.072.513	16 Persen	Rp1.003.533.390	16 Persen	Rp2.593.534.663	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 Persen	Rp1.293.514.900	25 Persen	Rp1.432.401.820	30 Persen	Rp1.710.576.180	35 Persen	Rp2.367.871.214	40 Persen	Rp2.701.817.752	40 Persen	Rp9.506.181.867	INSPEKTORAT DAERAH
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,24	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		3,45		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN	Persentase masyarakat yang	50 Persen	70 Persen	Rp1.490.327.740	71 Persen	Rp1.639.360.514	72 Persen	Rp1.671.101.718	73 Persen	Rp1.698.953.412	74 Persen	Rp1.868.848.754	74 Persen	Rp8.368.592.138	DINAS KOMUNIKASI

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KOMUNIKASI PUBLIK	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten														DAN INFORMATIKA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	86 Angka	Rp1.938.603.598	87 Angka	Rp2.132.464.458	89 angka	Rp2.195.710.604	90 Angka	Rp2.415.281.266	92 Angka	Rp2.695.307.791	92 Angka	Rp11.377.367.717	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	n/a	1,29 Angka	Rp8.931.074.062	1.43 Angka	Rp9.824.181.468	1,57 Angka	Rp10.206.599.615	1,57 Angka	Rp10.592.259.576	1,58 Angka	Rp11.251.485.534	1,58 Angka	Rp50.805.600.255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 Persen	100 Persen	Rp155.150.000	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp207.968.750	100 Persen	Rp228.765.625	100 Persen	Rp251.642.187	100 Persen	Rp1.014.191.562	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah														
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60 Persen	65 Persen	Rp1.184.565.600	70 Persen	Rp1.332.186.560	75 Persen	Rp1.374.185.313	80 Persen	Rp1.301.129.621	81 Persen	Rp2.508.509.884	81 Persen	Rp7.700.576.978	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10		88,40		88,80		89,10		89,50		89,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	Rp604.839.580	100 Persen	Rp463.100.000	100 Persen	Rp399.410.000	100 Persen	Rp439.351.000	100 Persen	Rp417.610.000	100 Persen	Rp2.324.310.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	100 Persen	Rp102.785.120	100 Persen	Rp96.800.000	100 Persen	Rp106.480.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp540.321.120	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83 Angka	Rp3.270.576.670	83.25 Angka	Rp3.527.457.358	83.50 Angka	Rp3.764.203.094	83.75 Angka	Rp4.029.945.929	84 Angka	Rp5.157.228.194	84 Angka	Rp19.749.411.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99 Persen	99,81 Persen	Rp626.137.394	99,82 Persen	Rp674.715.761	99,83 Persen	Rp735.641.493	99,84 Persen	Rp792.979.817	99,85 Persen	Rp872.277.799	99,85 Persen	Rp3.701.752.263	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	96 Persen	Rp431.856.669	96,1 Persen	Rp461.006.962	96,2 Persen	Rp500.562.813	96,3 Persen	Rp538.619.094	96,4 Persen	Rp592.481.004	96,4 Persen	Rp2.524.526.543	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99 Persen	99,5 Persen	Rp376.741.530	99,6 Persen	Rp900.380.308	99,7 Persen	Rp441.413.428	99,8 Persen	Rp479.554.771	99,9 Persen	Rp520.910.248	99,9 Persen	Rp2.719.000.285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	99 Persen	100 Persen	Rp89.968.737	100 Persen	Rp98.965.611	100 Persen	Rp108.862.172	100 Persen	Rp119.748.389	100 Persen	Rp113.902.755	100 Persen	Rp531.447.664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANTUL
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	85 Angka	Rp537.101.000	85 Angka	Rp679.013.140	85 Angka	Rp916.883.140	85 Angka	Rp1.159.235.140	85 Angka	Rp1.719.035.140	85 Angka	Rp5.011.267.560	KAPANEWON BANTUL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	90 Persen	Rp31.520.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp163.424.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100	100 Persen	Rp84.800.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp352.600.000	KAPANEWON BANTUL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp143.690.000	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp844.753.440	KAPANEWON BANTUL
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,59 Angka	80 Angka	Rp556.197.000	81 Angka	Rp641.466.500	82 Angka	Rp795.269.000	83 Angka	Rp976.385.000	84 Angka	Rp1.225.508.000	84 Angka	Rp4.194.825.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	95 Angka	Rp41.187.500	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka	Rp81.000.000	95 Angka	Rp115.000.000	95 Angka	Rp174.500.000	95 Angka	Rp482.437.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp125.436.000	91 Persen	Rp137.450.000	92 Persen	Rp168.000.000	93 Persen	Rp172.000.000	94 Persen	Rp255.000.000	94 Persen	Rp857.886.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	100%	100 Persen	Rp91.653.500	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen	Rp131.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp270.000.000	100 Persen	Rp734.307.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp5.000.000	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen	Rp21.000.000,00	100 Persen	Rp32.000.000,00	100 Persen	Rp63.000.000,00	100 Persen	Rp131.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON DLINGO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON DLINGO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	80 Angka	Rp564.587.500	80 Angka	Rp681.232.000	80 Angka	Rp830.000.000	80 Angka	Rp992.239.000	80 Angka	Rp1.537.926.000	80 Angka	Rp4.605.984.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp31.995.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp90.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp145.000.000	100 Persen	Rp421.995.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	100 Persen	Rp138.447.500	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp210.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp1.003.447.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp104.587.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp694.587.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Stabilitas	100 Persen	100 Persen	Rp10.980.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp38.710.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp139.690.000	KAPANEWON DLINGO

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON IMOGIRI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80 Angka	Rp586.982.500	81 Angka	Rp633.681.000	81 Angka	Rp728.092.000	82 Angka	Rp864.621.000	82 Angka	Rp1.370.710.000	82 Angka	Rp4.184.086.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	Rp37.200.000	96 Persen	Rp55.000.000	97 Persen	Rp80.000.000	98 Persen	Rp125.000.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp452.200.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	95 Persen	Rp188.122.500	96 Persen	Rp210.000.000	97 Persen	Rp280.000.000	98 Persen	Rp341.000.000	100 Persen	Rp390.000.000	100 Persen	Rp1.409.122.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	95 Persen	Rp49.750.000	96 Persen	Rp130.000.000	97 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp205.000.000	100 Persen	Rp724.750.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp18.600.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp93.000.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp371.600.000	KAPANEWON IMOGIRI
4	0	0	PROGRAM	Persentase	n/a	100	Rp45.300.	100	Rp66.040.	100	Rp66.040.	100	Rp66.040.00	100	Rp66.040.00	100	Rp309.46	KAPANEWON

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	4	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas		Persen	000	Persen	000	Persen	000	Persen	0	Persen	0	Persen	0.000	JETIS
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON JETIS
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp577.192.500	90 Angka	Rp663.568.500	90 Angka	Rp895.779.500	90 Angka	Rp1.152.411.500	90 Angka	Rp1.722.260.500	90 Angka	Rp5.011.212.500	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp25.475.000	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp138.225.000	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp130.585.000	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp775.651.000	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp119.087.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp651.137.500	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp15.000.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp36.000.000	KAPANEWON JETIS
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KRETEK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,16 Angka	80 Angka	Rp623.496.000	81 Angka	Rp520.847.000	81 Angka	Rp634.537.000	82 Angka	Rp840.830.000	82 Angka	Rp985.535.000	84 Angka	Rp3.605.245.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp56.700.000	90 Persen	Rp100.000.000	91 Persen	Rp104.000.000	91 Persen	Rp108.000.000	92 Persen	Rp250.000.000	94 Persen	Rp618.700.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp135.000.000	82 Persen	Rp173.000.000	83 Persen	Rp217.000.000	85 Persen	Rp229.000.000	87 Persen	Rp341.000.000	87 Persen	Rp1.095.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	87 Persen	Rp73.000.000	88 Persen	Rp135.000.000	89 Persen	Rp197.000.000	90 Persen	Rp206.000.000	92 Persen	Rp315.000.000	92 Persen	Rp926.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp4.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp16.000.000	100 Persen	Rp18.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON KRETEK
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp509.460.000	KAPANEWON KASIHAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KASIHAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85 Angka	Rp624.412.800	85 Angka	Rp705.586.439	85 Angka	Rp850.321.527	85 Angka	Rp953.380.527	85 Angka	Rp1.280.023.712	85 Angka	Rp4.413.725.005	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp60.147.000	100 Persen	Rp61.681.100	100 Persen	Rp84.569.320	100 Persen	Rp144.569.320	100 Persen	Rp214.820.257	100 Persen	Rp565.786.997	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp98.440.367	90 Persen	Rp111.462.477	90 Persen	Rp134.306.972	90 Persen	Rp174.306.972	90 Persen	Rp254.966.087	90 Persen	Rp773.482.875	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	90 Persen	Rp40.146.000	90 Persen	Rp35.679.800	90 Persen	Rp73.367.760	90 Persen	Rp103.367.760	90 Persen	Rp164.198.151	90 Persen	Rp416.759.471	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	90 Persen	Rp46.777.833	90 Persen	Rp89.301.184	90 Persen	Rp117.713.421	90 Persen	Rp147.713.421	90 Persen	Rp215.064.793	90 Persen	Rp616.570.652	KAPANEWON KASIHAN
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp503.750.000	100 Persen	Rp595.188.000	100 Persen	Rp807.961.000	100 Persen	Rp989.991.000	100 Persen	Rp1.474.032.000	100 Persen	Rp4.370.922.000	KAPANEWON PANDAK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp45.300.000	82 Persen	Rp66.040.000	83 Persen	Rp66.040.000	84 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PANDAK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	85 Persen	80 Angka		81 Angka	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	83 Angka	Rp50.000.000	83 Angka	Rp50.000.000	83 Angka	Rp250.000.000	KAPANEWON PANDAK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	89 Persen	Rp32.650.000	90 Persen	Rp37.900.000	90 Persen	Rp46.250.000	90 Persen	Rp66.600.000	90 Persen	Rp81.500.000	90 Persen	Rp264.900.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	82 Persen	Rp179.895.000	84 Persen	Rp224.935.000	86 Persen	Rp238.110.000	88 Persen	Rp266.950.000	88 Persen	Rp303.500.000	88 Persen	Rp1.213.390.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 Persen	82 Persen	Rp94.850.000	84 Persen	Rp134.850.000	86 Persen	Rp134.850.000	88 Persen	Rp149.000.000	88 Persen	Rp184.850.000	88 Persen	Rp698.400.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp6.310.000	100 Persen	Rp8.400.000	100 Persen	Rp18.400.000	100 Persen	Rp22.500.000	100 Persen	Rp26.750.000	100 Persen	Rp82.360.000	KAPANEWON PANDAK
																92		
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	95 Persen	Rp45.300.000	95 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PUNDONG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp399.541.000	90 Angka	Rp525.870.520	90 Angka	Rp728.127.745	90 Angka	Rp953.350.684	90 Angka	Rp1.479.373.976	90 Angka	Rp4.086.263.925	KAPANEWON PUNDONG

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp32.012.500	90 Persen	Rp29.974.875	90 Persen	Rp31.473.619	90 Persen	Rp33.047.299	90 Persen	Rp34.699.664	90 Persen	Rp161.207.957	KAPANEWON PUNDONG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 Persen	Rp210.794.000	80 Persen	Rp215.638.605	80 Persen	Rp226.420.535	80 Persen	Rp237.741.712	80 Persen	Rp249.628.640	80 Persen	Rp1.140.223.492	KAPANEWON PUNDONG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp169.492.500	90 Persen	Rp169.916.250	90 Persen	Rp178.412.063	90 Persen	Rp187.332.666	90 Persen	Rp196.699.299	90 Persen	Rp901.852.778	KAPANEWON PUNDONG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	90 Persen	Rp4.790.000	100 persen	Rp14.925.750	100 Persen	Rp25.672.038	100 Persen	Rp16.455.639	100 Persen	Rp17.278.421	100 Persen	Rp79.121.848	KAPANEWON PUNDONG
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PLERET
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PLERET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp549.024.000	80 Angka	Rp621.299.000	81 Angka	Rp770.338.000	81 Angka	Rp869.984.000	82 Angka	Rp1.424.155.000	82 Angka	Rp4.234.800.000	KAPANEWON PLERET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp38.992.500	90 Persen	Rp51.500.000	95 Persen	Rp72.000.000	95 Persen	Rp119.500.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp391.992.500	KAPANEWON PLERET

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PELAYANAN PUBLIK															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	90 Persen	Rp126.387.500	90 Persen	Rp151.000.000	95 Persen	Rp180.500.000	95 Persen	Rp232.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp929.887.500	KAPANEWON PLERET
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp115.475.000	90 Persen	Rp135.000.000	95 Persen	Rp160.000.000	95 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp190.000.000	100 Persen	Rp785.475.000	KAPANEWON PLERET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp55.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	100 Persen	Rp178.015.000	KAPANEWON PLERET
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PIYUNGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	82 Angka	Rp525.235.000	82 Angka	Rp614.882.000	82 Angka	Rp766.327.000	82 Angka	Rp955.906.000	82 Angka	Rp1.364.391.000	82 Angka	Rp4.226.741.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	92 Persen	Rp42.072.500	92 Persen	Rp75.000.000	92 Persen	Rp115.000.000	92 Persen	Rp125.000.000	92 Persen	Rp165.000.000	92 Persen	Rp522.072.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100 Persen	100 Persen	Rp124.932.500	100 Persen	Rp136.400.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp177.950.000	100 Persen	Rp235.750.000	100 Persen	Rp830.032.500	KAPANEWON PIYUNGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp135.000.000	100 Persen	Rp150.000.000	100 Persen	Rp165.000.000	100 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp880.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp17.500.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp145.515.000	KAPANEWON PIYUNGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PAJANGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80 Angka	Rp626.138.500	81 Angka	Rp730.288.000	81 Angka	Rp806.700.000	82 Angka	Rp875.900.000	82 Angka	Rp1.114.100.000	82 Angka	Rp4.153.126.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	Rp36.387.500	89 Persen	Rp55.000.000	90 Persen	Rp95.464.000	91 Persen	Rp150.000.000	92 Persen	Rp255.500.000	92 Persen	Rp592.351.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	88 Persen	Rp74.797.000	89 Persen	Rp87.500.000	90 Persen	Rp125.000.000	91 Persen	Rp185.000.000	92 Persen	Rp281.211.000	92 Persen	Rp753.508.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	100 Persen	88 Persen	Rp10.210.000	89 Persen	Rp16.000.000	90 Persen	Rp73.000.000	91 Persen	Rp120.000.000	92 Persen	Rp194.000.000	92 Persen	Rp413.210.000	KAPANEWON PAJANGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp97.249.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp130.000.000	100 Persen	Rp145.498.000	100 Persen	Rp200.000.000	100 Persen	Rp672.747.000	KAPANEWON PAJANGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	80 Angka	Rp505.086.000	81 Angka	Rp527.633.400	82 Angka	Rp754.492.400	83 Angka	Rp985.079.400	85 Angka	Rp1.523.654.400	85 Angka	Rp4.295.945.600	KAPANEWON SANDEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 angka	Rp55.797.500	91 Angka	Rp73.000.000	92 Angka	Rp74.000.000	93 Angka	Rp75.000.000	94 Angka	Rp76.000.000	94 Angka	Rp353.797.500	KAPANEWON SANDEN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp147.554.500	81 Persen	Rp166.207.600	82 Persen	Rp167.207.600	83 Persen	Rp168.207.600	84 Persen	Rp169.207.600	84	Rp818.384.900	KAPANEWON SANDEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp98.000.000	88 Persen	Rp111.000.000	89 Persen	Rp112.000.000	90 Persen	Rp113.000.000	91 Persen	Rp114.000.000	91 Persen	Rp548.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Stabilitas	n/a	100 Persen	Rp13.000.000	100 Persen	Rp66.000.000	100 Persen	Rp67.000.000	100 Persen	Rp68.000.000	100 Persen	Rp69.000.000	100 Persen	Rp283.000.000	KAPANEWON SANDEN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SRANDAKAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp481.662.000	86 Angka	Rp585.850.000	87 Angka	Rp798.206.000	88 Angka	Rp1.012.352.000	89 Angka	Rp1.530.821.000	89 Angka	Rp4.408.891.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp44.500.000	91 Persen	Rp46.750.000	92 Persen	Rp49.000.000	93 Persen	Rp51.500.000	94 Persen	Rp54.000.000	94 Persen	Rp245.750.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	95 Persen	Rp146.875.000	95 Persen	Rp155.000.000	96 Persen	Rp162.750.000	97 Persen	Rp171.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	98 Persen	Rp815.625.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	95 Persen	Rp132.125.000	95 Persen	Rp138.750.000	96 Persen	Rp145.000.000	97 Persen	Rp152.250.000	98 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp728.125.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp9.622.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.500.000	100 Persen	Rp11.000.000	100 Persen	Rp11.550.000	100 Persen	Rp52.672.000	KAPANEWON SRANDAKAN
4	0	0	PROGRAM	Persentase	n/a	96 Persen	Rp45.300.	97 Persen	Rp66.040.	98 Persen	Rp66.040.	99 Persen	Rp66.040.00	100	Rp66.040.00	100	Rp309.46	KAPANEWON

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	4	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			000		000		000		0	Persen	0	Persen	0.000	SEWON
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEWON
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp661.307.388	90 Angka	Rp677.434.308	90 Angka	Rp818.371.308	90 Angka	Rp958.371.308	90 Angka	Rp1.378.865.268	90 Angka	Rp4.494.349.580	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp58.215.000	90 Persen	Rp60.215.000	90 Persen	Rp60.215.000	90 Persen	Rp63.351.000	90 Persen	Rp63.351.000	90 Persen	Rp305.347.000	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp57.620.112	80 Persen	Rp60.535.000	80 Persen	Rp120.535.000	80 Persen	Rp210.535.000	80 Persen	Rp310.164.040	80 Persen	Rp759.389.152	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp88.357.500	100 Persen	Rp164.154.692	100 Persen	Rp194.154.692	100 Persen	Rp220.194.692	100 Persen	Rp276.154.692	100 Persen	Rp943.016.268	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp10.350.000	100 Persen	Rp76.390.000	100 Persen	Rp98.516.000	100 Persen	Rp98.516.000	100 Persen	Rp119.556.000	100 Persen	Rp403.328.000	KAPANEWON SEWON
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEDAYU

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	85 Angka	Rp598.889.000	85 Angka	Rp626.997.000	85 Angka	Rp856.620.000	85 Angka	Rp1.110.913.000	85 Angka	Rp1.675.020.000	85 Angka	Rp4.868.439.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp25.050.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp188.650.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp65.400.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp369.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp145.850.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp343.850.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp6.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp198.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp768.000.000	KAPANEWON SEDAYU
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp 45.300.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp -	82 Persen	Rp 50.000.000	83 Persen	Rp 50.000.000	84 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp 605.041.500	85 Angka	Rp 707.071.700	85 Angka	Rp 901.750.000	85 Angka	Rp 1.105.000.000	85 Angka	Rp 1.567.000.000	85 Angka	Rp4.885.863.540	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 angka	90 Angka	Rp 39.500.000	90 Angka	Rp 45.000.000	90 Angka	Rp 60.000.000	90 Angka	Rp 85.000.000	90 Angka	Rp 115.000.000	90 Angka	Rp344.500.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp 114.962.500	90 Persen	Rp 124.962.500	90 Persen	Rp 144.962.500	90 Persen	Rp 163.434.500	90 Persen	Rp 214.484.500	90 Persen	Rp762.806.500	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp 129.225.000	90 Persen	Rp 147.241.800	90 Persen	Rp 167.241.800	90 Persen	Rp 177.241.800	90 Persen	Rp 225.650.000	90 Persen	Rp846.600.400	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp 10.600.000	100 Persen	Rp 11.750.000	100 Persen	Rp 14.501.700	100 Persen	Rp 16.255.700	100 Persen	Rp 20.366.500	100 Persen	Rp73.473.900	KAPANEWON BANGUNTAPAN
			Jumlah Misi 1				Rp1.256.108.874.180		Rp1.275.955.482.000		Rp1.296.813.284.000		Rp1.311.535.592.000		Rp1.349.704.046.000		Rp6.490.167.278.520	
			Misi 2: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa															
			Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,02	80,63		81,09		81,54		81,99		82,44		82,44		DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup	73,90	74,01		74,11		74,20		74,29		74,39		74,39		DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			masyarakat yang tinggi															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	82,15 angka	Rp140.000.000.000	82,50 angka	Rp140.126.643.000	82,90 angka	Rp140.242.452.000	83,10 angka	Rp140.347.144.000	83,50 angka	Rp143.866.547.000	83,50 angka	Rp704.582.786.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Capaian SPM Rumah Sakit	77,50 Persen	80 Persen		80,50 Persen		81,00 Persen		81,50 Persen		82,00 Persen		82,00 Persen		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	Rp55.000.000	69 Persen	Rp59.950.000	71 Persen	Rp64.746.000	73 Persen	Rp69.279.000	73 Persen	Rp248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.733.836.320	84,15 Angka	Rp2.750.930.000	84,30 Angka	Rp2.763.020.000	84,40 Angka	Rp2.776.600.000	84,50 Angka	Rp2.798.350.000	84,50 Angka	Rp13.822.736.320	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang	1 indeks	1 indeks	Rp826.883.000	1 indeks	Rp831.000.000	1 indeks	Rp837.000.000	1 indeks	Rp842.850.000	1 indeks	Rp851.000.000	1 indeks	Rp4.188.733.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				diawasi)														
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	36 Kalurahan	40 Kalurahan	Rp943.664.600	45 Kalurahan	Rp957.000.000	50 Kalurahan	Rp948.000.000	55 Kalurahan	Rp950.500.000	60 Kalurahan	Rp953.000.000	60 Kalurahan	Rp4.752.164.600	DINAS KESEHATAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	25,93 Persen	33 Persen	Rp600.000.000	40 Persen	Rp4.044.050.000	48 Persen	Rp1.865.000.000	55 Persen	Rp2.035.000.000	62 Persen	Rp2.205.000.000	62 Persen	Rp10.749.050.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	180.645.120	84,15 Angka	Rp185.500.000	84,30 Angka	Rp190.000.000	84,40 Angka	Rp194.000.000	84,50 Angka	Rp198.000.000	84,50 Angka	Rp948.145.120	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	100 persen	37.128.755.263	100 persen	Rp37.129.000.000	100 persen	Rp37.130.000.000	100 persen	Rp37.131.000.000	100 persen	Rp37.132.000.000	100 persen	Rp185.650.755.263	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	176.881.680	100 Persen	Rp182.000.000	100 Persen	Rp186.000.000	100 Persen	Rp190.650.000	100 Persen	Rp194.000.000	100 Persen	Rp929.531.680	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	100 persen	100 persen	500.000.000	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	2.325.448.000	84,15 Angka	Rp1.755.000.000	84,30 Angka	Rp1.765.000.000	84,40 Angka	Rp1.775.000.000	84,50 Angka	Rp1.785.000.000	84,50 Angka	Rp9.405.448.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.461.858.400	84,15 Angka	Rp2.300.000.000	84,30 Angka	Rp2.380.000.000	84,40 Angka	Rp2.475.000.000	84,50 Angka	Rp2.580.000.000	84,50 Angka	Rp12.196.858.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.405.268.800	84,15 Angka	Rp2.526.000.000	84,30 Angka	Rp2.653.000.000	84,40 Angka	Rp2.786.000.000	84,50 Angka	Rp2.925.000.000	84,50 Angka	Rp13.295.268.800	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83,95 angka	84 Angka	Rp2.920.358.400	84,15 Angka	Rp3.005.000.000	84,30 Angka	Rp3.110.000.000	84,40 Angka	Rp3.215.000.000	84,50 Angka	Rp3.320.000.000	84,50 Angka	Rp15.570.358.400	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)														
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.850.678.294	84,15 Angka	Rp2.659.182.000	84,30 Angka	Rp2.715.265.000	84,40 Angka	Rp2.772.370.000	84,50 Angka	Rp2.830.517.000	84,50 Angka	Rp13.828.012.294	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.720.400	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp761.000.000	1 indeks	Rp2.901.417.064	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.949.358.400	84,15 Angka	Rp1.990.980.000	84,30 Angka	Rp2.033.699.600	84,40 Angka	Rp2.077.173.592	84,50 Angka	Rp2.121.417.064	84,50 Angka	Rp10.172.628.656	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT															
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.588.749.800	84,15 Angka	Rp1.624.495.869	84,30 Angka	Rp1.645.190.828	84,40 Angka	Rp1.666.041.736	84,50 Angka	Rp1.687.053.163	84,50 Angka	Rp8.211.531.396	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.216.541.116	84,15 Angka	Rp2.275.520.964	84,30 Angka	Rp2.336.033.988	84,40 Angka	Rp2.397.934.838	84,50 Angka	Rp2.461.258.209	84,50 Angka	Rp11.687.289.115	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.466.089.600	84,15 Angka	Rp695.000.000	84,30 Angka	Rp705.000.000	84,40 Angka	Rp715.000.000	84,50 Angka	Rp725.000.000	84,50 Angka	Rp4.306.089.600	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.075.268.800	84,15 Angka	Rp2.130.000.000	84,30 Angka	Rp2.186.250.000	84,40 Angka	Rp2.243.781.250	84,50 Angka	Rp2.302.625.781	84,50 Angka	Rp10.937.925.831	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.360.179.200	84,15 Angka	Rp1.396.600.000	84,30 Angka	Rp1.417.700.000	84,40 Angka	Rp1.437.600.000	84,50 Angka	Rp1.456.300.000	84,50 Angka	Rp7.068.379.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.272.316.420	84,15 Angka	Rp1.655.600.000	84,30 Angka	Rp1.676.356.000	84,40 Angka	Rp1.697.269.560	84,50 Angka	Rp1.718.342.255	84,50 Angka	Rp9.019.884.235	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Puskesmas														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.974.931.725	84,15 Angka	Rp2.077.334.231	84,30 Angka	Rp2.184.700.942	84,40 Angka	Rp2.189.700.942	84,50 Angka	Rp2.302.185.989	84,50 Angka	Rp10.728.853.829	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.705.952.000	84,15 Angka	Rp1.660.000.000	84,30 Angka	Rp1.695.600.000	84,40 Angka	Rp1.731.812.000	84,50 Angka	Rp145.000.000	84,50 Angka	Rp6.938.364.000	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.280.789.600	84,15 Angka	Rp1.314.168.000	84,30 Angka	Rp1.333.699.000	84,40 Angka	Rp1.352.994.000	84,50 Angka	Rp1.372.461.000	84,50 Angka	Rp6.654.111.600	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KABUPATEN/KOTA															
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.860.862.400	84,15 Angka	Rp2.865.504.000	84,30 Angka	Rp2.970.504.000	84,40 Angka	Rp3.075.504.000	84,50 Angka	Rp3.180.504.000	84,50 Angka	Rp14.952.878.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.988.358.400	84,15 Angka	Rp2.422.950.000	84,30 Angka	Rp2.451.130.000	84,40 Angka	Rp2.479.540.000	84,50 Angka	Rp2.508.180.000	84,50 Angka	Rp12.850.158.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM	Capaian Nilai	83,95 angka	84 Angka	Rp2.384.0	84,15	Rp712.00	84,30	Rp734.00	84,40	Rp755.000.0	84,50	Rp765.000.0	84,50	Rp5.350.0	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			37.982	Angka	0.000	Angka	0.000	Angka	00	Angka	00	Angka	37.982	KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.626.068.800	84,15 Angka	Rp1.640.000.000	84,30 Angka	Rp1.650.000.000	84,40 Angka	Rp1.660.000.000	84,50 Angka	Rp1.670.000.000	84,50 Angka	Rp8.246.068.800	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp777.179.200	84,15 Angka	Rp798.000.000	84,30 Angka	Rp810.000.000	84,40 Angka	Rp820.000.000	84,50 Angka	Rp835.000.000	84,50 Angka	Rp4.040.179.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.903.940.063	84,15 Angka	Rp2.720.040.000	84,30 Angka	Rp2.757.920.000	84,40 Angka	Rp2.786.920.000	84,50 Angka	Rp2.806.800.000	84,50 Angka	Rp13.975.620.063	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.005.768.800	84,15 Angka	Rp1.998.780.605	84,30 Angka	Rp2.099.719.635	84,40 Angka	Rp2.205.455.616	84,50 Angka	Rp2.316.228.396	84,50 Angka	Rp10.625.953.052	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.930.448.000	84,15 Angka	Rp2.940.000.000	84,30 Angka	Rp2.950.000.000	84,40 Angka	Rp2.960.000.000	84,50 Angka	Rp2.970.000.000	84,50 Angka	Rp14.750.448.000	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	Rp0	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM	Indeks capaian	1 indeks	1 indeks	Rp695.00	1 indeks	Rp715.00	1 indeks	Rp720.00	1 indeks	Rp725.000.0	1 indeks	Rp730.000.0	1 indeks	Rp3.585.0	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	SPM			0.000		0.000		0.000		00		00		00.000	KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.800.979.200	84,15 Angka	Rp1.667.600.000	84,30 Angka	Rp1.674.600.000	84,40 Angka	Rp1.681.600.000	84,50 Angka	Rp1.686.600.000	84,50 Angka	Rp8.511.379.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.651.878.200	84,15 Angka	Rp2.657.000.000	84,30 Angka	Rp2.663.000.000	84,40 Angka	Rp2.669.000.000	84,50 Angka	Rp2.675.000.000	84,50 Angka	Rp13.315.878.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.818.858.400	84,15 Angka	Rp1.634.000.000	84,30 Angka	Rp1.644.000.000	84,40 Angka	Rp1.654.000.000	84,50 Angka	Rp1.664.000.000	84,50 Angka	Rp8.414.858.400	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.455.179.200	84,15 Angka	Rp1.481.075.000	84,30 Angka	Rp1.507.466.125	84,40 Angka	Rp1.534.178.117	84,50 Angka	Rp1.561.215.789	84,50 Angka	Rp7.539.114.231	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,19	15,22		15,25		15,26		15,3		15,32		15,32		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	82 Angka	Rp5.009.338.342	82 Angka	Rp5.233.481.342	82 Angka	Rp5.533.481.342	82 Angka	Rp5.833.481.342	82 Angka	Rp6.921.161.342	82 Angka	Rp28.530.943.710	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEPENDIDIKAN	(kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM														DAN OLAHRAGA
1	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	3,88 Persen	4,18 Persen	Rp800.000.000	4,48 Persen	Rp3.175.000.000	4,78 Persen	Rp4.390.000.000	5,07 Persen	Rp2.390.000.000	5,37 Persen	Rp2.590.000.000	5,37 Persen	Rp13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	80 Angka	Rp831.968.820	80 Angka	Rp850.000.000	80 Angka	Rp900.000.000	80 Angka	Rp950.000.000	80 Angka	Rp1.000.000.000	80 Angka	Rp4.531.968.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	7,61 Persen	10,08 Persen	Rp416.798.700	12,55 Persen	Rp527.804.000	14,02 Persen	Rp2.050.000.000	17,48 Persen	Rp600.000.000	19,95 Persen	Rp1.000.000.000	19,95 Persen	Rp4.594.602.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	55 Medali	Rp8.350.081.966	65 Medali	Rp8.650.081.966	80 Medali	Rp8.900.081.966	100 Medali	Rp9.250.081.966	130 Medali	Rp11.750.081.966	130 Medali	Rp46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	80 Persen	Rp1.445.340.480	81 Persen	Rp1.745.340.480	82 Persen	Rp1.995.340.480	83 Persen	Rp2.345.340.480	84 Persen	Rp4.845.340.480	84 Persen	Rp12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	n/a	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	3	4		6		8		10		12		12		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	80,98 Angka	Rp1.036.350.000	81 Angka	Rp1.093.102.000	81,3 Angka	Rp1.152.071.001	81,5 Angka	Rp1.213.332.240	81,6 Angka	Rp1.656.258.364	81,6 Angka	Rp6.151.113.605	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	54 Persen	61,03 Persen	Rp1.425.000.000	68,38 Persen	Rp3.936.386.000	75,74 Persen	Rp6.862.053.999	83,08 Persen	Rp5.733.225.960	90,44 Persen	Rp6.077.448.556	90,44 Persen	Rp24.034.114.515	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Bahasa Sastra yang dilestarikan	n/a	18 Pelestarian	Rp3.300.000.000	46 Pelestarian	Rp6.879.050.000	76 Pelestarian	Rp7.770.950.000	104 Pelestarian	Rp7.177.450.500	132 Pelestarian	Rp7.756.495.550	132 Pelestarian	Rp32.883.946.050	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	n/a	219 Pelestarian	Rp10.125.000.000	454 Pelestarian	Rp15.783.924.000	691 Pelestarian	Rp16.251.193.000	953 Pelestarian	Rp18.324.602.300	1215 Pelestarian	Rp28.641.062.530	1215 Pelestarian	Rp89.125.781.830	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
			Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman	n/a	2,70		2,73		2,76		2,79		2,81		2,81		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang	Persentase penanganan gangguan ketentraman	n/a	100		100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			harmonis	ketertiban umum dan perlindungan masyarakat														KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	79 Angka	Rp2.952.127.000	80 Angka	Rp3.063.643.229	81 Angka	Rp3.370.007.552	82 Angka	Rp3.437.407.703	83 Angka	Rp3.781.148.473	83 Angka	Rp16.604.333.956	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0 5	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	27,22 Persen	29,37 Persen	Rp600.000.000	45,44 Persen	Rp1.500.000.000	66,88 Persen	Rp2.500.000.000	88,31 Persen	Rp3.500.000.000	100 Persen	Rp1.500.000.000	100 Persen	Rp9.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	0 1	0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	37,33 Persen	57,33 Persen	Rp2.229.678.400	84 Persen	Rp2.849.967.990	100 Persen	Rp33.599.967.990	100 Persen	Rp2.400.000.000	100 Persen	Rp2.500.000.000	100 Persen	Rp43.579.614.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp522.514.010	86 Angka	Rp808.737.010	87 Angka	Rp1.182.745.010	88 Angka	Rp800.000.000	89 Angka	Rp950.000.000	89 Angka	Rp4.263.996.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan	95 Persen	95 Persen	Rp341.009.000	100 Persen	Rp391.000.000	100 Persen	Rp416.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp1.998.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KARAKTER KEBANGSAAN	kebangsaan														
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	10,36 Persen	18 Persen	Rp61.000.000	23 Persen	Rp126.000.000	28 Persen	Rp226.000.000	33 Persen	Rp125.000.000	37 Persen	Rp168.049.000	37 Persen	Rp706.049.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	100 Persen	Rp360.293.590	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp1.960.293.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	Rp222.267.000	100 Persen	Rp447.267.000	100 Persen	Rp547.267.000	100 Persen	Rp409.446.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp2.076.247.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	n/a	-	Rp0	35 Persen	Rp417.000.000	50 Persen	Rp575.000.000	66,67 Persen	Rp645.000.000	100 Persen	Rp740.000.000	100 Persen	Rp2.377.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Misi 2				Rp633.154.020.520		Rp655.941.315.000		Rp696.175.958.000		Rp667.901.479.000		Rp695.494.573.000		Rp3.348.667.345.520	
			Misi 3: **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**															
			Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,12	3,8		3,97		4,48		4,83		5,12		5,12		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	30,67 Persen	37,33 Persen	Rp235.000.000	42,67 Persen	Rp340.000.000	48 Persen	Rp400.000.000	53,33 Persen	Rp390.000.000	58,67 Persen	Rp450.000.000	58,67 Persen	Rp1.815.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	n/a	14,28 Persen	Rp2.900.000	28,57 Persen	Rp20.000.000	57,14 Persen	Rp20.000.000	85,71 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp92.900.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	147,57 Persen	149 Persen	Rp525.935.120	151 Persen	Rp1.276.750.000	153 Persen	Rp1.276.750.000	155 Persen	Rp1.276.750.000	157 Persen	Rp1.519.750.000	157 Persen	Rp5.875.935.120	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	24 Persen	22,67 Persen	Rp80.687.000	21,33 Persen	Rp211.000.000	20 Persen	Rp211.000.000	18,67 Persen	Rp211.000.000	17,33 Persen	Rp325.000.000	17,33 Persen	Rp1.038.687.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	0	0	PROGRAM	Persentase	100 Persen	100	Rp31.000.	100	Rp61.000.	100	Rp61.000.	100	Rp61.000.00	100	Rp86.000.00	100	Rp300.00	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	9	5	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi		Persen	000	Persen	000	Persen	000	Persen	0	Persen	0	Persen	0.000	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan				100 Persen	Rp2.833.025.000							100 Persen	Rp2.833.025.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp1.845.737.082	85 Angka	Rp2.576.729.802	85 Angka	Rp2.351.698.802	85 Angka	Rp2.230.167.802	85 Angka	Rp2.572.698.802	85 Angka	Rp11.577.032.290	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	100 Persen	Rp1.585.571.950	100 Persen	Rp2.746.076.470	100 Persen	Rp3.146.076.470	100 Persen	Rp3.446.076.470	100 Persen	Rp4.196.951.470	100 Persen	Rp15.120.752.830	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	Rp1.699.075.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp1.892.125.000,00	100 Persen	Rp6.357.575.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	Rp1.941.072.488	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp2.814.455.368	100 Persen	Rp1.578.210.368	100 Persen	Rp8.962.648.960	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Produksi Daging	15.222 Ton	15.326 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton		15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase fasilitasi	100 Persen	100 Persen	Rp70.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp2.375.000.000	DINAS KETAHANAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	penanggulangan bencana														PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.700.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp32.000.000	100 Persen	Rp100.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	Rp792.243.360	6,315 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,32 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,325 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,33 ton/ha	Rp1.213.323.360	6,33 ton/ha	Rp5.090.536.800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp3.500.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	n/a	0	0	20 Persen	125.000.000	60 Persen	250.000.000	80 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	Rp625.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	Rp187.675.000	831 ton	Rp292.175.120,00	833 ton	Rp404.490.000,00	835 ton	Rp662.675.120,00	837 ton	Rp319.975.120,00	837 ton	Rp1.866.990.360	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	Rp1.459.882.000	12.805 ton	Rp1.474.817.880,00	12.878 ton	Rp3.610.882.000,00	12.959 ton	Rp1.613.413.880,00	13.046 ton	Rp2.133.888.880,00	13.046 ton	Rp10.292.884.640	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	5 Persen	Rp3.900.000	5 Persen	Rp3.900.000,00	5 Persen	Rp53.900.000,00	5 Persen	Rp53.900.000,00	5 Persen	Rp79.900.000,00	5 Persen	Rp195.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2 Persen	Rp42.900.000	2 Persen	Rp162.900.000,00	2 Persen	Rp127.900.000,00	5 Persen	Rp156.900.000,00	5 Persen	Rp306.950.000,00	5 Persen	Rp797.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Desa Wisata	32 Persen	33,33 Persen	Rp1.000.000.000	34,67 Persen	Rp2.379.500.000	36 Persen	Rp1.475.000.000	37,33 Persen	Rp1.525.000.000	38,67 Persen	Rp1.760.000.000	93 Persen	Rp8.139.500.000	DINAS PARIWISATA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	Rp0	100 Persen	Rp735.000.000	100 Persen	Rp0	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp1.635.000.000	DINAS PARIWISATA
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80 Angka	Rp4.278.552.000	80 Angka	Rp4.570.540.000	82 Angka	Rp4.872.137.000	83 Angka	Rp5.183.648.000	84 Angka	Rp6.765.820.000	84 Angka	Rp25.670.697.000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 Persen	Rp2.902.000.000	3,13 Persen	Rp5.402.000.000	3,13 Persen	Rp3.602.000.000	3,13 Persen	Rp8.902.000.000	3,13 Persen	Rp7.902.000.000	3,13 Persen	Rp28.710.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	n/a	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp4.834.000.000	DINAS PARIWISATA
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	0 Persen	14 Persen	Rp400.000.000	28 Persen	Rp1.447.073.000	40 Persen	Rp2.528.000.000	50 Persen	Rp2.537.000.000	70 Persen	Rp2.537.000.000	70 Persen	Rp9.449.073.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 Persen	51 Persen	Rp160.000.000	52 Persen	Rp168.000.000	53 Persen	Rp184.800.000	54 Persen	Rp194.040.000	55 Persen	Rp213.444.000	55 Persen	Rp920.284.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase pertumbuhan	1 Persen	2 Persen	Rp6.070.923.713	3 Persen	Rp7.294.730.000	4 Persen	Rp6.623.334.000	5 Persen	Rp6.923.334.000	6 Persen	Rp8.200.000.000	6 Persen	Rp35.112.321.713	DINAS KOPERASI,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	omzet pedagang pasar rakyat														USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8 Persen	7 Persen	Rp179.957.500	7 Persen	Rp188.955.375	6 Persen	Rp207.850.900	6 Persen	Rp218.243.400	5 Persen	Rp242.000.000	5 Persen	Rp1.037.007.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	83 juta US$	80 juta US$	Rp654.020.000	90 juta US$	Rp686.721.000	100 juta US$	Rp755.393.100	110 juta US$	Rp873.162.700	120 juta US$	Rp1.200.000.000	500 juta US$	Rp4.169.296.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25 Persen	27 Persen	Rp349.223.100	30 Persen	Rp384.145.000	32 Persen	Rp422.559.500	35 Persen	Rp443.687.400	40 Persen	Rp488.056.200	40 Persen	Rp2.087.671.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	0 Persen	-	Rp0	10 Persen	Rp300.000.000	15 Persen	Rp500.000.000	20 Persen	Rp525.000.000	25 Persen	Rp600.000.000	25 Persen	Rp1.925.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,34 angka	81 Angka	Rp2.775.856.027	81.5 Angka	Rp3.217.891.625	82 Angka	Rp3.505.716.000	82,5 Angka	Rp3.682.832.000	83 Angka	Rp4.333.290.583	83 Angka	Rp17.515.586.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA	Persentase rekomendasi penerbitan izin	2,5 Persen	2,5 Persen	Rp24.835.120	2,5 Persen	Rp28.000.000	2,5 Persen	Rp29.500.000	2,5 Persen	Rp31.000.000	2,5 Persen	Rp32.000.000	2,5 Persen	Rp145.335.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			SIMPAN PINJAM	usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten														DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	66,88 Persen	70,23 Persen	Rp121.110.120	73,58 Persen	Rp155.895.000	75,25 Persen	Rp159.543.000	76,92 Persen	Rp166.757.500	78,59 Persen	Rp194.992.000	78,59 Persen	Rp798.297.620	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	56,54 Persen	59,52 Persen	Rp26.835.120	63,99 Persen	Rp47.500.000	65,48 Persen	Rp50.000.000	66,96 Persen	Rp52.500.000	68,45 Persen	Rp55.000.000	68,45 Persen	Rp231.835.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	60 Persen	Rp554.286.350	60 Persen	Rp169.774.000	60 Persen	Rp175.938.500	60 Persen	Rp187.325.000	60 Persen	Rp221.936.000	60 Persen	Rp1.309.259.850	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	Rp108.497.240	5 Persen	Rp281.127.000	5 Persen	Rp296.384.000	5 Persen	Rp314.845.000	5 Persen	Rp372.966.000	5 Persen	Rp1.373.819.240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,99	85 Angka	Rp1.167.283.800	85 Angka	Rp1.009.881.000	85 Angka	Rp1.521.264.000	85 Angka	Rp1.625.315.000	85 Angka	Rp2.494.934.000	85 Angka	Rp7.818.677.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KABUPATEN/KOTA															PINTU
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	n/a	100 Persen	Rp149.330.000	100 Persen	Rp233.500.000	100 Persen	Rp256.850.000	100 Persen	Rp282.535.000	100 Persen	Rp236.500.000	100 Persen	Rp1.158.715.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	7,85 Persen	8,30 Persen	Rp278.587.500	11,29 Persen	Rp340.038.000	12,79 Persen	Rp406.688.000	15,29 Persen	Rp480.003.000	17,79 Persen	Rp473.038.000	17,79 Persen	Rp1.978.354.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	Rp379.462.000	100 Persen	Rp413.962.000	100 Persen	Rp422.712.000	100 Persen	Rp432.337.000	100 Persen	Rp430.237.000	100 Persen	Rp2.078.710.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,90		3,50		3,40		3,30		3,20		3,20		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Nilai	80 Nilai	Rp3.000.000.000	81 Nilai	Rp2.500.000.000	82 Nilai	Rp3.000.000.000	83 Nilai	Rp3.250.000.000	84 Nilai	Rp3.500.000.000	84 Nilai	Rp15.250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 Persen	18,5 Persen	Rp3.400.000.000	19,5 Persen	Rp2.600.000.000	20,5 Persen	Rp2.750.000.000	21,5 Persen	Rp3.050.000.000	22,5 Persen	Rp3.350.000.000	22,5 Persen	Rp15.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	54 Persen	54 Persen	Rp7.595.276.000	56 Persen	Rp7.639.007.000	58 Persen	Rp7.929.068.000	60 Persen	Rp8.346.856.000	62 Persen	Rp8.845.071.000	62 Persen	Rp40.355.278.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	PROGRAM	Persentase	35 Persen	35 Persen	Rp1.350.0	36 Persen	Rp875.00	37 Persen	Rp900.00	38 Persen	Rp950.000.0	39 Persen	Rp975.000.0	39 Persen	Rp5.050.0	DINAS TENAGA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	5	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) .			00.000		0.000		0.000		00		00		00.000	KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	3 2	0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	72 Persen	74 Persen	Rp575.000.000	80 Persen	Rp600.000.000	90 Persen	Rp625.000.000	100 Persen	Rp650.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	100 Persen	Rp3.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1 4	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp824.075.615	83 Angka	Rp865.278.871	83 Angka	Rp908.542.814	83 Angka	Rp953.969.955	83 Angka	Rp1.001.668.453	83 Angka	Rp4.553.535.708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	100 Persen	Rp3.458.543.215	100 Persen	Rp4.516.401.480	100 Persen	Rp4.222.310.172	100 Persen	Rp3.882.498.130	100 Persen	Rp4.294.388.138	100 Persen	Rp20.374.141.135	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp2.488.565.670	100 Persen	Rp4.063.753.649	100 Persen	Rp4.493.629.014	100 Persen	Rp4.971.991.915	100 Persen	Rp5.168.197.409	100 Persen	Rp21.186.137.657	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase ketersediaan bidang tanah	n/a	16 Persen	Rp600.000.000	36 Persen	Rp650.000.000	56 Persen	Rp700.000.000	77 Persen	Rp750.000.000	100 Persen	Rp800.000.000	100 Persen	Rp3.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.														DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	25 Persen	33 Persen	Rp1.057.984.500	41,67 Persen	Rp1.300.092.000	50 Persen	Rp1.300.092.000	58,33 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp6.258.352.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	n/a	80		90		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	n/a	2 CBT	Rp171.000.000	2 CBT	Rp549.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp499.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp1.317.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	Rp0	25 Persen	Rp522.000.000	35 Persen	Rp622.000.000	50 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp2.388.000.000	DINAS PARIWISATA
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	Rp599.342.940	55 Persen	Rp530.997.000	60 Persen	Rp564.096.000	65 Persen	Rp612.759.000	70 Persen	Rp736.976.000	70 Persen	Rp3.044.170.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)															PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	Rp410.733.440	65 Persen	Rp358.033.000	70 Persen	Rp364.207.500	75 Persen	Rp379.917.000	80 Persen	Rp420.988.000	80 Persen	Rp1.933.878.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	81,50%	85,97 Persen	Rp1.684.041.210	90,65 Persen	Rp2.702.391.000	95,32 Persen	Rp2.151.503.500	100 Persen	Rp2.305.827.000	100 Persen	Rp2.773.672.217	100 Persen	Rp11.617.434.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	100 Persen	Rp25.735.120	100 Persen	Rp44.500.000	100 Persen	Rp49.000.000	100 Persen	Rp52.000.000	100 Persen	Rp57.000.000	100 Persen	Rp228.235.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	0 Persen	0 Persen	Rp0	0,22 Persen	Rp50.000.000	0,22 Persen	Rp62.000.000	0,22 Persen	Rp63.000.000	0,22 Persen	Rp65.000.000	0,22 Persen	Rp240.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				perusahaan Kawasan industri di kabupaten														
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	9,33 persen	10,67 persen	Rp400.000.000	12 persen	Rp593.000.000	13,33 persen	Rp828.000.000	14,67 persen	Rp406.000.000	17,33 persen	Rp393.000.000	17,33 persen	Rp2.620.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Misi 3				Rp61.564.136.300		Rp78.235.765.000		Rp77.131.520.000		Rp85.482.063.000		Rp93.618.840.000		Rp396.032.324.300	
			Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana															
			Tujuan : Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	n/a	66,1175		67,26		67,88		69,50		70,61		70,61		DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
			Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	n/a	73,71		75,05		76,40		77,47		79,08		79,08		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	80,62 Persen	81,03 Persen	Rp22.050.532.539	81,44 Persen	Rp22.812.684.000	81,85 Persen	Rp22.993.952.400	82,26 Persen	Rp23.063.347.640	82,67 Persen	Rp23.139.682.404	82,67 Persen	Rp114.060.198.983	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42 Persen	75,83 Persen	Rp39.940.351.125	76,24 Persen	Rp40.913.427.855	76,65 Persen	Rp40.954.770.640	77,06 Persen	Rp41.110.247.704	77,47 Persen	Rp42.120.859.933	77,47 Persen	Rp205.039.657.257	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	n/a	0	Rp0	65 Persen	Rp70.000.000.000	25 Persen	Rp30.000.000.000	10 Persen	Rp10.000.000.000		Rp0	100 Persen	Rp110.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	82,83	83 Angka	Rp6.231.608.230	83,5 Angka	Rp6.088.747.424	84 Angka	Rp6.292.974.714	84 Angka	Rp6.667.624.734	84 Angka	Rp6.729.739.755	84 Angka	Rp32.010.694.857	DINAS PEKERJAAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	n/a	10 Persen	Rp11.093.340.360	20 Persen	Rp25.059.600.452	30 Persen	Rp15.501.452.323	40 Persen	Rp66.089.613.546	50 Persen	Rp73.228.230.810	50 Persen	Rp190.972.237.491	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34 Persen	72,84 Persen	Rp790.328.980	74,34 Persen	Rp842.300.472	75,84 Persen	Rp906.530.519	77,34 Persen	Rp1.077.183.571	78,84 Persen	Rp1.104.901.928	78,84 Persen	Rp4.721.245.470	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	21,33 Persen	22,67 Persen	Rp824.650.000	25,33 Persen	Rp2.500.000.000	28 Persen	Rp600.000.000	30,67 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp5.124.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	29,93 Persen	30 Persen	Rp12.435.566.438	35 Persen	Rp12.785.572.133	40 Persen	Rp12.914.129.346	45 Persen	Rp13.655.542.281	50 Persen	Rp14.421.096.509	50 Persen	Rp66.211.906.707	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	81,5 Persen	82,4 Persen		83,3 Persen		84,2 Persen		85,1 Persen		86 Persen		86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak														
1	0 3	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	n/a	3,97 Persen	Rp3.635.314.000	4,6 Persen	Rp5.035.548.547	5,23 Persen	Rp5.309.103.402	5,86 Persen	Rp5.540.013.742	6,49 Persen	Rp4.636.195.116	6,49 Persen	Rp24.156.174.807	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0 Persen	10,59 Persen	Rp4.266.816.699	21,18 Persen	Rp5.589.155.000	31,77 Persen	Rp5.648.070.500	42,36 Persen	Rp5.762.877.550	52,95 Persen	Rp5.939.165.305	52,95 Persen	Rp27.206.085.054	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	98,75 Persen	99,18 Persen	Rp421.652.609	99,39 Persen	Rp2.128.675.558	99,6 Persen	Rp2.348.253.042	99,8 Persen	Rp2.493.951.306	100 Persen	Rp2.692.300.000	100 Persen	Rp10.084.832.515	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	Rp406.039.100	100 Persen	Rp451.000.000	100 Persen	Rp496.100.000	100 Persen	Rp545.710.000	100 Persen	Rp600.281.000	100 Persen	Rp2.499.130.100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemanfaatan ruang Satuan	n/a	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp73.174.300.000	100 Persen	Rp850.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp75.374.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp3.390.000.000	100 Persen	Rp3.680.000.000	100 Persen	Rp2.010.000.000	100 Persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,00 angka	80,50 Angka	Rp965.187.000	80,75 Angka	Rp965.187.000	81 Angka	Rp1.061.705.000	81,25 Angka	Rp1.167.875.000	81,50 Angka	Rp1.284.662.000	81,50 Angka	Rp5.444.616.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	30,43	Rp13.012.540.000	30,43	Rp9.220.389.000	30,43	Rp10.689.762.000	30,43	Rp12.312.443.000	30,43	Rp14.128.890.000	30,43	Rp59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		
			Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfataan ruang	80,00	75,03		75,05		75,07		75,10		70,20		70,20		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	0 3	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	n/a	70 Persen	Rp1.397.829.950	70,1 Persen	Rp2.350.000.000	70,2 Persen	Rp1.495.000.000	70,3 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp7.182.829.950	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	0 3	1 3	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan perencanaan dan	n/a	90 Persen	Rp500.000.000	90 Persen	Rp1.910.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp2.860.000.000	DINAS PERTANAHAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten														DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	n/a	n/a	Rp0,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,71	82 Angka	Rp941.654.430	83 Angka	Rp950.143.500	84 Angka	Rp923.791.000	85 Angka	Rp1.571.656.000	86 Angka	Rp2.310.564.000	86 Angka	Rp6.697.808.930	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	n/a	90 Persen	Rp386.090.620	90 Persen	Rp13.400.000.000	90 Persen	Rp11.400.000.000	90 Persen	Rp10.400.000.000	90 Persen	Rp400.000.000	90 Persen	Rp35.986.090.620	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	20,73 Persen	33,03 Persen	Rp4.220.382.000	35,37 Persen	Rp7.318.511.500	44,74 Persen	Rp10.746.608.000	54,58 Persen	Rp11.010.451.000	64,89 Persen	Rp8.651.181.000	64,89 Persen	Rp41.947.133.500	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
			Sasaran Daerah: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,01	62,75		63,59		64,42		65,24		66,07		66,07		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENYELENGGA	Persentase pemanfaatan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp250.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp250.000.000	100 Persen	Rp1.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														HIDUP
x	x x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	3.278.515.080	83,25 Angka	Rp3.587.161.040	83,5 Angka	5.787.774.040	83,75 Angka	Rp3.980.745.040	84 Angka	4.191.158.040	84 Angka	Rp20.825.353.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	n/a	70 Persen	4.895.237.000	75 Persen	Rp1.745.000.000	80 Persen	1.590.000.000	85 Persen	Rp1.705.000.000	90 Persen	1.800.000.000	90 Persen	Rp11.735.237.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	n/a	30 Persen	3.782.201.120	32 Persen	Rp5.895.936.560	34 Persen	5.426.000.000	36 Persen	Rp6.268.600.000	38 Persen	5.850.000.000	38 Persen	Rp27.222.737.680	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	n/a	5 Persen	82.820.500	5 Persen	Rp106.000.000	5 Persen	117.000.000	5 Persen	Rp124.000.000	5 Persen	145.000.000	5 Persen	Rp574.820.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	n/a	1 penghargaan	16.310.000	1 penghargaan	Rp40.000.000	1 penghargaan	44.000.000	1 penghargaan	Rp50.000.000	1 penghargaan	55.000.000	1 penghargaan	Rp205.310.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	n/a	14,29 Persen	382.795.740	57,14 Persen	Rp1.700.000.000	85,71 Persen	910.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Rp3.337.795.740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	n/a	31,35 Persen	14.675.000	33,10 Persen	Rp15.000.000	34,84 Persen	20.000.000	36,58 Persen	Rp22.500.000	38,32 Persen	23.000.000	100 Persen	Rp95.175.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
2	1 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	n/a	16,67 Persen	31.900.000	23,33 Persen	Rp51.000.000	25 Persen	64.000.000	31 Persen	Rp73.000.000	33,33 Persen	82.000.000	34 Persen	Rp301.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	100 Persen	14.950.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	Rp124.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560	44,16 Persen	Rp10.086.535.400	45,87 Persen	10.303.791.960	46,86 Persen	Rp10.913.471.960	50,07 Persen	13.208.471.960	50,07 Persen	Rp52.802.563.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	181,26	175,51		169,94		164,55		159,33		154,27		154,27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp350.000.000	100 Persen	Rp220.000.000	100 Persen	Rp5.050.000.000	100 Persen	Rp80.000.000	100 Persen	Rp5.700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80,50 angka	81,00 Angka	Rp5.564.133.000	81,50 Angka	Rp10.902.809.000	82,00 Angka	Rp7.693.333.000	82,50 Angka	Rp6.247.815.000	83,00 Angka	Rp7.802.762.000	83,00 Angka	Rp38.210.852.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	0 5	0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	0 5	0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Misi 4				Rp164.347.613.000		Rp361.180.510.000		Rp240.015.010.000		Rp277.390.268.000		Rp263.279.362.000		Rp1.306.212.763.000	
			Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel															
			Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	13,50	13,37		12,90		12,50		12,05		11,50		11,50		DINAS SOSIAL
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	72.101	72.296		71.667		71.380		71.059		70.668		70.668		DINAS SOSIAL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Sosial (PPKS)														
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	82 Angka	Rp1.442.465.488	82 Angka	Rp1.471.857.672	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.942.358.268	83 Angka	Rp7.741.612.152	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL
1	0	0	PROGRAM	cakupan	75 Persen	75 Persen	Rp159.33	75 Persen	Rp152.03	80 Persen	Rp252.03	80 Persen	Rp375.547.9	80 Persen	Rp475.547.9	80 Persen	Rp1.414.4	DINAS SOSIAL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6	7	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial			4.904		0.720		0.720		04		04		92.152	
			Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,18	95,5		96		96,5		96,75		96,9		96,9		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	69,36		71,01		72,66		74,31		75,96		75,96		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	Rp550.000.000	38,67 Persen	Rp635.000.000	40 Persen	Rp775.000.000	41,33 Persen	Rp860.000.000	42,67 Persen	Rp815.000.000	42,67 Persen	Rp3.635.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	Rp63.875.000	66 Persen	Rp71.875.000	69 Persen	Rp457.899.000	72 Persen	Rp547.899.000	75 Persen	Rp612.899.000	75 Persen	Rp1.754.447.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	Rp434.963.300	0.00032	Rp434.708.820	0.00031	Rp905.000.000	0.00028	Rp925.000.000	0.00026	Rp940.000.000	0.00026	Rp3.639.672.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	6 persen	7 persen	Rp34.460.120	8 Persen	Rp34.460.120	9 Persen	Rp194.000.000	10 Persen	Rp294.000.000	11 Persen	Rp394.000.000	11 Persen	Rp950.920.240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya		Utama		Utama		KLA		KLA		KLA		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kalurahan	Rp55.799.245	30 Kalurahan	Rp55.799.245	45 Kalurahan	Rp900.000.000	60 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp2.811.598.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	70 Persen	100 Persen	Rp629.728.475	100 Persen	Rp629.728.700	100 Persen	Rp881.000.000	100 Persen	Rp886.000.000	100 Persen	Rp891.000.000	100 Persen	Rp3.917.457.175	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp1.938.485.000	83 Angka	Rp1.250.000.000	83 Angka	Rp1.500.000.000	83 Angka	Rp1.650.000.000	83 Angka	Rp1.732.500.000	83 Angka	Rp8.070.985.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	1,67	1,66	Rp150.544.950	1,65	Rp150.000.000	1,64	Rp165.000.000	1,63	Rp181.500.000	1,62	Rp194.700.000	1,62	Rp841.744.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	n/a	77,2 Persen	Rp5.548.497.130	77,2 Persen	Rp2.344.401.250	77,2 Persen	Rp2.090.369.135	77,2 Persen	Rp2.704.599.135	77,2 Persen	Rp4.127.300.000	77,2 Persen	Rp16.815.166.650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	82,5 Persen	83 Persen	Rp970.477.780	84 Persen	Rp973.795.865	84,5 Persen	Rp973.795.865	85 Persen	Rp1.123.795.865	85,5 Persen	Rp1.750.076.000	85,5 Persen	Rp5.791.941.375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Misi 5				Rp25.916.291.000		Rp22.308.217.000		Rp25.509.318.000		Rp27.063.393.000		Rp31.510.782.000		Rp132.308.001.000	
			Jumlah Total				Rp2.141.090.935.000		Rp2.393.621.289.000		Rp2.335.645.090.000		Rp2.369.372.795.000		Rp2.433.607.603.000		Rp11.673.387.712.340	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bantul berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*out come*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah pada RPJMD Tahun 2021–2026 dapat dilihat dari proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 7.1

Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul

Uraian	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	2.292.724.883.000	2.166.090.934.000	2.418.621.289.000	2.360.645.090.000	2.394.372.795.000	2.458.607.602
BELANJA DAERAH	2.267.724.883.000	2.141.090.935.000	2.393.621.289.000	2.335.645.090.000	2.369.372.795.000	2.433.607.603
Belanja Operasi	1.713.809.666.000	1.664.248.301.000	1.748.842.898.000	1.788.661.823.000	1.825.402.113.000	1.874.727.528
Belanja Pegawai	951.471.887.000	976.142.986.000	992.330.204.000	1.009.871.614.000	1.027.786.933.000	1.046.916.030
Belanja Barang dan Jasa	634.395.529.000	626.235.407.000	693.173.694.000	706.280.209.000	734.916.180.000	764.904.498
Belanja Hibah	122.107.250.000	55.601.908.000	57.339.000.000	66.510.000.000	56.699.000.000	56.907.000
Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000	6.268.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000
Belanja Modal	242.068.319.000,00	135.929.147.000	295.684.951.000	194.601.647.000	188.439.165.000	198.185.403
Belanja Tidak Terduga	34.055.411.000,00	22.686.428.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000
Belanja Transfer	277.791.487.000	318.227.059.000	329.093.440.000	332.381.620.000	335.531.517.000	340.694.671
Belanja Bagi Hasil	26.103.398.000,00	26.103.398.000	28.695.874.000	30.065.652.000	31.503.375.000	34.675.516
Belanja Bantuan Keuangan	251.688.089.000,00	292.123.661.000	300.397.566.000	302.315.968.000	304.028.142.000	306.019.155

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan pembangunan nasional.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2022 – 2026 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	82 Angka	Rp5.009.338.342	82 Angka	Rp5.233.481.342	82 Angka	Rp5.533.481.342	82 Angka	Rp5.833.481.342	82 Angka	Rp6.921.161.342	82 Angka	Rp28.530.943.710	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	3,88 Persen	4,18 Persen	800.000.000	4,48 Persen	3.175.000.000	4,78 Persen	4.390.000.000	5,07 Persen	2.390.000.000	5,37 Persen	2.590.000.000	5,37 Persen	Rp13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.733.836.320	84,15 Angka	Rp2.750.930.000	84,30 Angka	Rp2.763.020.000	84,40 Angka	Rp2.776.600.000	84,50 Angka	Rp2.798.350.000	84,50 Angka	Rp13.822.736.320	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	1 indeks	Rp826.883.000	1 indeks	Rp831.000.000	1 indeks	Rp837.000.000	1 indeks	Rp842.850.000	1 indeks	Rp851.000.000	1 indeks	Rp4.188.733.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	36 Kalurahan	40 Kalurahan	Rp943.664.600	45 Kalurahan	Rp957.000.000	50 Kalurahan	Rp948.000.000	55 Kalurahan	Rp950.500.000	60 Kalurahan	Rp953.000.000	60 Kalurahan	Rp4.752.164.600	DINAS KESEHATAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	25,93 Persen	33 Persen	Rp600.000.000	40 Persen	Rp4.044.050.000	48 Persen	Rp1.865.000.000	55 Persen	Rp2.035.000.000	62 Persen	Rp2.205.000.000	62 Persen	Rp10.749.050.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp180.645.120	84,15 Angka	Rp185.500.000	84,30 Angka	Rp190.000.000	84,40 Angka	Rp194.000.000	84,50 Angka	Rp198.000.000	84,50 Angka	Rp948.145.120	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	100 persen	Rp37.128.755.263	100 persen	Rp37.129.000.000	100 persen	Rp37.130.000.000	100 persen	Rp37.131.000.000	100 persen	Rp37.132.000.000	100 persen	Rp185.650.755.263	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp176.881.680	100 Persen	Rp182.000.000	100 Persen	Rp186.000.000	100 Persen	Rp190.650.000	100 Persen	Rp194.000.000	100 Persen	Rp929.531.680	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	100 persen	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.325.448.000	84,15 Angka	Rp1.755.000.000	84,30 Angka	Rp1.765.000.000	84,40 Angka	Rp1.775.000.000	84,50 Angka	Rp1.785.000.000	84,50 Angka	Rp9.405.448.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.461.858.400	84,15 Angka	Rp2.300.000.000	84,30 Angka	Rp2.380.000.000	84,40 Angka	Rp2.475.000.000	84,50 Angka	Rp2.580.000.000	84,50 Angka	Rp12.196.858.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.405.268.800	84,15 Angka	Rp2.526.000.000	84,30 Angka	Rp2.653.000.000	84,40 Angka	Rp2.786.000.000	84,50 Angka	Rp2.925.000.000	84,50 Angka	Rp13.295.268.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.920.358.400	84,15 Angka	Rp3.005.000.000	84,30 Angka	Rp3.110.000.000	84,40 Angka	Rp3.215.000.000	84,50 Angka	Rp3.320.000.000	84,50 Angka	Rp15.570.358.400	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.850.678.294	84,15 Angka	Rp2.659.182.000	84,30 Angka	Rp2.715.265.000	84,40 Angka	Rp2.772.370.000	84,50 Angka	Rp2.830.517.000	84,50 Angka	Rp13.828.012.294	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.720.400	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp761.000.000	1 indeks	Rp2.901.417.064	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.949.358.400	84,15 Angka	Rp1.990.980.000	84,30 Angka	Rp2.033.699.600	84,40 Angka	Rp2.077.173.592	84,50 Angka	Rp2.121.417.064	84,50 Angka	Rp10.172.628.656	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.588.749.800	84,15 Angka	Rp1.624.495.869	84,30 Angka	Rp1.645.190.828	84,40 Angka	Rp1.666.041.736	84,50 Angka	Rp1.687.053.163	84,50 Angka	Rp8.211.531.396	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.216.541.116	84,15 Angka	Rp2.275.520.964	84,30 Angka	Rp2.336.033.988	84,40 Angka	Rp2.397.934.838	84,50 Angka	Rp2.461.258.209	84,50 Angka	Rp11.687.289.115	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.466.089.600	84,15 Angka	Rp695.000.000	84,30 Angka	Rp705.000.000	84,40 Angka	Rp715.000.000	84,50 Angka	Rp725.000.000	84,50 Angka	Rp4.306.089.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.075.268.800	84,15 Angka	Rp2.130.000.000	84,30 Angka	Rp2.186.250.000	84,40 Angka	Rp2.243.781.250	84,50 Angka	Rp2.302.625.781	84,50 Angka	Rp10.937.925.831	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.360.179.200	84,15 Angka	Rp1.396.600.000	84,30 Angka	Rp1.417.700.000	84,40 Angka	Rp1.437.600.000	84,50 Angka	Rp1.456.300.000	84,50 Angka	Rp7.068.379.200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.272.316.420	84,15 Angka	Rp1.655.600.000	84,30 Angka	Rp1.676.356.000	84,40 Angka	Rp1.697.269.560	84,50 Angka	Rp1.718.342.255	84,50 Angka	Rp9.019.884.235	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.974.931.725	84,15 Angka	Rp2.077.334.231	84,30 Angka	Rp2.184.700.942	84,40 Angka	Rp2.189.700.942	84,50 Angka	Rp2.302.185.989	84,50 Angka	Rp10.728.853.829	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.705.952.000	84,15 Angka	Rp1.660.000.000	84,30 Angka	Rp1.695.600.000	84,40 Angka	Rp1.731.812.000	84,50 Angka	Rp145.000.000	84,50 Angka	Rp6.938.364.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.280.789.600	84,15 Angka	Rp1.314.168.000	84,30 Angka	Rp1.333.699.000	84,40 Angka	Rp1.352.994.000	84,50 Angka	Rp1.372.461.000	84,50 Angka	Rp6.654.111.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.860.862.400	84,15 Angka	Rp2.865.504.000	84,30 Angka	Rp2.970.504.000	84,40 Angka	Rp3.075.504.000	84,50 Angka	Rp3.180.504.000	84,50 Angka	Rp14.952.878.400	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.988.358.400	84,15 Angka	Rp2.422.950.000	84,30 Angka	Rp2.451.130.000	84,40 Angka	Rp2.479.540.000	84,50 Angka	Rp2.508.180.000	84,50 Angka	Rp12.850.158.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.384.037.982	84,15 Angka	Rp712.000.000	84,30 Angka	Rp734.000.000	84,40 Angka	Rp755.000.000	84,50 Angka	Rp765.000.000	84,50 Angka	Rp5.350.037.982	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.626.068.800	84,15 Angka	Rp1.640.000.000	84,30 Angka	Rp1.650.000.000	84,40 Angka	Rp1.660.000.000	84,50 Angka	Rp1.670.000.000	84,50 Angka	Rp8.246.068.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp777.179.200	84,15 Angka	Rp798.000.000	84,30 Angka	Rp810.000.000	84,40 Angka	Rp820.000.000	84,50 Angka	Rp835.000.000	84,50 Angka	Rp4.040.179.200	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.903.940.063	84,15 Angka	Rp2.720.040.000	84,30 Angka	Rp2.757.920.000	84,40 Angka	Rp2.786.920.000	84,50 Angka	Rp2.806.800.000	84,50 Angka	Rp13.975.620.063	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.005.768.800	84,15 Angka	Rp1.998.780.605	84,30 Angka	Rp2.099.719.635	84,40 Angka	Rp2.205.455.616	84,50 Angka	Rp2.316.228.396	84,50 Angka	Rp10.625.953.052	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.930.448.000	84,15 Angka	Rp2.940.000.000	84,30 Angka	Rp2.950.000.000	84,40 Angka	Rp2.960.000.000	84,50 Angka	Rp2.970.000.000	84,50 Angka	Rp14.750.448.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp1.800.979.200	84,15 Angka	Rp1.667.600.000	84,30 Angka	Rp1.674.600.000	84,40 Angka	Rp1.681.600.000	84,50 Angka	Rp1.686.600.000	84,50 Angka	Rp8.511.379.200	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.651.878.200	84,15 Angka	Rp2.657.000.000	84,30 Angka	Rp2.663.000.000	84,40 Angka	Rp2.669.000.000	84,50 Angka	Rp2.675.000.000	84,50 Angka	Rp13.315.878.200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.818.858.400	84,15 Angka	Rp1.634.000.000	84,30 Angka	Rp1.644.000.000	84,40 Angka	Rp1.654.000.000	84,50 Angka	Rp1.664.000.000	84,50 Angka	Rp8.414.858.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.455.179.200	84,15 Angka	Rp1.481.075.000	84,30 Angka	Rp1.507.466.125	84,40 Angka	Rp1.534.178.117	84,50 Angka	Rp1.561.215.789	84,50 Angka	Rp7.539.114.231	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	85 angka	82,15		82,50		82,90		83,10		83,50		83,50		RUMAH SAKIT

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		angka	140.000.000.000,00	angka	140.126.643.000,00	angka	140.242.452.000,00	angka	140.347.144.000,00	angka	143.866.547.000,00	angka	704.582.786.000,00	PANEMBAHAN SENOPATI
				Capaian SPM Rumah Sakit	77,50 Persen	80 Persen		80,50 Persen		81,00 Persen		81,50 Persen		82,00 Persen		82,00 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,83	83 Angka	Rp6.231.608.230	83,5 Angka	Rp6.088.747.424	84 Angka	Rp6.292.974.714	84 Angka	Rp6.667.624.734	84 Angka	Rp6.729.739.755	84 Angka	Rp32.010.694.857	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	n/a	0	Rp0	65 Persen	Rp70.000.000.000	25 Persen	Rp30.000.000.000	10 Persen	Rp10.000.000.000		Rp0	100 Persen	Rp110.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp73.174.300.000	100 Persen	Rp850.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp75.374.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	29,93 Persen	30 Persen	Rp12.435.566.438	35 Persen	Rp12.785.572.133	40 Persen	Rp12.914.129.346	45 Persen	Rp13.655.542.281	50 Persen	Rp14.421.096.509	50 Persen	Rp66.211.906.707	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten														DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	81,5 Persen	82,4 Persen		83,3 Persen		84,2 Persen		85,1 Persen		86 Persen		86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	n/a	3,97 Persen	Rp3.635.314.000	4,6 Persen	Rp5.035.548.547	5,23 Persen	Rp5.309.103.402	5,86 Persen	Rp5.540.013.742	6,49 Persen	Rp4.636.195.116	6,49 Persen	Rp24.156.174.807	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat kemantaban	80,62 Persen	81,03 Persen	Rp22.050.532.539	81,44 Persen	Rp22.812.684.000	81,85 Persen	Rp22.993.952.400	82,26 Persen	Rp23.063.347.640	82,67 Persen	Rp23.139.682.404	82,67 Persen	Rp114.060.198.983	DINAS PEKERJAAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERMUKIMAN	infrastruktur permukiman (jalan desa)														UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	n/a	10 Persen	Rp11.093.340.360	20 Persen	Rp25.059.600.452	30 Persen	Rp15.501.452.323	40 Persen	Rp66.089.613.546	50 Persen	Rp73.228.230.810	50 Persen	Rp190.972.237.491	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42 Persen	75,83 Persen	Rp39.940.351.125	76,24 Persen	Rp40.913.427.855	76,65 Persen	Rp40.954.770.640	77,06 Persen	Rp41.110.247.704	77,47 Persen	Rp42.120.859.933	77,47 Persen	Rp205.039.657.257	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34 Persen	72,84 Persen	Rp790.328.980	74,34 Persen	Rp842.300.472	75,84 Persen	Rp906.530.519	77,34 Persen	Rp1.077.183.571	78,84 Persen	Rp1.104.901.928	78,84 Persen	Rp4.721.245.470	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	21,33 Persen	22,67 Persen	Rp824.650.000	25,33 Persen	Rp2.500.000.000	28 Persen	Rp600.000.000	30,67 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp5.124.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	n/a	70 Persen	Rp1.397.829.950	70,1 Persen	Rp2.350.000.000	70,2 Persen	Rp1.495.000.000	70,3 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp7.182.829.950	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	90 Persen	Rp500.000.000	90 Persen	Rp1.910.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp2.860.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	09	PROGRAM PENATAAN	Cakupan perencanaan	n/a	n/a	Rp0,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	penataan bangunan dan lingkungan														DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0 Persen	10,59 Persen	Rp4.266.816.699	21,18 Persen	Rp5.589.155.000	31,77 Persen	Rp5.648.070.500	42,36 Persen	Rp5.762.877.550	52,95 Persen	Rp5.939.165.305	52,95 Persen	Rp27.206.085.054	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	98,75 Persen	99,18 Persen	Rp421.652.609	99,39 Persen	Rp2.128.675.558	99,6 Persen	Rp2.348.253.042	99,8 Persen	Rp2.493.951.306	100 Persen	Rp2.692.300.000	100 Persen	Rp10.084.832.515	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	Rp406.039.100	100 Persen	Rp451.000.000	100 Persen	Rp496.100.000	100 Persen	Rp545.710.000	100 Persen	Rp600.281.000	100 Persen	Rp2.499.130.100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	27,22 Persen	29,37 Persen	600.000.000	45,44 Persen	1.500.000.000	66,88 Persen	2.500.000.000	88,31 Persen	3.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	Rp9.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN KEBUDAYAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	79 Angka	Rp2.952.127.000	80 Angka	Rp3.063.643.229	81 Angka	Rp3.370.007.552	82 Angka	Rp3.437.407.703	83 Angka	Rp3.781.148.473	83 Angka	Rp16.604.333.956	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0 5	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80 angka	81,00 Angka	Rp5.564.133.000	81,50 Angka	Rp10.902.809.000	82,00 Angka	Rp7.693.333.000	82,50 Angka	Rp6.247.815.000	83,00 Angka	Rp7.802.762.000	83,00 Angka	Rp38.210.852.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	-	Rp0	100 Persen	Rp350.000.000	100 Persen	Rp220.000.000	100 Persen	Rp5.050.000.000	100 Persen	Rp80.000.000	100 Persen	Rp5.700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01	0 5	0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana														AN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	82 Angka	Rp1.442.465.488	82 Angka	Rp1.471.857.672	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.942.358.268	83 Angka	Rp7.741.612.152	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani														
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	75 Persen	Rp159.334.904	75 Persen	Rp152.030.720	80 Persen	Rp252.030.720	80 Persen	Rp375.547.904	80 Persen	Rp475.547.904	80 Persen	Rp1.414.492.152	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	80 Nilai	80 Nilai	Rp3.000.0	81 Nilai	Rp2.500.000	82 Nilai	Rp3.000.000	83 Nilai	Rp3.250.0	84 Nilai	Rp3.500.0	84 Nilai	Rp15.250.00	DINAS TENAGA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			00.000		.000		.000		00.000		00.000		0.000	KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 Persen	18,5 Persen	Rp3.400.000.000	19,5 Persen	Rp2.600.000.000	20,5 Persen	Rp2.750.000.000	21,5 Persen	Rp3.050.000.000	22,5 Persen	Rp3.350.000.000	22,5 Persen	Rp15.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	54 Persen	54 Persen	Rp7.595.276.000	56 Persen	Rp7.639.007.000	58 Persen	Rp7.929.068.000	60 Persen	Rp8.346.856.000	62 Persen	Rp8.845.071.000	62 Persen	Rp40.355.278.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 Persen	35 Persen	Rp1.350.000.000	36 Persen	Rp875.000.000	37 Persen	Rp900.000.000	38 Persen	Rp950.000.000	39 Persen	Rp975.000.000	39 Persen	Rp5.050.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	Rp550.000.000	38,67 Persen	Rp635.000.000	40 Persen	Rp775.000.000	41,33 Persen	Rp860.000.000	42,67 Persen	Rp815.000.000	42,67 Persen	Rp3.635.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEBUDAYAAN															ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	Rp63.875.000	66 Persen	Rp71.875.000	69 Persen	Rp457.899.000	72 Persen	Rp547.899.000	75 Persen	Rp612.899.000	75 Persen	Rp1.754.447.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	Rp434.963.300	0.00032	Rp434.708.820	0.00031	Rp905.000.000	0.00028	Rp925.000.000	0.00026	Rp940.000.000	0.00026	Rp3.639.672.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6 persen	7 persen	Rp34.460.120	8 Persen	Rp34.460.120	9 Persen	Rp194.000.000	10 Persen	Rp294.000.000	11 Persen	Rp394.000.000	11 Persen	Rp950.920.240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kalurahan	Rp55.799.245	30 Kalurahan	Rp55.799.245	45 Kalurahan	Rp900.000.000	60 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp2.811.598.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	100 Persen	100 Persen	Rp629.728.475	100 Persen	Rp629.728.700	100 Persen	Rp881.000.000	100 Persen	Rp886.000.000	100 Persen	Rp891.000.000	100 Persen	Rp3.917.457.175	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang ditangani instansi terkait kabupaten														DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	30,67 Persen	37,33 Persen	Rp235.000.000	42,67 Persen	Rp340.000.000,00	48 Persen	Rp400.000.000,00	53,33 Persen	Rp390.000.000,00	58,67 Persen	Rp450.000.000,00	58,67 Persen	Rp1.815.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	n/a	14,28 Persen	Rp2.900.000	28,57 Persen	Rp20.000.000,00	57,14 Persen	Rp20.000.000	85,71 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp92.900.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	147,57 Persen	149 Persen	Rp525.935.120	151 Persen	Rp1.276.750.000,00	153 Persen	Rp1.276.750.000	155 Persen	Rp1.276.750.000	157 Persen	Rp1.519.750.000	157 Persen	Rp5.875.935.120	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	24 Persen	22,67 Persen	Rp80.687.000	21,33 Persen	Rp211.000.000	20 Persen	Rp211.000.000	18,67 Persen	Rp211.000.000	17,33 Persen	Rp325.000.000	17,33 Persen	Rp1.038.687.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	100 Persen	Rp31.000.000	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp86.000.000,00	100 Persen	Rp300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,04	82 Angka	Rp941.654.430	83 Angka	Rp950.143.500	84 Angka	Rp923.791.000	85 Angka	Rp1.571.656.000	86 Angka	Rp2.310.564.000	86 Angka	Rp6.697.808.930	DINAS PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	n/a	90 Persen	Rp386.090.620	90 Persen	Rp13.400.000.000	90 Persen	Rp11.400.000.000	90 Persen	Rp10.400.000.000	90 Persen	Rp400.000.000	90 Persen	Rp35.986.090.620	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	20,73 Persen	33,03 Persen	Rp4.220.382.000	35,37 Persen	Rp7.318.511.500	44,74 Persen	Rp10.746.608.000	54,58 Persen	Rp11.010.451.000	64,89 Persen	Rp8.651.181.000	64,89 Persen	Rp41.947.133.500	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	3.278.515.080	83,25 Angka	Rp3.587.161.040	83,5 Angka	5.787.774.040	83,75 Angka	Rp3.980.745.040	84 Angka	4.191.158.040	84 Angka	Rp20.825.353.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan	n/a	0	-	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	Rp1.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				perundang-undangan														
2	1	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	n/a	14,29 Persen	382.795.740	57,14 Persen	Rp1.700.000.000	85,71 Persen	910.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Rp3.337.795.740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	n/a	70 Persen	4.895.237.000	75 Persen	Rp1.745.000.000	80 Persen	1.590.000.000	85 Persen	Rp1.705.000.000	90 Persen	1.800.000.000	90 Persen	Rp11.735.237.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	n/a	30 Persen	3.782.201.120	32 Persen	Rp5.895.936.560	34 Persen	5.426.000.000	36 Persen	Rp6.268.600.000	38 Persen	5.850.000.000	38 Persen	Rp27.222.737.680	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	n/a	31,35 Persen	14.675.000	33,10 Persen	Rp15.000.000	34,84 Persen	20.000.000	36,58 Persen	Rp22.500.000	38,32 Persen	23.000.000	100 Persen	Rp95.175.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	n/a	16,67 Persen	31.900.000	23,33 Persen	Rp51.000.000	25 Persen	64.000.000	31 Persen	Rp73.000.000	33,33 Persen	82.000.000	34 Persen	Rp301.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	n/a	5 Persen	82.820.500	5 Persen	Rp106.000.000	5 Persen	117.000.000	5 Persen	Rp124.000.000	5 Persen	145.000.000	5 Persen	Rp574.820.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	n/a	1 penghargaan	16.310.000	1 penghargaan	Rp40.000.000	1 penghargaan	44.000.000	1 penghargaan	Rp50.000.000	1 penghargaan	55.000.000	1 penghargaan	Rp205.310.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	100 Persen	14.950.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	Rp124.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560	44,16 Persen	Rp10.086.535.400	45,87 Persen	10.303.791.960	46,86 Persen	Rp10.913.471.960	50,07 Persen	13.208.471.960	50,07 Persen	Rp52.802.563.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83 Angka	Rp3.270.576.670	83.25 Angka	Rp3.527.457.358	83.50 Angka	Rp3.764.203.094	83.75 Angka	Rp4.029.945.929	84 Angka	Rp5.157.228.194	84 Angka	Rp19.749.411.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99 Persen	99,81 Persen	Rp626.137.394	99,82 Persen	Rp674.715.761	99,83 Persen	Rp735.641.493	99,84 Persen	Rp792.979.817	99,85 Persen	Rp872.277.799	99,85 Persen	Rp3.701.752.263	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	96 Persen	Rp431.856.669	96,1 Persen	Rp461.006.962	96,2 Persen	Rp500.562.813	96,3 Persen	Rp538.619.094	96,4 Persen	Rp592.481.004	96,4 Persen	Rp2.524.526.543	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99 Persen	99,5 Persen	Rp376.741.530	99,6 Persen	Rp900.380.308	99,7 Persen	Rp441.413.428	99,8 Persen	Rp479.554.771	99,9 Persen	Rp520.910.248	99,9 Persen	Rp2.719.000.285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	99 Persen	100 Persen	Rp89.968.737	100 Persen	Rp98.965.611	100 Persen	Rp108.862.172	100 Persen	Rp119.748.389	100 Persen	Rp113.902.755	100 Persen	Rp531.447.664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT DAN DESA															
	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	n/a	82 Angka	824.075.615	83 Angka	865.278.871	84 Angka	908.542.814	85 Angka	953.969.955	86 Angka	1.001.668.453	86 Angka	4.553.535.708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan		100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	100 Persen	Rp3.458.543.215	100 Persen	Rp4.516.401.480	100 Persen	Rp4.222.310.172	100 Persen	Rp3.882.498.130	100 Persen	Rp4.294.388.138	100 Persen	Rp20.374.141.135	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp2.488.565.670	100 Persen	Rp4.063.753.649	100 Persen	Rp4.493.629.014	100 Persen	Rp4.971.991.915	100 Persen	Rp5.168.197.409	100 Persen	Rp21.186.137.657	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	n/a	16 Persen	Rp600.000.000	36 Persen	Rp650.000.000	56 Persen	Rp700.000.000	77 Persen	Rp750.000.000	100 Persen	Rp800.000.000	100 Persen	Rp3.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	25 Persen	33 Persen	Rp1.057.984.500	41,67 Persen	Rp1.300.092.000	50 Persen	Rp1.300.092.000	58,33 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp6.258.352.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp1.938.485.000	83 Angka	Rp1.250.000.000	83 Angka	Rp1.500.000.000	83 Angka	Rp1.650.000.000	83 Angka	Rp1.732.500.000	83 Angka	Rp8.070.985.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	1,67	1,66	Rp150.544.950	1,65	Rp150.000.000	1,64	Rp165.000.000	1,63	Rp181.500.000	1,62	Rp194.700.000	1,62	Rp841.744.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	n/a	77,2 Persen	Rp5.548.497.130	77,2 Persen	Rp2.344.401.250	77,2 Persen	Rp2.090.369.135	77,2 Persen	Rp2.704.599.135	77,2 Persen	Rp4.127.300.000	77,2 Persen	Rp16.815.166.650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	82,5 Persen	83 Persen	Rp970.477.780	84 Persen	Rp973.795.865	84,5 Persen	Rp973.795.865	85 Persen	Rp1.123.795.865	85,5 Persen	Rp1.750.076.000	85,5 Persen	Rp5.791.941.375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERHUBUNGAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,00 angka	80,50 Angka	Rp965.187.000	80,75 Angka	Rp965.187.000	81 Angka	Rp1.061.705.000	81,25 Angka	Rp1.167.875.000	81,50 Angka	Rp1.284.662.000	81,50 Angka	Rp5.444.616.000	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp3.390.000.000	100 Persen	Rp3.680.000.000	100 Persen	Rp2.010.000.000	100 Persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	30,43	Rp13.012.540.000	30,43	Rp9.220.389.000	30,43	Rp10.689.762.000	30,43	Rp12.312.443.000	30,43	Rp14.128.890.000	30,43	Rp59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	86 Angka	Rp1.938.603.598	87 Angka	Rp2.132.464.458	89 angka	Rp2.195.710.604	90 Angka	Rp2.415.281.266	92 Angka	Rp2.695.307.791	92 Angka	Rp11.377.367.717	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	50 Persen	70 Persen	Rp1.490.327.740	71 Persen	Rp1.639.360.514	72 Persen	Rp1.671.101.718	73 Persen	Rp1.698.953.412	74 Persen	Rp1.868.848.754	74 Persen	Rp8.368.592.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten														
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	n/a	1,29 Angka	Rp8.931.074.062	1.43 Angka	Rp9.824.181.468	1,57 Angka	Rp10.206.599.615	1,57 Angka	Rp10.592.259.576	1,58 Angka	Rp11.251.485.534	1,58 Angka	Rp50.805.600.255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,34 angka	81 Angka	Rp2.775.856.027	81.5 Angka	Rp3.217.891.625	82 Angka	Rp3.505.716.000	82,5 Angka	Rp3.682.832.000	83 Angka	Rp4.333.290.583	83 Angka	Rp17.515.586.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi	2,5 Persen	2,5 Persen	Rp24.835.120	2,5 Persen	28.000.000	2,5 Persen	29.500.000	2,5 Persen	31.000.000	2,5 Persen	32.000.000	2,5 Persen	Rp145.335.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten														PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	66,88 Persen	70,23 Persen	Rp121.110.120	73,58 Persen	Rp155.895.000	75,25 Persen	Rp159.543.000	76,92 Persen	Rp166.757.500	78,59 Persen	Rp194.992.000	78,59 Persen	Rp798.297.620	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	56,54 Persen	59,52 Persen	Rp26.835.120	63,99 Persen	47.500.000	65,48 Persen	50.000.000	66,96 Persen	52.500.000	68,45 Persen	55.000.000	68,45 Persen	Rp231.835.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	60 Persen	Rp554.286.350	60 Persen	Rp169.774.000	60 Persen	Rp175.938.500	60 Persen	Rp187.325.000	60 Persen	Rp221.936.000	60 Persen	Rp1.309.259.850	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	Rp108.497.240	5 Persen	Rp281.127.000	5 Persen	Rp296.384.000	5 Persen	Rp314.845.000	5 Persen	Rp372.966.000	5 Persen	Rp1.373.819.240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	Rp599.342.940	55 Persen	Rp530.997.000	60 Persen	Rp564.096.000	65 Persen	Rp612.759.000	70 Persen	Rp736.976.000	70 Persen	Rp3.044.170.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	Rp410.733.440	65 Persen	Rp358.033.000	70 Persen	Rp364.207.500	75 Persen	Rp379.917.000	80 Persen	Rp420.988.000	80 Persen	Rp1.933.878.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	85 Angka	Rp1.167.283.800	85 Angka	Rp1.009.881.000	85 Angka	Rp1.521.264.000	85 Angka	Rp1.625.315.000	85 Angka	Rp2.494.934.000	85 Angka	Rp7.818.677.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	n/a	100 Persen	Rp149.330.000	100 Persen	Rp233.500.000	100 Persen	Rp256.850.000	100 Persen	Rp282.535.000	100 Persen	Rp236.500.000	100 Persen	Rp1.158.715.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	7,85 Persen	8,30 Persen	278.587.500	11,29 Persen	340.038.000	12,79 Persen	406.688.000	15,29 Persen	480.003.000	17,79 Persen	473.038.000	17,79 Persen	Rp1.978.354.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	Rp604.839.580	100 Persen	Rp463.100.000	100 Persen	Rp399.410.000	100 Persen	Rp439.351.000	100 Persen	Rp417.610.000	100 Persen	Rp2.324.310.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	Rp379.462.000	100 Persen	Rp413.962.000	100 Persen	Rp422.712.000	100 Persen	Rp432.337.000	100 Persen	Rp430.237.000	100 Persen	Rp2.078.710.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan	100 Persen	100 Persen	Rp102.785.120	100 Persen	Rp96.800.000	100 Persen	Rp106.480.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp540.321.120	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PENANAMAN MODAL	Non Perijinan														TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	80 Persen	Rp1.445.340.480	81 Persen	Rp1.745.340.480	82 Persen	Rp1.995.340.480	83 Persen	Rp2.345.340.480	84 Persen	Rp4.845.340.480	84 Persen	Rp12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	55 Medali	Rp8.350.081.966	65 Medali	Rp8.650.081.966	80 Medali	Rp8.900.081.966	100 Medali	Rp9.250.081.966	130 Medali	Rp11.750.081.966	130 Medali	Rp46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	n/a	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Rp155.150.000	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp207.968.750	100 Persen	Rp228.765.625	100 Persen	Rp251.642.187	100 Persen	Rp1.014.191.562	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60 Persen	65 Persen	Rp1.184.565.600	70 Persen	Rp1.332.186.560	75 Persen	Rp1.374.185.313	80 Persen	Rp1.301.129.621	81 Persen	Rp2.508.509.884	81 Persen	Rp7.700.576.978	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22		URUSAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2		PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	80,98 Angka	Rp1.036.350.000	81 Angka	Rp1.093.102.000	81,3 Angka	Rp1.152.071.001	81,5 Angka	Rp1.213.332.240	81,6 Angka	Rp1.656.258.364	81,6 Angka	Rp6.151.113.605	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	54 Persen	61,03 Persen	1.425.000.000	68,38 Persen	3.936.386.000	75,74 Persen	6.862.053.999	83,08 Persen	5.733.225.960	90,44 Persen	6.077.448.556	90,44 Persen	Rp24.034.114.515	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Bahasa Sastra yang dilestarikan	n/a	18 Pelestarian	3.300.000.000	46 Pelestarian	6.879.050.000	76 Pelestarian	7.770.950.000	104 Pelestarian	7.177.450.500	132 Pelestarian	7.756.495.550	132 Pelestarian	Rp32.883.946.050	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	n/a	219 Pelestarian	10.125.000.000	454 Pelestarian	15.783.924.000	691 Pelestarian	16.251.193.000	953 Pelestarian	18.324.602.300	1215 Pelestarian	28.641.062.530	1215 Pelestarian	Rp89.125.781.830	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	80 Angka	Rp831.968.820	80 Angka	Rp850.000.000	80 Angka	Rp900.000.000	80 Angka	Rp950.000.000	80 Angka	Rp1.000.000.000	80 Angka	Rp4.531.968.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	7,61 Persen	10,08 Persen	Rp416.798.700	12,55 Persen	Rp527.804.000	14,02 Persen	Rp2.050.000.000	17,48 Persen	Rp600.000.000	19,95 Persen	Rp1.000.000.000	19,95 Persen	Rp4.594.602.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2 4	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	59 Persen	60 Persen	Rp215.832.480	61 Persen	Rp250.000.000	62 Persen	Rp300.000.000	63 Persen	Rp400.000.000	64 Persen	Rp700.000.000	64 Persen	Rp1.865.832.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				nasional)														
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 Persen	69 Persen	Rp19.236.000	70 Persen	Rp50.000.000	71 Persen	Rp1.133.865.000	72 Persen	Rp152.673.000	73 Persen	Rp167.080.000	73 Persen	Rp1.522.854.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp3.500.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	n/a	0	0	20 Persen	125.000.000	60 Persen	250.000.000	80 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	Rp625.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	Rp187.675.000	831 ton	Rp292.175.120,00	833 ton	Rp404.490.000,00	835 ton	Rp662.675.120,00	837 ton	Rp319.975.120,00	837 ton	Rp1.866.990.360	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	Rp1.459.882.000	12.805 ton	Rp1.474.817.880,00	12.878 ton	Rp3.610.882.000,00	12.959 ton	Rp1.613.413.880,00	13.046 ton	Rp2.133.888.880,00	13.046 ton	Rp10.292.884.640	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2	0	PROGRAM	Penurunan	5 Persen	5 Persen	Rp3.900.0	5	Rp3.900.000	5 Persen	Rp53.900.00	5 Persen	Rp53.900.	5	Rp79.900.	5 Persen	Rp195.500.0	DINAS

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	5	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	jumlah pelanggaran aturan			00	Persen	,00		0,00		000,00	Persen	000,00		00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2 Persen	Rp42.900.000	2 Persen	Rp162.900.000,00	2 Persen	Rp127.900.000,00	5 Persen	Rp156.900.000,00	5 Persen	Rp306.950.000,00	5 Persen	Rp797.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp4.278.552.000	80 Angka	Rp4.570.540.000	82 Angka	Rp4.872.137.000	83 Angka	Rp5.183.648.000	84 Angka	Rp6.765.820.000	84 Angka	Rp25.670.697.000	DINAS PARIWISATA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	32 Persen	33,33 Persen	Rp1.000.000.000	34,67 Persen	Rp2.379.500.000	36 Persen	Rp1.475.000.000	37,33 Persen	Rp1.525.000.000	38,67 Persen	Rp1.760.000.000	93 Persen	Rp8.139.500.000	DINAS PARIWISATA
1	0 3	1 3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	Rp0	100 Persen	Rp735.000.000	100 Persen	Rp0	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp1.635.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 Persen	Rp2.902.000.000	3,13 Persen	Rp5.402.000.000	3,13 Persen	Rp3.602.000.000	3,13 Persen	Rp8.902.000.000	3,13 Persen	Rp7.902.000.000	3,13 Persen	Rp28.710.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	n/a	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp4.834.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	n/a	2 CBT	Rp171.000.000	2 CBT	Rp549.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp499.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp1.317.000.000	DINAS PARIWISATA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			EKONOMI KREATIF	Kreatif														
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	Rp0	25 Persen	Rp522.000.000	35 Persen	Rp622.000.000	50 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp2.388.000.000	DINAS PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a		100 Persen	Rp2.833.025.000							100 Persen	Rp2.833.025.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp1.845.737.082	85 Angka	Rp2.576.729.802	85 Angka	Rp2.351.698.802	85 Angka	Rp2.230.167.802	85 Angka	Rp2.572.698.802	85 Angka	Rp11.577.032.290	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	100 Persen	Rp1.585.571.950	100 Persen	Rp2.746.076.470	100 Persen	Rp3.146.076.470	100 Persen	Rp3.446.076.470	100 Persen	Rp4.196.951.470	100 Persen	Rp15.120.752.830	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	Rp1.699.075.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp1.892.125.000,00	100 Persen	Rp6.357.575.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Penurunan kejadian dan	100 Persen	100 Persen	Rp1.941.072.488	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp2.814.455.368	100 Persen	Rp1.578.210.368	100 Persen	Rp8.962.648.960	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	jumlah kasus penyakit hewan menular														PERTANIAN
				Produksi Daging	15.326 Ton	15.456 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton		15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Rp70.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp2.375.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.700.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp32.000.000	100 Persen	Rp100.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	Rp792.243.360	6,315 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,32 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,325 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,33 ton/ha	Rp1.213.323.360	6,33 ton/ha	Rp5.090.536.800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	0 Persen	14 Persen	400.000.000	28 Persen	1.447.073.000	40 Persen	2.528.000.000	50 Persen	2.537.000.000	70 Persen	2.537.000.000	70 Persen	Rp9.449.073.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 Persen	51 Persen	Rp160.000.000	52 Persen	Rp168.000.000	53 Persen	Rp184.800.000	54 Persen	Rp194.040.000	55 Persen	Rp213.444.000	55 Persen	Rp920.284.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	1 Persen	2 Persen	Rp6.070.923.713	3 Persen	Rp7.294.730.000	4 Persen	Rp6.623.334.000	5 Persen	Rp6.923.334.000	6 Persen	Rp8.200.000.000	6 Persen	Rp35.112.321.713	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8 Persen	7 Persen	Rp179.957.500	7 Persen	Rp188.955.375	6 Persen	Rp207.850.900	6 Persen	Rp218.243.400	5 Persen	Rp242.000.000	5 Persen	Rp1.037.007.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	83 juta US$	80 juta US$	Rp654.020.000	90 juta US$	Rp686.721.000	100 juta US$	Rp755.393.100	110 juta US$	Rp873.162.700	120 juta US$	Rp1.200.000.000	500 juta US$	Rp4.169.296.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25 Persen	27 Persen	Rp349.223.100	30 Persen	Rp384.145.000	32 Persen	Rp422.559.500	35 Persen	Rp443.687.400	40 Persen	Rp488.056.200	40 Persen	Rp2.087.671.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	0 Persen	-	Rp0	10 Persen	Rp300.000.000	15 Persen	Rp500.000.000	20 Persen	Rp525.000.000	25 Persen	Rp600.000.000	25 Persen	Rp1.925.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	3 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	81,50%	85,97 Persen	Rp1.684.041.210	90,65 Persen	Rp2.702.391.000	95,32 Persen	Rp2.151.503.500	100 Persen	Rp2.305.827.000	100 Persen	Rp2.773.672.217	100 Persen	Rp11.617.434.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK														
3	3 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	100 Persen	Rp25.735.120	100 Persen	Rp44.500.000	100 Persen	Rp49.000.000	100 Persen	Rp52.000.000	100 Persen	Rp57.000.000	100 Persen	Rp228.235.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0 Persen	0 Persen	Rp0	0,22 Persen	Rp50.000.000	0,22 Persen	Rp62.000.000	0,22 Persen	Rp63.000.000	0,22 Persen	Rp65.000.000	0,22 Persen	Rp240.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	9,33 Persen	10,67 persen	Rp400.000.000	12 persen	Rp593.000.000	13,33 persen	Rp828.000.000	14,67 persen	Rp406.000.000	17,33 persen	Rp393.000.000	17,33 persen	Rp2.620.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3		URUSAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1		PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	3 2	0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	72 Persen	74 Persen	Rp575.000.000	80 Persen	Rp600.000.000	90 Persen	Rp625.000.000	100 Persen	Rp650.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	100 Persen	Rp3.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	0 1		SEKRETARIAT DAERAH															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	14.208.911.120	83 Angka	10.249.528.900	83 Angka	11.331.547.240	83 Angka	10.800.822.664	83 Angka	11.784.585.000	83 Angka	Rp58.375.394.924	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	92 Persen	92 Persen	Rp1.043.927.620	92 Persen	Rp1.151.371.000	92 Persen	Rp1.266.508.100,00	92 Persen	Rp1.393.158.910,00	92 Persen	Rp1.532.490.000,00	92 Persen	Rp6.387.455.630	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				(EKPPD)														
				Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	Rp442.575.000	100 Persen	Rp550.000.000	100 Persen	Rp580.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp620.000.000	100 Persen	Rp2.787.575.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp3.723.619.270	100 Persen	Rp4.857.000.000	100 Persen	Rp5.342.700.000	100 Persen	Rp5.876.970.000	100 Persen	Rp5.375.000.000	100 Persen	Rp25.175.289.270	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp239.850.000	100 Persen	Rp553.207.500	100 Persen	Rp666.046.500	100 Persen	Rp714.387.650	100 Persen	Rp780.000.000	100 Persen	Rp2.953.491.650	SEKRETARIAT DAERAH
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 Persen	80 Persen	Rp1.095.088.990	80 Persen	Rp2.169.305.600	80 Persen	Rp2.386.236.160	80 Persen	Rp2.624.859.776	80 Persen	Rp2.663.111.000	80 Persen	Rp10.938.601.526	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	0 Persen	87,5 Persen	261.050.000	88 Persen	261.050.000	88,5 Persen	261.050.000	89 Persen	261.050.000	89,5 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89.50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan	80.5 Persen	81 Persen	150.000.000	82 Persen	200.000.000	83 Persen	230.000.000	84 Persen	245.000.000	85 Persen	250.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				SATRIYA di PD Kabupaten Bantul														
4	02		SEKRETARIAT DEWAN															
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	84 Angka	Rp28.007.830.550	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp34.625.814.130	85 Angka	Rp37.263.395.543	85 Angka	Rp40.989.735.097	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	80 Persen	82 Persen	Rp14.943.253.450	84 Persen	Rp13.013.911.337	86 Persen	Rp11.035.494.870	88 Persen	Rp8.316.640.457	90 Persen	Rp9.980.250.903	90 Persen	Rp57.289.551.018	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85,5 Angka	Rp1.595.755.060	86 Angka	Rp1.675.542.813	86,5 Angka	Rp1.759.319.954	87 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp1.759.319.954	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	90 Persen	95 Persen	Rp330.502.000	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp506.413.800	100 Persen	Rp554.065.000	100 Persen	Rp601.315.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	100 Persen	Rp2.351.135.980	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp3.475.219.775	100 Persen	Rp4.348.590.929	100 Persen	Rp4.646.105.575	100 Persen	Rp17.938.226.189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase indikator sasaran Renstra	95 Persen	95 Persen		96 Persen		96 Persen		97 Persen		97 Persen		97 Persen		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi														
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	100 Persen	Rp1.572.022.220	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp8.339.577.877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
5	02		KEUANGAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,14 Angka	84,5 Angka	Rp684.327.504.740	85 Angka	Rp709.274.223.000	85 Angka	Rp716.438.030.000	85,5 Angka	Rp730.029.284.000	85,5 Angka	Rp737.972.504.000	85,5 Angka	Rp3.578.041.545.740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	80 Persen	Rp299.595.500	83 Persen	Rp500.000.000	85 Persen	Rp550.000.000	88 Persen	Rp605.000.000	90 Persen	Rp665.500.000	90 Persen	Rp2.620.095.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp342.169.016.830	Tepat Waktu	Rp324.547.097.500	Tepat Waktu	Rp325.811.451.000	Tepat Waktu	Rp318.197.011.000	Tepat Waktu	Rp323.284.972.890	Tepat Waktu	Rp1.634.009.549.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	87,84 Persen	89 Persen		89 Persen		90 Persen		90 Persen		91 Persen		91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	Rp1.262.739.710	100 Persen	Rp1.470.000.000	100 Persen	Rp1.542.000.000	100 Persen	Rp2.114.000.000	100 Persen	Rp1.692.000.000	100 Persen	Rp8.080.739.710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	Rp10.302.989.220	100 Persen	Rp12.193.391.500	100 Persen	Rp12.827.418.000	100 Persen	Rp13.430.197.000	100 Persen	Rp14.082.037.110	100 Persen	Rp62.836.032.830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	82,43 Angka	Rp98.789.110.760	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,55 Angka	Rp102.195.950.000	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	82,65 Angka	Rp105.113.512.700	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	7 Persen	20 Persen	Rp381.726.000	40 Persen	Rp741.084.500	60 Persen	Rp741.084.500	75 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pengisian	n/a	30 Persen	Rp8.953.282.240	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp6.377.996.500	32 Persen	Rp6.426.537.800	32 Persen	Rp6.527.537.800	32 Persen	Rp34.814.116.440	BADAN KEPEGAWAIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAERAH	kebutuhan formasi ASN														DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Peta Kompetensi ASN	n/a	6 Persen		9 Persen		12 Persen		15 Persen		18 Persen		18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	n/a	100 Persen	Rp230.343.740	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp1.221.973.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,93 angka	83 Angka	Rp2.141.908.600	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp3.695.858.239	83 Angka	Rp4.260.897.302	83 Angka	Rp5.176.587.857	83 Angka	Rp18.130.253.801	INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	0	0	0	38,89 Persen	219.857.000	44,44 Persen	241.842.700	50 Persen	266.026.970	55,56 Persen	292.629.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat	n/a	12 Persen	Rp194.072.500	13 Persen	Rp303.445.378	14 Persen	Rp449.410.881	15 Persen	Rp643.072.513	16 Persen	Rp1.003.533.390	16 Persen	Rp2.593.534.663	INSPEKTORAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah terhadap peraturan yang berlaku														
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 Persen	Rp1.293.514.900	25 Persen	Rp1.432.401.820	30 Persen	Rp1.710.576.180	35 Persen	Rp2.367.871.214	40 Persen	Rp2.701.817.752	40 Persen	Rp9.506.181.867	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN															-
7	01		KAPANEWON															-
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANTUL
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	90 Persen	Rp31.520.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp163.424.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100 Persen	Rp84.800.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp352.600.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa	n/a	100 Persen	Rp143.690.000	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp844.753.440	KAPANEWON BANTUL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN UMUM	n Pemerintahan Umum														
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	85 Angka	Rp537.101.000	85 Angka	Rp679.013.140	85 Angka	Rp916.883.140	85 Angka	Rp1.159.235.140	85 Angka	Rp1.719.035.140	85 Angka	Rp5.011.267.560	KAPANEWON BANTUL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,59 Angka	80 Angka	Rp556.197.000	81 Angka	Rp641.466.500	82 Angka	Rp795.269.000	83 Angka	Rp976.385.000	84 Angka	Rp1.225.508.000	84 Angka	Rp4.194.825.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	95 Angka	Rp41.187.500	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka	Rp81.000.000	95 Angka	Rp115.000.000	95 Angka	Rp174.500.000	95 Angka	Rp482.437.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90%	90 Persen	Rp125.436.000	91 Persen	Rp137.450.000	92 Persen	Rp168.000.000	93 Persen	Rp172.000.000	94 Persen	Rp255.000.000	94 Persen	Rp857.886.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100%	100 Persen	Rp91.653.500	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen	Rp131.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp270.000.000	100 Persen	Rp734.307.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Stabilitas	n/a	100 Persen	Rp5.000.000	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen	Rp21.000.000,00	100 Persen	Rp32.000.000,00	100 Persen	Rp63.000.000,00	100 Persen	Rp131.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPUR

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														O
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	80 Angka	Rp564.587.500	80 Angka	Rp681.232.000	80 Angka	Rp830.000.000	80 Angka	Rp992.239.000	80 Angka	Rp1.537.926.000	80 Angka	Rp4.605.984.500	KAPANEWON DLINGO
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON DLINGO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp31.995.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp90.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp145.000.000	100 Persen	Rp421.995.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	100 Persen	Rp138.447.500	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp210.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp1.003.447.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp104.587.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp694.587.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp10.980.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp38.710.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp139.690.000	KAPANEWON DLINGO
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	80 Angka	80 Angka	Rp586.98	81	Rp633.681.0	81 Angka	Rp728.092.0	82 Angka	Rp864.62	82	Rp1.370.7	100	Rp4.184.086	KAPANEWON

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			2.500	Angka	00		00		1.000	Angka	10.000	Persen	.500	IMOGIRI
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON IMOGIRI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	Rp37.200.000	96 Persen	Rp55.000.000	97 Persen	Rp80.000.000	98 Persen	Rp125.000.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp452.200.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	95 Persen	Rp188.122.500	96 Persen	Rp210.000.000	97 Persen	Rp280.000.000	98 Persen	Rp341.000.000	100 Persen	Rp390.000.000	100 Persen	Rp1.409.122.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	95 Persen	Rp49.750.000	96 Persen	Rp130.000.000	97 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp205.000.000	100 Persen	Rp724.750.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp18.600.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp93.000.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	0 Persen	Rp371.600.000	KAPANEWON IMOGIRI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp577.192.500	90 Angka	Rp663.568.500	90 Angka	Rp895.779.500	90 Angka	Rp1.152.411.500	90 Angka	Rp1.722.260.500	90 Angka	Rp5.011.212.500	KAPANEWON JETIS

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON JETIS
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON JETIS
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp25.475.000	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp138.225.000	KAPANEWON JETIS
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp130.585.000	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp775.651.000	KAPANEWON JETIS
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp119.087.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp651.137.500	KAPANEWON JETIS
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp15.000.000,00	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp36.000.000	KAPANEWON JETIS
7	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	80 Angka	Rp623.496.000	81 Angka	Rp520.847.000	81 Angka	Rp634.537.000	82 Angka	Rp840.830.000	82 Angka	Rp985.535.000	84 Angka	Rp3.605.245.000	KAPANEWON KRETEK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KRETEK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Keistimewaan yang Berkualitas														
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp56.700.000	90 Persen	Rp100.000.000	91 Persen	Rp104.000.000	91 Persen	Rp108.000.000	92 Persen	Rp250.000.000	94 Persen	Rp618.700.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp135.000.000	82 Persen	Rp173.000.000	83 Persen	Rp217.000.000	85 Persen	Rp229.000.000	87 Persen	Rp341.000.000	87 Persen	Rp1.095.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	87 Persen	Rp73.000.000	88 Persen	Rp135.000.000	89 Persen	Rp197.000.000	90 Persen	Rp206.000.000	92 Persen	Rp315.000.000	92 Persen	Rp926.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp4.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp16.000.000	100 Persen	Rp18.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON KRETEK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Persen	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp509.460.000	KAPANEWON KASIHAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KASIHAN
				Tingkat penerapan	n/a	85 Angka	Rp624.412.800	85 Angka	Rp705.586.439	85 Angka	Rp850.321.527	85 Angka	Rp953.380.527	85 Angka	Rp1.280.023.712	85 Angka	Rp4.413.725.005	KAPANEWON KASIHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp60.147.000	100 Persen	Rp61.681.100	100 Persen	Rp84.569.320	100 Persen	Rp144.569.320	100 Persen	Rp214.820.257	100 Persen	Rp565.786.997	KAPANEWON KASIHAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp98.440.367	90 Persen	Rp111.462.477	90 Persen	Rp134.306.972	90 Persen	Rp174.306.972	90 Persen	Rp254.966.087	90 Persen	Rp773.482.875	KAPANEWON KASIHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	90 Persen	Rp40.146.000	90 Persen	Rp35.679.800	90 Persen	Rp73.367.760	90 Persen	Rp103.367.760	90 Persen	Rp164.198.151	90 Persen	Rp416.759.471	KAPANEWON KASIHAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	90 Persen	Rp46.777.833	90 Persen	Rp89.301.184	90 Persen	Rp117.713.421	90 Persen	Rp147.713.421	90 Persen	Rp215.064.793	90 Persen	Rp616.570.652	KAPANEWON KASIHAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Persen	80 Angka	Rp503.750.000	81 Angka	Rp595.188.000	82 Angka	Rp807.961.000	83 Angka	Rp989.991.000	83 Angka	Rp1.474.032.000	83 Angka	Rp4.370.922.000	KAPANEWON PANDAK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PANDAK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten	n/a	0 Persen		82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PANDAK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Bantul														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	89 Persen	Rp32.650.000	90 Persen	Rp37.900.000	90 Persen	Rp46.250.000	90 Persen	Rp66.600.000	90 Persen	Rp81.500.000	90 Persen	Rp264.900.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	82 Persen	Rp179.895.000	84 Persen	Rp224.935.000	86 Persen	Rp238.110.000	88 Persen	Rp266.950.000	88 Persen	Rp303.500.000	88 Persen	Rp1.213.390.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 Persen	82 Persen	Rp94.850.000	84 Persen	Rp134.850.000	86 Persen	Rp134.850.000	88 Persen	Rp149.000.000	88 Persen	Rp184.850.000	88 Persen	Rp698.400.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp6.310.000	100 Persen	Rp8.400.000	100 Persen	Rp18.400.000	100 Persen	Rp22.500.000	100 Persen	Rp26.750.000	100 Persen	Rp82.360.000	KAPANEWON PANDAK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	95 Persen	Rp45.300.000	95 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PUNDONG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp399.541.000	90 Angka	Rp525.870.520	90 Angka	Rp728.127.745	90 Angka	Rp953.350.684	90 Angka	Rp1.479.373.976	90 Angka	Rp4.086.263.925	KAPANEWON PUNDONG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan penyelenggaran pemerintahan	100 Persen	90 Persen	Rp32.012.500	90 Persen	Rp29.974.875	90 Persen	Rp31.473.619	90 Persen	Rp33.047.299	90 Persen	Rp34.699.664	90 Persen	Rp161.207.957	KAPANEWON PUNDONG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PUBLIK	dan pelayanan publik														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 Persen	Rp210.794.000	80 persen	Rp215.638.605	80 persen	Rp226.420.535	80 persen	Rp237.741.712	80 persen	Rp249.628.640	80 persen	Rp1.140.223.492	KAPANEWON PUNDONG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp169.492.500	90 persen	Rp169.916.250	90 persen	Rp178.412.063	90 persen	Rp187.332.666	90 persen	Rp196.699.299	90 persen	Rp901.852.778	KAPANEWON PUNDONG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	90 persen	Rp4.790.000	100 Persen	Rp14.925.750	100 Persen	Rp25.672.038	100 Persen	Rp16.455.639	100 Persen	Rp17.278.421	100 Persen	Rp79.121.848	KAPANEWON PUNDONG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp549.024.000	80 Angka	Rp621.299.000	81 Angka	Rp770.338.000	81 Angka	Rp869.984.000	82 Angka	Rp1.424.155.000	82 Angka	Rp4.234.800.000	KAPANEWON PLERET
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PLERET
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PLERET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp38.992.500	90 Persen	Rp51.500.000	95 Persen	Rp72.000.000	95 Persen	Rp119.500.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp391.992.500	KAPANEWON PLERET
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100 Persen	90 Persen	Rp126.387.500	90 Persen	Rp151.000.000	95 Persen	Rp180.500.000	95 Persen	Rp232.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp929.887.500	KAPANEWON PLERET

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp115.475.000	90 Persen	Rp135.000.000	95 Persen	Rp160.000.000	95 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp190.000.000	100 Persen	Rp785.475.000	KAPANEWON PLERET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp55.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	100 Persen	Rp178.015.000	KAPANEWON PLERET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	82 Angka	Rp525.235.000	82 Angka	Rp614.882.000	82 Angka	Rp766.327.000	82 Angka	Rp955.906.000	82 Angka	Rp1.364.391.000	82 Angka	Rp4.226.741.000	KAPANEWON PIYUNGAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PIYUNGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	92 Persen	Rp42.072.500	92 Persen	Rp75.000.000	92 Persen	Rp115.000.000	92 Persen	Rp125.000.000	92 Persen	Rp165.000.000	92 Persen	Rp522.072.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp124.932.500	100 Persen	Rp136.400.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp177.950.000	100 Persen	Rp235.750.000	100 Persen	Rp830.032.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 Persen	100 Persen	Rp135.000.000	100 Persen	Rp150.000.000	100 Persen	Rp165.000.000	100 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp880.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp17.500.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp145.515.000	KAPANEWON PIYUNGAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PAJANGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,53 Angka	80 Angka	Rp626.138.500	81 Angka	Rp730.288.000	81 Angka	Rp806.700.000	82 Angka	Rp875.900.000	82 Angka	Rp1.114.100.000	82 Angka	Rp4.153.126.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	Rp36.387.500	89 Persen	Rp55.000.000	90 Persen	Rp95.464.000	91 Persen	Rp150.000.000	92 Persen	Rp255.500.000	92 Persen	Rp592.351.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	88 Persen	Rp74.797.000	89 Persen	Rp87.500.000	90 Persen	Rp125.000.000	91 Persen	Rp185.000.000	92 Persen	Rp281.211.000	92 Persen	Rp753.508.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	88 Persen	Rp10.210.000	89 Persen	Rp16.000.000	90 Persen	Rp73.000.000	91 Persen	Rp120.000.000	92 Persen	Rp194.000.000	92 Persen	Rp413.210.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	n/a	100 Persen	Rp97.249.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp130.000.000	100 Persen	Rp145.498.000	100 Persen	Rp200.000.000	100 Persen	Rp672.747.000	KAPANEWON PAJANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UMUM	Pemerintahan Umum														
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp55.797.500	91 Persen	Rp73.000.000	92 Persen	Rp74.000.000	93 Persen	Rp75.000.000	94 Persen	Rp76.000.000	94 Persen	Rp353.797.500	KAPANEWON SANDEN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp147.554.500	81 Persen	Rp166.207.600	82 Persen	Rp167.207.600	83 Persen	Rp168.207.600	84 Persen	Rp169.207.600	84	Rp818.384.900	KAPANEWON SANDEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp98.000.000	88 Persen	Rp111.000.000	89 Persen	Rp112.000.000	90 Persen	Rp113.000.000	91 Persen	Rp114.000.000	91 Persen	Rp548.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp13.000.000	100 Persen	Rp66.000.000	100 Persen	Rp67.000.000	100 Persen	Rp68.000.000	100 Persen	Rp69.000.000	100 Persen	Rp283.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	80 Angka	Rp505.086.000	81 Angka	Rp527.633.400	82 Angka	Rp754.492.400	83 Angka	Rp985.079.400	85 Angka	Rp1.523.654.400	85 Angka	Rp4.295.945.600	KAPANEWON SANDEN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	85 Angka	85 Angka	Rp481.662.000	86 Angka	Rp585.850.000	87 Angka	Rp798.206.000	88 Angka	Rp1.012.352.000	89 Angka	Rp1.530.821.000	89 Angka	Rp4.408.891.000	KAPANEWON SRANDAKAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SRANDAKAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp44.500.000	91 Persen	Rp46.750.000	92 Persen	Rp49.000.000	93 Persen	Rp51.500.000	94 Persen	Rp54.000.000	94 Persen	Rp245.750.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	95 Persen	Rp146.875.000	95 Persen	Rp155.000.000	96 Persen	Rp162.750.000	97 Persen	Rp171.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	98 Persen	Rp815.625.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	95 Persen	Rp132.125.000	95 Persen	Rp138.750.000	96 Persen	Rp145.000.000	97 Persen	Rp152.250.000	98 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp728.125.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp9.622.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.500.000	100 Persen	Rp11.000.000	100 Persen	Rp11.550.000	100 Persen	Rp52.672.000	KAPANEWON SRANDAKAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	96 Persen	Rp45.300.000	97 Persen	Rp66.040.000	98 Persen	Rp66.040.000	99 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEWON

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEWON
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp661.307.388	90 Angka	Rp677.434.308	90 Angka	Rp818.371.308	90 Angka	Rp958.371.308	90 Angka	Rp1.378.865.268	90 Angka	Rp4.494.349.580	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp58.215.000	90 Persen	Rp60.215.000,00	90 Persen	Rp60.215.000,00	90 Persen	Rp63.351.000,00	90 Persen	Rp63.351.000,00	90 Persen	Rp305.347.000	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp57.620.112	80 Persen	Rp60.535.000,00	80 Persen	Rp120.535.000,00	80 Persen	Rp210.535.000,00	80 Persen	Rp310.164.040,00	80 Persen	Rp759.389.152	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp88.357.500	100 Persen	Rp164.154.692,00	100 Persen	Rp194.154.692,00	100 Persen	Rp220.194.692,00	100 Persen	Rp276.154.692,00	100 Persen	Rp943.016.268	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp10.350.000	100 Persen	Rp76.390.000,00	100 Persen	Rp98.516.000,00	100 Persen	Rp98.516.000,00	100 Persen	Rp119.556.000,00	100 Persen	Rp403.328.000	KAPANEWON SEWON
04	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEDAYU
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEDAYU

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,23 angka	85 Angka	Rp598.889.000	85 Angka	Rp626.997.000	85 Angka	Rp856.620.000	85 Angka	Rp1.110.913.000	85 Angka	Rp1.675.020.000	85 Angka	Rp4.868.439.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp25.050.000	90 Persen	Rp40.900.000,00	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp188.650.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp65.400.000	100 Persen	Rp75.900.000,00	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp369.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp145.850.000	100 Persen	Rp49.500.000,00	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp343.850.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp6.000.000	100 Persen	Rp188.000.000,00	100 Persen	Rp198.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp768.000.000	KAPANEWON SEDAYU
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp 45.300.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp -	82 Persen	Rp 50.000.000	83 Persen	Rp 50.000.000	84 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	85 Angka	85 Angka	Rp 605.041.5	85 Angka	Rp 707.071.700	85 Angka	Rp 901.750.000	85 Angka	Rp 1.105.000	85 Angka	Rp 1.567.000.	85 Angka	Rp4.885.863.540	KAPANEWON BANGUNTAPAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			00						.000		000			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp 39.500.000	90 Persen	Rp 45.000.000	90 Persen	Rp 60.000.000	90 Persen	Rp 85.000.000	90 Persen	Rp 115.000.000	90 Persen	Rp344.500.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	90 Persen	Rp 114.962.500	90 Persen	Rp 124.962.500	90 Persen	Rp 144.962.500	90 Persen	Rp 163.434.500	90 Persen	Rp 214.484.500	90 Persen	Rp762.806.500	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp 129.225.000	90 Persen	Rp 147.241.800	90 Persen	Rp 167.241.800	90 Persen	Rp 177.241.800	90 Persen	Rp 225.650.000	90 Persen	Rp846.600.400	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp 10.600.000	100 Persen	Rp 11.750.000	100 Persen	Rp 14.501.700	100 Persen	Rp 16.255.700	100 Persen	Rp 20.366.500	100 Persen	Rp73.473.900	KAPANEWON BANGUNTAPAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp522.514.010	86 Angka	Rp808.737.010	87 Angka	Rp1.182.745.010	88 Angka	Rp800.000.000	89 Angka	Rp950.000.000	100 Angka	Rp4.263.996.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	95 Persen	95 Persen	Rp341.009.000	100 Persen	Rp391.000.000	100 Persen	Rp416.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp1.998.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	37,33 Persen	57,33 Persen	Rp2.229.678.400	84 Persen	Rp2.849.967.990	100 Persen	Rp33.599.967.990	100 Persen	Rp2.400.000.000	100 Persen	Rp2.500.000.000	100 Persen	Rp43.579.614.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	10,36 Persen	18 Persen	Rp61.000.000	23 Persen	Rp126.000.000	28 Persen	Rp226.000.000	33 Persen	Rp125.000.000	37 Persen	Rp168.049.000	95 Persen	Rp706.049.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	100 Persen	Rp360.293.590	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp1.960.293.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	Rp222.267.000	100 Persen	Rp447.267.000	100 Persen	Rp547.267.000	100 Persen	Rp409.446.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp2.076.247.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	n/a	-	0	35 Persen	417.000.000	50 Persen	575.000.000	66,67 Persen	645.000.000	100 Persen	740.000.000	100 Persen	Rp2.377.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Rp2.141.090.935.000		Rp2.393.621.289.000		Rp2.335.645.090.000		Rp2.369.372.795.000		Rp2.433.607.603.000			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja makro daerah, indikator kinerja utama daerah (sasaran daerah) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah).

Indikator kinerja makro bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro Kabupaten Bantul tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44
2	Tingkat Kemiskinan	%	13.50	13.50	13.37	12.9	12.5	12.05	11.5	11.5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.90	3.50	3.40	3.30	3.20	3.20
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.80	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12
5	Rasio Gini	Angka	0.381	0.37	0.36	0.35	0.325	0.32	0.31	0.31

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	IKU PEMDA
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA
3	Nilai Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3.24	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45	3.45	IKU PEMDA
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.03	88.03	88.10	88.40	88.80	89.10	89.50	89.50	IKU PEMDA
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	73.90	74.01	74.11	74.20	74.29	74.39	74.39	IKU PEMDA
7	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	IKU PEMDA
8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	IKU PEMDA
9	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PEMDA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	IKU PEMDA
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.90	3.50	3.40	3.30	3.20	3.20	IKU PEMDA
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100	IKU PEMDA
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,4	77,74	79,08	79,08	IKU PEMDA
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75.01	80	75.03	75.05	75.07	75.10	75.20	75.20	IKU PEMDA
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63.02	63.01	62.75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKU PEMDA
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IKU PEMDA
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668	IKU PEMDA
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.78	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96	IKU PEMDA
19	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	IKU BUPATI

Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:.

Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44	TUJUAN	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73.9	74.01	74.11	74.2	74.29	74.39	74.39	IKU PEMDA	DINAS KESEHATAN
	Net Death Rate (NDR)	permil	21.7	21.7	21.5	21	20.5	20	19.5	19.5	IKU PD	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88.7	80.7	72.6	64.5	56.5	56.5	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6.93	8	7.7	7.3	6.9	6.5	6.3	6.3	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2.8	2.75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1.75	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	125	120	115	110	105	105	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Prevalensi stunting	Persen	9.74	9	9	8,5	8	7,5	7	7	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	93,91	93,91	94	94,22	94,25	94,26	94,3	94,3	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,88	94,88	95	95,22	95,25	95,26	95,3	95,3	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,35	98,35	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara	Persen	13,57	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	IKU PD	DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	-83,3	33	33	33,5	34	34,5	35	35,5	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	90	90	85	85,5	86	86,5	87	87	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	n/a	n/a	10	18	23	25	30	30	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,42	3,42	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.46	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	IKU PEMDA	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	9	12	15	18	21	24	27	27	IKU PD	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,7	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	TUJUAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU PEMDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Presentase Pemilih yang berpartisipasi.	Persen	80,32	75	75	77	77	78	78	78	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.8	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12	TUJUAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	IKU PEMDA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PERDAGANGAN
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91.4	91.4	90.4	90.8	91	91.2	91.2	91.2	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0.712	0.712	0.714	0.714	0.714	0.714	0.714	0.714	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	1.59	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.65	IKU PD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.348.313	1,870,000	2,057,000	2,262,700	2,488,970	2,737,867	3,011,654	3,011,654	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,56	1	1,25	1,5	1,75	2	2,1	2,1	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	675.000	708.750	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565	904.565	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40	2.038,40	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	n/a	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1594,75	1684,64	1824,47	2030,54	2290,35	2640,66	3110,56	3110,56	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.9	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	IKU PEMDA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	5000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	IKU PD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	NA	NA	80	90	100	100	100	100	IKU PEMDA	DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	n/a	14	16	18	18	18	18	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	n/a	0.2	0.31	0.41	0.56	0.84	0.97	0.97	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pertumbuhan industri	persen	1.8	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.3	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	65	70	70	70	70	70	70	70	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Tingkat Kemiskinan	persen	13,5	13,5	13.37	12,9	12,5	12,05	11,5	11,5	TUJUAN	DINAS SOSIAL
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	orang	72.101	71.101	71.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668	IKU PEMDA	DINAS SOSIAL
	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	DINAS SOSIAL
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12*	95.18	95.5	96	96.5	96.75	96.9	96.9	TUJUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	NA	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2.56	2.54	2.5	2.45	2.4	2.35	2.3	2.3	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II	Aspek Pelayanan Umum											
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	n/a	66 Persen	70 Persen	75 Persen	79 Persen	83 Persen	83 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	n/a	3,88 Persen	4,18 Persen	4,48 Persen	4,78 Persen	5,07 Persen	5,37 Persen	5,37 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,38 angka	85 angka	83 Angka	83,5 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50 Persen	77,50 Persen	80 Persen	80,50 Persen	81 Persen	82,50 Persen	82 Persen	82 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29 Persen	57,29 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73 Persen	73 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69 hari	2,69 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29 kali	46,29 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS KESEHATAN
	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		UPTD JAMKESDA
	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		UPTD LABKESDA
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	83,92 angka	83.95 angka	84 angka	84,15 angka	84,30 angka	84,40 angka	84,50 angka	84,50 angka		27 PUSKESMAS
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		27 PUSKESMAS
	Indeks kapasitas Sumberdaya	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Manusia Kesehatan											KESEHATAN
	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36 Kalurahan	36 Kalurahan	40 Kalurahan	45 Kalurahan	50 Kalurahan	55 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan		DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	18,5 Persen	25,93 Persen	33 Persen	40 Persen	48 Persen	55 Persen	62 Persen	62,9 Persen		DINAS KESEHATAN
	Indeks capaian SPM	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		27 PUSKESMAS
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Persen	75,42	75,42 Persen	75,83 Persen	76,24 Persen	76,65 Persen	77,06 Persen	77,47 Persen	77,47 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	80,62 Persen	81,03 Persen	81,44 Persen	81,85 Persen	82,26 Persen	82,67 Persen	82,67 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	10 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34 Persen	71,34 Persen	72,84 Persen	74,34 Persen	75,84 Persen	77,34 Persen	78,84 Persen	78,84 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	n/a	0	65 Persen	25 Persen	10 Persen	0	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93 Persen	29,93 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82,06 Persen	81,5 Persen	82,4 Persen	83,3 Persen	84,2 Persen	85,1 Persen	86 Persen	86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36 Persen	82,36 Persen	83,56 Persen	84,38 Persen	85,19 Persen	85,98 Persen	86,76 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83 Persen	84,83 Persen	87,86 Persen	89,89 Persen	91,92 Persen	93,95 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	n/a	3,97 Persen	4,6 Persen	5,23 Persen	5,86 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70,1 Persen	70,2 Persen	70,3 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	82,99 Persen	82,99 Persen	10,59 Persen	21,18 Persen	31,77 Persen	42,36 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75 Persen	98,75 Persen	99,18 Persen	99,39 Persen	99,6 Persen	99,8 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen		27,22 Persen	29,37 Persen	45,44 Persen	66,88 Persen	88,31 Persen	100 Persen	100 Persen		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANG

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	dan evakuasi korban bencana											AN BENCANA DAERAH
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	n/a	n/a	n/a	45 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	65 Persen		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PPKS	Persen	55 Persen	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80 Persen	80 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70 Persen	70 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50 persen	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	99 Persen	57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS SOSIAL
	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	17,5 Persen	18,5 Persen	18,5 Persen	19,5 Persen	20,5 Persen	21,5 Persen	22,5 Persen	22,5 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	52 Persen	54 Persen	54 Persen	56 Persen	58 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Persen	32 Persen	35 Persen	54 Persen	36 Persen	37 Persen	38 Persen	39 Persen	39 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	peserta BPJS Ketenagakerjaan).											
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Capaian Desa Prima	Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Unit	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	5 unit		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	5 Kalurahan		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												KALURAHAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka		DINAS PERHUBUNGAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten											
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Angka	n/a	n/a	1,29 Angka	1.43 Angka	1,57 Angka	1,57 Angka	1,58 Angka	1,58 Angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67.55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase usaha simpan pinjam	Persen	60.12 Persen	56,54 Persen	59,52	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96	68,45 Persen	68,45 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				Persen			Persen				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Aplikasi SIM dalam	Persen	n/a	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Layanan Perijinan dan Non Perijinan				Persen			Persen				PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Jumlah prestasi Olahraga	medali	50 medali	n/a	55 medali	65 medali	80 medali	100 medali	130 medali	130 medali		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	n/a	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	Persentase perputakaan yang terakreditasi	Persen	4,94 Persen	7,61 Persen	10,08 Persen	12,55 Persen	14,02 Persen	17,48 Persen	19,95 Persen	19,95 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	93 Persen		DINAS PARIWISATA
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	15,19 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	10 Persen		DINAS PARIWISATA
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	-											
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	PERDAGANGAN											
	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai ekspor	juta US$	122 juta US$	83 juta US$	80 juta US$	90 juta US$	100 juta US$	110 juta US$	120 juta US$	500 juta US$		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Cakupan promosi penggunaan dan	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemasaran dalam negeri											KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0.20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	2,67 persen	2,67 persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	0 Pesen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	SEKRETARIAT DAERAH											
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka		SEKRETARIAT

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Instansi Pemerintah (AKIP)											DAERAH
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89.50 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80.5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DEWAN											
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	PERENCANAAN											
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen		BADAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi											PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	KEUANGAN											
	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN ASET DAERAH
3	KEPEGAWAIAN											
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	INSPEKTORAT DAERAH											
	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen		0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen		n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen		n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
G	UNSUR KEWILAYAHAN											
	KAPANEWON											
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANTUL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Kabupaten Bantul											
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	98 Persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
2	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
3	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
4	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON IMOGIRI

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
5	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
6	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	94 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
7	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON KASIHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	n/a	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen		KAPANEWON KASIHAN
8	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK
9	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
10	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Umum											
11	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
12	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
13	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
14	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
15	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
16	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
17	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan penyelenggaran	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemerintahan dan pelayanan publik											BANGUNTAPAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	41,67 Persen	66,67 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
III	Aspek Daya Saing											
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)	TUJUAN	Semua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4	IKU PEMDA	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	memiliki nilai IKM minimal B											DAERAH
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	90	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	IKU PD	SEKRETARIAT DPRD
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	IKU PD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	21.69	17	21.69	22.19	22.69	23.19	23.69	23.69	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Nilai Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK,	persen	91.5	91.5	81	82	83	84	85	85	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten											
	Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.24	3.24	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45	3.45	IKU PEMDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.03	80	83.75	84	84.25	84.5	84.75	84.75	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	n/a	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	7.8	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.7	2.7	2.7	2.75	2.8	2.9	3	3	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.03	88.03	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5	89.5	IKU PEMDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87.89	80.5	85.25	85.5	85.75	86	86.25	86.25	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	n/a	3	4	6	8	10	12	12	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	IKM Kapanewon	angka	95.5	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANTUL
	IKM Kapanewon	angka	95.73	95	95	95	95	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	IKM Kapanewon	angka	95.54	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON DLINGO
	IKM Kapanewon	angka	91.11	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON IMOGIRI
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON JETIS
	IKM Kapanewon	angka	92	92	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON KRETEK
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON KASIHAN
	IKM Kapanewon	angka	92.27	92.45	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PANDAK
	IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PUNDONG
	IKM Kapanewon	angka	95.82	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON PLERET
	IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON PIYUNGAN
	IKM Kapanewon	angka	95.78	90	94	94.5	95	95.5	96	96	IKU PD	KAPANEWON PAJANGAN
	IKM Kapanewon	angka	98.48	100	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON SANDEN
	IKM Kapanewon	angka	92.58	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SRANDAKAN
	IKM Kapanewon	angka	90.99	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SEWON
	IKM Kapanewon	angka	95.61	95	91	92	93	94	95	95	IKU PD	KAPANEWON SEDAYU
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61	TUJUAN	DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	IKU PEMDA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	78.02	78.02	78.43	78.84	79.25	79.66	80.07	80.07	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	IKU PD	DINAS PERHUBUNGAN
	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,01	80	75,03	75,05	75,07	75,1	75,2	75,2	IKU PEMDA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72	72,5	73	73,5	74	74	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	63,01	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKU PEMDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,8	56	40	40,5	41	41,5	42	42	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	85,18	90	87	87,5	88	88,5	89	89	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	54,82	61,2	57	59	61	63	65	65	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IKU PEMDA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan pencapaian visi jangka panjang, yaitu "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" akan dapat terwujud pula.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi didasarkan dari pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD setiap tahun.
3) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul akan menyusun RKPD Tahun 2027 pada tahun 2026, yang merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam hal pada tahun 2026 RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bantul pada periode berkenaan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang berlokasi di Bantul, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diterbitkan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

CASCADING

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN**						**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**76,43 (BB)**	**78,00 (BB)**	**80,00 (BB)**	**82,00 (BB)**	**82,5 (BB)**	**83,25 (BB)**	**83,75 (BB)**	**83,75 (BB)**	**Hasil penilaian KemenPAN RB atas laporan kinerja Pemerintah Daerah**	**Semua Perangkat Daerah**	**KEMENPAN RB**
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Hasil penilaian Kemendagri atas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	KEMENDAGRI
				Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	Nilai AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
					Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama dikali 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pengaturan tata laksana perangkat daerah			Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi jumlah perangkat daerah yang dinilai x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah kebijakan yang dihasilkan per tahun x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	90	90	90	Jumlah tingkat capaian seluruh program Setda dibagi jumlah program Setda	SEKRETARIAT DAERAH	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
								Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dibagi Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
								Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disediakan dibagi jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang harus disediakan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan Perekonomian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan x 100%	SEKREATRIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	
								Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Nilai realisasi pengadaan dengan metode tender dibagi nilai rencana pengadaan dengan metode tender x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan dibagi Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89.50 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80.5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan budaya pemerintahan SATRIYA dibagi jumlah perangkat daerah x 100^	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
				Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD		Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	(Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100%	SEKRETARIAT DPRD	
				Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Kesesuaian sasaran daerah, indikator sasaran daerah, program, indikator program dan target program	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah			Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	Jumlah rata-rata capaian sasaran daerah dibagi jumlah sasaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah															
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% Dokumen perencanaan sesuai tahapan : 4 dok Dokumen Pengendalian sesuai tahapan : 6 dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanatkan peraturan Mendagri x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya profesionalisme ASN		Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BKN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pengawas) dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	Jumlah tambahan formasi yang disetujui Menpan dibagi jumlah kekurangan kebutuhan formasi dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
								Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen	Jumlah aparatur yang sudah dinilai potensinya dibagi jumlah total ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
								Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
				Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah Peningkatan inovasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan		Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan tata kelola kearsipan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar		Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen	T = (a + i + s + j) / 4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen	T = (m + b + g + a + c + i) / 6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BPK
				Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah		Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
								Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
								Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	(Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
					Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	21,69	17	21,69	22,19	22,69	23,19	23,69	23,69	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	Hasil Monitoring dari 8 area intervensi yang dilakukan KPK	INSPEKTORAT DAERAH	KPK
				Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Transparansi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	91,5	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dibagi seluruh LHP BPK dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
					Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen	PD pelaksana Danais yang berkualitas dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen	Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	PD yang menerapkan Manajemen Resiko dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEMENPAN RB
				Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika		Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.03	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi															
							PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pengamanan informasi	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai		Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	n/a	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						Pengembangan aplikasi dan statistik		Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Angka	n/a	n/a	1,29 Angka	1.43 Angka	1,57 Angka	1,57 Angka	1,58 Angka	1,58 Angka	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON	BAGIAN ORGANISASI
				Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu		IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87,89	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25	Nilai SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Peningkatan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan		Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	Jumlah Persentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPEI, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
								Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	n/a	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah PD yang menggunakan hak akses	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen	Jumlah Data Anomali/ganda/ jumlah data adminduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah buku profil yang disebarkan / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,5	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bantul	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANTUL	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	98 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BANTUL	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANTUL	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,73	95	95	95	95	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bambanglipuro	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,54	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Dlingo	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON DLINGO	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON DLINGO	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	91,11	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Imogiri	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON IMOGIRI	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON IMOGIRI	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Jetis	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON JETIS	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON JETIS	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92	92	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kretek	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KRETEK	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KRETEK	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kasihan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KASIHAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KASIHAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,27	92,45	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pandak	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PANDAK	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PANDAK	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pundong	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PUNDONG	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PUNDONG	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,82	90	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pleret	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PLERET	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PLERET	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PLERET	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Piyungan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PIYUNGAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PIYUNGAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,78	90	94	94,5	95	95,5	96	96	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pajangan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PAJANGAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PAJANGAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	98,48	100	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sanden	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SANDEN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SANDEN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,58	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SRANDAKAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SRANDAKAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90,99	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sewon	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEWON	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SEWON	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEWON	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,61	95	91	92	93	94	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sedayu	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEDAYU	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEDAYU	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Banguntapan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
2	**Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**	**Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya**						**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**80,01**	**80,02**	**80,63**	**81,09**	**81,54**	**81,99**	**82,44**	**82,44**	**IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata- rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak**	**DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi					Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39	74,39	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS	BPS BANTUL
				Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Menurunnya angka kematian		Net Death Rate (NDR)	permil	21,7	21,7	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5	Angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit setiap 1000 pasien keluar.	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	82,38 angka	85 angka	83 Angka	83,5 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50 Persen	77,50 Persen	80 Persen	80,50 Persen	81 Persen	81,50 Persen	82 Persen	82 Persen	Indikator SPM rumah sakit yang tercapai dibagi seluruh indikator SPM rumah sakit x 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29 Persen	57,29 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73 Persen	73 Persen	Jumlah hari perawatan dibagi (jumlah tempat tidur dikali 365 hari) dikali 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69 hari	2,69 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	((Jumlah tempat tidur x 365 hari)-Jumlah Pasien yang Keluar)dibagi Jumlah Pasien yang Keluar	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29 kali	46,29 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) dibagi Jumlah Tempat Tidur	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
				Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup x100.000	DINAS KESEHATAN	
				Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan			Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,93	8	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3	AKB =Jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi jumlah lahir hidup kali 1000	DINAS KESEHATAN	
								Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2,8	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75	CFR Covid 19 = Jumlah kematian karena covid 19 dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita covid 19 dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP ditambah Indeks Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan perhitungan : (50% x capaian indeks fasilitas pelayanan kesehatan) + (50% x capaian indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP)	DINAS KESEHATAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang di hitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) + (20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga) + (20% x Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)) +(20% x Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan) + (20% x Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga)	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pendampingan pembiayaan kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pendampingan pembiayaan kesehatan dikali 100%	UPTD JAMKESDA	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pelayanan laboratorium kesehatan dikali 100%	UPTD LABKESDA	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	angka	83,92 angka	83.95 angka	84 angka	84,15 angka	84,30 angka	84,40 angka	84,50 angka	84,50 angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	27 PUSKESMAS	
								Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dibagi (5 layanan UKM dan 4 Layanan UKM) dikali 100%	27 PUSKESMAS	
				Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat		Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	125	120	115	110	105	105	Insiden Rate DBD = Jumlah orang yang sakit DBD dalam1 tahun dibagi jumlah penduduk x 100.000	DINAS KESEHATAN	
					Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan			Prevalensi stunting	Persen	9,74	9	9	8,5	8	7,5	7	7	Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek dibagi total jumlah balita dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : (50% x Persentase pemenuhan SDMK) + (50% x Persentase SDMK memiliki STR)	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36 Kalurahan	36 Kalurahan	40 Kalurahan	45 Kalurahan	50 Kalurahan	55 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan	Desa Siaga Purnama Mandiri	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	18,5 Persen	25,93 Persen	33 Persen	40 Persen	48 Persen	55 Persen	62 Persen	62,9 Persen	Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehata Tradisional (Yankestrad) terintegrasi / seluruh Puskesmas * 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9% x capaian pelayanan kesehatan bayi sesuai standar) + (8 % x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15 -59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun ke atas mendapatkan skriing kesehatan sesuai standar) + (8% capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar) + (8% penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8% x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang endapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)	27 PUSKESMAS	
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^{n} (E^t_i / P^t_i)$ Keterangan: - HLS^t_a = harapan lama sekolah pada umur a di tahun t. - E^t_i = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t. - P^t_i = penduduk usia i pada tahun t. - i = usia (a, a+1, ..., n). - FK = faktor koreksi pesantren (jumlah santri sekolah dan mukim dibagi jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1). - Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah. - Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BPS BANTUL
				Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	93,91	93,91	94	94,22	94,25	94,26	94,3	94,3	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,88	94,88	95	95,22	95,25	95,26	95,3	95,3	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,35	98,35	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	13,57	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	n/a	66 Persen	70 Persen	75 Persen	79 Persen	83 Persen	83 Persen	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) dikali 100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	n/a	3,88 Persen	4,18 Persen	4,48 Persen	4,78 Persen	5,07 Persen	5,37 Persen	5,37 Persen	Jumlah sekolah berbasis budaya dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dikalikan 100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka		Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	-83,3	33	33	33,5	34	34,5	35	35,5	Jumlah pemustaka yg berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	90	90	85	85,5	86	86,5	87	87	Nilai SKM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	4,94 Persen	7,61 Persen	10,08 Persen	12,55 Persen	14,02 Persen	17,48 Persen	19,95 Persen	19,95 Persen	Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Meningkatkan prestasi olahraga	Fasilitasi minat dan bakat generasi muda Pembangunan sarana prasarana olah raga Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	Meningkatnya prestasi olahraga		Peningkatan prestasi olahraga	Persen	n/a	n/a	10	18	23	25	30	30	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	medali	50 medali	n/a	55 medali	65 medali	80 medali	100 medali	130 medali	130 medali	Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				Meningkatkan kualitas pemuda	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan Peningkatan kapasitas kepemudaan Peningkatan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,42	3,42	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	n/a	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	Jumlah Organisasi Pramuka yang aktif	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah					Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah Desa/Kalurahan yang memiliki 4 pedikat sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa *Preneur* dan Desa Prima)	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah		Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	9	12	15	18	21	24	27	27	Jumlah Desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda yang Terdata dikali 100%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
								Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
								Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya						Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,70	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	Survey masyarakat oleh lembaga independen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LEMBAGA INDEPENDEN
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis					Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan penegakan perda Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat		Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	70 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan) / (Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	n/a	27,22 Persen	29,37 Persen	45,44 Persen	66,88 Persen	88,31 Persen	100 Persen	100 Persen	Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan dikali 100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan		Presentase Pemilih yang berpartisipasi.	Persen	80,32	75	75	77	77	78	78	78	jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan /jumlah sekolahx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen	Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	FKUB Aktif /FKUB se Kab. Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dibagi permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dikali 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	41,67 Persen	66,67 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lokasi yang direkondisi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	**Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**	**Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas**						**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**-1,66**	**3,12**	**3,8**	**3,97**	**4,48**	**4,83**	**5,12**	**5,12**	**Pertumbuhan PDRB** **PDRB(t+1) – PDRB(t) x 100%** **PDRB(t)** **Dimana:** **t+1= tahun pengamatan PDRB** **t= tahun pengamatan PDRB sebelumnya**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,** **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** **DINAS PARIWISATA** **DINAS KUKMP PERDAGANGAN**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Rasio Gini	Angka	0,381	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	G = 1- á Pi (Qi + Qi-1) dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3= ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5= ketimpangan tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN	BPS BANTUL
				Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,4	91,4	90,4	90,8	91	91,2	91,2	91,2	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen	Desa Mandiri Pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100% Jumlah Lumbung Tahun 2020 = 7 Unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen	(Jumlah cadangan pangan) / (Jumlah kebutuhan pangan)*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	17,33 Persen	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100% Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Tahun 2020 = 18 Kalurahan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	Meningkatnya produksi pertanian		Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0,712	0,712	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan dibagi jumlah prasarana pertanian yang tersedia dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah bibit ternak yang diberikan fasilitas perlindungan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t)–jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) / (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton	Jumlah daging sapi. Kambing, itik dan ayam	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan Peningkaan nilai tambah perikanan Peningkatan pengawasan dan pengendalain	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat		Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1.59	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun dasar dikalikan 100 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	Jumlah Produksi perikanan tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun kemarin dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikalikan 100 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total pJumlah produksi olahan ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100 %roduksi dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.348.313	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.654	3.011.654	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n	DINAS PARIWISATA	
					Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,56	1	1,25	1,50	1,75	2,00	2,10	2,10	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	DINAS PARIWISATA	
					Peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata			Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	675.000	708.750	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565	904.565	Rata -rata belanja wisatawan saat berkunjung	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	93 Persen	Desa wisata yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	15,19 Persen	Peningkatan pembangunan atau rehabilitasi 3 sarana prasarana di destinasi baru	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	10 Persen	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali seratus persen	DINAS PARIWISATA	
				Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar tradisional	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40	2.038,40	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data BPS)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen	Desa Preneur yang dipromosikan/dipasarkan dibagi seluruh Desa Preneur yang ditetapkan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen	(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan - omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) / (omzet pedagang di lokasi pasar 't'sebelum dilakukan pengembangan) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	122 juta US$	83 juta US$	80 juta US$	90 juta US$	100 juta US$	110 juta US$	120 juta US$	500 juta US$	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	(Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan) / (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	n/a	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Koperasi yang berkualitas = Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67.55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koeprasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60.12 Persen	56,54 Persen	59,52 Persen	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96 Persen	68,45 Persen	68,45 Persen	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya nilai investasi		Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1.594,75	1.684,64	1.824,47	2.030,54	2.290,35	2.640,66	3.110,56	3.110,56	Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen	((Jumlah investasi thn n – Jumlah investasi tahun-1) di kabupaten) / (Jumlah investasi di tahun n - 1 di Kabupaten)*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja x100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BPS BANTUL
				Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	Meningkatknya serapan tenaga kerja		Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	5000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	Jumlah tenaga kerja yang terserap	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	17,5 Persen	18,5 Persen	18,5 Persen	19,5 Persen	20,5 Persen	21,5 Persen	22,5 Persen	22,5 Persen	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi) / (Jumlah tenaga kerja keseluruhan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	52 Persen	54 Persen	54 Persen	56 Persen	58 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen	(Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan) / (Jumlah pencaker yang terdaftar)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	32 Persen	35 Persen	54 Persen	36 Persen	37 Persen	38 Persen	39 Persen	39 Persen	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak) / (Jumlah Perusahaan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	0 Persen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri		Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	25	27	33	43	53	63	73	73	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan Sasaran Penataan Kalurahan, dibagi jumlah seluruh Kalurahan , dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar kalurahan dibagi Pelaksanaaan Kerjasama Antar Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dengan baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan, dikali 100 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi Jumlah LPM dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan yang dilakukan inventarisasi tanah kalurahan dibagi seluruhkalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	Kalurahan yang melaksanakan urusan keistimewaan kelembagan berdasarkan Peraturan bupati Kewenangan Kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)	DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	*Indonesia Creative Cities Network* (ICCN) atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia
				Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif		Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	n/a	14	16	18	18	18	18	Capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	Peningkatan desa wisata yang sudah mandiri (CBT = Community Based Tourism)	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen	Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI	DINAS PARIWISATA	
				Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil	Meningkatnya kualitas UMKM		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	65	70	70	70	70	70	70	70	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen	Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan	Meningkatnya pertumbuhan industri		Pertumbuhan industri	Persen	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif			Pertumbuhan industri kreatif	Persen	n/a	0,2	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97	0,97	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0.20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecol menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	10,67 persen	12 persen	13,33 persen	14,67 persen	17,33 persen	17,33 persen	Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	**Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana**	**Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan**						**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**Indeks**	**n/a**	**n/a**	**66,12**	**67,26**	**67,88**	**69,50**	**70,61**	**70,61**	**(indeks kualitas infrastruktur+ kesesuaian pemanfaatan ruang + IKLH + IRB yang setarakan dalam persen) dibagi 4**	**DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik					Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	(40% x tingkat kemantaban jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78,02	78,02	78,43	78,84	79,25	79,66	80,07	80,07	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)+(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Persen	75,42	75,42 Persen	75,83 Persen	76,24 Persen	76,65 Persen	77,06 Persen	77,47 Persen	77,47 Persen	(Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	80,62 Persen	81,03 Persen	81,44 Persen	81,85 Persen	82,26 Persen	82,67 Persen	82,67 Persen	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (/ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	10 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34 Persen	71,34 Persen	72,84 Persen	74,34 Persen	75,84 Persen	77,34 Persen	78,84 Persen	78,84 Persen	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisi) / (Jumlah tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah Kabupaten)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	n/a	0	65 Persen	25 Persen	10 Persen	0	100 Persen	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	(Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting) / (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93 Persen	29,93 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	(Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha))*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
								Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82,06 Persen	81,5 Persen	82,4 Persen	83,3 Persen	84,2 Persen	85,1 Persen	86 Persen	86 Persen	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk seluruhnya x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36 Persen	82,36 Persen	83,56 Persen	84,38 Persen	85,19 Persen	85,98 Persen	86,76 Persen	100 Persen	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	(Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak) / (Jumlah total penduduk) * 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83 Persen	84,83 Persen	87,86 Persen	89,89 Persen	91,92 Persen	93,95 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	n/a	3,97 Persen	4,6 Persen	5,23 Persen	5,86 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen	(Panjang drainase ditangani) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan : SK Bupati No. 220 Tahun 2016 selesai di tahun 2021 Tahun 2021 sd 2026 berdasarkan : SK Bupati No. 82 Tahun 2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	82,99 Persen	82,99 Persen	10,59 Persen	21,18 Persen	31,77 Persen	42,36 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75 Persen	98,75 Persen	99,18 Persen	99,39 Persen	99,6 Persen	99,8 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Pemanfaatan ruang SRS	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	Selisih kejadian n tahun dengan kejadian baseline tahun)/baseline x 100%	DINAS PERHUBUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PERHUBUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	DINAS PERHUBUNGAN	
								Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	V / C Ratio di Jalan kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik					Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,01	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20	Pemanfaatan ruang / perencanaan ruang x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang		Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan tata ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70,1 Persen	70,2 Persen	70,3 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen	Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen); (rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas/rekom FPRD atau TKPRD yang diterbitkan + temuan pengawasan yang ditindak lanjuti/rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas)	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah		Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan pertanahan	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan sengketa garapan)*100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekom pemanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangkutan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen	tanah yang dikelola (tanah yang dilakukan penatausahaan (bidang yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya) / total tanah kasultanan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	72,00	62,76	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKLH = (0.376xIKA)+(0.405xIKU)+(0.219xIKL)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,80	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	IKA = Ii + Ij + Ik + Im	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	85,18	90,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	IKU = 100-((50/0,9) x(Ieu-0,1))	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	54,82	61,20	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	ITL = 100-((84,3-((LTL/LWK) x 100)) x(50/54,3))	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan seumber pencemaran air dan udara dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen	Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi jumlah lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/ nasional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten) dibagi (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Pengaduan masyarakat yang tertangani) dibagi (total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi) x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	(Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	(Total volume sampah yang dapat ditanganI) / (Total vol timbulan sampah kabupatenI)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Terwujudnya penurunan risiko bencana					Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas	BPBD	BNPB
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Assesment 71 indikator	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen	Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	n/a	n/a	n/a	45 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	65 Persen	Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) ditambah (jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan / atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) dibagi (Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)*100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
5	**Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel**	**Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat**						**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**13,5**	**13,5**	**13,37**	**12,90**	**12,50**	**12,05**	**11,50**	**11,50**	**Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)**	**DINAS SOSIAL**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial
				Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel Pembangunan infrastruktur ramah difabel	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		PPKS yang ditangani dan dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	55 Persen	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen	jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80 Persen	80 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS	DINAS SOSIAL	
								Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70 Persen	70 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah PPKS yang diikutsertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50 persen	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	99 Persen	57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	
		Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12*	95,18	95,5	96	96,5	96,75	96,9	96,9	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96	IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
				Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen	ARG kali APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi 100.000 penduduk perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga dibagi jumlah penduduk perempuan Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (lbh dr 900).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEMEN PPPA
				Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak Menyediakan Layanan Ramah Anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA		Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950	nilai Evaluasi KLA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	Jumlah Desa layak anak se Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah anak korban kekerasan yang ditanganı instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak Kabupaten Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali		Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,56	2,54	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3	Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* /mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	(Jumlah peserta KB Aktif Modern) / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen	Jumlah pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina dibagi Jumlah Kelompok Tribina dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Jl. R.W. Monginsidi 01 Kompleks Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
https://bappeda.bantulkab.go.id

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

FUNGSI RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam :

a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan RKPD.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 8

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 terdiri atas :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
i. BAB IX : PENUTUP; dan
j. *CASCADING*;

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(3) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,22/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021-2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Bantul dan wakil Bupati Bantul.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 140

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

9

PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1. LATAR BELAKANG 1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-8
1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD 1-9
1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 1-9
1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 1-10
1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 1-10
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 1-10
1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD 1-11
1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD 1-11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1-11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 1-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-15
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2-15
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 2-15
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 2-32
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2-40
2.1.4. Demografi 2-48
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2-53
2.2.1. Pertumbuhan PDRB 2-53
2.2.2. PDRB Perkapita 2-63
2.2.3. Laju Inflasi 2-63
2.2.4. Indeks Gini 2-64
2.2.5. Kemiskinan 2-65
2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka 2-68
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2-69
2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2-70
2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah 2-70
2.2.10. Umur Harapan Hidup 2-71
2.2.11. Angka Kematian Bayi 2-72
2.2.12. Angka Kematian Ibu 2-74
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2-75
2.3.1. Layanan Urusan Wajib 2-75
2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2-251
2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum 2-276
2.3.4. Layanan Keistimewaan 2-294
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2-307
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 2-307
2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur 2-309

2.4.3. Iklim Berinvestasi....2-312
2.4.4. Sumber Daya Manusia....2-328
2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2-331
2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021....2-350
2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)....2-357
2.7.1. Bidang Pendidikan....2-358
2.7.2. Bidang Kesehatan....2-359
2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....2-363
2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman....2-363
2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat....2-364
2.7.6 Bidang Sosial....2-366
2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR....2-367
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH....3-1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU....3-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD....3-3
3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah....3-10
3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah....3-12
3.1.4. Neraca Daerah....3-29
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU....3-39
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran....3-39
3.2.2. Analisis Pembiayan....3-44
3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19) 3-48
3.3. KERANGKA PENDANAAN....3-52
3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan....3-52
3. 3. 2 Penghitungan Kerangka Pendanaan....3-75
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH....4-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN....4-1
4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah....4-1
4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah....4-14
4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19....4-15
4.2 ISU-ISU STRATEGIS....4-16
4.2.1. Telaah Isu Internasional....4-17
4.2.2. Telaah Isu Nasional....4-20
4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta....4-28
4.2.4. Telaah Isu Daerah....4-61
4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul....4-80
4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar....4-88
4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul....4-95
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN....5-1
5.1. Visi....5-2
5.2. Misi....5-3
5.3. Tujuan dan Sasaran....5-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan....6-1

6.1.1. Analisis SWOT 6-2
6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 6-11
6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6-38
6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan 6-49
6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19 6-61
6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 6-63
6.2. Program Pembangunan Daerah 6-64
6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah 6-65
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 7-1
7.2. Program Perangkat Daerah 7-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 8-1
BAB IX PENUTUP 9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan 9-2
9.2. Pedoman Transisi 9-2
CASCADING L-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul 2-17
Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul 2-23
Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul 2-25
Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul 2-26
Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-27
Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-29
Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 2-40
Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-46
Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-47
Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon 2-49
Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul 2-50
Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%) 2-56
Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori 2-60
Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata 2-62
Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-66
Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon 2-67
Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-68
Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020 2-69
Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi 2-73
Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-74
Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-76
Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-77
Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-79
Tabel 2 24 Jumlah sekolah menurut peringkat akreditasi yang diperoleh 2-79
Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-79
Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-80
Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-81
Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-82
Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-82
Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul 2-83
Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul 2-84
Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul 2-85
Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020 2-86
Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-87
Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-88
Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-89
Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting 2-91
Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul 2-92
Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul 2-92
Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-93
Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-94
Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul 2-95

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-101
Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul 2-103
Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-103
Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-105
Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-106
Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-107
Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-108
Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul 2-109
Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul 2-112
Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul 2-114
Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020 2-116
Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-118
Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-119
Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-120
Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018 2-122
Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-123
Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-124
Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-126
Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-127
Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-128
Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul 2-128
Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ... 2-129
Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020 2-134
Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-135
Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-20202-136
Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-137
Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020 2-137
Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-139
Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-141
Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-141
Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-142
Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-142
Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-143
Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-143
Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-144
Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 2-145

Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 2-146
Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-147
Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-147
Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-150
Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-151
Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-153
Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-156
Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul..... 2-157
Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020..... 2-157
Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-159
Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-159
Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020..... 2-160
Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-161
Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020 2-163
Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020 2-164
Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 2-166
Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi 2-167
Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 2-170
Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018..... 2-171
Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019 2-171
Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020 2-171
Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-172
Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul,..... 2-172
Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-174
Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-176
Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020..... 2-176
Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-177
Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-178
Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-179
Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020..... 2-179
Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-180
Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-180
Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-181
Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-182
Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-183
Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 2-183
Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-184
Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... 2-184
Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-186
Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-187

Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-191
Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018 2-192
Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-192
Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul 2-193
Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, ... 2-193
Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-195
Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-199
Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul 2-200
Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul 2-200
Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul 2-201
Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul 2-201
Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-201
Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-202
Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-202
Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul 2-203
Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-204
Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-205
Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-208
Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018 2-208
Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019 2-209
Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020" 2-210
Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-210
Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 2-211
Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI 2-213
Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap 2-216
Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020 2-218
Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik 2-219
Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen 2-220
Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020 2-221
Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian 2-222
Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 2-225
Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul 2-226
Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul 2-238
Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-242
Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020 2-243
Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca 2-243
Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi 2-244
Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-245
Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020 2-245
Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-247
Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-247
Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan 2-248

Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan 2-249
Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020 2-250
Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-251
Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-252
Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-253
Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-253
Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-254
Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-255
Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-256
Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-256
Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019 2-257
Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-258
Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-258
Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-260
Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-261
Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-263
Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-264
Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-265
Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-266
Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-266
Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-267
Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-268
Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-268
Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul 2-269
Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-271
Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) 2-271
Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-272
Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-273
Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-274
Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-274
Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul 2-275
Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 2-276
Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-277
Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-278
Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-279
Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul 2-280
Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-285
Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-285

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-288
Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-290
Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-290
Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-291
Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020 2-292
Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-294
Tabel 2 205 Penetapan Desa Budaya di Kabupaten Bantul 2-297
Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul 2-298
Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul 2-299
Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019 2-302
Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul 2-304
Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-306
Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul 2-307
Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-308
Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul 2-309
Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019 2-310
Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-311
Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 2-313
Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-314
Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-315
Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-316
Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-318
Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2-319
Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-324
Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul 2-324
Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul 2-325
Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020 2-331
Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2-332
Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul 2-351
Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul ... 2-354
Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 2-359
Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-360
Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 2-363
Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-364
Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-365
Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 2-366
Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-367
Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) 3-4

Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020 3-7
Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... 3-12
Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 3-12
Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)..... 3-17
Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) 3-21
Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-23
Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 3-31
Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020 3-36
Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-40
Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab Bantul, 2016-2020.... 3-41
Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-42
Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020..... 3-43
Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)..... 3-45
Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta) 3-46
abel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 3-49
Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 3-51
Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bantul Tahun 2021-2026..... 3-56
Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026 3-59
Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait 3-64
Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait 3-68
Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020. 3-71
Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..... 3-78
Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..... 3-80
Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 3-81
Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025..... 4-29
Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 4-62
Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang 4-69
Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang 4-73
Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis..... 4-79
Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD 4-86
Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain 4-89
Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul 5-5
Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 5-6
Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 5-8
Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 6-12
Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif 6-22

Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak 6-28
Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026 6-29
Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD 6-30
Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU 6-33
Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026 6-34
Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi 6-35
Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025 . 6-36
Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025 6-37
Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM 6-40
Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul 6-52
Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas. 6-54
Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul 6-55
Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul 6-56
Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 6-59
Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul 6-60
Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul 6-60
Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 6-63
Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 6-66
Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul 7-2
Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 7-4
Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. 8-1
Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. 8-2
Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul 8-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1-8
Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul 2-16
Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul 2-16
Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul 2-20
Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul 2-21
Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul 2-23
Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul 2-24
Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul 2-26
Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-28
Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-28
Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul 2-41
Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul 2-42
Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul 2-42
Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul 2-43
Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul 2-43
Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Bantul 2-44
Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul 2-44
Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul 2-45
Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul 2-45
Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021 2-52
Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020 2-53
Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-54
Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010 2-55
Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010 2-55
Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kab Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020 2-57
Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2-58
Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020 2-59
Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020 2-61
Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020 2-64
Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 2-65
Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 2-66
Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul 2-70
Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul 2-71
Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-72
Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-73
Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-74
Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul 2-90
Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-91
Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul 2-97
Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul 2-99
Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul 2-100
Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-113
Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 2-115

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik 2-117
Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 2-130
Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 2-131
Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 2-136
Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-144
Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-148
Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 2-149
Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-154
Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 2-160
Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai 2-161
Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 2-162
Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul 2-163
Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul 2-164
Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2-165
Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020 2-175
Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-185
Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-188
Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-189
Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data 2-212
Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 2-241
Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020 2-309
Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-314
Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan 2-329
Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020 3-8
Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 3-9
Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020 3-18
Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020 3-19
Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul 5-3
Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 6-21
Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021 6-52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Bantul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo. Pelantikan dilaksanakan pada Jumat 26 Februari 2021 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sedangkan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 angka 3 (tiga) menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan Musrenbang, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPJMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

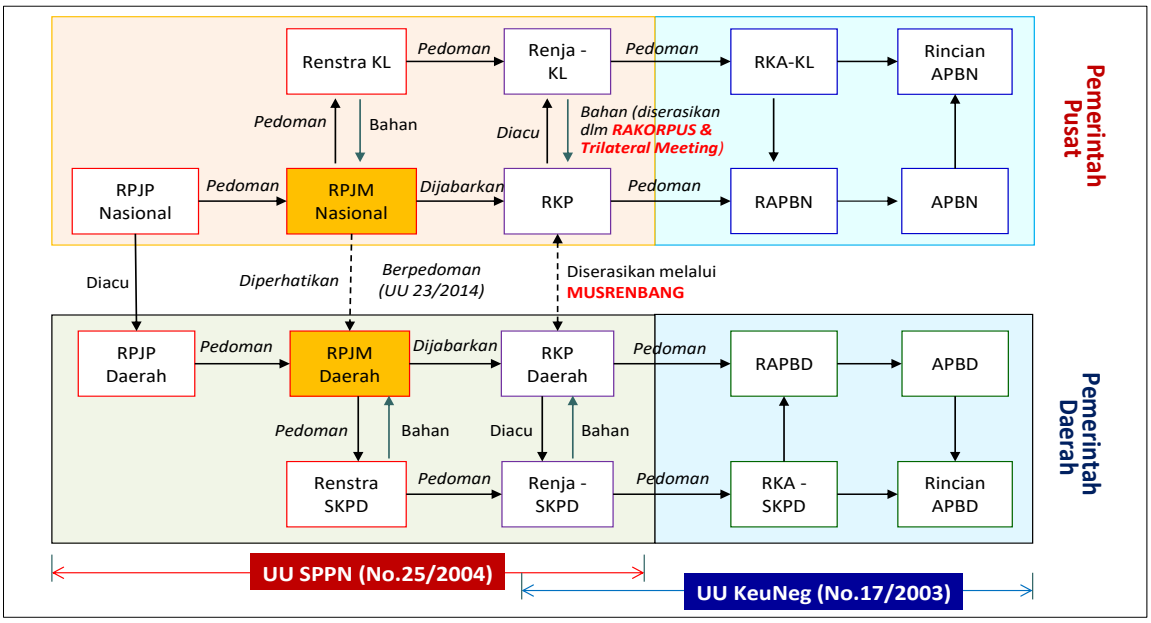

Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025. RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Visi RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2005-2025 adalah: "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis". Kata "Projotamansari" dimaknai sebagai: etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Kata "Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" merupakan keadaan yang ingin diwujudkan di tahun 2025. Secara singkat, kondisi yang ingin diwujudkan Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah: "Bantul yang Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, Asri, Sejahtera, dan Demokratis dan Agamis".

1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bantul. RPJMD Kabupaten Bantul juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Bantul.

1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Tahun 2021 -2026 didasari pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah memberi arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2022-2026 bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD serta pembangunan daerah dalam

rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
3) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2021–2026 disajikan dalam sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan program perangkat daerah yang disajikan

berdasarkan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bab IX Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Informasi berkaitan dengan gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section.*

Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan periode data yang tersedia sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Periode 2016-2021 (terkait target pembangunan), serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km^2 (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

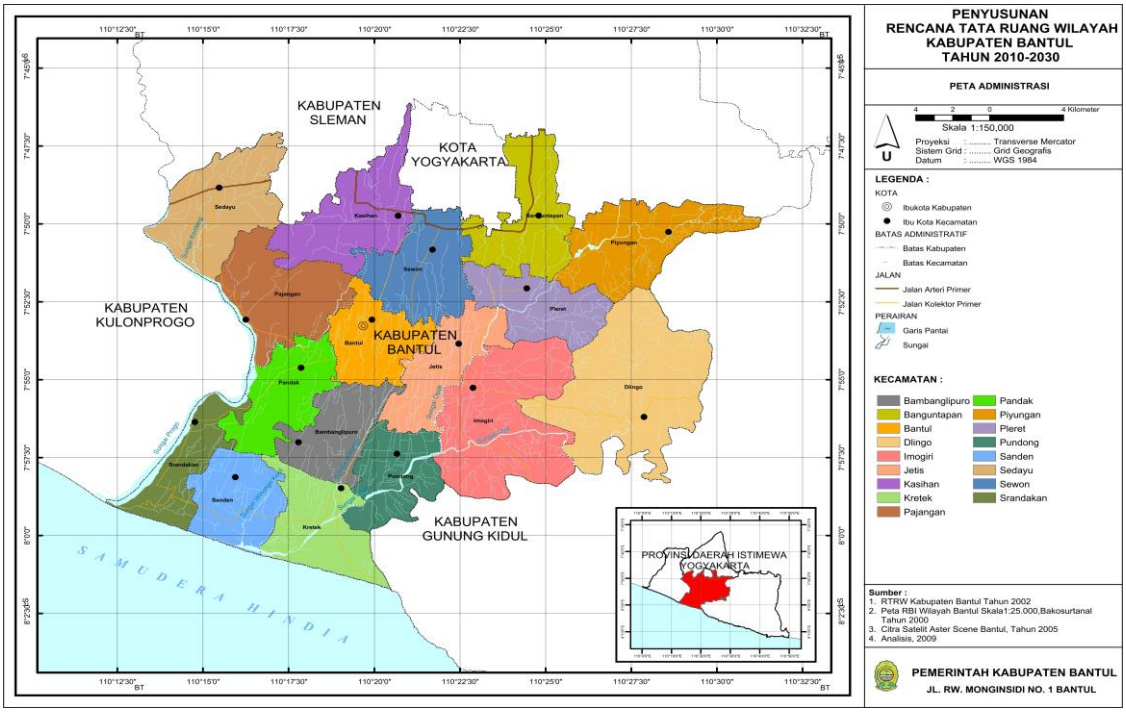

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda, 2021

Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar 2.2.

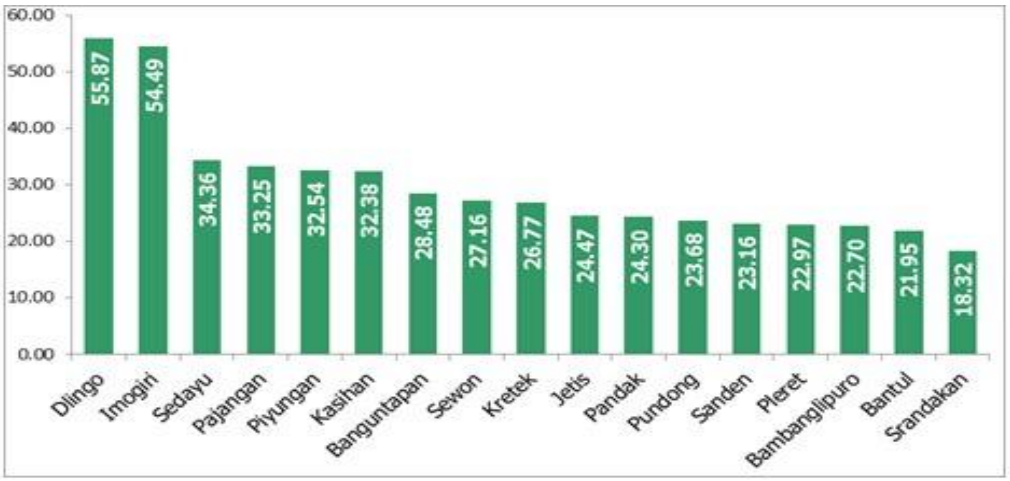

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 padukuhan dengan jumlah kalurahan dan padukuhan yang terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72

padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yaitu dua kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi kalurahan perdesaan (*rural area*) sebanyak 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 kalurahan. Secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
1	Srandakan	Poncosari (24 padukuhan)	11,86	Trimurti (19 padukuhan)	6,46
2	Sanden	Sri Gading (20 padukuhan)	7,57	Gadingsari (18 padukuhan)	8,12
				Gadingharjo (6 padukuhan)	3,08
				Murtigading (18 padukuhan)	4,39
3	Kretek	Tirtohargo (6 padukuhan)	3,62	Donotirto (13 padukuhan)	4,70
		Parangtritis (11 padukuhan)	11,87		
		Tirtosari (7 padukuhan)	2,39		
		Tirtomulyo (15 padukuhan)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 padukuhan)	11,10	Srihardono (17 padukuhan)	6,87
		Panjangrejo (16 padukuhan)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo (16 padukuhan)	8,19	Sidomulyo (15 padukuhan)	8,05
				Mulyodadi (14 padukuhan)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14 padukuhan)	5,93	Wijirejo (10 padukuhan)	4,68
		Triharjo (10 padukuhan)	6,43		
		Gilangharjo (15 padukuhan)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 padukuhan)	8,78	Triwidadi (22 padukuhan)	12,71
				Sendangsari (18 padukuhan)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 padukuhan)	2,32	Palbapang (10 padukuhan)	5,53
				Ringinharjo (6 padukuhan)	2,77
				Bantul (12 padukuhan)	5,24
				Trirenggo (17 padukuhan)	6,10

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
9	Jetis	Patalan (20 padukuhan)	5,65	Trimulyo (12 padukuhan)	7,11
		Canden (15 padukuhan)	5,36	Sumberagung (17 padukuhan)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro (18 padukuhan)	22,75	Kebonagung (5 padukuhan)	1,87
		Sriharjo (13 padukuhan)	6,32	Karangtalun (5 padukuhan)	1,21
		Karangtengah (6 padukuhan)	2,88	Imogiri (4 padukuhan)	0,83
				Wukirsari (16 padukuhan)	15,39
				Girirejo (5 padukuhan)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 padukuhan)	9,52	Dlingo (10 padukuhan)	9,16
		Muntuk (11 padukuhan)	12,85		
		Temuwuh (12 padukuhan)	7,67		
		Jatimulyo (10 padukuhan)	8,91		
		Terong (9 padukuhan)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 padukuhan)	3,75	Baturetno (8 padukuhan)	3,94
		Jagalan (2 padukuhan)	0,27	Banguntapan (11 padukuhan)	8,33
		Singosaren (5 padukuhan)	0,67		
		Wirokerten (8 padukuhan)	3,86		
		Jambidan (7 padukuhan)	3,76		
		Potorono (9 padukuhan)	3,90		
13	Pleret	Bawuran (7 padukuhan)	4,97	Wonokromo (12 padukuhan)	4,34
		Wonolelo (8 padukuhan)	4,54	Pleret (11 padukuhan)	4,25
		Segoroyoso (9 padukuhan)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 padukuhan)	9,40	Srimulyo (22 padukuhan)	14,56
				Srimartani (17 padukuhan)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo (16 padukuhan)	6,98	Bangunharjo (17 padukuhan)	6,79
		Timbulharjo (16 padukuhan)	7,78	Panggungharjo (14 padukuhan)	5,61
16	Kasihan	Tamantirto (10 padukuhan)	6,72	Tirtonirmolo (12 padukuhan)	5,13
		Ngestiharjo (12 padukuhan)	5,10		
		Bangunjiwo (19 padukuhan)	15,43		

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah			
		Kalurahan Perdesaan	Luas (km²)	Kalurahan Perkotaan	Luas (km²)
17	Sedayu	Argodadi (14 padukuhan)	11,21	Argosari (13 padukuhan)	6,37
		Argomulyo (14 padukuhan)	9,55	Argorejo (13 padukuhan)	7,23
	Jumlah	**41 Kalurahan**	**289,65 (28.965 ha)**	**34 Kalurahan**	**217,20 (21.720 ha)**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"- 110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"- 08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil.

Secara geostrategik, Kabupaten Bantul berada pada posisi yang strategis. *Pertama*, Kabupaten Bantul berada di sisi selatan yang merupakan daerah hilir sebagai muara aliran sungai yang memberikan keuntungan ketersedian air untuk pemenuhan kebutuhan air. Selain itu, berdasarkan Visi Gubernur DIY 2017-2022 Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Kabupaten Bantul akan menjadi muka atau wajah DIY. Namun, wilayah hilir juga mempunyai dampak negative terhadap kualitas lingkungan dan sumber air. K*edua*, wilayah Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini memberikan keuntungan strategis untuk berkembangnya wilayah.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.

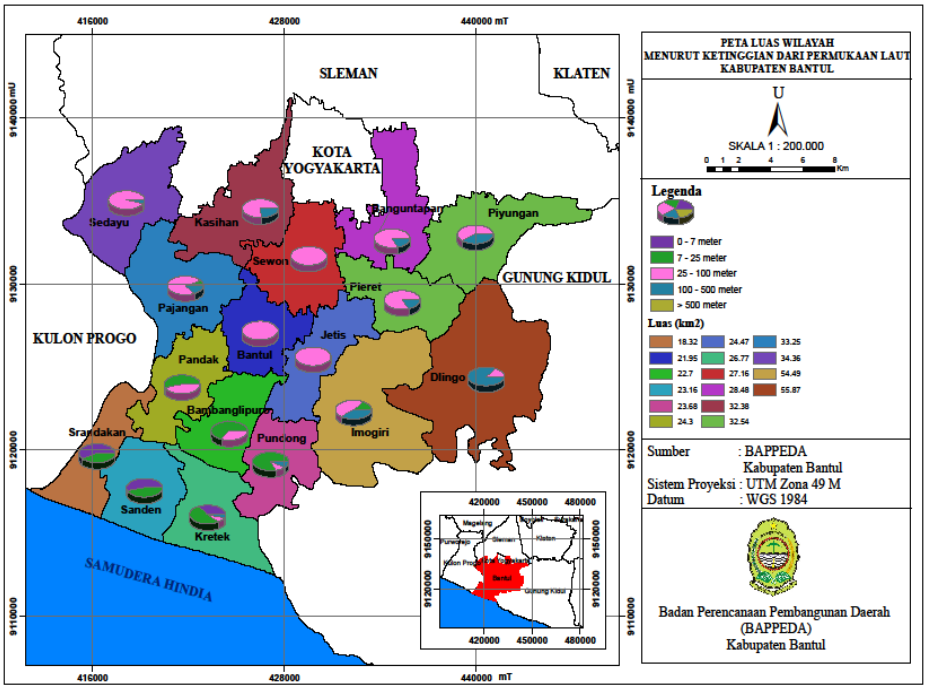

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan.

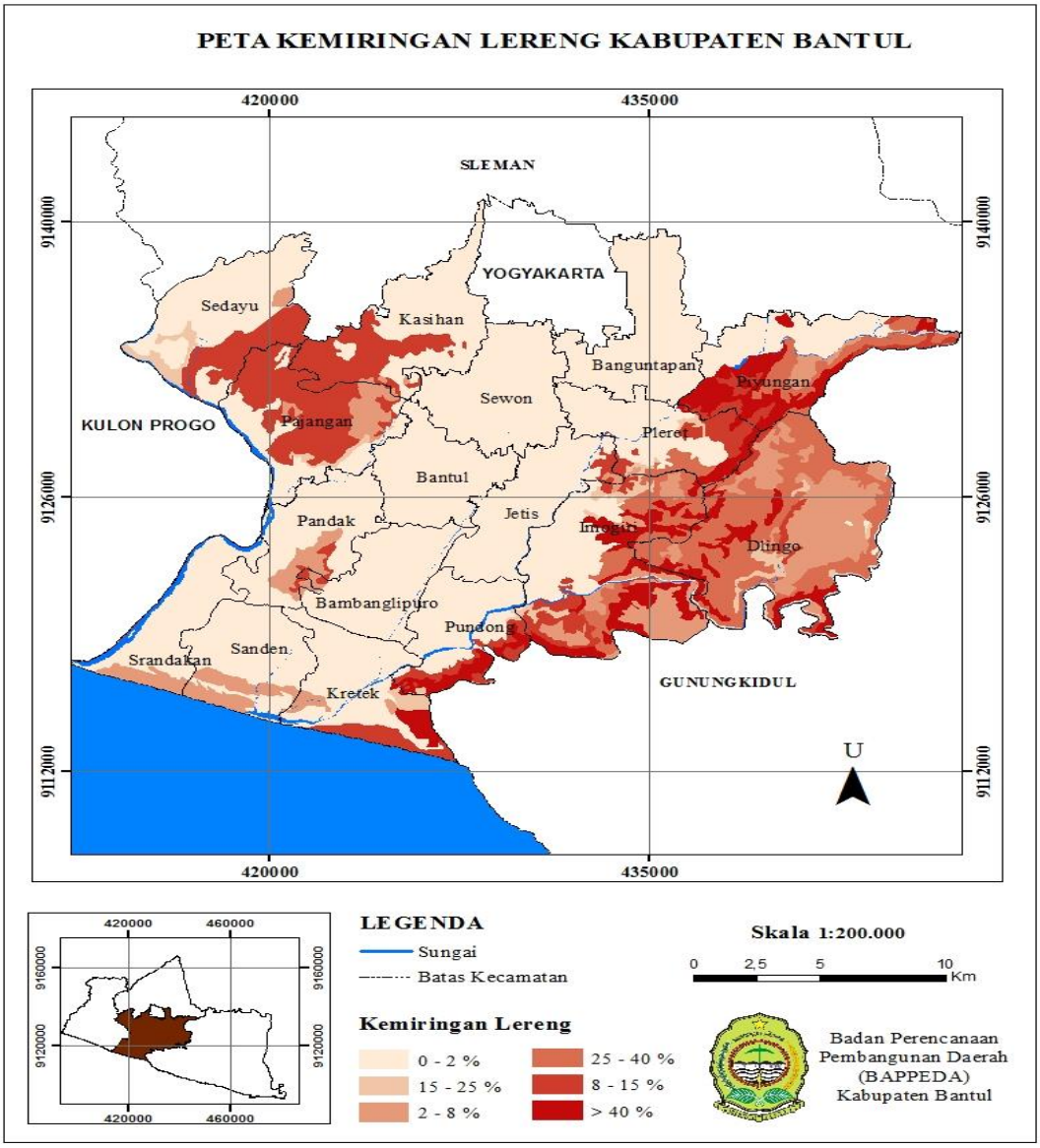

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden merupakan daerah terendah di antara Kapanewon lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya

berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%).

Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1- 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah Kapanewon terlihat bahwa wilayah Kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah Kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi.

Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat sebagai berikut :

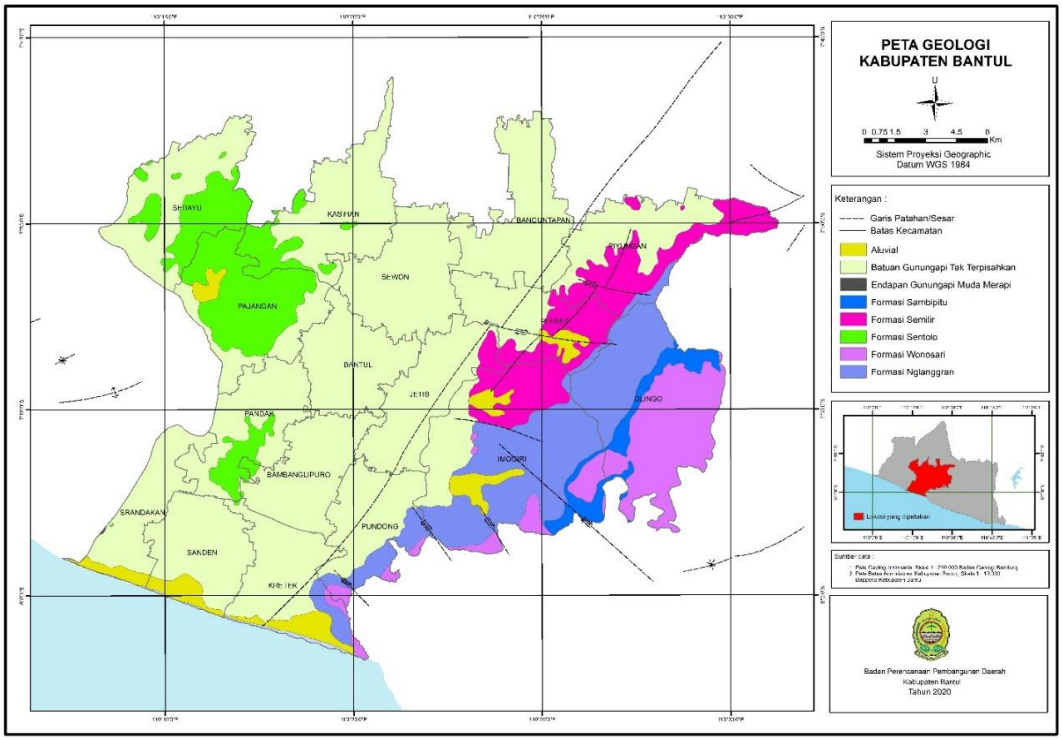

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

No.	Formasi Batuan	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	1.669	3,27
2	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan	30.984	60,63
3	Endapan Gunungapi Muda Merapi	4	0,01
4	Formasi Sambipitu	950	1,86
5	Formasi Semilir	3.703	7,25
6	Formasi Sentolo	4.622	9,04
7	Formasi Wonosari	3.388	6,63
8	Formasi Nglanggran	5.783	11,32
Jumlah		50.685	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Kabupaten Bantul sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984.03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggeran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9.04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau

1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi Semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

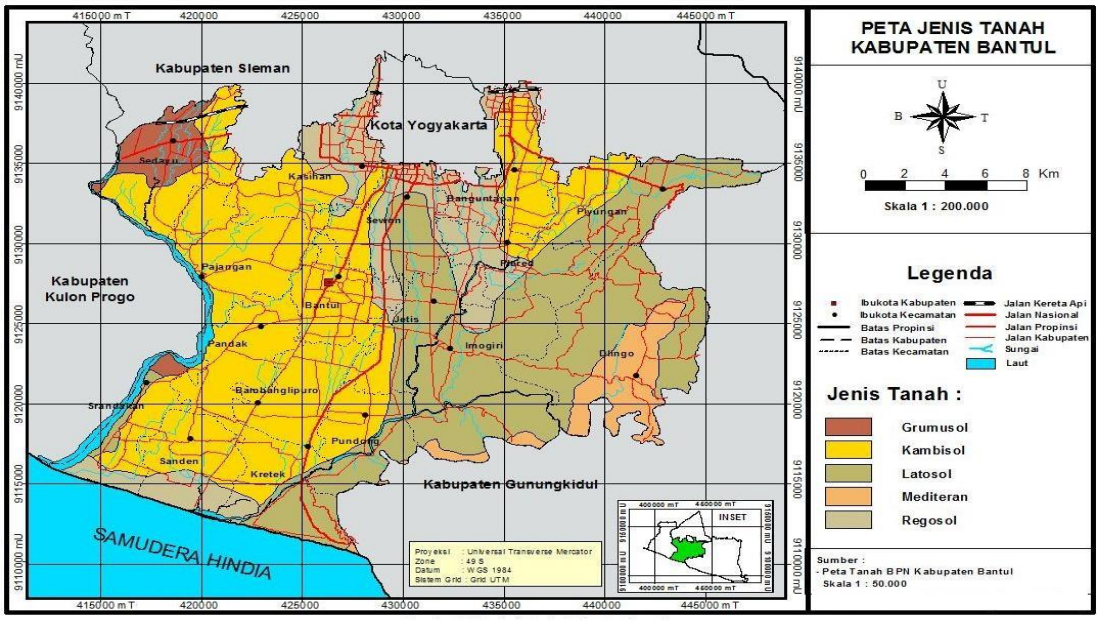

Sumber: BPN,2021

Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu.

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret.

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Di wilayah Bantul terdapat dua DAS yaitu DAS Progo dan DAS Opak.

Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS(Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,50	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: BPDAS KLHK, 2019

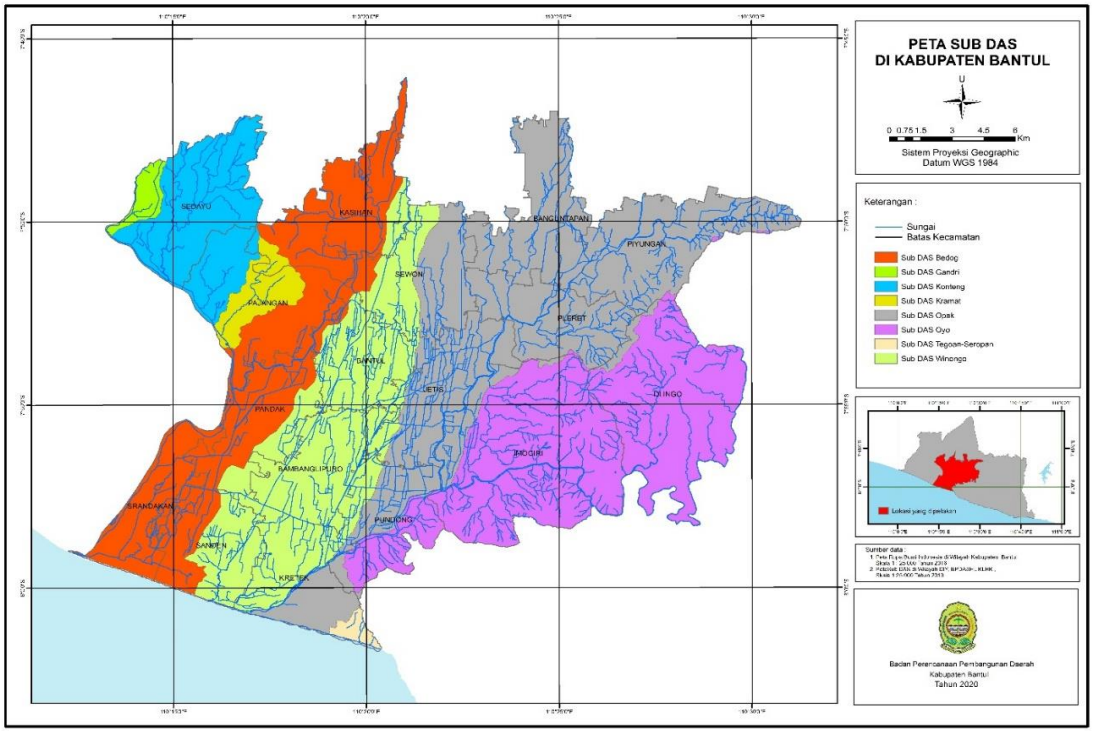

Sumber: BPDAS KLHK, 2019

Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati 5 sungai besar yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gadjah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/ industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam menyusun program kegiatan.

Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan
II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gadjahwong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gadjahwong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo,Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.1.1.6 Klimatologi

Data curah hujan Kabupaten Bantul diperoleh dari hasil pengamatan di 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso.

Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	132	300	556	171,8	145,8	18	22	24	20	17
Februari	234	302	362	122,5	136,6	19	20	21	14	15
Maret	236	385	395	272,5	195,9	20	20	16	16	19
April	135	216	227	54,6	128,4	14	15	14	7	11

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Mei	80	38	20	1,9	79,4	16	5	4	6	11
Juni	125	24	14	0,4	2,3	11	3	1	2	1
Juli	54	4	-	-	0,3	11	3	-	-	1
Agustus	57	1	-	-	4,0	10	2	-	-	2
September	169	60	7	-	2,8	16	4	1	-	2
Oktober	223	96	5	-	76,6	19	13	1	-	9
Nopember	347	587	217	23,5	114,3	21	16	12	4	12
Desember	318	308	210	73,1	188,8	24	17	16	12	21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

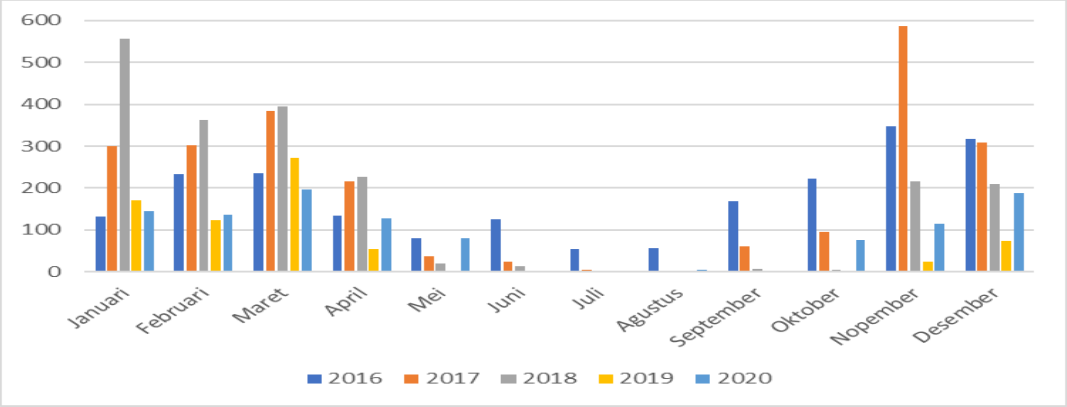

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

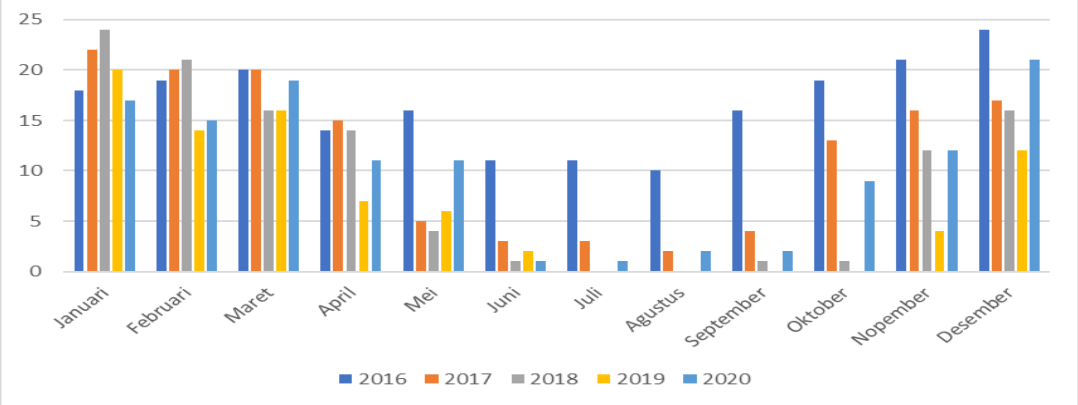

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, intensitas hujan tertinggi selama 5 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi di akhir tahun sedangkan tahun 2018-2019 terjadi pada awal tahun. Intensitas

hujan yang tinggi merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrim yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2017 dan tahun 2019, di Kabupaten Bantul terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir besar di beberapa wilayah sebagai akibat dari Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Tropis Dahlia serta Siklon Tropis Savanna yang merupakan dampak perubahan iklim. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Berdasarkan SNI 7645-1:2014 penggunaan lahan diklasifikasi terdiri dari hutan lahan kering, hutan lahan basah, sawah irigasi, sawah non irigasi, Kawasan terbangun, Kawasan tidak terbangun, gosomng sungai, pasir pantai, tambak, tubuh air. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hutan Lahan Kering	1,573.6	1,547.5	1,497.5	1,488.8	1,471.4
2	Hutan Lahan Basah	49.2	47.5	46.3	45.2	47.3
3	Sawah Irigasi	14,935.3	14,877.6	14,477.6	14,270.8	13,772.1
4	Sawah Non Irigasi	14,325.4	14,281.9	13,965.9	13,888.3	13,566.1
5	Kawasan Terbangun	16,559.3	16,721.2	17,531.5	17,959.9	18,675.7
6	Kawasan Tidak Terbangun	2,329.5	2,296.4	2,258.4	2,122.0	1,986.3
7	Gosong Sungai	17.7	18.3	19.2	16.5	15.9

No.	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Pasir Pantai	270.3	269.9	265.9	265.9	237.2
9	Tambak	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
10	Tubuh Air	570.1	570.1	568.1	573.0	858.5
	Jumlah	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**	**50,685.0**

Sumber: Bappeda dan DPTR, 2021

Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh lahan terbangun sebesar 36,85%, sawah irigasi 27,17% dan sawah non irigasi 26,77%. Selanjutnya, pada data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang berkurang terjadi pada penggunaan lahan sawah baik yang beririgasi maupun tidak beririgasi, kawasan tidak terbangun dan pasir pantai. Sementara untuk penambahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan terbangun dan tubuh air. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perubahan lahan yang didasarkan pada data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sehingga merupakan data eksisting di lapangan. Hal ini tentu akan memiliki perbedaan dengan data pada perubahan penggunaan lahan yang didasarkan pada data ijin pemanfaatan penggunaan lahan. Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah menjadi lahan terbangun. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Tabel 2 7 Alih Fungsi Sawah Irigasi

Tahun	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)
2017	57.70
2018	400.00
2019	206.80
2020	498.70

Sumber: Bappeda dan DPTR (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021, diolah

Perubahan penggunaan lahan khususnya lahan sawah yang dilakukan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah-langkah guna pengendalian alih fungsi lahan dengan penyusunan Peraturan Daerah Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain upaya tersebut, juga, dilakukan langkah penumbuhan minat dan perlindungan pertanian, sehingga masyarakat tetap mempertahankan lahannya. Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta berikut ini:

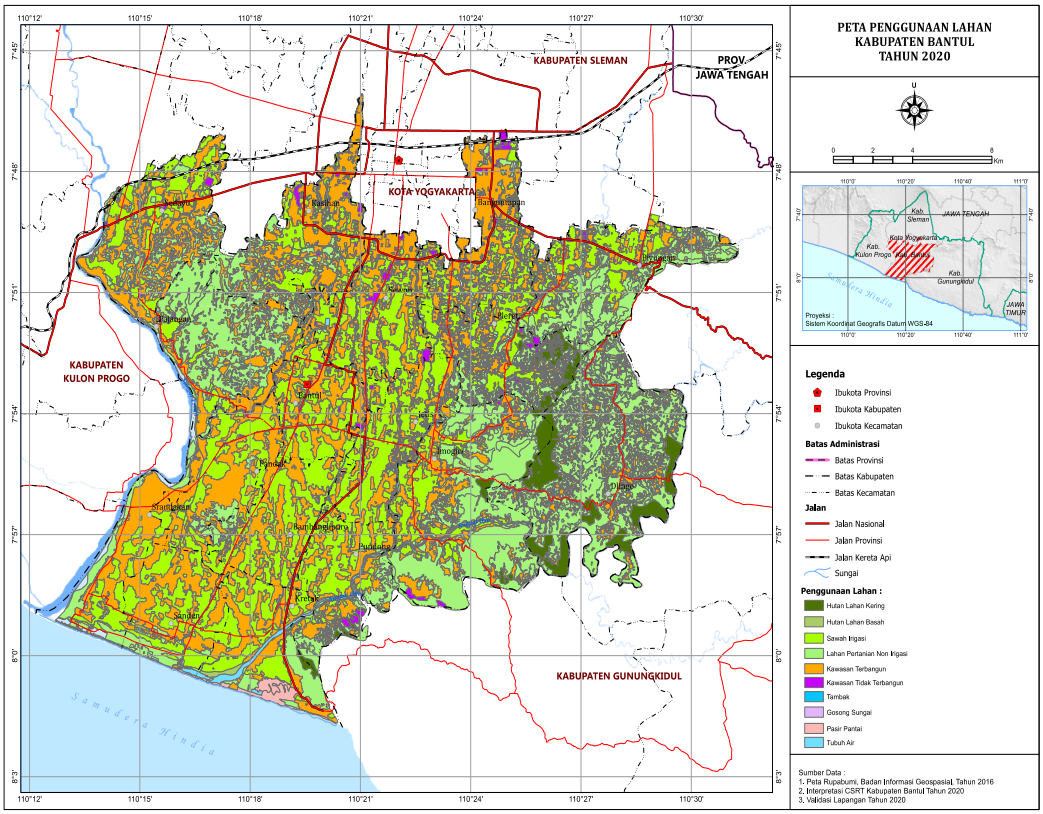

Sumber: Interpretasi CSRT Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.10. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diamati penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan kansekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah terbangun. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan pertanian non irigasi dan belum banyak lahan terbangun. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penataan ruang Kabupaten Bantul yaitu

mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan perkebunan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

2.1.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

2.1.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian tanaman hortikultura, dan kawasan peternakan, yaitu:

1) Kawasan pertanian tanaman pangan direncanakan seluas ±11.3177,69 Ha (22,05%) difokuskan terutama berada pada wilayah bagian tengah dengan penyebarannya kapanewon;
2) Kawasan hortikultura direncanakan seluas ±7.897,32 Ha (15,58%) yang berada di seluruh wilayah kapanewon, kecuali Kapanewon Sewon dan Kapanewon Bantul;
3) Kawasan peternakan direncanakan untuk peruntukan :
   a. ternak besar potong tersebar di seluruh wilayah kapanewon;
   b. ternak besar perah berada di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu;
   c. ternak kecil dan unggas berada di seluruh wilayah Kapanewon;

Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 19.075,01Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 14.407,50Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.667,51Ha.

2.1.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek;
2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan direncanakan di seluruh wilayah kapanewon, yang terdiri dari:
   a. Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembesaran direncanakan berada di Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Srandakan, selain di Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan Kapanewon Pandak, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu.

b. Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembenihan direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pandak.
c. Kawasan Perikanan Budidaya untuk jenis ikan hias direncanakan berada di Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Bantul.

2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan direncanakan seluas ±4.426 Ha yang terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas ±565Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Imogiri.
2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas ±2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Dlingo.
3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat seluas ±910Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Jetis.

2.1.2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1) Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan besar sebagai berikut :
   a. Kapanewon Piyungan dengan luas 374,96 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan enam) hektar;

b. Kapanewon Sedayu dengan luas 246,14 (dua ratus empat puluh enam koma satu empat) hektar;
c. Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar.

2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
3) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, dengan sebaran sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di:
   a. Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
   b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
   c. Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret;
   d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan;
   e. Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
   f. Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;
   g. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   h. Desa/Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
   i. Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;

j. Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan
k. Parangendog di Kalurahan Parangtritis.

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
   a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
   b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
   c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
   d. Kompleks Goa Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
   e. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   f. Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; dan Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten Bantul:
   a. Desa Wisata Kebonagung di Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri;
   b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon;
   c. Desa Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan;
   d. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan;
   e. Desa Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
   f. Desa Wisata Serut;
   g. Desa Wisata Trimulyo; dan
   h. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Dari uraian di atas Goa Jepang masuk dalam kawasan pariwisata alam maupun budaya karena sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa Goa Jepang masuk pada wisata budaya dan wisata alam.

Goa Jepang masuk pada wisata budaya karena merupakan peninggalan Jepang, dan masuk dalam cagar budaya, sehingga pengelolaan wisata di Goa Jepang harus memperhatikan ketentuan pengelolaan cagar budaya.

2.1.2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 4.922,72 (empat ribu sembilan rarus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Sewon;
2) Rencana permukiman kota satelit direncanakan seluas 1.846,45 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma empat lima) hektar berada di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan; Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan; dan Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak;
3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 9.450,22 (sembilan ribu empat ratus lima puluh koma dua dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan.

2.1.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi: kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

1). Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
   a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan Udara di Kapanewon Banguntapan;
   b. Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
   c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
   d. Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
   e. Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
   f. Stasiun Radar di Kapanewon Kretek.

2). Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
   a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlayaninya wilayah kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pajangan;
   c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti

puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan;

d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing Kapanewon dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penilaian dari BNPB memiliki nilai Indeks Risiko Bencana 187,20 dengan kategori tinggi. Risiko bencana berbanding lurus dengan tingkat bahaya dan kerentanan, artinya semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan maka semakin tinggi risiko bencana. Sebaliknya, risiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas daerah artinya semakin baik/tinggi kapasitas daerah maka semakin rendah risiko bencana.

Komponen bahaya bencana adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam sedangkan komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Selama tahun 2020 tercatat 530 kejadian bencana yang tersebar hampir di seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil kajian dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut :

Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

NO	JENIS BENCANA	LOKASI YANG BERPOTENSI
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh Kapanewon
2.	Kawasan rawan	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan

NO	JENIS BENCANA	LOKASI YANG BERPOTENSI
	longsor	Pajangan
3.	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret
4.	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:

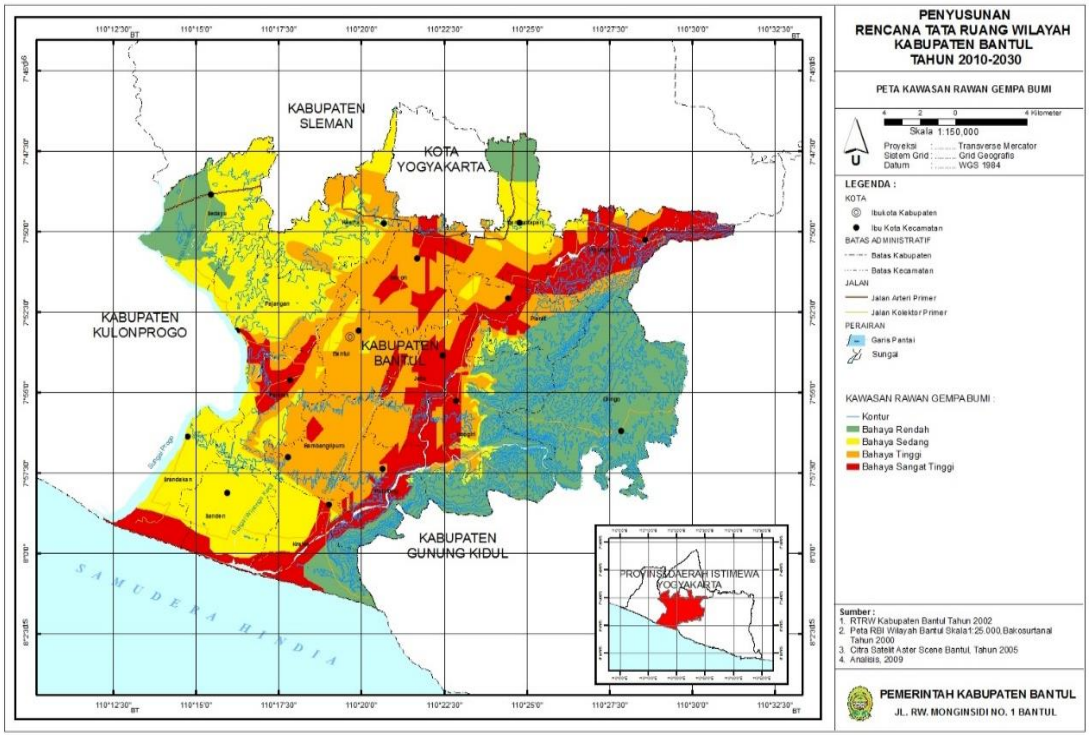

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul

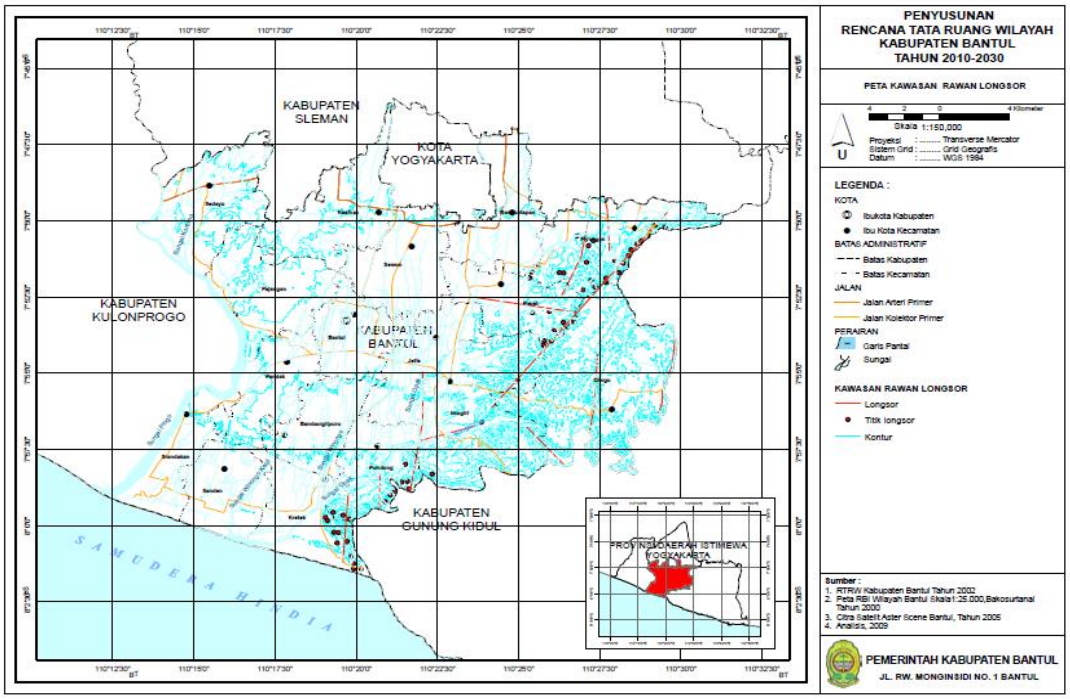

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul

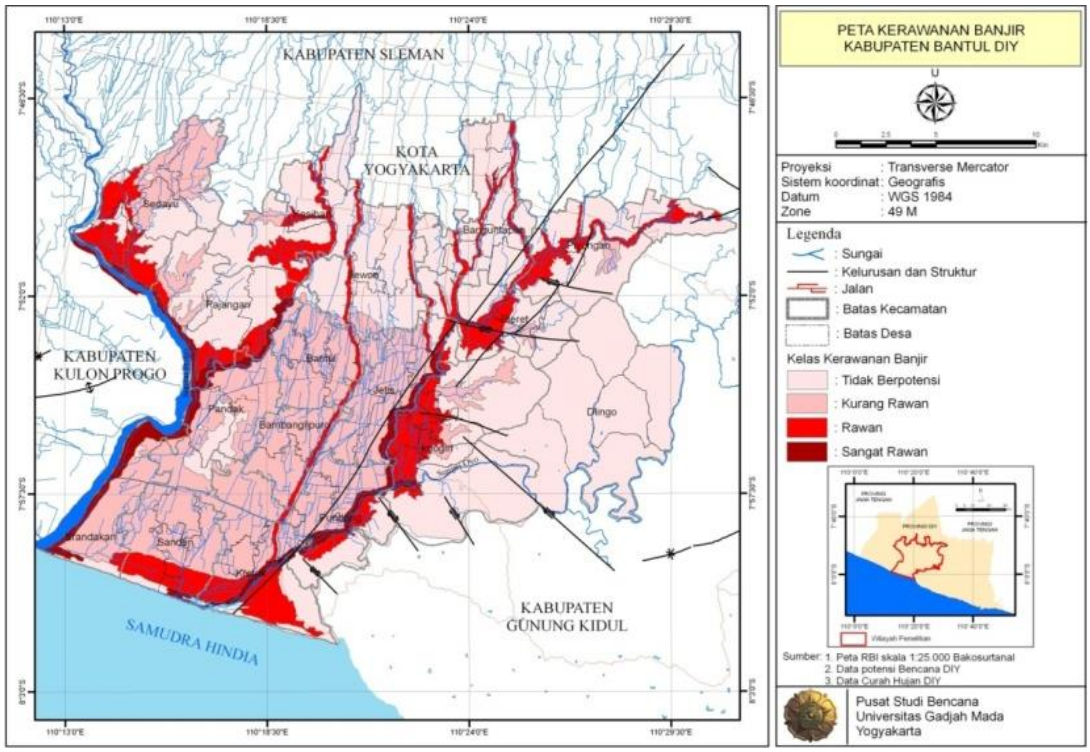

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,

Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul

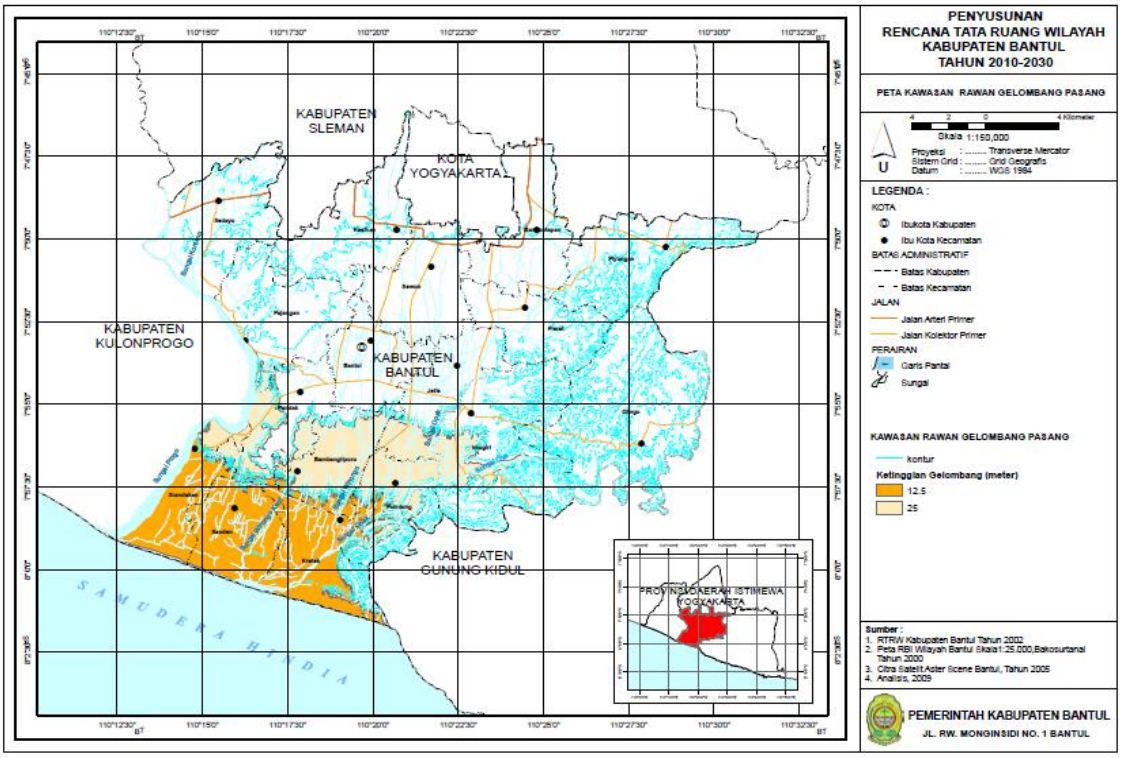

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

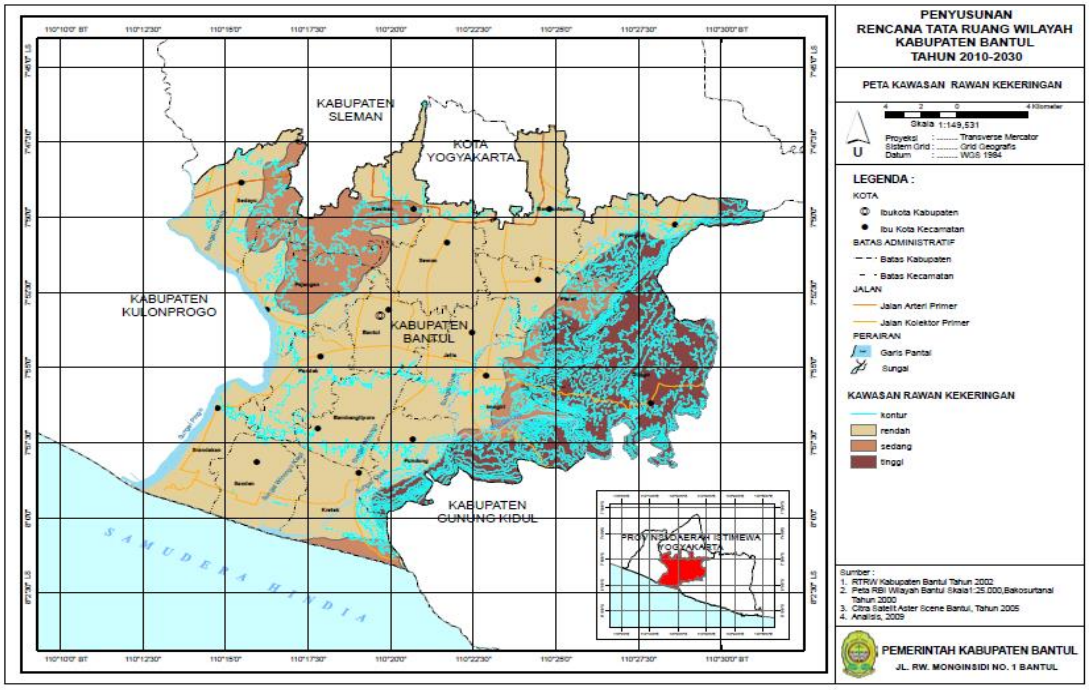

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

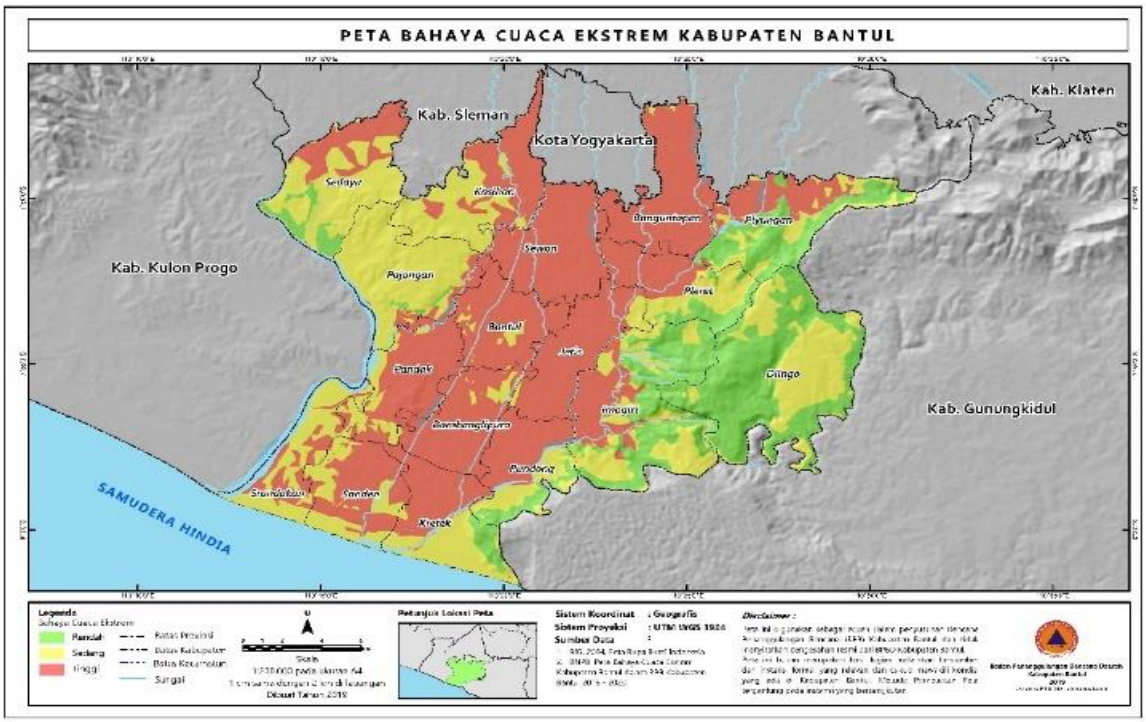

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul

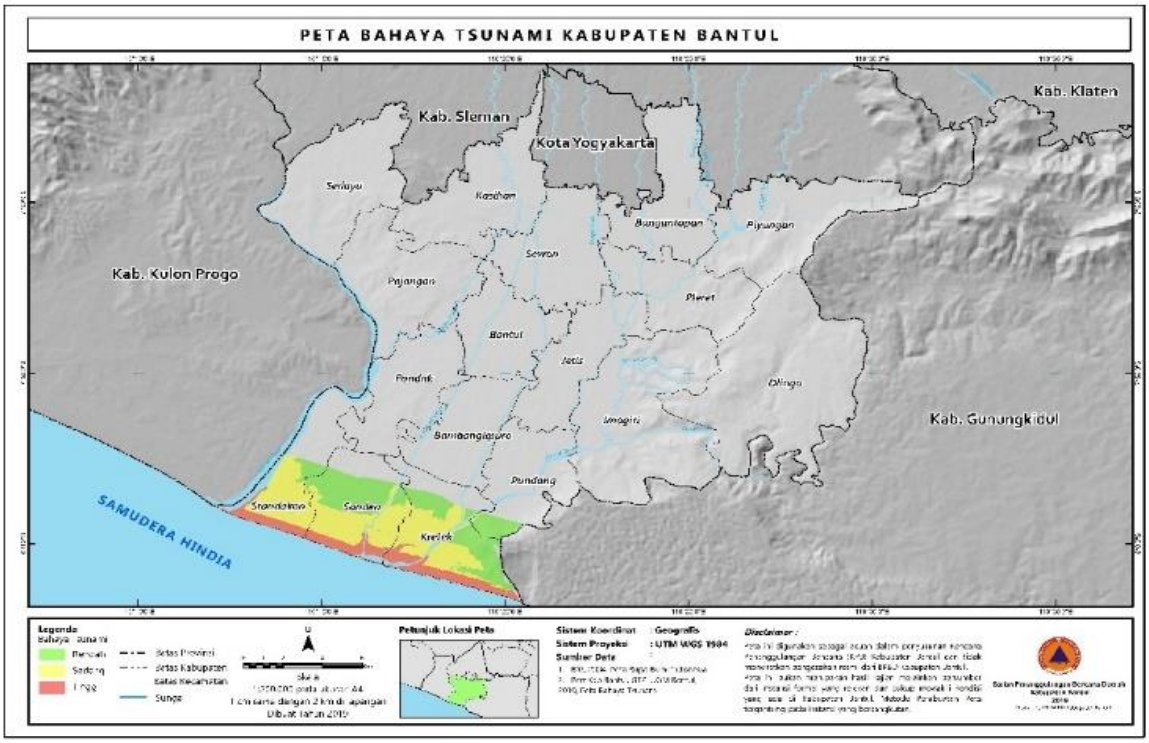

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

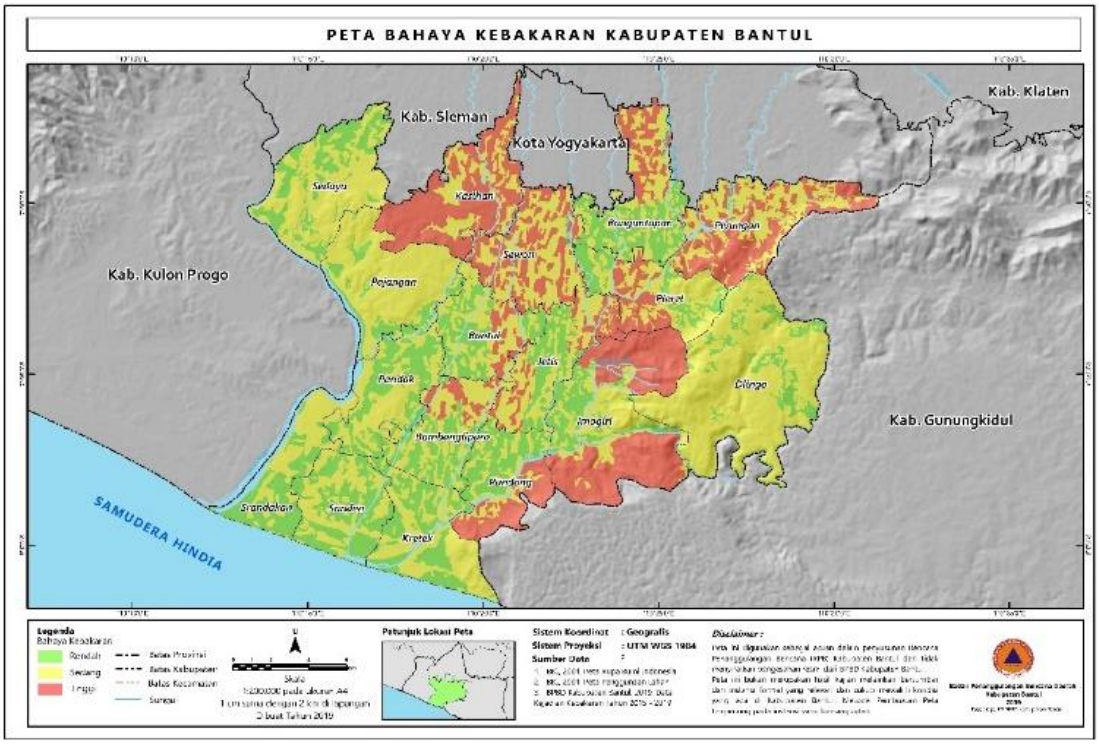

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul

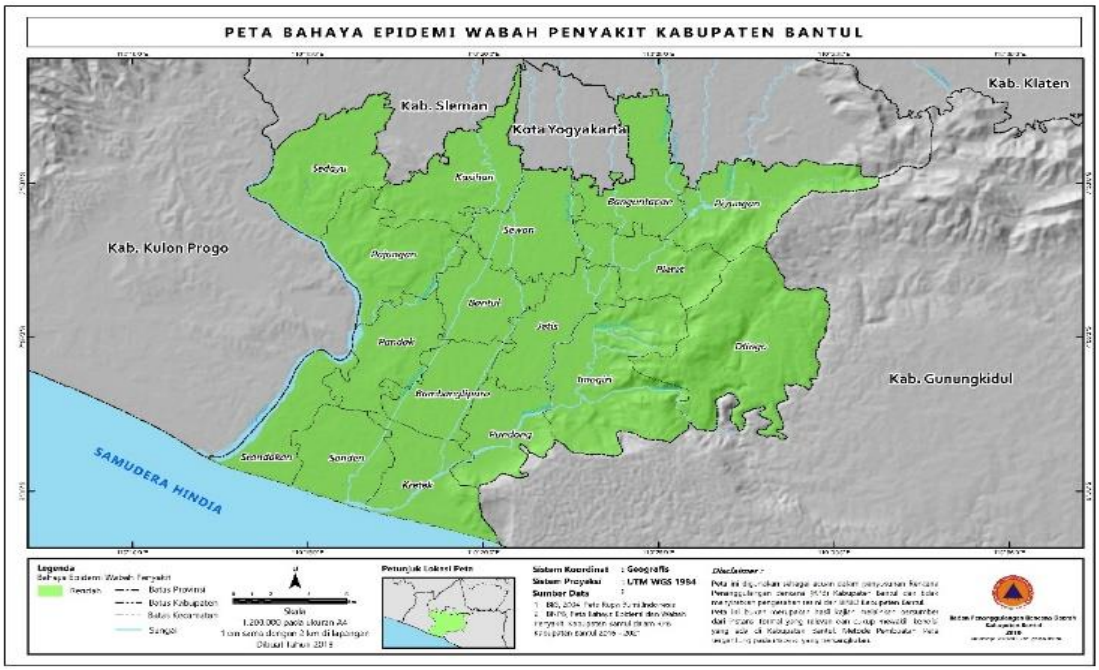

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul

Komponen kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian

risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Peningkatan kapasitas daerah salah satunya dilakukan dengan perwujudan kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Pencapaian kalurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2020 sebanyak 35 kalurahan dari 75 kalurahan atau baru mencapai 46,67%. Sedangkan pencapaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 23 atau sebesar 4,51%.

Potensi tingkat risiko bencana pada 9 (sembilan) jenis bencana adalah tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Ancaman	Luas Ancaman		Jumlah Penduduk Terpapar		Nilai Kerugian		Tingkat Kapasitas Daerah	Tingkat risiko
		Ha	Kelas	Jiwa	Kelas	Miliyar	Kelas	Kelas	
1	Gempa Bumi	6.978	Tinggi	93.414	Sedang	8.417	Sedang	Rendah	Sedang
2	Longsor	6.874	Tinggi	63.369	Sedang	5.629	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir	15.068	Tinggi	24.558	Sedang	24.104	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	799	Tinggi	7.031	Rendah	651	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan	11.225	Tinggi	93.460	Sedang	13	Rendah	Rendah	Rendah
6	Cuaca Ekstrim	44.768	Tinggi	692.936	Tinggi	53.486	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	3.384	Tinggi	34.735	Sedang	1.751	Sedang	Rendah	Sedang
8	Kebakaran	11.727	Tinggi	94.878	Sedang	22.173	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Epidemi dan Wabah penyakit	50.685	Sedang	945.441	Tinggi	317*	Rendah	Rendah	tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

*Keterangan : * angka sementara, belum memperhitungkan kerugian* yang dirasakan/dialami masyarakat

Jenis bencana tidak hanya bencana alam, namun bencana non alam juga berpotensi menjadi ancaman. Hal ini terbukti dengan terjadinya pandemi Covid-19. Sejak awal Maret 2020, wilayah Kabupaten Bantul mulai dilanda wabah Covid-19 dan terus bertambah

menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul bahkan pada bulan Maret 2021 tiga wilayah kapanewon terkonfimasi lebih dari 1000 kasus yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat karena mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, meskipun pada sektor tertentu ada dampak positif yang diperoleh seperti sektor informasi dan komunikasi. Luasnya sektor kehidupan yang terdampak menjadikan tidak mudah dalam mengidentifikasi atau menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun, melalui pendekatan kondisi perekonomian makro daerah, kerugian dampak Pandemi Covid-19 dapat tergambar dari pertumbuhan PDRB . Merujuk pada hal tersebut, maka selama pandemi Covid-19 (2019-2020) telah menyebabkan penurunan PDRB sebesar Rp317,140 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah ada penurunan sebesar Rp30,64 Milyar. Sementara untuk kerugian yang dirasakan/dialami masyarakat setiap sektor belum dapat terhitung secara detil karena luasnya dampak yang ditimbulkan

Tingkat risiko bencana per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
1.	Pajangan	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Rendah
2.	Pandak	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
3.	Sedayu	Rendah	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Sedang
4.	Sanden	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
5.	Dlingo	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah		Sedang
6.	Sewon	Tinggi	Rendah		Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang
7.	Srandakan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
8.	Kasihan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi		Tinggi
9.	Imogiri	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Sedang
10.	Pleret	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
11.	Bantul	Sedang	Tinggi		Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi

No	Kapanewon	Risiko								
		Kebakaran	Banjir	Tsunami	Gempa bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Epidemi dan Wabah Penyakit *
12.	Pundong	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi		Sedang
13.	Kretek	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang
14.	Bambanglipuro	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Sedang
15.	Piyungan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Rendah
16.	Jetis	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi
17.	Banguntapan	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi		Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Keterangan: * Data covid 19 di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah 928.676 jiwa dan cenderung meningkat mencapai 954.706 jiwa pada tahun 2020. Dihitung dari nilai totalnya, pertumbuhan penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 0,57%.

Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon

No	Kapanewon	2016				2017				2018				2019				2020				Pertumbuhan 2020 (%)	Proporsi 2020 (%)
		L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio	L	P	Jumlah	Sex Ratio		
1	Kretek	15232	15850	31082	96.10	15061	15776	30837	95.47	15099	15756	30855	95.83	15101	15762	30863	95.81	15076	15688	30764	96.10	-0,32%	3,2
2	Srandakan	15590	15654	31244	99.59	15551	15725	31276	98.89	15522	15642	31164	99.23	15505	15713	31218	98.68	15475	15607	31082	99.15	-0,44%	3,3
3	Sanden	16085	16409	32494	98.03	15755	16169	31924	97.44	15747	16220	31967	97.08	15763	16209	31972	97.25	15713	16097	31810	97.61	-0,51%	3,3
4	Pundong	17554	17930	35484	97.90	17456	17992	35448	97.02	17503	18165	35668	96.36	17658	18250	35908	96.76	17587	18079	35666	97.28	-0,67%	3,7
5	Pajangan	17409	17265	34674	100.83	17467	17427	34894	100.23	17691	17774	35465	99.53	18000	18040	36040	99.78	18271	18280	36551	99.95	1,42%	3,8
6	Dlingo	19401	19625	39026	98.86	19188	19314	38502	99.35	19463	19629	39092	99.15	19649	19888	39537	98.80	19872	20126	39998	98.74	1,17%	4,2
7	Bambanglipuro	20498	20887	41385	98.14	20326	20875	41201	97.37	20551	21070	41621	97.54	20673	21207	41880	97.48	20620	21086	41706	97.79	-0,42%	4,4
8	Sedayu	23155	22898	46053	101.12	23109	23043	46152	100.29	23507	23546	47053	99.83	23754	23892	47646	99.42	24046	24110	48156	99.73	1,07%	5,0
9	Pleret	23610	23053	46663	102.42	23590	23235	46825	101.53	23906	23953	47859	99.80	24246	23924	48170	101.35	24430	24067	48497	101.51	0,68%	5,1
10	Pandak	25986	25784	51770	100.78	25820	25672	51492	100.58	25981	25800	51781	100.70	26112	25901	52013	100.81	26118	25918	52036	100.77	0,04%	5,5
11	Piyungan	25463	25383	50846	100.32	25490	25561	51051	99.72	25714	25978	51692	98.98	26041	26292	52333	99.05	26320	26542	52862	99.16	1,01%	5,5
12	Jetis	28650	28824	57474	99.40	28540	28868	57408	98.86	28906	29300	58206	98.66	29111	29438	58549	98.89	29237	29394	58631	99.47	0,14%	6,1
13	Imogiri	31247	31172	62419	100.24	31168	31363	62531	99.38	31442	31737	63179	99.07	31583	31959	63542	98.82	31730	32105	63835	98.83	0,46%	6,7
14	Bantul	31548	31576	63124	99.91	31230	31558	62788	98.96	31637	32032	63669	98.77	31988	32377	64365	98.80	32146	32506	64652	98.89	0,45%	6,8
15	Sewon	49084	48336	97420	101.55	48760	48274	97034	101.01	49463	49043	98506	100.86	50183	49624	99807	101.13	50539	50024	100563	101.03	0,76%	10,5
16	Kasihan	50397	49933	100330	100.93	50152	50070	100222	100.16	51055	51120	102175	99.87	51749	51778	103527	99.94	52215	52384	104599	99.68	1,04%	11
17	Banguntapan	53951	53957	107908	99.99	53786	53810	107596	99.96	54948	55178	110126	99.58	55800	56155	111955	99.37	56476	56822	113298	99.39	1,20%	11,9
Jumlah		464860	464536	929396	100.07	462449	464732	927181	99.51	5E+05	471943	940078	99.19	472916	476409	949325	99.27	475871	478835	954706	99.38	**0,57%**	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Di tahun 2020, pertumbuhan penduduk yang tertinggi ada di Kapanewon Pajangan (1,42%), Kapanewon Banguntapan (1,20%), dan Dlingo (1,17%). Jumlah penduduk terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan (11,9%), Kasihan (11%) dan Sewon (10,5%). Hal ini terjadi karena ketiga kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kapanewon Kretek (3,2%), Srandakan (3,3%) dan Sanden (3,3%).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender.* Dari sisi *sex ratio*, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bantul lebih besar daripada lelaki. Di tahun 2020, kapanewon yang memiliki *sex ratio* di atas 100% (lelaki lebih banyak daripada perempuan) ada di Kapanewon Pandak (100,49%), Pleret (101,64%) dan Sewon (100,94%). Dari sisi *sex ratio* ini sangat jelas bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dioptimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul

NO	KAPANEWON	KEPADATAN (jiwa/km²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	RERATA
1	Dlingo	692	689	700	705	715	700
2	Pajangan	1.043	1.049	1.067	1.076	1.099	1.066
3	Imogiri	1.146	1.148	1.159	1.164	1.171	1.157
4	Kretek	1.161	1.152	1.153	1.154	1.149	1.153
5	Sedayu	1.340	1.343	1.369	1.381	1.401	1.366
6	Sanden	1.403	1.378	1.380	1.381	1.373	1.383
7	Pundong	1.498	1.497	1.506	1.510	1.506	1.503
8	Piyungan	1.563	1.569	1.589	1.601	1.624	1.589
9	Srandakan	1.705	1.707	1.701	1.704	1.696	1.702
10	Bambanglipuro	1.823	1.815	1.834	1.840	1.837	1.829

NO	KAPANEWON	KEPADATAN (jiwa/km²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	RERATA
11	Pleret	2.031	2.039	2.068	2.083	2.111	2.066
12	Pandak	2.130	2.119	2.131	2.137	2.141	2.131
13	Jetis	2.349	2.346	2.379	2.387	2.396	2.371
14	Bantul	2.876	2.861	2.901	2.915	2.945	2.899
15	Kasihan	3.099	3.095	3.156	3.180	3.230	3.152
16	Sewon	3.587	3.573	3.627	3.655	3.702	3.628
17	Banguntapan	3.776	3.778	3.867	3.906	3.978	3.861
RERATA		**1.954**	**1.950**	**1.976**	**1.987**	**2.004**	**1.974**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Dilihat dari tabel di atas kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk belum merata. Rerata tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.974 jiwa per km^2 dengan standar deviasi sebesar 914 jiwa per km^2.

Di tahun 2020, kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan (3.861 jiwa/km^2), Sewon (3.628 jiwa/km^2), dan Kasihan (3.152 jiwa/km^2). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kapanewon Dlingo (700 jiwa/km^2).

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kapanewon. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

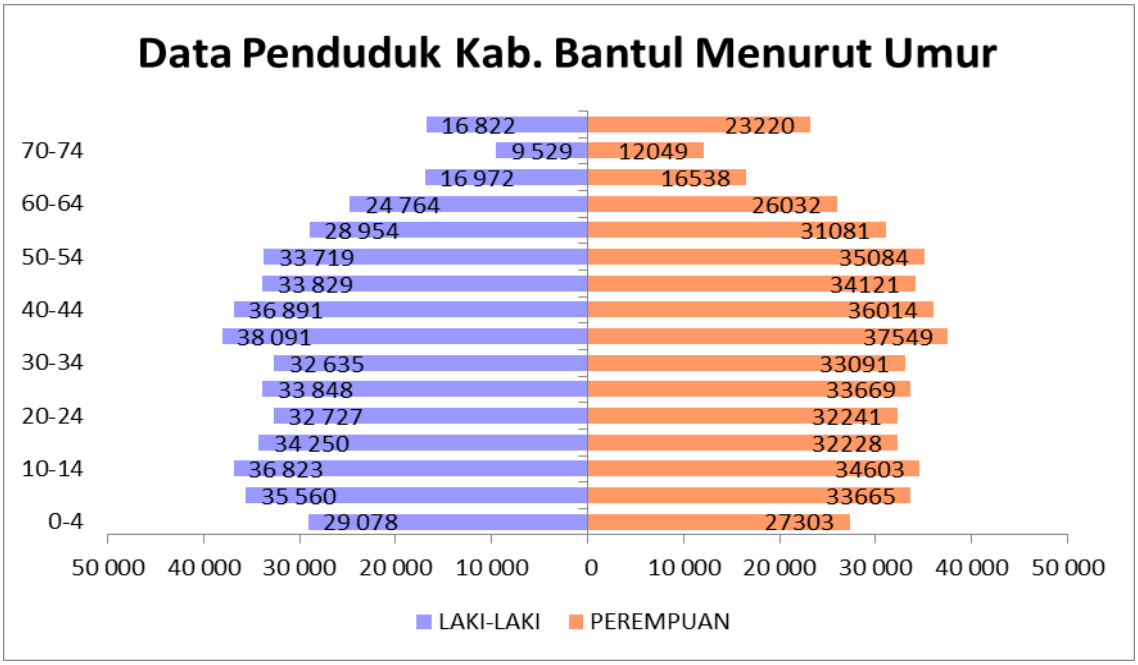

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021

Komposisi Penduduk menurut kelompok usia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.19. Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 64 tahun) menurun dapat dikatakan Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan.

Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Upaya pemanfaatan peluang tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk

menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

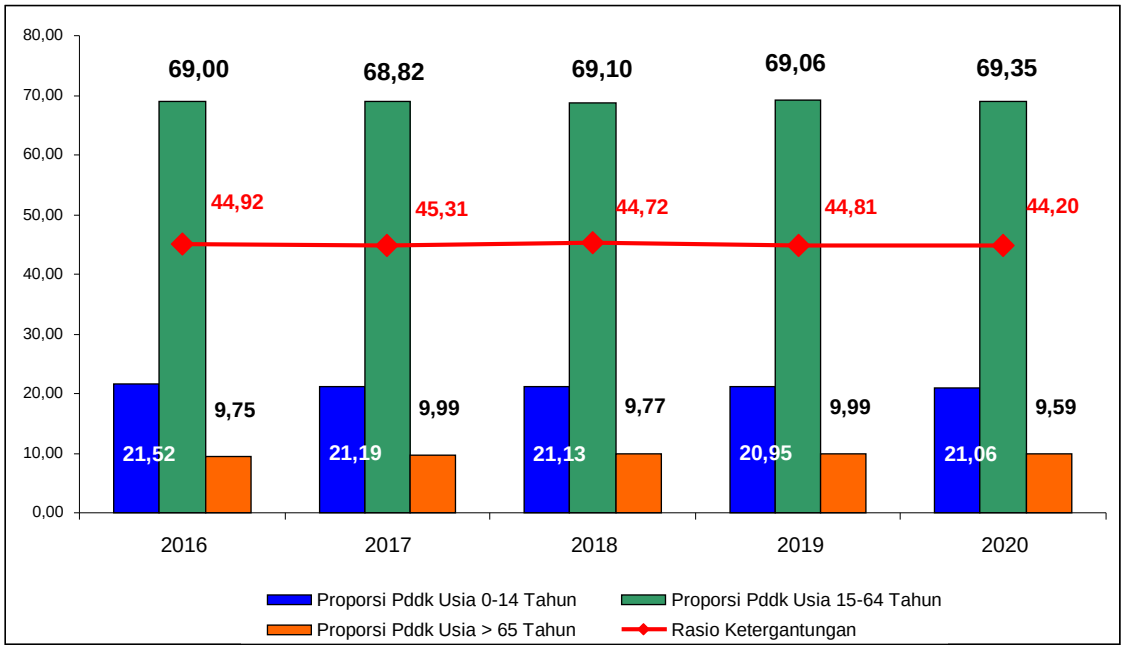

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah.

Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memuat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantul berdasarkan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan target serta capaian RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB dapat menggambarkan kinerja pembangunan dan transformasi struktural perekonomian. PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan ini terjadi pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil). Apabila dicermati angka-angkanya, peningkatan ini dapat dikatakan

signifikan dengan rata-rata 1,3 triliun rupiah per tahun untuk PDRB atas harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 0,61 triliun untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB baik nominal maupun riil pada periode 2016-2020.

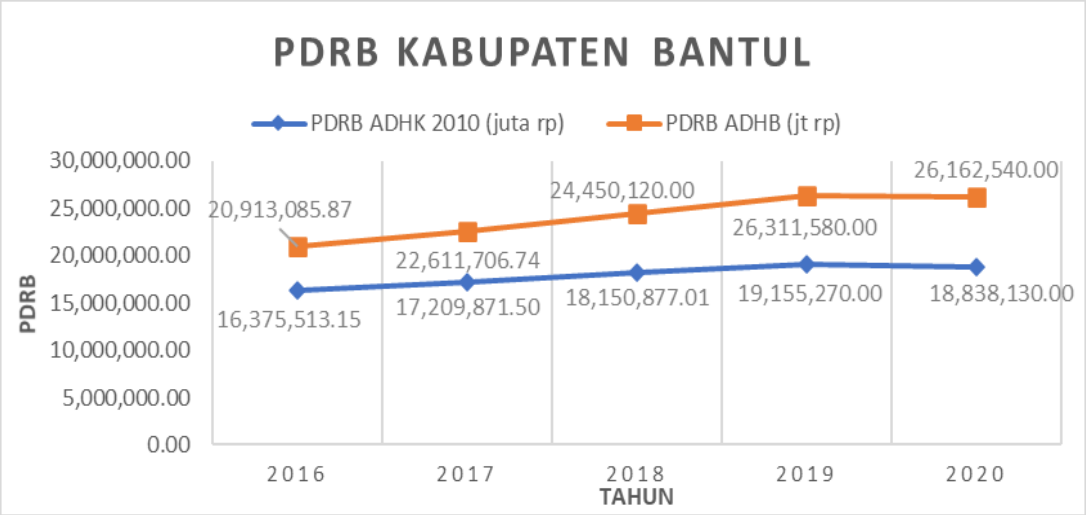

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 trilliun rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Grafik PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku. Periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 trilliun rupiah.

Jika diperhatikan berdasar atas harga konstan perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, besarnya PDRB mengikuti tren yang berbentuk kuadratik. Besarnya PDRB mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian pada

tahun 2021 dan selanjutnya perlu diambil tindakan antisipasi agar penurunannya tidak semakin besar.

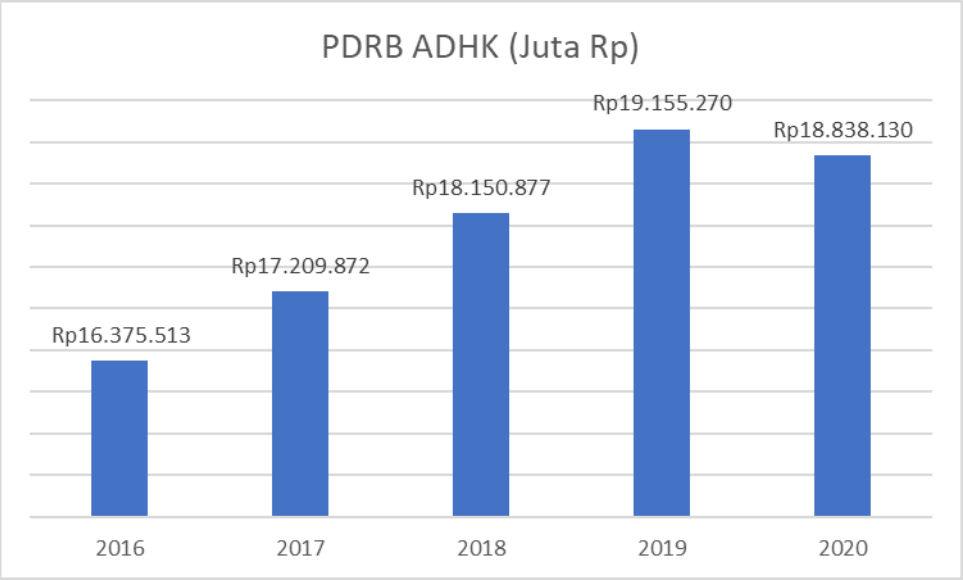

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dalam rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

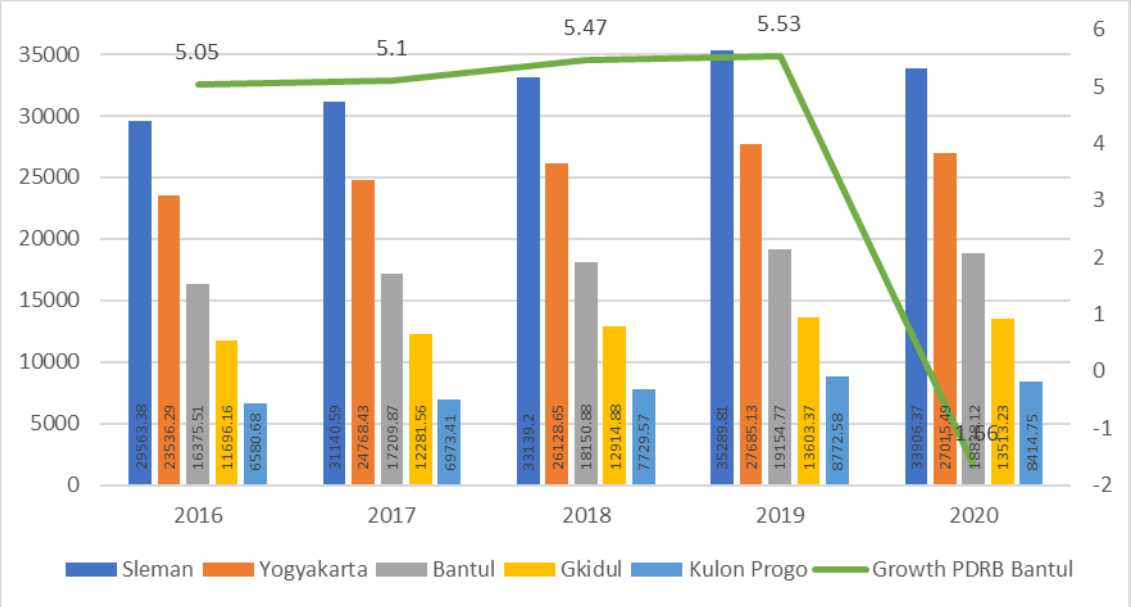

Sumber:Tabel Dinamis, BPS, 2021

Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010

Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY 2016-2020

Secara umum kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY berada dalam posisi ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 18,53%, kontribusi Sleman sebesar 33,66% dan kontribusi Kota Yogyakarta sebesar 26,67%. Sedangkan kontribusi kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 13,22% dan kontribusi Kulonprogo sebesar 7,91%. Pola kontribusi semua kabupaten/kota tersebut cenderung stabil dalam rentang tahun 2016-2020.

Apabila PDRB dilihat dengan menggolongkan lapangan usahanya, maka dengan menggunakan pengelompokan 17 sektor hasil perhitungan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,33	13,85	13,63	13,07	14,12
2	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,57	0,54	0,51	0,47
3	Industri Pengolahan	15,21	15,25	15,22	15,18	14,84
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,29	9,38	9,72	9,75	8,5
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,47	8,61	8,69	8,65	8,46
8	Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,74	4,72	4,85	4,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,67	11,73	11,69	11,92	10,73
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,38	7,32	7,27	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,8	2,77	2,83	2,94	2,88
12	Real Estate	6,58	6,57	6,56	6,71	6,9
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,48	0,47	0,49	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Perta-hanan, dan Jaminan Sosial	7,55	7,77	7,73	7,63	7,72
15	Jasa Pendidikan	6,87	6,82	6,8	6,9	7,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,85	1,81	1,85	2,28
17	Jasa-jasa Lainnya	1,98	2,01	2,04	2,05	1,86
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum; yang masing-masing berkisar kurang lebih 14 persen, 15 persen dan 11 persen. Pada tahun 2016-2020 sektor pertanian dan industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang menurun secara bertahap (kecuali sektor pertanian tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan).

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan pula. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY tahun 2016-2020.

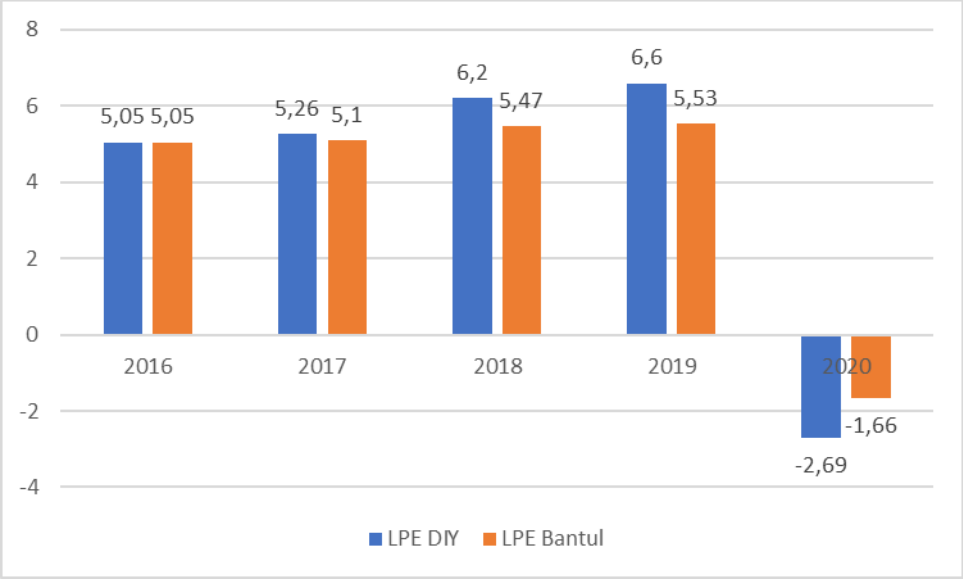

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besar peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan

tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen. Tahun 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY pada tahun 2016 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan DIY.

Tren dari data berbentuk kuadratik dengan puncak, perlu usaha yang besar agar tahun-tahun berikutnya besar pertumbuhan ekonominya tidak mengikuti tren seperti di atas. Besaran pertumbuhan ekonomi harus diupayakan menjadi positif kembali agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan

Apabila dilihat dari struktur PDRB maka besarnya pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

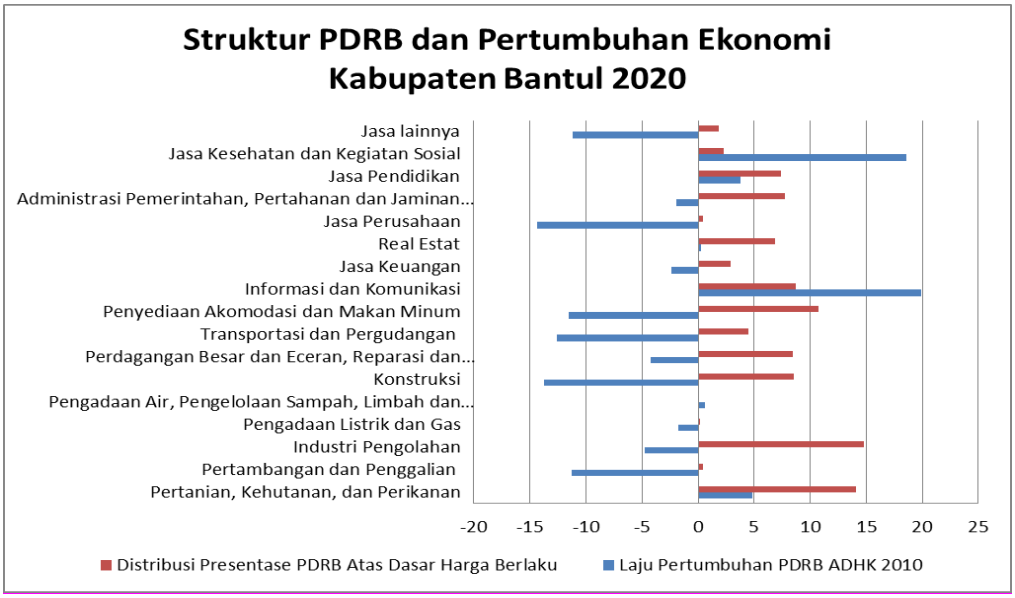

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan kategori usaha yang lain. Pertanian mempunyai pertumbuhan yang juga positif

meskipun lebih rendah dibanding kedua sektor tersebut di atas. Kontribusi terbesar masih disumbang oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku apabila dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer, dapat dilihat pada gambar berikut.

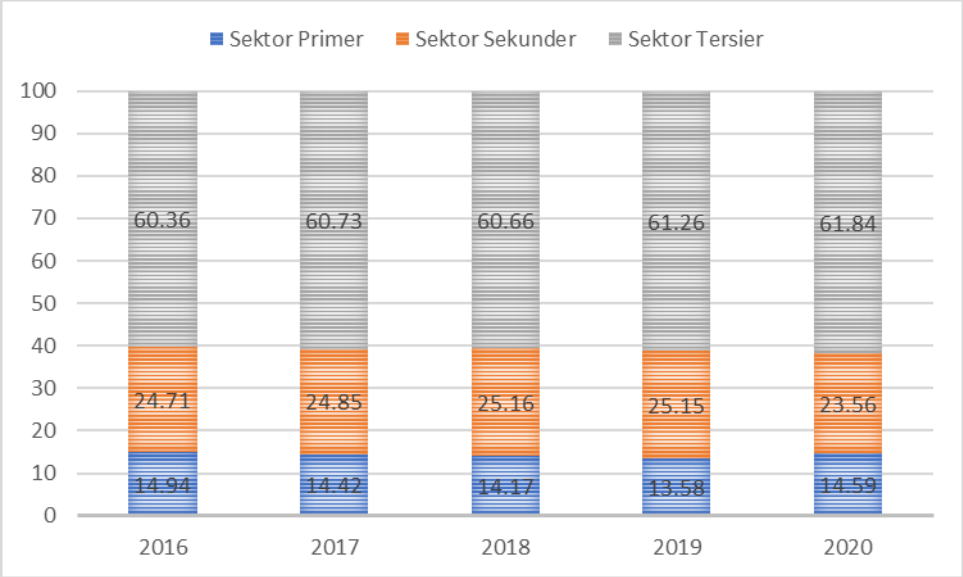

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2016-2019 pangsa sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun, baru tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,01 persen. Sebaliknya sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) konsisten rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit sekali mengalami

penurunan. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen dari total PDRB Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,52	2,5	2	0,13	4,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,06	1,57	-0,27	-11,32
3	Industri Pengolahan	5,43	6,39	5,52	5,38	-4,8
4	Pengadaan Listrik, Gas	15,58	3,99	4,85	4,73	-1,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,96	3,18	5,16	8,25	0,61
6	Konstruksi	4,07	5,93	7,24	5,17	-13,78
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	6,54	5,79	5,64	5,19	-4,2
8	Transportasi dan Pergudangan	4,23	3,88	5,51	6,46	-12,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,19	5,7	6,75	8,68	-11,55
10	Informasi dan Komunikasi	8,41	5,87	6,18	7,29	19,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	2,82	6,59	9,97	-2,41
12	Real Estate	5,82	4,97	5,41	6,43	0,23
13	Jasa Perusahaan	4,26	4,27	5,37	7,38	-14,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	4,98	4,55	3,42	-1,96
15	Jasa Pendidikan	2,95	5,16	6,08	6,65	3,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	5,13	4,62	7,02	18,59
17	Jasa Lainnya	6,02	5,61	7,14	6,09	-11,21
	PDRB	5,05	5,1	5,47	5,53	-1,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2018 dan 2019 melaju relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,1 persen, sementara tahun 2018 tumbuh menjadi 5,47 persen dan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,53 persen.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Hanya ada beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di antaranya adalah sektor informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 19,94%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (tumbuh sebesar 18,59%) dan sektor

pertanian yang tumbuh sebesar 4,86%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan di antaranya adalah sektor jasa perusahaan (-14,4%), sektor konstruksi (-13,78%), sektor transportasi dan pergudangan (-12,58%), sektor akomodasi dan makan minum (-11,55%), sektor pertambangan dan penggalian (-11,32%) dan sektor jasa lainnya (-11,21%).

Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul dalam pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

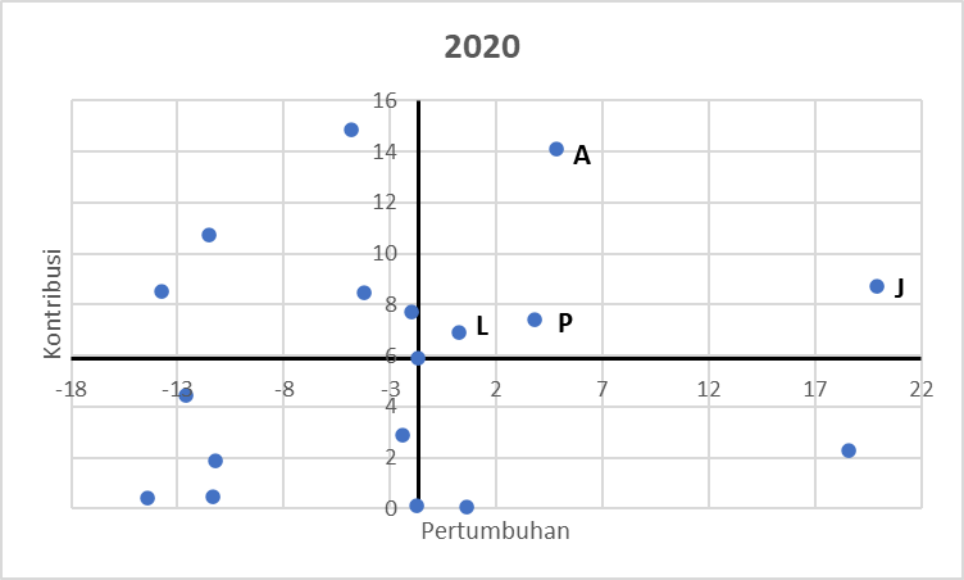

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Keterangan
A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
J: Informasi dan Komunikasi
P: Jasa Pendidikan
L: Informasi dan Komunikasi.

Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Dari pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat ditunjukkan perubahan posisi sektor-sektor di Kabupaten Bantul tahun 2016, 2018 dan 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata

Tahun	2016	2018	2020
Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul	• Industri pengolahan • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	• Industri pengolahan • Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. • Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makanan dan minuman • Informasi dan Komunikasi • Jasa Pendidikan	• Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Informasi dan Komunikasi • Real Estate • Jasa Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 ada beberapa lapangan usaha yang konsisten tumbuh dan berkontribusi di atas angka rata-rata Kabupaten Bantul. Lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makanan dan minuman dan informasi dan komunikasi.

Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 hanya sektor informasi dan komunikasi yang tetap tumbuh dan berkontribusi di atas rata-rata, sementara sektor lain yang juga tumbuh di atas rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan kondisi pandemi telah mengubah komposisi sektor ekonomi.

2.2.2. PDRB Perkapita

Perkembangan nilai PDRB per kapita dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Nilai PDRB per kapita diukur menggunakan harga berlaku tahun 2020, yaitu sebesar 25,4 juta rupiah. Dengan perhitungan menggunakan harga konstan tahun 2010 tercatat bahwa nilai PDRB per kapita sebesar 18,29 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 mencapai 4,32%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020.

2.2.3. Laju Inflasi

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian.

Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Kondisi inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

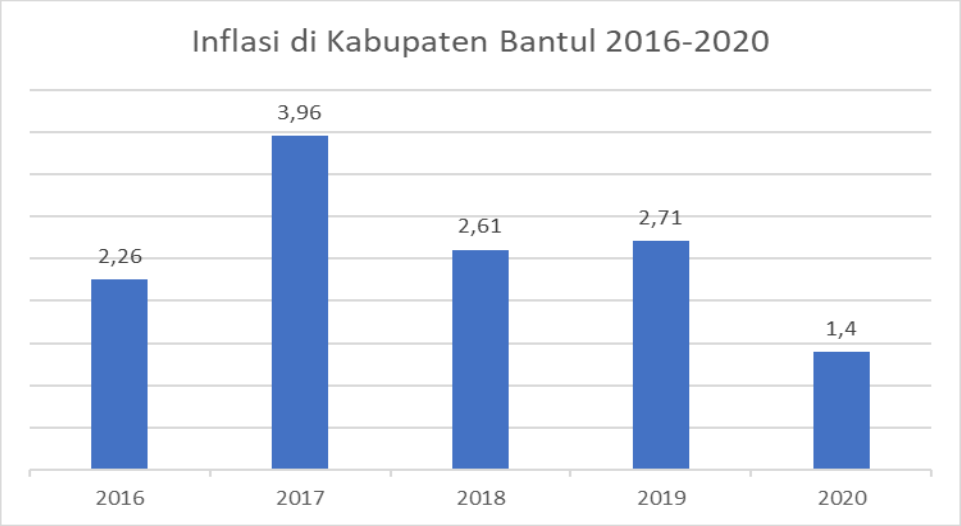

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020

Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren kuadratik yang mencapai posisi tertinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, selanjutnya selama tahun 2018 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif, dalam arti mengalami peningkatan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020.

2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

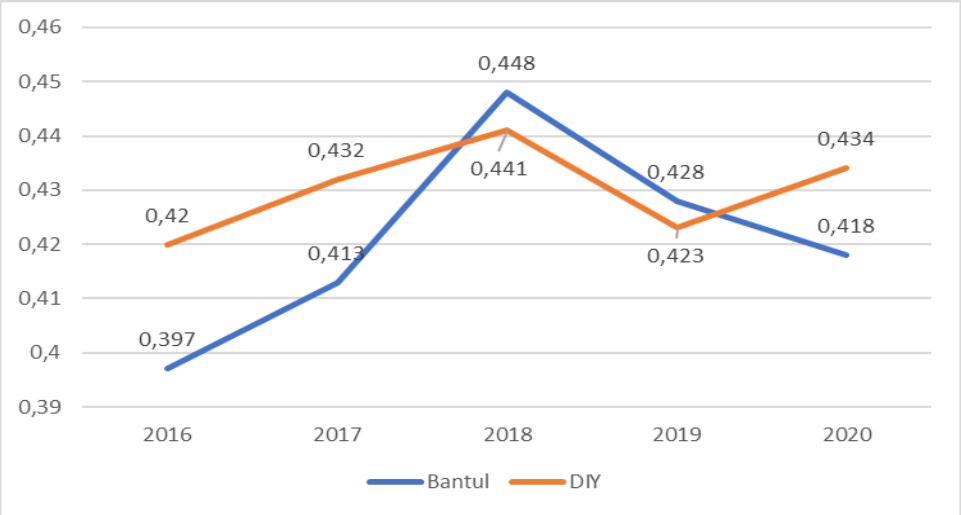

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2020 berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan "moderat". Indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016, 2017 dan 2020 lebih baik dibandingkan DIY. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan provinsi.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian. Karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan.

2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata

pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tingkat kemiskinan pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten Bantul dengan DIY disajikan pada gambar berikut:

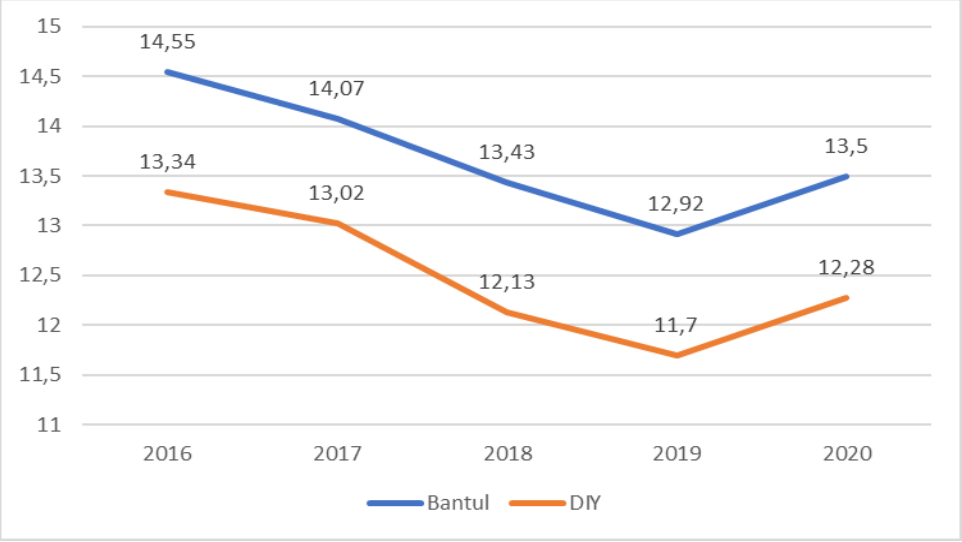

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020. Selama periode 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selalu lebih tinggi dibandingkan DIY.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS di atas digunakan sebagai indikator makro daerah, sehingga tidak dapat menampilkan data *by name by addres* yang dibutuhkan dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel berikut menunjukkan data jumlah penduduk miskin di setiap kapanewon menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon

No.	KAPANEWON	Penduduk tahun 2020	Jumlah	%
1	BAMBANGLIPURO	41.706	12.637	30,30
2	BANGUNTAPAN	113.298	15.551	13,73
3	BANTUL	64.652	12.341	19,09
4	DLINGO	39.998	14.518	36,30
5	IMOGIRI	63.835	21.458	33,61
6	JETIS	58.631	15.383	26,24
7	KASIHAN	104.599	18.639	17,82
8	KRETEK	30..764	7.131	23,18
9	PAJANGAN	36.551	15.793	43,21
10	PANDAK	52.036	19.824	38,10
11	PIYUNGAN	52.862	13.603	25,73
12	PLERET	48.497	14.916	30,76
13	PUNDONG	35.666	12.822	35,95
14	SANDEN	31..810	9.369	29,45
15	SEDAYU	48.156	13.456	27,94
16	SEWON	100.563	18.968	18,86
17	SRANDAKAN	31.082	10.562	33,98
TOTAL		**954.706**	**246.971**	**25,87**

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) No. 146 tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan kapanewon dengan persentase individu desil 1-4 terbanyak adalah Kapanewon Pajangan, Pandak, Dlingo, Pundong, Imogiri, dan Srandakan, sementara data jumlah penduduk miskin yang sebesar 246.971 berbeda dengan data dari BPS yang sebesar 138.660 karena data penduduk miskin pada DTKS mencakup penduduk miskin dan penduduk rawan miskin.

2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	TPT	TPT DIY
1	2016	3,00	2,72
2	2017	2,87	3,02
3	2018	2,72	3,37
4	2019	3,06	3,18
5	2020	4,06	4,57

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2021

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 3,06% di tahun 2019 menjadi 4,06% di tahun 2020. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul dibandingkan DIY lebih rendah, kecuali tahun 2016. Jumlah pengangguran di Bantul pada tahun 2017 sebanyak 17.466 orang, sempat menurun menjadi 15.730 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 17.700 orang pada

tahun 2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61
D.I Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, levelnya mencapai 80,01. Capaian level IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 78,42. Komponen IPM Kabupaten Bantul adalah indikator usia harapan hidup (UHH) 73,86 tahun, angka harapan lama sekolah (HLS) 15,17 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 9,55 tahun, dan pengeluaran perkapita riil (KAP) Rp15,52 juta yang disesuaikan.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga perkembangan Kota Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Bantul, karena daya tampung wilayah Kota Yogyakarta yang sudah tidak memungkinkan.

2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

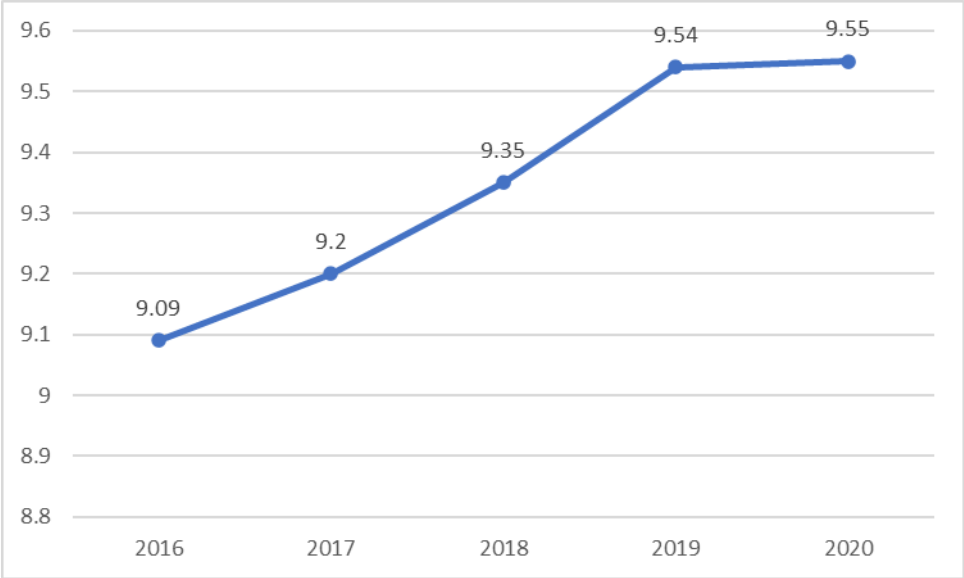

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,09 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,55 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

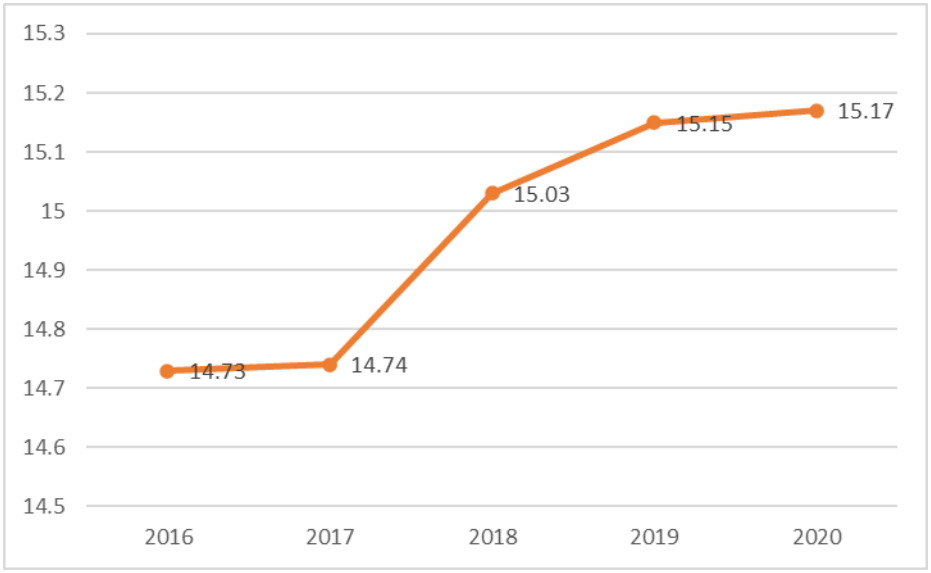

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 15,17 tahun. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

2.2.10. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat dinilai dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi salah satu IKU Bupati. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

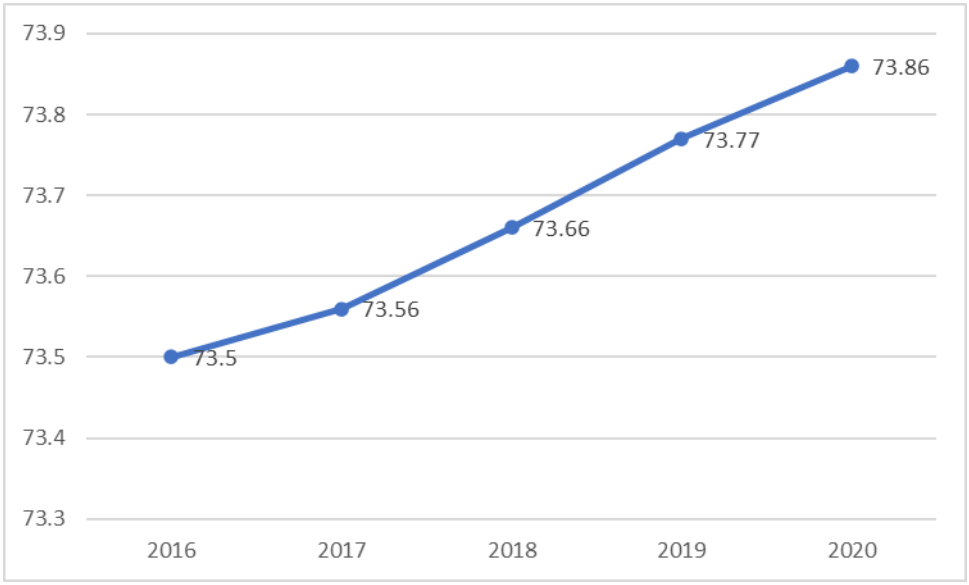

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu 73,86 tahun, 2019 yaitu 73,77 tahun meningkat dari tahun 2018 sebesar 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (*Incidence Rate*/ IR) DBD serta penyakit tidak menular (PTM).

2.2.11. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

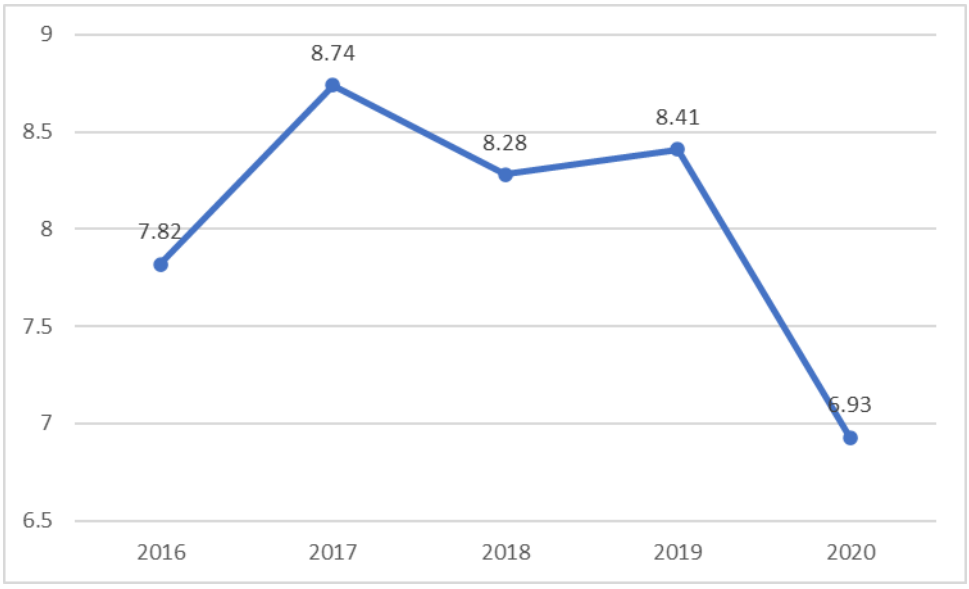

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perubahan angka kematian bayi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 cenderung menurun cukup signifikan dibanding tahun 2019. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93 terjadi penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,41 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan kelainan bawaan. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada berikut.

Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi

No	Sebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bayi Berat Lahir Rendah	22	22	31	28	16
2	Asfiksia	24	14	32	27	16
3	Kelainan bawaan	23	20	19	20	26
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	52	25	35	17
	J u m l a h	94	108	107	109	75

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada

bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.12. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

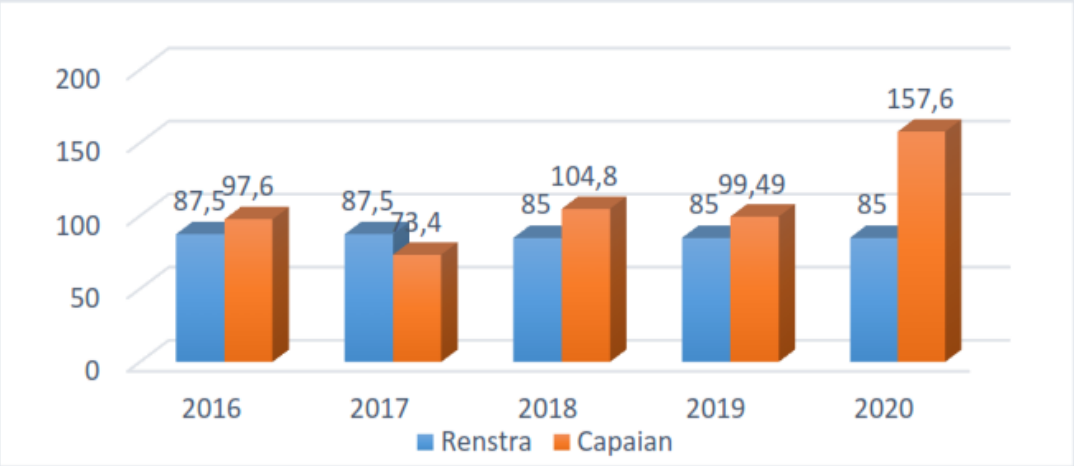

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kasus kematian ibu atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdarahan	2	2	5	3	1
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5
3	Emboli air ketuban	0	0	0	1	0
4	Infeksi	2	2	0	-	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0
9	Kanker	0	0	0	0	2
10	Syok Septik/Hypovolemik	0	0	0	0	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2
	J u m l a h	12	9	14	13	20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu: 1) program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2) program pencegahan penyakit; 3) program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Kalurahan Siaga, ambulan kalurahan, dan donor darah; 4) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi; 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) diintegrasikan dengan kelas ibu; 6) membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); dan 7) peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED); serta 8) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara

secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan SPM meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

2.3.1.1. Pendidikan

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan Kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	7	553	25.793	2.886	1.674	58%
2.	KB	0	492	8263	1605	0	0
3.	TPA	0	56	811	214	0	0
4.	SPS	0	237	3.604	778	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Indikator untuk mengukur tingkat Pendidikan PAUD antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam

Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 usia PAUD adalah 4-6 tahun. Sedangkan APM menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD.

Tingkat Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh nilai APK dan APM sebagai berikut:

Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK PAUD	93,44	98,20	100,70	106,24	97,70
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM PAUD	83,73	88,68	86,54	83,84	81,20

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai APK yang semakin tinggi dari 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Namun turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal.

Nilai APM yang menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa daya serap sistem pendidikan yang ada masih belum mencukupi, fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia belum dapat dimanfaatkan penduduk sesuai usia PAUD dalam arti bahwa penduduk usia PAUD belum semua dapat bersekolah tepat waktu.

Dalam perkembangannya sesuai Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara Holistik Integratif pula.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI merupakan layanan yang kompleks dan menyeluruh, sehingga dibutuhkan sinergi dari lintas sektor, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD), Polres, Kapanewon, Kalurahan, Organisasi Mitra PAUD, Posyandu, Tokoh masyarakat dan Paguyuban Orangtua serta Komite Sekolah.

Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Bantul telah mencapai 90% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2020 PAUD HI tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi Covid 19, namun dari hasil pemantauan perkembangan anak oleh pendidik/guru, layanan PAUD HI tetap dilaksanakan meski sangat terbatas.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik.

Kondisi pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	83	73.523	5.033	2552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,7
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai akreditasi yang diperoleh lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 24 Jumlah Sekolah Menurut Peringkat Akreditasi yang Diperoleh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Peringkat Akreditasi				
		A	B	C	BT	Jumlah
1	SD	306	56	0	2	364
2	MI	24	8	0	1	33
3	SMP	64	22	3	4	93
4	MTs	18	6	0	1	25

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud, 2021

Partisipasi peserta didik jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SLTP/MTs ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	101.78
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	102.86
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	92,96
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	79,01
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI			100	100	99,80
	APS SMP/Mts			100	99,74	99,36

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2020 sebesar 101,78%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,84 % dari capaian tahun 2019 sebesar 95,26. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,48% menjadi 102,86%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2020 adalah 92,96%, dan APM SMP/MTs tahun 2020 adalah 79,01%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterjangkauan dan pemerataan pendidikan dengan melihat proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan. Semakin kecil angka putus sekolah berarti semakin baik pendidikan di wilayah tersebut

Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah					
	SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin turun dan pada jenjang SMP/MTs sudah mencapai angka 0 berarti tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah semakin baik, namun masih belum merata.

Beberapa strategi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan indikator di atas diantaranya adalah :

(1) Program Wajar 9 tahun dilakukan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan pengembangan kompentensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;

(2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

c. Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SKB					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	143	296	170	317	386
	- Jumlah Tutor	9	36	36	36	31
2	PKBM					
	- Jumlah Lembaga	33	27	31	31	26
	- Jumlah Warga Belajar	1762	1768	2570	3115	2771
	- Jumlah Tutor	210	423	135	226	404
3	LKP					
	- Jumlah Lembaga	62	44	44	34	42
	- Jumlah Warga Belajar	3276	3452	2272	2296	2059
	- Jumlah Tutor	210	423	518	315	264
4	TBM					
	- Jumlah Lembaga	35	47	53	62	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
5	Rumah Pintar					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
6	*Homeschooling*					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar	21	21	25	-	-
	- Jumlah Tutor	10	10	10	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Keterangan :

SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
Rumpin : Rumah Pintar;

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2020 jumlah data rumah pintar dan *homeschooling* nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan ijin.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	563	469	1,032
2	Paket B	466	203	669
3	Paket C	998	458	1.456

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD	98,7	98,75	108.41	106.24	97,70
2.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	92,77
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	97,23
3.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	86,55
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	76,31
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	9,2	9,35	9,55
5	Peringkat Rata-rata Nilai USM					
	- Nilai USM SD / MI	-	4	4	3	0
	- Nilai USM SMP / MTs	-	3	3	3	0
6	Jumlah Prestasi Non Akademik TK Nasional (Buah)		6	8	4	4

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Kelulusan					
	- SD / MI	100	100	100	100	100
	- SMP / MTs	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM)					
	- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	109,61	108,56	101,27
	- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	108,54	111,18	105,93
9	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	- SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2020 nilai APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs, angka capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu yang sekolah di jenjang atasnya. Selain itu, terdapat siswa yang bersekolah di luar wilayah Bantul.

2.3.1.2. Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	1.137	1.141	1.141	1.139	1.139
2	Jumlah balita	59.720	58.255	60.087	59.522	59.947
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,04	19,59	18,99	19,2	20,3
4	Cakupan layanan posyandu	52 (balita)	51 (balita)	53 (balita)	52 (balita)	49 (balita)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1.000 Balita sebesar 20,3 berarti dalam 1.000 Balita terdapat 20 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 49 Balita.

2) Ketersediaan Fasilitas

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	11	10	11	10
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	5	5	6	6	6
4	Klinik Utama	2	3	2	2	2
5	Klinik Pratama	47	55	56	61	70
	Klinik Pratama Rawat Jalan	38	45	45	50	59
	Klinik Pratama Rawat Inap	9	10	11	11	11
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	4	5	0	0	0
7	Apotek	123	125	140	157	175
8	Klinik kecantikan estetika	10	9	9	8	8
9	Laboratorium	4	3	3	3	3
10	Toko obat	4	5	7	8	10
11	Optik	12	12	13	7	7
12	Puskesmas rawat inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas pembantu	65	65	65	65	65
15	Puskesmas keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu	1132	1132	1142	1142	1139
17	Posyandu lansia	901	967	1034	1034	1034

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2020 terdapat RS sejumlah 10 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas yang terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap, dan 11 Puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi Puskesmas sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NomornHK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi puskesmas.

Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
1	Pajangan	√			√	tidak dilaksanakan akreditasi	Utama
2	Pleret	√			√		Utama
3	Piyungan	√			√		Paripurna
4	Banguntapan II	√			√		Utama
5	Srandakan	√		√			Utama
6	Sanden	√			√		Madya
7	Pundong	√			√		Madya
8	Bantul I	√			√		Utama
9	Imogiri I	√		√			Utama
10	Bambanglipuro			√			Utama
11	Jetis I	√		√			Utama
12	Jetis II			√			Paripurna
13	Kasihan I		√		√		Utama
14	Pandak I		√		√		Utama

No.	Puskesmas	2016	2017	2018	2019	2020	Status
15	Pandak II		√		√		Utama
16	Kretek		√				Utama
17	Bantul II		√				Utama
18	Imogiri II		√				Madya
19	Dlingo I		√				Madya
20	Dlingo II		√				Utama
21	Sewon I		√				Madya
22	Sewon II		√				Utama
23	Sedayu I		√				Madya
24	Sedayu II		√				Madya
25	Banguntapan I		√				Utama
26	Banguntapan III		√				Madya
27	Kasihan II		√				Madya

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B-Umum	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolukito	B-Umum	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C-Umum	Akreditasi
4	RSU Nur Hidayah	D-Umum	Akreditasi
5	RSU Santa Elizabeth	D-Umum	Akreditasi
6	RSU Permata Husada	D-Umum	-
7	RSU Rahma Husada	D-Umum	Akreditasi
8	RSU Rajawali Citra	D-Umum	Akreditasi
9	RSU Griya Mahardika	C-Umum	Akreditasi
10	RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah	C-Khusus KIA	Akreditasi
11	RSK Bedah Ringroad Selatan	C-Khusus Bedah	Akreditasi
12	RSK Paru Respira	C-Khusus Paru	Akreditasi
13	RSK Ibu dan Anak Adinda	C-Khusus KIA	-

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
14	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C-Khusus KIA	-
15	RSK Bedah Adelia	C-Khusus Bedah	Akreditasi
16	RS UII	C-Umum	-

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain fasilitas fisik sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas lain yang disediakan pemerintah Kabupaten Bantul adalah pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN. Pada tahun 2020 kepesertaan JKN sebesar 841.108 jiwa atau 88,10%. Data kepesertaan JKN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Jaminan Kesehatan Nasional				
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	53,61	445.505	46,66
1.2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	5,64	50.887	5,33
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	26,14	224.980	23,57
1.4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	10,70	88.688	9,29
1.5	Bukan Pekerja	32.340	3,90	31.048	3,25
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,50	841.108	88,10
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	118.210	12,50	113.598	11,90
	Total penduduk Kab Bantul	945.441	100,00%	954.706	100,00

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Dari total kepesertaan JKN tersebut, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2020 merupakan kepesertaan dengan jumlah terbesar yaitu 445.505 jiwa atau 46,66%. Kepesertaan JKN-PBI dari APBD sebesar 50.887 jiwa atau 5,33%. Hal tersebut merupakan perubahan program pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin/Jamkesda menjadi peserta JKN. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 224.980 jiwa atau 23,57%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 88.688 jiwa atau 9,29% dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 31.048 atau 3,25%. Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 113.598 jiwa atau 11,90%, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait. Tingginya jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.

3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Umum	127	154	238	307	417
2	Jumlah Dokter Spesialis	61	65	202	215	304
3	Jumlah Penduduk	928.676	931.356	939.718	949.325	954.706
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,16	0,25	0,32	0,43
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,065	0,070	0,21	0,23	0,32

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter umum per 1000 penduduk mencapai 0,43 artinya satu dokter melayani 4.367 penduduk. Hal

ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara rekruitmen tenaga dokter baik melalui tenaga kontrak maupun ASN.

4) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia. Pada Tahun 2020 telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1.034, artinya telah terdapat Posyandu Lansia di setiap padukuhan di Kabupaten Bantul. Tidak ada peningkatan jumlah posyandu lansia dari tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

b. Kesehatan Masyarakat

1) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita yang diukur	48.750	48.895	48.943	48.502	18.621
Jumlah Balita Gizi Buruk	195	202	202	199	57
Prevelensi Balita Gizi Buruk	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%	0,31%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pengukuran berat badan balita pada tahun 2020 dilaksanakan secara sampling. Balita status gizi buruk sebesar 0,31%. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di

dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut.

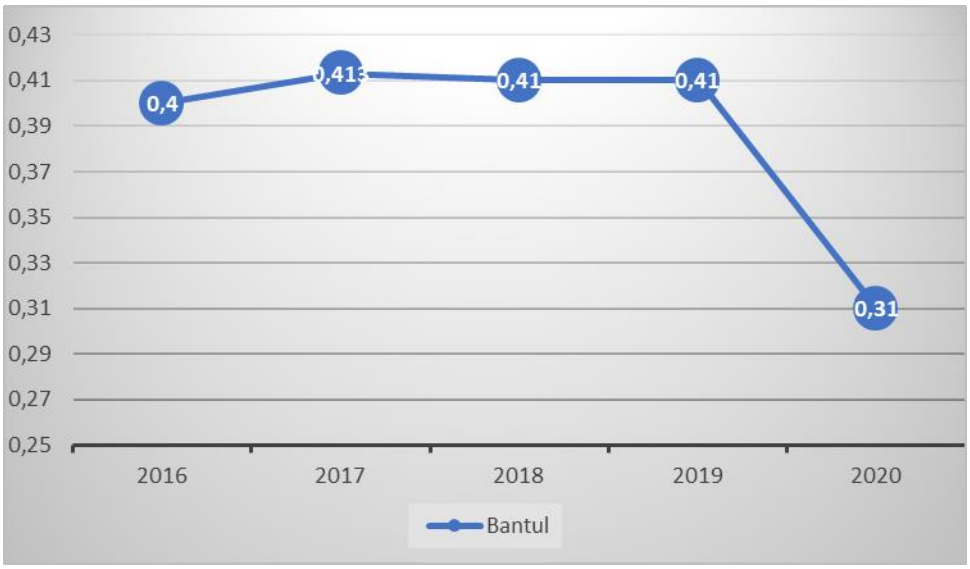

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

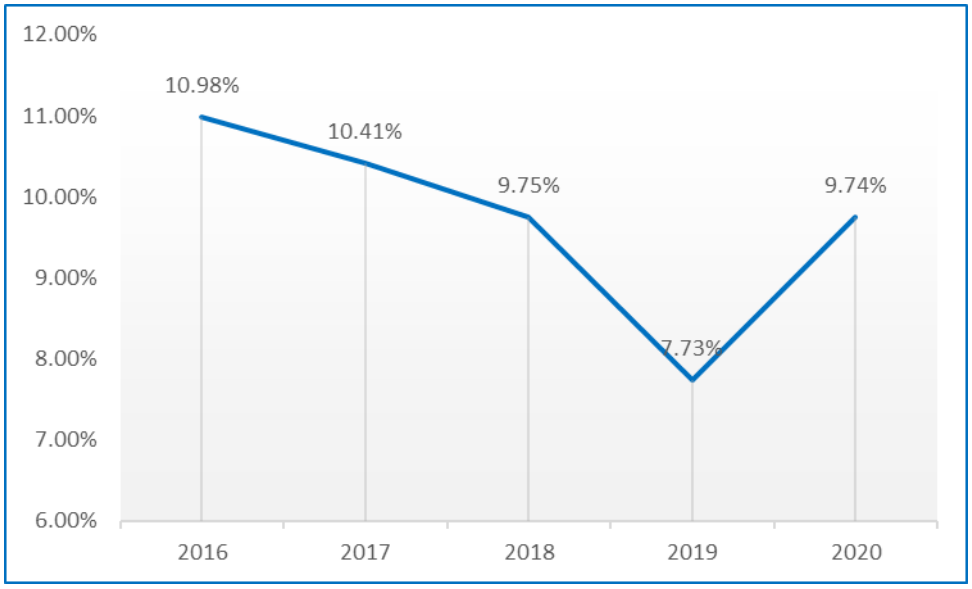

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Bantul Tahun 20216-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48,476	5,325	10.98%
2017	47,899	4,987	10.41%
2018	48,553	4,733	9.75%
2019	48,181	3,725	7.73%
2020	18,638	1,816	9.74%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul

No	Analisa Penyebab	% Balita Stunting
1	Keluarga Gakin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53,00%	53,10%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61,00%	62,20%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59,00%	59,15%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

3) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

4) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat. Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Bambanglipuro	39	6.713	34
Banguntapan	20	7.443	89
Bantul	26	7.377	136
Dlingo	1465	5.131	66
Imogiri	294	8.968	49
Jetis	90	7.500	49
Kasihan	225	9.166	79
Kretek	8	4.391	18
Pajangan	507	5.590	56
Pandak	369	8.311	80
Piyungan	161	6.639	31
Pleret	83	6.677	71
Pundong	33	6.981	82

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/ Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Sanden	76	5.482	42
Sedayu	435	6.203	30
Sewon	47	9.228	35
Srandakan	97	5.369	16
Jumlah Rumah Tangga	3.975	117.169	963

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2021

5) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap kalurahan.

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Penyakit Menular**					
1	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	295	175	344	112,9	343
2	Jumlah Kasus HIV	144	49	184	127	103
3	Jumlah Kasus AIDS	55	9	36	22	38
4	Jumlah Kasus Syphilis	18	100	8	64	3
5	Kusta	11	7	15	8	4

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah Kasus Campak	124	-	3	1	-
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	744	1.197	1.093	941	424
8	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.822	5.481	4.877	4.622	6.005
9	AFP Rate (non polio) < 15 th	6	10	9	5	3
10	DBD	2.442	538	181	150	128
11	Malaria	-	3	-	7	3
12	Leptospirosis	74	94	93	92	79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	IR (‰)	JUMLAH MENINGGAL	CFR (%)
1	2016	2442	2,62	4	0,16
2	2017	538	0,55	2	0,37
3	2018	182	0,18	0	0
4	2019	1424	1,5	4	0,6
5	2020	1222	1,3	4	0,3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kesakitan DBD pada tahun 2020 sebesar 129 per 100.000 penduduk (1.222 kasus) menurun dibanding tahun 2019 yaitu 140 per 100.000 penduduk (1424 kasus). Pada tahun 2020 terdapat empat kematian penderita DBD, sama dibandingkan tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader padukuhan, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan

koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue; Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama lintas program dan lintas sektor; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

2) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.

Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul masih terkait dengan penemuan kasus yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan. Cakupan Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) yang diobati per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (*Success Rate*/SR) dapat dilihat pada grafik berikut.

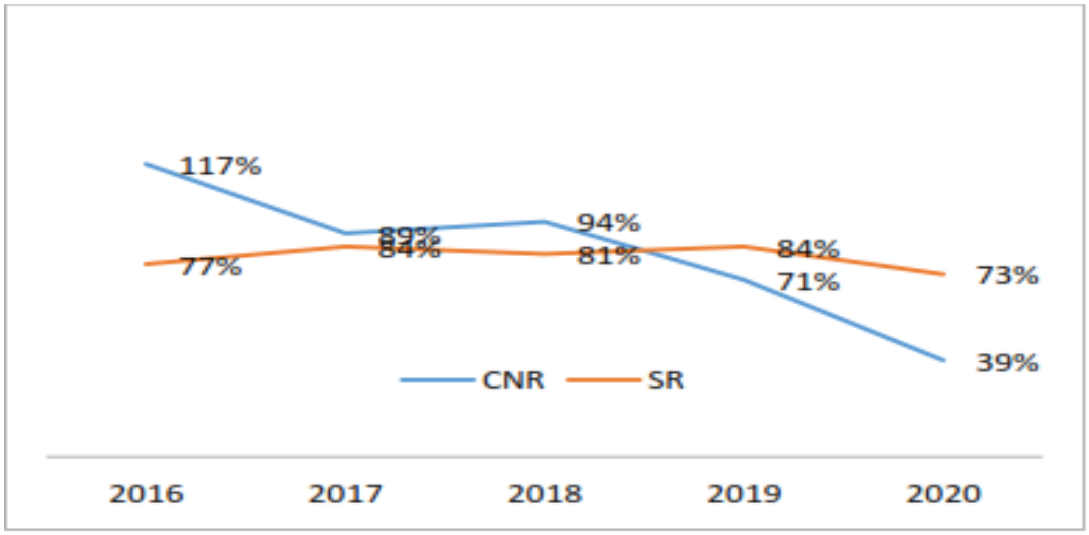

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020, pada tahun 2020 ini angka penemuan TBC mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kunjungan pasien kelayanan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi angka penemuan kasus TBC dilayanan. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TBC yang belum mencapai target hal ini disebabkan masih tingginya angka gagal, putus berobat dan meninggal.

Angka penemuan kasus TB *(case detection rate)* terlihat menurun, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*). Namun demikian, angka kesembuhan (cure rate) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR). Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pemutusan rantai penularan TBC.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan

kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

3) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 79 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 92 kasus. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2020 adalah 8,29 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,79 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah.

4) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan

fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut disajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2020.

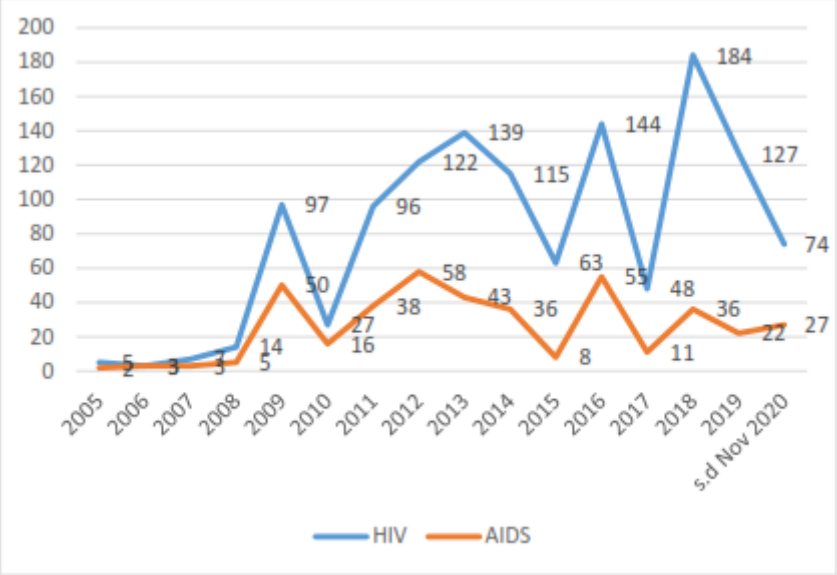

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2020 sebesar 0,01% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari 127 kasus menjadi 74 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2020 digambarkan dalam grafik berikut.

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit); Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Puskesmas; Klinik layanan IMS di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan VCT; Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi metadhone, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS); Klinik pelayanan VCT di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth,

RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan Care Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di 2 (dua) RS dan 1 (satu) Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjolukito dan Puskesmas Kretek; Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA); dan Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penyakit Tidak Menular					
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	254	74	19	44	6
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	17	4	31	45	2
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	26	14	9	12	81
4	Diabetes Melitus	20.969	50.242	33.013	43.696	18.516
5	Gangguan Jiwa	3.875	6.864	6.844	9.761	2.097
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	44.954	50.242	69.228	91.266	58.069
7	Obesitas	398	406	994	239	NA

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

1) Diabetes Mellitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)

Tahun 2019 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular DM dan PJPD.

Pada tahun 2020 pelayanan pada DM sebanyak 18.516 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 43.696 kasus, sedangkan pelayanan pada PJPD sebanyak 58.069 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 91.266 kasus.

2) Deteksi Dini NAPZA

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes bekerjasama dengan BNNK Bantul dan RSPAU dr S. Harjolukito serta Paskas TNI AU dan Kodim 0729 Bantul.

3) Pengendalian kasus kesehatan jiwa

Pada tahun 2020 pelayanan pada ODGJ sebanyak 2.097 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 9.761 kasus.

e. Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus. pada tahun 2019 masih didominasi dengan kejadian Keracunan Makanan yaitu 9 (Sembilan) kasus diikuti adanya dugaan kasus Pertusis, gastroenteritis dan GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) masing-masing 1 (satu) kasus. Capaian Accute Flaccid Paralysis (AFP) sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap adanya virus Polio liar di masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus. Surveilans Campak mencatat sebanyak 199 suspek dengan hasil konfirmasi Campak positif 1 kasus dan Rubella positif sebanyak 14 kasus.

Pada tahun 2020 terdapat 3 jenis kejadian luar biasa yaitu: GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), keracunan makanan dan

wabah Covid-19 (merscov) yang masih menunjukkan peningkatan, data sampai dengan per 31 Juli 2021 terkonfirmasi sebanyak 42.374 positif terjangkit virus dengan 988 kasus kematian. Sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan per 31 Juli 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul (per 31 Juli 2021)

No.	Kapanewon	Dalam Perawatan	Meninggal	Sembuh	Jumlah Kasus Positif
1	Bambanglipuro	894	31	1.106	2.031
2	Banguntapan	2.229	121	3.734	6.084
3	Bantul	1.855	87	2.121	4.063
4	Dlingo	170	24	437	631
5	Imogiri	887	63	1.679	2.629
6	Jetis	830	83	2.455	3.368
7	Kasihan	1.014	65	2.275	3.354
8	Kretek	406	35	824	1.265
9	Pajangan	406	34	1.030	1.470
10	Pandak	777	43	1.455	2.275
11	Piyungan	574	24	634	1.232
12	Pleret	660	76	1.461	2.197
13	Pundong	468	27	689	1.184
14	Sanden	268	35	1.342	1.645
15	Sedayu	407	50	1.828	2.285
16	Sewon	1.389	136	3.663	5.188
17	Srandakan	341	54	1.078	1.473
	Jumlah	13.575	988	27.811	42.374

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

f. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Kesehatan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	96,77	72,8	108,3	99,49	157,6

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	7,65	8,74	8,28	8,33	6,93
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,40	0,41	0,41	0,41	0,31
Prevalensi Penderita HIV (Angka)	0,083	0,09	0,19	0,12	0,01
Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD) per 100.000 Penduduk	237,75	57,98	19,52	140	128
Net Death Rate per 1000 pasien	18,69	16,98	22,62	18,7	21,17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari data dapat kita lihat adanya peningkatan nilai Angka Kematian Ibu pada tahun 2020, kondisi ini disebabkan karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan akibat pandemic covid-19.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2017	624.47	463.23	74.18	161.24	25.82
2018	624.47	465.73	74.58	158.74	25.42
2019	624.47	468.97	75.10	156.64	24.90
2020	624.47	470.98	75.42	153.49	24.58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan dikabupaten bantul bisa dalam kondisi mantap.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah

Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik)			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

Dapat diketahui bahwa belum semua DI memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpoteni menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung.

Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
		Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
1	2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2	2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
3	2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
4	2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
5	2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

c. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran.

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021
Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

d. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakamanan umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu terdapat juga lahan pemakaman di Tegaldowo, Bantul. Lahan pemakaman disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagi warga perumahan maupun masyarakat umum namun pada masa pandemi dapat dimanfaatkan bagi jenazah yang meninggal akibat Covid 19. Sampai saat ini belum ada jenazah

Covid-19 yang dimakamkan di Tilaman, karena tidak ada pertentangan dari warga untuk memakamkan jenazah Covid 19 di pemakaman warga.

e. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Peraturan Bupati Bantul nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kapanewon : RDTR dan PZ Kapanewon Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu (2014) RDTR dan PZ Kapanewon Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan) (2015) RDTR dan PZ Kapanewon Pundong dan Jetis (2016) RDTR dan PZ Kapanewon Bambanglipuro, Dlingo,(2017) Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong (2017) RDTR dan PZ Kapanewon Sewon dan Kasihan (2018) RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaaan (2018) Draft RDTR Pansela, Perkotaan, dan Perdesaan (2020)
7.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) : RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018) RTBL Zona pengembangnan Kawasan Parangtritis II (2018) RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negoro Babadan, Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020)
8.	Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020)
9	Masterplan dan DED : Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) Masterplan Watu Amben (2019)

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul saat ini masih berupa kajian yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. Sampai saat ini dokumen RDTR yang telah disusun dalam Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan masuk dalam RDTR Perkotaan. RDTR Pansela ditargetkan selesai akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, dan RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2022. RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur ditargetkan selesai tahun 2023. Proses penyusunan RDTR yang membutuhkan waktu cukup lama ini, disebabkan antara lain oleh tata cara dan tata kala proses penyusunan dan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan unsur eksternal lintas sektor dan instansi, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, maupun Kementerian/Lembaga pemerintah pusat.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018 peninjauan kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan perbaikan revisi RTRW agar sesuai dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kegiatan konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahapan persetujuan substansi RTRW ke Kementerian ATR, masih diperlukan persyaratan yang harus dilengkapi pada tahun 2020 antara lain:

1) Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi dengan DPRD;
2) Rekomendasi Gubernur terhadap rancangan RTRW;

3) SK Bupati tentang rekomendasi hasil PK RTRW (sedang dilaksanakan);
4) Tabel sandingan RTRW eksisting dengan rancangan perubahan RTRW;
5) Surat pernyataan Bupati bahwa bertanggungjawab terhadap kualitas raperda RTRW;
6) Konsultasi publik minimal dua kali;
7) Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;
8) Berita acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal peta dasar RTRW;
9) KLHS RTRW yang sudah divalidasi; dan
10) Surat permohonan persetujuan substansi Materi teknis dan album peta RTRW;

KLHS RTRW telah divalidasi oleh DIY, proses Peninjauan Kembali RTRW, saat ini tengah berproses penyampaian materi untuk evaluasi gubernur dan akan dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan DPRD. Setelah itu akan berproses di Kementerian ATR/BPN. Tatakala optimis diperkirakan akhir tahun dapat disampaikan Kementrian ATR, namun tatakala pesimis diperkirakan akan selesai pada triwulan pertama 2022. Target Kabupaten Bantul adalah RTRW selesai di tahun 2021.

f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta

mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1009,82	33,15	228,01	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20.14	109,02	275,64
	Jumlah Lindung (Ha)	**5.291,07**	**53,29**	**1.470,58**	**6.814,92**
	% terhadap Kawasan Lindung	**77,64**	**0,78**	**21,58**	**100,00**
	% terhadap Kabupaten Bantul	**9,73**	**0,37**	**3,52**	**13,62**
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	10.110,43	752,34	73,23	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.005,58	5.182,31	7,87	12.195,75
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
	Kawasan Peruntukan Industri	1.776,79	-	686,96	2.463,75
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	-	-	982,96
	Jumlah Budidaya (Ha)	**32.230,19**	**6.974,74**	**4.004,54**	**43.209,47**
	% terhadap Kawasan Budidaya	**74,59**	**16,14**	**9,27**	**100**
	% terhadap Kabupaten Bantul	**64,43**	**13,94**	**8,01**	**86,38**
TOTAL (Ha)		**37.521,26**	**7.028,03**	**5.475,12**	**50.024,41**
% terhadap Kabupaten Bantul		**75,01**	**14,05**	**10,94**	**100**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2020 dengan kriteria ‘sesuai’ sebesar 75,01%; ‘belum sesuai’ sebesar 14,05%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 10,94%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan

ruang kurang berkualitas (<80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

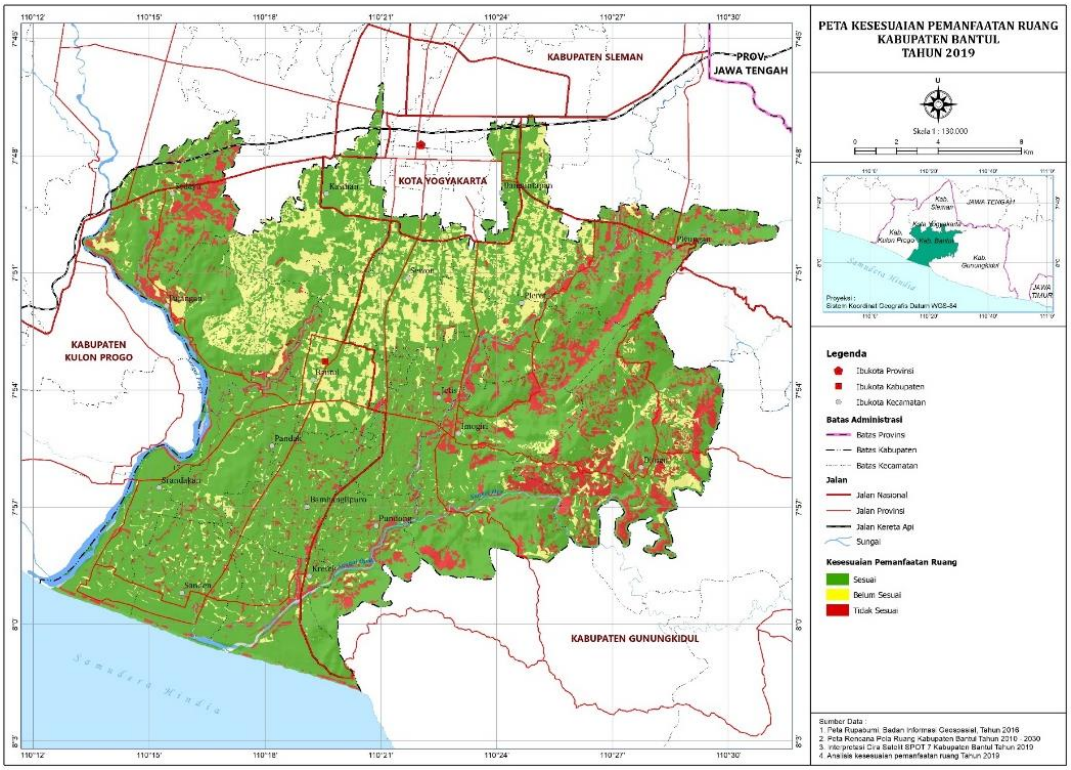

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019

g. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis RTH, yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan.

Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
1	BANGUNAN	Perumahan	132,61
		Perkantoran (pemerintah dan swasta)	26,05
		Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	113,42
		Sub total	**272,08**
2	LINGKUNGAN	Lapangan	32,03
		Pemakaman	81,93
		Taman Kelurahan	230,63
		Taman Kapanewon	9,58
		Taman Kota	1,51
		Wanadesa	5,51
		Sub total	**361,2**
3	PERKOTAAN	Sempadan Jalan	630,43
		Taman/jalur hijau	3,86
		Sub total	**634,3**
4	FUNGSI TERTENTU	Sempadan SUTT	107,09
		Sempadan Rel	1,12
		Sempadan Sungai	254,88
		Sempadan Irigasi	88,92
		Sempadan Danau/Telaga Desa	3,63
		Pariwisata	15,19
		Sempadan Pipa Pertamina	14,03
		Cagar Budaya	11,87
		Gardu Induk PLN	3,1
		Hankam	23,86
		IPAL	7,39
		TPST	0,17
		Sub total	**531,25**
Total Luas RTH			**1.798,83**
Luas Wilayah			**19.873,00**
Luas Kawasan Perkotaan			**12.544,00**
% Luas Kawasan PerkotaaN			**63,12**
RTH Kawasan Perkotaan (%)			**14,34**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021 , diolah

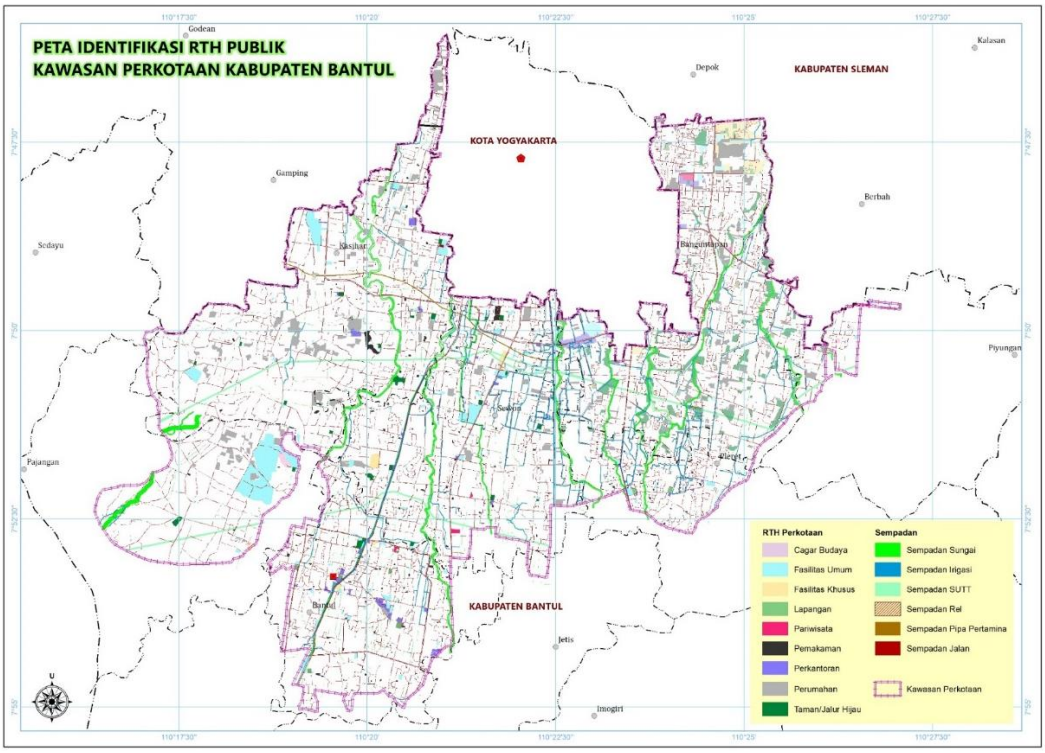

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020

Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019

h. Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan,

sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT : kapasitas	m3/hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/ 12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2020 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu :

(1) Risiko Sangat Tinggi (skala 4) , yang meliputi Kalurahan Srihardono, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Temuwuh,

Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Sendangsari

(2) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan, Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Karang Talun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Wonolelo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Guwosari, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argomulyo.

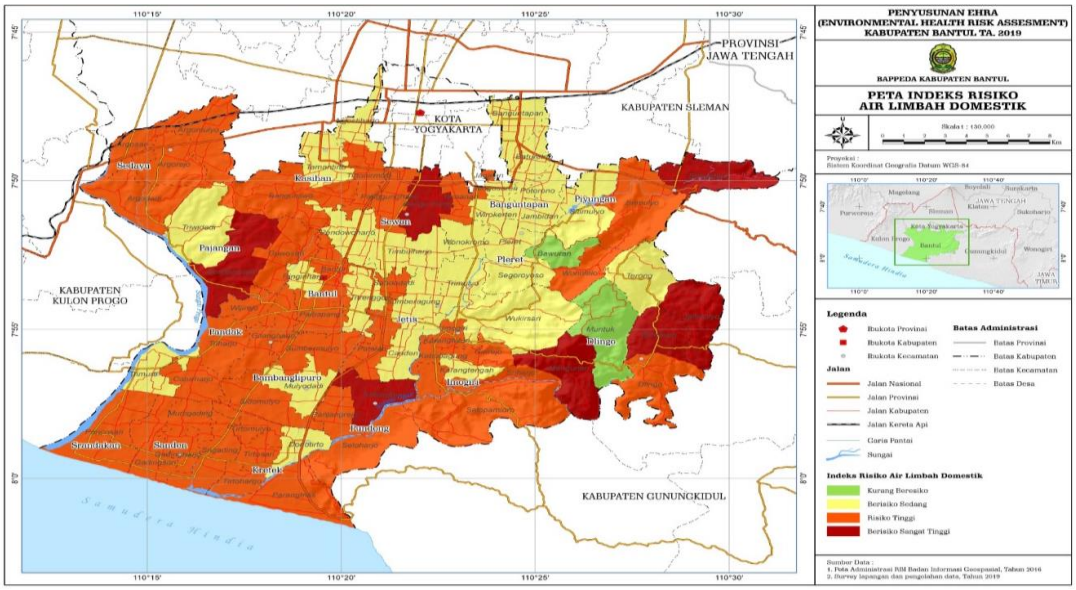

Sumber: Studi EHRA, Bappeda, 2019

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	82,79	74,18	74,58	75,10	75.42
Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	80	80	84	84	84
Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	80,44	82,19	80,01
Persentase Penanganan Banjir (%)	20,30	24,90	28,84	34	41,31
Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	-	2	2	2	2
Persentase Cakupan Pengendalian Tata (%)	-	71	70,35	72,5	75,01

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2019 mencapai 96,81% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kab. Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu

upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM sebanyak 33.886 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

b. Lingkungan Permukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggungharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Padukuhan Jaranan Banguntapan sehingga total peanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%. Terdapat kekurangan penanganan di Padukuhan Deresan Kalurahan Ringinharjo, Padukuhan Mandingan Kalurahan Ringinharjo dan Padukuhan Kweden Kalurahan Trirenggo.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan dengan lokasi Kawasan kumuh. Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26Ha.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber Anggaran RTLH	2016	2017	2018	2019	2020
BSPS (Unit)	652	365	959	1365	1577
DAK (Unit)	-	-	150	176	139
APBD I (Unit)	-	582	517	443	-
APBD II (Unit)	-	-	171	83	-
Total	**652**	**947**	**1794**	**2067**	**1716**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020.

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% namun menurun di tahun 2020. Sampai tahun 2020 ini realisasi kurang lebih hampir di angka 59%. Akan tetapi berjalannya waktu, karena pandemi, masuk dalam anggaran refocusing. Pada APBD II di refocusing untuk penanganan Covid-19. Dan pada APBD I tidak dianggarkan.

d. Fasilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Padukuhan Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Padukuhan Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian pelayanan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum) di Kabupaten Bantul telah mencapai target, namun demikian Kabupaten Bantul masih memiliki masalah terkait urusan trantibum pada penegakan perda yang baru mencapai 70%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Sementara itu dari aspek kebencanaan belum semua Desa Tangguh Bencana yang dibentuk yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Desa Tanggap Bencana.

2.3.1.5.1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi dan pencegahan miras dan Napza.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda melalui 406 kali operasi yustisi dan non yustisi. Program ini juga didukung dengan kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian serta Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Berijin	9	21	30	17	77
2	Proses Hukum	8	12	25	31	76
3	Pembinaan	53	49	45	47	193
4	Panggilan PPNS	3	-	-	22	25
5	Bukti Pelanggaran Perda	8	-	-	-	8
6	Membuat Surat Pernyataan	-	-	1	3	4
7	Pembongkaran Pribadi	1	3	-	-	4
8	Tidak Memenuhi Panggilan	4	1	-	-	5
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	-	14	-	-	14
	Jumlah	86	99	101	120	406

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing, sementara pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi semua ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan, pemanggilan, serta untuk kasus tertentu dilakukan penyidangan.

Dari keseluruhan jumlah pengaduan masyarakat semuanya telah ditindaklanjuti sesuai kasus masing-masing. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tercapai 100%.

c. Rasio Jumlah Linmas

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum diketahui belum baik. Hal tersebut ditandai dengan belum semua padukuhan memiliki jaga warga.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT pada

tahun 2020, tercapai 95,3 %, yaitu jumlah Linmas 5.501 dan jumlah RT 5.775.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penegakan PERDA (%)	57	77,7	95,3	66	70
Persentase Penyelesaian K3	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021.

2.3.1.5.2. Sub-Urusan Bencana Daerah

a. Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Capaian nilai risiko bencana tahun 2020 adalah 187,200 atau masuk dalam kategori tinggi. Tingginya indeks risiko ini disebabkan masih tingginya ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul dan masih tingginya tingkat kerentanan

yang disebabkan pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, dan belum optimalnya integrasi tata ruang dengan mitigasi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 23 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) atau sebesar 4,51%, dibawah target yang ditetapkan yaitu 4,7%.

Capaian persentase Desa Tangguh Bencana yang terbentuk adalah 46,67% (35 Kalurahan) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 38,66 % (28 Kalurahan). Pada tahun 2019 dilaksanakan pembentukan 4 Desa Tangguh Bencana yaitu Kalurahan Terong, Temuwuh, Dlingo, dan Guwosari. Pada tahun 2020 pembentukan maupun pengembangan Desa Tangguh Bencana tidak bisa dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan corona virus 19.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

No	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	58	111	208	227	130
2	Banjir	7	4	0	8	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0
4	Gempa *	11	27	7	6	13
5	Tanah Longsor	77	319	23	176	85
6	Kekeringan	0	0	0	0	0
7	Abrasi danGelombang Pasang	0	1	2	0	1
8	Cuaca Ekstrim : Angin Kencang	39	3	22	16	22
	Pohon Tumbang	52	63	80	105	115

No	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Epidemi penyakit	0	0	0	0	1

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021
Keterangan : * dirasakan di Bantul

Sepanjang tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2017 dan tahun 2019 berupa siklon tropis cempaka, siklon tropis Dahlia dan siklon tropis savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

Tahun	Bencana non Pandemi Covid-19			Covid 19 (Pandemi)	
	Estimasi kerusakan	Jumlah Korban			
		Luka	MD	Confirm	MD
2016	Rp 5.486.054.889,00	5	1		
2017	Rp 298.836.444.366,00	5	3		
2018	Rp 2.667.930.000,00	7	4		
2019	Rp 95.675.921.376,00	7	7		
2020	Rp 14.576.944.000,00	4	2	3163	90

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan alat *Early Warning System*. EWS yang ada di Kabupaten Bantul adalah EWS Tsunami.

Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul

No	Lokasi
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek

No	Lokasi
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Bencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Relokasi Warga	9,09	27,28	36,36	89,09	132
Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,69	3,19	3,97	4,12	4,51

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

c. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Awal wabah ini terjadi di China berdasarakan laporan WHO *China Country Office* yang melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Selanjutnya, *World Health Organization*

(WHO) telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari penyebaran *corona virus-disease (Covid-19)* sebagai isu pandemik dunia, maka perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, kemudian ditetapkan status tanggap darurat Covid-19 dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 tahun 2020 pada 20 Maret 2020

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Juli 2021 belum menunjukkan kecenderungan menurun, namun yang terjadi sebaliknya.

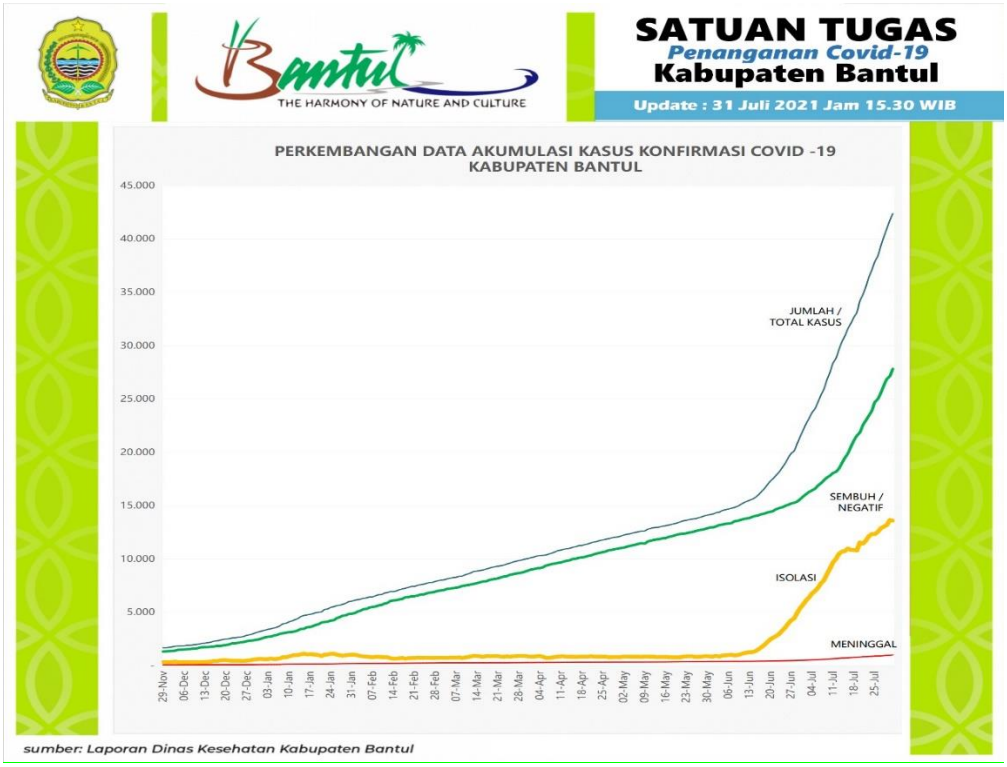

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

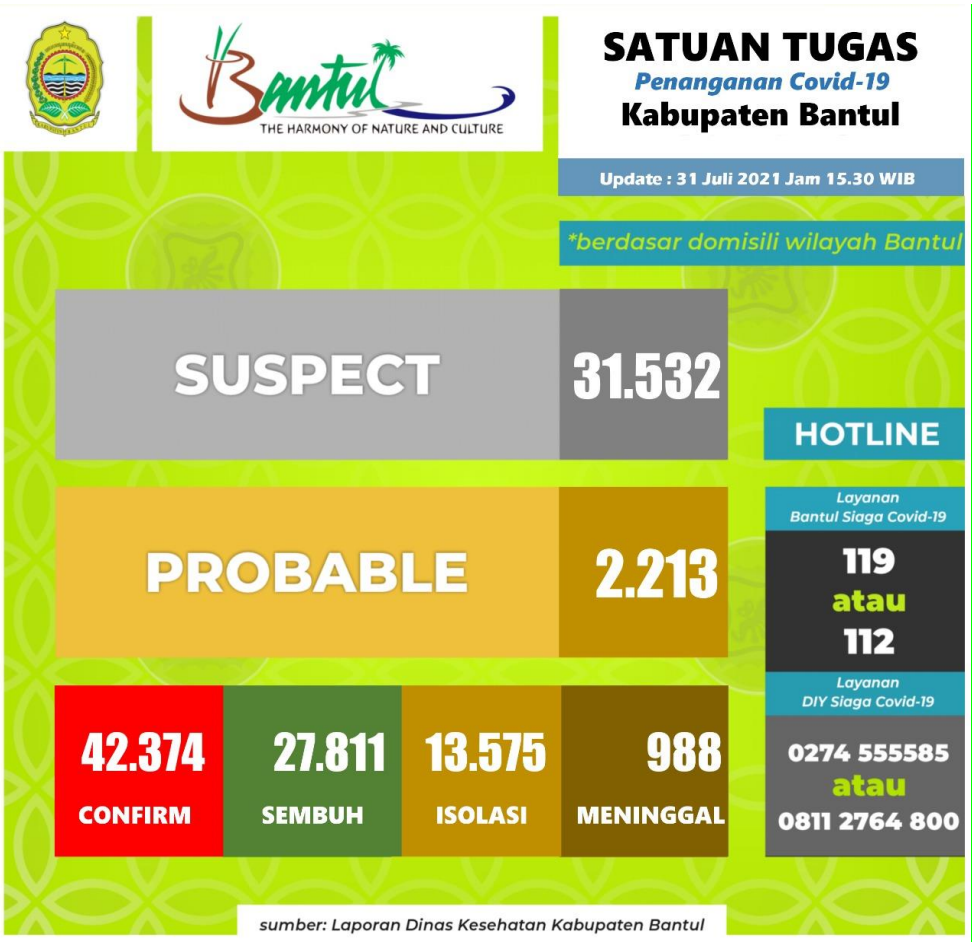

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (sampai dengan per 31 Juli 2021) menyatakan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 42.374 kasus, 27.811 pasien dinyatakan sembuh dan 988 meninggal dunia. Selanjutnya jumlah pasien dalam isolasi sebanyak 13.575 orang.

Upaya penanganan pasien Covid-19 dengan penyediaan Rumah Sakit Rujukan, RSLKC dan Shelter, sebagai berikut:

- RS rujukan COVID ada16 RS dengan rincian kamar : R. Isolasi: 187 ruang, R. ICU tanpa tek. negative: 5 ruang, R. ICU dengan tek. negative: 9 ruang, R. NICU: 5 ruang
- Shelter Kabupaten: Semaul: 15 kamar, Niten: 88 kamar dan Patmasuri: 60 kamar

Upaya Disinfeksi Ruang dan Lingkungan, sebagai berikut:

- 47 kali disinfeksi Fasilitas Umum
- 161 kali disinfeksi Rumah dan Lingkungan warga Terkonfirmasi Positif Covid-19
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul – TNI – POLRI – PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul – FPRB Kalurahan – Relawan
- Pelatihan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Upaya penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19:

- 50 kali penanganan
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul - PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul
- Pelatihan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Selain upaya di atas, ada beberapa upaya lain yang telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik
2. Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan, petugas yang melayani masyarakat.
3. Skrining swab / RT-PCR secara langsung pada karyawan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan, serta swab massal pada populasi berisiko (pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positip) yang dijaring melalui aplikasi
4. Penguatan Laboratorium untuk COVID : yaitu E. Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR

5. Penegakaan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegkan hukum
6. Sosialisasi protokol kesehatan kepada instusi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren
7. Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan namun juga berpengaruh pada sektor lainnya. Secara umum sangat dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah. Adanya beberapa kebijakan untuk mencegah penularan wabah virus corona, antara lain penerapan *social distancing* dan pengaturan jadwal kerja dari rumah (*work from home*), mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pegawai di perusahaan/pabrik, UMKM dan pedagang kaki lima tidak bisa berjualan dengan normal, jasa ojek *online* tidak bisa beroperasi seperti biasa sebab orderan yang menurun. Kondisi ini menyebabkan perekonomian melemah.

Dampak pandemi covid-19 terkadap makro ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2020 menurut BPS adalah pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -1,66, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar -2,76, persentase penduduk miskin sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,06

Pengaruh ekonomi di Kabupaten Bantul ditunjukan dengan adanya trend menurun pada sektor:belanja, industry, pariwisata dan keuangan.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap perusahaan di Kabupaten Bantul, sebanyak 42% perusahaan mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 26-50% perusahaan mengalami penurunan pendapatan 32 %, 25 % perusahaan mengalami penurunan pendapatan 22%. dan sebanyak 43 % mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UKM di Kabupaten Bantul, sebanyak 43 % UKM mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 32 %UKM mengalami penurunan pendapatan antara 26-50%, 21% UKM mengalami penurunan pendapatan hingga 25 % dan UKM yang pendapatannya naik sebesar 4%.

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	106.419	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD	17.886	APBDES

Sumber : Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Kalurahan (Muskal). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilakasanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa/Kalurahan

2.3.1.5.3. Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat *(Response Time)* penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	39	93	175	203	114
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	39	93	175	193	114
3	Jumlah total terjadi kebakaran	48	111	208	227	130
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	9	18	34	34	16
5	Tingkat waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pada tahun 2020 luas WMK adalah 176,62 Ha, di tahun 2019 adalah 353,35 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter yang dimiliki pada Tahun 2020 sebanyak 8 unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, pada Tahun 2020 sudah terdapat 7 pos pemadam yaitu pos induk BPBD, pos di Kapanewon Kasihan, Banguntapan dan Imogiri, Piyungan, Pundong dan Sedayu.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja utama Kebakaran Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit (%)	94	97	100	100	100

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja BPBD, Bappeda 2021

2.3.1.6. Sosial

a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)

Sarana sosial yang dimiliki Kabupaten Bantul adalah panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	27
2	2017	26
3	2018	26
4	2019	43
5	2020	52

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

Jenis PMKS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Balita Terlantar	n/a	110	74	65	34
Anak Terlantar	n/a	2094	1862	1731	1475
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	n/a	63	87	124	121
Anak Jalanan	n/a	56	14	12	5
Korban Tindak Kekerasan	n/a	163	210	229	231
Lanjut Usia Terlantar	n/a	9278	8971	8085	7684
Penyandang Cacat	n/a	5900	6324	6137	6535
Tuna Susila	n/a	83	71	46	24

Jenis PMKS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengemis	n/a	25	25	22	25
Gelandangan	n/a	29	38	35	12
Korban Penyalahgunaan Napza	n/a	101	100	97	21
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	n/a	54	69	57	30
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	n/a	2771	3068	2991	2865
Orang dengan HIV/AIDS	n/a	n/a	184	127	103
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	n/a	1185	1329	1319	1228
Keluarga Fakir Miskin	n/a	57.210	57.022	52.509	50.609
Korban Trafficking	n/a	1	2	1	0
Korban Bencana Sosial	n/a	n/a	0	0	0
Korban Bencana Alam	n/a	n/a	61	21	405
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	n/a	107	155	151	47
Anak dengan Kedisabilitasan	n/a	625	446	450	353
Anak dengan Korban Tindak Kekerasan	n/a	54	81	115	114
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	n/a	54	81	115	114
Pemulung	n/a	153	156	154	66
Korban Minoritas	n/a	0	0	0	0
Jumlah	n/a	80116	80430	74593	72101

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

Data tabel menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PMKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PMKS karena tidak adanya jenis PMKS Komunitas Adat Terpencil.

Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain :

a. meningkatkan mentalitas anak yatim,
b. meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial,
c. penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar,
d. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak,
e. mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY,
f. pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti,
g. perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, dan
h. sosialisasi peduli PMKS

Selain itu dilakukan razia anak gelandangan dan pengemis dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut.

Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Jalanan	12 orang
2	Gelandangan/Pengemis	57 orang
3	Psikotik	- orang
Total		**69 orang**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

c. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang ada membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan

rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat Kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2018 perkembangan SLRT masih berupa embrio dengan *pilot project* dua puskesos, 21 puskesos penumbuhan, 75 fasilitator dan 34 supervisor. Tahun 2019 untuk mendukung pengembangan SLRT dan Puskesos telah disusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, selain itu 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul sudah memiliki SK kelembagaan Puskesos. Tahun 2020 Puskesos mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan berinovasi serta berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19 antara lain Ambulance standby, CSR puskesos, Kerjasama baznas, lazizmu, dan lain lain, Layanan antar SEP, Gojek puskesos, Registrasi KIS, KIP. Puskesos juga menjadi mitra penting Kalurahan dalam menanggulangi Covid-19.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang sosial Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan NAPZA	4	5	NA	NA	NA
Persentase PMKS	13,5	13,25	7,29	7,29	7,29

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

a. Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	67,84
2	2017	72,21
3	2018	73,87
4	2019	73,18
5	2020	74,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2016-2020 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.107	2.650	3.230	3.329	3.305
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	2.797	4.188	3.772	3.828	4.816
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75,3%	63,27%	85,63%	86,96%	86,62%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 86,62% atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 86,96%.

c. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	25.325	23.753	26.664	28.666	26.664
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	40.484	42.842	48.908	49.036	44.263
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	62,00%	55,44%	54,73%	58,61%	60,24%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 mencapai 60,24%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial
yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Besaran sengketa yang terselesaikan	97%	97%	95%	94%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Kasus yang terselesaikan tahun 2020 mencapai 100% dari jumlah kasus yang ada, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Tenaga Kerja Bantul tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka pengangguran(%)	3,12	3,12	3,12	3,06	4,06
Upah Minimum Kabupaten(Rp.)	1.297.700	1.404.760	1.404.760	1.649.800	1.842.460

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

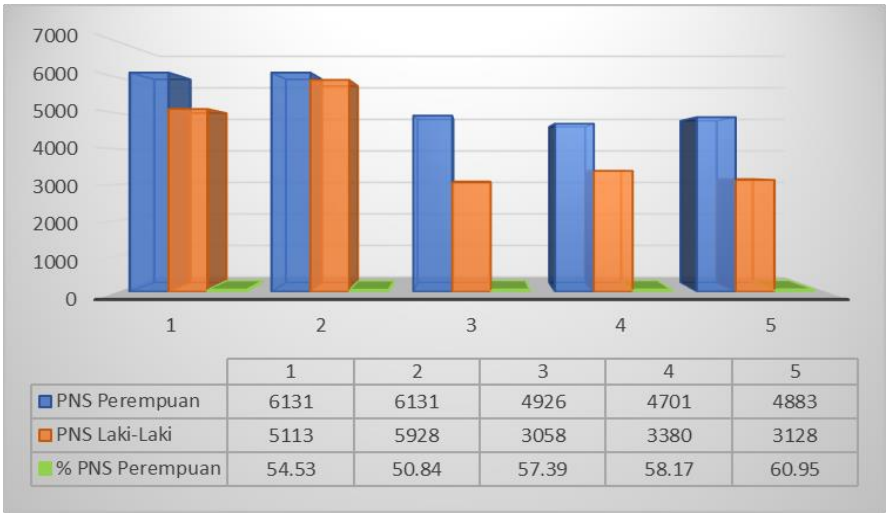

	1	2	3	4	5
PNS Perempuan	6131	6131	4926	4701	4883
PNS Laki-Laki	5113	5928	3058	3380	3128
% PNS Perempuan	54.53	50.84	57.39	58.17	60.95

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Berdasar data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diketahui tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	4	4	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	37	43	46	37
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	223	223	231	250	277
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	273	263	278	300	317
5	Jumlah PNS perempuan	6.131	5.928	4.701	4883	3592
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	4.45	4.44	5,91	6,14	8,83

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Tabel di atas menunjukkan dari jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019, sejumlah 300 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV.

b. Partisipasi Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Aktivis P2WKSS	300	300	300	360
2	Pengurus harian Parpol	75	76	76	120
3	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	101	101	101	101
4	Lembaga Legislatif Daerah	3	3	3	4
5	Pekerja Sektor Informal	128.958	206.055	206.055	131.110

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psycological violence*),

pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking)*, dan penelantaran (*neglect*).

Kasus KDRT dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase Kasus Tertangani
1	2017	186 Kasus	100%
2	2018	210 Kasus	100%
3	2019	229 Kasus	100%
4	2020	224 Kasus	100%

Sumber : UPT PPA, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak 2021

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

d. Pernikahan Dini

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Rumah tangga pasangan pernikahan dini dapat mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan berlanjut pada generasi yang akan datang. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jumlah pernikahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia dini	95	83	81	74	56
2	Semua usia	11.528	12.359	12.604	12.927	6.232
	Persentase pernikahan dini	0,82	0,67	0,64	0,57	0,90

Sumber: Kementrian Agama Bantul, 2021

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partispasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	**Tahun**	**Angkatan Kerja**		**Total**	**Prosentase Angkatan Kerja Perempuan**
		Laki-laki	**Perempuan**		
1	2016	Na*	Na*	Na*	Na*
2	2017	313.139	25.839	558.978	46,22%
3	2018	323.287	254.243	577.530	44,02%
4	2019	319.784	259.445	579.229	44,79%
5	2020	339.974	269.969	609.943	44,26%

Sumber: Sakernas, BPS, 2021
Keterangan : *tidak terdapat data dikarenakan tidak diakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

Jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari tingkat persentasenya maka dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari 46,22% di tahun 2017 menjadi 44,02%, 44,79% dan terakhir 44,26% di tahun 2020.

f. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

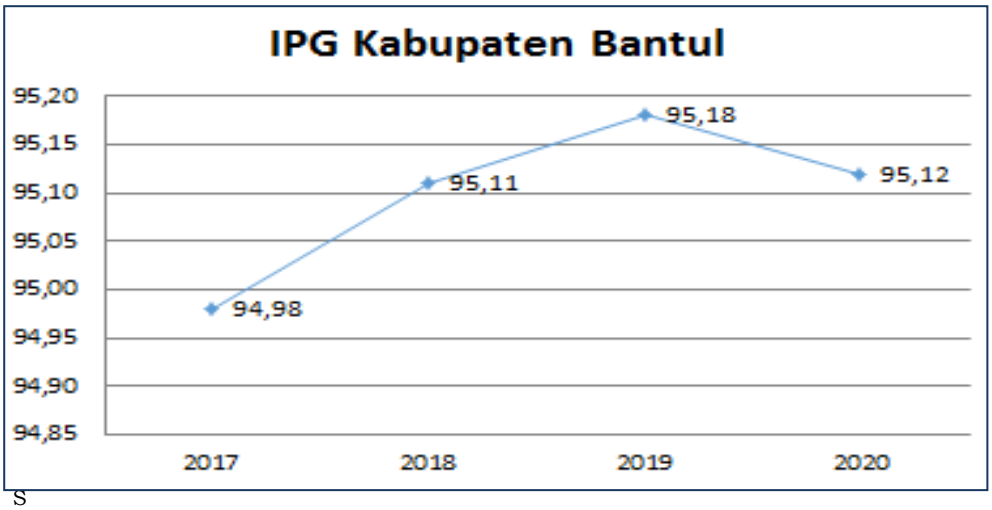

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada kurun waktu 2017-2019 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,06 dibandingkan tahun sebelumnya.

g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

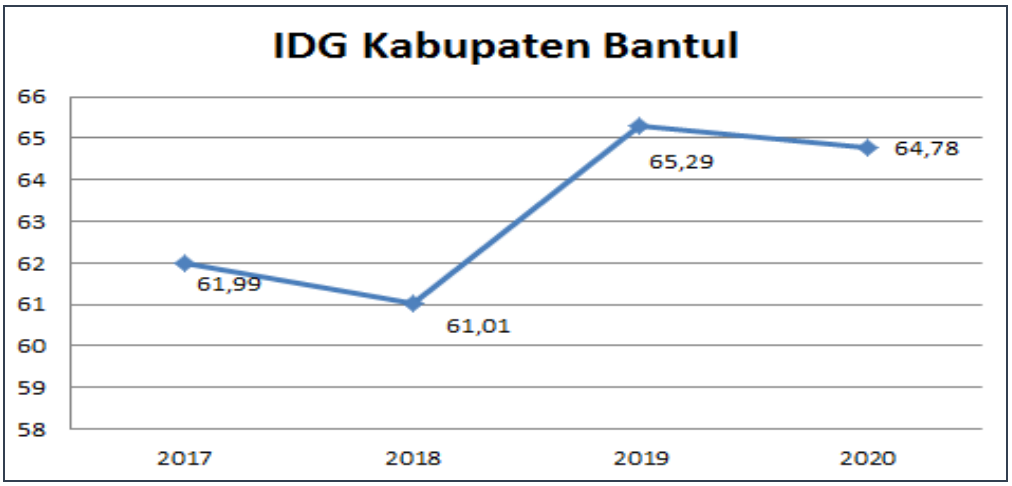

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,01 menjadi 65,29, sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,51 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

h. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Ada lima kategori dalam KLA yaitu:

1. Pratama (500-600)
2. Madya (600-700)
3. Nindya (700-800)

4. Utama (800-900)
5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (>900).

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul masih termasuk dalam kategori 'Pratama', dan tahun 2018-2020 masuk dalam kategori 'Madya'.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA, Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA. Selain adanya dukungan regulasi, di kabupaten Bantul juga sudah terbentuk 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana), dan 11 Forum Anak tingkat kecamatan/kapanewon.

i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	0,73	0,73	0,18

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021.

2.3.1.2.3. Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan

keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr.

Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)		
				Nabati	Hewani	Total
1	2016	3.072	142.88	54,61	23,20	77,80
2	2017	3.079	143.21	56,93	18,80	75,73
3	2018	2.993	139.21	66,73	11,63	78,36
4	2019	3.123	130.13	75,10	14,86	89,95
5	2020	3.092	100	71,28	11,62	82,90

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ketersediaan energi dan protein di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 ketersediaan energi mencapai 3.092 kal/kap/hr, atau 28,83% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Ketersediaan protein mencapai 82,90 gr/kap/hr atau 45,43% di atas rata-rata kecukupan protein penduduk Indonesia.

b. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan

kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan dan mengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan UU no. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana pemerintah bertanggungjawab dalam peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraan cadangan pangan.

Pada tahun 2017 cadangan pangan Kabupaten Bantul sebesar 3 ton lebih besar dibanding tahun 2016 (267 kg). Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,036 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 20 lumbung pangan dan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak. Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan 2020 adalah 5,036 ton beras.

Mulai tahun 2018 dilaksanakan analisis cadangan pangan rumah tangga, dengan tujuan untuk mengetahui situasi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tahun 2018 dilaksanakan di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan

rumah tangga di Kapanewon Bambanglipuro: 12,20%, Bantul: 17,29%, Kasihan: 6,32%, Imogiri: 5,08%, Srandakan: 9,34%, dan Pleret: 5,44%. Rata-rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kapanewon tersebut 9,28%.

Tahun 2019 lanjutkan analisis cadangan pangan rumah tangga di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kapanewon Pajangan: 8,12%, Kapanewon Piyungan: 12,04%, Kapanewon Kretek: 11,46%, Kapanewon Pundong: 11,07%, Kapanewon Dlingo: 4,82% dan Kapanewon Banguntapan: 2,93%. Rata - rata cadangan pangan rumah tangga di 6 Kapanewon tersebut adalah 8,41%.

Pada tahun 2020 cadangan pangan pemerintah masih tetap yaiti 5,036 ton masih jauh dari target yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu 283 ton.

c. Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola PanganHarapan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,0	21,7	25.0	25.0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,7	1.4	1.3	2,0
3	Pangan hewani	24,0	24	24.0	24.0	22,4
4	Minyak dan lemak	2,8	3,1	1.5	1.8	1,2
5	Buah/biji berlemak	0,7	0,9	0.6	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10.0	10.0	10,0

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola PanganHarapan				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Gula	1,1	1,4	0.4	0.6	0,3
8	Sayur dan buah	27,5	28,0	28.8	30.0	30,0
9	Lain-lain	0	0,0	0.0	0.0	0.0
	Total	92,6	90,8	91,7	93,7	91.4

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Tahun 2020 Skor PPH menurun menjadi 91,4 dibandingkan tahun 2019. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama. Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.50.

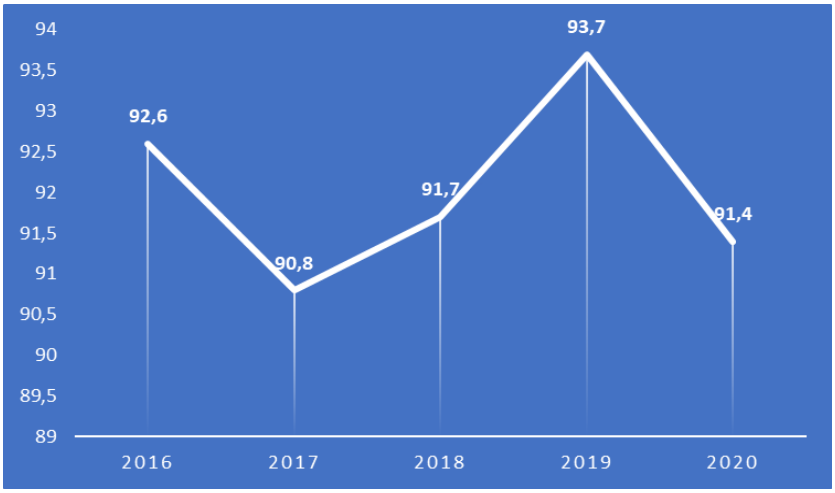

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2021

Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada 2017, namun meningkat di tahun 2018 dan 2019 kemudian menurun kembali pada 2020.

d. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sbagai berikut :

1. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

   Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu:

   1) Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan;
   2) Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera;
   3) Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

   Berdasarkan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

   1) Tidak ada Kalurahan yang masuk kategori rawan pangan (Merah);
   2) Hanya ada 1 Kalurahan yang masuk kategori Waspada Pangan (Kuning) yaitu Kalurahan Wonolelo.

2. Analisis *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA)/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

   Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

   a) Aspek Ketersediaan Pangan
      1) Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan;
      2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.
   b) Aspek Akses terhadap Pangan
      1) Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan;
      2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan;
2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2020 terdapat 18 Desa Rentan Pangan, sebagai berikut :

1) Desa Rentan Pangan Prioritas 1, ada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi.
2) Desa Rentan Pangan Prioritas 2, ada 1 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Dlingo
3) Desa Rentan Pangan Prioritas 3, ada 12 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari dan Argodadi.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.079	2.993	3.121	3.123	3.092
Ketersediaan Protein (kkal/kapita/hari)	75	78,36	87,23	89,95	82.90
Skor Pola Pangan Harapan	92,60	90,80	91,7	93,7	91,4
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	27	29	69	16	19

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

.

2.3.1.2.4. Pertanahan

a. Luas Lahan Bersertifikat

Pada tahun 2020 dilakukan pensertifikatan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m^2)	Bidang	Luas (m^2)
A	Kabupaten Bantul	634.314	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar*				
	- Hak milik (HM)	637.682	353.647.046	96,099	69,773
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	19.889	7.204.828	3,997	1,421
	- Hak Pakai (HP)	3.461	9.394.135	0,54	1,85
	- Wakaf	1.932	580.979	0,291	0,115
	- Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806.761	0,006	0,159
	Jumlah	663.567	373.572.020		73.704
C	Tanah belum terdaftar		133.277.980		26,29

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Bantul, 2021
Keterangan : *Sudah bersertifikat

b. Konflik Pertanahan

Konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga terjadi di 34 Kalurahan selama tahun 2017 – 2020, sebagai berikut :

Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
1	Kalurahan Selopamioro	2	Tukar guling tanah	2017
2	Kalurahan Argorejo	1	Tukar guling tanah	2017
3	Kalurahan Poncosari	1	Tukar guling tanah	2017
4	Kalurahan Sriharjo	1	Tukar guling tanah	2017
5	Kalurahan Sendangsari	1	Warisan	2017
6	Kalurahan Bangunjiwo	1	Tukar guling tanah	2018
7	Kalurahan Selopamioro	1	Tukar guling tanah	2018
8	Kalurahan Sitimulyo	1	Tukar guling tanah	2019
9	Kalurahan Bangunharjo	1	Tukar guling tanah	2019
10	Kalurahan Triwidadi	1	Tukar guling tanah	2019
11	Kalurahan Argomulyo	1	Tukar guling tanah	2019
12	Kalurahan Tamantirto	1	Tukar guling tanah	2019
13	Kalurahan Srimulyo	1	Tukar guling tanah	2019
14	Kalurahan Bantul	1	Tukar guling tanah	2019
15	Kalurahan Sumberagung	1	Tukar guling tanah	2019
16	Kalurahan Sriharjo	5	Tukar guling tanah	2019
17	Kalurahan Tirtonirmolo	1	Tukar guling tanah	2019
18	Kalurahan Murtigading	1	Tukar guling tanah	2020
19	Kalurahan Sumberagung	1	Tukar guling tanah	2020

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
20	Kalurahan Canden	1	Tukar guling tanah	2020
21	Kalurahan Tirtohargo	2	Tukar guling tanah	2020
22	Kalurahan Poncosari	1	Tukar guling tanah	2020
23	Kalurahan Terong	1	Tukar guling tanah	2020
24	Kalurahan Pleret	1	Tukar guling tanah	2020
25	Kalurahan Mangunan	1	Tukar guling tanah	2020
26	Kalurahan Srigading	1	Tukar guling tanah	2020
27	Kalurahan Tamantirto	1	Tukar guling tanah	2020
28	Kalurahan Patalan	1	Tukar guling tanah	2020
29	Kalurahan Segoroyoso	1	Tukar guling tanah	2020
30	Kalurahan Tirtonirmolo	1	Tukar guling tanah	2020
31	Kalurahan Argomulyo	1	Tukar guling tanah	2020
32	Kalurahan Temuwuh	1	Tukar guling tanah	2020
33	Kalurahan Bawuran	1	Tukar guling tanah	2020
34	Kalurahan Timbulharjo	1	Penyalahgunaan tanah SG	2020

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Tabel di atas menunjukkan antara tahun 2017-2020 terdapat konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga di 34 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dan sebagian besar mengenai tukar guling tanah. Penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan adalah melalui fasilisasi dan mediasai pihak-pihak yang bermasalah khususnya untuk tanah desa dan SG. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut sertifikasi di BPN.

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar. Untuk tahun 2020 jumlah permohonan izin lokasi sebanyak 10 izin dengan jumlah izin lokasi yang diberikan sebanyak 8 izin lokasi.

Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	Persentase (%)
2016	6	5	83,33
2017	2	2	100,00
2018	6	4	66,66
2019	5	5	100,00
2020	10	8	80,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Sertifikasi Tanah	NA	100	93,16	99,37	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021.
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

	Indeks Kualitas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	24	34,67	39,63	51,80
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,76	90,9	85,66	90,9	85,18
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		47,53	45,50	53,36	60,40	63,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL di atas memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,2 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2019 sebesar 60,4. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH tidak semakin buruk.

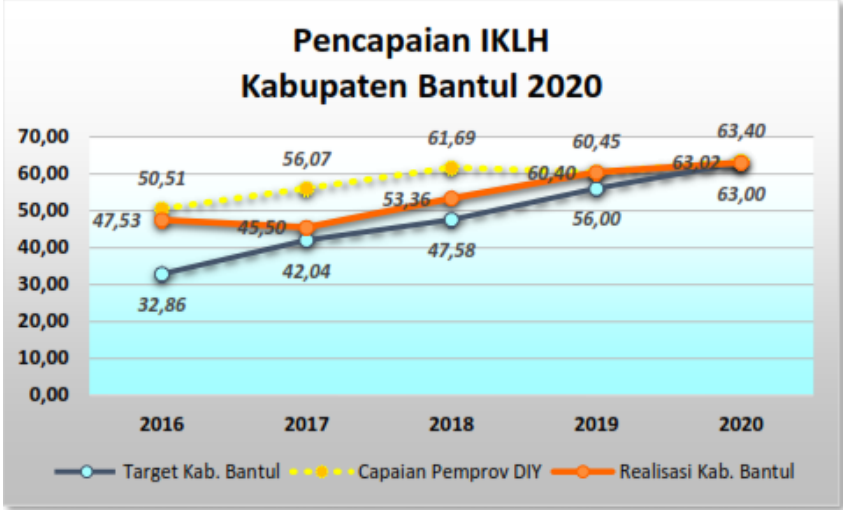

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Keterangan :
Sangat baik (IKLH>80), Baik (70<IKLH≤80), Cukup Baik (60<IKLH≤70), Kurang Baik (50<IKLH≤60), Waspada (40<IKLH≤50)

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan Peraturan Gubenur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode (penghujan dan kemarau).

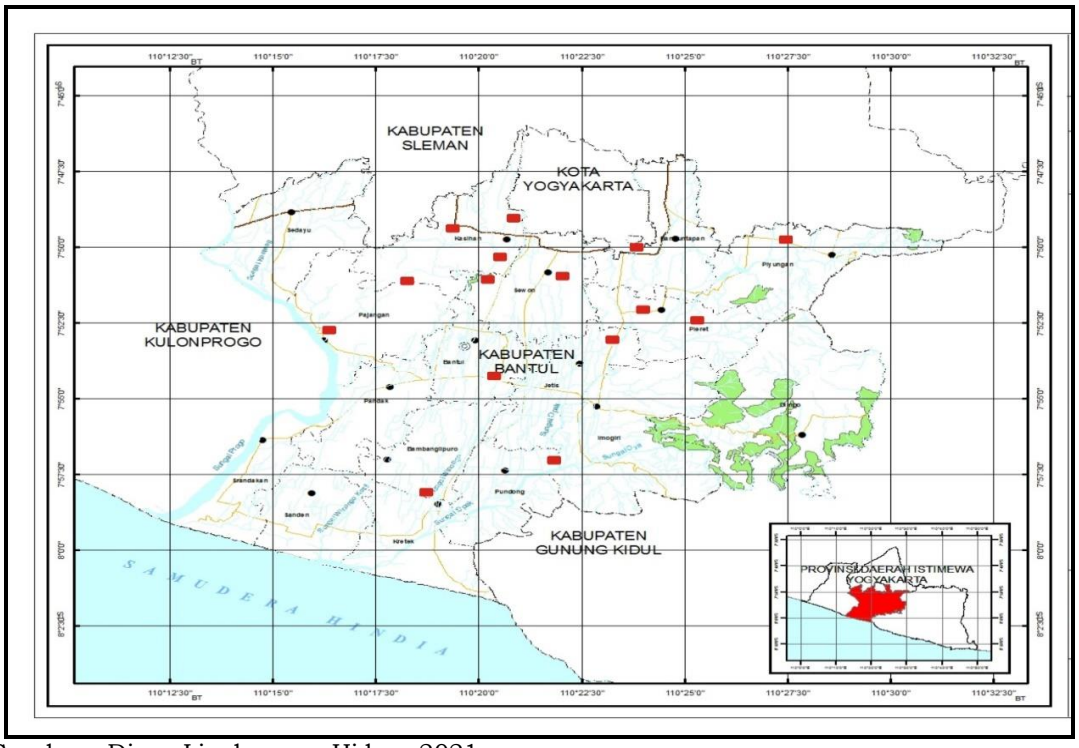

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai

Kabupaten Bantul berdasarkan parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik, selanjutnya dianalisa untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Winongo	32,500	33,334	37,500	43,333	53,330
Code	35,832	33,334	41,666	42,500	50,830

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Pada Tahun				
Gajahwong	33,334	31,666	38,334	30,000	43,330
Bedog	27,334	31,334	43,332	40,667	48,180
Oyo	28,334	28,334	33,334	41,667	37,500

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2020 sebesar 51,8 meningkat dibandingkan pada tahun 2019. IKA dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan.

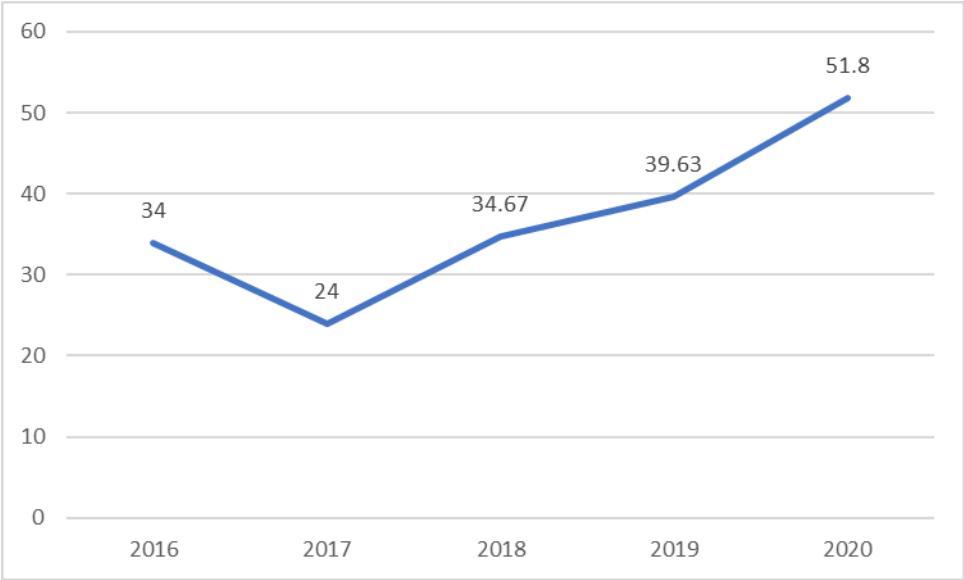

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara ambient dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Pemantauan udara ambient dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argoindustri, wilayah pemukiman, dan wilayah perkantoran/ komersial.

Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020

Parameter	Rerata (µg/Nm3)	EU	IEU
NO2	13,97	40,00	0,34925
SO2	7,68	20,00	0,384
Rerata			0,3666
Indeks Kualitas Udara			85,18

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2020 sebesar 80. Indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain.

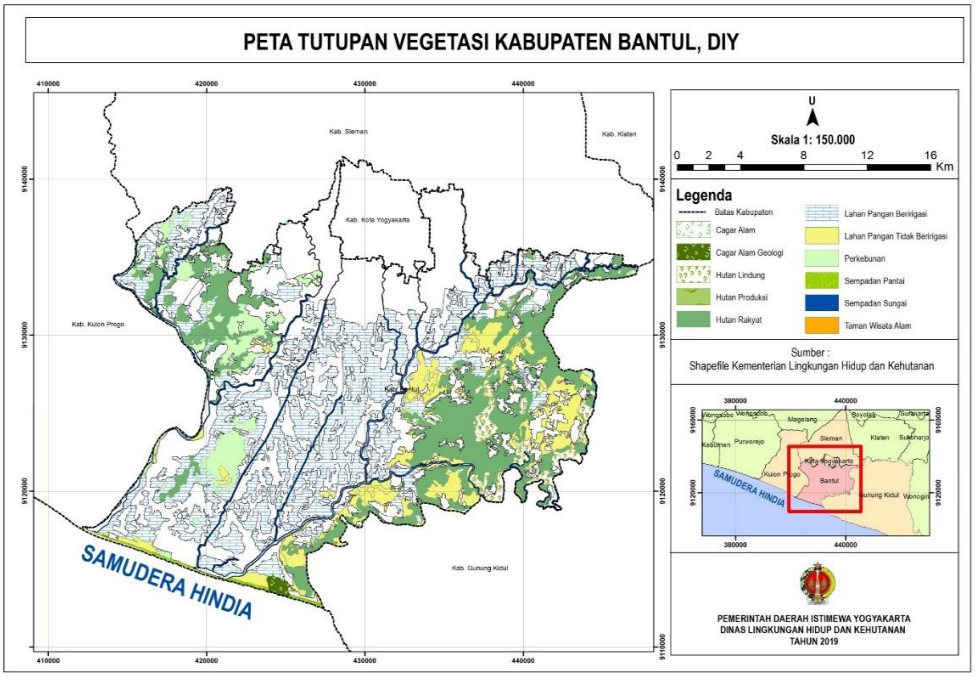

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020

No.	Jenis Tutupan Vegetasi	Luasan (km²)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penghijauan lingkungan	0,462	0,0125	0,12885	12	9,53125
2	Mangrove	0,02	0,0125	0,012	0,012	0,01
3	Reklamasi bekas tambang	0	0	0,0379	0,021	0,001
4	Hutan rakyat	0	0,0105	85,95	42,65	0
5	RTH/TAMAN	0	0,00101	0	0	0,0016
	Total penambahan	0,482	0,03651	86,12875	54,683	9,54385

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2020 ada penambahan tutupan lahan sebesar 9,54385 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2020 menjadi 178,60 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 54,82 atau naik sebesar 1,73 poin

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan keseluruhan luas tutupan lahan Kabupaten Bantul mencapai 178,60 km2.

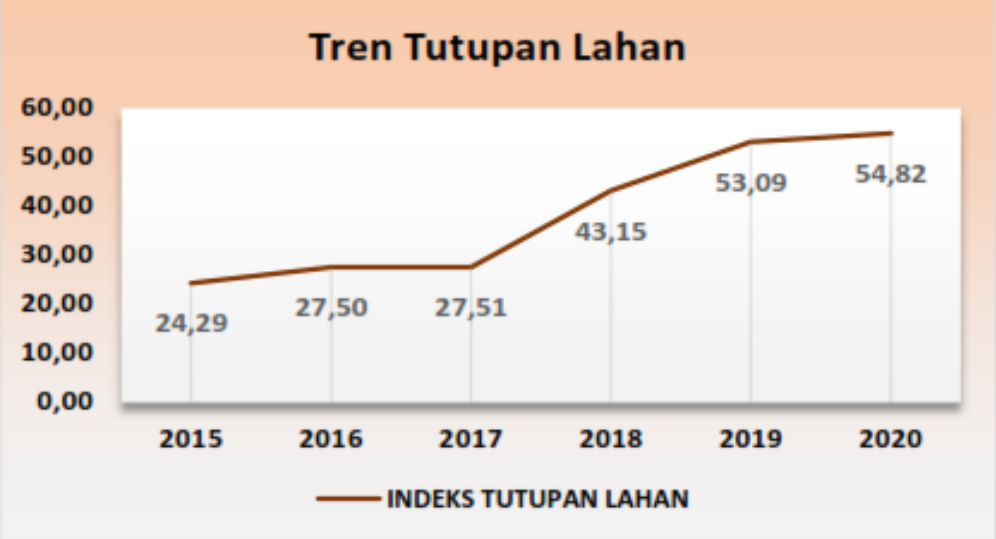

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas, secara keseluruhan dari tahun 2015 – 2020 terdapat kenaikan IKTL yang sangat signifikan pada tahun 2018 dibandingkan capaian pada tahun 2017 yang dipengaruhi oleh adanya penambahan komponen Hutan Rakyat yang sebelumnya tidak diperhitungkan, dengan luasan Hutan Rakyat tahun 2018 sebesar 8.595 Ha atau 85,95 km2.

e. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Linkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pemberian Izin Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Mulai tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa ijin lingkungan hanya untuk kantor

pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH merupakan persyaratan permohonan Izin Lingkungan. Berikut data Dokumen Lingkungan Hidup yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat pengurusan Izin Lingkungan.

Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

NO	TAHUN	DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP			Izin Lingkungan	KETERANGAN
		DPLH	UKL-UPL	JUMLAH		
1	2017	342	29	371	371	Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor
2	2018	95	33	128	128	Perumahan, kantor, sekolah, rumah makan, SPBE, SPBU, pasar, klinik
3	2019	1	66	67	67	OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja
		54	17	71	71	DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir
4	2020	N/A	62	62	62	Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, pemakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional)
		10	14	24	24	Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data di atas, Ijin Lingkungan yang diterbitkan tahun 2020 sejumlah 86 ijin, lebih rendah dari 2019 yaitu 138 ijin.

Terdapat 15 Usaha/kegiatan yang membuang limbah ke sungai yaitu PG Madukismo, PT ASA, PT Samitex, PT Dagsap Endura Eatore, PT Cahaya Mulia Persada, Ros In Hotel, Dafam Rohan Hotel, Balai Pialam, RS Paru Respira, RSUD Panembahan Senopati, RS Santa Elisabeth, RS Khusus Bedah, RSU PKU Muh Bantul, RS KIA Ummi Khasanah, RSPAU Harjolukito, RS UII Pandak, PT Pertamina.

Tingkat ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan insidentil. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tindak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung

Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi

No	Tahun	Dokumen Lingkungan Hidup			Izin Lingkungan	Yang Diawasi	Yang Taat	Yang Tdk Taat	Keterangan
		DPLH	UKL-UPL	Jumlah					
1	2017	342	29	371	371	NA	NA	NA	Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor
2	2018	95	33	128	128	11	0	11	Perumahan, kantor, sekolah, rumah makan, SPBE,

No	Tahun	Dokumen Lingkungan Hidup			Izin Lingkungan	Yang Diawasi	Yang Taat	Yang Tdk Taat	Keterangan
		DPLH	UKL-UPL	Jumlah					
									SPBU, pasar, klinik
3	2019	1	66	67	67	24	13	11	OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja
		54	17	71	71				DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir
4	2020	N/A	62	62	62	19	12	7	Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, pemakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional)
		10	14	24	24				Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2018, dari 11 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan semuanya belum memenuhi ketentuan izin lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2019, dari 24 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 13 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat. Untuk tahun 2020, dari 19 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 12 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat.

Tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Pada tahun 2021, DLH Bantul melakukan inovasi terkait pengawasan tidak langsung melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan mengirimkan hasil penelaahan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat dipergunakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perbaikan pengelolaan lingkungannya

2) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Bupati tersebut masih relevan dengan Permen LHK di atas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pokok aduan antara lain tentang gangguan kebisingan, pencemaran air, dan gangguan limbah cair. Setiap aduan yang masuk diverifikasi oleh DLH Kabupaten Bantul bekerjasama dengan instansi terkait. Verifikasi yang dilakukan berupa peninjauan langsung ke lokasi kejadian, pengambilan dan analisa sampel jika dianggap perlu. Jika hasil analisa laboratorium menunjukkan adanya pencemaran yang

ditunjukkan dengan telah terlampauinya baku mutu, maka DLH Kabupaten Bantul akan memberikan rekomendasi teknis terkait penanggulangan pencemaran yang terjadi. Sebagian besar kasus diselesaikan dengan cara mediasi antara pihak pelapor dan terlapor oleh DLH Kabupaten Bantul. Beberapa kasus setelah diverifikasi dan ditemukan terjadi pelanggaran peraturan daerah akan ditinjaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

No	Pokok Aduan	2018	2019	2020
1	Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara	10	11	17
2	Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair	6	27	8
	Total	16	38	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat jumlah aduan meningkat tahun 2020 sejumlah 25 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 25 aduan, penurunan jumlah aduan disebabkan pengaruh adanya pandemi covid 19 berpengaruh pada penurunan jumlah kegiatan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan berkurang. Semua aduan yang masuk sudah diselesaikan dengan baik.

f. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018
Total sampah yang terkelola (a)	441.000	486.784
Volume timbulan sampah (b)	715.400	726.543
Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100%	72,42%	72,50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

JAKSTRADA disahkan Desember 2018, pengelolaan sampah pada tahun 2017-2018 belum dihitung secara rinci. Pengelolaan sampah pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019

No	Uraian	m3/tahun
1	Volume timbulan sampah	608.731.643
2	Volume sampah yang terangkut ke TPS Piyungan	82.380.960
3	Volume sampah yang terolah ke TPS3R, Bank Sampah (Anorganik)	36.523.899
4	Volume sampah organic yang terkelola di pedesaan	271.646.495
5	Volume sampah organic yang terkelola di KPY	61.634.079
6	Total volume sampah tertangani	452.185.433

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan sampah pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020

No	Uraian	ton / th	m3/tahun
1	Pengurangan sampah	83.069.71	324.841.87
	Jumlah pembatasan timbulan sampah	56.376,28	220.282.47
	Jumlah sampah terdaur ulang	26.693,43	104.559.40
2	Penanganan sampah	34.373.91	134.644,21
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	1.626.61
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	33.958,65	133.017.60
3	Jumlah sampah terkelola	117.443,63	460.032.08
4	Timbulan sampah	192.020,7442	752.154,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah TPS (unit)	231	245	275	334	350
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	1.386	1.470	1.650	2.668	3.088
Jumlah Penduduk (Jiwa)	968.632	927.181	939.718	945.441	954.706
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	1,43	1,59	1,76	2,82	3,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah TPS sebanyak 350 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,253 m3. Masih sangat kecil namun ada peningkatan dibanding tahun 2019.

g. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	34,00	31,33	34,67	39,63	51,80
Indeks Kualitas Udara	87,76	82,31	85,66	90,90	85,25
Indeks Tutupan Lahan	27,50	27,50	43,15	53,09	54,82
Volume sampah yang tertangani	420.000m^3	441.000m^3	486.784m^3	452.185m^3	460.032m^3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan standar pelayanan administrasi kependudukan tahun 2019 meliputi Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan KK, Penerbitan KTP elektronik, Penerbitan KIA, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Penerbitan Akta Kelahiran, Pencatatan Lahir Mati, Penerbitan Akta Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, Pencatatan Pembetulan Akta, Pencatatan Pembatalan Akta, Pencatatan Penerbitan Kutipan II, Legalisir Fotocopi Dokumen Adminduk. Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poin utama pengelolaan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
2. Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat keterangan terkait lainnya;
3. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Kartu Keluarga (KK)		
		Jumlah KK	Kepemilikan KK	Prosentase
1	Srandakan	10.929	10.929	100
2	Sanden	11.524	11.524	100
3	Kretek	11.083	11.083	100
4	Pundong	12.648	12.648	100
5	Bambanglipuro	15.023	15.023	100
6	Pandak	18.261	18.261	100
7	Bantul	22.709	22.709	100
8	Jetis	20.596	20.596	100
9	Imogiri	22.358	22.358	100
10	Dlingo	13.984	13.984	100
11	Pleret	16.252	16.252	100
12	Piyungan	17.940	17.940	100
13	Banguntapan	37.647	37.647	100
14	Sewon	34.409	34.409	100
15	Kasihan	35.548	35.548	100
16	Pajangan	12.161	12.161	100
17	Sedayu	16.544	16.544	100
Total		**329.616**	**329.616**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

b. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap anak Indonesia perlu memiliki KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Identitas Anak. KIA bertujuan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak

konstitusional anak. KIA menjadi bukti identitas resmi anak yang umurnya 0-17 tahun, kartu ini berlaku layaknya KTP.

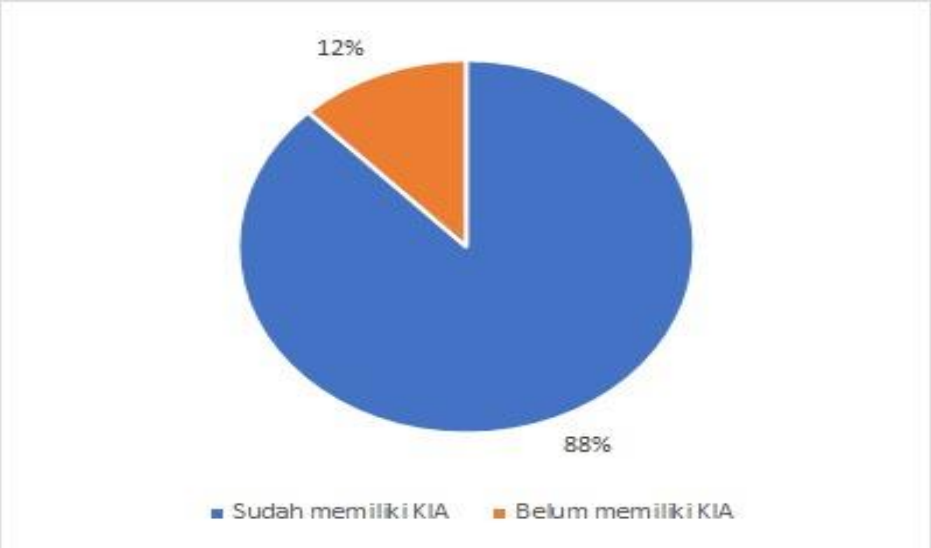

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, 2021

Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah anak yang belum memiliki KIA mencapai 12%, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

c. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)		
	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-El	Persentase
Srandakan	24.060	24.002	99,76
Sanden	25.056	24.988	99,73
Kretek	24.198	24.134	99,74
Pundong	27.601	27.508	99,66
Bambanglipuro	32.258	32.174	99,74
Pandak	40.280	40.176	99,74
Pajangan	27.781	27.675	99,61
Bantul	49.295	49.132	99,66
Jetis	44.706	44.588	99,73
Imogiri	48.508	48.320	99,61
Dlingo	31.021	30.890	99,57
Banguntapan	84.376	84.110	99,68
Pleret	35.746	35.596	99,58
Piyungan	39.633	39.498	99,65
Sewon	76.331	76.047	99,62
Kasihan	79.240	78.982	99,67
Sedayu	36.740	36.618	99,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	677.425	703.660	713.078	718.179	724.438
2	Jumlah PendudukWajib KTP	704.074	710.225	714.518	721.687	726.830
3	Persentasependuduk yang memiliki KTP ber-NIK	96,21%	99,07%	99,79%	99,51	99,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

d. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk

registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020

KAPANEWON	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	PERSENTASE
Srandakan	31.082	19.448	62,57
Sanden	31.810	18.875	59,34
Kretek	30.764	17.593	57,19
Pundong	35.666	19.347	54,24
Bambanglipuro	41.706	22.807	54,69
Pandak	52.036	30.864	59,31
Bantul	64.652	41.430	64,08
Jetis	58.631	35.760	60,99
Imogiri	63.835	35.926	56,28
Dlingo	39.998	19.976	49,94
Pleret	48.497	26.925	55,52
Piyungan	52.862	30.056	56,86
Banguntapan	113.298	64.961	57,34
Sewon	100.563	58.306	57,98
Kasihan	104.599	57.018	54,51
Pajangan	36.551	22.531	61,64
Sedayu	48.156	29.911	62,11
Srandakan	31.082	19.448	62,57
Total	954.706	551.734	57,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	10.127	10.949	10.000	9.928	9.038
Jumlah kelahiran di tahun N	10.516	11.056	10.900	9.938	9.075
Persentase penerbitan akta kelahiran	96,30	99,85	99,88	99.90	99.59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

e. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon, dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
1	2016	10.817
2	2017	15.653
3	2018	20.672
4	2019	12.245
5	2020	10.006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari uraian di atas, secara keseluruhan penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020

NO	KAPANEWON	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH KEPEMILIKAN KK	JUMLAH WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP-EL	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN
1	Srandakan	31.082	10.929	10.929	24.060	24.002	19.448
2	Sanden	31.810	11.524	11.524	25.056	24.988	18.875
3	Kretek	30.764	11.083	11.083	24.198	24.134	17.593
4	Pundong	35.666	12.648	12.648	27.601	27.508	19.347
5	Bambanglipuro	41.706	15.023	15.023	32.258	32.174	22.807
6	Pandak	52.036	18.261	18.261	40.280	40.176	30.864
7	Bantul	64.652	22.709	22.709	49.295	49.132	41.430
8	Jetis	58.631	20.596	20.596	44.706	44.588	35.760
9	Imogiri	63.835	22.358	22.358	48.508	48.320	35.926
10	Dlingo	39.998	13.984	13.984	31.021	30.890	19.976
11	Pleret	48.497	16.252	16.252	35.746	35.596	26.925
12	Piyungan	52.862	17.940	17.940	39.633	39.498	30.056
13	Banguntapan	113.298	37.647	37.647	84.376	84.110	64.961
14	Sewon	100.563	34.409	34.409	76.331	76.047	58.306
15	Kasihan	104.599	35.548	35.548	79.240	78.982	57.018
16	Pajangan	36.551	12.161	12.161	27.781	27.675	22.531
17	Sedayu	48.156	16.544	16.544	36.740	36.618	29.911
Total		**954.7066**	**329.6166**	**329.616**	**726.8300**	**724.438**	**551.7344**

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri,2021

f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	97,45	97,83	99,55	99,63
Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	NA	91,74	85	85	78,05
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,18	80,20	83,90	92,3	90,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Dari data diketahui rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 4,17, dalam arti rata-rata

satu LPMD membina sekitar 4 kelompok. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD tersebut menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK Kalurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Kelompok binaan PKK di Kabupaten Bantul sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	JUMLAH				
	PKK Kapanewon	Kelompok PKBN	Kelompok Kadarkum	Kelompok Pola Asuh	Kelompok PKK Padukuhan
2016	17	325	339	402	933
2017	17	325	339	402	933
2018	17	-	-	-	933
2019	17	-	-	-	933
2020	17	-	-	-	933

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

c. Pemberian Bantuan Khusus P2MD dan BKK

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kalurahan khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik diberikan bantuan khusus dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan. Bantuan Keuangan P2MD tahun 2020 dialokasikan sebesar 24,96 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 24,96 milyar rupiah. Sedangkan untuk Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) dialokasikan sebesar 28,94 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 28,94 milyar. Tahun 2020 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik, kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kulin. Untuk penanganan covid, ada BKK khusus covid bagi 75 Kalurahan masing masing dialokasikan berkisar 1,3 milyar.

Adapun output dari BKK dan P2MD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Proposal	Kegiatan	Jumlah (%)	Jumlah proposal	Jumlah Alokasi
1	**BKK**	Corblok, (Perbaikan Jalan)	43,60%	320	11.193.000.000
		Bangket, Talud	14,44%	106	3.918.000.000
		Drainase, Irigasi dll	5,99%	44	1.709.000.000
		Masjid / Rumah Ibadah	14,58%	107	4.658.000.000
		Penerangan Jalan	11,58%	85	2.315.000.000
		TK / PAUD	0,95%	7	420.000.000
		Gedung (pertemuan, Olahraga, serbaguna)	4,09%	29	2.235.000.000
		Lain- lain	4,77%	35	2.499.000.000
		Total	**100%**	**733**	**28.947.000.000**
2	**P2MD**	Corblok, (Perbaikan Jalan)	51,89%	385	13.525.000.000
		Bangket, Talud	20,49%	152	5.465.000.000
		Drainase, Irigasi dll	9,84%	73	2.995.000.000
		Penerangan Jalan	16,98%	126	2.520.000.000
		Lain - lain	0,81%	6	455.000.000
		Total	**100%**	**742**	**24.960.000.000**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Mandiri	14	16	22	24	27
Indeks Desa Membangun (%)	NA	NA	22	24	36

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, tampak pada tabel berikut.

Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	154,202	-	143,861	-	141,317	-	139,938	-	140,324	-
2	Peserta KB Aktif	121,764	78,96	109,257	75,95	103,912	73.53	101,691	72.67	102,751	73.22
3	Peserta KB MKJP	42,308	34,75	37,453	34,28	36,454	35,08	35,850	35.25	36,934	29.62
4	Peserta KB Pria	9,543	7,84	9,308	8,52	9,651	9,29	11,472	11.28	991	0.96
5	Peserta KB Baru	13,837	100,45	11,801	85,36	17,686	44,42	9,473	53.54	9730	34.74
6	PUS *Unmetneed*	9,058	5,87	12,118	8,42	14,226	10,07	14,757	10.55	13,975	9.96

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur disebabkan oleh banyaknya pasangan yang telah memasuki lansia. Hal ini juga diikuti oleh penurunan jumlah peserta keluarga berencana aktif maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun untuk kepesertaan KB pria dan peserta KB baru mengalami peningkatan. Hal ini berarti tingkat kesadaran dari pasangan usia subur yang belum mengikuti program KB mengalami peningkatan.

b. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih pasangan usia subur untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Cakupan anggota BKB ber-KB	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	91,88	94,50	91.04	93.02	90.79

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kategori keluarga kurang sejahtera (%)	13,49	11,94	12	NA	NA
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,29	3,12	3,12	NA	NA
Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	NA	1,67	1,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

2.3.1.2.9. Perhubungan

a. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.

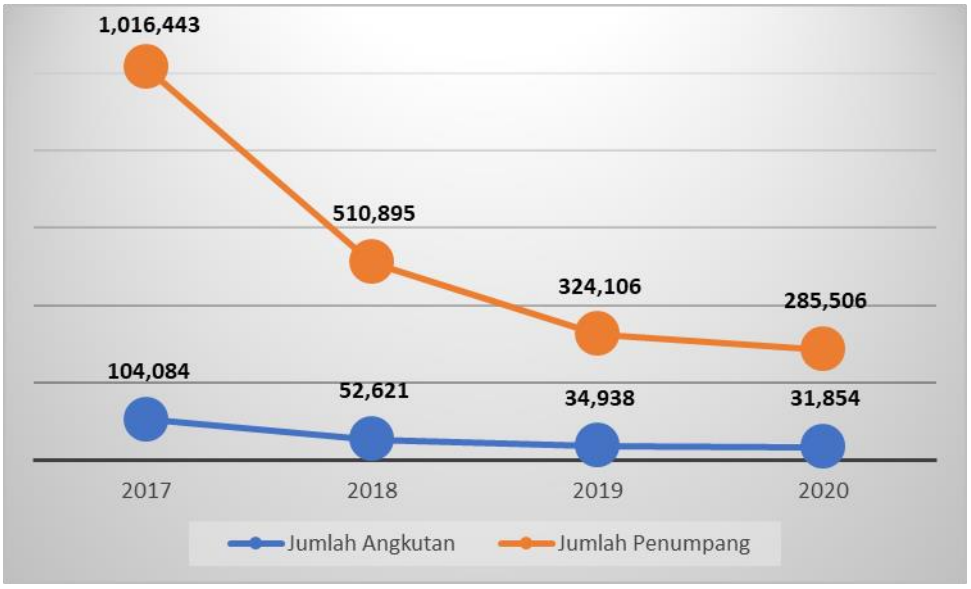

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum

pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

b. Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk kalurahan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima Kapanewon yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
1	2016	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
2	2017	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
3	2018	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri
4	2019	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
5	2020	7	Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

c. Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	Jumlah Uji Kir				
	2016	2017	2018	2019	2020
Uji kir kendaraan umum	17.810	18.730	20.923	19.131	11.762

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji KIR di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018, namun terjadi penurunan di tahun 2019 yang dikarenakan mutasi keluar dan beberapa kendaraan yang melakukan uji KIR di luar Kabupaten Bantul. Hal lain yang juga mempengaruhi penurunan jumlah uji kir adalah karena *brake tester* yang mengalami kerusakan. Sementara untuk tahun 2020 juga terjadi penurunan jumlah uji KIR yang disebabkan kuota yang dikurangi hingga 50% sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 (*social distancing*) sebagaimana

dianjurkan oleh kemenhub. Alasan lain adalah masih sama dengan tahun 2019 yaitu karena *brake tester* yang rusak sebanyak 4 kali dalam setahun sehingga menghambat pengujian KIR.

d. Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

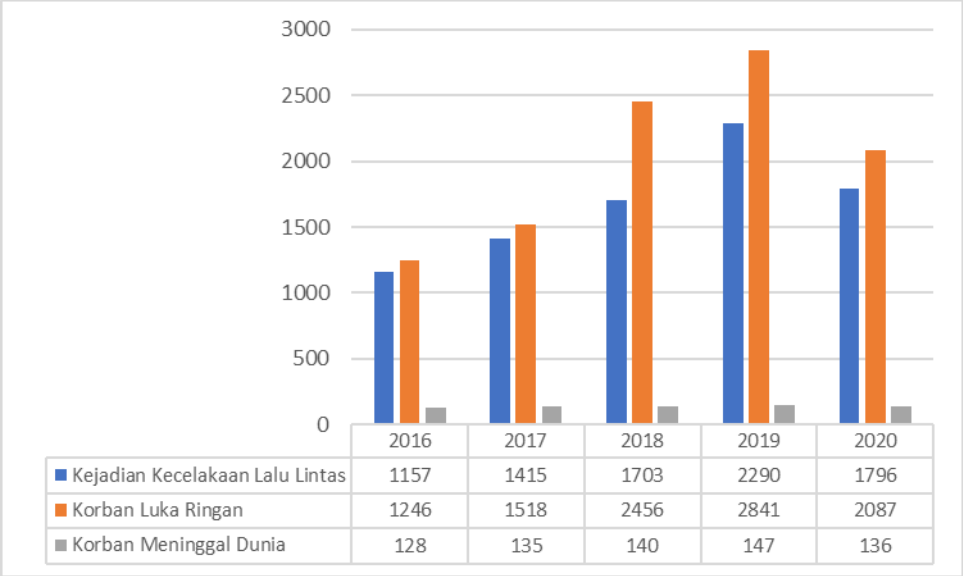

	2016	2017	2018	2019	2020
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	1157	1415	1703	2290	1796
Korban Luka Ringan	1246	1518	2456	2841	2087
Korban Meninggal Dunia	128	135	140	147	136

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan kejadian pada tahun 2019. Meskipun jumlah kecelakaan lalulintas menurun, masih perlu upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dengan

melakukan sosialisasi *safety riding,* memberlakukan batas kecepatan kendaraan dan melengkapi rambu-rambu lalu lintas.

Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan *Ringroad* Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan yang padat di pagi hari dan sore hari.

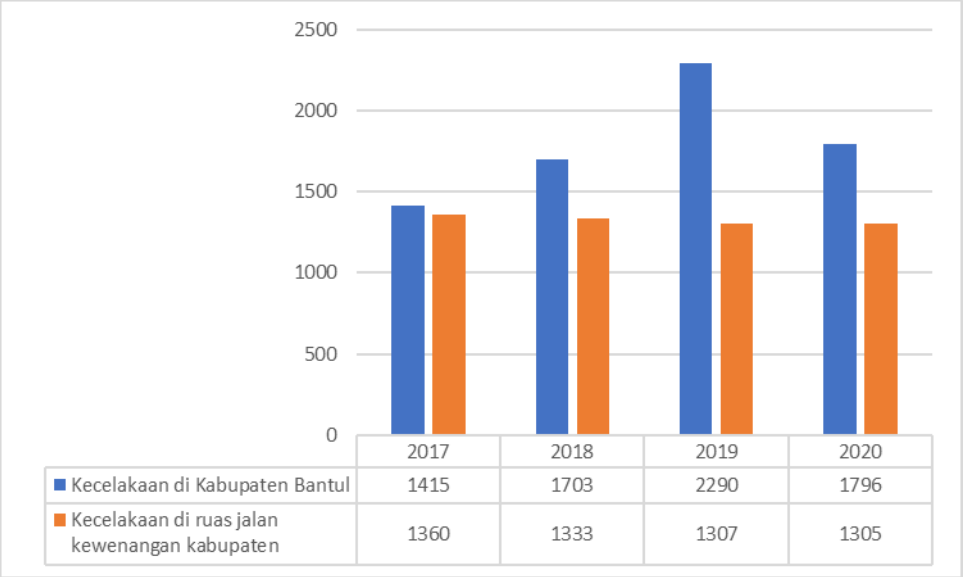

	2017	2018	2019	2020
Kecelakaan di Kabupaten Bantul	1415	1703	2290	1796
Kecelakaan di ruas jalan kewenangan kabupaten	1360	1333	1307	1305

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas, kecelakaan yag terjadi di ruas jalan kewenangan kabupaten cukup tinggi antara 57% sd 96%.

e. Terminal Bus

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Selama kurun waktu 5

tahun tidak mengalami pertambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

1) terminal penumpang tipe C di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul;
2) terminal angkutan barang di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu;
3) stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
4) terminal angkutan barang di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuangin, dan halte Bandung. Tahun 2018 sebanyak lima unit halte terpasang di halte sebelah Utara *Traffic Light* S4 Kasongan, sebelah Utara *Traffic Light* S4 Palbapang, depan SMP 2 Bantul, dan dua di depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA).

f. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih

menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Angkudes					
1	Ps.Bantul-Imogiri	10	10	0	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	3	0	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Seropan)	4	4	0	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0		0	0	0
	Jumlah	17	14	0	0	0
	Angkutan Perbatasan					
1	Yogya- Parangtritis	29	29	21	15	15
2	Yogya- Samas	7	7	5	5	5
3	Yogya- Sorobayan	8	8	3	3	3
4	Yogya-Srandakan	6	6	3	2	2
5	Dlingo - Terminal Giwangan	16	16	14	13	13
6	Yogyakarta – Petoyan	7	7	15	6	6
7	Trisik - Giwangan	16	16	14	12	12
	Jumlah	89	89	75	56	56
	AKDP					
1	Yogya- Panggang GK	17	18	13	13	0
2	Yogya- Parangtritis	26	26	26	26	0
3	Yogya- Samas	14	14	14	14	0
4	Yogya- Pandansimo	13	13	13	13	0
5	Yogya- Wates	16	16	17	17	0
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	8	8	0
	Jumlah	105	94	91	91	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

g. Rasio Konektivitas dan V/C Ratio

1) Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2016 - 2018 sebagai berikut.

Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

URAIAN	2016	2017	2018
Jumlah Angkutan Darat	109.018	104.084	52.621
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	1.089.241	1.016.443	610.895
Rasio Konektivitas (%)	10,1	10,24	10,30

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ ANGKUTAN\ DARAT}{JUMLAH\ PENUMPANG\ ANGKUTAN\ DARAT}\ X\ 100\%$$

Pada tahun 2019 – 2020 terdapat perubahan perhitungan rasio konektivitas menyesuaikan manual Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019 -2020 sebagai berikut :

Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23
Bobot Trayek	1	1
Bobot Angkutan Jalan	100	100
Rasio Konektivitas (%)	30,34	30,34

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ TRAYEK\ YANG\ DILAYANI\ PADA\ KAB\ x\ BOBOT\ TRAYEK}{JUMLAH\ KEBUTUHAN\ TRAYEK\ PADA\ KABUPATEN}\ X\ BOBOT\ ANGKUTAN\ JALAN$$

2) V/C Ratio

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 dijelaskan bahwa nisbah volume/kapasitas atau (V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. V/C

rasio sendiri berfungsi untuk mengetahui nilai tingkat pelayanan dari ruas jalan di suatu wilayah. Data V/C Ratio Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Ruas Jalan	V/C Ratio
1	2017	Jalan Parangtritis	0,31
		Jalan Bantul	0,27
2	2019	Jalan Srandakan	0,39
		Jalan Parangtritis	0,45
3	2020	Jalan Dr. Wahidin S	0,17
		Jalan Jend Sudirman	0,39

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

h. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perhubungan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas (%)	5	6	1,99	1,95	1,83

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelengaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum

terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

b. Penerbitan Informasi Media Cetak

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Buletin Sejada yang penyebarannya sampai ke tingkat padukuhan melalui kapanewon. Tujuan utama penerbitan buletin ini adalah: sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta sebagai sarana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemerintah. Penerbitan buletin ini dilakukan empat kali/edisi dalam setiap tahunnya.

c. Penyiaran Radio/TV

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interatif dengan pemirsa di luar studio.

d. *Website* Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat http://www.bantulkab.go.id, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah http://hukum.bantulkab.go.id dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Instansi	Subdomain
	Dinas	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	sosial.bantulkab.go.id
3	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	diperpautkan.bantulkab.go.id
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	pu.bantulkab.go.id
6	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.bantulkab.go.id
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	diskukmp.bantulkab.go.id
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dppkbpmd.bantulkab.go.id
12	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	disbud.bantulkab.go.id
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana),	dptr.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.bantulkab.go.id
16	Satpol PP	satpolpp.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	dpmpt.bantulkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
19	Dinas Perdagangan	perdagangan.bantulkab.go.id
	Badan	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.bantulkab.go.id
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.bantulkab.go.id
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.bantulkab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
5	Inspektorat	inspektorat.bantulkab.go.id
6	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.bantulkab.go.id
	PD	
1	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	dprd.bantulkab.go.id
3	RSUD Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	ulp.bantulkab.go.id
	Kapanewon	
1	Kapanewon Bambanglipuro	Kapanewon-bambanglipuro.bantulkab.go.id
2	Kapanewon Banguntapan	Kapanewon-banguntapan.bantulkab.go.id
3	Kapanewon Bantul	Kapanewon-bantul.bantulkab.go.id
4	Kapanewon Dlingo	Kapanewon-dlingo.bantulkab.go.id
5	Kapanewon Imogiri	Kapanewon-imogiri.bantulkab.go.id
6	Kapanewon Jetis	Kapanewon-jetis.bantulkab.go.id
7	Kapanewon Kasihan	Kapanewon-kasihan.bantulkab.go.id
8	Kapanewon Kretek	Kapanewon-kretek.bantulkab.go.id
9	Kapanewon Pajangan	Kapanewon-pajangan.bantulkab.go.id
10	Kapanewon Pandak	Kapanewon-pandak.bantulkab.go.id
11	Kapanewon Piyungan	Kapanewon-piyungan.bantulkab.go.id
12	Kapanewon Pleret	Kapanewon-pleret.bantulkab.go.id
13	Kapanewon Pundong	Kapanewon-pundong.bantulkab.go.id
14	Kapanewon Sanden	Kapanewon-sanden.bantulkab.go.id
15	Kapanewon Sedayu	Kapanewon-sedayu.bantulkab.go.id
16	Kapanewon Sewon	Kapanewon-sewon.bantulkab.go.id
17	Kapanewon Srandakan	Kapanewon-srandakan.bantulkab.go.id
	Kalurahan	
1	Kalurahan : Argodadi	http://argodadi.bantulkab.go.id
2	Kalurahan : Argomulyo	http://argomulyo.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
3	Kalurahan : Argorejo	http://argorejo.bantulkab.go.id
4	Kalurahan : Argosari	http://argosari.bantulkab.go.id
5	Kalurahan : Bangunharjo	http://bangunharjo.bantulkab.go.id
6	Kalurahan : Bangunjiwo	http://bangunjiwo.bantulkab.go.id
7	Kalurahan : Banguntapan	http://banguntapan.bantulkab.go.id
8	Kalurahan : Bantul	http://bantul.bantulkab.go.id
9	Kalurahan : Baturetno	http://baturetno.bantulkab.go.id
10	Kalurahan : Bawuran	http://bawuran.bantulkab.go.id
11	Kalurahan : Canden	http://canden.bantulkab.go.id
12	Kalurahan : Caturharjo	http://caturharjo.bantulkab.go.id
13	Kalurahan : Dlingo	http://dlingo-bantul.desa.id
14	Kalurahan : Donotirto	http://donotirto.bantulkab.go.id
15	Kalurahan : Gadingharjo	http://gadingharjo.bantulkab.go.id
16	Kalurahan : Gadingsari	http://gadingsari.bantulkab.go.id
17	Kalurahan : Gilangharjo	http://gilangharjo.bantulkab.go.id
18	Kalurahan : Girirejo	http://girirejo.bantulkab.go.id
19	Kalurahan : Guwosari	http://guwosari.bantulkab.go.id
20	Kalurahan : Imogiri	http://imogiri.bantulkab.go.id
21	Kalurahan : Jagalan	http://jagalan.bantulkab.go.id
22	Kalurahan : Jambidan	http://jambidan.bantulkab.go.id
23	Kalurahan : Jatimulyo	http://jatimulyo.bantulkab.go.id
24	Kalurahan : Karangtalun	http://karangtalun.bantulkab.go.id
25	Kalurahan : Karangtengah	http://karangtengah.bantulkab.go.id
26	Kalurahan : Kebonagung	http://kebonagung.bantulkab.go.id
27	Kalurahan : Mangunan	http://mangunan.bantulkab.go.id
28	Kalurahan : Mulyodadi	http://mulyodadi.bantulkab.go.id
29	Kalurahan : Muntuk	http://muntuk.bantulkab.go.id
30	Kalurahan : Murtigading	http://murtigading.bantulkab.go.id
31	Kalurahan : Ngestiharjo	http://ngestiharjo.bantulkab.go.id
32	Kalurahan : Palbapang	http://palbapang.bantulkab.go.id
33	Kalurahan : Panggungharjo	http://panggungharjo.desa.id
34	Kalurahan : Panjangrejo	http://panjangrejo.bantulkab.go.id
35	Kalurahan : Parangtritis	http://parangtritis.bantulkab.go.id
36	Kalurahan : Patalan	http://patalan.bantulkab.go.id
37	Kalurahan : Pendowoharjo	http://pendowoharjo.bantulkab.go.id
38	Kalurahan : Pleret	http://pleret.bantulkab.go.id
39	Kalurahan : Poncosari	http://poncosari.bantulkab.go.id
40	Kalurahan : Potorono	http://potorono.bantulkab.go.id
41	Kalurahan : Ringinharjo	http://ringinharjo.bantulkab.go.id
42	Kalurahan : Sabdodadi	http://sabdodadi.bantulkab.go.id

No.	Instansi	Subdomain
43	Kalurahan : Segoroyoso	http://segoroyoso.bantulkab.go.id
44	Kalurahan : Seloharjo	http://seloharjo.bantulkab.go.id
45	Kalurahan : Selopamioro	http://selopamioro.bantulkab.go.id
46	Kalurahan : Sendangsari	http://sendangsari.bantulkab.go.id
47	Kalurahan : Sidomulyo	http://sidomulyo.bantulkab.go.id
48	Kalurahan : Singosaren	http://singosaren.bantulkab.go.id
49	Kalurahan : Sitimulyo	http://sitimulyo.bantulkab.go.id
50	Kalurahan : Srigading	http://srigading.bantulkab.go.id
51	Kalurahan : Srihardono	http://srihardono.bantulkab.go.id
52	Kalurahan : Sriharjo	http://sriharjo.bantulkab.go.id
53	Kalurahan : Srimartani	http://srimartani.bantulkab.go.id
54	Kalurahan : Srimulyo	http://srimulyo.bantulkab.go.id
55	Kalurahan : Sumberagung	http://sumberagung.bantulkab.go.id
56	Kalurahan : Sumbermulyo	http://sumbermulyo.bantulkab.go.id
57	Kalurahan : Tamanan	http://tamanan.bantulkab.go.id
58	Kalurahan : Tamantirto	http://tamantirto.bantulkab.go.id
59	Kalurahan : Temuwuh	http://temuwuh.bantulkab.go.id
60	Kalurahan : Terong	http://terong.bantulkab.go.id
61	Kalurahan : Timbulharjo	http://timbulharjo.bantulkab.go.id
62	Kalurahan : Tirtohargo	http://tirtohargo.bantulkab.go.id
63	Kalurahan : Tirtomulyo	http://tirtomulyo.bantulkab.go.id
64	Kalurahan : Tirtonirmolo	http://tirtonirmolo.bantulkab.go.id
65	Kalurahan : Tirtosari	http://tirtosari.bantulkab.go.id
66	Kalurahan : Triharjo	http://triharjo.bantulkab.go.id
67	Kalurahan : Trimulyo	http://trimulyo.bantulkab.go.id
68	Kalurahan : Trimurti	http://trimurti.bantulkab.go.id
69	Kalurahan : Trirenggo	http://trirenggo.bantulkab.go.id
70	Kalurahan : Triwidadi	http://triwidadi.bantulkab.go.id
71	Kalurahan : Wijirejo	http://wijirejo.bantulkab.go.id
72	Kalurahan : Wirokerten	http://wirokerten.bantulkab.go.id
73	Kalurahan : Wonokromo	http://wonokromo.bantulkab.go.id
74	Kalurahan : Wonolelo	http://wonolelo.bantulkab.go.id
75	Kalurahan : Wukirsari	http://wukirsari.bantulkab.go.id
	Lembaga lain	
1	PPID utama	ppid.bantulkab.go.id
2	KIM Kabupaten Bantul	kim.bantulkab.go.id
3	Karang Taruna Kabupaten Bantul	karangtaruna.bantulkab.go.id
4	Ikatan Bidan	ibi.bantulkab.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul hingga saat ini meliputi 202 titik. Dari jumlah tersebut 70 titik telah menggunakan jaringan *fiber optic* (FO) dan 132 titik lainnya menggunakan radio nirkabel. Guna melayani penggunaan internet, telah dialokasikan bandwith 500 MB.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	60	70,33	77,70	80,69	101,49
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	-	75,23	75,33	78,56	100,04

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi Berbadan Hukum

Pada tahun 2016 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang: Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi. Jumlah koperasi berbadan hukum sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan

dibanding tahun 2018. Jumlah koperasi berbadan hukum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasihan	10	35	28	28	27
2	Sewon	62	51	43	42	44
3	Banguntapan	42	34	25	25	24
4	Pundong	12	6	8	9	9
5	Dlingo	20	19	16	16	16
6	Piyungan	23	21	17	16	17
7	Pajangan	10	9	8	8	8
8	Bantul	92	86	69	69	70
9	Srandakan	18	16	10	11	11
10	Pandak	17	15	13	13	14
11	Imogiri	31	30	24	25	25
12	Sanden	23	22	19	19	19
13	Kretek	10	9	10	10	10
14	Sedayu	18	16	15	15	15
15	Jetis	31	26	17	18	17
16	Pleret	23	17	10	10	10
17	Bambanglipuro	21	21	15	15	15
Jumlah		**493**	**433**	**347**	**349**	**351**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 202i

b. Perkembangan UKM

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 49.801 unit, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2019.

Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	27.708	27.828	28.384	29.098	30.468
2.	Usaha Kecil	11.544	11.594	11.768	11.992	12.201
3.	Usaha Menengah	6.926	6.956	6.991	7.058	7.114
	Jumlah	46.178	46.378	47.143	48.148	49.801

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	55.416	55.656	56.768	58.225	59.890
2.	Usaha Kecil	34.632	34.782	35.130	36.048	36.925
3.	Usaha Menengah	6.926	6.956	111.856	112.977	113.884
	Jumlah	200.864	201.734	203.754	207.250	210.699

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM.

Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah
1	2016	4.674
2	2017	2.749
3	2018	4.996
4	2019	6.864
5	2020	Melalui OSS
Jumlah		23.814

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	192	183	185	185
Peningkatan Kesehatan Koperasi	10	10	10	12	8

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021.

Peningkatan kesehatan koperasi turun pada tahun 2020 karena dipengaruhi oleh salah satu unsur penilaiannya, yaitu penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT). Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan berkumpul dibatasi sehingga koperasi ada yang tidak menyelenggarakan RAT.

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

a. Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Bantul kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2016	37	5	42
2	2017	46	15	61
3	2018	47	47	94
4	2019	41	64	105
5	2020	77	56	133

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Data di atas menunjukkan jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 28 investor dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya jumlah investor tentunya berdampak pula pada nilai investasi yang ditanamkan. Nilai investasi PMA/PMDN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	*Jmlh Proyek PMDN*	*Jmlh Proyek PMA*	*Jmlh Proyek PMDN+ PMA*	*Nilai Investasi PMDN*	*Nilai Investasi PMA (Rp)*	*Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)*	*Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)*	*Pertum-buhan (%)*
s.d 2016	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,	142.143.455.561,11	14,60
s.d 2017	15	46	61	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.596,	141.917.800.000,00	12,72
s.d 2018	47	47	94	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,	149.052.000.000,00	11,85
s.d 2019	103	106	209	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,	130.897.300.000,00	9,31
s.d.2020	338	96	434	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,	57.500.940.000,00	3,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021
Catatan:
- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situshttps://lkpmonline.bkpm.go.id
- 2016 , kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P2016
- 2017 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-P2017
- 2018 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-2018
- 2019 , kurs US$ 1 = Rp15.000 sesuai APBN-2019

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi

pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai nilai Rp1.594.746.877.696 meningkat bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.587.245.987.696 . Jika dilihat dari nilai investasi, PMDN lebih besar dibanding PMA. Nilai investasi PDMN tahun 2020 sebesar Rp808.479.481.996,00, sementara nilai investasi PMA sebesar Rp786.267.895.780.

b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76
2	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51
3	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39
4	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138,66
5	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 hanya mencapai 67,86 hal ini berarti satu perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 67 sampai 68 tenaga kerja, menurun jauh bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 138,66 yang berarti satu

perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 138 sampai 139 tenaga kerja.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan perijinan tepat waktu	81,60	70,98	83,87	83,80	96,92
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,99	83,08	83,29	85,89	87,89
Pertumbuhan realisasi investasi	12,20	12,72	11,85	9,30	3,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul bisa dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh dalam setiap event pertandingan olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasinal yang sangat bagus dan membanggakan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bantul lebih serius menangani bidang kepemudaan baik dari segi pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemudaan dan kemitraan serta kelembagaan pemuda, maupun pembinaan olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

a. Kepemudaan

Ada banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang kepemudaan dengan tujuan untuk melatih kemandirian pemuda, meningkatkan keperdulian pada lingkungan serta meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah.

Berbagai kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda	(1) Lomba Wirausaha Muda Bantul; (2) MTQ Pelajar Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten, dilaksanakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolalan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi dan dari hasil seleksi ditentukan perwakilan untuk mengikuti seleksi di tingkat DIY pada tahun 2021
	b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda	(1) Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; Sesuai instruksi presiden terkait adanya Pandemi Covid 19 maka perwakilan, pengiriman petugas Paskibraka tidak dilaksanakan. (2) Pelatihan Tallent Mapping (pemetaan potensi pemuda); (3) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul (peran aktif pemuda di masyarakat dalam kegiatan rehab rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah); (4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; (5) Pelatihan Bela Negara Pemuda (terutama pelajar sekolah menengah untuk menangkal aliran radikal dan mengembangkan budaya disiplin); (6) Seminar NAPZA (bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bantul dan LSM);
3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (termasuk kemampuan *public speaking)*
4) Program Pengembangan Kebijakan dan Menajemen Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	(1) Pelatihan Wasit Tenis Lapangan, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket. (2) Pelatih Sepak Takraw, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket.
5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	(1) Car Free Day (hanya dilaksanakan pada Januari dan Februari selanjutnya dihentikan

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
Olahraga		karena adanya pembatasan kegiatan masyarkat akibat pandemi Covid 19); (2) Olahraga Tradisional (penyelenggaraan lomba untuk melestarikan nilai-nilai pembentukan karakter yang terkandung dalam permainan tradisional warisan leluhur); (3) Pemassalan Olahraga.
	b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	(1) Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul; (2) Pekan Olahraga Daerah (POPDA) (3) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Kab. Bantul (POSPEDA); (4) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA); (5) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC; (6) Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul; (7) Pembinaan Atlet Berprestasi (90 atlet dari 10 cabang olahraga unggulan); (8) Reward / Bonus Atlet Berprestasi POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA (549 atlit dan 95 pelatih);
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	(1) Pengadaan peralatan E Sport (2) Program Perisai, Penambahan fasilitas kebersihan SSA dan Dwi windiu (3) Pemeliharaan rutin/berkala sarpras olahraga

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Unsur penilaian kegiatan lomba Wirausaha Muda Bantul sebagaimana tersebut dalam tabel di atas diantaranya meliputi kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan wirausaha muda dalam penguasaan teknologi informasi melalui media, terutama dalam hal promosi dan kemasan publikasi yang menarik, akurat dan inovatif. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan potensi anak muda dibidang kewirausahaan dapat berkembang dengan baik.

Selain berbagai macam kegiatan kepemudaan sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, di Kabupaten Bantul juga ada wadah pengembangan potensi anak muda antara lain: Rumah milenial dan kegiatan forum anak bantul.

b. Olahraga

1) Organisasi Olahraga

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki 71 organisasi induk cabang olahraga. Sebagai anggota KONI, Kabupaten Bantul telah memiliki 43 organisasi cabang olahraga seperti Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) dan sebagainya, dari berbagai macam cabang olahraga tersebut masing-masing membina beberapa klub yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

2) Prestasi dalam Bidang Olahraga

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi pelajar difabel dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit pelajar berprestasi, sementara POSPEDA merupakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pasantren Tingkat Daerah dan merupakan salah satu ruang kreasi dan prestasi bagi santriwan dan santriwati di bidang olahraga dan seni Islami.

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2020, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestas sebagai juara umum dengan memperoleh medali emas 96, perak 77 dan perunggu 72 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	96	77	72	246	1
2	Kab. Sleman	67	61	97	225	2
3	Kota Yogyakarta	45	41	63	149	3
4	Kab. Kulonprogo	18	34	51	103	4
5	Kab. Gunungkidul	14	27	53	94	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Sementara dalam Pekan Paralimpic Nasional, berbagai macam kejuaraan cabang olahraga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga diraih oleh Kabupaten Bantul. Daftar prestasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis kursi roda	Ganda Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
2	Tenis kursi roda	Tunggal Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
3	Tenis kursi roda	Ganda Campuran (Quad dan pemula putri)	Tuna Daksa Bawah	Emas
4	Tenis kursi roda	Ganda Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
5	Tenis kursi roda	Tunggal Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
6	Tenis kursi roda	Ganda Quad dan Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
7	Atletik	Lari 100 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
8	Atletik	Lari 200 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
9	Atletik	Lompat jauh T.F 54 Putri	Tuna Rungu Wicara	Perak
10	Atletik	Lempar lembing F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perak
11	Tenis Meja	Ganda Mix Class 9	Tuna Daksa Bawah	Perak
12	Bulutangkis	Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
13	Bulutangkis	Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak
14	Bulutangkis	Tunggal Putri Wch Open	Tuna Daksa Bawah	Perak
15	Atletik	Lempar Cakram F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
16	Atletik	Lempar Peluru F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
17	Atletik	Lompat Jauh T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perunggu
18	Atletik	Lari 800 m T/F. 37 (CP) Putra	CP	Perunggu
19	Tenis Meja	Tunggal Kelas Tuna Netra Putra	Tuna Netra	Perunggu
20	Tenis Meja	Ganda Mix Kelas 11	Tuna Grahita	Perunggu
21	Tenis Meja	Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
22	Tenis Meja	Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
23	Tenis kursi roda	Beregu Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
24	Bulutangkis	Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
25	Bulutangkis	Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019

NO	CABOR	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis Meja	Tunggal	Tuna Netra	Emas
2	Tenis Meja	Tunggal	TT4	Perak
3	Tenis Meja	Beregu	TT3-TT5	Perak
4	Tenis Meja	Tunggal	Tuna Netra	Perunggu
5	Tenis Meja	Tunggal	TT3-TT5	Perunggu
6	Bocia	Tunggal	BC 5	Perak
7	Basket Kursi Roda	Beregu 3x3	Wheelchair	Perunggu
8	Angkat Berat	49 Kg	Daksa	Emas
9	Atletik	T. Peluru	F11	Perak
10	Atletik	L. Cakram	F11	Emas
11	Atletik	200 M	T37	Perunggu
12	Atletik	400 M	T37	Perunggu
13	Atletik	200 M	T11	Perak
14	Atletik	L. Jauh	F11	Emas
15	Atletik	100 M	T11	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020"

No	CABANG OLAHRAGA	NOMOR	KLASIFIKASI	PRESTASI
1	Tenis Kursi Roda	Beregu	Main Draw	Emas
2	Tenis Kursi Roda	Beregu	Second Draw	Emas

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat prestasi yang diraih kontingen Kabupaten Bantul dari tahun 2018 sampai 2020.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut	32,00	31,40	34,21	32,18	40,33
Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.1.2.14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir,

terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2016 – 2019, urusan statistik belum dilaksanakan melalui program tersendiri. Setelah perubahan RPJMD 2016-2021, pada tahun 2020, urusan statistik dilaksanakan melalui Program Penyajian Data Statistik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	
								Target	Capaian
1	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Data statistik acuan perencanaan pembangunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	7	1
2	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
		Portal data terkelola	Portal	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal

nasional https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional https://data.go.id/. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (*resource*) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu Kalurahan (Kalurahan Panggungharjo). Kalurahan Panggungharjo menjadi *pilot project* nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat Kalurahan. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (*resource*) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 157 layer data spasial.

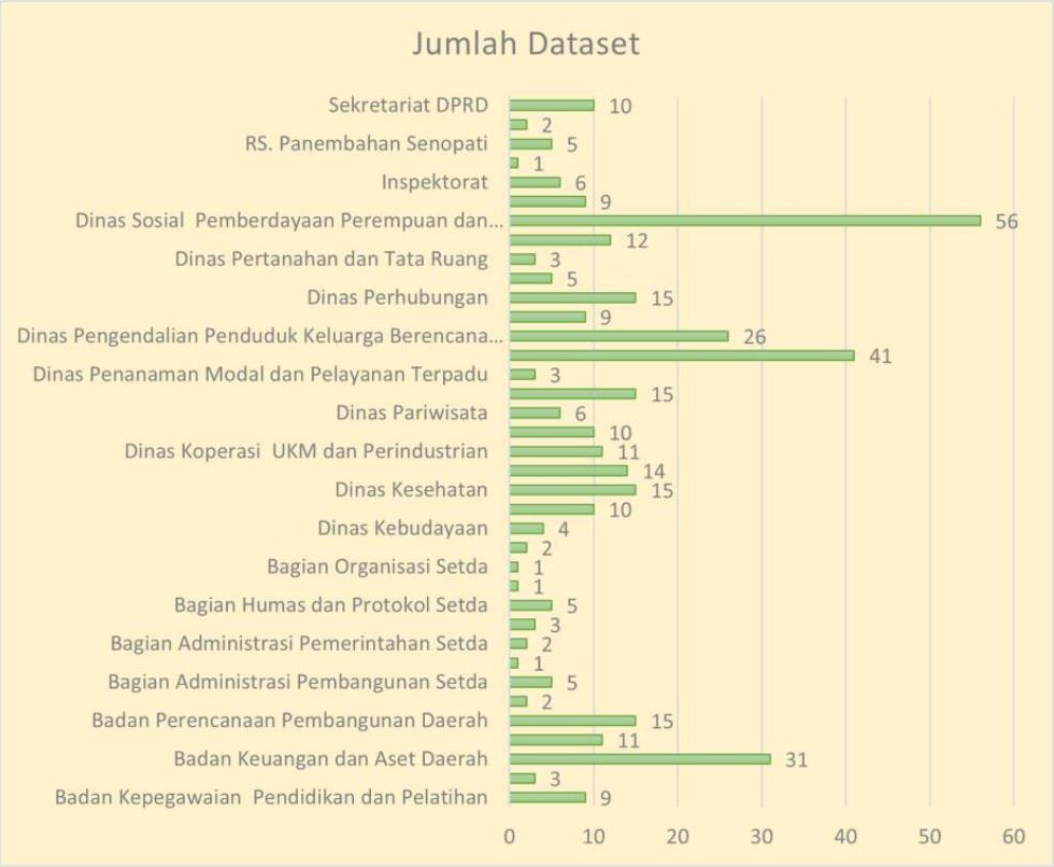

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaran SDI, diantaranya sesuai permendagri 18/2020 dan permendagri 86/2017, sebagai berikut :

Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380
Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18
Jumlah *resource* yang dipublikasi	*resource*	0	712
Jumlah *resource* yang berstatus privat	*resource*	0	27
Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	Layes spasial	0	157
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58.15
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95.48
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83.75	100
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83.75	100
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43
jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37
jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Survey	0	0
jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Dalam hal penyelenggaran simpul jaringan, Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten, diterima pada tanggal 27 November 2020.

Kabupaten Bantul dinilai telah berhasil mengembangkan Simpul Jaringan dalam waktu relatif cepat. Kebijakan Satu Data

Indonesia juga telah dimasukkan dalam simpul jaringan Kabupaten Bantul sesuai Perpres 39/2019. Disamping itu Kabupaten Bantul diapresiasi melibatkan seluruh perangkat daerah dalam memperkaya data yang ada di geoportal. Studio untuk pengolahan informasi geosoasial dan ruang pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan nilai lebih simpul jaringan Kabupaten Bantul. Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

2.3.1.2.15. Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan, diantaranya adalah pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Pengamanan persandian pada hakekatnya merupakan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Pengamanan persandian meliputi:

- naskah dinas berklasifkasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi;
- komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail.

- informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*.
- pengiriman informasi digital, kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan.
- pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Dalam operasional kegiatannya pengamanan persandian melaksanakan:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

Program ini bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul. Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan

Bertujuan untuk melakukan deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara menanam peralatan penyadap

di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap

NO	TAHUN		
	2018	2019	2020
1.	Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati	Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas PUPR
2.	Ruang Kerja dan Ruang Rapat Wakil Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati	Ruang kerja dan ruang rapat Dinas Kesehatan
3.	Ruang Kerja Sekretaris Pribadi upati dan Wakil Bupati	Ruang Kerja Staff Ahli	Ruang kerja dan ruang rapat Inspektur Bantul
4.	Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah	Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah	Ruang kerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5.			Ruang kerja Kasubag Teknologi Informasi Pengadaan, Ruang Kerja Kassubag Pengadaan Barang dan Jasa, Ruang Rapat Madya, Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Pratama
6.			Ruang kerja Ketua DPRD Bantul
7.			Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

3) Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemerintah Kabupaten Bantul

Dilakukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting yang dihadiri pejabat tinggi, seperti kegiatan Syawalan Gubernur DIY di Kabupaten Bantul tahun 2020, Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul tahun 2020.

4) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemeritah Daerah

Jumlah sambungan telepon *extention* baik analog maupun IPPhone pada tahun 2020 mencapai 238 sambungan, sementara itu untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frequensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup.

5) Gelar Jaring Persandian Daerah

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY(Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY,Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas,Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Sebagai UPT Teknis Persandian, di Pemkab. Bantul, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian tergabung dalam Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY. Forkomsanda menjadi media komunikasi dan koordinasi di tingkat Daerah DIY, dengan tujuan untuk menyatukan pola pikir, pola tindak dan pola sikap petugas sandi di Lingkungan Pememerintah Daerah DIY.

6) Penyediaan Filter *Repeater* RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh, atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi.

7) Layanan Call Center 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, *call center* atau panggilan darurat di tingkat nasional dan daerah yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal harus menggunakan nomor 112, integrasi panggilan paling lambat sudah dilaksanakan pada tahun 2022. *Call Centre* 112 merupakan suatu inovasi sistem pelayanan pengaduan kepada masyarakat secara terpadu yang dapat diakses selama 24. *Call Centre* 112 dibentuk dan diresmikan oleh Bupati Bantul pada tanggal 18 November 2019.

Data panggilan darurat masuk sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020

Jumlah Panggilan Masuk dari Bulan Januari – November 2020	
Bulan	**Jumlah Panggilan**
Januari	41.852
Februari	28.915
Maret	42.168
April	31.849
Mei	34.385
Juni	30.899
Juli	25.124
Agustus	27.608
September	27.982
Oktober	29.069
November	16.133
Total	**335.984**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi dalam penerapan *Digital Government Service.*

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal

Kegiatan ini berupa pemanfaatan radio komunikasi internal untuk mendukung komunikasi di beberapa Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta *repeater*-nya.

2) Penambahan Saluran Telepon

Saluran telepon kini telah menjangkau seluruh perangkat daerah dan kapanewon.

3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2021. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Berikut pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik

No	Domain	Nama Sistem	PD Pengampu	Pelaksanaan Penilaian
1	https://sipentol.bantulkab.go.id/	Sistem Pendaftaran Online Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan	19-24 Mei'21
2	https://sidakui.bantulkab.go.id/	Aplikasi Sistem Informasi Data Koperasi UMKM dan Industri (SIDAKUI)	DKUKMP	29 Mar - 1 Apr'21 7 - 9 Apr'21 26 - 29 Apr'21
3	https://simponi.bantulkab.go.id/	Sistem Informasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terkini Kabupaten Bantul	Disdikpora	15-16 Sep'20 22-23 Sep'20 16-21 Okt'20 25-29 Jan'21
4	https://bkk.bantulkab.go.id/	Aplikasi BKK Disnakertrans	Disnakertrans	16-25 Mar'21
5	simelog.*	Sistem Manajemen Logistik Obat	Dinkes	8-10 Mar'21 21-23 Apr'21

No	Domain	Nama Sistem	PD Pengampu	Pelaksanaan Penilaian
				24-27 Mei'21
6	https://sisklb.bantulkab.go.id/	Sistem Informasi Kejadian Luar Biasa	Dinkes	22 Okt'20 4-6 Nov'20 16-19 Nov'20 1-3 Mar'21
7	https://smartcity.bantulkab.go.id/	Profil *Smart City* Pemkab Bantul	Diskominfo	1-5 Feb'21
8	https://simpatik.bantulkab.go.id/	Aplikasi SIM Data Pariwisata	Dinpar	14-15 Sept'20 12-13 Apr'21
9	bukutamudiskominfo.kab-bantul.id	Aplikasi Buku Tamu	Diskominfo	12-21 Apr'21

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 diolah

Pelaksanaan asesment dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen selama periode tahun 2021 sampai dengan 1 Juni 2021 sebagai berikut:

Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah Aplikasi
1.	Aplikasi Baru		18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2.	Aplikasi Lama		3
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	0
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	3
	Total Aplikasi yang dinilai		21

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

4) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap

suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data-data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa:

1. Layanan penanggulangan dan pemulihan
2. Layanan penanganan kerawanan
3. Layanan penanganan artifak.

Selama tahun 2020 terjadi 12 insiden dengan rincian dan masing-masing penanganannya sebagai berikut:

Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020

No.	Jenis Aplikasi	Tanggal Laporan	Jenis Serangan	Penanganan
1.	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	31 Maret 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* sementara selama upgrade aplikasi; Perbaikan selesai pada akhir tahun 2020
2.	Sistem Informasi	24 Maret 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	Perbaikan
3.	Sistem Informasi	5 Mei 2020	Akses server via web menggunakan *backdoor* yang ditanamkan di server	Perbaikan
4.	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	19 Juni 2020	Ransomware	*Recovery* menggunakan data backup
5.	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	27 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* sementara, perbaikan menunggu anggaran tahun depan
6.	Sistem Informasi dan layanan	27 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* permanen sudah tersedia aplikasi pengganti
7.	Sistem Informasi	28 Juli 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan

No.	Jenis Aplikasi	Tanggal Laporan	Jenis Serangan	Penanganan
8.	Sistem Informasi	29 Juli 2020	Terdeteksi Malware/ *Backdoor* di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
9.	Sistem Informasi dan Web Profil	9 September 2020	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	Perbaikan
10.	Sistem Informasi	30 September 2020	Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
11.	Sistem Informasi	5 Oktober 2020	Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	*Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan
12.	*Abuse Report*	21 Desember 2020	Malware pada perangkat end point (pc/ laptop)	*Tracing* dan blok ke ip tujuan serangan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

c. Capaian Indikator Kegiatan

Capaian indikator persandian tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	NA	NA	NA	10	15
2.	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	NA	NA	NA	43	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Kebudayaan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan di Indonesia, tidak hanya memunculkan bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang dalam masyarakat namun sebagai modal pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa konsep. kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni.

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

Kabupaten Bantul memiliki setidaknya tiga jenis kelompok seni dan budaya yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul, yaitu seni musik, seni tari dan seni teater.

Dengan berkembangnya kelompok seni maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasikan karya-karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang

merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) melaksanakan program kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana APBD dan Dana Keistimewaan DIY melalui mekanisme BKK.

a. Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Budaya

Dinas Kebudayaan (Kunda Kabudayan) mulai tahun 2017 mendapat Dana Keistimewaan dari Provinsi DIY. Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai tahun 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk membina dan memberi ruang berekspresi seni dan budaya, serta pemeliharaan warisan budaya.

Sumber Data Nomor Induk Kesenian (NIK) pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2020 menunjukkan sejumlah 1.156 kelompok seni yang memiliki register kesenian berupa NIK, namun hanya 1.106 kelompok seni yang aktif. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya berupa :

a. Festival : Jathilan, Wayang, Reog, Dolanan Anak, Hadroh, Musik Religi, Teater, Tari, Koes Plus-an, Campursari, Gejog Lesung, Montro, Bergodo;
b. Pentas seni : Pentas Wayang, Kethoprak, Jathilan, Reyog, Tari, Hadroh, Musik Religi, Campursari dan Koes Plus-an.

Tabel berikut ini adalah fasilitasi kelompok seni yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menggunakan anggaran Dana Keistimewaan DIY.

Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Fasilitasi Kelompok Seni	488	498	228	239

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pada masa pandemi Covid-19 yang dirasakan pada tahun 2020, fasilitasi pertunjukan kelompok seni dilakukan secara daring, di gedung tertutup, tanpa penonton dan hanya untuk kesenian yang tidak terlalu banyak melibatkan peserta. Pertunjukan seni tetap dilaksanakan meskipun secara daring untuk selalu meningkatkan produktivitas pekerja seni. Kegiatan Gelar Budaya Jogya di Propinsi DIY, juga dikemas secara daring yaitu Festival Kethoprak, Festival Sendra Tari, dan Festival Teater.

Program kegiatan untuk pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda berupa pelestarian cagar budaya. Kabupaten Bantul memiliki 126 cagar budaya yang tersebar hampir di seluruh kapanewon, dengan kepemilikan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan. Terdapat 126 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 disajikan secara terperinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
1	Kompleks Makam Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Tempat wisata religi	Keraton
2	Kompleks Makam Banyusumurup	Girirejo, Imogiri	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Tempat wisata religi	Keraton
3	Monumen Bibis	Bangunjiwo, Kasihan	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
4	Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Gubernur DIY	Kantor Sekretariat Juru Kunci Purloyo	Keraton
5	Bangunan Cagar Budaya Joglo R. Ngt. Hadi Puspito	Sumberagung, Jetis	SK Gubernur DIY	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
6	Bangunan Cagar Budaya Gereja Ganjuran	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Gubernur DIY Tahun 2000	Tempat ibadah dan wisata religi	Swasta
7	Bangunan Cagar Budaya Joglo Bp. Miji Yuwono	Trienggo, Bantul	SK Gubernur DIY Tahun 2002	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
8	Bangunan Cagar Budaya Joglo Broto Sudarmo	Gilangharjo, Pandak	SK Gubernur DIY Tahun 2002	Masih ditempati sebagai rumah tinggal	Pribadi
9	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening	Wukirsari, Imogiri	SK Gubernur DIY Tahun 2004	Bangunan tempat tinggal dan Museum Batik	Pribadi
10	Struktur Cagar Budaya Saluran air PG Pajangan	Sendangsari, Pajangan	SK Gubernur DIY Tahun 2008	Sarana irigasi	PSDA DIY
11	Bangunan Cagar Budaya Joglo Yusuf Sudirman	Jambidan, Banguntapan	SK Gubernur DIY Nomor 210/KEP/2010	Bangunan tempat tinggal	Pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
12	Kawasan Cagar Budaya Kotagedhe	Banguntapan	SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	Tempat wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
13	Kawasan Cagar Budaya Imogiri	Imogiri	SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	Tempat wisata religi	Keraton
14	Kawasan Cagar Budaya Kerta - Plered	Pleret	SK Gubernur DIY Nomor 211/KEP/2019	Tempat wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
15	Bangunan Kompleks Masjid Mataram Kotagede	Jagalan, Banguntapan	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - SK Bupati No. 458 Th 2016	Tempat ibadah dan wisata religi	Keraton
16	Kompleks Makam Imogiri	Girirejo, Imogiri	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - SK Bupati No. 458 Th 2016	Tujuan wisata religi segala umat beragama	Keraton
17	Bangunan Cagar Budaya Panggung Krapyak	Panggungharjo, Sewon	- PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri - Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2020 - SK Bupati No. 458 Th 2016	Bangunan monumental	Keraton
18	Struktur Cagar Budaya Dam Kamijoro	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
19	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Palbapang	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan sebagai kantor terminan Palbapang oleh Dinas Perhubungan Bantul	KAI
20	Bangunan Cagar Budaya Cagak ANIEM Palbapang	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 458 Th 2016	Tinggalan Tiang Listrik Peninggalan Kolonial masa Hindia Belanda	PLN DIY
21	Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan sebagai tempat tinggal	Pribadi
22	Situs Cagar Budaya Candi Gampingan	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
23	Situs Cagar Budaya Candi Mantup	Baturetno, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
24	Situs Cagar Budaya Petirtaan Payak	Srimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
25	Benda Cagar Budaya Watu Gilang Baturetno	Baturetno, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
26	Situs Cagar Budaya Gua Siluman	Banguntapan, Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan tempat untuk menepi atau bersemedi	Keraton
27	Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang	Seloharjo, Imogiri	SK Bupati No. 458 Th 2016	Wisata Sejarah	BPCB DIY
28	Benda Cagar Budaya Stoomwals PU	Palbapang, Bantul	SK Bupati No. 416 Th 2017	Tinggalan masa Kolonial Hindia-Belanda	DPUPKP BANTUL
29	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
30	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Sonopakis	Ngestiharjo, Kasihan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Perlu tindakan penyelamatan dari pembangunan rumah warga sekitar	Keraton
31	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Ambarbinangun	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Wisma atlet oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY	Keraton
32	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo	Tirtohargo, Kretek	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
33	Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Bangunan tempat tinggal	Pribadi
34	Struktur Cagar Budaya Dam Makam Mbulan	Sendangsari, Pajangan	SK Bupati No. 416 Th 2017	Digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
35	Benda Cagar Budaya Arca Hayasya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
36	Benda Cagar Budaya Arca Mukunda	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
37	Benda Cagar Budaya Arca Muraja	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
38	Benda Cagar Budaya Arca Sukarasya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
39	Benda Cagar Budaya Arca Vajrabhasa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
40	Benda Cagar Budaya Arca Vajradhupa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
41	Benda Cagar Budaya Arca Vajragantha	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
42	Benda Cagar Budaya Arca Vajragiti	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
43	Benda Cagar Budaya Arca Vajrakarma	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
44	Benda Cagar Budaya Arca Vajralasi	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
45	Benda Cagar Budaya Arca Vajraloka	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
46	Benda Cagar Budaya Arca Vajranrtya	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
47	Benda Cagar Budaya Arca Vajrapani	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
48	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraga	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
49	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraksa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
50	Benda Cagar Budaya Arca Vajrasphota	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
51	Benda Cagar Budaya Arca Vamsa	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
52	Benda Cagar Budaya Arca Vinayaka	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 416 Th 2017	Koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
53	Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit	Pleret, Pleret	SK Bupati N0. 595 Th 2018		Pribadi
54	Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 596 Th 2018	Tempat wisata religi	BPCB DIY
55	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kretek Abang Madukismo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No.597 Th 2018	Digunakan untuk jembatan oleh warga	DPUPKP BANTUL
56	Struktur Cagar Budaya Sendang Kasihan	Tamantirto , Kasihan	SK Bupati No. 598 Th 2018	Tempat wisata religi	Keraton
57	Bangunan Cagar Budaya Masjid Wonokromo	Wonokromo, Pleret	SK Bupati No.599 Th 2018	Tempat ibadah	Keraton
58	Benda Cagar Budaya Mushaf Bejen	Bantul, Bantul	SK Bupati No. 600 Th 2018	Koleksi pribadi oleh pemilik	Pribadi
59	Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Stasiun Sedayu	Argosari, Sedayu	SK Bupati No. 601 Th 2018	Aset KAI yang tidak terpelihara	KAI

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
60	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 602 Th 2018	Pembatas wilayah sendang	BPCB DIY
61	Benda Cagar Budaya Arca Agastya di Kompleks Sendang Kasihan	Tamantirto , Kasihan	SK Bupati No. 603 Th 2018		BPCB DIY
62	Bangunan Cagar Budaya Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Tirtonirmolo, Kasihan	SK. Bupati No. 604 Th 2018	Tempat ibadah	Keraton
63	Struktur Cagar Budaya Sumur Gumiling Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 605 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
64	Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 606 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
65	Benda Cagar Budaya Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 607 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
66	Batu Balok Masjid Agung Plered	Pleret, Pleret	SK Bupati No.608 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
67	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Winongo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 609 Th 2018	Gudang oleh warga	KAI
68	Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 610 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
69	Benda Cagar Budaya Umpak Kerto	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 611 Th 2018	Wisata Sejarah	Disbud DIY
70	Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 612 Th 2018	Tempat wisata religi semua umat beragama	BPCB DIY
71	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Bantul	Bantul, Bantul	SK Bupati No. 613 Th 2018	Dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh masyarakat	KAI
72	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 614 Th 2018	Tembok pembatas atau benteng makam	BPCB DIY
73	Struktur Cagar Budaya Sendang Banyuurip	Jatimulyo, Dlingo	SK Bupati No. 615 Th 2018	Tempat wisata religi semua umat beragama	Keraton
74	Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 616 Th 2018	Tujuan wisata religi segala umat beragama	BPCB DIY
75	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api Winongo	Tirtonirmolo, Kasihan	SK Bupati No. 617 Th 2018	Jembatan penyebrangan warga	KAI
76	Benda Cagar Budaya Arca Ganesha di Kompleks Sendang Kasihan	Tamantirto, Kasihan	SK Bupati No. 618 Th 2018		BPCB DIY
77	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Dwiningsih	Canden, Ketis	SK Bupati No. 619 Th 2018	Bangunan tempat tinggal dan perkumpulan masyarakat	Pribadi
78	Struktur Cagar Budaya Gua Surocolo	Seloharjo, Pundong	SK Bupati No. 517 Th 2019	Tempat wiata	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
79	Benda Cagar Budaya Yoni Sembungan	Bangunjowo, Kasihan	SK Bupati No. 518 Th 2019		
80	Bangunan Masjid Pathok Negoro Babadan	Banguntapan, Banguntapan	SK Bupati No. 519 Th 2019	Tempat ibadah	Keraton
81	Bangunan Cagar Budaya Pasar Angkruksari	Donotirto, Kretek	SK Bupati No. 520 Th 2019		Dinas Perdagangan
82	Bangunan Cagar Budaya Bale palereman (Transit Jenazah Raja-raja Mataram)	Girirejo, Imogiri	SK Bupati No. 521 Th 2019		
83	Bangunan Cagar Budaya Langgar Dhuwur	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 522 Th 2019		
84	Banguna Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Mojosari	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 523 Th 2019	Aula, gedung TK ABA Mojosari	Pemerintah Kalurahan Sitimulyo
85	Bangunan Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Madigondo	Sitimulyo, Piyungan	SK Bupati No. 524 Th 2019	Sebagai Persatuan PAUD	Pemda Bantul
86	Banguna Cagar Budaya Rumah Tradisional Dinas kebudayaan DIY (Bekas Milik Bu Nur Johan)	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 525 Th 2019	Sebagai Sarana untuk masyarakat	Dinas Kebudayaan DIY
87	Struktur Cagar Budaya Makam Syeh Maulana Maghribi	Parangtritis, Kretek	SK Bupati No. 526 Th 2019	Tempat wisata religi	Keraton

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
88	Situs Cagar Budaya Gunung Mungker	Srigading, Sanden	SK Bupati No. 527 Th 2019		Tanah milik warga
89	Bangunan Cagar Budaya Candi Gereja Hati Kuds Tuhan Yesus	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Bupati No. 528 Th 2019	Wisata Religi	Pengurus Gereja Papa Miskin
90	Struktur Cagar Budaya Cepuri Parangkusumo	Pleret, Pleret	SK Bupati No. 529 Th 2019	Wisata Sejarah dan Religi	Keraton
91	Bangunan Cagar Budaya Pasar Sangkeh	Srigading, Sanden	SK Bupati No. 530 Th 2019	Pasar	Pemerintah Kalurahan Srigading
92	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 531 Th 2019	Tempat tinggal dan kantor juru kunci	Keraton Surakarta
93	Struktur Cagar Budaya Makan Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 532 Th 2019	Wisata Religi	Keraton
94	Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo	Wukirsari, Imogiri	SK Bupati No. 533 Th 2019	Tempat Ibadah	Keraton
95	Struktur Cagar Budaya Jagang Cepori Keraton Koragede	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 534 Th 2019		BPCB DIY
96	Bangunan Cagar Budaya Pasar Gatak	Sumbermulyo, Bambanglipuro	SK Bupati No. 535 Th 2019	Los Pasar	Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
97	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik UGM	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 536 Th 2019	Tempat tinggal dan wisata edukatif	UGM
98	Bangunan Cagar Budaya Monumen Segoroyoso	Segoroyoso, Pleret	SK Bupati No. 537 Th 2019		Dinas Sosial Bantul
99	Bangunan Cagar Budaya Rumah Singgah Gerilya Jenderal sudirman	Parangtritis, Kretek	SK Bupati No. 538 Th 2019	Pos Napak tilas Rute Gerilya oleh Taruna Akmil	Pribadi
100	Struktur Cagar Budaya Sendang Seliran	Jagalan, Banguntapan	SK Bupati No. 539 Th 2019	Tempat wisata religi semua umat beragama	Kraton
101	Omah Demamit	Seloharjo, Pundong	No. 688 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Gudang	pribadi
102	Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 689 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Kolam renang umum	pribadi
103	Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 690 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Kamar mandi	pribadi
104	Pagar Komplek Kolam Renang John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 691 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Pembatas tegalan	pribadi
105	SDN 1 Pundong	Srihardono, Pundong	No. 692 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Sarana pendidikan	Disdikpora Bantul
106	Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto	Argodadi, Sedayu	No. 693 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	Pribadi
107	Song Kamal	Srimulyo, Piyungan	No. 694 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tirakat	Di atas Tanah Sultan Ground
108	Rumah Tradisional Jawa milik Cokro	Srimulyo, Piyungan	No. 695 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
	Subroto				
109	Makam Sunan Geseng	Srimulyo, Piyungan	No. 696 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat wisata religi	Kraton
110	Rumah Singgah Soedirman	Srimartani, Piyungan	No. 697 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi
111	Makam KRT Mangunegoro Bupati Bantul I	Sitimulyo, Piyungan	No. 698 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat wisata religi	Pemerintah Kalurahan Sitimulyo
112	Arca Agastya Nomor Inventaris BG. 1815	Guwosari, Pajangan	No. 703 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
113	Arca Bodhisattwa Padmapani BG. 575	Argodadi, Sedayu	No. 704 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
114	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.b	Sitimulyo, Piyungan	No. 705 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
115	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.c	Sitimulyo, Piyungan	No. 706 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
116	Arca Bodhisattwa Candralokeswara Nomor Inventaris BG.1469	Sitimulyo, Piyungan	No. 707 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
117	Arca Jembhala Nomor Inventaris BG. 1474	Sitimulyo, Piyungan	No. 708 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
118	Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475	Sitimulyo, Piyungan	No. 709 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
119	Arca Siwa dan Parwati Nomor Inventaris BG. 1252	Baturetno, Banguntapan	No. 710 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
120	Arca Siwa Nomor Inventaris BG. 349	Sitimulyo, Piyungan	No. 711 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY

No	Cagar Budaya	Lokasi	Penetapan	Pemanfaatan	Kepemilikan
121	Koleksi Emas Nomor Inventaris BG. 1471 a-i	Sitimulyo, Piyungan	No. 712 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
122	Pasar Sungapan	Argodadi, Sedayu	No. 713 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Los pasar	Dinas Perdagangan Bantul
123	Rumah Indis milik Bapak Muhadi Djajus	Sitimulyo, Piyungan	No. 714 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi
124	SD Kanisius Ganjuran	Sumbermulyo, Bambanglipuro	No. 715 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Sarana pendidikan	Yayasan Kanisius
125	Penginapan John Kersch	Parangtritis, Kretek	No. 716 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Penginapan	pribadi
126	Rumah Tradisional milik Bapak Raditya Wahyu Kumara	Srigading, Sanden	No. 717 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Tempat tinggal	pribadi

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Data Budaya Tak Benda yang merupakan potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2019 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ada 18 jenis, disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul

NO	DATA BUDAYA TAK BENDA (POTENSI WBTB) DI BANTUL	DOMAIN / OBJEK YANG DIKAJI	DITETAPKAN	
			Register	SK Kemendikbud
1	Nama INDUSTRI GERABAH KASONGAN Lokasi Kalurahan Kasongan, Kasihan, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 192864/MPK.F /DO/2013 16 Desember 2013	No. 238 / M / 2013 13 Desember 2013
2	Nama BLANGKON YOGYAKARTA Lokasi Pathen, Sumberagung, Jetis, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 60085/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
3	Nama MONTRO Lokasi Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul	Seni Pertunjukan	No. 60075/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
4	Nama WEDANG UWUH IMOGIRI Lokasi Kalurahan Imogiri, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 60087/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
5	Nama SRANDUL	Seni Pertunjukan	No. 60077/MPK.E/ KB/2017 4 Oktober 2017	No. 260 /M/ 2017 29 September 2017
6	Nama REBO PUNGKASAN Lokasi Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	No. 65675/MPK.E/ KB/ 2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
8	Nama NINI THOWONG YOGYAKARTA Lokasi Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Bantul	Seni Pertunjukan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
9	Nama BATIK NITIK YOGYAKARTA Lokasi Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
10	Nama GEJOG LESUNG YOGYAKARTA Lokasi Padukuhan Bendo, Imogiri, Imogiri	Seni Pertunjukan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
11	Nama BENTHIK YOGYAKARTA Lokasi Kampung dolanan, Panggungharjo	Tradisi dan Ekspresi Lisan	No. 65675/MPK.E/ KB/2018 10 Oktober 2018	No. 264 /M/ 2018 21 September 2018
12	Nama ANDONG YOGYAKARTA	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No. 103617/MPK.E/	No. 362 /M/ 2019

NO	DATA BUDAYA TAK BENDA (POTENSI WBTB) DI BANTUL	DOMAIN / OBJEK YANG DIKAJI	DITETAPKAN	
			Register	SK Kemendikbud
	Lokasi Bengkel Pendowo Limo, Pandeyan, Patalan, Jetis		KB/2019 8 Oktober 2019	24 September 2019
13	Nama MIE LETHEK Lokasi Srandakan, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
14	Nama SHOLAWAT MAULUD JAWI Lokasi Jejeran, Wonokromo, Pleret	Tradisi dan Ekspresi Lisan	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
15	Nama CEMBENGAN YOGYAKARTA Lokasi Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul PT Madu Baru	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
16	Nama SATE KLATAHAK Lokasi Jejeran, Pleret, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
17	Nama KERAJINAN KULIT TATAH SUNGGING YOGYAKARTA Lokasi Pucung, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019
18	Nama PEWARNA ALAMI YOGYAKARTA Lokasi Giriloyo,Wukirsari, Imogiri,Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	No.103617/MPK.E/ KB/2019 8 Oktober 2019	No. 362 /M/ 2019 24 September 2019

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan di tingkat desa/kalurahan Desa/Kalurahan adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimiliki.

Perkembangan desa/ kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 Kalurahan telah ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan

budaya melalui rintisan desa/kalurahan budaya. Data rintisan desa/kalurahan budaya yang berpotensi naik status jadi desa/kalurahan budaya terdapat Sembilan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020. Adapun Sembilan rintisan desa/kalurahan budaya yaitu Kalurahan Gadingsari (Sewon), Parangtritis (Kretek), Girirejo dan Sriharjo (Imogiri), Srimulyo (Piyungan), Muntuk (Dlingo), Sendangsari (Pajangan), Tamantirto (Kasihan), dan Argodadi (Sedayu).

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dengan adanya UU Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, menjadi tampak jelas bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam segala lini pembangunan. Undang-Undang ini mengamanatkan agar kebudayaan yang ada diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui tindakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasar Undang-Undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapatkan apresiasi. Salah satu dukungan Pemerintah dalam mengapresiasi daerah dalam mengelola kebudayaannya tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang telah dikembangkan oleh UNESCO yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Indeks ini bukan mengukur nilai budaya, namun diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. IPK dapat menjadi data dasar yang informatif dalam memonitor dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan, selain itu dapat menjadi suatu tolok ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan, sebagaimana Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan IPK untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya pencapaian pembangunan kebudayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun IPK dengan menggunakan pendekatan metode survey dan kuisioner untuk mengukur 7 dimensi pembangunan kebudayaan.

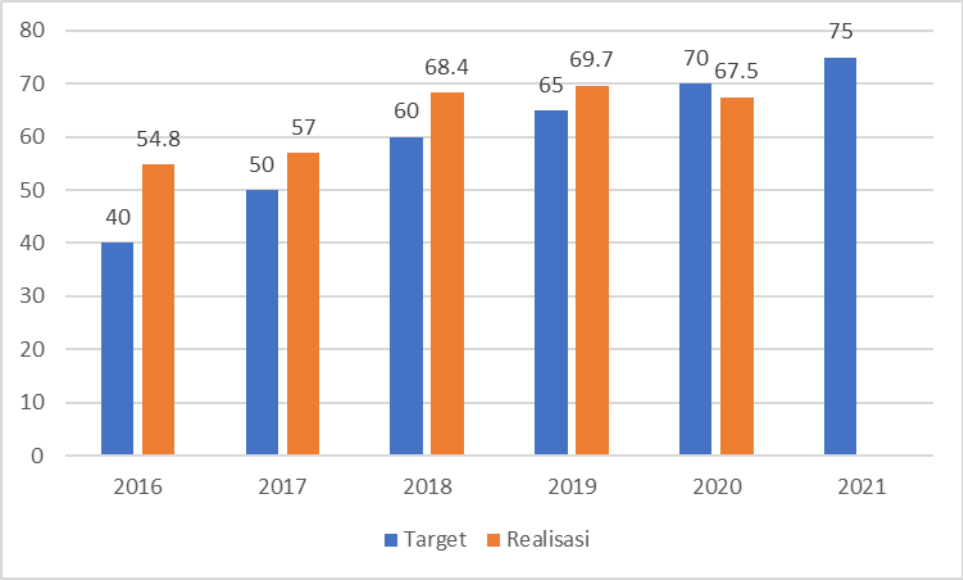

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Capaian kinerja Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul, terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 telah melampaui target capaian. Pada tahun 2020 IPK Kabupaten Bantul dibawah target yaitu 67,5. Kabupaten Bantul telah berusaha memetakan capaian kinerja pembangunan kebudayaan sejak tahun

2016, langkah tersebut diperkuat dengan kegiatan inventarisasi objek-objek kebudayaan serta menggali hambatan serta dukungan dalam pembangunan kebudayaan di wilayah ini. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY tertinggi Nasional yaitu sebesar 73,79.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Desa/Kalurahan Budaya	9	10	10	12	12
Cakupan Perlindungan Warisan Budaya (%)	NA	NA	-	24	24

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021.

2.3.1.2.17. Perpustakaan

a. Jumlah Perpustakaan

Budaya literasi (baca,tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpusatakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling sebanyak 192 lokasi, antara lain di sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Selain itu layanan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis di lokasi wisata dan *event-event* tertentu seperti *Car Freeday*. Layanan mandiri dilakukan di 57 lokasi dan

pelayanannya dilakukan selama 7 hari kerja. Semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kapanewon dan 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Pelayanan perpustakaan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dan Jum'at. Untuk Senin – Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 dan Jumat dari pukul 08.00 – 14.30 sedangkan untuk hari Sabtu - Minggu dilayani dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, dan pelayanan diliburkan pada saat hari libur nasional dan cuti bersama. Namun pada masa pandemi ini perpustakaan hanya melayani pengunjung pada hari Senin sampai Jumat pada jam 07.30-14.30 WIB, namun untuk layanan keliling dihentikan sementara.

Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Kalurahan	75
3	Perpustakaan SD	395
4	Perpustakaan SMP	116
5	Perpustakaan SMA/SMK	99
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
	Jumlah	864

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 75 kalurahan yang ada di Bantul seluruhnya sudah mempunyai perpustakaan. Perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dari 395 SD/MI di Bantul seluruhnya mempunyai perpustakaan sekolah. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari 116 sekolah seluruhnya mempunyai perpustakaan.

Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca

No	Tahun	Jumlah
1	2017	3
2	2018	10
3	2019	17

No	Tahun	Jumlah
4	2020	0
	Jumlah	30

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 telah terbangun 30 pojok baca. Sedangkan tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan pojok baca karena anggaran *direfocusing* untuk penanganan Covid-19.

Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi

No	Perpustakaan yang Terakreditasi	Jumlah s.d Th. 2020
1	Perpustakaan Desa/Kalurahan	2
2	Perpustakaan SD	12
3	Perpustakaan MI	0
4	Perpustakaan SMP	7
5	Perpustakaan MTs	3
7	Perpustakaan Khusus	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan sehingga dengan semakin banyak perpustakaan di Bantul yang terakrediatsi semakin baik kinerja layanan yang pada akhinya akan semakin banyak siswa dan masyarakat yang berkunjung. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang ada, masih sedikit perpustakaan yang terakreditasi. Untuk perpustakaan desa/kalurahan baru 2,67% yang terakreditasi, 3,03% untuk jenjang SD, 0% MI, 7,6% SMP dan 12,5% MTs. Untuk mendukung akreditasi dilaksanakan dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau

berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	345.368	518.693	732.826	841.154	140.366

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 345.368 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 menjadi 841.154 orang pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

Pada tahun 2020 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 140.366, jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2019. Penurunan ini disebabkan pandemi covid. Untuk mengurangi risiko penularan covid, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan dengan mewajibkan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk perpustakaan.

Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020

Jenis Pemustaka	Usia	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		Jumlah Pengunjung Perpustakaan
		Laki-laki	Perempuan	
Paud/TK	3-6 th	672	1.163	1.835
SD	7-12 th	45.424	63.829	109.253

Jenis Pemustaka	Usia	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		Jumlah Pengunjung Perpustakaan
		Laki-laki	Perempuan	
SMP	13-15 th	1.111	2.392	3.503
SMA	16-18 th	1.545	2.755	4.300
Mahasiswa	>18 th	852	1.692	2.544
Pegawai	>18 th	3.226	6.895	10.121
Umum/lain-lain	>18 th	3.038	5.772	8.810
Jumlah		55.868	84.498	140.366

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa 83,48% pengunjung perpustakaan adalah yang masih bersekolah. Bila dilihat dari jenjang pendidikan, siswa sekolah dasar merupakan pengunjung paling banyak, yaitu 109.253 (77,83%). Hal ini akuimerupakan hal yang menggembirakan, karena dapat menjadi adanya petunjuk minat baca. Sayangnya, data pengunjung SMP, SMA dan mahasiswa masih jauh selisihnya. Diharapkan apabila pandemi covid berakhir pemustaka yang datang ke perpustakaan meningkat kembali. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat, menambah inovasi layanan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan *online*.

c. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 107.360 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 39.040 judul. Hal ini sudah memenuhi standar perpustakaan tipe A dengan koleksi sebanyak 17.000 judul. Selain itu, juga terdapat koleksi digital melalui *e-book* sebanyak 263 judul, masing-masing judul ada 8 buah, sehingga jumlah sebanyak 2.104 buah. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Judul	38.782	40.300	39.040	39.547	39.812
Buku	102.292	104.300	107.360	113.897	114.162
e-book	0	0	2.104	2.104	3.372

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan
Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%)	28,5	29	37,72	31	-83,3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021

2.3.1.2.18. Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan

manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 16 orang tenaga arsiparis dan 156 orang pengelola kearsipan dengan jumlah arsip yang dikelola sebanyak 2.649 dokumen arsip statis. Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengusulkan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia(ANRI) berupa arsip Eks Keuangan kelompok B sebanyak 3.176 nomorberkas, dan arsip permanen sebanyak 375 nomorberkas.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

a. Pengawasan dan Penilaian arsip

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 52 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH PD	
		2019	2020
1	Memuaskam	0	2
2	SangatBaik	5	3
3	Baik	14	30
4	Cukup	7	4

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH PD	
5	Kurang	26	15
	Jumlah	52	54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 baru sebanyak 5 perangkat daerah yang pengelolaan arsipnya dalam kategori sangat baik, 14 PD kategori baik, sementara 33 PD lainnya dalam kategori cukup dan kurang, sementara untuk tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah PD. yang pengelolaan arsipnya masuk dalam kategori sangat baik dan baik, yaitu menjadi sejumlah 33 PD.

b. Akuisisi Arsip

Selain melakukan pengawasan dan penilaian pengelolaan kearsipan, sejak tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
1.	2017	Tokoh keris	Mbah Djiwodiharjo
2.	2017	Pelukis	Ki Joko Pekik
3.	2018	Tokoh dalang	Ki Timbul Hadiprayitno
4.	2018	Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan	-
5.	2019	Tokoh batik “Jogo Pertiwi”	-
6.	2020	Tokoh “seniman dagelan	Ki Ngabdul

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan akuisisi sebanyak 6 arsip.

c. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi acuan dalam pengelolaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 4.427 penomoran arsip, secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020

No	Jenis Arsip	Sudah dibuat daftar arsip/ temubalik	Belum dibuat daftar arsip/ temubalik	Jumlah
1.	Arsip Aktif	359	101	460
2.	Arsip Inaktif	872	339	1211
3.	Arsip Statis	937	384	1321
4	Arsip yang Dialih mediakan	1346	89	1435
	Jumlah Total	3514	913	4427

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 359 arsip (78,04 %), Arsip in aktif sebanyak 872 arsip (72 %), Arsip statis sebanyak 937 arsip (70,93 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 1346 arsip (93,73 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.427 nomor arsip.

d. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik (%)	27	33	46,2	52	64,8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas diketahui bahwa semakin banyak perangkat daerah mampu menyelenggarakan kearsipan sesuai standar. Dari 54 perangkat daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 27% perangkat daerah telah menyelenggarakan kearsipan sesuai standard dan pada tahun 2020 menjadi 35 perangkat daerah atau sebanyak 64,8%.

2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

a. Produksi Perikanan Budidaya

Terdapat 7 jenis ikan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Bantul, yaitu gurami, nila, lele, bawal, patin, mas dan udang vanamei. Lele, nila dan gurami merupakan jenis ikan yang sangat diminati untuk dibudidayakan.

Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas	Produksi (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020**
1	Gurami	1.860.867	2.028.830	2.164.370	1.723.948	1.672.601
2	Nila	1.924.565	2.114.000	2.567.437	2.618.329	2.482.902
3	Lele	6.738.202	7.094.430	7.028.122	7.425.503	7.498.039
4	Bawal	258.883	282.250	179.914	218.661	236.653
5	Patin	40.150	29.370	21.421	36.828	103.535
6	Mas	34.018	37.450	37.444	42.888	35.876
7	Udang Vanamei	507.038	440.890	292.292	374.440	599.444
JUMLAH		**11.363.724**	**12.027.236**	**12.291.000**	**12.440.597**	**12.629.050****

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,51 % atau 188.453 kg dari 12.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Produksi pada 6 jenis ikan mengalami peningkatan dan didominasi lele. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat yaitu teknologi Matlair (hemat lahan dan air), berupa kolam bulat dengan *inlet outlet* dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Penurunan produksi ikan budidaya terjadi pada gurami, karena langkanya ketersediaan bibit gurami dan adanya penyakit ikan yang menyebabkan kematian gurami.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya. Pada tahun 2020 terdapat penambahan

RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Adanya teknologi Matlair menjadi daya tarik tersendiri karena mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas, dapat diusahakan di pekarangan.

Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	RTP Budidaya (unit)
1	2016	5.176
2	2017	5.176
3	2018	5.176
4	2019	5.216
5	2020	5.416

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pengembangan budidaya perikanan didukung dengan pengembangan benih ikan melalui Balai Budidaya Ikan (BBI) yang berlokasi di Barongan, Sanden, Gesikan, Krapyak dan Pundong.

Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Produksi Benih Ikan (ekor)
1	2016	2.600.854
2	2017	3.378.975
3	2018	4.629.118
4	2019	4.530.470
5	2020	4.118.504

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan di atas pada tahun 2020 diproduksi 4,11 juta ekor benih ikan dari BBI. Jika sandingkan dengan produksi perikanan budidaya (II.3-141) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 produksi ikan khususnya gurami, nila dan lele berkisar 10 juta s.d 11 juta kg. Artinya BBI belum mampu memenuhi kebutuhan benih dan kekurangan benih ini dipenuhi dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas pada UPR, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasarana pembesaran ikan maupun perbenihan ikan. Selain itu juga

dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan.

b. Produksi Perikanan Tangkap

Kabupaten Bantul memiliki pantai sepanjang 13,5 km dan terdapat usaha perikanan tangkap yang beraktifitas pada 5 unit TPI yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tangkap laut	234,30	624,75	473,01	497,77	470,14
2	Produksi tangkap perairan umum	282,20	260,60	295,43	305,08	354,73
Jumlah		516,50	885,35	768,44	802,85	824,87

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar -27,63 ton atau -5,5%. Sedangkan produksi tangkap perairan umum mengalami peningkatan 49,65 ton atau 16,2%. Walaupun terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut, namun jenis ikan tangkap laut yang ada di Bantul tergolong dalam ikan ekonomis penting, antara lain ikan bawal dan ikan layur.

Peningkatan produksi ikan di perairan umum didukung program restocking ikan yang pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

c. Potensi Pengembangan Produksi Garam

Pantai selatan Bantul selain kaya dengan potensi ikan, ternyata menyimpan kekayaaan alam yang bisa dijadikan komoditas unggulan salah satunya produksi garam kristal, dengan memanfaatkan air laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi dapat dikembangkan usaha produksi garam. Kegiatan produksi

garam di Bantul berawal dari pelatihan dan bantuan peralatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019.

Produksi garam baru terealisasi pada semester kedua tahun 2020, sejumlah 4.400 kg, dengan luas tambak garam 240 m^2. Lokasi produksi garam berada di Pantai Pandansari Wonoroto, Gadingsari, Sanden. Pada saat ini produksi garam berhenti karena peralatan mengalami rusak. Kegiatan memproduksi garam hanya menjadi usaha sampingan selain mengurus lahan dan sebagai nelayan.

d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (Ton)	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.453,92

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

2.3.2.2. Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2.	2017	3.711.384	17.090.253.000,00
3.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00
4.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
5.	2020	2.348.313	16.954.700.250,00

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2020 mencapai Rp16.954.700.250,00. Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
A.	**Daya Tarik Wisata**							
1	Alam	20	20	25	32	55	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	54	59	59	84	129	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Kalurahan Kalurahan Wisata
B.	**Usaha Pariwisata**							
1	Hotel bintang	1	1	3	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	94	117	56	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah	199	225	142	142	142	Unit	

No.	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
A.	**Daya Tarik Wisata**							
	makan							
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	33	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu padusan di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru; dan malam tahun baru di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai macam *event* sebagai berikut:

Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019

NO.	JENIS EVENT
1	Festival Makanan Tradisional
2	Festival Ingkung
3	Festival Mie
4	Festival Lampion
5	Festival Fashion Street
6	Festival Dayung
7	Festival Jogja Air Show (JAS)
8	Festival Malam 1 Syuro
9	Festival Malam 15 Syuro
10	Pentas Jathilan
11	Pentas Campursari
12	Pentas Koes Plus
13	Pentas Akhir Tahun
14	Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis
15	The Harmony Nature dan Culture Orchestra
16	Syimphoni Orkestra
17	Surving Kompetisi

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Namun masih ada ketimpangan jumlah pengunjung yang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Nama Destinasi Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Pantai Parangtritis	2.229.125	2.996.204	2.895.187	2.808.134	1.457.400
Pantai Samas	247.293	668.740	730.875	539.073	237.150
Goa Cemara	84.687				
Pandansimo	140.050				
Kwaru	49.307				
Goa Selarong	36.818	36.652	37.847	38.700	20.130
Goa Cerme	13.520	9.788	7.924	6.828	3.403

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mulai tahun 2017 untuk masuk obyek wisata Pantai Samas, Goa Cemara, Patehan, Kwaru, Pandansimo Baru dan Pandansimo dikenakan satu kali retribusi. Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat ketimpangan kunjungan wisatawan yang signifikan antara Pantai Parangtritis dan pantai lainnya. Kunjungan wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan misalnya di Pantai Parangtriris berkurang 50,06% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarna alami	Maju
2	Kakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
3	Kampungsantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
4	Krebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan Batik Kayu	Maju
5	Tembi	Timbulharjo, Sewon	Kerajinan, Outbond	Maju
6	Karangtengah	Karangtengah, imogiri	Alam, Kerajinan	Maju
7	TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
8	Kebonagung	Kebonagung,	Wisata Pendidikan	Maju

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
		Imogiri	Pertanian	
9	Manding	Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
10	Candran	Kebonagung, Imogiri	Museum tani, Kesenian	Maju
11	Lopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
12	Karangasem	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan	Berkembang
13	Jipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
14	Kiringan	Canden, Jetis	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
15	Puton	Trimulyo, Jetis	Alam	Berkembang
16	Kalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kuliner Ingkung	Embrio
17	Mangrove	Tirtohargo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
18	Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner	Embrio
19	Ngringinan	Palbapang, bantul	Museum, Kuliner	Embrio
20	Mangir	Sendangsari, Pajangan	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Embrio
21	Trimulyo	Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya, Batik	Embrio
22	Jagalan	Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya, Kuliner	Embrio
23	Kampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	Cagar Budaya, Budaya	Embrio
24	Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan	Embrio
25	Juron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan	Embrio
26	Ngembel Mbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya	Embrio
27	Gunung Cilik	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
28	Bendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Embrio
29	Kajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah	Embrio
30	Songgo Langit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
31	Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah	Embrio
32	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam	Embrio
33	Guwosari Selarong	Guwosari, Pajangan	Cagar Budaya, Kerajinan	Embrio
34	Gilangharjo	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya	Embrio
35	Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Embrio
36	Pucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinan Kulit	Embrio

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
37	Imogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
38	Srikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya	Embrio
39	Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah	Embrio
40	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya	Embrio
41	Pandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
42	Kalibuntung	Srihardono, Pundong	Out Bond Pendidikan	Embrio
43	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Kiliner, Seni Budaya	Embrio

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul perlu untuk terus ditingkatkan, terutama di Kawasan Pantai Selatan, sehingga kunjungan wisata tidak hanya terfokus di Pantai Parangtritis. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan dapat dijadikan peluang pengembangan destinasi wisata dengan tetap memperhatikan ciri khas Kabupaten Bantul.

b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pariwisata Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.800.800	3.711.384	4.204.422	5.166.615	2.348.313
Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,6	1,8	1,9	2	1,56

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021.

2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB

meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Data Kelompok tani Kabupaten Bantul kurang lebih 850 kelompok tani, 1250 kelompok peternak, dan 500 kelompok perikanan.

a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Komoditas		Tahun				Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi Sawah						
	Luas Panen	29.944,00	30.376,40	31.182,30	29.524	30.077	ha
	Produktivitas (GKG)	61,11	62,60	60,06	63,56	63,29	ku/ha
	Produksi (GKG)	183.980,00	190.144,00	187.280,89	187.655	190.357	ton
	Produksi beras	116.275,00	119.790,67	119.899,86	120.099	121.867	ton
2	Jagung						
	Luas Panen	3.647,00	3.283,00	3.565,10	4.934	3.452	ha
	Produktivitas	69,63	73,78	73,17	70,74	100,18	ku/ha
	Produksi (pipilan kering)	25.394,06	24.221,97	26.085,84	34.903	34.583	ton
3	Kedelai						
	Luas Panen	980,40	969,00	1.213,60	909	616	ha
	Produktivitas	12,87	13,67	15,52	15,90	17,63	ku/ha
	Produksi (wose kering)	1.261,77	1.324,62	1.883,51	1.445	1.086	ton

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 1,21 % atau naik sebesar 2.275 ton dibandingkan tahun 2019. Dari produksi padi sebesar 188.089 ton gabah kering giling (GKG) pada

tahun 2019 menjadi 190.364 ton GKG pada tahun 2020. Peningkatan produksi padi tahun 2020 ini disebabkan kondisi iklim yang kondusif (curah hujan normal), distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya gerakan-gerakan pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan 50.000 kg benih untuk 206 kelompok tani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 2000 ha.

Produksi jagung pada tahun 2020 adalah 34.583 ton sedangkan tahun 2019 adalah 34.903 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,9 % atau turun sebesar 320 ton dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (*Spodotera litura*/exigua) pada fase vegetatif. Ditambah lagi dengan mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Di sisi lain, produktivitas jagung meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 30,06 ku/ha pada tahun 2020. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh penggunaan kualitas unggul benih hibrida bantuan pemerintah dan budidaya yang lebih intensif. Bantuan berupa benih jagung dari pemerintah ini sebesar 15.000 kg diperuntukan kepada 134 kelompok petani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 1000 ha.

Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunanan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan

harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit. Disisi lain, produktivitas kedelai mengalami peningkatan sebesar 1,73 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan produktivitas ini juga berupa dukungan pemerintah berupa bantuan benih dan pupuk. Bantuan pupuk yang diberikan berupa pupuk hayati sebesar 2.100 liter, rhizobium sebesar 175.000 gram, serta herbisida sebesar 2.100 liter yang diberikan kepada 113 kelompok tani.

b. Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas /uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bawang Merah						
	Luas Panen	765	830	835	893	860	Ha
	Produksi	7.859,40	7.910,2	7.979,8	9.427	9.487,6	Ton
	Produktivitas	10,29	9,53	9,61	10,56	11,03	ton/ha
2	Cabai Merah						ket
	Luas Panen	116	366	402	298	561,5	Ha
	Produksi	409,25	1.497,6	1.925,6	1.166,4	1.667,7	Ton
	Produktivitas	3,52	4,09	4,79	3,91	2,97	Ton/Ha
3	Pisang						Ket
	Produksi	6.095	6.095,9	5.902,90	6.727,8	5.109,00	Ton

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 60 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan luas tanam 58 ha dan peningkatan produktifitas sebesar 9,9% dikarenakan adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat.

Produksi cabai merah mengalami penurunan dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019 dan

kemabli meningkat menjadi 1.6677,7 ton di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan penurunan luas panen seluas 104 ha dan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air menjadi terbatas ini, petani mengurangi luas tanam cabenya. Tanaman cabe butuh air yang cukup agar pertumbuhanya optimum.

Pisang juga mengalami peningkatan produksi sebesar 13.97 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 6.727,8 ton pada tahun 2019. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi.

c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas/ Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tembakau Rakyat						
	Luas Panen	172,00	316,00	305,00	175	174	ha
	Produksi	1.023,50	3.044	2.893,00	1.321,3	1.341,5	ku
							(rajang kering)
	Produktivitas	5,95	9,63	9,49	7,64	7,7	ku/ha
							(rajang kering)
2	Tebu						
	Luas Panen	1.174,32	1.207,69	1.022,89	1.042,67	1.096	Ha
	Produksi	41.021,95	29.186,75	38.430,00	39.971,17	43.881,75	ku (hablur)
	Produktivitas	34,93	26,76	37,57	38,33	40,04	ku/ha (hablur)
3	Kelapa						
	Luas Panen	7.064,07	10.464,73	7.050,03	7.107,81	7.120	Ha
	Produksi	91.342,50	112.677	103.931,80	104.794,70	105.836,9	ku (kopra)
	Produktivitas	12,93	15,87	14,74	14,74	14,9	ku/ha (kopra)
4	Kakao						
	Luas Panen	N/A	N/A	7,2	18,1	18,3	Ha
	Produksi	N/A	N/A	28,34	65,18	162	Ku
	Produktivitas	N/A	N/A	3,94	15,16	8,9	Ku/Ha

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 produksi tembakau mengalami peningkatan sebesar 2,28 % atau 30,2 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,18 ku/ha dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen pada tahun 2020 sebanyak 33 Ha.

Produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 173 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,17 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2020.

Produksi tebu tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 9,78 % atau 3.910,31 ku dibanding tahun 2019. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca cukup kondusif untuk budidaya tebu pada tahun 2020.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao mengalami peningkatan dari 153,69 kwintal menjadi 162 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 %. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 7,1 Ha pada tahun 2020 menjadi 18,3 Ha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tanaman kakao yang mulai produktif berbuah.

d. Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak Kecil, dan unggas.

Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis ternak	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
1	Sapi Potong	56.799	56.139	58.895	62.582	66.098	Ekor
2	Sapi Perah	284	80	72	68	68	Ekor
3	Kerbau	544	248	206	218	217	Ekor
4	Kuda	1.977	1.258	1564	1.631	1.583	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi sapi potong tahun 2020 mengalami kenaikan 5,61% atau sebanyak 3.516 ekor dibanding tahun 2019. Peningkatan jumlah populasi sapi potong tidak terlepas dari keberhasilan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang ada di tahun 2018-2019. Jumlah ini diharapkan masih akan terus meningkat mengingat masih berlangsungnya program tersebut.

Sapi perah mengalami penurunan populasi, sedangkan kerbau dan kuda mengalami sedikit peningkatan populasi. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya khusus dalam peningkatan populasi jenis ternak ini.

Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
1	Kambing	108.199	87.195	94.332	95.467	95.104	Ekor
2	Domba	83.790	74.955	77.197	74.441	74.577	Ekor
3	Babi	5.329	3.544	5.024	5.136	4.512	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi kambing sebesar 0,4%, hal ini dikarenakan adanya program Inseminasi Buatan Kambing/Domba bersubsidi. Populasi domba mengalami kenaikan sebesar 0,2%.

Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	**Unggas**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Ket.**
1	Ayam buras	1.019.461	792.862	829.916	966.371	975.546	Ekor
2	Ayam ras petelur	821.587	712.307	759.199	765.137	765.126	Ekor
3	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	1.093.222	1.128.489	1.127.715	Ekor
4	Itik	222.265	163.528	184.978	201.805	202.180	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2020 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit

menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak Kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Daging	14.742.55	14.751.00	14.855.72	15.088.31	15.228.52	Kg
2	Telur	8.072.166	7.184.368	7.329.945	7.789.187	7.782.977	Kg
3	Susu	365.127	184.777	102.484	80.541	82.625	Kg

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Kenaikan produksi daging pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 0,9% dari tahun 2019. Produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang disebabkan karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

e. Jenis Penyakit Hewan Ternak

Jenis penyakit hewan ternak pada tahun 2020 sebanyak 4.984 kasus menurun dari tahun 2019 sebesar 6.209 kasus, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies.

Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Nama Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
1	Helmithosis	2.256	3.221	4.344	4.182	2.809
2	Avitaminosis	221	827	1.301	1.504	724
3	Scabies	173	412	564	723	1.451
	Total	2.650	4.460	6.209	6.409	4.984

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanian Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	9,94	0,113	0,13	1,57	0,71
Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	14,09	7,94	0,85	3,83	2,91
Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	7,8	0,17	0,24	1,09	2,80
Pertumbuhan Produksi Daging	4,24	20,52	0,71	0,57	0,93

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

2.3.2.4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek, hasil kajian menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

2.3.2.6. Perdagangan

a. Pasar Rakyat

Penyebutan pasar rakyat sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tipe Kelas Pasar.

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 7.962 pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 11,52% dari jumlah pedagang yang ada.

Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
1	Pasar Imogiri	A	Harian	99	759	142
2	Pasar Bantul	A	Harian	185	525	114
3	Pasar Piyungan	A	Harian	84	641	78
4	Pasar Niten	A	Harian	119	450	94
5	Pasar Klitikan Niten	B	Harian	-	172	-
6	Pasar Ngipik	B	Harian	20	144	18
7	Pasar Pundong	B	Harian	-	82	51
8	Pasar Celep	B	Harian	17	139	4
9	Pasar Gatak	B	Harian	-	192	10
10	Pasar Jodog	B	Harian	23	118	15

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
11	Pasar Barongan	B	Harian	43	135	63
12	Pasar Pijenan	B	Harian	30	140	15
13	Pasar Dlingo	B	2x dalam 5 hari	18	170	20
14	Pasar Panasan	B	4x dalam 5 hari	24	171	28
15	Pasar Pleret	B	2x dalam 5 hari	71	497	70
16	Pasar Jejeran	B	3x dalam 5 hari	71	497	45
17	Pasar Angkruksari	B	4x dalam 5 hari	46	498	56
18	Pasar Turi	B	1x dalam 5 hari	-	432	27
19	Pasar Sorobayan	B	2x dalam 5 hari	9	138	17
20	Pasar Mangiran	B	2x dalam 5 hari	-	252	19
21	Pasar Gumulan	B	1x dalam 5 hari	-	269	3
22	Pasar Sungapan	B	2x dalam 5 hari	6	88	3
23	Pasar Semampir	B	2x dalam 5 hari	12	233	19
24	Pasar Hewan Pandak	B	2x dalam 5 hari	-	13	-
25	Pasar Hewan Imogiri	B	1x dalam 5 hari	-	-	-
26	Pasar Janten	C	Harian	-	52	-
27	Pasar Grogol	C	Harian	-	29	4
28	Pasar Jragan	C	3x dalam 5 hari	-	43	1
29	Pasar Koripan	C	2x dalam 5 hari	-	53	-
30	Pasar Bendosari	D	2x dalam 5 hari	-	23	-
31	Pasar Sangkeh	D	2x dalam 5 hari	-	4	1
32	Pasar Unggas Bantul	-	1x dalam 5 hari	12	56	-
33	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	58	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Data jumlah pedagang pasar yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 6.718 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran / hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar

Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran. Dinas Perdagangan telah melakukan validasi data pedagang berdasarkan NIK sebanyak 6.152 pedagang, sedangkan sisanya masih dalam proses input.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume ekspor	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06	6.645.724,59	15.841.100
2	Nilai ekspor (US$)	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.454	151.040.882,38	122.334.077,34
3	Jumlah Negara	42	77	83	79	77
4	Macam komoditi	36	34	43	39	49

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021, diolah

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2020 mencapai US$122.334.077,34 turun US$21.600.000 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa, sedangkan negara tujuan ekpor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda

Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurun sebesar 4,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.	2016	1.401,61
2.	2017	1.482,8
3.	2018	1.565,67
4.	2019	1.645,73
5.	2020	1.576,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekspor	7	7	13,96	14,61	-1,3
Jumlah Pasar Tipe A	1	1	1	4	4
Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	6,54	5,79	5,59	5,11	-4,2

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan menurun sangat drastis. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, termasuk menurunnya jumlah permintaan ekspor barang ke luar negeri maupun perdagangan di dalam negeri.

2.3.2.7. Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri Kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785	9.712	31.267	9.824	31.375
2.	Sandang dan Kulit	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175	1.092	8.228	1.186	8.295
3.	Kerajinan Umum	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074	8.574	30.875	8.702	30.920
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057	3.488	30.124	3.520	30.176
5.	Logam dan Jasa	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373	1.493	3.403	1.545	3.456
Jumlah		**21.567**	**95.164**	**22.310**	**99.008**	**23.089**	**102.464**	**24.359**	**103.897**	**24.777**	**104.222**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 335,916 Hektar), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 207,34 Hektar), dan Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 71,51 Hektar). Kawasan Peruntukan Industri Piyungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 261 tahun 2015 ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang berlokasi di Kalurahan Srimulyo dengan pengelola PT. Yogyakarta Isti Parama. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemda sudah menyiapkan dokumen (Masterplan dan FS), selain itu akan dibuat sistem informasi pengembangan industry dimana sistem informasi itu sudah berbasis bidang, termasuk nilai tanah dan lokasi peta bidangnya. Sistem ini diharapkan dapat membantu calon investor untuk menentukan atau memilih lokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu Pajangan. Kemudian akan diprioritaskan

untuk kemudahan pembuatan ijin untuk industri di lokasi KPI Sedayu Pajangan.

b. Industri Kreatif

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50%
2.	2017	41,11%
3.	2018	42.90%
4.	2019	46,20%
5	2020	46,20%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perindustrian di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri	2	3,4	3,49	3,5	1,8

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustian, 2021.

Pertumbuhan industri yang menurun pada tahun 2020 dari 3,5% menjadi 1,8% merupakan cakupan industri kreatif, dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan menurun, demikian juga pasokan bahan baku yang sulit diperoleh.

2.3.2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa
2015	40	131
2016	50	150
2017	12	38
2018	28	94
2019	20	54
2020	20	54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Jumlah KK transmigran pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2020 masih tetap sama dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 20 KK. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran sebagai berikut:

Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Lokasi	Kuota (KK)
1	UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	5
2	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2
3	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	5
4	UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3
5	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara	5
	Jumlah	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Adanya pandemi Covid 19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2021.

2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

2.3.3.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.3.1.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut

Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Evaluasi Kinerja PD	65	70	76,19	76,16	76
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,78	87,57	88,70	86,97	87,89
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4478* (Sangat Tinggi)	3,4
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	73,66 (BB)	77,90 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,85
Persentase Belanja Pegawai	55	52	43,46	47,37	47

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021.

2.3.3.1.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, sekretariat Dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Bantul.
2) Integrasi program kerja DPRD dengan RPJM dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
3) Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	94%	94%	100%	82%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang telah disesuaikan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengalami perubahan target pada awal tahun. Hal ini sebagai dampak realokasi anggaran karena pandemi Covid-19 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga beberapa Raperda perlu dilakukan penyesuaian.

2.3.3.2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.2.1. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka

dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-*Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja utama bidang perencanaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	NA	94,35	105,46	107,31	98,77
Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD	NA	90	106,57	99,40	98,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021
Keterangan: Data “NA” pada 2016 disebabkan adanya perubahan IKU Bappeda.

2.3.3.2.2. Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukan kinerja yang semakian baik. Hal ini ditunjukkan dengan Persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Proporsi Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan untuk Realisasi pendapatan dan Belanja yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.105.405.470.000,00 tidak dicatat dalam LRA TA 2020. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 serta berdasarkan Rekomendasi dari BPK RI. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

No	Bidang Urusan/ Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
2	Persentase SILPA terhadap APBD	14,04%	12,27%	11,41%	12,22%	10,15%
3	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	38,95%	31,92%	31,11%	30,20%	27,09%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,14%	17,76%	18,66%	17,25%	18,23%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	37,22%	45,46%	47,25%	48,32%	41,96%*)
		62,78%	54,54%	52,75%	51,68%	58,04%*)

No	Bidang Urusan/ Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,62%	0,69%	0,82%	0,98%	0,98%
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

*)Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui

efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;

8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online, leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.3.2.3. Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Bantul semakin berkurang. Kondisi tersebut dikarenakan karena banyak PNS di Kabupaten Bantul yang memasuki masa purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan rekruitmen PNS di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarehakan karena proses rekruitmen PNS saat ini sangat tergantung dari persetujuan formasi dari Pemerintah Pusat.

Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	126	7	133	880	478	1358	2006	2781	4787	1801	2662	4463
2017	102	6	108	781	389	1170	1464	2290	3754	1311	2241	3552
2018	93	6	99	709	263	972	1456	2493	3949	1059	1939	2998
2019	86	5	91	664	360	1024	1446	2754	4200	932	1764	2696
2020	77	5	82	613	331	944	1297	2546	3843	824	1671	2495

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pemenuhan kompetensi aparatur dan indeks kepuasan aparatur di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul semakin mendukung bidang tugasnya.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	84	89	89,03	90,14	92,38
Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73,55	81,32	82,44	87,24	88,33

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

2.3.3.2.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan

tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan**.**

Menindaklanjuti *Roadmap* SIDa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” (UPN) Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik (tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain UPN Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan Desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat),

telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penelitian/Validitas/Survei oleh:					
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463	3.310	2.453	152
	- Lembaga Survei	142	39	16	14	22
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:					
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281	318	106	43
Jumlah		4.781	3.783	3.644	2573	217

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.3.3.3 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.3.3.1. Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai

perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
(5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)Internal dan Eksternal	89,5%	90,50%	90,00%	91,78%	90,50%	90,49%	91,00%	91,73%	91,50%	91,5%

Sumber : Inspektorat, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 82 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut

Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Inspektur Pembantu	4	5	1
	Kasubag	3	3	0
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	18	58	40
	P2UPD	10	48	38
	Auditor Kepegawaian	1	5	3
Jumlah		**39**	**121**	**82**

Sumber: Inspektorat, 2021

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Maturitas SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1,92	2	3,075	3,18	3,075

Sumber: Inspektorat, 2021

2.3.3.4. Unsur Kewilayahan

2.3.3.4.1. Kapanewon

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon. Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2020, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (98,48) sedangan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,99).

Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020

No	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rerata IKM
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pundong	85,1	96,9	97,1	90,6	93.74	91,55
2	Sanden	80,2	96,9	95,7	96,0	98.48	89,77
3	Pleret	81,9	96,6	96,8	89,7	95.82	89,00
4	Kretek	80,8	94,8	96,3	91,7	92.29	88,75
5	Bambanglipuro	77,8	97,1	97,4	90,2	95.73	88,22
6	Piyungan	80,2	93,8	95,6	91,6	93.67	88,08
7	Dlingo	77,6	95,1	95,2	91,3	95.96	88,00
8	Imogiri	80,0	89,8	97,2	91,2	92.15	87,64
9	Bantul	77,2	93,2	99,0	91,9	95.70	87,63
10	Pajangan	81,8	94,2	87,4	90,6	95.78	87,31
11	Sedayu	79,0	93,1	95,5	88,0	95.61	87,17

No	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rerata IKM
		2016	2017	2018	2019	2020	
12	Jetis	79,1	94,7	94,8	89,1	92.77	87,13
13	Sewon	76,9	96,1	95,4	88,5	98.48	86,42
14	Kasihan	81,7	83,7	94,9	89,0	94.26	85,69
15	Srandakan	81,6	81,9	86,3	90,3	92.58	84,40
16	Pandak	79,5	82,9	84,6	92,2	92.45	82,50
17	Banguntapan	80,1	80,5	79,8	89,7	92.21	82,01
Rerata IKM		80,0	91,8	93,5	96,17	94,13	87,13

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

2.3.3.5. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.3.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu PILKADA tahun 2020 mencapai 80,32% menurun dibanding PILPRES 2019 mencapai 87,9%, Penurunan disebabkan PILKADA diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19.

b. Potensi Intoleransi

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah intoleransi di masyarakat (%)	0	0	0	2	0
Persentase Pemilih yang Berpartisipasi (%)	0	0	0	87,89	80,32

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021
Keterangan : 2016-2018 tidak diselenggarakan pemilu

2.3.4. Layanan Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada

Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun n+2.

a. Kelembagaan

Urusan keistimewaan di bidang kelembagaan dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *kalurahan*. Penciri keunikan lainnya dilakukan melalui penyelarasan terhadap ketatalaksanaannya. Mendukung pelaksanaan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

b. Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. *Event* kebudayaan berskala nasional di Kabupaten Bantul bertajuk "Festival Segoro Kidul" dimulai pada tahun 2022.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan urusan kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Perkembangan kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 kalurahan ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, terdapat 9 (Sembilan) Rintisan Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020.

Desa/Kalurahan Budaya adalah Desa/Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara,

kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan. Sementara itu aspek pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa *Preneur*, dan Desa Mandiri Pangan.

1) Desa/Kalurahan Budaya

Kabupaten Bantul memiliki duabelas (12) Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016, yaitu :

Tabel 2 205 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Sabdodadi	Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul
2	Bangunjiwo	Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
3	Dlingo	Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo
4	Gilangharjo	Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
5	Mulyodadi	Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
6	Panggungharjo	Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
7	Seloharjo	Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong
8	Selopamioro	Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri
9	Sitimulyo	Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan
10	Srigading	Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden
11	Trimurti	Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
12	Triwidadi	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan budaya melalui rintisan kalurahan budaya yang saat ini telah ditetapkan sembilan (9) kalurahan. Penetapan rintisan kalurahan budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Gadingsari	Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden
2	Parangtritis	Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek
3	Girirejo	Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri
4	Srimulyo	Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan
5	Muntuk	Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo
6	Sendangsari	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
7	Tamantirto	Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan
8	Sriharjo	Kalurahan Sriharji Kapanewon Imogiri
9	Argodadi	Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

2) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Kalurahan wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur

tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Kalurahan Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul, sebagai berikut:

Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
1	Sabdodadi	Manding	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
2	Timbulharjo	Tembi	Kerajinan, Outbond	Maju
3	Karangtengah	Karangtengah	Alam, Kerajinan	Maju
4	Kebonagung	Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju
		Candran	Museum Tani, Kesenian	Maju
5	Wukirsari	Wukirsari	Batik pewarna alami	Maju
		Pucungrejo	Kerajinan Kulit	Embrio
		Bendo	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Embrio
6	Mangunan	Kakilangit	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
		TTSA	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
		Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
		Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Embrio
7	Guwosari	Kampungsantan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
		Kalakijo	Budaya, Kuliner Ingkung	Embrio
		Guwosari Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Embrio
8	Sendangsari	Krebet	Kerajinan Batik Kayu	Maju
		Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Embrio
		Ngembel Beji	Alam, Budaya	Embrio
9	Canden	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
10	Trimurti	Lopati	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
11	Muntuk	Karangasem	Alam, Kerajinan	Berkembang
12	Bangunjiwo	Jipangan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
		Kajigelem	Budaya, Gerabah	Embrio

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
13	Trimulyo	Puton	Alam	Berkembang
		Trimulyo	Cagar Budaya, Batik	Embrio
		Dewa Batu	Alam, Budaya	Embrio
14	Jagalan	Kampung Gurami	Pertanian, Perikanan	Embrio
15	Tirtohargo	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
16	Tirtomulyo	Ngemel Benji	Alam, Budaya	Embrio
17	Parangtritis	Laguna Depok	Outbond, Kuliner	Embrio
18	Palbapang	Ngringinan	Museum, Kuliner	Embrio
19	Seloharjo	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Budaya	Embrio
		Juron	Kerajinan	Embrio
20	Panjangrejo	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Embrio
21	Srihardono	Kalibuntung	Outbond, Pendidikan	Embrio
22	Pendowoharjo	Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
23	Gilangharjo	Gilangharjo	Alam, Budaya	Embrio
24	Gadingsari	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Embrio
		Pandansari	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
25	Imogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
26	Sriharjo	Srikeminut (wunut)	Alam, Budaya	Embrio
27	Terong	Banyu Nibo Rejosari	Pertanian, Alam	Embrio
28	Mulyodadi	Mulyodadi	Kuliner, Seni budaya	Embrio

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

3) Desa *Prenuer*

Desa *Preneur* adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha milik kalurahan, unit usaha yang berada dalam lingkup kalurahan yang diusahakan oleh warga kalurahan itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian kalurahan dan tercapainya kesejahteraan hidup

warga. Desa *Preneur* di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sejumlah 7 kalurahan, yaitu: Trimurti, Mulyodadi, Gilangharjo, Sabdodadi, Panggungharjo, Bangunjiwo dan Dlingo.

4) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa Prima merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Desa Prima yang telah terbentuk di Kabupaten Bantul mencakup 26 kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019

No.	NAMA KELOMPOK PRIMA	ALAMAT	TAHUN DIBENTUK	JUMLAH HIBAH DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA SEKARANG (Rp)	JUMLAH ANGGOTA		PRODUK UNGGULAN
						AWAL	SEKARANG	
1	SEJAHTERA	SRIHARJO, IMOGIRI	2009	37,500,000	83,112,000	24	53	PEYEK, KACANG DAN KERIPIK SAGU
2	GADINGSARI MAKMUR	GADINGSARI, SANDEN	2012	37,000,000	55,150,000	25	29	PEYEK DAN UBI UNGU
3	MUKTI REJEKI	NITIPRAYAN DK VII NGESTIHARJO, KASIHAN	2013	37,000,000	66,739,500	22	32	TEMPE, TAS PERCA DAN DOMPET BATIK
4	ANYELIR	IMOGIRI, IMOGIRI	2014	37,000,000	48,000,000	24	32	SNACK DAN CEMILAN KRIPIK
5	TIMBUL REJEKI	TIMBULHARJO, SEWON	2015	37,000,000	49,044,000	25	32	KRIPIK GEMBUS
6	SELOMAJU	SELOPAMIORO, IMOGIRI	2016	37,000,000	54,834,000	24	25	KRIPIK TEMPE, KRIPIK DAUN TALOK, KRIPIK PARE, DAUN KRIKIL DAN DAUN KELOR
7	GIRI PRIMA TAMA	DLINGO, DLINGO	2017	37,000,000	44,709,000	25	25	WEDANG KEKEP S. BUNGA, TAS, MENGGLENG DAN EMPING GARUT
8	SEJAHTERA TERONG	TERONG, DLINGO	2017	37,000,000	51,700,000	25	28	PANGSIT DAUN KELOR
9	NIAGA PATALAN JETIS	PATALAN, JETIS	2017	37,000,000	40,000,000	25	25	KERAJINAN TAS
10	MANDIRI	NOGOSARI II, WUKIRSARI, IMOGIRI	2017	37,000,000	51,224,000	25	25	USAHA BOGA
11	AGUNG MANDIRI	KEBON AGUNG, IMOGIRI	2018	37,000,000	45,098,700	25	25	TELUR ASIN, ANEKA KRIPIK DAN KEMBANG GOYANG
12	MAJU MULYO	MULYODADI BAMBANGLIPURO	2018	37,000,000	42,000,000	25	25	TELUR ASIN, KRIPIK BAYAM, TAS DARI KAIN PERCA
13	SUMBER REJEKI	PAJANGAN, TRIWIDADI, PAJANGAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	25	EMPING MELINJO, EMPING JAGUNG DAN EMPING GARUT

No.	NAMA KELOMPOK PRIMA	ALAMAT	TAHUN DIBENTUK	JUMLAH HIBAH DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA SEKARANG (Rp)	JUMLAH ANGGOTA		PRODUK UNGGULAN
						AWAL	SEKARANG	
14	WANUDYOTOMO	KAL TAMANAN BANGUNTAPAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	27	ANEKA OLAHAN KUE
15	MURTI MANDIRI	TRIMURTI, SRANDAKAN	2018	37,000,000	48,100,000	25	25	CRIPING, AMPAS TAHU, BAKPIA PISANG
16	OPTIMIS "SELOHARJO"	SELOHARJO, PUNDONG	2018	37,000,000	45,895,000	25	39	BAKPIA
17	NGUDI REJEKI	BANGUNHARJO SEWON	2012	37,000,000	59,918,000	25	26	BAKPIA, TEMPE
18	PANGGUNG MAKMUR	JL. KH. ALI MAKSUM PANGGUNGHARJO, SEWON	2019	25,000,000	30,778,424	25	25	ANEKA KUE, EMPING, ABON
19	GILANG LESTARI	GILANGHARJO, PANDAK	2019	25,000,000	28,316,500	25	25	JAMUR CRISPY
20	GADINGMAS	SRIGADING, SANDEN	2019	25,000,000	30,280,200	25	25	TELUR ASIN, TAHU WALIK, BATIK, KUE KERING, OLAHAN GULA KELAPA, KACANG-KACANGAN, DAN KUE BASAH
21	PRIMA JATI	JATIMULYO, DLINGO	2019	25,000,000	30,103,000	25	25	KUE KACANG
22	DULLOR SUBUR NECO	SABDODADI	2019	25,000,000	26,175,000	25	25	JUSSER, OKRA, DAN KENIKIR
23	NGUDI MUKTI	KARANGTENGAH, IMOGIRI	2019	25,000,000	31,773,000	25	25	METE, BUMBU PAWON, EMPING
24	SEKARNINGTYAS	BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN	2012	37,000,000	57,216,000	25	36	MAKANAN KERING
25	BANGKIT MANDIRI	CANDEN, JETIS	2012	37,000,000	50,787,000	25	24	JAMU GENDONG
26	SUMBER MAKMUR	SUMBERAGUNG, JETIS	2018	37,000,000	48,265,000	25	22	OLAHAN HASIL PERIKANAN

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

5) Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan yang dikenali dengan istilah "Demapan" adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program
6	Wukirsari	Exit Program
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021
Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan

c. Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadan tanah Kasultanan dan

Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarisasi Sultan Ground 3.432	300	350	400	500	500

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

d. Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada Tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon. SRS Kasultanan yang terletak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	PENANDA SRS
A.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon**	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggungharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis
B.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon**	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Non Makanan	58.44	56.94	60,60	58,65	57,53
2.	Makanan	41,56	43,06	39,40	41,35	42,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung stabil. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana lt menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikomsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

NTP tidak relevan sebagai alat ukur kesejahteraan petani, karena NTP mengasumsikan tingkat produksi yang tetap dan tidak mengakomodir kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Oleh karena itu, NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. NTP bukan mutlak

sebagai kesejehateraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga, namun belum tentu NTP meningkat karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani

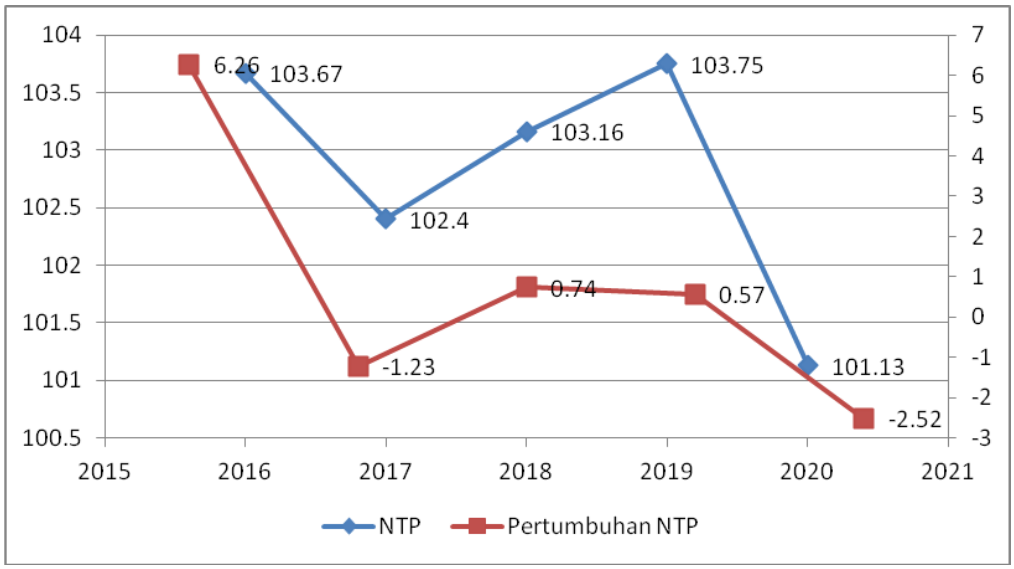

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai tukar petani dari tahun 2015-2020 menggambarkan tren yang fluktuatif. NTP Kabupaten Bantul tahun 2020 memiliki indeks sebesar 101,13, lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 103,75. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur

a. Fasilitas Perbankan.

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank BPR.

Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Kantor Pusat	0	17	0	17	0	17	0	16	0	16
Kantor Cabang	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
Cabang Pembantu	34	0	34	0	33	0	35	0	35	0

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Kantor Kas	25	35	25	36	25	38	23	36	23	37
Jumlah Bank	61	54	61	55	60	48	60	55	60	56
	115		116		118		115		116	
Jumlah Penduduk	928.676		927.181		939.718		949.325		954.706	
Rasio Pelayanan per 1000 Penduduk (%)	12,38		12,51		12,55		12,11		12,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah kantor bank umum di Kabupaten Bantul sebanyak 60, terdiri dari 2 kantor cabang, 35 cabang pembantu dan 23 kantor kas sedangkan jumlah kantor bank BPR sebanyak 56, terdiri dari 16 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 37 kantor kas.

Rasio pelayanan perbankan di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dengan rata-rata di atas 12% per 1000 penduduk, artinya dalam 1000 penduduk terdapat 120 orang terlayani oleh perbankan. Pada tahun 2020, jumlah kantor bank bertambah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penambahan jumlah kantor kas bank BPR.

b. Penggunaan Listrik Rumah Tangga.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

Realisasi	Jumlah KK	Jumlah PLG RMH Tangga PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Non PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Total	REPLN(%)	RE Total (%)
2017	312.530	282.357	57	282.414	90.35	90.36
2018	319.033	297.675	6.863	304.538	93.31	95.46
2019	325.082	313.194	6.553	319.747	96.34	98.36

Sumber: Dinas DPU ESDM DIY, 2021

Persentase RE total di Kabupaten Bantul tahun 2019 yaitu sebesar 98.36% dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah menerima aliran listrik.

c. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

E-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Membangun Bantul *Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS).

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengembangkan aplikasi sebanyak 79 aplikasi, baik yang berbasis *dekstop* atau *android*, *online* maupun *offline*. Untuk mendukung pelayanan *Digital Government Services* di Kabuaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun infrastruktur jaringan utama (*backbone*) *fiber optic* sepajang 135,241 Km, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Jaringan utama ini memenuhi kebutuhan jaringan internet dan intranet seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan sebagian kantor pemerintah kalurahan dengan kualitas jaringan *fiber optic* yang baik.

Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	3
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	2
7	Bantul	4
8	Jetis	4
9	Imogiri	5
10	Dlingo	4
11	Pleret	3

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
12	Piyungan	2
13	Banguntapan	4
14	Sewon	1
15	Kasihan	4
16	Pajangan	2
17	Sedayu	3
Jumlah		53

Sumber : *https://data.bantulkab.go.id/dataset/fasilits-wifi-desa-di-kabupaten-bantul, 2021*

Hingga tahun 2019 jumlah kantor pemerintah kalurahan yang tidak tersambung jaringan *fiber optic* sebanyak 72 titik karena tidak dilalui jalur utama *fiber optic*. Untuk kantor pemerintah kalurahan yang tidak dilalui jalur utama (*backbone*) *fiber optic*, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memberikan fasilitas jaringan internet dan intranet melalui sambungan udara. Untuk itu dibangun infrastruktur tower internet dan intranet milik pemerintah sebanyak 135 tower yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan *Digital Government Services* di kantor pemerintah kalurahan juga difasilitasi wifi publik sebanyak 53 titik yang dapat diakses juga oleh masyarakat kalurahan.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Tahun 2020 melalui SK Bupati Bantul Nomor 198 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul Tahun 2020. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016-2019 sebagai berikut :

Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2016	Nilai Thn 2017	Nilai Thn 2018	Nilai Thn 2019
	Komponen Pengungkit					
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	15	6.79	9.67	10.95	12.95
2.	Penguatan pengawasan	12	6.04	6.27	6.73	7.16
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.71	2.71	2.71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	6	3.84	3.84	3.84	3.89
5.	Manajemen perubahan	5	3.37	3.45	3.44	3.53
6.	Penguatan akuntabilitas	6	4.10	4.34	4.37	4.38
7.	Penataan tatalaksana	5	3.47	3.50	3.30	3.47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	6	4.33	4.53	4.51	4.52
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	34.64	38.31	39.85	42.11
	Komponen Hasil					
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	14.0	9.84	10.31	10.91	11.39
2.	Survey internal integritas organisasi	6.0	3.88	3.58	4.45	4.47
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	7.0	6.49	5.90	6.30	6.06
4	Opini BPK	3.0	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Survey eksternal pelayanan public	10.0	9.60	8.14	9.10	9.33
	Total Komponen Hasil (B)	40	32.79	30.93	33.76	34.25
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	67.43	69.25	73.61	76.36
	Kategori		**B**	**B**	**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah 76,43 dengan kategori B, sebagai berikut :

Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2020
A	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20	14,73
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93
3.	Reform	30	20,74
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	42,40
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28
4	Kinerja Organisasi	10	6,99
	Total Komponen Hasil (B)	40	34,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	76,43
	Kategori		**BB**

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

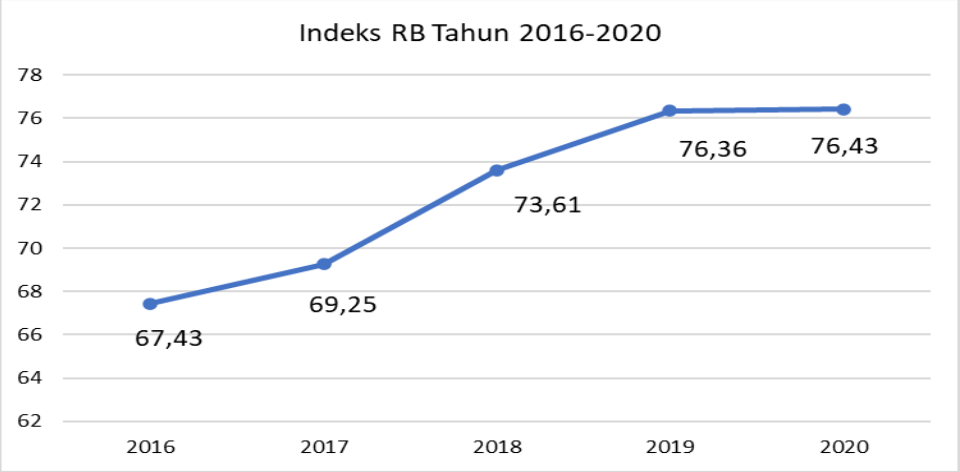

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah 76,43 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 yaitu 67,43. Meningkat dari kategori B (Cukup Baik) menjadi BB (Baik). Kategori B memiliki interprestasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, sedangkan Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

b. Angka Kriminalitas.

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus Narkoba	45	46	78	95	109
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	0	2	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	4	29	15	41	32
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	135	81	85	238
5	Jumlah kasus Pencurian	345	395	281	362	407
6	Jumlah kasus Penipuan	88	76	94	122	139
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	2	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	567	683	551	707	927
9	Jumlah Penduduk	928.676	927.181	939.718	945.441	954.706
10	Angka Kriminalitas	0,061	0,074	0,055	0,074	0,097

Sumber: Satpol PP, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 0,097 artinya bahwa dalam setiap 1000 penduduk terdapat lebih dari 9 kasus kriminalitas.

Dilihat dari jenis kriminal yang mengalami peningkatan adalah kasus penganiyaan, penipuan, pencurian dan kasus narkoba. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut antara lain tekanan ekonomi yang cukup tinggi akibat pandemic covid-19, pengaruh media sosial/pergaulan.

c. Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Ekonomi		1	2	5
2	Bidang Politik	1		1	
3	Bidang Lainnya	3	2	4	1
4	Mogok Kerja		6		2
Jumlah Demonstrasi		4	9	7	8

Sumber: Satuan Pol PP, 2021

Jumlah demonstrasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9 demonstrasi dibanding tahun 2017 yang hanya ada 4 demonstrasi, untuk selanjutnya bersifat fluktuatif, dalam arti terjadi penurunan jumlah demonstrasi, terutama untuk kasus pemogokan kerja pada tahun 2019 menjadi 7 demonstrasi, namun naik lagi di tahun 2020 menjadi 8 demonstrasi.

d. Kemudahan Perijinan.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkanlah Keputusan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang bertugas mengawal dan membantu peningkatan pelayanan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan atas izin berusaha,pengidentifikasian perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi) dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPT untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS).

Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2020 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020

Perizinan OSS		
No	Nama Perizinan	Jumlah Jenis Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1
2.	Perizinan Perdagangan	2
3.	Perizinan Perindustrian	2
4.	Perizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2
5.	Perizinan Pekerjaan Umum Peruamahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Pertahanan	3
6.	Perizinan Perhubungan	2
7.	Perizinan Peternakan	1
8.	Perizinan Kesehatan	8
9.	Perizinan Usaha Pariwisata	1
10.	Perizinan Tenaga Kerja	1
Perizinan Non OSS		
1.	Perizinan Dasar	3
2.	Perizinan Kesehatan	27
3.	Perizinan Usaha Perikanan	1
4.	Perizinan Reklame	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Selain adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu di mana proses penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar, maka pengurusan izin juga dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama). Waktu yang diperlukan bagi pelayanan perizinan secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nomor Induk Berusaha (NIB)						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya

Perdagangan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan Umum = - Toko Swalayan = 35 Pusat Perbelanjaan = 35	3	5	Umum = - Swalayan berdiri sendiri = 3 Swalayan terintegrasi = 1 Pusat Perbelanjaan = 4	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya
4.	SIUP Mihol	35	5	11	Pengecer Gol B dan C = 3 Penjual Gol B dan C = 3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	• SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)	20	5	4	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
8.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP dan Pertanahan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
10.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
11.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Adminis-trasi	Teknis	
12.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
13.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
      a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
   2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
      a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 perizin;
      b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 perIzin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
14.	Pendaftaran Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
15.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
16.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
17.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
18.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya
21.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
22.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata					
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
23.	Tanda Daftar Usaha Pariwista	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
24.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut.

Dari keseluruhan proses perizinan yang dikelola oleh DPMPT dari rekapitulasi dari permohonan izin tahun 2016 -2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah			
	Permohonan izin	Izin diterbitkan	Izin ditolak	Izin dalam proses
2016	6807	6021	165	621
2017	6165	5986	177	2
2018	5664	5502	148	14
2019	3793	2784	929	80
2020	5487	2827	2611	49

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

e. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan.

Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

Jenis Perda
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Jenis Perda
dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038; 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 11. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sumber: Bagian Hukum, 2021

f. Perkembangan Kemajuan Kalurahan

Kalurahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten IDM, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul
Menurut IndeksDesa Membangun (IDM) Tahun 2020

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
1	Srandakan	0.8374	Poncosari	0,793	MAJU
			Trimurti	0,8817	MANDIRI
2	Sanden	0.8122	Srigading	0,8133	MAJU
			Gadingsari	0,8133	MAJU
			Gadingharjo	0,8094	MAJU
			Murtigading	0,8149	MAJU
3	Kretek	0.8165	Tirtohargo	0,7571	MAJU
			Donotirto	0,8178	MAJU

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
			Parangtritis	0,8827	MANDIRI
			Tirtosari	0,8149	MAJU
			Tirtomulyo	0,8102	MAJU
4	Pundong	0.7760	Seloharjo	0,7229	MAJU
			Srihardono	0,8462	MANDIRI
			Panjangrejo	0,759	MAJU
5	Bambanglipuro	0.8477	Sumbermulyo	0,8787	MANDIRI
			Sidomulyo	0,8302	MANDIRI
			Mulyodadi	0,8343	MANDIRI
6	Pandak	0.8105	Caturharjo	0,8041	MAJU
			Wijirejo	0,8083	MAJU
			Triharjo	0,8143	MAJU
			Gilangharjo	0,8154	MAJU
7	Pajangan	0.7722	Guwosari	0,7708	MAJU
			Triwidadi	0,7624	MAJU
			Sendangsari	0,7833	MAJU
8	Bantul	0.7925	Sabdodadi	0,766	MAJU
			Palbapang	0,814	MAJU
			Ringinharjo	0,7432	MAJU
			Bantul	0,8105	MAJU
			Trirenggo	0,8287	MAJU
9	Jetis	0.8395	Patalan	0,8362	MANDIRI
			Trimulyo	0,8376	MANDIRI
			Canden	0,8456	MANDIRI
			Sumberagung	0,8384	MANDIRI
10	Imogiri	0.8067	Selopamioro	0,7611	MAJU
			Kebonagung	0,8132	MAJU
			Sriharjo	0,8138	MAJU
			Karangtalun	0,81	MAJU
			Karangtengah	0,7644	MAJU
			Imogiri	0,8987	MANDIRI
			Wukirsari	0,7767	MAJU
			Girirejo	0,8154	MAJU
11	Dlingo	0.8116	Mangunan	0,754	MAJU
			Dlingo	0,8148	MAJU
			Muntuk	0,8059	MAJU
			Temuwuh	0,8046	MAJU
			Jatimulyo	0,7929	MAJU
			Terong	0,8971	MANDIRI
12	Banguntapan	0.8323	Tamanan	0,8529	MANDIRI
			Baturetno	0,8879	MANDIRI
			Jagalan	0,7798	MAJU
			Banguntapan	0.9216	MANDIRI
			Singosaren	0,7524	MAJU
			Wirokerten	0,8324	MANDIRI
			Jambidan	0,8062	MAJU
			Potorono	0,8248	MANDIRI

No.	KAPANEWON	IDM 2020	KALURAHAN	IDM 2020	KLASIFIKASI
13	Pleret	0.8195	Bawuran	0,7521	MAJU
			Wonokromo	0,8916	MANDIRI
			Wonolelo	0,8005	MAJU
			Segoroyoso	0,7838	MAJU
			Pleret	0,8694	MANDIRI
14	Piyungan	0.8488	Sitimulyo	0,8137	MAJU
			Srimulyo	0.9195	MANDIRI
			Srimartani	0,8132	MAJU
15	Sewon	0.8244	Pendowoharjo	0,8121	MAJU
			Bangunharjo	0,8098	MAJU
			Timbulharjo	0,8116	MAJU
			Panggungharjo	0,864	MANDIRI
16	Kasihan	0.8254	Tamantirto	0,8138	MAJU
			Tirtonirmolo	0,8565	MANDIRI
			Ngestiharjo	0,8138	MAJU
			Bangunjiwo	0,8176	MANDIRI
17	Sedayu	0.8235	Argodadi	0,791	MAJU
			Argosari	0,786	MAJU
			Argomulyo	0,8829	MANDIRI
			Argorejo	0,834	MANDIRI

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 2.208 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Tidak ada satupun kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapat status 'Desa Sangat Tertinggal', 'Desa Tertinggal' dan "Desa Berkembang";
2) Menurut IDM, terdapat sejumlah 25 kalur dengan kriteria 'Desa Mandiri' dan 50 'Desa Maju';
3) Menurut *ranking* IDM, tiga kalurahan dengan skor tertinggi adalah Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan (0,9216); Kalurahan Srimulyo di Kapanewon Piyungan (0,9195); dan Kalurahan Imogiri di Kapanewon Imogiri (0,8987);
4) Adapun kalurahan dengan nilai terendah adalah Kalurahan Bawuran di Kapanewon Pleret (0,7521); Kalurahan

Ringinharjo di Kapanewon Bantul (0,7432); dan Kalurahan Seloharjo di Kapanewon Pundong (0,7229).

2.4.4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai tehnologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi

tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 269.908 jiwa atau 27.82%, kemudian lulusan SD/sederajat menempati peringkat kedua sebesar 20%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

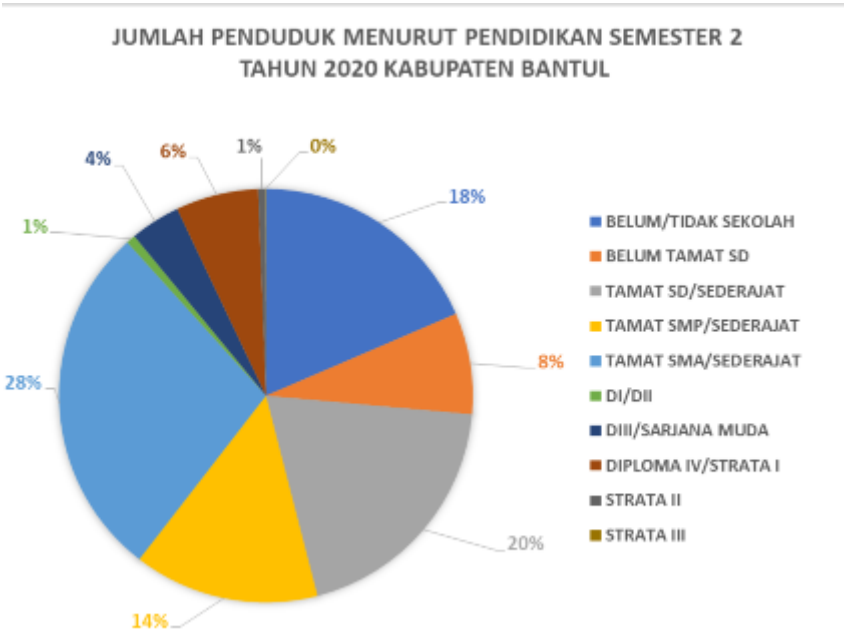

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap

tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 44,20. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (45,08) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	197.308	196.441	198.537	200.936	201.101
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	90.550	92.668	91.837	94.029	91.539
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	287.858	289.109	290.374	294.965	292.640
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	640.818	638.072	649.344	654.360	662.066
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,92	45,31	44,72	45,08	44,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Angka Kemiskinan	Persen	14.55	14.07	13.43	12.92	13.5	13.94	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.05	5.1	5.47	5.53	-1.66	-0.13	Belum tercapai (<)
	Gini Ratio	Angka	0.397	0.413	0.448	0.428	0.418	0.38	Belum tercapai (<)
	Laju inflasi	Persen	2.26	3.96	2.61	2.71	1.4	Menurun/stabil	Belum tercapai (<)
	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	3	2.87	2.72	3.06	4.06	2.9	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78.42	78.67	79.45	80.01	80.01	Meningkat	Sesuai (=)
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	9.09	9.2	9.35	9.54	9.55	9	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
II	**Aspek Pelayanan Umum**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	98.7	98.75	108.41	106.24	97.7	98.9	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Persen	96.12	98.2	98.45	95.26	92.77	96.4	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	Persen	95	99.23	97.83	101.38	97.23	95.3	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	84.1	88.68	89.55	85.86	86.55	84.65	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	71.09	76.6	77.33	76.8	76.31	68.2	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	109.61	108.56	101.27	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan	Persen	100	100	108.54	111.18	105.93	100	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA								
	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0.02	0.02	0.01	0.004	0.004	0.02	Melampaui (>)
	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0.02	0.02	0.02	0.01	0.004	0.02	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	96.77	72.8	108.3	99.49	157.6	157.6	Sesuai (=)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7.65	8.74	8.28	8.33	6.93	6.93	Sesuai (=)
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.4	0.41	0.41	0.41	0.31	0.31	Sesuai (=)
	Prevalensi Penderita HIV (Angka)	Persen	0.083	0.09	0.19	0.12	0.01	0.01	Sesuai (=)
	Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD)	per 100.000 Penduduk	237.75	57.98	19.52	140	128	110	Belum tercapai (<)
	Net Death Rate	per 1000 pasien	18.69	16.98	22.62	18.7	21.17	16.6	Belum tercapai (<)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam	Persen	82.79	74.18	74.58	75.1	75.42	75.58	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kondisi Mantap								
	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	Persen	80	80	84	84	84	84	Sesuai (=)
	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	81.12	81.16	80.44	82.19	80.01	82.66	Belum tercapai (<)
	Persentase Penanganan Banjir	Persen	20.3	24.9	28.84	34	41.31	40.9	Melampaui (>)
	Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	Jumlah	-	2	2	2	2	4	Belum tercapai (<)
	Persentase Cakupan Pengendalian Tata Ruang	Persen	-	71	70.35	72.5	75.01	77	Belum tercapai (<)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	Persen	50.13	79.69	92.06	92.49	92.49	92.49	Sesuai (=)
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	MASYARAKAT								
	Persentase penegakan PERDA	Persen	57	77.7	95.3	66	70	69	Melampaui (>)
	Persentase Penyelesaian K3	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	Persen	94	97	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase Relokasi Warga	Persen	9.09	27.28	36.36	89.09	132	81.82	Melampaui (>)
	Persentase Sekolah Siaga Bencana	Persen	2.69	3.19	3.97	4.12	4.51	4.2	Melampaui (>)
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
	Penanganan NAPZA	Jumlah	4	5	NA	NA	NA	Menurun	Belum tercapai (<)
	Persentase PMKS	Persen	13.5	13.25	7.29	7.29	7.29	12.75	Belum tercapai (<)
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	1,297,700.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,649,800.00	1,842,460.00	1,679,093.00	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	Angka	0.38	0.38	0.73	0.73	0.18	0.38	Melampaui (>)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
	Ketersediaan Energi	(kkal/kapita/hari)	3079	2993	3121	3123	3092	3095	Belum tercapai (<)
	Ketersediaan Protein	(kkal/kapita/hari)	75	78.36	87.23	89.95	82.9	72.8	Melampaui (>)
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	92.6	90.8	91.7	93.7	91.4	93.6	Belum tercapai (<)
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Jumlah	27	29	69	16	19	35	Belum tercapai (<)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
	Cakupan Sertifikasi Tanah	Persen	NA	100	93.16	99.37	100	96	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	34	24	34.67	39.63	51.8	50	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Indeks	87.76	90.9	85.66	90.9	85.18	80	Melampaui (>)
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	27.5	27.51	43.15	53.09	54.82	52.93	Melampaui (>)
	Volume sampah yang tertangani	(ribu/m3)	NA	441	486.784	452.185	460.032	460	Melampaui (>)
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	NA	97.83	97.83	99.55	99.63	91	Melampaui (>)
	Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	Persen	NA	91.74	85	85	78.05	90	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan	Indeks	80.18	80.2	83.9	92.3	90.01	80.35	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Masyarakat								
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	14	16	22	24	27	22	Melampaui (>)
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	Persen	13.49	11.94	12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	Rata-rata	3.29	3.12	3.12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	NA	NA	1.67	1.67	1.83	Belum tercapai (<)
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	Persen	5	6	1.99	1.95	1.83	1.83	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	Persen	60	70.33	77.7	80.69	101.49	85	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	-	75.23	75.33	78.56	100.04	83	Melampaui (>)
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Jumlah	10	10	10	12	8	10	Belum tercapai (<)
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah	0	192	183	185	185	180	Melampaui (>)
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
	Layanan perijinan tepat waktu	Persen	81.6	70.98	83.87	83.8	96.92	83	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.99	83.08	83.29	85.89	87.89	80	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	12.2	12.72	11.85	9.3	3.74	9,25	Belum tercapai (<)
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut	Persen	32	31.4	34.21	32.18	40.33	29	Melampaui (>)
	Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah	4	4	5	5	5	5	Sesuai (=)
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	Persen	NA	NA	NA	10	15	28	Belum tercapai (<)
	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	Persen	NA	NA	NA	43	47	45	Melampaui (>)
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
	Kalurahan Budaya	Jumlah	9	10	10	12	12	16	Belum tercapai (<)
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	NA	NA	NA	24	24	27	Belum tercapai (<)
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
	Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%)	Persen	28.5	29	37.72	31	-38.3	32	Belum tercapai (<)
18	**URUSAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Persentase SKPD yang menyeleng-garaan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	Persen	27	33	46.2	52	64.8	61	Melampaui (>)
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0.697	5.92	1.14	1.41	1.59	1.45	Melampaui (>)
	Produksi Perikanan	Ton	12191.22	12912.57	13059.44	13243.45	13453.92	13383	Melampaui (>)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32.51	32.51	22.89	-54.55	-67	Melampaui (>)
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2800800	3405685	4204422	5166615	2348313	5486311	Belum tercapai (<)
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.6	1.8	1.9	2	1.56	2.1	Belum tercapai (<)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	BIDANG PERTANIAN								
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Persen	9.94	0.113	0.13	1.57	0.71	0.1025	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	14.09	7.94	0.85	3.83	2.91	1.1	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	Persen	7.8	0.17	0.24	1.09	2.8	0.3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Daging	Persen	4.24	20.52	0.71	0.57	0.93	0.9	Melampaui (>)
	Produksi Daging	Ton	14742.55	14751	14855.725	15088.317	15228.523	14644.26	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	215622.67	215867	216152	216152	226033.2	232034	Belum tercapai (<)
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	14363.65	15503.7	15635.3	15635.3	16264.3	6697.25	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14466.77	14490.78	145255.81	145255.81	15122.22	14604.08	Melampaui (>)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								
	-								
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	-		-	-	-	-	-	-	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
	Pertumbuhan Ekspor	Persen	7	7	13.96	14.61	-1.3	7	Belum tercapai (<)
	Jumlah Pasar Tipe A	Jumlah	1	1	1	4	4	3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	Persen	6.54	5.79	5.59	5.11	-4.2	5.62	Belum tercapai (<)
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
	Cakupan industri kreatif	Persen	39.95	41.11	41.11	46.2	46.2	47	Belum tercapai (<)
	Pertumbuhan Industri	Persen	2	3.4	3.49	3.5	1.8	3	Belum tercapai (<)
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
	Jumlah KK Transmigran	Jumlah	50	12	28	20	20	50	Belum tercapai (<)
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
1	**SEKRETARIAT**								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	DAERAH								
	Nilai Evaluasi Kinerja PD	Angka	65	70	76.19	76.16	76	71	Melampaui (>)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.78	87.57	88.7	86.97	87.89	83	Melampaui (>)
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4478 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	Belum tercapai (<)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka	73,66 (BB)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,85 (A)	82 (A)	Belum tercapai (<)
	Persentase Belanja Pegawai	Persen	55	52	43.46	47.37	47	45	Melampaui (>)
2	**SEKRETARIAT DEWAN**								
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	94	94	100	82	100	100	Sesuai (=)
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
1	**PERENCANAAN**								
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	Persen	NA	94.35	105.46	107.31	98.77	94.9	Melampaui (>)
	Persentase rata-rata Pencapaian Target	Persen	NA	90	106.57	99.4	98.81	91.1	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kinerja OPD								
2	**KEUANGAN**								
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai (=)
	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	14.04	12.27	11.41	12.22	10.15	Menurun	Sesuai (=)
	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	38.95	31.92	31.11	30.2	27.09	20	Melampaui (>)
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	18.14	17.76	18.66	17.25	18.23	10	Melampaui (>)
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	37.22	45.46	47.25	48.32	44.09	Menurun	Sesuai (=)
		Persen	62.78	54.54	52.75	51.68	55.91	Meningkat	Sesuai (=)
	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	Persen	0.62	0.69	0.82	0.98	0.98	Meningkat	Sesuai (=)
	Penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai (=)
3	**KEPEGAWAIAN**								
	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Persen	84	89	89.03	90.14	92.38	91	Melampaui (>)
	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	81.8	Melampaui (>)
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
	Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian	Jumlah	4781	3783	3644	2573	217	Meningkat	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	kepada Masyarakat								
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
	INSPEKTORAT DAERAH								
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	Persen	90.5	91.78	90.49	91.73	91.5	91,5	Sesuai (=)
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
	KECAMATAN								
	Rerata IKM	Indeks	80	91.8	93.5	96.17	94.13	90	Belum tercapai (<)
G	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Jumlah intoleransi di masyarakat	Persen	0	0	0	2	0	0	Sesuai (=)
	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi	Persen	0	0	0	87.89	80.32	70	Melampaui (>)
III	**Aspek Daya Saing**								
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia	Klasifikasi	62.9	75	75	7.72	7.7	8	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Governance Index/IGI)								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Angka	NA	71.57	74.36	76.77	76.77	78	Belum tercapai (<)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47.53	45.5	53.36	60.4	63.02	63	Melampaui (>)
	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29.33	37.33	46.67	46.67	45.33	Melampaui (>)
	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70.12	70.42	70.45	72.5	75.01	75	Melampaui (>)
	Angka Kriminalitas	Angka	0.061	0.074	0.055	0.074	0.076	0.065	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54.8	57	68.4	69.7	67.52	70	Belum tercapai (<)
	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	103.67	102.4	103.16	103.75	101.13	101.9	Belum tercapai (<)

Sumber: Bappeda, 2021

2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, perubahan substansi dan sistematika RPJMD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan perubahan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018. Perubahan ini tidak mencakup indikator sasaran daerah, namun dilakukan penyesuaian target capaiannya. *Cascading* dokumen lima tahunan beserta target kinerja sasaran daerah periode kemarin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)														
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	
							Realisasi	N/A	74,5 (Baik)	75 (Baik)	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	8,5 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	RPJMD 11/2016		73,26	73,28	73,3	73.31	73.32	73.33	
							Realisasi	73,24	73,44	73,47	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	73,6	73,65	73,70	73,70
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	RPJMD 11/2016		15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9	
							Realisasi	15	13,55	14,73	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	15,23	15,38	15,54	15,54
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016		14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66	
							Realisasi	15,16	14,55	14,07	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	12,13	10,86	9,59	8,32	8,32
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	RPJMD 11/2016		5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6	
							Realisasi	5,1	5,06	5,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	5,45	5,5	5,6	5,6
					Gini Ratio	Angka	RPJMD 11/2016		0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025	
							Realisasi	0,3177	0,3967	0,41	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,39	0,38	0,37	0,37
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	RPJMD 11/2016		5	6	7	8	9	10	10
							Realisasi	4,85	12,03	21,59	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	22	23	24	24

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	RPJMD 11/2016		25	30	35	40	45	50	
							Realisasi	22	39	41,11	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	45	47	50	50
				Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	RPJMD 11/2016		0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103	
							Realisasi	0,1001	9,94	0,1133	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,1020	0,.1025	0,1030	0,1030
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	RPJMD 11/2016		1,00	1,025	1,05	1,08	1,10	1,125	
							Realisasi	0,75	14,09	7,94	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,08	1,10	1,125	1,125
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	RPJMD 11/2016		0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
							Realisasi	0,09	7,8	0,17	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,25	0,3	0,35	0,35
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	RPJMD 11/2016		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
							Realisasi	0,45	4,24	20,52	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,8	0,9	1	1
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	RPJMD 11/2016		1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
							Realisasi	1,20	0,35	5,92	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,40	1,45	1,50	1,50
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		N/A	72	74	76	78	80	
							Realisasi	N/A	N/A	71,57	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	76	78	80	80
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	RPJMD 11/2016		39	45	50	56	63	72	
							Realisasi	38	31,35	45,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	56	63	72	72
				Terciptanya kesadaran masyarakat	Desa Tangguh Bencana	Persen	RPJMD 11/2016		20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	
							Realisasi	18	15	29,33	-	-	-	-	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				dalam kesiap-siagaan bencana			Perubahan RPJMD		-	-	-	38,66	45,33	52	52
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016		80	81	70,35	83	84	85	
							Realisasi	79	70	70,24	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	72,5	75	80,0	80,0
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
							Realisasi	0,04	0,061	0,074	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,070	0,065	0,060	0,060
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016		40	50	60	70	80	90	
							Realisasi	35	54,8	57,01	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	65	70	75	75

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Capaian kinerja pada Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	62,9	75	75	7,72	8,0	7,70	96,25	8,50	90,59
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,5	73,56	73,66	73,77	73,65	73,86	100,29	73,70	100,22
Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,73	14,74	15,03	15,15	15,38	15,17	98,63	15,54	97,62
Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	14,55	14,07	13,43	12,92	9,59	13,50	59,22	8.32	37,74
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,1	5,47	5,53	5,50	-1,66	-30,18	5,6	-29,64
	Gini Ratio	Angka	0,397	0,413	0,448	0,428	0,38	0,418	99,74	0,37	97,03
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32,51	32,51	22,89	23	-54,55	-237,17	24	-227,29

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	39,95	41,11	41,11	46,20	47	46,20	98,30	50	92,40
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,074	0,1133	0,13	3,83	1,10	0,71	64,40	0,10	689,63
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	14,09	36,974	0,85	1,09	1,10	2,91	264,55	1,125	258,67
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,054	0,166	0,24	0,57	0,30	2,80	933,33	0,35	800,00
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	4,24	20,52	0,71	1,57	0,90	0,93	103,33	1	93,00
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0,697	5,92	1,14	1,41	1,45	1,59	109,66	1,50	106,00
Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Angka	NA	71,57	74,36	76,77	78,00	76,77	98,42	80,00	95,96

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
masyarakat	Layanan Infrastruktur										
Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,53	45,5	53,36	60,40	63,00	63,02	100,03	72,00	87,53
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29,33	37,33	46,67	45,33	46,67	102,93	52,00	89,73
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70,12	70,42	70,45	72,50	75,00	75,01	100,01	80,00	93,76
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	0,061	0,074	0,055	0,074	0,065	0,076	83,080	0,060	73,33
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,8	57	68,4	69,70	70,00	67,52	96,46	70,00	96,46

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Dari 13 sasaran daerah dengan 19 indikator sasaran, capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD diperoleh nilai terendah minus 227,29% untuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai tertinggi 800% untuk pertumbuhan produksi tanaman perkebunan.

2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

   Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

   Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

   Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

   Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

   Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemenuhan SPM pada masing-masing bidang dapat menggunakan indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang.

2.7.1. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan

(Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	Bidang Urusan Pendidikan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PAUD	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	27.060	100	25.029	25.029	100
2	SD	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	81.294	100	82.166	82.166	100
3	SMP/MTs	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 – 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	39.578	100	41.006	41.006	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.373	1.373	100	2.046	2.046	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.7.2. Bidang Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	14.312	13.848	97	12.708	12.088	95,12	2019: Beberapa ibu hamil belum melaksanakan K4 pada trimester 3 karena adanya mobilisasi penduduk atau pindah daerah 2020: Ada ibu hamil kunjungan K1 sudah lewat dan tidak terpantau
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	13.088	13.072	99,8	12.708	12.697	99,91	2019: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes walaupun dilayani oleh nakes 2020: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.072	10.998	84,1	12.624	10.680	84,60	2019: Beberapa bayi gagal IMD 2020: - Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). - Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60.005	42.135	70,2	53.647	39.055	72.80	2019: Masih ada balita yang belum tercatat ditimbang secara rutin 2020: Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi COVID-19
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.861	27.861	100	113.058	106.072	93,82	2020: -screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19 -aplikasi mobscreen penjarkes belum optimal
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	98.438	98.438	100	584.084	407.090	69.70	2020: screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	49.942	41.063	82,2	121.619	35.247	28.98	2019: Keterbatasan lansia mengisi form skrining 2020: Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.337	29.337	100	60.204	36.777	61.09	2020: penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.954	11.954	100	21.138	13.584	64.26	2020: penderita yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.999	2.999	100	2.353	2.178	92.56	2020: kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan peayanan TBC sesuai standar	9.224	9022	98	4.438	4.438	100	2019: Orang terduga tuberculosis, disebabkan penderita TB tidak taat minum obat secara rutin
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	12.787	12.787	100	16.101	16.101	95.60	2020: Pandemi Covid-19 menyebabkan: - Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil - Layanan VCT mobile berhenti

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain beberapa sebab di atas, capaian pelayanan tidak mencapai 100% juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya kunjungan karena ketakutan masyarakat periksa di fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{10}{10} x\ 100\ \% = 100\ \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{0}{0} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..

Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%	0	0	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2021

2.7.6 Bidang Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{6535}{6535} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{1475}{1475} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	$\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{7684}{7684} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)	$\frac{57}{57} x\ 100\ \% = 100\%$	$\frac{40}{40} x\ 100\% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock)	$\frac{92}{92}\ x\ 100\% = 100\%$	$\frac{405}{405}\ x\ 100\% = 100\%$	$\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan}\ x\ 100\ \%$

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, 2021

2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana *CSR* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul pada tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
1	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL	Pariwisata, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan	1.146.105.000
2	BANK BRI KC BANTUL	Kesehatan	25.000.000
3	BANK BUKOPIN KCP BANTUL	Kesehatan	19.000.000
4	BANK MUAMALAT INDONESIA	Sosial, Pendidikan	167.000.000
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Sosial	1.000.000
6	BANK MANDIRI TASPEN YOGYAKARTA	Sosial, Kesehatan	24.925.000
7	BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA	Sosial	381.967.600
8	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC BANTUL	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup	63.984.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
9	KSU AMANAH INSANI MAKMUR	Sosial	9.860.000
10	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	2.178.177.225
11	KSPPS BMT ASSALAM	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	106.327.000
12	KSPPS BMT AD DA'WAH	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	55.393.900
13	KSPPS BMT INTI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	82.799.865
14	KSPPS BMT MITRAMA	Sosial, Kesehatan	68.897.500
15	KOPWAN BMT AN-NISA'	Sosial	900.000
16	PT. PLN (PERSERO) UP3 YOGYAKARTA	Sosial	165.000.000
17	PT. TELKOM INDONESIA	UMKM dan Ekonomi Kreatif	508.000.000
18	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	14.070.000
19	PT. IDE STUDIO INDONESIA	Sosial, Pendidikan	9.500.000
20	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)	Sosial	1.500.000
21	PT. MADUBARU	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	978.125.000
22	AGUNG SWALAYAN	Kesehatan	1.520.000
23	KSP KOPERASI KREDIT ADIL DLINGO	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	25.975.000
24	PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	47.322.000
25	PT. SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	239.500.000
26	BANK INDONESIA PERWAKILAN DIY	UMKM dan Ekonomi Kreatif	320.000.000
27	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Kesehatan	8.140.000
28	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Kesehatan	45.588.000
29	BANK TABUNGAN NEGARA KC YOGYAKARTA	Sosial	60.000.000
30	BANK TABUNGAN NEGARA KC BANTUL	Kesehatan	3.777.500
31	GAPENSI KABUPATEN BANTUL	Kesehatan	28.500.000
32	KELUARGA ALUMNI UGM (KAGAMA)	Kesehatan	24.492.000
33	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) BANTUL	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
34	PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA	Kesehatan	60.000.000
35	YAYASAN WAHANA MANDIRI INDONESIA (YWMI)	Sosial, Lingkungan Hidup	1.108.723.000
36	PT. OUT OF ASIA	Sosial, LIngkungan HIdup, Pendidikan	96.330.000
37	PT. SAMITEX SEWON	Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup	16.200.000
38	PERTAMINA TBBM REWULU	UMKM dan Ekonomi	601.775.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
		Kreatif, Kesehatan, Lingkungan Hidup	
39	KSPPS BMT EL BUMMI 381	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	182.931.000
40	KSPPS BMT RIZQI BAROKAH	Pendidikan	15.236.600
41	KSPPS BMT SABIBUL MUHTADIN	Sosial, Kesehatan	21.636.300
42	KSPPS BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial	47.155.000
43	KOPPONTREN AL-MUHSIN	Sosial	6.033.000
44	REAL ESTATE INDONESIA (REI) DPD DIY	Kesehatan	22.505.000
45	ASTRA MOTOR YOGYAKARTA	Kesehatan	20.000.000
46	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	126.790.500
47	KSPPS BMT ARTHA AMANAH SANDEN	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan	474.660.750
48	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KC YIA	Sosial, Lingkungan Hidup	116.112.400
49	ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)	Kesehatan	8.500.000
50	PAGUYUBAN SUGENG REGIONAL DIY	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
51	CABANG MUHAMMADIYAH KAPANEWON DLINGO	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
52	KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU) MALAYSIA	Kesehatan	2.550.000
53	PT. ADI SATRIA ABADI (ASA)	Sosial	47.060.000
54	ROS IN HOTEL	Sosial	19.300.000
55	PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO	Sosial	40.000.000
56	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Sosial	40.000.000
			9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Dari sisi pendapatan dan belanja, Pada tahun 2016-2019 pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi Covid-19.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan dalam rencana dan program kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan pada upaya mengatasi permasalahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja APBD merupakan gambaran singkat kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul meliputi perkembangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	**PENDAPATAN**	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	Pendapatan Asli Daerah	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:02	Dana Perimbangan	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:03:00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
5	**BELANJA**	2,016,544	2,076,742	2,165,652	2,283,585	2 .199.124	2,25%
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.890	1.116.642	1.142.422	1.180.251	1.276.279	0,49%
5:02	BELANJA LANGSUNG	750.654	960.100	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
	Surplus (Defisit)	-16,209	10,137	62,101	-14,046	11.121	12,07%
6	**PEMBIAYAAN**	-	-	-	-		
6:01	PENERIMAAN DAERAH	293,078	261,454	256,630	296,985	238.679	-4,14%
6:02	PENGELUARAN DAERAH	24,752	24,365	39,573	48,892	11.599	2,03%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	268,326	237,089	217,057	248,093	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252,117	247,226	279,158	234,047	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016-2020, sebesar 2,59% pertahun, sedangkan pertumbuhan rerata belanja daerah sebesar 2,25% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin meningkat. Ditinjau dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan cenderung lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA, sedangkan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran pembiayaan adalah dari penyertaan modal.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 4,99% pertahun atau melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya berada pada kisaran 3-4% pertahun. Tahun 2017 pada komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi hal ini disebabkan adanya Pendapatan Hibah dari BOS, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pos PAD menurun dari tahun sebelumnya, hal ini karena ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan komponen PAD dari pajak daerah mencapai sebesar 12,56% pertahun, retribusi tumbuh

8,11% pertahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 4,85% pertahun, dan Lain-lain PAD yang sah tumbuh 1,37% pertahun;

- Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,12%, Bagi Hasil Pajak mengalami pertumbuhan rerata sebesar 8,83%, Bagi Hasil SDA mengalami penurunan rerata sebesar 16,33%, DAU mengalami penurunan sebesar 1,87%, dan DAK mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,30%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh 15,59% pertahun.

Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	**PENDAPATAN**	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	**Pendapatan Asli Daerah**	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	133,475	165,562	182,127	213,629	200.826	12,56%
4:01:02	Hasil Retribusi Daerah	26,613	31,576	46,053	48,278	30.466	8,11%
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,068	20,130	19,653	21,945	25.138	4,85%
4:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223,299	276,911	214,821	222,077	223.181	1,37%
4:02	**Dana Perimbangan**	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:02:01	Bagi Hasil Pajak	34,633	30,048	29,871	19,355	35.645	8,83%
4:02:02	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4,706	4,823	714	592	11.121	-16,33%
4:02:03	Dana Alokasi Umum	999,814	982,251	982,251	1,015,303	923.214	-1,87%
4:02:04	Dana Alokasi Khusus	292,200	270,134	342,621	315,907	308.644	2,30%
4:03:00	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
4:03:01	Pendapatan Hibah	6,149	10,599	139,342	77,281	83.860	312,75%
4:03:02	Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda lainya	137,137	145,069	155,587	164,966	159.399	3,92%
4:03:03	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	99,913	131,691	113,326	165,850	191.989	19,99%
4:03:04	Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lainnya	21,328	18,085	1,387	4,356	27.050	156,88%
4:03:04	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016–2020, diolah

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

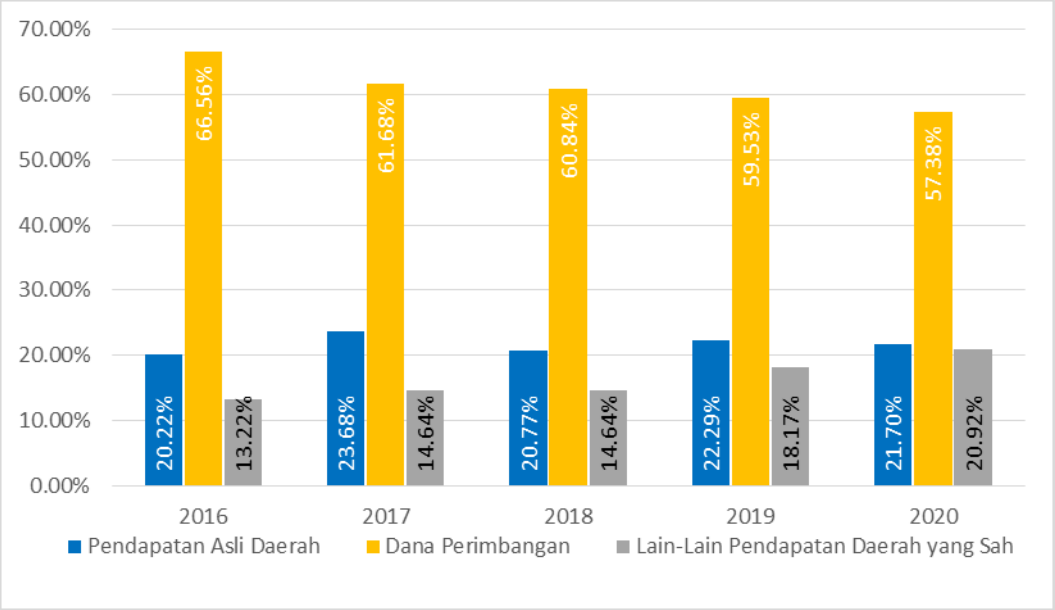

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD selalu meningkat namun pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 target yang telah disusun pada awal tahun dilakukan penyesuaian dan *refocusing* pada Perubahan APBD Tahun 2020.

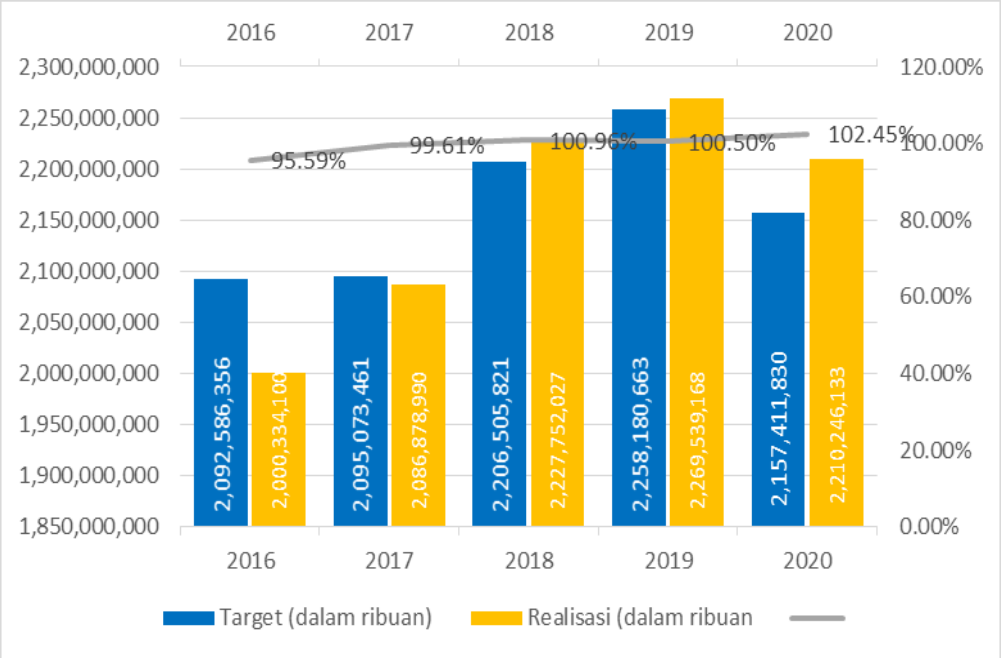

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 target pendapatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 ada penundaan dana transfer oleh pemerintah pusat pada DAK Non Fisik.

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, target pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1, berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,124 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 1,107 pada tahun 2020. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) menyusun *readiness criteria* untuk mencari dana APBN, DAK, dan Dana Keistimewaan; (2) opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (3) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; (4) Pinjaman baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri; dan (4) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.

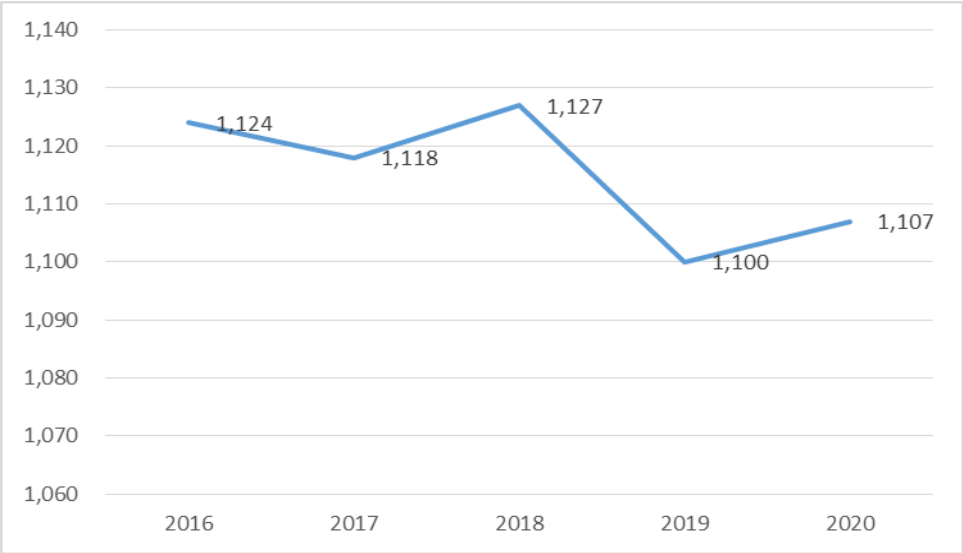

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah

Sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Pemerintah Daerah telah berupaya dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR), dan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tidak berlaku lagi. Pembiayaan CSR lebih dipertegas untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Berikut tabel yang menunjukan realisasi CSR dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang menunjukkan tingkat pertumbuhan rerata 59,98% per tahun, sedangkan jumlah perusahaan yang memberikan CSR bersifat fluktuatif.

Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	perusahaan	Realisasi
1	2016	62	3.218.324.974
2	2017	41	10.550.863.240
3	2018	54	6.378.310.667
4	2019	61	8.629.852.289
5	2020	56	9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dicerminkan dengan peran PAD terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat salah satu dimensi yang diukur yaitu kondisi keuangan daerah yang terdiri dari beberapa indikator maka perlu disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemandirian Keuangan	0,2022	0,2033	0,2077	0,2230	0,2170
2	Fleksibilitas Keuangan	1,573	1,998	1,976	1.974	1,972
3	Solvabilitas Operasional	0,9732	1,0148	0,9269	0,9451	0,8809
4	Solvabilitas Jangka Pendek	32,7679	17,7492	8,4630	6,2744	6,1438
5	Solvabilitas Layanan	2.564.950	2.606.274	2.742.242	2.852.578	2.866.769

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam indikator kemandirian keuangan pemerintah kabupaten bantul berkisar di angka 0,20 sampai dengan 0,22 hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bantul masuk dalam katagori belum mandiri yang artinya masih sangat tergantung dengan dana transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai sebesar 22 persen belanja daerah.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting , karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan daerah lain di DIY dan nasional tahun 2016-2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul

mencapai kisaran angka 20 % sampai dengan 22 %. Pada tahun 2020, Kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja masih berada di bawah capaian Kabupaten/Kota di DIY dan capaian daerah kabupaten/kota lain secara nasional.

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio PAD Terhadap Pendapatan			Rasio PAD Terhadap Belanja		
	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional
2016	20,2%	29,0%	22,9%	20,0%	28,5%	22,9%
2017	20,3%	29,6%	25,4%	20,4%	30,5%	25,9%
2018	20,8%	29,0%	24,6%	21,4%	30,1%	25,0%
2019	22,3%	29,0%	24,5%	22,2%	29,4%	24,7%
2020	21,7%	26,7%	24,1%	21,8%	27,5%	24,4%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, DJPK Kemenkeu RI, 2016-2020 (data per 16 Maret 2021, diolah)

Beberapa permasalahan optimalisasi pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Belum optimalnya pemutahiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sistem administrasi pencatatan penerimaan pembayaran daerah dengan memanfaatkan tehnologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum dikelola secara optimal.

- Masih terbatasnya ruang gerak BUMD dalam melakukan ekspansi bisnis.
- Ketergantungan penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih cukup tinggi.

3.1.3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas riil keuangan daerah. Tabel 3.6 berikut menunjukkan jumlah nominal dan Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 2,02 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 2,20 triliun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rerata sebesar 2,25% pertahun.

Dari sisi komponen belanja, belanja tidak langsung rerata mengalami penurunan sebesar 0,49%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,49% per tahun. Pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dari pertumbuhan belanja tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja

Pemerintah Kabupaten Bantul semakin besar untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Sebagian besar pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, kecuali belanja pegawai. Pos belanja pegawai mengalami penurunan rerata sebesar 5,78% per tahun, terutama terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke Pemerintah DIY yang berimplikasi terhadap pemindahan belanja pegawai guru sekolah tingkat menengah ke Pemerintah DIY dan pada tahun 2020 belanja tunjangan profesi guru tidak dapat sepenuhnya terealisasi karena ada banyak guru yang pensiun, dan tidak terealisasinya tambahan penghasilan guru karena banyak guru yang sudah bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi selain itu juga adanya penurunan insentif pemungutan pajak daerah dikarenakan adanya penurunan dari target pendapatan pajak daerah akibat pandemi Covid-19.

Untuk belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan disebabkan pada tahun 2020 banyak alokasi anggaran belanja langsung yang direfocusing dan dialihkan ke belanja tidak terduga dalam rangka penangan covid-19.

Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	**BELANJA**	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124	2,25%
05.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.265.890	1.116.642	1.142.423	1.180.250	1.276.279	0,49%
05.01.01	Belanja Pegawai	1.032.505	825.306	826.969	838.872	799.455	-5,78%
05.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	39		
05.01.03	Belanja Hibah	31.862	50.474	44.796	59.646	84.738	30,60%
05.01.04	Belanja Bantuan Sosial	3.267	1.650	7.852	6.920	760	56,37%
05.01.05	Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	12.430	14.330	17.799	22.291	22.871	16,83%
05.01.06	Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	185.305	222.760	244.601	251.171	266.883	9,74%
05.01.07	Belanja Tidak Terduga	521	2.121	406	1.312	101.572	2022,79%
05.02	**BELANJA LANGSUNG**	750.654	960.099	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
05.02.01	Belanja Pegawai	44.679	69.976	93.830	113.645	126.114	30,70%
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	421.914	557.504	591.238	652.975	580.329	9,38%
05.02.03	Belanja Modal	284.061	332.619	338.160	336.714	216.401	-4,35%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Pengalokasian anggaran belanja APBD mencakup penyediaan alokasi belanja Pendidikan sebesar 20%, belanja Kesehatan 10% diluar gaji, belanja infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 51% sampai dengan 63%, sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 37% sampai dengan 48%.

Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

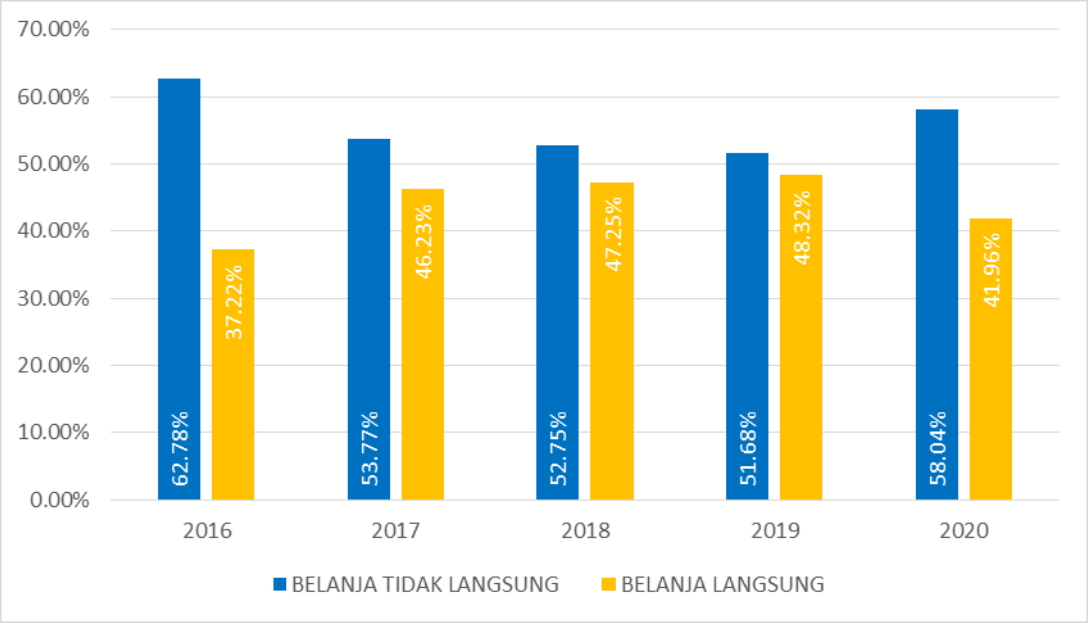

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020

Selama periode tahun 2016-2020, realisasi belanja belum sesuai rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah yang mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 91%, sebagaimana pada gambar berikut:

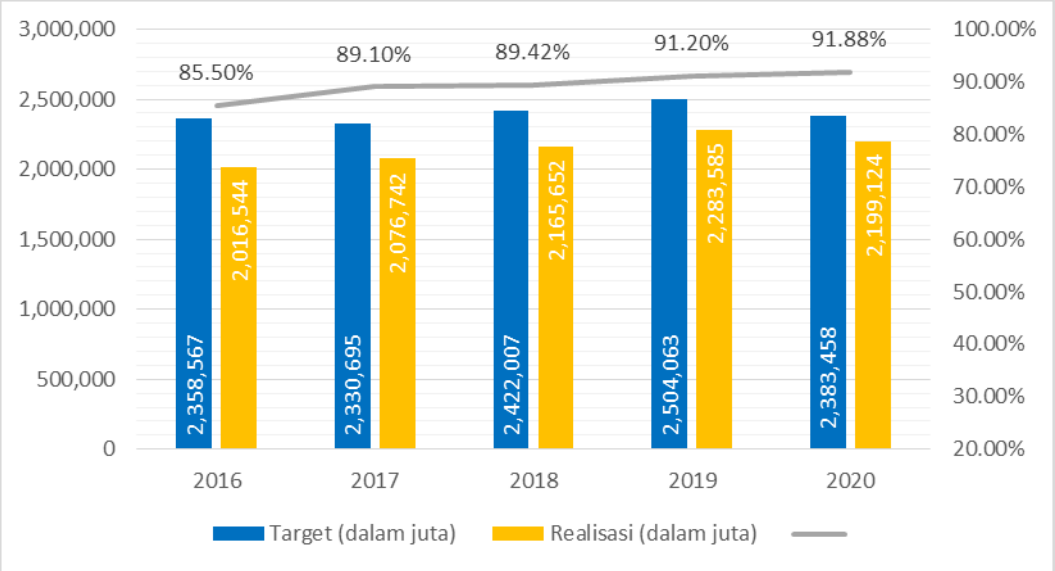

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020

Beberapa permasalahan utama perencanaan dan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Bantul antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang diindikasikan oleh relatif besarnya jumlah belanja yang tidak terserap. Selain itu adanya peraturan dan kebijakan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus diacu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum optimalnya pengendalian belanja daerah sehingga masih terdapat inefisiensi belanja daerah, karena belum semua instrumen pengendalian belanja yang ada seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) di implementasikan pada penganggaran.

3. Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan,pelaksanaan dan pencairan anggaran.

3.1.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir.

Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Surplus (Defisit)	-16.210	10.137	62.100	-14.046	11.121	12,07%
6	**PEMBIAYAAN**	-	-	-	-		
06.01	**PENERIMAAN DAERAH**	293.078	261.454	256.630	296.985	238.679	-4,14%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026	254.842	247.145	279.158	234.048	-4,05%
06.01.02	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.01.03	Penerimaan Piutang Daerah	8.711	6.613	9.486	7.853	3.918	-11,99%
06.01.04	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	7.000	0	-100,00%
06.01.05	Penjualan aset daerah yang dipisahkan	1.342	-	-	2.974	713	-76,03%
06.02	**PENGELUARAN DAERAH**	24.752	24.365	39.573	48.892	11.599	2,03%
06.02.01	Transfer Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.02.02	Penyertaan Modal	16.045	17.150	31.500	34.300	8.001	5,69%
06.02.03	Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo	-	-	-	7.000		-100,00%
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.707	7.215	8.073	7.592	3.598	-15,95%
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	268.326	237.089	217.058	248.094	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252.117	247.226	279.158	234.048	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyertaan Modal merupakan suatu upaya dalam penguatan modal untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Penyertaan modal diberikan kepada 4 (empat) BUMD, yaitu : PT. Bank BPD DIY, Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini digunakan untuk modal tetap dan modal kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD serta melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)
1	PT BPD DIY	10.045	17.151	7.500	16.442	23.000	15.247	23.000	17.353	-	20.154
2	Perumda Aneka Dharma	-	24	1.900	-	500	-	1.800	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	4.500	296	5.500	325	4.500	408	5.000	514	6.000	688
4	PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)	1.500	3.386	2.250	3.173	3.500	3.657	4.500		2.001	4.025
JUMLAH		16.045	20.858	17.150	19.939	31.500	19.312	34.300	21.684	8.001	24.867

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi penyertaan modal dan bagian laba atas penyertaan modal Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.7. Pada periode tahun 2017-2020 hanya 3 (tiga) BUMD yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk deviden (pembagian atas laba yang dibagi) dan telah disetorkan sebagai PAD. Selama periode tersebut Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD . Secara umum kontribusi BUMD pada periode tahun 2016-2020, mengalami pertumbuhan pembagian laba rerata sebesar 4,85%.

Adapun kinerja dari PT BPD DIY dan tiga BUMD Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. PT. BPD DIY

PT Bank BPD DIY adalan bank umum yang kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dan 4 (empat) Kabupaten se DIY dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 dan dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan setoran modal sebesar Rp.98.200.000.000,00, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Keptusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017 telah disepakati untuk meningkatkan modal PT Bank BPD DIY. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.392.800.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan memperluas kelembagaan, memperluas ruang gerak bank dalam

melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Perumda Aneka Dharma

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Daerah ini bergerak di bidang perdagangan umum, pelayanan jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan dan pariwisata. Perumda Aneka Dharma dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 berubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.9.015.063.051,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp10.984.936.949,00 dan diharapkan kekurangan tersebut dapat segera terpenuhi untuk pengembangan Perumda Aneka Dharma. Sampai dengan saat ini, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala hal ini dapat terlihat masih rendahnya laba yang diperoleh bahkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kerugian sehingga Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya penyehatan dan pengembangan Perumda Aneka Dharma baik dari Perumda Aneka Dharma maupun dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Aneka Dharma melalui penyertaan modal dengan tujuan untuk melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut tahun 2021 Perumda Aneka Dharma menyusun Rencana Bisnis Aneka Dharma Tahun 2022 – 2026 yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan operasionalisasi Perumda Aneka Dharma pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Di dalam rencana bisnis tersebut tertuang perencanaan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis inti yang saat ini digeluti dan berusaha mengembangkan bidang usaha baru yang lebih prospektif. Sampai saat ini beberapa progress perbaikan mulai dari sisi organisasi, pelaporan keuangan, Sumber Daya Manusia, operasional, sarana dan prasarana sudah dilakukan untuk memperbaiki citra dan kinerja Perumda Aneka Dharma.

Saat ini Perumda Aneka Dharma lebih fokus pada kegiatan kegiatan usaha inti, dalam hal ini usaha percetakan dan fotokopi. Perbaikan dan pengembangan melalui pembelian mesin dan peralatan baru perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayaanan sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu juga mengembangkan bidang usaha baru yang prospektif sehingga meningkatkan citra dan kinerja perusahaan. Perbaikan dan pengembangan bidang usaha inti dan bidang usaha baru dilakukan melalui penyusunan rencana bisnis yang baik melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Analisis internal mempertimbangkan kondisi Teknis dan Non Teknis, sedangkan analisis eksternal menggunakan analisis PEST (*Political, Economic, Social, Technological*). Adapun pengembangan usaha yang dilakukan diantaranya:

1. Pendirian Apotek Dharma Bhakti Farma untuk mendukung PPBMP
2. Peternakan Kambing dan/atau domba
3. Pengembangan usaha Digital Printing Indoor Dharma Cetak
4. Perdagangan air kemasan Banew Dharma Tirta (distribrutor).

c. Perumda Air Minum Tirta Projotamansari

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 dan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp40.450.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp59.550.000.000,00. Penyertaan Modal yang selama ini diterima oleh Perumda Air Minum Tirta Projotamansari adalah untuk penyambungan saluran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana nantinya akan diganti oleh Pemerintah. Hal ini tentunya masih belum mencukupi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang masih belum memadai utamanya untuk pembangunan kantor pusat sebagai salah satu upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu tambahan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirto Projotamansari.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menambah cakupan pelayanan agar kebutuhan air minum masyarakat terpenuhi maka Perumda Air Minum Tirta Projotamansari mempunyai rencana pengembangan usaha:

1. Pemanfaatan Air SPAM Regional
2. Memaksimalkan kapasitas produksi
3. Menambah kapasitas Instalansi Pengolahan Air (IPA)
4. Rencana Pengamanan Air Minum dan memastikan keakuratan Water Meter Pelanggan
5. Peremajaan pipa pada jaringan pipa tua
6. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW/Non Revenue Water)

7. Pembuatan Zona Air Minum Prima dilingkungan kantor pusat PDAM Bantul
8. Peningkatan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Banew”
9. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
10. Peningkatan SDM yang profesional
11. Peningkatan perfoma perusahaan.

d. PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)

Bank Bantul merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bentuk badan hukum Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Bank Bantul dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Adapun modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp79.029.999.525,00 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.970.000.475,00. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pembagian laba dibagi 55% untuk PAD. Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Bantul sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan untuk memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pengembangan PT BPR Bank Bantul :

1. Pengembangan dan peningkatan layanan dan akses pasar bisnis
2. Mengembangkan produk kredit yang kompetitif
3. Pengadaan dan pengembangan tehnologi informasi
4. Memperkuat kelembagaan dan permodalan.
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dan profesional

3.1.4. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp3,03 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 3,48 triliun pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan.

Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	**296.308.785.282**	**247.225.967.225**	**279.201.069.180**	**234.221.742.887**	**238.201.393.766**	**-4,51%**
Kas Di Kas Daerah	221.268.668.754	229.851.336.933	262.466.433.454	209.212.057.577	200.803.065.465	**-1,56%**
Kas Di Bendahara Pengeluaran	74.654.448	833.005.672	895.288.887	517.382.679	577.835.200	**248,19%**
Kas Di Bendahara Penerimaan	460.910.384	713.824.537	202.892.821	144.893.486	114.418.736	**-16,58%**
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	30.269.625.120	13.541.504.539	13.932.533.084	18.688.863.886	29.197.443.270	**9,50%**
Kas di Pengelola Dana Bergulir	43.932.000	4.710.000				**-94,64%**
Kas di Bendahara BOS	17.353.282.450	2.281.585.544	1.703.920.935	5.658.545.258	7.508.631.095	**38,15%**
Kas di Bendahara Blockgrant	26.837.712.126	-			-	
Kas di KPU dan Panwas	-	-			-	
Piutang	**49.605.707.271**	**64.302.519.439**	**66.825.617.211**	**79.054.966.424**	**63.139.859.320**	**7,93%**
Piutang Pajak	85.821.335.423	97.093.170.135	106.385.740.777	120.990.006.411	130.486.662.479	**11,07%**
Penyisihan Piutang Pajak	(49.426.187.389)	(58.055.308.123)	(65.663.925.171)	(73.764.443.405)	(83.337.103.485)	**13,97%**
Piutang Pajak Neto	36.395.148.035	39.037.862.013	40.721.815.606	47.225.563.006	47.149.558.994	**6,85%**
Piutang Retribusi	2.087.948.332	2.336.181.964	1.162.781.234	965.762.321	1.229.028.167	**-7,01%**
Penyisihan Piutang Retribusi	(50.500.464)	(54.447.542)	(55.663.242)	(81.290.252)	(68.504.614)	**10,09%**
Piutang Retribusi Netto	2.037.447.868	2.281.734.422	1.107.117.992	884.472.069	1.160.523.553	**-7,10%**
Piutang Lain-lain PAD	35.055.495.307	50.808.323.947	56.653.223.726	66.623.914.285	55.014.174.115	**14,15%**
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	(23.882.383.938)	(27.825.400.943)	(31.656.540.112)	(35.678.982.936)	(40.184.397.341)	**13,90%**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Piutang Lain-lain PAD Netto	11.173.111.368	22.982.923.004	24.996.683.613	30.944.931.349	14.829.776.774	**21,54%**
Belanja Dibayar Dimuka	**969.489.397**	**375.616.706**	**1.286.866.565**	**1.155.845.948**	**1.353.626.879**	**47,07%**
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	**46.302.100**	**23.125.600**	**4.989.600**	-	-	-64,24%
Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	**14.204.551.854**	**14.776.862.986**	**13.340.761.956**	**13.043.382.057**	**12.713.282.011**	**-2,61%**
Penyisihan Piutang Lainnya	(8.793.485.753)	(9.264.018.934)	(9.673.315.403)	(9.961.494.004)	(10.177.475.432)	**3,73%**
Piutang Lainnya Netto	5.411.066.101	5.512.844.052	3.667.446.553	3.081.888.053	2.535.806.579	**-16,32%**
Piutang Lain-lain	**1.420.076.050**	**2.699.133.341**	-	**4.565.313.667**	**5.230.278.485,00**	**52,32%**
Persediaan	**48.774.707.770**	**49.634.079.007**	**30.712.021.915**	**53.729.871.567**	**62.671.691.153**	**13,81%**
Jumlah Aset Lancar	**402.536.133.971**	**369.773.285.370**	**381.698.011.024**	**375.809.628.546**	**373.132.656.182**	**-1,79%**
Investasi Jangka Panjang						
Investasi Nonpermanen						
Pinjaman Jangka Panjang						
Investasi dalam SUN						
Investasi Nonpermanen lainnya						
Jumlah Investasi nonpermanen						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	117.590.549.808	129.528.808.610	141.614.648.648	192.310.420.018	201.398.147.561	**15,00%**
Investasi Permanen Lainnya	111.561.713.151	119.040.767.501	148.337.286.340	157.901.380.798	159.601.719.394	**9,71%**
Jumlah Investasi permanen	**229.152.262.959**	**248.569.576.111**	**289.951.934.988**	**350.211.800.816**	**360.999.866.955**	**12,25%**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**229.152.262.959**	**248.569.576.111**	**289.951.934.988**	**350.211.800.816**	**360.999.866.955**	**12,25%**
Aset Tetap						
Tanah	535.067.314.152	517.919.614.242	517.793.609.992	518.697.554.092	528.259.669.252	**-0,30%**
Peralatan dan Mesin	514.461.731.544	561.102.664.151	697.431.861.950	795.637.620.716	857.132.572.730	**13,79%**
Gedung dan Bangunan	1.261.647.454.205	1.194.597.731.232	1.249.672.267.650	1.322.393.411.270	1.347.477.527.788	**1,75%**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.821.460.231.355	1.973.041.023.200	2.107.565.021.860	2.279.618.395.259	2.418.835.722.267	**7,35%**
Aset Tetap Lainnya	73.057.689.969	65.734.074.972	72.473.448.275	76.633.860.414	74.559.439.255	**0,82%**
Konstruksi dalam Pengerjaan	644.050.000	-	-	-	-	
Akumulasi Penyusutan	(1.824.330.894.619)	(1.895.906.957.058)	(2.068.002.225.876)	(2.284.957.635.304)	(2.489.343.832.342)	**8,11%**
Jumlah Aset Tetap	**2.382.007.576.606**	**2.416.488.150.739**	**2.576.933.983.851**	**2.708.023.206.447**	**2.736.921.098.950**	**3,56%**
Dana Cadangan						
Dana Cadangan						
Jumlah Dana Cadangan						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Aset Lainnya						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tagihan Jangka Panjang	764.419.414	742.769.414	15.311.414	15.311.414	15.311.414	**-25,19%**
TGR						
Aset Tak berwujud	17.412.173.338	19.945.487.938	18.926.953.566	28.169.681.590	24.725.518.327	**11,51%**
Aset Lain-lain	6.350.410.718	-	-			
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	238.727.239	229.284.603	238.882.149	795.205.530	1.501.519.876	**80,48%**
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(7.914.273.215)	(10.110.558.975)	(12.744.973.240)	(16.605.092.564)	(14.783.929.410)	**18,28%**
Jumlah Aset Lainnya	**16.851.457.495**	**10.806.982.981**	**6.436.173.889**	**12.375.105.970**	**11.458.420.208**	**2,14%**
JUMLAH ASET	**3.030.547.431.031**	**3.045.637.995.200**	**3.255.020.103.753**	**3.446.419.741.778**	**3.482.512.042.295**	**3,58%**
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.161.600	-	42.820.164	29.213.107	-	**-65,89%**
Utang Bunga	-	-	-			
Bagian Lancar Utang Jangka panjang	-	-	-			
Pendapatan Diterima Dimuka	54.070.543	211.677.622	2.358.808.158	2.097.987.840	1.920.229.253	**321,57%**
Utang Belanja	8.987.426.141	13.717.202.977	30.589.186.848	35.202.753.758	36.850.544.830	**48,85%**
Utang Jangka Pendek	-	-	-			

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**9.042.658.284**	**13.928.880.599**	**32.990.815.170**	**37.329.954.705**	**38.770.774.084**	**51,97%**
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan						
Utang Dalam Negeri-Obligasi						
Premium (diskonto) obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-			
JUMLAH KEWAJIBAN	**9.042.658.284**	**13.928.880.599**	**32.990.815.170**	**37.329.954.705**	**38.770.774.084**	**51,97%**
EKUITAS						
Ekuitas	**3.021.504.772.747**	**3.031.709.114.602**	**3.222.029.288.583**	**3.409.089.787.073**	**3.443.741.268.211**	**3,36%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.030.547.431.031**	**3.045.637.995.200**	**3.255.020.103.753**	**3.446.419.741.788**	**3.482.512.042.295**	**3,58%**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	402.536,00	369.773,00	381.698,00	375.809,00	373.133,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Lancar	44,52	26,55	11,57	10,07	9,62
	Aset Lancar Persediaan	353.761,00	320.139,00	350.986,00	322.080,00	310.461,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Cepat	39,12	22,98	10,64	8,63	8,01
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Aset	3.030.547,00	3.045.638,00	3.255.020,00	3.446.420,00	3.482.512,00
	Rasio Total Hutang (%)	0,30%	0,46%	1,01%	1,08%	1,11%
	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Ekuitas	3.021.505,00	3.031.709,00	3.222.029,00	3.409.090,00	3.443.741,00
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,30%	0,46%	1,02%	1,10%	1,13%
	Pendapatan Daerah	2.000.334,00	2.086.879,00	2.227.752,00	2.269.539,00	2.210.246,00

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Aktivitas	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	36.482,00	39.876,00	41.574,00	44.969,00	48.210,00
	Rata-rata Umur Piutang	6,66	6,97	6,81	7,23	7,96

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, iolah

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 semakin menurun, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo semakin turun. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak

kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin Kecil rasio ini berarti semakin Kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 1,09% artinya sebesar Rp1,09 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rerata umur piutang dan rerata umur persedian. Rasio rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Rumus perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Dari data tabel 3.10 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 8 hari pada tahun 2020. Melihat Analisis Rasio Neraca Daerah maka perlu pencermatan dan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan piutang upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya :

- Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan penerbitan surat tagihan pajak daerah atas piutang pajak yang masih menunggak untuk ketetapan pajak tahun 2013 - 2020;
- Pelaksanaan pelayanan pembayaran melalui mobil keliling untuk mengurangi pembayaran kolektif melalui dukuh;
- Penyusunan perbikan pada kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- Perbaikan pada penatausahaan piutang pajak daerah;
- Pelaksanaan sunset policy untuk memutus mata rantai tunggakan PBB dari Tanah Kas Desa.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul cukup tinggi yang mencapai rerata sebesar 89,42% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja langsung yang mencapai rerata sebesar 89,50%, sedangkan belanja tidak langsung mencapai rerata sebesar 89,75%.

Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
Belanja Tidak Langsung	84,54%	86,85%	91,52%	93,96%	91,88%	89,75%
Belanja Pegawai	84,27%	87,20%	93,40%	95,12%	92,47%	90,49%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%		9,83%		3,28%
Belanja Hibah	91,72%	90,60%	78,41%	86,49%	96,38%	88,72%
Belanja Bantuan Sosial	58,57%	42,30%	86,11%	76,49%	26,80%	58,05%
Belanja Bagi Hasil kepada Pem.Prop, Pemda dan Pem. bawahan	98,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pem.Prop,Pemda dan Pem.bawahan	94,84%	96,10%	99,47%	97,80%	99,53%	97,55%
Belanja Tidak Terduga	2,19%	6,18%	1,23%	7,87%	71,15%	17,72%
Belanja Langsung	87,16%	91,97%	87,18%	88,41%	92,80%	89,50%
Belanja Pegawai	87,92%	95,10%	94,29%	94,99%	97,34%	93,93%
Belanja Barang dan Jasa	87,58%	91,03%	90,61%	95,17%	92,01%	91,28%
Belanja Modal	86,44%	92,89%	80,19%	76,15%	92,44%	85,62%
Total Jumlah Belanja	85,50%	89,10%	89,42%	91,20%	91,88%	89,42%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada

berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul, 2016-2020

No.	Tahun	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2016	1.131.440.506.084	2.041.295.978.974	55,43%
2.	2017	968.394.279.891	2.101.106.963.062	46,09%
3.	2018	981.014.504.512	2.205.224.260.352	44,49%
4	2019	1.042.226.986.512	2.332.476.537.902	44,68%
5	2020	913.904.940.061	2.210.723.452.965	41,34%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan terdapat penurunan belanja aparatur tahun 2016-2020, namun terjadi peningkatan pada tahun 2019 karena ada kenaikan belanja antaa lain belanja gaji dan tunjangan, belanja makanan dan minumam pegawai tertentu dan belanja modal. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.037.520.841.483**	**825.306.291.768**	**826.974.448.856**	**838.871.806.847**	**799.455.130.819**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	714.667.286.650	663.489.993.481	728.708.331.992	736.474.607.351	694.559.843.827
2	Belanja Tambahan Penghasilan	308.820.477.912	148.260.815.093	79.000.640.426	78.600.404.750	81.681.945.062
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.001.999.949	5.941.836.000	11.439.120.000	13.866.000.000	14.463.480.000
4	Belanja pemungutan Pajak dan retribusi Daerah (insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah)	5.015.538.486	6.410.647.194	7.826.356.438	9.930.794.746	8.749.861.930
5	Tunjangan Uang Makan	5.015.538.486	1.203.000.000			
B	**Belanja Langsung**	**93.919.664.601**	**143.087.988.123**	**154.040.055.656**	**202.355.179.665**	**114.439.681.242**
1	Belanja Honorarium PNS	5.153.557.350	5.315.219.200	7.190.335.700	6.613.266.900	5.698.408.600
2	Belanja Uang Lembur	158.364.250	105.595.003	94.741.201	112.645.000	45.526.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	213.500.000	420.000.000	103.500.000	49.750.000	34.500.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.275.132.200	2.320.355.900	3.390.889.800	8.124.762.500	1.665.801.383
5	Belanja Premi Asuransi	14.859.650	6.567.897.370	10.847.352.364	20.755.630.871	21.291.371.178
6	Belanja makanan dan minuman pegawai tertentu	23.450.786.561	29.167.294.676	38.769.767.741	51.664.012.196	33.617.686.430
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	295.939.899	4.371.452.625	404.910.100	523.689.500	538.887.000
8	Belanja Pakaian Kerja	1.079.931.264	1.503.899.200	1.452.509.451	1.717.830.941	834.556.535
9	Belanja perjalanan dinas	27.795.508.307	35.352.013.236	37.088.865.955	32.100.809.618	11.728.590.921
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dan lain lainl)	32.482.085.120	57.964.260.913	54.697.183.344	80.692.782.139	38.994.481.195
	Total Belanja Aparatur	**1.131.440.506.084**	**968.394.279.891**	**981.014.504.512**	**1.042.226.986.512**	**913.904.940.061**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Belanja wajib ini digunakan untuk urusan wajib dan mengikat terkait kelangsungan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan kebutuhan.

Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	2018 (Rp.juta)	2019 (Rp.juta)	2020 (Rp.juta)
I.	**BELANJA**	**1,277,096**	**1,151,575**	**1,170,066**	**1,215,009**	**1,129,996**
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,247,923**	**1,108,512**	**1,116,398**	**1,147,678**	**1,037,680**
1	Gaji Dan Tunjangan	714,667	663,490	728,708	737,475	694,560
2	Tambahan Penghasilan PNS	308,820	148,261	79,001	78,600	81,682
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,002	5,942	11,440	13,866	14,463
4	Belanja Hibah	31,862	66,409	44,796	59,646	84,738
5	Belanja Bantuan Sosial	3,267	1,650	7,852	6,920	759
6	Belanja Bantuan Keuangan	185,305	222,760	244,601	251,171	161,478
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**29,173**	**43,063**	**53,668**	**67,331**	**92,316**
1	Belanja Jasa Kantor	28,944	36,075	42,717	46,525	70,989
2	Belanja Premi Asuransi	15	6,568	10,847	20,756	21,292
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	214	420	104	50	35
II.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**16,045**	**17,150**	**31,500**	**34,300**	**8,000**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16,045	17,150	31,500	34,300	8,000
2	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
JUMLAH (I + II)		**1,293,141**	**1,168,725**	**1,201,566**	**1,249,309**	**1,137,996**
Jumlah Total Belanja		**2,016,544**	**2,076,742**	**2,165,652**	**2,283,585**	**2,094,142**
Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Terhadap Total Belanja		**64.13%**	**56.28%**	**55.48%**	**54.71%**	**54.34%**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel di atas Periode tahun 2017-2020 terdapat kecenderungan menurun dan mencapai 54,34% pada tahun 2020.

Mencermati rincian belanja, pada tahun 2017 dan 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada belanja hibah karena adanya kenaikan Belanja Operasional Pendidikan (BOP), dan premi asuransi karena adanya kebijakan terkait pemberian jaminan kesehatan, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan *refocusing* anggaran diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19

3.2.2. Analisis Pembiayan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.000.335	2.086.879	2.227.753	2.269.539	2.210.246
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.752	24.365	39.573	48.892	11,599
	Surplus/Defisit Riil	**(40.962)**	**(14.228)**	**22.527**	**(62,938)**	**(477)**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	283,026	254,842	247,145	279,158	234,048
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,342	-	-	2,974	713
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	7,000	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	8,711	6,613	9,486	7,853	3,918
	Jumlah penerimaan daerah	293,078	261,454	256,630	296,985	238,678

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapaiya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan dalam rangka investasi daerah, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	283,026		254,842		247,145		279,158		234,048	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	54,827	19.37%	31,213	12.25%	36,137	14.62%	30,108	10.79%	26.678	11,40%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-12,367	-4.37%	-135,427	-53.14%	-51,893	-21.00%	-21,898	-7.84%	-	
4	Pelampauan Penerimaan lan-lain Pendapatan Daerah yg sah	-5,296	-1.87%	11,962	4.69%	7,562	3.06%	13,036	4.67%	-	
5	Sisa Penghematan Belanja	245,955	86.90%	342,024	134.21%	253,954	102.76%	256,355	91.83%	207.370	88,60%
6	Kewajiban kepada Pihak III yang belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	
8	Koreksi SiLPA	-	-	2.725	1,07%	(18)	-0,03%	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

SiLPA yang tinggi menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan belanja daerah yang meningkat cukup signifikan tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga menyebabkan SiLPA yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ada empat hal yang menyebabkan terjadinya SiLPA yaitu :

1. Pelampauan Target Pendapatan

   SiLPA terjadi karena adanya pelampauan target dari pendapatan, bila pelampauan PAD maka dapat memperbesar ruang fiskal dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah tetapi apabila sebaliknya maka justru mengindikasikan penurunan dalam kemandirian daerah.

2. Efisiensi Belanja

   SiLPA di Kabupaten Bantul juga terjadi karena adanya efisiensi belanja program kegiatan sehingga terjadi penghematan belanja dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas lainnya.

3. Target belanja tidak tercapai

   SiLPA karena tidak terpenuhinya target belanja akan menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya dan hal tersebut menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, antara lain karena tata kelola keuangan yang tidak tertib seperti lemahnya perencanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan lambatnya penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga.

3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19)

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dampak Pandemi tersebut mengharuskan Pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelamatan baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 diantaranya adalah untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dana dan penggunaan APBD yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada triwulan II Tahun 2020 Pemerintah Bantul mulai melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja.

3.2.3.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2,31 trilyun, karena ada pandemi maka target tersebut dikoresi pada perubahan APBD 2020 menjadi Rp2,08 trilyun atau turun sebesar 10,05%. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada hampir semua komponen pendapatan. Namun demikian masih ada

beberapa pendapatan yang mengalami kenaikan yaitu sumber pendapatan dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 4,21%; Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak naik sebesar 8,60% peningkatan ini berasal dari komponen pajak penghasilan; dan pendapatan hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 33,33% dimana kenaikan tersebut berasal dari Hibah kepada PDAM.

abel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PENDAPATAN DAERAH	**2.313.851.073.116,50**	**2.081.194.441.954,19**	**(232.656.631.162)**	**-10,05%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**469.798.331.294,00**	**420.780.615.321,87**	**(49.017.715.972)**	**-10,43%**
Pajak Daerah	195.000.000.000,00	175.265.482.000,00	(19.734.518.000)	-10,12%
Retribusi Daerah	46.832.583.434,00	24.354.322.386,00	(22.478.261.048)	-48,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	23.707.166.955,00	24.704.142.455,07	996.975.500	4,21%
Lain-lain PAD Yang Sah	204.258.580.905,00	196.456.668.480,80	(7.801.912.424)	-3,82%
DANA PERIMBANGAN	**1.393.629.940.890,50**	**1.279.745.464.554,00**	**(113.884.476.337)**	**-8,17%**
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	28.634.067.890,50	31.097.246.000,00	2.463.178.110	8,60%
Dana Alokasi Umum	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00	(93.874.919.000)	-9,15%
Dana Alokasi Khusus	339.124.949.000,00	316.652.213.554,00	(22.472.735.446)	-6,63%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**450.422.800.932,00**	**380.668.362.078,32**	**(69.754.438.854)**	**-15,49%**
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000	33,33%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.733.524.432,00	152.621.840.588,32	(15.111.683.844)	-9,01%
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	192.493.982.000,00	191.989.028.000,00	(504.954.000)	-0,26%
- Dana Insentif Daerah	86.277.987.000,00	86.583.558.000,00	305.571.000	0,35%
- Dana Desa	106.215.995.000,00	105.405.470.000,00	(810.525.000)	-0,76%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.695.294.500,00	30.057.493.490,00	(55.637.801.010)	-64,93%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.3.2. Belanja Daerah

Dengan penurunan target pendapatan daerah pada APBD 2020 maka belanja daerah pada perubahan APBD juga mengalami

penurunan sebesar 3,70%. Penurunan belanja tersebut terjadi pada semua mata anggaran belanja daerah, kecuali belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dan pegawai serta belanja barang dan jasa pada belanja langsung.

Belanja Tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 797,81%, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan dan penataan ulang dengan memperhatikan kebijakan dan instruksi pemerintah pusat yang ditekankan pada penanganan dampak pandemi Covid19 yang meliputi aspek kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial.

Tabel.3.19 Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
BELANJA DAERAH	**2.474.907.091.918,14**	**2.383.458.652.405,17**	**(91.448.439.512,97)**	**-3,70%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.334.474.653.321,04**	**1.389.050.261.074,07**	**54.575.607.753**	**4,09%**
Belanja Pegawai	917.865.137.233,00	864.539.520.207,34	(53.325.617.026)	-5,81%
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	90.916.212.000,00	87.919.851.200,00	(2.996.360.800)	-3,30%
Belanja Bantuan Sosial	6.810.000.000,00	2.835.000.000,00	(3.975.000.000)	-58,37%
Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40	-	0,00%
Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	280.110.271.960,00	268.118.528.110,00	(11.991.743.850)	-4,28%
Belanja Tidak Terduga	15.901.514.534,64	142.765.843.963,33	126.864.329.429	797,81%
BELANJA LANGSUNG	**1.140.432.438.597,10**	**994.408.391.331,10**	**(146.024.047.266)**	**-12,80%**
Belanja Pegawai	121.493.996.828,00	129.562.208.540,00	8.068.211.712	6,64%
Belanja Barang dan Jasa	625.601.960.111,10	630.734.900.915,10	5.132.940.804	0,82%
Belanja Modal	393.336.481.658,00	234.111.281.876,00	(159.225.199.782)	-40,48%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan didominasi dari

SilPA yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi kegiatan tahun 2020. SilPA mengalami kenaikan sebesar 41,37% dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada sisi penerimaan penerimaan pinjaman daerah pada perubahan APBD 2020 diperhitungkan dalam rangka untuk biaya operasional RSUD dikarenakan klaim dari BPJS sering mengalami keterlambatan namun pelaksanaan pinjaman sampai akhir 2020 tidak direalisasikan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 138,70%. Pengeluran pembiayaan didominasi dari penyertaan modal yang mengalami kenaikan sebesar 77,76% karena adanya tambahan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang semula sebesar Rp4.5 milyar menjadi Rp6 milyar.

Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**176.556.833.064,26**	**263.047.636.293,60**	**86.490.803.229**	**48,99%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	165.556.833.064,26	234.047.636.293,60	68.490.803.229	41,37%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PENGELURAAN PEMBIAYAAN	**15.500.814.262,62**	**37.000.814.262,62**	**21.500.000.000**	**138,70%**
Penyertaan Modal	4.500.814.262,62	8.000.814.262,62	3.500.000.000	77,76%
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	161.056.018.801,64	**226.046.822.030,98**	**64.990.803.229,34**	40,35%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 dihitung hingga tahun 2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Bantul tahun 2007-2020. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal DIY maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

3. 3. 1. 1 **Pendapatan Daerah**

a. Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan sebesar 3,42% pertahun. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi pajak maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 akan memproses perubahan peraturan daerah terkait dengan pajak daerah. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
   1) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
   2) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
   3) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   4) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
   5) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
   6) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
   7) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
   8) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
   9) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak; dan
   10) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.

b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru.
c. Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
d. Dengan sudah disusunnya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul sementara pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbatas maka diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya dengan cara menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta swasta melalui CSR, kemitraan, kerjasama, KPBU, filantropi dan sebagainya.

3. 3. 1. 2 **Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada:

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

1. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan
6. Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
8. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);

9. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
10. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
11. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:

1) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial. Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. 3. 1. 3 **Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan:

1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	**2.121.698.479.000**	**2.025.812.431.000**	**2.272.219.790.000**	**2.213.997.734.000**	**2.246.435.909.000**	**2.306.150.935.000**	**1,84%**
4,01	**Pendapatan Asli Daerah**	**495.767.307.000**	**493.854.008.000**	**520.280.302.000**	**535.634.373.000**	**551.833.901.000**	**585.897.304.000**	**3,42%**
04,01,01	Hasil Pajak Daerah	221.912.299.000,00	221.979.000.000	246.313.246.000	259.002.532.000	272.352.367.000	303.021.040.000	**6,51%**
04,01,02	Hasil Retribusi Daerah	39.446.673.000,00	39.631.673.000	40.645.490.000	41.653.992.000	42.681.385.000	43.734.117.000	**2,09%**
04,01,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.167.000,00	23.707.167.000	24.271.398.000	25.727.681.000	27.399.981.000	29.591.979.000	**4,58%**
04,01,04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.701.168.000,00	208.536.168.000	209.050.168.000	209.250.168.000	209.400.168.000	209.550.168.000	**-0,11%**
4,02	**Pendapatan Transfer**	**1.619.931.172.000**	**1.531.958.423.000**	**1.751.939.488.000**	**1.678.363.361.000**	**1.694.602.008.000**	**1.720.253.631.000**	**1,44%**
04,02,01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.343.338.184.000**	**1.343.338.184.000**	**1.377.511.321.000**	**1.402.550.118.000**	**1.425.711.264.000**	**1.451.851.970.000**	**1,57%**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.153.018.000,00	29.153.018.000	30.610.669.000	32.141.202.000	33.748.262.000	35.435.675.000	**4,00%**
	Dana Alokasi Umum	941.315.965.000,00	941.315.965.000	959.200.968.000	978.384.988.000	995.506.725.000	1.015.416.859.000	**1,53%**
	Dana Alokasi Khusus	233.146.510.000,00	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000	**1,46%**
	DID	**30.323.619.000,00**	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	
	Dana Desa	**109.399.072.000,00**	109.399.072.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	**1,94%**
04,02,02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**276.592.988.000**	**188.620.239.000**	**374.428.167.000**	**275.813.243.000**	**268.890.744.000**	**268.401.661.000**	**7,53%**
	Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	152.713.899.000,00	158.913.899.000	166.065.025.000	173.537.951.000	181.347.159.000	189.507.781.000	**4,41%**
	Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya	123.879.089.000,00	29.706.340.000	208.363.142.000	102.275.292.000	87.543.585.000	78.893.880.000	**90,04%**
4,03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**6.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
04,03,01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000						
5	**BELANJA DAERAH**	**2.267.724.883.000**	**2.141.090.935.000**	**2.393.621.289.000**	**2.335.645.090.000**	**2.369.372.795.000**	**2.433.607.603.000**	**1,59%**
5,01	**Belanja Operasi**	**1.713.809.666.000**	**1.664.248.301.000**	**1.748.842.898.000**	**1.788.661.823.000**	**1.825.402.113.000**	**1.874.727.528.000**	**1,84%**
05,01,01	Belanja Pegawai	951.471.887.000	976.142.986.000	992.330.204.000	1.009.871.614.000	1.027.786.933.000	1.046.916.030.000	**1,93%**

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05,01,02	Belanja Barang dan Jasa	634.395.529.000	626.235.407.000	693.173.694.000	706.280.209.000	734.916.180.000	764.904.498.000	**3,89%**
05,01,05	Belanja Hibah	122.107.250.000	55.601.908.000	57.339.000.000	66.510.000.000	56.699.000.000	56.907.000.000	**-9,95%**
05,01,06	Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000	6.268.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	**0,63%**
5,02	**Belanja Modal**	**242.068.319.000,00**	**135.929.147.000**	**295.684.951.000**	**194.601.647.000**	**188.439.165.000**	**198.185.404.000**	**8,30%**
5,03	**Belanja Tidak Terduga**	34.055.411.000,00	**22.686.428.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**-9,05%**
5,04	**Belanja Transfer**	**277.791.487.000**	**318.227.059.000**	**329.093.440.000**	**332.381.620.000**	**335.531.517.000**	**340.694.671.000**	**4,29%**
05,04,01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.000,00	26.103.398.000	28.695.874.000	30.065.652.000	31.503.375.000	34.675.516.000	**5,91%**
05,04,02	Belanja Bantuan Keuangan	251.688.089.000,00	292.123.661.000	300.397.566.000	302.315.968.000	304.028.142.000	306.019.155.000	**4,15%**
Surplus (Defisit)		**146.026.404.000**	**115.278.503.000**	**121.401.499.000**	**121.647.356.000**	**122.936.886.000**	**127.456.668.000**	**-2,16%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6,01	**Penerimaan Pembiayaan**	**182.026.404.000**	**151.278.503.000**	**158.401.499.000**	**158.647.356.000**	**159.936.886.000**	**164.456.668.000**	**-1,68%**
06,01,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000	**-1,90%**
06,01,02	Penerimaan Piutang Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	**1,82%**
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
6,02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**36.000.000.000**	**36.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**	**0,56%**
06,02,01	Penyertaan Modal	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	**0,00%**
06,02,02	Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	**1,82%**
			-					
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	**146.026.404.000**	**115.278.503.000**	**121.401.499.000**	**121.647.356.000**	**122.936.886.000**	**127.456.668.000**	**-2,16%**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pendapatan daerah diperkirakan rerata tumbuh sebesar 1,84% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai sebesar Rp.2,12 triliun. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, diasumsikan pandemi Covid sudah dapat diatasi, total pendapatan daerah diperkirakan kembali tumbuh mencapai sebesar Rp.2,03 triliun dan meningkat menjadi Rp.2,31 triliun pada tahun 2026.

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 1,59%. Pada tahun 2021, belanja daerah dalam APBD mencapai nilai nominal sebesar Rp.2,27 triliun yang kemudian diperkirakan menjadi sebesar Rp.2,14 triliun pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp.2,43 triliun pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rerata pertahun sebesar 1,81%. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami peningkatan rerata sebesar 8,30% pertahun

Selanjutnya berdasarkan perimbangan pendapatan dan belanja daerah maka dapat ditemukan selisih defisit APBD Kabupaten Bantul yang akan ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2021-2026, SiLPA diperkirakan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dari sebesar Rp. 171,03 milyar pada tahun 2021 dan tahun 2026 mencapai sebesar Rp.152,46 milyar.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu peningkatan modal BUMD melalui penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyertaan Modal pada BUMD di proyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026

BUMD	PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Rp.JUTA)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PT. BPD DIY	15.000	13.200	13.200	13.200	12.230	15.200
PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.970	2.000
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PERUMDA ANEKA DHARMA		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
JUMLAH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3. 3. 1. 4 Penjelasan Proyeksi masing-masing Pos Pendapatan dan Belanja Daerah

Metode yang digunakan dalam memproyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah terdiri dari expert judgement dan teknik forecasting trend linear. Gambaran proyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Proyeksi Pajak Daerah tahun 2021-2026, berdasarkan penilaian kecenderungan data realisasi berbagai jenis pajak daerah selama periode 10 tahun terakhir, maka secara keseluruhan pos pajak

daerah mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,51% selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dari sebesar Rp.221,91 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.303,02 milyar pada tahun 2026. Pertumbuhan pajak daerah cukup signifikan, didasari oleh perkiraan akan terjadinya kondisi kenormalan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Perekonomian daerah Kabupaten Bantul akan tumbuh ditandai dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif, pariwisata dan usaha Kecil dan menengah yang selama ini telah banyak memberi kontribusi terhadap realisasi pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan seterusnya. Adapun proyeksi rincian pajak daerah tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Hotel diperkirakan pulih kembali pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 5%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,11 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos.
- Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadi 7 % pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026.
- Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya

pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan, adapun rerata pertumbuhan pajak hiburan sebesar 5,25% pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.876 Juta, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1,15 milyar pada tahun 2026. Prediksi pertumbuhan ini optimis dapat tercapai karena didukung pulihnya kegiatan pariwisata pada tahun 2023.

- Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah dan ditahun 2026 mencapai sekitar Rp.3,03 milyar. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu. Namun pendapatan pajak reklame dapat dioptimalkan dengan menempatkan reklame ditempat yang strategis selain lokasi yang ada pembatasan jumlah titik reklame.
- Pajak Penerangan Jalan mulai tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun sesuai dengan perkembangan data realisasi pada 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp.47,51 milyar dan terus meningkat sampai tahun 2026 mencapai sebesar Rp.57,74 milyar.
- Pajak Parkir diperkirakan mulai pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh mencapai 7%. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp.260 juta pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.337 juta pada tahun 2026.

- Pajak air bawah tanah diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 4,01% pertahun. Pada tahun 2021 mencapai kisaran Rp.781 juta kemudian meningkat menjadi Rp.949 juta pada tahun 2026. Hambatan dalam pengembangan sumber pendapatan dari pajak air bawah tanah ini adalah adanya potensi perusakan lingkungan hidup akibat terlalu dieksploitasi. Perlu dicarikan solusi agar pajak air bawah tanah tetap optimal dan lingkungan hidup tetap terpelihara.
- Pajak sarang burung walet setiap tahun hanya ditarget sebesar Rp2.000,000 karena potensi Kecil dan semakin hilang, selayaknya pos ini dipertimbangkan terkait dengan efisien pendapatan dan belanja sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat(4) yang mana menyebutkan bahwa apabila potensi jenis pajak kurang memadai dapat tidak dipungut.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.938 juta pada tahun 2026. Rerata pertumbuhan pajak mineral bukan logam sebesar 5% pertahun.
- Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5%, dengan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) setiap 3(tiga) tahun sekali. Pada tahun 2021 PBB P2 ditarget sebesar Rp.55,13 milyar dan meningkat sebesar Rp.55,68 milyar dan seterusnya menjadi Rp.87,52 milyar pada tahun 2026.
- BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5 % dikarenakan adanya efek kenaikan NJOP setiap 3(tiga) tahun sekali. Pajak ini ditarget sebesar Rp.93,71 milyar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp.92,78 milyar pada tahun 2022 dan seterusnya meningkat menjadi Rp.125,02 milyar pada tahun 2026.

Selanjutnya beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang antara lain:

- Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos.
- Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya.
- Pajak hiburan perlu didorong dengan meningkatkan atraksi seni dan budaya di Bantul seiring dengan pengembangan objek dan destinasi pariwisata.
- Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
- Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.
- Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan, namun demikian perlu ada kordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya.

Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.01	Pajak Hotel	4.034	4.115	4.236	4.448	4.670	4.903	Pajak Hotel diperkirakan baru awal masa pemulihan pada tahun 2022 dan mulai dengan tingkat pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan rerata pertahun sebesar 5% mulai tahun 2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,12 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos
01.02	Pajak Restoran	16.348	16.675	17.492	18.717	20.027	21.429	Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadai rerata pertahun mencapai sebesar 7%. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026
01.03	Pajak Hiburan	876	876	938	1.003	1.073	1.149	Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul.

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
								Cukup optimisnya pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan
01.04	Pajak Reklame	2.499	2.524	2.624	2.755	2.893	3.038	Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
01.05	Pajak Penerangan Jalan	47.506	47.506	49.882	52.376	54.995	57.744	Pajak ini diperkirakan tumbuh sebesar 5 % pertahun mulai tahun 2023.
01.06	Pajak Parkir	257	260	275	294	315	337	Pajak Parkir diperkirakan masuk awal pemulihan pada tahun 2022 Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 7 %.
01.07	Pajak Air Bawah Tanah	781	789	820	861	904	949	Pajak air bawah tanah ditargetkan sebesar Rp.781 juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan tumbuh sebesar 4,01% pertahun

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.08	Pajak Sarang Burung Walet	2	2	2	2	2	2	Potensi Kecil dan target yang dipatok tetap sebesar Rp2.000,000 pertahun
01.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	772	780	810	851	893	938	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5%.
01.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	55.125	55.676	66.150	69.458	72.930	87.516	Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5 % pertahun, dengan penyesuaian NJOP setiap 3 tahun.
01.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	93.713	92.776	103.084	108.238	113.650	125.015	BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5% dan terdapat efek kenaikan NJOP PBB setiap 3 tahun.
J U M L A H		221.912	221.979	246.313	259.003	272.352	303.021	Rerata Pertumbuhan 6,%1%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2. Proyeksi retribusi daerah tahun 2021-2026 akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% pertahun. Hal ini dihitung berdasarkan justifikasi pola data realisasi masing-masing pos retribusi daerah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, perolehan retribusi daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp.39,45 milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp.39,63 milyar pada tahun 2022, dan mencapai sebesar Rp.43,73 milyar pada tahun 2026. Lima pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta retribusi parkir.

Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
1	RETRIBUSI JASA UMUM	7.502.283.120	7.502.283.120	7.739.885.860	8.017.680.724	8.215.717.438	8.418.645.659	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.799.855.120	1.799.855.120	1.880.848.600	1.915.486.787	1.962.799.311	2.011.280.454	DLH Dinas perdagangan
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	330.750.000	330.750.000	345.633.750	361.187.269	370.108.595	379.250.277	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	3.173.092.000	3.173.092.000	3.215.881.140	3.365.095.791	3.448.213.657	3.533.384.534	Dinas perdagangann
	Retribusi PKB - Buku Uji	1.203.247.500	1.203.247.500	1.257.393.638	1.288.976.351	1.320.814.067	1.353.438.174	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	8.000.000	8.000.000	8.360.000	8.736.200	8.951.984	9.173.098	Dinas Kesehatan
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	535.500.000	535.500.000	559.597.500	584.779.388	599.223.439	614.024.258	Dinas KOMINFO
	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	21.602.500	21.602.500	22.574.613	23.590.470	24.173.155	24.770.232	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	224.400.000	224.400.000	234.498.000	245.050.410	251.103.155	257.305.403	DPPPKP
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000	112.200.000	117.249.000	122.525.205	125.551.578	128.652.702	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	93.636.000	93.636.000	97.849.620	102.252.853	104.778.498	107.366.527	Dinas Perdagangan
2	RETRIBUSI JASA USAHA	29.275.889.984	29.295.889.984	30.117.021.171	30.772.242.728	31.530.855.896	32.309.668.037	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.241.595.000	1.261.595.000	1.297.466.775	1.355.852.780	1.389.342.344	1.423.659.100	DPUPKP' DPPKP; Dinas Perhubungan; DLH

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	86.700.000	86.700.000	90.601.500	94.678.568	97.017.129	99.413.452	DPPKP
	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	122.173.000	122.173.000	127.670.785	133.415.970	136.711.344	140.088.115	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	192.710.000	192.710.000	201.381.950	210.444.138	215.642.108	220.968.468	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000	5.000.000	5.225.000	5.460.125	5.594.990	5.733.186	Bagian Umum
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.200.875.000	25.200.875.000	25.858.630.513	26.322.224.490	26.970.922.208	27.637.103.986	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.316.586.984	2.316.586.984	2.420.833.398	2.529.770.901	2.592.256.242	2.656.284.971	DPPKP
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.250.000	110.250.000	115.211.250	120.395.756	123.369.531	126.416.759	DPPKP
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2.668.500.000	2.668.500.000	2.788.582.500	2.864.068.713	2.934.811.210	3.005.803.778	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.205.000.000	2.205.000.000	2.304.225.000	2.357.915.125	2.416.155.629	2.474.337.404	DPUPKP
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	463.500.000	463.500.000	484.357.500	506.153.588	518.655.582	531.466.374	Dina Tenaga Kerja
JUMLAH		39.446.673.104	39.466.673.104	40.645.489.532	41.653.992.164	42.681.384.544	43.734.117.474	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3. Untuk proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan dengan metode forecasting trend linear. Selama periode tahun 2021-2026, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 4,58% pertahun, dari sebesar Rp.23,7 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.29,59 milyar pada tahun 2026. Peningkatan perolehan pendapatan daerah dari pos ini didasari oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan regional DIY yang akan berdampak pada semakin meningkatnya laba bersih sektor usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti BPD DIY dan PD BPR Bank Bantul, PD Aneka Dharma, PDAM dan BUKP.

4. Lain-lain PAD tidak dilakukan estimasi karena pos ini hanya bersifat insidentil menampung berbagai kemungkinan adanya dana pendapatan daerah. Beberapa pos yang dominan dari pendapatan ini berasal dari pendapatan BLUD, deposito, dana bergulir, denda, pengembalian kerugian dan beberapa pos lainnya. Berdasarkan angka realisasi yang ada diperkirakan sepanjang tahun 2021-2026, pendapatan dari lain-lain PAD lebih kurang sebesar Rp209,55 milyar pertahun.

5. Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata yang berkisar antara 4 - 5% pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Perkiraan dan justifikasi tersebut dilakukan karena forecasting yang dilakukan atas data realisasi tahun 2007-2019 menghasilkan model estimasi dan angka perkiraan yang fluktuatif.
Sesuai dengan meningkatnya iklim investasi yang makin kondusif di Kabupaten Bantul maka jumlah realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga akan terus meningkat, hal ini akan

berdampak pada meningkatnya pembayar pajak penghasilan pasal 21 di Kabupaten Bantul yang otomatis akan menjadi potensi Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2015-2020 terlihat adanya peningkatan jumlah investasi PMA dan PMDN serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja		
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah
1	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730
2	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760
3	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921
4	2019	106	103	209	17.146	11.834	28.980
5	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

6. Dana Alokasi Umum diestimasi dengan menggunakan justifikasi pertumbuhan realisasi beberapa tahun belakangan, hal ini dilakukan akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan. Selama periode tahun 2021-2026, DAU diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 1,53% pertahun yaitu berada pada kisaran tingkat pertumbuhan DAU periode 2014-2019. Pada tahun 2021, DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp.941.3 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1.015,4 milyar pada tahun 2026.

7. Dana Alokasi Khusus hanya diprediksi DAK Non Fisik saja terutama untuk DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tersebut mengalami pertumbuhan rerata 1,46% dengan asumsi adanya kenaikan gaji pokok. Sementara untuk alokasi DAK yang lain tidak dapat diprediksi hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, sebelum ada informasi dari Pemerintah maka tidak bisa mencantumkan prediksi dari Dana Alokasi Khusus tersebut.

8. Dana Insentif Daerah tidak dilakukan proyeksi karena pendapatan tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dan diasumsikan tetap selama periode 2021 - 2026.

9. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dengan menggunakan metode forecasting linear terhadap data Bagi Hasil Pajak Provinsi pada periode tahun 2007-2019. Dari hasil perhitungan ditemukan rerata pertumbuhan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 4,41% pertahun selama periode tahun 2021-2026.

10. Proyeksi belanja Operasi tahun 2021-2026 menggunakan metode forecasting linear dan justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,84%. Belanja operasi lebih di dominasi dari belanja pegawai yang mencapai 56% sampai 59% dari pos belanja lainnya. Adapun penjelasan proyeksi masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

a. Pos belanja pegawai diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,93% pertahun, dari sebesar Rp.951,47 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1,05 triliun pada tahun 2026. Kenaikan belanja tersebut digunakan mendukung belanja kepegawaian berupa gaji, tunjangan, insentif serta belanja-belanja yang terkait dengan dukungan pelaksanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Anggaran belanja pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2022-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sedangkan pengelolaan gaji tetap dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah

b. Belanja barang dan jasa diperkirakan sedikit mengalami peningkatan rerata sebesar 3,89% sepanjang periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai sebesar Rp634,40 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp626,24 milyar pada tahun 2022 dan kembali mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp.762,08 milyar pada tahun 2026. Justifikasi pertumbuhan belanja barang dan jasa tersebut didasarkan pada kisaran angka pertumbuhan yang dapat mempertahankan proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah yang pada periode 2014-2019 berada pada kisaran angka 18 - 28%.

c. Belanja Hibah menggunakan metode forecasting trend linear. Belanja hibah diproyeksikan tidak sepenuhnya mengikuti hasil forecasting namun juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp.122,11milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.55,60 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2024 megalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.66,51 milyar dikarenakan adanya PILKADA serentak.

d. Belanja Bantuan Sosial dilakukan justifikasi nilai berdasarkan nilai median. Hal tersebut disebabkan oleh variasi data antar tahun yang sangat berbeda yang menghasilkan estimasi dan angka perkiraan yang tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Proyeksi Belanja Modal untuk tahun 2021 - 2026 menggunakan metode justifikasi akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan, Pada tahun 2021 belanja modal mencapai Rp242,07 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp135,93 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 mencapai sebesar Rp198,18 milyar, Selama periode 2022-2026 belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan pada periode tersebut tidak memprediksi belanja yang berasal dari sumber dana DAK Fisik,

12. Belanja tidak terduga tidak dilakukan proyeksi karena sifatnya untuk keperluan darurat dan tidak bisa diprediksi sehingga diasumsikan tetap dalam kisaran angka sebesar Rp20 milyar pertahun.

13. Proyeksi Belanja Transfer tahun 2021-2026 menggunakan metode justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. Hasilnya pos ini diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 4,29% pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp.277,79 milyar kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.318,23 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp.340.69 milyar.

14. Belanja Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk setiap Kalurahan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Selama periode tahun 2021-2026, belanja bagi hasil mengalami pertumbuhan rerata sebesar 5,91% pertahun, dari sebesar Rp26,10 milyar pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp34,68 milyar pada tahun 2026.

15. Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan mengalami peningkatan rerata sebesar 4,15 % pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 jumlah belanja bantuan keuangan mencapai sebesar Rp251,12 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp292,67milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp306,09 milyar pada tahun 2026.

3. 3. 2 **Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan dalam RPJMD bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja

dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earkmark) dan belanja tertentu.Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam penghitungan Kapasitas Riil Keuangan daerah adalah

- Langkah pertama: menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
- Langkah kedua: menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiiki daerah yaitu pendapatan DAK dan Dana penyesuaian dan Otsus. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tersedia,
- Langkah Ketiga: Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji, tunjangan pegawai dan belanja transfer, juga termasuk dalam belanja mengikat yaitu belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah.
- Langkah Keempat: menghitung jumlah belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, diantaranya belanja untuk mendukung program pendidikan yang mencapai 20% dari alokasi belanja, kemudian belanja untuk kesehatan yang mencapai 10% dari belanja

daerah, dan kebutuhan belanja BLUD pada beberapa perangkat daerah.

- Langkah Kelima: menghitung Kapasitas riil keuangan daerah dengan rumus berikut Kapasitas Riil Keuangan Daerah = Kapasitas riil penerimaan daerah – (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat + Belanja Wajib Daerah).

Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL PENERIMAAN DAERAH	**2.292.724.883.000**	**2.166.090.934.000**	**2.418.621.289.000**	**2.360.645.090.000**	**2.394.372.795.000**	**2.458.607.603.000**
PENDAPATAN DAERAH	2.121.698.479.000	2.025.812.431.000	2.272.219.790.000	2.213.997.734.000	2.246.435.909.000	2.306.150.935.000
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000
PENDAPATAN MENGIKAT	**372.869.201.000**	**372.869.201.000**	**387.699.684.000**	**392.023.928.000**	**396.456.277.000**	**400.999.436.000**
DAK	233.146.510.000	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000
Dana Penyesuaian	139.722.691.000	139.722.691.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000
BELANJA MENGIKAT	**1.051.272.293.000**	**1.099.234.070.000**	**1.145.461.299.000**	**1.148.770.127.000**	**1.168.774.017.000**	**1.194.483.293.000**
Belanja Pegawai	781.733.920.000	806.405.019.000	818.373.462.000	831.590.629.000	845.073.598.000	859.659.537.000
Belanja Transfer	138.068.796.000	178.504.368.000	178.759.040.000	182.047.220.000	185.197.117.000	190.360.271.000
Belanja yang terkait dengan biaya Rutin PD	131.469.577.000	114.324.683.000	148.328.797.000	135.132.278.000	138.503.302.000	144.463.485.000
BELANJA WAJIB	**477.592.573.000**	**461.539.015.000**	**481.026.448.000**	**496.847.006.000**	**504.570.398.000**	**519.426.959.000**
Belanja Pendidikan(20% dari belanja barang dan jasa + modal)	194.010.988.000	184.202.298.000	196.961.171.000	209.033.223.000	213.328.981.000	222.738.493.000

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	103.581.585.000	97.386.717.000	104.115.277.000	107.863.783.000	111.291.417.000	116.738.466.000
BLUD	180.000.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT	**1.926.734.067.000**	**1.958.642.286.000**	**2.039.187.431.000**	**2.062.641.061.000**	**2.094.800.692.000**	**2.139.909.688.000**
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	**365.990.816.000**	**207.448.648.000**	**379.433.858.000**	**298.004.029.000**	**299.572.103.000**	**318.697.915.000**
%tase	**15,96%**	**9,58%**	**15,69%**	**12,62%**	**12,51%**	**12,96%**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Keterangan : Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp207,45 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dan mencapai Rp318,70 milyar pada tahun 2026, dengan asumsi adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin PD agar lebih efektif dan efisien.

Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Pendapatan daerah	2.121.698	2.025.812	2.272.220	2.213.998	2.246.436	2.306.151
Pencairan Dana Cadangan (sesuai peraturan daerah)	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran	171.026	140.279	146.401	146.647	147.937	152.457
Total penerimaan	2.292.725	2.166.091	2.418.621	2.360.645	2.394.373	2.458.608
Dikurangi	-	-	-	-	-	-
Belanja Wajib Mengikat	1.901.734	1.933.642	2.014.187	2.037.641	2.069.801	2.114.910
Pengeluaran Pembiayaan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	-	-	-	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	365.991	207.449	379.434	298.004	299.572	318.698
%tase	15,96%	9,58%	15,69%	12,62%	12,51%	12,96%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
Keterangan: Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%
Prioritas I	1.926.734	84,04%	1.958.642	90,42%	2.039.187	84,31%	2.062.641	87,38%	2.094.801	87,49%	2.139.910	87,04%
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	365.991		207.449		379.434		298.004		299.572		318.698	
Prioritas II	227.049	9,90%	134.579	6,22%	304.095	12,58%	213.494	9,04%	224.873	9,39%	243.791	9,92%
Prioritas III	138.942	6,06%	72.870	3,36%	75.339	3,11%	84.510	3,58%	74.699	3,12%	74.907	3,04%
Jumlah	2.292.725	100%	2.166.091	100%	2.418.621	100%	2.360.645	100%	2.394.373	100%	2.458.608	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

3.3.2.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program Program yang telah disusun oleh Pemerintah Ka bupaten Bantul sementara ada keterbatasan anggaran dalam APBD maka tidak semua program-program dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten Bantul. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kemitraan, pinjaman dan TSLP/CSR. Selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 TSLP/CSR dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tahun	Nominal (Rp)
2021	8.348.811.699
2022	8.941.577.329
2023	9.685.456.452
2024	10.513.191.039
2025	11.407.144.393
2026	12.372.614.015

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Metode yang digunakan untuk memproyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu teknik *forecasting Moving Average* dengan menggunakan data Realisasi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp8,94 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan mencapai Rp.12,37 milyar pada tahun 2026, Pertumbuhan CSR/TLSP diperkirakan sebesar 8,19% dengan asumsi adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan tingkat inflasi sebesar 3%.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

4.1.1.1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

(1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.

(2) Adanya peserta didik putus sekolah.
Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.

(3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.

(4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.

(6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

(1) Adanya kasus balita gizi buruk yang dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

(2) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular.
Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB. Diperparah dengan adanya pandemic Covid-19.

(3) Adanya kematian ibu melahirkan.
Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

(4) Adanya kematian bayi.
Nilai AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 sebesar 6,93.

(5) Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(6) Capaian tatanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah. Capaian PHBS di lingkup rumah tangga baru mencapai 53%.

(7) Belum optimalnya fasilitas layanan bidang Kesehatan.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Adanya jaringan jalan yang mengalami kerusakan.
Terdapat 24,58% jalan kabupaten dalam kondisi belum mantap.

(2) Adanya kejadian banjir disebagian wilayah.
Persentase penanganan banjir luapan baru mencapai 40,9% (365,47ha) dari luas daerah rawan banjir luapan 893.56 ha.

(3) Adanya Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang belum terlayani/tercukupi air dengan baik sebesar 19,09%.

(4) Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%. Akses terhadap air minum yang layak baru 96,81%. Di beberapa wilayah belum memiliki akses air minum yang layak.

(5) Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%.
Akses sanitasi yang layak baru 84,83%.

(6) Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang.
Kesesuaian pola ruang tahun 2020 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,01%; 'belum sesuai' sebesar 14,05%; dan 'tidak sesuai' sebesar 10,94%. Ketidaksesuaian terbesar adalah pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

(1) Adanya RTLH yang belum tertangani.

(2) Adanya Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul.
Penanganan kumuh sesuai Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 mencapai 92,49%.

(3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman.

5. Urusan Pemerintah Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

(1) Belum optimalnya penegakan perda.
Persentase penegakan perda sebesar 70% pada tahun 2020.

(2) Sebagian masyarakat belum sadar hukum.

(3) Tingkat risiko bencana tinggi.
Indeks Risiko Bencana tahun 2020 adalah 187,2 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Bantul yang berada pada daerah rawan bencana.

(4) Tingkat kerentanan bencana masih tinggi.

(5) Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Belum semua Kalurahan ditetapkan sebagai Kalurahan Tanggap Bencana, baru mencapai 35 Kalurahan (46,67%). Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baru mencapai 23 SPAB (4,51%).

(6) Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

(1) Tingkat kemiskinan masih tinggi.
Angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 13,5 %.

(2) Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(3) Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penangan korban bencana.

(4) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

(5) Sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik belum ramah difabel.

4.1.1.2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

(1) Kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
Pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

(2) Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

(3) Informasi pasar kerja yang belum optimal.

(4) Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Belum efektifnya peran satuan tugas perlindungan.

(2) Belum efektifnya pemenuhan hak-hak perempuan.

(3) Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Kasus KDRT mencapai 200 kasus.

(4) Belum efektifnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG).

(5) Belum optimalnya peran Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

(6) Adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun).

(7) Persentase sekolah ramah anak masih rendah.

(8) Belum optimalnya peran Forum Anak dalam proses pembangunan lima klaster KLA.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

(1) Kurangnya cadangan pangan pemerintah.
Cadangan pangan daerah Kabupaten Bantul baru mencapai 5,036 ton dari target 283 ton.

(2) Adanya kalurahan rentan pangan.
Menurut Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul terdapat 18 kalurahan rentan pangan.

4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

(1) Pendataan tanah belum optimal.

Masih terdapat 26,29% tanah yang belum terdaftar pada tahun 2020.

(2) Adanya konflik kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah. Konflik yang terjadi didominasi kasus tukar guling tanah.

5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

(1) Kualitas lingkungan hidup belum baik.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 atau kategori cukup baik (60<IKLH≤70).

(2) Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Ruang terbuka hijau perkotaan baru mencapai 14,34%.

(3) Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

(4) Penanganan hutan mangrove belum berkelanjutan.

Luasan Kawasan Hutan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul mencapai 14 Ha dengan Luas Lahan Konservasi Aktif sebesar 6 Ha.

(5) Belum maksimalnya pengelolaan sampah.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m^3/th, sementara jumlah yang tertangani baru sebanyak 452.185,43 m^3/th atau 74,28%.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

(1) Banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid.

(2) Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk *update* data base.

(3) Belum semua anak usia 0 – 16 tahun memiliki KIA.

(4) Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah (57,79%).

(5) Pemuthakiran data kependudukan belum optimal.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Sebagian aparatur kalurahan belum memenuhi standar kompetensi.
(2) Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan kalurahan.
(3) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir.
(4) Belum optimalnya peran PKK dalam gerakan pembangunan masyarakat.
(5) Masih kecilnya jumlah Desa Mandiri (25 kalurahan dari 75 kalurahan yang ada).
(6) Belum semua kalurahan memiliki BUMDes.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1) Angka Pasangan Usia Subur (PUS) *unmet need* menunjukkan tren meningkat.
(2) Semakin menurunnya persentase jumlah peserta KB baru.
(3) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

(1) Tingkat pelanggaran lalulintas masih tinggi.
(2) Tingkat kepadatan lalu lintas tidak merata.
V/C rasio Kabupaten Bantul bervariasi antara 0,17 – 0,45.
(3) Belum meratanya lampu penerangan jalan.
(4) Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan.
(5) Adanya pemanfaatan ruang milik jalan yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

(2) Belum efektifnya pemanfaatan sarana prasarana Teknologi Informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

(3) Infrastruktur Teknologi Informasi belum menjangkau semua tempat layanan publik.

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada tahun 2019 mencapai 78,56.

11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

(1) Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%).

(2) Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha.

12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

(1) Iklim investasi belum mampu menarik investor.

(2) Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.

(3) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Perizinan Online Daerah.

13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

(1) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.

(2) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.

(3) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

(1) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral.

Penyediaan data statistik beberapa indikator strategis belum bisa disediakan dalam skala kabupaten, diantaranya nilai inflasi, nilai tukar petani, ICOR, PDRB triwulan, dan indikator SDG's seperti jumlah pengguna telepon, internet, dan sebagainya yang memerlukan survei.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Jumlah pemanfaatan data geospasial sebanyak 1 aplikasi yaitu sistem informasi dashboard Portal Satu Data Bantul (https://data.bantulkab.go.id/), belum dimanfaatkan pada aplikasi di sektor lainnya.

15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

(1) Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi.

(2) Kurangnya peralatan persandian yang memenuhi standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

(1) Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal.

(2) Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal.

(3) Belum terbangunnya Taman Budaya Bantul.

17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

(1) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi.

(2) Rendahnya minat dan budaya baca sebagian masyarakat.

(3) Terbatasnya jumlah pustakawan.

(4) Kurangnya koleksi pustaka yang berkualitas dan terbaru.

(5) Masih minimnya jumlah dan variasi *e-book.*

(6) Belum adanya akses layanan perpustakaan *online*.

18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

(1) Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip. Sebanyak 15 perangkat daerah termasuk dalam kategori kurang dalam pengelolaan arsip.

(2) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

4.1.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

(1) Tidak ada regenerasi menjadi nelayan.

(2) Belum optimalnya produksi ikan tangkap.

(3) Menurunnya produksi perikanan budidaya, terutama komoditas gurami.

(4) Belum tersentra dan terkelolanya dengan baik budidaya perikanan.

(5) Terbatasnya ketersediaaan bibit, pakan dan air dalam jumlah dan kualitas.

(6) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

(1) Kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi.

(2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat.

(3) Belum optimalnya SDM pengelola wisata.

(4) Kurangnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari.

(5) Belum optimalnya promosi wisata.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

(1) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan marginal dan lahan pekarangan.
(3) Semakin menipisnya ketersediaan air dan distribusi belum merata.
(4) Semakin menurunnya minat menjadi petani.
(5) Belum optimalnya pengelolaan peternakan secara profesional.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

(1) Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana pasar rakyat.
(2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar rakyat.
(3) Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik.

5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

(1) Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
(2) Masih kecilnya pertumbuhan industri manufaktur.
(3) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.

6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

(1) Kurang sesuainya lokasi yang tersedia dengan minat calon transmigran.
(2) Terbatasnya kuota transmigran.

4.1.1.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

(1) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 76,43 (BB) kategori Baik, dengan interprestasi: secara instansional mampu

mewujudkan sebagian besar sasaran reformasi birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

(2) Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan daerah.

(3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

b) Sekretariat DPRD

Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Perencanaan

(1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data.

(2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.

(3) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan.

b) Keuangan

(1) Belum efektifnya manajemen keuangan daerah.

(2) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

(3) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(1) Belum terpenuhinya formasi ASN.

(2) Belum optimalnya penataan PNS sesuai dengan formasi.

(3) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat.

d) Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

3. Unsur Pengawasan

Inspektorat Daerah

(1) Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

(2) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

4. Unsur Kewilayahan

Kapanewon

(1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

(2) Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

(3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan, terkait penyusunan Peraturan Kalurahan/Lurah, pengelolaan keuangan kalurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kalurahan.

5. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(1) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

(2) Adanya kenakalan remaja.
(3) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama.
(4) Belum terkoordinirnya pemantauan aktivitas WNA.

4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPJMD, yaitu :

(1) Belum optimalnya pertumbuhan PDRB per kapita.
(2) Tingginya angka kemiskinan.
(3) Adanya ketimpangan pendapatan.
(4) Adanya ketimpangan wilayah.
(5) Adanya dampak pandemi Covid-19 pada sebagian besar sektor kehidupan masyakat.
(6) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
(7) Belum terpenuhinya kualitas tenaga kerja yang kompeten.
(8) Masih terjadinya kematian ibu dan bayi.
(9) Masih adanya balita stunting.
(10) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
(11) Masih adanya kenakalan remaja
(12) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama
(13) Belum terpenuhinya cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi.
(14) Adanya RTLH yang belum tertangani.
(15) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel.
(16) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
(17) Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup.
(18) Belum optimalnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
(19) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.
(20) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.

4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator makro daerah merupakan cerminan aspek kesejahteraan masyarakat.

1) PDRB

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besaran peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen, stabil pada rentang waktu 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66.

2) PDRB per kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun selanjutnya.

3) Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan besarnya persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 adalah 14,55% sampai dengan 2019 mengalami penurunan mencapai 12,92%, tetapi tahun 2020

pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali menjadi 13,50%.

4) Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik, meningkat kemudian menurun. Pada tahun 2020 Indeks Gini membaik pada 0,418, dan diharapkan pada tahun 2021 dan seterusnya Indeks Gini ini akan semakin turun (membaik). Indeks Gini Bantul masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada periode 2016-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 TPT cenderung menurun kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga perlu tindakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal

yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1. Telaah Isu Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Develoment Goals* (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Develoment Goals* (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's.

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. 17 tujuan adalah:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

2. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to- machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

3. Pandemi Covid-19

WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi dikarenakan penyebarannya yang meluas.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2O2O, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses tranformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

4.2.2. Telaah Isu Nasional

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa Isu Nasional sebagai berikut :

1. Undang Undang Cipta Kerja

Keberadaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Teknis penyusunan UUCK menggunakan model Omnibus Law mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut: (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (2) Ketenagakerjaan (3) Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (4) Kemudahan berusaha (5) Dukungan riset dan inovasi (6) Pengadaan tanah (7) Kawasan Ekonomi (8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek

Strategi Nasional (9) Pelaksanaan administrasi pemerintah (10) Pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Terdapat 49 Peraturan pelaksana turunan UUCK. 49 Peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

2. Pandemi Covid-19

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new norrna*[], yang proses tranformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-l9.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produk yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak

relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*) sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing,* dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, dan belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid- 19.

3. Reformasi Ekonomi

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3)

memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

4. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat (Germas), kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

5. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error,* terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi Covid-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui

peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

6. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana non alam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan.

Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (Kalurahan/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancarnan bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit).

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pangan di wilayah yang

memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan

4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.3.1. Telaah RPJPD DIY

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025 memuat Visi: ***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD DIY sebagai berikut:

Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025

MISI	Tahapan	Prioritas
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.	a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara,	Pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan.
	b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya,	Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
	c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin,manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator),	Pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.
	d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing,	Peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.
	e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama,	Pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.
	f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha,	Penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.
	g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional,	Upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.
	h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan	Perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.

MISI	Tahapan	Prioritas
	(*knowledge society*),	
	i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan,	Penciptaan *research research* unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
	j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan,	Pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip "pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua".
	k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman,	Perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
	l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,	Penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.
	m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana,	Pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.
	n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan,	Pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.	a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada:	1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;
		2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
	b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang	1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
		2) Mempertahankan dan mengembangkan "kantong-kantong"

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh,	kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
		3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event-event budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman,	1) Fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
		2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu;
		3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional;
		4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;
		5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.
	b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian,	1) Pengembangan produk Pariwisata;
		2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat
		3) Pengembangan usaha pariwisata
		4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat : a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan informasi pasar wisatawan;

MISI	Tahapan	Prioritas
	industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,	c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.
		5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat : a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan; b) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata.
		6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titikberat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata;
		7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat : a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.	a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial	1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
		2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
		3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;
		4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
	b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan,	1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;
		2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga Kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;
		3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.
	c. Menyediakan tenaga kerja yang	peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis

MISI	Tahapan	Prioritas
	memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya,	kultural, standarisasi, kompentensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional.
	d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif,	pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.
	e. Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender,	peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.
	f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat,	Penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.
	g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya	1) Pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi,	2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar
	h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan,	Perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.
	i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan,	Pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.
	j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:	1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;
		2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.
	k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis	1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan;

MISI	Tahapan	Prioritas
	dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,	2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;
		3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat;
		4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;
		5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat : a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang porfesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya; b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima.
		8) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;
		9) Membudayanya manajeman penanggulangan dan pencegahan bencana.

4.2.3.2. Telaah RTRW DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. RTRW DIY memuat rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Sistem Perkotaan

1) Sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi sebagian Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan;
2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah Bantul;
3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) terdiri atas ibu kota kapanewon dan satuan permukiman yang meliputi: ibu kota Kapanewon Piyungan, ibu kota Kapanewon Kretek, ibu kota Kapanewon Imogiri, ibu kota Kapanewon Sedayu.

b. sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana terdiri atas: sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1) Sistem Jaringan Transportasi, Sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan sistem jaringan kereta api.
   a) Sistem jaringan jalan terdiri atas: jaringan jalan nasional; jaringan jalan provinsi; terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

(1) Jaringan jalan nasional terdiri atas:
   (a) Jalan arteri primer terdiri atas: peningkatan dan atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi Sentolo-Imogiri; Imogiri-Piyungan; dan Piyungan-Prambanan.
   (b) Jalan kolektor primer terdiri atas Yogyakarta – Piyungan; Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul; Yogyakarta – batas kota Bantul; Jalan Pemuda Bantul; Jalan Kolonel Sugiyono Bantul; Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul; Jalan Panembahan Senopati Bantul; Bantul – Simpang Kweden; Simpang Kweden – Bakulan; Bakulan – Kretek; Kretek – Parangtritis.

(2) Jaringan jalan provinsi terdiri atas:
   (a) Jalan kolektor primer dua yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong.
   (b) Jalan kolektor primer tiga yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan.
   (c) Jalan strategis provinsi (1) Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Prambanan – Piyungan; (2) Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1.

b) Sistem jaringan kereta api, jaringan jalur kereta api umum terdiri atas jalur kereta api Samas – Yogyakarta –

Borobudur dan jalur kereta api bandar udara baru Kapanewon Temon – Samas – Parangtritis.

2) Sistem Jaringan Energi.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi listrik tenaga hibrid dan pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY.

3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: sistem jaringan pengolahan air limbah; sistem jaringan persampahan; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana.

a) Sistem jaringan pengholahan air limbah terdiri atas: (1) pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di: Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; dan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul; (2) pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kapanewon Bambanglipuro.

b) Sistem jaringan persampahan terdiri atas (1) pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan; (2) pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce,reuse, recycle)*, dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle)*; (3) pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kapanewon Piyungan.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah

a. Kawasan lindung

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri atas:

a) Kawasan hutan lindung meliputi Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar;
b) Kawasan resapan air meliputi Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.

2) Kawasan Konservasi

Cagar Alam Imogiri di Kapanewon Imogiri dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.

3) Kawasan Lindung Geologi

a) Kawasan cagar alam geologi

Gumuk Pasir Parangtritis di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.

b) Kawasan perlindungan air tanah

Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan luas 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar.

c) Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air meliputi Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu.

4) Kawasan Terbuka Hijau

   Terdapat di Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul.

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

   a) Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek;
   b) Kawasan rawan tsunami di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   c) Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   d) Kawasan rawan banjir meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   e) Kawasan rawan gempa bumi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   f) Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo.

6) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan cagar budaya Imogiri dan Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret.

b. Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Rencana pola ruang Kawasan budi daya terdiri atas: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pertahanan dan keamanan; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, terdapat di Kapanewon Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, terdapat di Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
3) Kawasan Peruntukan Pertanian, terdiri atas kawasan budi daya tanaman pangan; dan kawasan budi daya perkebunan.
    a) Kawasan budi daya tanaman pangan terdiri atas kawasan lahan pangan beririgasi; kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
        (1) Kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis,

Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;

(2) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar.

(3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:

(a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;

(b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar.

b) Kawasan budi daya perkebunan terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon

Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap; dan kawasan perikanan budi daya.
   a) Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Depok; Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru; Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo; Pangkalan Pendaratan Ikan Samas; Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan.
   b) Kawasan perikanan budi daya terdapat di kawasan minapolitan Kapanewon Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kapanewon Sanden.
5) Kawasan Peruntukan Pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
   a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar;
   b) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret,

Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;

c) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar.

6) Kawasan Peruntukan Industri

a) Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri di Kapanewon Piyungan dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Sedayu dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;

b) Sentra industri kecil menengah terdapat di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Sewon, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Piyungan.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa

wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar.

a) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;

b) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri,

Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, dan Kapanewon Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi meliputi pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan dan pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

3. Kawasan strategis provinsi di wilayah DI

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri dari: Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten; Di Bantul hanya ada Kawasan Strategis Kasultanan antara lain:

1) Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
3) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) Masjid Pathok Nagoro;
5) Pantai Samas – Parangtritis;
6) Kerto – Pleret;
7) Karst Gunungsewu.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
2) Kawasan Temon – Prambanan, terdiri atas Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

3) Kawasan Tempel – Parangtritis, terdiri atas Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
4) Kawasan Pantai Selatan DIY terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
   1) Kawasan Bentang Alam Karst terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul.
   2) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terdapat di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

4.2.3.3. Telaah Keistimewaan DIY

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul terkait erat dengan predikat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai

baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 'keistimewaannya" menyusuri lorong sejarah. Dengan demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang tersusun nanti harus memiliki kapasitas "mendukung" dan "menguatkan" keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terdapat keterkaitan dengan Kraton dan Pakulaman yang dipercaya mempunyai makna simbolik, penuh dengan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan pemimpinnya, dan antara manusia dengan manusia lainnya perlu dipertahankan dan dilestarikan atas dasar filosofi tradisional di bawah ini:

1) Hamemayu Hayuning Bawana

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental.

2) Sangkan Paraning Dumadi

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (Sangkan Paraning Dumadi). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya

(jagad gedhé; makrokosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni).

Sangkan Paraning Dumadi menjadi landasan tata ruang dalam konsep berpikir Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB-I) ketika wilayah kerajaannya. Konsep Sangkan Paraning Dumadi terungkap pada pola tata ruang berupa sumbu imajiner yang menjadi salah satu nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menonjol dalam bentuk fisik sebagai warisan budaya, yaitu berupa pola kota atau tata kota yang mengikuti sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Selatan.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantul nantinya ada aspek melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan ruang dan tata ruang berbasis budaya untuk turut serta dalam mengungkapkan nilai-nilai dan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tata ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

3) Manunggaling Kawula lan Gusti

Ditinjau dari aspek tata ruang wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta ditata secara istimewa oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan konsep yang tinggi dan sarat makna yang divisualisasikan dalam Warisan Budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan (Samudra Indonesia). Warisan Budaya ini menggambarkan Sumbu Imajiner yang selaras dengan konsep Tri

Hita Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palemahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha). Konsep Tri Hita Karana, ada tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga, dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofi sumbu imajiner tersebut. Konsep kosmogoni yang Hinduistis ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I diubah menjadi Konsep Islam-Jawa Manunggaling Kawula Gusti (Jagad Gedhe dan Jagad Cilik).

4) Sumbu Imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi (asas harmonisasi lingkungan)

Kabupaten Bantul dilewati oleh sumbu imajiner yaitu Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara filosofi sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun min Allah), manusia dengan manusia (hablun min Annas), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (tirta) dari laut Selatan, angin (maruta) dan angkasa (eiter).

5) Catur Gatra Tunggal

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan konsep dasar pembentukan Inti Kota. Catur Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas: kraton, masjid, alun-alun, dan pasar adalah elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dalam perkembangannya konsep ini dimaknai dengan elemen identitas berupa tempat ibadah, kantor pemerintahan, alun-alun dan pasar.

Catur Gatra Tunggal sebagai konsep filosofis merupakan salah satu konsep inti yang mendasari keberadaan identitas Kabupaten Bantul. Artinya konsep yang bersifat makro-filosofis dan konsep mikro-filosofis merupakan konsepsi bagi tata ruang Kabupaten Bantul.

4.2.3.4. Telaah RPJMD DIY

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".**

Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1) **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan.
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM

aparatur sipil negara, melalui "Silang Belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Etos, dalam konteks Trilogi SDM DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan- penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh

negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Isu strategis berdasarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima)tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

Jika dilihat perkembangan pengurangan kemiskinan terdapat perbedaan karakter antar kabupaten/kota. Berdasarakan kajian dari BPS, Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

2. Tingginya Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Komposisi struktur ekonomi tiap Kabupaten/kota menarik untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Bantul penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut kebutuhan investasi di Kabupaten/kota, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/kota tereliminir.

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari masing-masing Kabupaten-kota. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Jika dilihat ketimpangan di dalam masing-masing Kabupaten/kota, Bantul angka indeks gini tinggi. Jika dicermati, struktur ekonomi di kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Risiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan hidup mencakup antara lain pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), dampak pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan sumber daya air.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai ISPU DIY sebesar 30,5 yang berada dalam kategori relatif sehat/baik.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 diketahui bahwa kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolved Oxygen* (DO), kadar residu terlarut/*Total Dissolved Solid* (TDS), dan kandungan bahan kimia lain yang terkandung di air Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik, Sungai Bedog, Sungai Gadjahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo telah melampaui ambang batas Baku Mutu kualitas air. Nilai BOD di sembilan sungai tersebut hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir. Nilai COD sebagian besar sungai juga sudah melampaui ambang batas, namun nilai DO di semua bagian di sembilan sungai masih memenuhi standard baku mutu. Begitu pula untuk parameter TDS (zat padat terlarut), semua sampel air sungai masih berada di bawah baku mutu maksimum yang ditentukan.

Masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air dan sebaliknya kebanjiran yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar Samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.
Permasalahan di DIY dalam penanggulangan bencana adalah:

1) Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman bencana di 301 kalurahan rawan bencana dari 438 kalurahan se-DIY).

2) Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan masih perlu diterjemahkan secara lebih jelas dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
3) Kapasitas kelembagaan yang kurang, yaitu masih rendahnya kapasitas dalam pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pemahaman strategi dan kebijakan pada pra, saat dan setelah bencana.
4) Suprastruktur/budaya penyelenggara pemerintahan dan masyarakat belum pro- Pengurangan Risiko Bencana, paradigma masih didominasi dengan tanggap darurat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya data dan pemanfaatan data.
5) Jejaring potensi penanggulangan bencana belum optimal, koordinasi antara *stakeholder* belum padu di dalam penanggulangan bencana, peran swasta masih di tanggap darurat dan akademisi (kampus) masih lebih dominan dalam posisi sebagai menara gading dalam penanggulangan bencana.

4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74 %. Sementara itu, kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan budidaya adalah sebesar 66,51 %. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan

dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 2014- 2015, lahan pertanian mengalami penurunan dari 76.26 % menjadi 76.04 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanfaatannya (lahan-lahan produktif harus dilindungi fungsi dan pemanfaatannya melalui program PLP2B).

Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal dan apartemen berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun akan meningkatkan koefisien dasar bangunan (KDB) sehingga berpotensi mengakibatkan genangan dan banjir. Urbanisasi (proses perubahan suatu kawasan menjadi kota) juga turut mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DIY. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan persentase lahan terbangun dari 23.75 % menjadi 23.96%.

5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar

wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, jalur kereta api penghubung dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Salah satu penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan yaitu Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar.

Pembangunan infrastruktur strategis lain di kawasan pesisir selatan DIY adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya transportasi ini memerlukan dukungan dari infrastruktur yang ada berupa jalan.

6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan

ajaran moral nilai luhur Budaya. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai peningkatan taraf pendidikan melalui revolusi karakter siswa melalui pendidikan karakter dan perluasan pendidikan berbasis ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan atau vokasi.

7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama seusai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Hingga tahun 2017 Cagar Budaya dan warisan budaya yang terdiri dari benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan cagar budaya berjumlah 2.239 buah, yang sudah mendapatkan SK sejumlah 1331, baru sejumlah 492 yang dilestarikan. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional sejumlah 40 buah dari 911 ragam budaya tak benda, sedangkan yang sudah masuk database Warisan Budaya tak benda di tingkat pusat berjumlah 246 buah. Organisasi seni dan budaya berjumlah 6293, yang dinilai telah maju karena managemen dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional berjumlah 93 organisasi.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang

menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya.

Upaya-upaya pelestarian budaya yang mencakup legalitas dan pelindungan fisik, penguatan, serta pemanfaatan akan terus ditingkatkan untuk mencapai Visi RPJPD mendatang.

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance)*

Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing- masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan

kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

4.2.4. Telaah Isu Daerah

4.2.4.1. Telaah RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuputen Bantul Tahun 2006- 2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Penekanan pada lima tahun keempat adalah pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	• Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkataan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. • Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas pendidikan. • Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. • Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan pekembangan ilmu dan teknologi. • Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;	• Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. • Penerapan budaya hidup sehat dan bersih. • Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. • Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu. • Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. • Peningkaan manajemen kesehatan. • Peningkatan pemakaian obat tradisional.
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja,	• Penciptaan wirausaha baru. • Pemantapan sistem rekruitmen tenaga kerja.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;	• Peningkatan sarana dan cakupan permodalan • Pemantapan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi dan kerjasama di tingkat internasional. • Peningkatan tenaga trampil dan produktif. • Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. • Terpenuhinya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mncapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.	• Kemandirian unit-unit usaha industri kecl da kerajinan rakyat. • Terpenuhinya bahan baku secara mandiri. • Perluasan jangkauan pemasaran • Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. • Pengembangan sistem industri, yang ramah lingkungan, dan kemantapan koperasi. • Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai. • Terpenuhinya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengganggguran. • Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. • Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.
	Peningkatan jaringan infrasruktur yang	• Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelyanan dasar di diseluruh

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	handal, guna meningkatkan aksebilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. • Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksebilitas wilayah. • Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. • Pemenuhan teknologi informasi ke seluruh wilayah. • Terbangunnya JJLS.
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;	• Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. • Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. • Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada.
	Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.	• Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lngkungan dan penegakan hukum. • Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lidung. • Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam; • Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	Pengurangan risiko bencana alam melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	• Penataan dan pembangunan permukiman berbasis bencana. • Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. • Penangana korban bencana alam yang cepat dan responsif. • Pemenuhan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana.
	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.	• Pemanyapan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam sustu suanan yang agamis dan dmokratis. • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dareh, membina akhlak yan mulia dan memupuk etos kerja. • Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meingkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. • Pemantapan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehataan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak. • Terpenuhinya sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.
	Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	• Terpenuhinya kualitas yang baik, sarana prasarana penunjang olahraga. • Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat. • Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan RI. • Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, beraklaq mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yag dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beerbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	• Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. • Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. • Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang mah Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatnya rasa salin percaya, toleransi dan harmonis antar kelompok masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	• Aparat pemerinah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap denan berdasarkan tata kelola pememrintah yang peduli pada kepentingan rakyat. • Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. • Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah. • Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha. • Mewujudkan kepastian perlindungan, penegakkan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. • Kemantapan etika birokrasi, budaya kerja, penetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.
	Peningkatan	2. Pemantapan teknologi informasi

MISI	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	kualitas pelayanan kepada masyarakat	dalam pelayanan public 3. Pemantapan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar mutu pelayanan. 4. Pemenuhan srana dan prasarana publik yang berkualitas.
	Mewujudkan ketertiban masyarakat	• Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat • Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana • Terciptanya kondosi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
	Menjujung tinggi HAM yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.	Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

4.2.4.2. Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

a. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan

f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
1	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemantapan fungsi dan peranan Kota PKN dan PKW	Pemantapan fungsi pengembangan wilayah pada PKN, PKW dan PKL	Kapanewon Bantul, Banguntapan, Kasihan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Imogiri, Kretek, Srandakan, Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Dlingo, Pajangan, Pandak, Pundong dan Sanden		
		Pengembangan fungsi dan peranan Kota PKL, PPK dan PPL	Peningkatan fungsi pengembangan wilayah pada PKL, PPK dan PPL			
		Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	1. Pemantapan sistem pelayanan lembaga keuangan, terutama bank dan koperasi/lemba ga perkreditan	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			2. Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana Perkantoran	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			3. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan		
			4. Pengembangan dan pemantapan fungsi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, lab. klinik dan fasilitas pendukung)			
			5. Pemantapan fungsi fasilitas perdagangan (pasar harian, mingguan, toko dan warung)			
			6. Pemantapan fasilitas komunikasi (kantor pos dan fasilitas telekomunikasi lainnya)			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
		Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan		
		Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa	Pengembangan Jaringan Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Bintek dan Pendampingan)	Seluruh wilayah Tingkat Desa/Kalurahan Kabupaten Bantul		
		Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan	Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Kapanewon Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro		
				Kapanewon Pundong, Jetis dan Pleret,Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro		
				Kapanewon Pajangan, Sanden, Pleret		
2	Jaringan Sarana Prasara dan Utilitas Daerah	Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat	1. Peningkatan jalan lokal-kolektor primer	Kapanewon Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden, Pleret		
			2. Peningkatan jalan kolektor–arteri pada ruang Nglebeng- RSU Kodya			
			3. Pembangunan jalan arteri . primer Ring Road			
			4. Pembangunan jalan arteri . primer Pantai Selatan	Pantai Selatan		
			5. Pengembangan terminal Tipe B			
			6. Peningkatan Keselamatan LL Jalan Lokal	Se Kabupaten Bantul		
			7. Pemasangan Prasarana APILL	Se Kabupaten Bantul		
			8. Pengembangan Terminal Barang	Piyungan		
			9. Pemasangan Prasarana Rambu Jl. Kolektor Sekunder	Se Kabupaten Bantul		
		Pengembangan jaringan energi	Peningkatan pelayanan jaringan listrik perkotaan dan pengembangan cakupan jaringan listrik perdesaan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan jaringan telekomunikasi	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi satelit maupun terestrial	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Pengembangan Jaringan pusat komunikasi dan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan dan pengembangan informasi pembangunan daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan dan pengembangan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan struktur jaringan irigasi	1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan jaringan drainase perkotaan	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Peningkatan jaringan air minum	Se-Kabupaten Bantul		
			3. Pengembangan sistem persampahan	Se- Kabupaten Bantul		
			4. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpusat	Se- Kabupaten Bantul		
			5. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pemakaman	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			6. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan jaringan penerangan jalan dan lingkungan	1. Penambahan jaringan penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			2. Pengembangan jaringan penerangan lingkungan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

b. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
1	Kawasan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	Hutan Lindung	1 Pengendalian kegiatan dalam hutan lindung	Kec. Dlingo, Imogiri dan Sanden (hutan bakau)		
		Kawasan Konservasi dan resapan air	1. Pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air, Sumur Resapan	Kec. Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek		
			2 . Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan konservasi			
2	Kawasan lindung setempat	Kawasan sempadan sungai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kawasan sempadan pantai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek		
		Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan		
		Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	1 Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Piyungan dan Bantul.		
			2 Peningkatan kuantitas jumlah dan luasan RTH			
			3 Peningkatan kualitas RTH melalui penataan dan penggalakan penanaman pohon pada RTH			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
			4 Penunjukan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota			
3	Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1 Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pajangan, Pundong, Pleret, Sewon, Pandak		
			2 Pemeliharaan, perawatan dan dan perlindungan Cagar Budaya			
			3 Kerjasama perlindungan Cagar Budaya di Kotagede	Kapanewon Banguntapan		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
1	Kawasan peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Pengembangan Pertanian pangan			
		Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Peningkatan ketahanan pangan			
			Pengembangan pertanian perkebunan			
			Pengembangan hutan rakyat			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kec. Pandak, Kec. Pundong, Kec. Sedayu, Kec. Piyungan, Kec. Banguntapan Kec. Sanden		
			Pengembangan SDM Perikanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
2	Kawasan peruntukan industri	Penetapan peraturan pengendalian untuk kegiatan industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah	Penyusunan perda tentang peraturan pengendalian industri kecil dan menengah			
		Pengembangan dan peningkatan kawasan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Kec. Sedayu dan Piyungan		
			Penyusunan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri			
			Konsolidasi pelaku industri pada kawasan industri			
			Promosi dan Penjaringan investor baru			
			5 Pembangunan dan peningkatan kawasan industri			
		Pengembangan industri kecil	1 Penataan Struktur IKM			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
		dan menengah	2 Pengembangan IKM			
			3. Pengembangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang melayani KUKM yang ada di wilayah itu	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
3	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan			
			2 Pengembangan tujuan wisata baru			
			3 Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah			
			4. Pelestarian dan Pengelolaan Benda dan Cagar Budaya			
		Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	1. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Kec. Banguntpan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan		
			2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana			
4	Kawasan peruntukan permukiman	Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman	1. Penyusunan rencana pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan	Seluruh Wilayah Kab. Bantul di luar kawasan lindung		
			2. Pengembangan permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			3. Pengembangan permukiman khusus seperti perumahan nelayan, perumahan buruh industri dan perumahan			
			4. Pengembangan dan pengendalian perumahan formal			
			5. Pengembangan dan fasilitasi perumahan swadaya			
			- Jalan Lingkungan			
			- Drainase			
			6. Pembangunan BKM sebagai permukiman strategis	Kec. Pajangan dan Kec. Kasihan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

c. Telaah terhadap Rencana Kawasan Strategis

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:
   a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
   b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
   c) Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan;
   d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
   e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
   f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.
b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
   a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
   b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
   a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kapanewon Dlingo dan Agropolitan di Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, KapanewonPundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan
   b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis

No.	Fungsi	Indikasi Program	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
				Periode III	Periode IV
				2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan Strategis Ekonomi	Pengembangan Kawasan KonvensiPameran (MICE) Skala Internasional di kawasan JEC	KapanewonBanguntapan		
		Pengembangan Perumahan dan Permukiman berbentuk kota satelit	Kapanewon Banguntapan, Sewon dan Kasihan		
		Pengembangan kawasan industri	Kapanewon Sedayu dan Piyungan		
		Pengembangan Bantul Kota Mandiri	Kapanewon Kasihan dan Pajangan		
		Pengembangan Wisata Bahari di sepanjang pantai selatan	Kapanewon Kretek, Sanden dan Srandakan		
		Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut	Kapanewon Kretek, Sanden, Srandakan		
2	Kawasan Strategis Sosio-Kultural	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan – Manding – Tembi	Kapanewon Bantul, Sewon		
		Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi)	Kapanewon Kasihan, Pajangan		
		Pelesatarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan,		
3	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Pengembangan Agrowisata	Kapanewon Dlingo, Sanden		
		Konservasi gumuk pasir	Kapanewon. Kretek, Sanden dan Srandakan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan

penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam progam daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tembahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataanannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a. Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%.

Sementara itu, untuk produk limbah yang dihasilkan yang tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumput Tinja (IPLT).

Atas dasar hal tersebut, permasalahan kualitas air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius karena membawa dampak secara luas dan mengancam keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

b. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,02. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat, dengan jumlah korban akibat bencana mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kesiapsiagan dan upaya penyiapan dan pengurangan risiko yang terjadi. Upaya ini menjadi penting karena dampak bencana dimaksud sangat besar dan mengancam banyak orang.

c. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70). IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk.

d. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir mencapai 34 Ha/tahun, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

e. Tingginya angka kemiskinan

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19

yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

f. Ketimpangan Pendapatan

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah.

Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

g. Ketimpangan Wilayah

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan.

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

KLHS RPJMD memberikan rekomendasi program agar penyusunan RPMJD sesuai dengan aspek pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi berupa program dalam Permendagri 90 tahun 2019.

Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) • Program Pengelolaan Persampahan
Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanggulangan Kebakaran • Program Penanganan Bencana
Penurunan kualitas lingkungan hidup	• Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Alih fungsi lahan	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tingginya angka kemiskinan	• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum • Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia • Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Ketimpangan Pendapatan	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Pemasaran Pariwisata • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Promosi Penanaman Modal • Program Hubungan Industrial • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	(Kerjasama Daerah) • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ketimpangan Wilayah	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Perlindungan Dan Jaminan • Program Pelatihan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja • Program Aplikasi Informatika • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah) • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Penempatan Tenaga Kerja

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
1	YOGYAKARTA 2017-2022 “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan	Meningkatkan Kesejahtaraan dan Keberdayaan Masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Keberhasilan kebijakan sektor pertanian Kabupaten Bantul dapat menyebabkan surpus pangan dan mempengaruhi ketahanan pangan daerah sekitar Bantul, termasuk Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta bisa dikatakan tidak memiliki lahan pertanian. Pasokan pangan berasal dari luar Kota Yogyakarta. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan ditempuh. Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kota Yogyakarta terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.
		Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bantul antara lain dengan strategi perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran melalui modernisasi pasar rakyat. Produk lokal yang dihasilkan UMK diharapkan mampu bersaing bahkan dapat memasuki pasar Yogyakarta, sedangkan modernisasi pasar rakyat diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta. Disamping itu,

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata. Kerjasama pariwisata dengan Kota Yogyakarta diharapkan agar ada sinergi pada pakert-paket kunjungan wisata lintas wilayah.
			Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Meningkatnya investasi di Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Banyak tenaga kerja dari Kab. Bantul yang bekerja di Kota Yogyakarta.
		Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	Gangguan trantibbum di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh pada daerah perbatasan, dan sebaliknya. Kejadian “klithih” sering terjadi di daerah perbatasan. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum .
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	Kualitas pendidikan meningkat	Peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi peningkatan daya saing pendidikan, agar mampu bersaing dengan kualitas pendidikan Kota Yogyakarta. Diharapkan masyarakat Bantul lebih memilih bersekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
			Harapan hidup masyarakat meningkat	Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga. Warga Kabupaten Bantul yang bertempat tinggal di perbatasan memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kota

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				Yogyakarta.
			Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Perlu upaya yang kuat untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kota Yogyakarta memiliki lahan yang sangat terbatas. Sehingga banyak pekerja Kota Yogyakarta memilih tempat tinggal di luar Kota Yogyakarta. Hal ini mengkhawatirkan keberadaan lahan pertanian terutama di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Diperlukan upaya yang kuat dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, agar tidak beralih ke fungsi yang lain.
			Kualitas lingkungan hidup Meningkat	Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Air dari Kota Yogyakarta mengalir menuju hilir yaitu wilayah Kabupaten Bantul. Apabila kondisi air sungai buruk mempengaruhi kondisi air di Kabupaten Bantul. Disamping itu, sampah dari Kota Yogyakarta dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di Kabupaten Bantul.

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				Diperlukan kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul
		Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Pembangunan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan diperlukan koordinasi lintas kabupaten/kota agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut. Kerjasama penanganan jalan, transportasi, penyediaan air bersih dan drainase difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Kartamantul.
2	KULON PROGO 2017-2022 "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kulon Progo dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo secara langsung maupun tidak langsung bagi Kabupaten Bantul. Pembangunan JJLS merupakan jalur alternative dari dan ke Bandara, wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul semakin terbuka.
3	SLEMAN	Membangun	Terkelolanya lingkungan	Di DIY, Sleman merupakan

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
	2020-2026 Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong	sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	hidup dalam rangka Pembangunan yang berkelanjutan	daerah hulu, yang banyak memiliki sumber mata air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Bantul merupakan daerah hilir, dimana air yang diterima dalam kualitas dan kuantitasnya sudah menurun. Hal ini menyebabkan kondisi sungai di wilayah Bantul memiliki kualitas yang tidak baik. Disamping itu, sampah dari Sleman dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di Kabupaten Bantul. Diperlukan kesadaran warga Sleman dalam menjaga tutupan lahan di daerah hulu agar smber mata air tetap terjaga. Disamping itu dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Prasarana olahraga di Kabupaten Sleman relative lebih banyak. Masyarakat Bantul di daerah perbatasan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan memilih mengikuti club olah raga Sleman.
		Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kabupaten Sleman sebagai daerah hulu terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya,

NO	PERIODE RPJMD/ VISI	MISI	SASARAN	KETERKAITAN
				sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.
		Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat sleman dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
4	GUNUNGKIDUL 2020-2026 Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	Gunung Kidul memiliki Pelabuhan Perikanan Sadeng. Aktivitas perikanan di Pelabuhan ini berjalan cukup baik mengingat lokasinya berada di teluk. Kapal-kapal nelayan Bantul mendarat di pelabuhan ini, mengingat Bantul tidak memiliki pelabuhan perikanan. Hanya perahu saja yang dapat mendarat di pantai Bantul. Disamping memiliki Pelabuhan Perikanan, Gunung Kidul juga memiliki wisata alam pantai yang indah dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Agar dapat bersaing dengan pantai Gunung Kidul, Bantul harus segera meningkatkan pengelolaan pantainya.

4.2.7.Isu Strategis Kabupaten Bantul

Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/ kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pertumbuhan jasmani, kemampuan intelektual dan mental spiritual. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan jasmani**

  Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Bantul masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

  Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

  Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020.

  Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan. Perhatian pada ibu, bayi dan balita perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi peran POSYANDU.

Disamping upaya kesehatan, anak membutuhkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terutama dari tindak kekerasan. Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun saat ini pada kategari madya, 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), dan 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana) dan terdapat 11 Forum anak tingkat kecamatan/kapanewon.

- **Kemampuan intelektual**

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul belum merata dilihat dari kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik.

Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD: 84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%.

Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Perlunya optimalisasi pelaksanaan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65%

sehingga rasio ketergantungannya 44,20. Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pemanfaatan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan prasyarat iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Namun kondisi saat ini kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Tahun 2020 pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

- **Kemampuan mental spiritual**

Kemampuan mental spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemampuan mental spiritual dapat dilihat dari:

- Ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
- Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

2) Masih Tingginya Ketimpangan

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

- **Ketimpangan pendapatan**

  Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik. Pada tahun 2020 angka indeks Gini membaik pada 0,418. Nilai ini masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

  Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 13,5% jumlah penduduk miskin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,92%. Hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

  Upaya peningkatan pelayanan bagi warga miskin perlu dilakukan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. Di tingkat desa, perlu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos). Integrasi SLRT dengan Puskesos bisa menjadi sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah pengembangan industri kreatif. Komoditas industri kreatif yang diproduksi antara lain *furniture,* gerabah, batik, tatah sungging, produk kulit, batik kayu, perak, anyaman, keris dan fashion. Produk-produk tersebut rata-rata dibuat oleh *home industry.* Kualitas industry kreatif Kabupaten Bantul belum optimal. Cakupan Industri kreatif baru mencapai 46,20 % pada 2020 meningkat dari 39,5% di tahun 2016.

Industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Industri kreatif dan sektor pariwisata telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme.

Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 2.348.313 wisatawan dari 5.166.615 wisatawan pada tahun 2019, akibad pandemic covid-19. Perlu upaya untuk memulihkan kunjungan wisatawan pada saat pandemic berakhir dengan menjadikan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif.

Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif, selain sektor industri dan sektor pariwisata di atas, sektor pertanian perlu dioptimalkan terutama dalam penyediaan bahan baku kuliner.

- **Ketimpangan wilayah**

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpotret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru,

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 bagian wilayah perkotaan, yaitu (1) Wilayah Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan sudah tergabung dalam sebuah Aglomerasi Perkotaan yang sangat terikat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Wilayah Pantai Selatan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata dan keistimewaan di Samas dan Parangtritis, terhubung dengan JJLS, (3) wilayah Bantul Barat dan (4) wilayah Bantul Timur.

Penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung 4 bagian wilayah perkotaan di atas perlu mendapat perhatian terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang.

Pada penyediaan infrastrukur pelayanan publik saat ini belum sepenuhnya ramah difabel, baru sedikit kantor pelayanan public sudah ramah difabel.

Dalam upaya terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Tahun 2021 terdapat 6.381 rumah masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, tersisa 2.589. Pembangunan RTLH harus berlanjut agar semua rumah layak huni.

3) Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup

- **Degradasi lingkungan,**

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis

seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa. Harapannya sampah selesai di tingkat desa.

- **Bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi

sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manageman bencana dalam hal ini *Respon Time* 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

4) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penerapan UUCK yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

5.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

⇩

Visi Pembangunan DIY 2017-2022:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

⇩

Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
	pada Seluruh Warga	Demokratis	Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia Dan Difabel
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Bantul dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

MISI RPJPD BANTUL UNTUK RPJMD KE-4 (2020-2025)	MISI RPJMD TAHUN 2021 - 2026
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik dan Bertanggung Jawab	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

MISI RPJPD BANTUL UNTUK RPJMD KE-4 (2020-2025)	MISI RPJMD TAHUN 2021 - 2026
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
				Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80.67	82	82.50	83.50	83.75	84	84.50	84.50
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	n/a	3.24	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.45
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.03	88.03	88.10	88.40	88.80	89.10	89.50	89.50

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.86	73.90	74.01	74.11	74.20	74.29	74.39	74.39
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.17	15.30	15.35	15.42	15.49	15.56	15.63	15.63
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	5	7	9	11	13	13
				Indeks Rasa Aman	Indeks	N/A	N/A	2.70	2.73	2.76	2.79	2.81	2.81
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.80	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12
			Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
	berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.06	4.06	3.9	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	75.13	76.90	78.68	80.46	82.24	82.24
				Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75.01	75.01	75.03	75.05	75.07	75.10	75.20	75.20
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63.02	63.01	62.75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
			Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187.20	181.26	175.51	169.94	164.55	159.33	154.27	154.27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	13.50	13.50	13.77	12.90	12.50	12.05	11.50	11.50
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.12	95.18	95.50	96	96.50	96.75	96.90	96.90

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.78	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

6.1.1. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif.
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi.
6. Banyaknya kelompok seni budaya.
7. Kuatnya tradisi/adat istiadat.
8. Keanekaragaman kuliner.
9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi.
10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah.
11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha.
12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat.

Kelemahan

1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat.
2. Pengangguran cukup tinggi.
3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif.
4. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.

5. Kualitas Pendidikan belum merata.
6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah.
7. Penanganan masalah Kesehatan belum optimal.
8. Ketimpangan infrastruktur wilayah.
9. Pemenuhan layanan dasar belum merata
10. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah.
11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik.
12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%.
13. Jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis Cukup tinggi
14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah.
15. Nilai-nilai budaya luhur daerah mulai hilang.
16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat.
17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi.
18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik.
19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk baru tertangani sebanyak 74,28%.
20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local.
22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola.
23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang).
24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020).

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri.
4. Kemajuan teknologi informasi.
5. Keberadaan Bandara YIA.
6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta.

Ancaman

1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan.
4. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
5. Wilayah rawan bencana.
6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial.
7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda.
8. Tingginya laju urbanisasi.
9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Tabel 6 1 Analisis SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	**KEKUATAN (STRENGTHS)**	**KELEMAHAN (WEAKNESSES)**
	1. Banyaknya destinasi wisata. 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparatur yang meningkat. 5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi 10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah 11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha 12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat	1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat 2. Pengangguran cukup tinggi 3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif. 4. Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel. 5. Kualitas Pendidikan belum merata 6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah 7. Penanganan masalah kesehatan belum optimal 8. Ketimpangan infrastruktur wilayah 9. Belum meratanya pemenuhan layanan dasar 10. perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah 11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik 12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,05% 13. Masih cukup tingginya jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosos 14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah 15. Nilai-nilai luhur budaya daerah mulai hilang 16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat 17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi 18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik 19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%, 20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda

		21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local 22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola. 23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang) 24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**Asumsi Strategi SO**	**Asumsi Strategi WO**
1. Kebijakan pengembangan Kawasan selatan DIY 2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 3. Pengembangan Kawasan peruntukan industri 4. Kemajuan Teknologi Informasi 5. Keberadaan Bandara YIA 6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR 7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat 8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta	1. S4,5 – O4: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2. S4,5-O4: Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum 3. S4,5-O4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 4. S4,5-O4: Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur 5. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah 6. S2,4,5-O4: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 7. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah 8. S4,5-O4: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 9. S4,5-O4: Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 10. S1,2,5,6,8 –O1,2,4,6,7: Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat 11. S3,5,10,11- O3,4,5: Meningkatkan pertumbuhan industri 12. S9,13-O4,7: Meningkatkan pola konsumsi pangan	1. W5,6,9– O4,6,7: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 2. W14-O4,6,7: Meningkatkan kualitas UMKM 3. W8,17,24 - O1,2,3,5:Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur 4. W11,18 – O1,2,3: Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 5. W4,10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif 6. W10 – O4,6: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 7. W10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 8. W20-O4,6,7: Meningkatkan prestasi olahraga 9. W20-O4,6,7: Meningkatkan kualitas pemuda 10. W2,3-O3,5:Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif 11. W2,25-O4,6: Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

	13. S13-O4,5,8 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 14. S9-O1,5,8: Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan 15. S11-O1,2,3,4:Mempermudah investasi dalam berbagai bidang. 16. S2,5-O4,6,7: Pengembangan Potensi Desa 17. S3,5,8,11-O2,4,6,7: Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif	
ANCAMAN (THREATS)	**Asumsi Strategi ST**	**Asumsi Strategi WT**
1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata. 2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. 3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup 5. Wilayah rawan bencana 6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial 7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda 8. Tingginya laju urbanisasi 9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY	1. S5,7,12-T5,6: Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana 2. S2-T7: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3. S3,11-T1Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 4. S10-T2,8: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. W1,23– T3,6: Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran 2. W19-T4,9: Meningkatkan kualitas Pengelolaan persampahan 3. W16-T7,8: Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama 4. W15,21 - T7,8: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 5. W7,12,13-T6:Menguatkan sistem Kesehatan 6. W7,12,13-T6:Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 7. W11-T6: Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Program Unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
   a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
   b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;
   c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
   a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa melalui peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
   b. Pengembangan kapasitas pendidikan dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal;
   c. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
   e. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;
   f. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga;

g. Optimalisasi peran Posyandu dan Posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif;
h. Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
i. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
j. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi;
k. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;
l. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah;
m. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;
n. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air
b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas
c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura
d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif
e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Modernisasi pasar rakyat
g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas

h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
   a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi
   b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman
   c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumberdaya ekonomi dan energi terbarukan
   d. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
   e. Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan
   f. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
   g. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
   a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
   b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial
   c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan
   d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
   e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.

Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Bantul selain mempertimbangkan program unggulan bupati terpilih,

juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah.

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	√√	√	√	√	√
			Pengaturan tata laksana perangkat daerah	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	√√	√√	√√	√	√
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangiunan daerah	√	√	√	√	√
			Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah					
		Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan inovasi pembangunan daerah	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
			Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
		Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pengamanan informasi	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Peningkatan tata kelola kearsipan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		kearsipan						
		Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	√	√	√	√	√
Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	√√	√√	√√	√√	√√
			Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	√√	√√	√√	√√	√√
	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,	√√	√√	√√	√√	√√
			Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	√	√	√	√	√√
		Meningkatkan prestasi olahraga	Fasilitasi minat dan bakat generasi muda	√	√	√	√	√√
			Pembangunan sarana prasarana olah raga	√	√	√	√	√
			Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	√	√	√	√	√√
		Meningkatkan kualitas pemuda	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	√	√	√	√	√√
			Peningkatan kapasitas kepemudaan	√	√	√	√	√√
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan	√	√	√	√	√√
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban	Peningkatan penegakan perda	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran serta	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		masyarakat	masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban					
		Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	√	√	√	√	√
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	√	√	√	√	√
			Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air	√	√	√	√	√
			Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak	√	√	√	√	√
			Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian	√	√	√	√	√
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkaan nilai tambah perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkatan pengawasan dan pengendalaian	√	√	√	√	√
		Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	√	√	√	√	√
			Peningkatan Promosi dan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Kerjasama pariwisata					
			Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata	√√	√	√	√	√
		Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar rakyat/ tradisional	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	√	√	√	√	√
		Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	√	√	√	√	√
		Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	√	√	√	√	√
			Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
			Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	√	√	√	√	√
		Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh kalurahan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro	√√	√√	√√	√√	√√
			Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan	√	√	√	√	√
			Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan	√	√	√	√	√
			Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif	√√	√√	√√	√√	√√
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	√	√√	√√	√	√
			Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang	√	√	√	√	√
			Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
	Terwujudnya lingkungan hidup yang	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan	Penanganan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√	√	√
			Pemulihan fungsi lingkungan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
	berkualitas	kerusakan lingkungan hidup	hidup dan ekosistem					
			Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	√	√	√	√	√
	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	√	√	√	√	√
			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	√	√	√	√	√
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	√	√	√	√	√
			Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	√	√	√	√	√
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√
			Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	√	√	√	√	√
			Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	√	√	√	√	√
Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	√√	√√	√√	√√	√√
			Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel	√	√	√	√	√
			Pembangunan infrastruktur ramah difabel	√	√	√	√	√
	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak	√	√	√	√	√
			Menyediakan Layanan Ramah Anak	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan Ketahanan dan kesejahtreraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√	√	√	√	√

Keterangan:

√√: program prioritas

√ : program reguler

Selanjutnya untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:

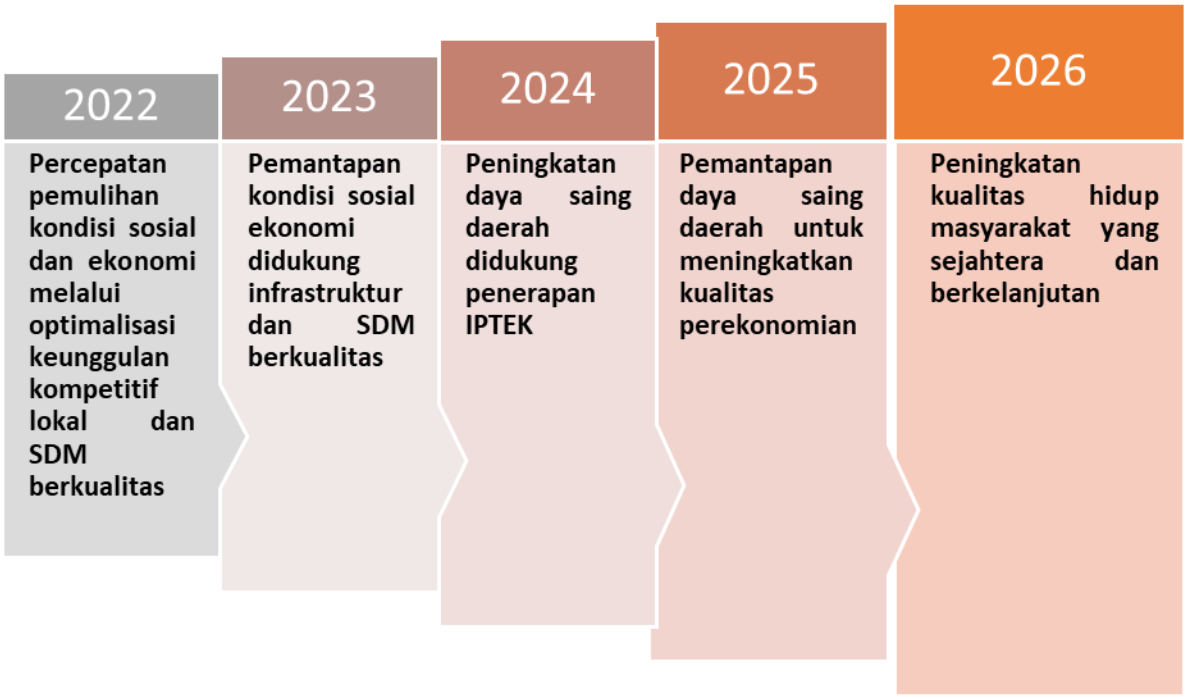

Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif

Konteks pembangunan Kota Kreatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dimana Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah :

a. Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas;
b. Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan
c. Rantai nilai kreasi-produksi-distribusi-konsumsi-konservasi.

Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
1	Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
2	Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
3	Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
4	Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
5	Mekanisme, kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif	v	v	v	v	v	Bimtek dan Pelatihan Industri Kreatif, ISI, Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY
6	Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Lokal Batik, Tatah Sungging, Memasak di Pendidikan Dasar, ISI, SMKI, SMSR, Akademi Teknologi Kulit, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
7	Pusat penelitian	v	v	v	v	v	ISI, Balai Besar

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian.						Batik dan Kerajinan DIY, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
8	Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat professional.	v	v	v	v	v	Gazebo Batik Giriloyo, Koperasi Setyo Bawono, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
9	Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.)	v	v	v	v	v	Giriloyo, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
10	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung.	v	v	v	v	v	Bantul Ekspo, Bantul Juoss, Pentas Wayang Kulit
11	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun	v	v	v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta, pencipta, masyarakat sipil, dan atau akademisi.						
12	Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Jagad, Komunitas Gerabah Bantul, Komunitas Ingkung, Persatuan Dalang Indonesia, Asosiasi Sate Klathak
13	Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	V	Indikasi Geografis Batik dan Gerabah
14	Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Sentra Industri Kecil Menengah, Pembangunan Rumah Produksi Tatah Sungging, Pembangunan Showroom Batik di Wijirejo dan Triharjo, Pembangunan Gazebo Batik Giriloyo, Land Mark Kasongan
15	Kerjasama internasional utama di bidang kreatif yang menjadi perhatian, dikembangkan dengan kota dari berbagai Negara dalam lima tahun			v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir.						
16	Mekanisme dukungan, program, dan proyek yang dilakukan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan mendirikan sinergi antara bidang kreatif yang menjadi perhatian dengan sedikitnya satu bidang kreatif lainnya yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)		v	v	v	v	Promosi/Pameran, PSWG
17	Inisiatif kerjasama internasional dan atau kemitraan yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan sedikitnya dua dari tujuh bidang kreatif yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)			v	v	V	
18	Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi			v	v	V	

Semua kota yang memenuhi indikator tersebut akan bergabung menjadi bagian dari anggota UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). Menurut *Mission Statement Bologna Creative Cities Meeting, Creative Cities Network* bertujuan untuk memperkuat kreasi, produksi, distribusi dan menikmati barang-barang dan layanan budaya pada level lokal, mempromosikan kreativitas dan ekpresi kreatif khususnya di tengah kelompok rentan, termasuk perempuan dan generasi muda; meningkatkan akses dan partisipasi dalam dan untuk kehidupan budaya sama baiknya dengan menikmati barang-barang budaya itu sendiri; serta mengintegrasikan budaya dan industri kreatif ke dalam rencana pembangunan lokal.

Pencapaian Kabupaten Kreatif di dukung oleh pembangunan sektor:

a. Pertanian

Salah satu Program Strategis Nasional bidang pertanian adalah *Food Estate. Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Program *food estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi bahan baku untuk menunjang industri kreatif Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi :

a) Rehabilitasi irigasi pertanian (irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam)
b) Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian
c) Sarana dan prasarana pasca panen
d) Renovasi Puskeswan
e) Pengembangan pakan konsentrat unggas.

Kegiatan di atas didukung rehabilitasi:

1) Bidang Irigasi,
   Rehabilitasi jaringan irigasi

2) Bidang Jalan:
   a) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan
   b) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas jalan.

b. Industri

Produk unggulan industri kreatif yang dimiliki Kabupaten Bantul:

- Kriya: Furniture, Batik, Gerabah, Batik Kayu, Tatah Sungging, Produk Kulit, Perak, Anyaman, Keris, Fashion
- Kuliner: Ingkung, Sate Klathak, Wedang Uwuh, Mie Lethek, Bakpia, Adrem, Peyek Tumpuk, Geplak, Mie Des.

Untuk mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner dilakukan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro, fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil, serta pengembangan klaster industri kreatif.

c. Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata
- pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata
- revitalisasi Daya Tarik Wisata
- akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah
- pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah(DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata desa/kalurahan budaya meliputi :
  a) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai kawasan wisata alam, budaya, pendidikan, dirgantara, religi dan olahraga;
  b) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, agro wisata, olahraga dan Industri;

c) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai kawasan wisata ekonomi kreatif, kerajinan, budaya, pendidikan, sejarah, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition(MICE);

d) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai kawasan wisata kerajinan, sejarah, budaya, kuliner dan epdesaan; dan

e) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai kawasan wisata alam, kuliner, budaya, olahraga, dan kerajinan.

2. Kabupaten Layak Anak :

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh Kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan Kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan dikatakan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Target pencapaian kategori Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak

No	Indikator	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA
2	Nilai KLA	n/a	730	830	890	910	950
3	Kapanewon Layak Anak	11	17	17	17	17	17
4	Kalurahan Layak Anak	n/a	15	30	45	60	75

Dalam upaya mewujudkan target di atas, maka dilakukan beberapa rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyusunan Perda KLA	v				
2	Sosialisasi Perda KLA		v			
3	Pengelolaan KLA Kapanewon dan Kalurahan	v	v	v	v	v
4	Pengelolaan Forum Anak Bantul	v	v	v	v	v
5	Bimbingan teknis administrasi KLA Perlindungan Anak	v	v	v	v	v
6	Monitoring Evaluasi	v	v	v	v	v

Pencapaian Kabupaten Layak Anak didukung :

a. Penyelenggaraan PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran penyelenggaraan PAUD adalah untuk menciptakan PAUD Holistik Integratif yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan.

PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan

kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Satuan PAUD merupakan wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan pengembangan PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kurasi PAUD	75 Lokus Lembaga PAUD	933 Lokus lembaga PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD
3	Penguatan dasar hukum PAUD	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
4	Penguatan kurikulum	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent
5		Penjalinan kemitraan dengan berbagai	Kemitraan PAUD dengan lembaga	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam pendampingan

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pihak	pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	pendampingan tumbuh kembang anak	pendampingan tumbuh kembang anak	tumbuh kembang anak
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
7		Inovasi PAUD	Inovasi PAUD			

b. Penyelenggaraan POSYANDU

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar terpadu yang bersumberdaya masyarakat, dalam arti diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan POSYANDU adalah Peningkatan mutu dan pelayanan Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sasaran Posyandu yang aman, bersih, sehat, nyaman, indah dan universal akses dengan layanan kesehatan, konseling, penganekaragaman pangan, peningkatan ekonomi keluarga.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM

Arah kebijakan pengembangan POSYANDU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU

No	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Melakukan Kurasi	Penentuan 933 Lokus	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana
3	Penguatan dasar hukum	Peningkatan Sarana dan prasarana	Optimalisasi peran posyandu dalam pendataan dan pelayanan kesehatan	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
4	Penguatan SDM	Penguatan Anggaran	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO
5		Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu
7		Inovasi posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu
8			Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
9			Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan

c. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat

mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya mewujudkan Puskesos-SLTR, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dan SK Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM	v					
2	Advokasi anggaran: Kelengkapan kerja SDM dan insentif		v				
3	Inovasi : One Stop Service Best Practice Tanggul Bantul			v			
4	Festival Puskesos : replikasi model Puskesos 75 kalurahan				v		
5	Revitalisasi Puskesos: Bimbingan lanjut Puskesos, supervisi, evaluasi, inovasi berkelanjutan					v	v

3. Permukiman Bersih dan Sehat

Pembangunan sanitasi yang menyeluruh, berkualitas, dan berkelanjutan akan mewujudkan permukiman bersih dan sehat. Kegiatan pembangunan sanitasi dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
b. Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah;
c. Gerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat;
d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS;
e. Penggalangan dan upaya dukungan pendanaan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan sanitasi;

Pembangunan sanitasi meliputi : penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainasi.

Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
Penanganan Air Limbah Domestik	Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan	Tersusunnya regulasi pengelolaan air limbah
		Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL sebanyak 11 lokasi
Pengelolaan Sampah	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2025
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah	Meningkatnya Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2025

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
Penanganan Drainasi	Peningkatan kualitas pelayanan sub sektor drainase	Meningkatnya pelayanan drainase dengan mengurangi genangan pada daerah rawan sebesar 110 ha sampai tahun 2025
	Peningkatan pembiayaan melalui dana APBD (Kabupaten Bantul dan DIY) dan kemitraan	Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta/lembaga/masyarakat/ program pada tahun 2025
	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2025

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Dari tabel tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di atas, maka ditetapkan target penanganan air limbah domestik dan penanganan drainase sebagai berikut :

Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Air limbah domestic					
a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)	94.48%	94.11%	93.74%	93.37%	93.00%
b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T)	5.52%	5.89%	6.26%	6.63%	7.00%
2. Drainase (bebas genangan/ banjir)					
a. Risiko Sangat Tinggi	50%	62.5%	74.5%	87%	100%
b. Risiko Tinggi	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Target pengelolaan persampahan sesuai dengan Rencana Induk Persampahan sebagai berikut

Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persampahan					
a. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	20,91%	21,35%	21,78%	22,37%	22,81%
b. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	42,42%	44,16%	45,87%	46,86%	50,07%

Sumber : Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul, 2021

4. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 49 peraturan pelaksana turunannya yang terdiri dari 45 Peraturan pemerintah dan 4 Peraturan Presiden berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perbup yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perda atau Perbup yang disesuaikan antara lain:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) karena akan menimbulkan duplikasi perizinan pemanfaatan ruang.
2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa karena sudah tidak

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing karena sudah tidak relevan dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021
4. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
5. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Gudang
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah disiapkan untuk mengatur rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar.

Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							x											
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.0	DINAS

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	capaian SPM		indeks	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		00.000	KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp768.00 0.000	1 indeks	Rp785.00 0.000	1 indeks	Rp3.771.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.72 0.400	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp761.00 0.000	1 indeks	Rp2.901.4 17.064	1 indeks	Rp5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.0	DINAS

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	capaian SPM		indeks	0.000		0.000	indeks	0.000		0.000		0.000		00.000	KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tangga di seluruh kabupaten yang layak														
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)														
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL

6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan

Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu (1) Kelembagaan; (2) Kebudayaan; (3) Pertanahan; dan (4) Tata Ruang.

1. Kelembagaan

Implementasi kewenangan kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi - strategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

a) Mempedomani nilai–nilai luhur budaya DIY dan internalisasi keistimewaan setiap ASN sebagai penyelenggara pemerintahan;
b) Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memperkuat keistimewaan;
c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
d) Sinergitas dengan kelembagaan nasional;
e) Menerapkan prinsip *rightsizing*;
f) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
g) Mendesain lembaga dan ketatalaksanaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.

2. Kebudayaan

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tindak lanjut atas kewenangan urusan kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang bertujuan untuk:

a) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
b) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
c) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
d) mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, maka nomenklatur Kalurahan Budaya dimaknai sebagai Desa/Kalurahan Budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Dalam kerangka Kalurahan Mandiri, Kabupaten Bantul akan mewujudkan Kalurahan Pamor Budaya.

Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah

Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Kalurahan Pamor Budaya (versi Bantul) dimaknai sama dengan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya (versi DIY). Dengan demikian indikator yang dipergunakan serta PD pengampunya, meliputi:

a) Desa/Kalurahan Budaya : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
b) Desa Wisata : Dinas Pariwisata
c) Rintisan Desa Preneur : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
d) Desa Prima : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

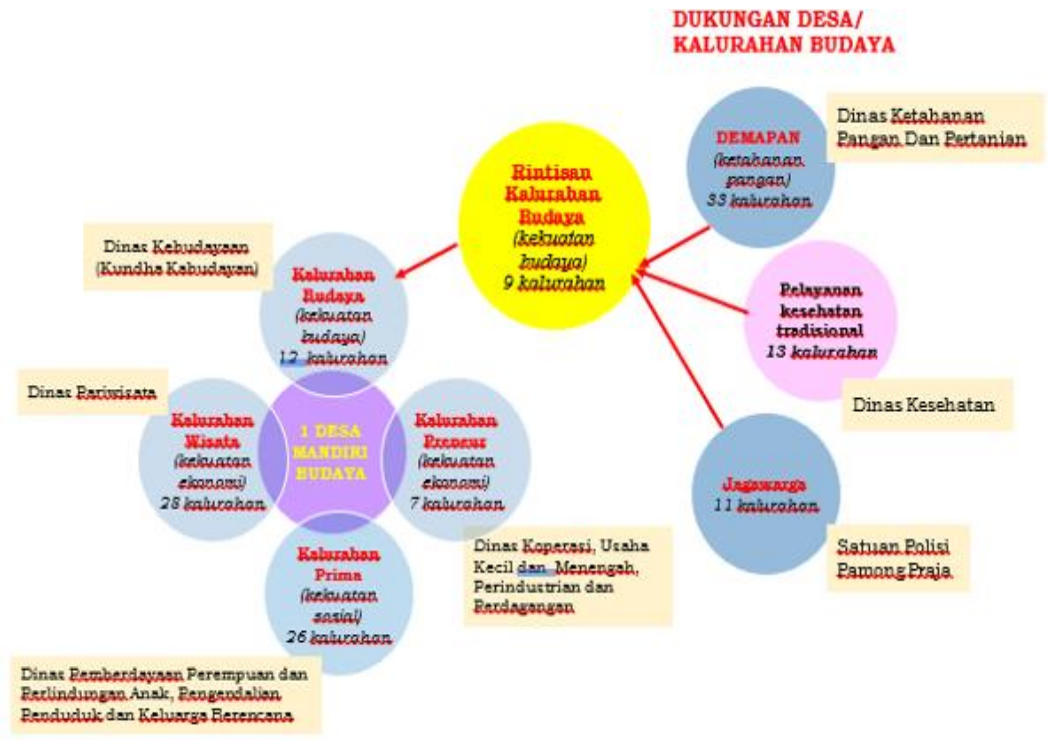

Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Desa/Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata dan ekonomi. Sementara itu aspek ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

a. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Demapan adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Demapan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program

No	KALURAHAN	TAHAPAN DEMAPAN
6	Wukirsari	Exit Program
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan
Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi : tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Di Kabupaten Bantul rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dengan anggaran Dana Keistimewaan Provinsi DIY telah digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di

puskesmas dan padukuhan percontohan. Pelayanan dalam gedung yang dikembangkan yaitu : (1) Akupuntur; (2) Akupresur; (3) Obat Tradisional; (4) Pijat Bayi/Balita, dan (5) Meditasi. Sedangkan untuk pelayanan luar gedung yang bersifat pemberdayaan masyarakat yaitu berupa Asuhan Mandiri Akupresur dan Asuhan Mandiri Ramuan Jamu. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2021 telah mencakup 7 puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, Imogiri I, Sedayu II, Jetis II, Pajangan dan Piyungan serta 12 padukuhan percontohan.

Rencana pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2026 mencakup 17 Puskesmas, dan satu Griya Sehat yang dibangun dengan sharing sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas

No	Tahun	Puskesmas	Keterangan
1	2022	1. Pajangan 2. Sewon II	
2	2023	1. Kasihan I 2. Dlingo II 3. Griya Sehat	Usulan pembebasan lahan Griya Sehat dengan Dana Keistimewaan Tahun 2023
3	2024	1. Dlingo I 2. Pandak II 3. Griya Sehat	Usulan pembangunan Griya Sehat dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024
4	2025	1. Imogiri II 2. Srandakan 3. Griya Sehat	Operasional Griya Sehat dengan anggaran APBD Kabupaten Bantul
5	2026	1. Sedayu II 2. Sanden 3. Griya Sehat	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

c. Jagawarga

Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019 menjelaskan definisi Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan

keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan jagawarga berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, sekelompok orang dapat membentuk Jaga Warga di tingkat padukuhan dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.

Fungsi jaga warga yaitu 1) mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; 2) melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan 3) melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan dan pengukuhan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021 telah mencakup 262 padukuhan, dan akan dilakukan pembentukan Jaga warga secara bertahap sehingga pada tahun 2026 di seluruh padukuhan telah terdapat Jaga Warga. Pemetaan pembentukan Jaga warga di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pembentukan Jaga Warga	20 padukuhan	150 padukuhan	200 padukuhan	200 padukuhan	109 padukuhan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

3. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan dinyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh

kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang ada di Kabupaten Bantul sudah selesai dilaksanakan yaitu sejumlah 4.088 bidang tanah. Sedangkan pendaftaran tanah desa yang sudah mendapatkan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan sebagai berikut:

Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
1	Sumberagung	Jetis	13 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 3 Tahun 2019
2	Imogiri	Imogiri	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 1 Tahun 2019
4	Potorono	Banguntapan	20 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
5	Terong	Dlingo	22 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
6	Wonokromo	Pleret	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 6 Tahun 2019
7	Trimurti	Srandakan	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 4 Tahun 2019
8	Mangunan	Dlingo	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
9	Kebonagung	Imogiri	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 4 Tahun 2019
10	Tirtonirmolo	Kasihan	20 Maret 2019	21 Mei 2019	No. 4 Tahun 2019
11	Guwosari	Pajangan	10 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
12	Tirtosari	Kretek	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
13	Muntuk	Dlingo	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 2 Tahun 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	13 Agustus 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2019
15	Argorejo	Sedayu	28 Agustus 2019	24/09/2019	No. 7 Tahun 2019
16	Tamanan	Banguntapan	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
17	Baturetno	Banguntapan	11 Oktober 2019	14 Oktober 2019	No. 7 Tahun 2019

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	18 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 8 Tahun 2019
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 11 Tahun 2019
20	Triwidadi	Pajangan	28 Agustus 2019	30 September 2019	No. 7 Tahun 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 5 Tahun 2019
22	Wukirsari	Imogiri	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 11 Tahun 2019
23	Karangtalun	Imogiri	24 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 05 Tahun 2019
24	Pleret	Pleret	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 8 Tahun 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	27 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 07 Tahun 2019
26	Argodadi	Sedayu	28 September 2019	31 Desember 2019	No. 07 Tahun 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 04 Tahun 2019
28	Panggungharjo	Sewon	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 5 Tahun 2019
29	Girirejo	Imogiri	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No.6 Tahun 2019
30	Parangtritis	Kretek	28 Agustus 2019	24 September 2019	No. 10 Tahun 2019
31	Srigading	Sanden	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 2 Tahun 2019
32	Gadingsari	Sanden	02 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 1 Tahun 2020 (4)
33	Tirtohargo	Kretek	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 04 Tahun 2020 (4)
34	Triharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
35	Jagalan	Banguntapan	11 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 06 Tahun 2020 (4)
36	Sriharjo	Imogiri	14 September 2020	24 September 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
37	Sendangsari	Pajangan	22 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
38	Temuwuh	Dlingo	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
39	Argomulyo	Sedayu	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
40	Poncosari	Srandakan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 2 Tahun 2020 (4)
41	Donotirto	Kretek	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
42	Panjangrejo	Pundong	29 September 2020	12 Oktober 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
43	Karangtengah	Imogiri	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
44	Ngestiharjo	Kasihan	14 September 2020	24 September 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
45	Srihardono	Pundong	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
46	Caturharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
47	Singosaren	Banguntapan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
48	Trirenggo	Bantul	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
49	Murtigading	Sanden	23 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
50	Segoroyoso	Pleret	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
51	Seloharjo	Pundong	14 September 2020	24 September 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
52	Bawuran	Pleret	18 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
53	Patalan	Jetis	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
54	Bangunjiwo	Kasihan	04 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
55	Tamantirto	Kasihan	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2021 (4)
56	Wijirejo	Pandak	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
57	Sabdodadi	Bantul	18 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 3 Tahun 2021 (4)
58	Palbapang	Bantul	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
59	Canden	Jetis	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2020 (4)
60	Srimulyo	Piyungan	14 September 2020	24 September 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
61	Argosari	Sedayu	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 02 Tahun 2021 (4)
62	Trimulyo	Jetis	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
63	Wonolelo	Pleret	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
64	Gadingharjo	Sanden	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
65	Bantul	Bantul	15 April 2020	06 Mei 2020	No. 4 Tahun 2020 (4)
66	Srimartani	Piyungan	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 4 Tahun 2021 (4)
67	Selopamioro	Imogiri	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
68	Pendowoharjo	Sewon	18 November 2020	09 Februari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
69	Timbulharjo	Sewon	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
70	Jambidan	Banguntapan	31 Desember 2020	22 Januari 2021	No. 01 Tahun 2021 (4)
71	Ringinharjo	Bantul	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 02 Tahun 2021 (4)
72	Dlingo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2020 (4)

NO.	KALURAHAN	KAPANEWON	KETERANGAN		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
73	Bangunharjo	Sewon	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
74	Gilangharjo	Pandak	05 September 2019	28 Oktober 2019	No. 2 Tahun 2021 (4)
75	Wirokerten	Banguntapan	15 April 2020	06 Mei 2020	*

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Sementara itu untuk tanah yang belum memiliki Peraturan Desa/ Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan akan dilakukan pendaftaran tanah. Rencana pendaftaran tanah kalurahan pada tahun 2021 – 2026 akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

Inventarisasi Tanah Kalurahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	1.500	500	500	500	500

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

4. Tata Ruang

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut SRS Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. SRS Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada tanah bukan Keprabon, yang terletak di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	KALURAHAN	PENANDA SRS
A.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon**	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggungharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis
B.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon**	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Pemanfaatan ruang pada SRS yang diperbolehkan meliputi :

Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
1.	Makam Raja-Raja di Imogiri	Zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya. Zona penyangga antara lain: 1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa.
2.	Sumbu filosofi	1. pemanfaatan ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan 2. pemanfaatan ruang pada satuan ruang Sumbu Filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi; b. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
		dari batas ruang milik jalan; dan c. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.
3.	Masjid dan makam Raja Mataram di Kotagede	1. kegiatan ekonomi skala kecil; 2. wisata budaya dan sejarah; 3. *home stay*; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4.	Masjid Pathok Negoro	1. kegiatan ekonomi skala masyarakat; 2. wisata budaya dan sejarah; dan 3. pendidikan dan pengembangan budaya
5.	Samas – Parangtritis	1. pembangunan pelindung pantai; 2. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas; 3. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; 4. penangkapan hasil laut; 5. pangkalan pendaratan ikan; 6. pengembangan energi terbarukan; 7. pendidikan dan penelitian; 8. pariwisata terbatas dan minat khusus; 9. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai; 10. pembangunan fasilitas umum; dan 11. pengembangan sistem mitigasi bencana.
6.	Kerto – Pleret	1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Sumber: RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2021

6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan pertengahan Juni 2021 belum ada

tanda pandemi akan berakhir. Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi.

Strategi ke depan yang dilakukan adalah dengan penguatan layanan Kesehatan, dengan arah kebijakan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga dan optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan.

Di tingkat kabupaten dengan meneruskan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keberhasilan mengatasi pandemi bertumpu pada masyarakat, maka secara preventif sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas akan terus dikampanyekan. Secara konsisten dilakukan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) pengetesan, pelacakan, isolasi/karantina, dan pengobatan, juga didorong semakin tinggi cakupan masyarakat yang mendapat suntikan vaksin covid.

Secara kuratif dengan penguatan sistem layanan kesehatan, layanan Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid(RSLKC) dan Shelter. Memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan, ketersediaan obat, sumberdaya manusia, dan alat pelindung diri.

Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi

Pemulihan perekonomian dilakukan dengan:

1. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas;
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan dengan arah kebijakan optimalisasi

pengelolaan Kawasan Industri Piyungan dan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;

3. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa, modernisasi pasar rakyat/ tradisional, peningkatan kualitas perkoperasian;
4. Mempermudah investasi dalam berbagai bidang dengan penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
5. Pengembangan SDM Industri Kreatif dengan penyiapan tenaga kerja kompetitif.

6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Kebijakan pembangunan/rehabilitasi gedung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pembangunan/ rehabilitasi gedung pada kurun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Shelter Kessos	1.700	-	-	-	-	-	- Dinsos P3A - Melanjutkan pembangunan tahun 2020
2	RS tipe D	5.000	-	10.000	-	-	-	- Dinas Kesehatan - Melanjutkan pembangunan tahun 2018
3	MPP	-	3000	-	-	-	-	DPMPT dan DPUPKP

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya	400	2000	2000	2000	2000	2000	- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Usul Dana Keistimewaan
5	Rumah Dinas Wabup	-	4.500	-	-	-	-	DPUPKP
6	Pembangunan Rumdin Kajari	-	1.500	-	-	-	-	DPUPKP
7	Pembangunan DPRD	-	-		-	60.000	60.000	DPUPKP
8	Rehabilitasi Kantor PDAM	-	-	4500	4000	-	-	DPUPKP
9	Pembangunan Gedung Metrologi	-	-	2000	-	-	-	DPUPKP
10	Pembangunan TPR	-	-	-	-	4000	-	DPUPKP
11	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	-	-	3000	-		-	DPUPKP
12	Pembangunan Kantor Baru 1 unit/tahun	-	-	10.000	10.000	-	10.000	DPUPKP
13	Intermediate Treatment Facility (ITF)	-	-	2500	-	-	-	DPUPKP
14	Kantor Baznas	-	-	1.000	-	-	-	DPUPKP
15	Taman Budaya	-	-	70.000	30.000	10.000	-	Disnas Kebudayaan dan DPUPKP
16	Rehabilitasi UPT DLLAJ	-	-	2.000	-	-	-	Dinas Perhubungan dan DPUPKP
17	Rumah Pemotongan Hewan	-	-	8.000	-	-	-	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Usul Dana Keistimewaan
18	Pelataran Bekas pasar lama Imogiri	-	-	-	13.500	-	-	- DPUPKP - Usul Dana Keistimewaan
19	Tempat Evakuasi Sementara Bulak Makbul	-	-	-	-	5.000	-	- BPBD - Usul Dana Keistimewaan
20	Pembangunan UPT Persampahan	-	-	-	2000	-	-	DLH
21	Balai Benih Ikan	-	-	-	2000	-	-	Dinas Kelautan
22	Laboratorium Pertanian	-	-	-	-	1500	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	-	6400	-	Dinas Kesehatan
	Jumlah	**7.100**	**11.000**	**115.000**	**65.500**	**88.900**	**72.000**	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

6.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi

acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Misi 1 : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima**															
			Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00 (BB)	80,00 (BB)		82,00 (BB)		82,5 (BB)		83,25 (BB)		83,75 (BB)		83,75 (BB)		
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315		4,1815		4,2315		4,2815		4,3315		4,3315		SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	Rp14.208.911.120	83 Angka	Rp10.249.528.900	83 Angka	Rp11.331.547.240	83 Angka	Rp10.800.822.664	83 Angka	Rp11.784.585.000	83 Angka	Rp58.375.394.924	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	92 Persen	92 Persen	Rp1.043.927.620	92 Persen	Rp1.151.371.000	92 Persen	Rp1.266.508.100,00	92 Persen	Rp1.393.158.910,00	92 Persen	Rp1.532.490.000,00	92 Persen	Rp6.387.455.630	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Daerah (EKPPD)														
				Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	Rp442.575.000	100 Persen	Rp550.000.000	100 Persen	Rp580.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp620.000.000	100 Persen	Rp2.787.575.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp3.723.619.270	100 Persen	Rp4.857.000.000	100 Persen	Rp5.342.700.000	100 Persen	Rp5.876.970.000	100 Persen	Rp5.375.000.000	100 Persen	Rp25.175.289.270	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp239.850.000	100 Persen	Rp553.207.500	100 Persen	Rp666.046.500	100 Persen	Rp714.387.650	100 Persen	Rp780.000.000	100 Persen	Rp2.953.491.650	SEKRETARIAT DAERAH
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 Persen	80 Persen	Rp1.095.088.990	80 Persen	Rp2.169.305.600	80 Persen	Rp2.386.236.160	80 Persen	Rp2.624.859.776	80 Persen	Rp2.663.111.000	80 Persen	Rp10.938.601.526	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	0 Persen	87,5 Persen	261.050.000	88 Persen	261.050.000	88,5 Persen	261.050.000	89 Persen	261.050.000	89,5 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89.50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80.5 Persen	81 Persen	150.000.000	82 Persen	200.000.000	83 Persen	230.000.000	84 Persen	245.000.000	85 Persen	250.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI	Nilai Akuntabilitas	83 angka	84 Angka	Rp28.007.830.550	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp34.625.814.130	85 Angka	Rp37.263.395.543	85 Angka	Rp40.989.735.097	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	80 Persen	82 Persen	Rp14.943.253.450	84 Persen	Rp13.013.911.337	86 Persen	Rp11.035.494.870	88 Persen	Rp8.316.640.457	90 Persen	Rp9.980.250.903	90 Persen	Rp57.289.551.018	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85,5 Angka	Rp1.595.755.060	86 Angka	Rp1.675.542.813	86,5 Angka	Rp1.759.319.954	87 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp1.759.319.954	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	90 Persen	95 Persen	Rp330.502.000	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp506.413.800	100 Persen	Rp554.065.000	100 Persen	Rp601.315.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	100 Persen	Rp2.351.135.980	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp3.475.219.775	100 Persen	Rp4.348.590.929	100 Persen	Rp4.646.105.575	100 Persen	Rp17.938.226.189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	95 Persen	95 Persen		96 Persen		96 Persen		97 Persen		97 Persen		97 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD	100 Persen	100 Persen	Rp1.572.022.220	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp8.339.577.877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMBANGUNAN DAERAH	bidang pemerintahan dan pembangunan manusia														
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	82,43 Angka	Rp98.789.110.760	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,55 Angka	Rp102.195.950.000	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	82,65 Angka	Rp105.113.512.700	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	7 Persen	20 Persen	Rp381.726.000	40 Persen	Rp741.084.500	60 Persen	Rp741.084.500	75 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	0 3	0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	n/a	30 Persen	Rp8.953.282.240	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp6.377.996.500	32 Persen	Rp6.426.537.800	32 Persen	Rp6.527.537.800	32 Persen	Rp34.814.116.440	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Peta Kompetensi ASN	n/a	6 Persen		9 Persen		12 Persen		15 Persen		18 Persen		18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		MANUSIA
				Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	n/a	100 Persen	Rp230.343.740	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp1.221.973.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	59 Persen	60 Persen	Rp215.832.480	61 Persen	Rp250.000.000	62 Persen	Rp300.000.000	63 Persen	Rp400.000.000	64 Persen	Rp700.000.000	64 Persen	Rp1.865.832.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 Persen	69 Persen	Rp19.236.000	70 Persen	Rp50.000.000	71 Persen	Rp1.133.865.000	72 Persen	Rp152.673.000	73 Persen	Rp167.080.000	73 Persen	Rp1.522.854.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,14 Angka	84,5 Angka	Rp684.327.504.740	85 Angka	Rp709.274.223.000	85 Angka	Rp716.438.030.000	85,5 Angka	Rp730.029.284.000	85,5 Angka	Rp737.972.504.000	85,5 Angka	Rp3.578.041.545.740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	80 Persen	Rp299.595.500	83 Persen	Rp500.000.000	85 Persen	Rp550.000.000	88 Persen	Rp605.000.000	90 Persen	Rp665.500.000	90 Persen	Rp2.620.095.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp342.169.016.830	Tepat Waktu	Rp324.547.097.500	Tepat Waktu	Rp325.811.451.000	Tepat Waktu	Rp318.197.011.000	Tepat Waktu	Rp323.284.972.890	Tepat Waktu	Rp1.634.009.549.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	87,84 Persen	89 Persen		89 Persen		90 Persen		90 Persen		91 Persen		91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	Rp1.262.739.710	100 Persen	Rp1.470.000.000	100 Persen	Rp1.542.000.000	100 Persen	Rp2.114.000.000	100 Persen	Rp1.692.000.000	100 Persen	Rp8.080.739.710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	0 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	Rp10.302.989.220	100 Persen	Rp12.193.391.500	100 Persen	Rp12.827.418.000	100 Persen	Rp13.430.197.000	100 Persen	Rp14.082.037.110	100 Persen	Rp62.836.032.830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Sasaran Daerah	Nilai Rata-Rata	82,00	82,50		83,50		83,75		84,00		84,50		84,50		INSPEKTORAT

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK														DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,93 angka	83 Angka	Rp2.141.908.600	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp3.695.858.239	83 Angka	Rp4.260.897.302	83 Angka	Rp5.176.587.857	83 Angka	Rp18.130.253.801	INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	0	0	0	38,89 Persen	219.857.000	44,44 Persen	241.842.700	50 Persen	266.026.970	55,56 Persen	292.629.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	n/a	12 Persen	Rp194.072.500	13 Persen	Rp303.445.378	14 Persen	Rp449.410.881	15 Persen	Rp643.072.513	16 Persen	Rp1.003.533.390	16 Persen	Rp2.593.534.663	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 Persen	Rp1.293.514.900	25 Persen	Rp1.432.401.820	30 Persen	Rp1.710.576.180	35 Persen	Rp2.367.871.214	40 Persen	Rp2.701.817.752	40 Persen	Rp9.506.181.867	INSPEKTORAT DAERAH
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,24	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		3,45		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN	Persentase masyarakat yang	50 Persen	70 Persen	Rp1.490.327.740	71 Persen	Rp1.639.360.514	72 Persen	Rp1.671.101.718	73 Persen	Rp1.698.953.412	74 Persen	Rp1.868.848.754	74 Persen	Rp8.368.592.138	DINAS KOMUNIKASI

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KOMUNIKASI PUBLIK	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten														DAN INFORMATIKA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	86 Angka	Rp1.938.603.598	87 Angka	Rp2.132.464.458	89 angka	Rp2.195.710.604	90 Angka	Rp2.415.281.266	92 Angka	Rp2.695.307.791	92 Angka	Rp11.377.367.717	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	n/a	1,29 Angka	Rp8.931.074.062	1.43 Angka	Rp9.824.181.468	1,57 Angka	Rp10.206.599.615	1,57 Angka	Rp10.592.259.576	1,58 Angka	Rp11.251.485.534	1,58 Angka	Rp50.805.600.255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 Persen	100 Persen	Rp155.150.000	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp207.968.750	100 Persen	Rp228.765.625	100 Persen	Rp251.642.187	100 Persen	Rp1.014.191.562	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah														
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60 Persen	65 Persen	Rp1.184.565.600	70 Persen	Rp1.332.186.560	75 Persen	Rp1.374.185.313	80 Persen	Rp1.301.129.621	81 Persen	Rp2.508.509.884	81 Persen	Rp7.700.576.978	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10		88,40		88,80		89,10		89,50		89,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	Rp604.839.580	100 Persen	Rp463.100.000	100 Persen	Rp399.410.000	100 Persen	Rp439.351.000	100 Persen	Rp417.610.000	100 Persen	Rp2.324.310.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	100 Persen	Rp102.785.120	100 Persen	Rp96.800.000	100 Persen	Rp106.480.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp540.321.120	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83 Angka	Rp3.270.576.670	83.25 Angka	Rp3.527.457.358	83.50 Angka	Rp3.764.203.094	83.75 Angka	Rp4.029.945.929	84 Angka	Rp5.157.228.194	84 Angka	Rp19.749.411.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99 Persen	99,81 Persen	Rp626.137.394	99,82 Persen	Rp674.715.761	99,83 Persen	Rp735.641.493	99,84 Persen	Rp792.979.817	99,85 Persen	Rp872.277.799	99,85 Persen	Rp3.701.752.263	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	96 Persen	Rp431.856.669	96,1 Persen	Rp461.006.962	96,2 Persen	Rp500.562.813	96,3 Persen	Rp538.619.094	96,4 Persen	Rp592.481.004	96,4 Persen	Rp2.524.526.543	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99 Persen	99,5 Persen	Rp376.741.530	99,6 Persen	Rp900.380.308	99,7 Persen	Rp441.413.428	99,8 Persen	Rp479.554.771	99,9 Persen	Rp520.910.248	99,9 Persen	Rp2.719.000.285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	99 Persen	100 Persen	Rp89.968.737	100 Persen	Rp98.965.611	100 Persen	Rp108.862.172	100 Persen	Rp119.748.389	100 Persen	Rp113.902.755	100 Persen	Rp531.447.664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANTUL
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	85 Angka	Rp537.101.000	85 Angka	Rp679.013.140	85 Angka	Rp916.883.140	85 Angka	Rp1.159.235.140	85 Angka	Rp1.719.035.140	85 Angka	Rp5.011.267.560	KAPANEWON BANTUL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	90 Persen	Rp31.520.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp163.424.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100	100 Persen	Rp84.800.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp352.600.000	KAPANEWON BANTUL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp143.690.000	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp844.753.440	KAPANEWON BANTUL
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,59 Angka	80 Angka	Rp556.197.000	81 Angka	Rp641.466.500	82 Angka	Rp795.269.000	83 Angka	Rp976.385.000	84 Angka	Rp1.225.508.000	84 Angka	Rp4.194.825.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	95 Angka	Rp41.187.500	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka	Rp81.000.000	95 Angka	Rp115.000.000	95 Angka	Rp174.500.000	95 Angka	Rp482.437.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp125.436.000	91 Persen	Rp137.450.000	92 Persen	Rp168.000.000	93 Persen	Rp172.000.000	94 Persen	Rp255.000.000	94 Persen	Rp857.886.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	100%	100 Persen	Rp91.653.500	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen	Rp131.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp270.000.000	100 Persen	Rp734.307.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp5.000.000	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen	Rp21.000.000,00	100 Persen	Rp32.000.000,00	100 Persen	Rp63.000.000,00	100 Persen	Rp131.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON DLINGO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON DLINGO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	80 Angka	Rp564.587.500	80 Angka	Rp681.232.000	80 Angka	Rp830.000.000	80 Angka	Rp992.239.000	80 Angka	Rp1.537.926.000	80 Angka	Rp4.605.984.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp31.995.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp90.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp145.000.000	100 Persen	Rp421.995.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	100 Persen	Rp138.447.500	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp210.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp1.003.447.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp104.587.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp694.587.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Stabilitas	100 Persen	100 Persen	Rp10.980.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp38.710.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp139.690.000	KAPANEWON DLINGO

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON IMOGIRI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80 Angka	Rp586.982.500	81 Angka	Rp633.681.000	81 Angka	Rp728.092.000	82 Angka	Rp864.621.000	82 Angka	Rp1.370.710.000	82 Angka	Rp4.184.086.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	Rp37.200.000	96 Persen	Rp55.000.000	97 Persen	Rp80.000.000	98 Persen	Rp125.000.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp452.200.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	95 Persen	Rp188.122.500	96 Persen	Rp210.000.000	97 Persen	Rp280.000.000	98 Persen	Rp341.000.000	100 Persen	Rp390.000.000	100 Persen	Rp1.409.122.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	95 Persen	Rp49.750.000	96 Persen	Rp130.000.000	97 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp205.000.000	100 Persen	Rp724.750.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp18.600.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp93.000.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp371.600.000	KAPANEWON IMOGIRI
4	0	0	PROGRAM	Persentase	n/a	100	Rp45.300.	100	Rp66.040.	100	Rp66.040.	100	Rp66.040.00	100	Rp66.040.00	100	Rp309.46	KAPANEWON

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	4	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas		Persen	000	Persen	000	Persen	000	Persen	0	Persen	0	Persen	0.000	JETIS
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON JETIS
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp577.192.500	90 Angka	Rp663.568.500	90 Angka	Rp895.779.500	90 Angka	Rp1.152.411.500	90 Angka	Rp1.722.260.500	90 Angka	Rp5.011.212.500	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp25.475.000	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp138.225.000	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp130.585.000	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp775.651.000	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp119.087.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp651.137.500	KAPANEWON JETIS
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp15.000.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp36.000.000	KAPANEWON JETIS
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KRETEK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,16 Angka	80 Angka	Rp623.496.000	81 Angka	Rp520.847.000	81 Angka	Rp634.537.000	82 Angka	Rp840.830.000	82 Angka	Rp985.535.000	84 Angka	Rp3.605.245.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp56.700.000	90 Persen	Rp100.000.000	91 Persen	Rp104.000.000	91 Persen	Rp108.000.000	92 Persen	Rp250.000.000	94 Persen	Rp618.700.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp135.000.000	82 Persen	Rp173.000.000	83 Persen	Rp217.000.000	85 Persen	Rp229.000.000	87 Persen	Rp341.000.000	87 Persen	Rp1.095.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	87 Persen	Rp73.000.000	88 Persen	Rp135.000.000	89 Persen	Rp197.000.000	90 Persen	Rp206.000.000	92 Persen	Rp315.000.000	92 Persen	Rp926.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp4.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp16.000.000	100 Persen	Rp18.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON KRETEK
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp509.460.000	KAPANEWON KASIHAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KASIHAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	85 Angka	Rp624.412.800	85 Angka	Rp705.586.439	85 Angka	Rp850.321.527	85 Angka	Rp953.380.527	85 Angka	Rp1.280.023.712	85 Angka	Rp4.413.725.005	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp60.147.000	100 Persen	Rp61.681.100	100 Persen	Rp84.569.320	100 Persen	Rp144.569.320	100 Persen	Rp214.820.257	100 Persen	Rp565.786.997	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp98.440.367	90 Persen	Rp111.462.477	90 Persen	Rp134.306.972	90 Persen	Rp174.306.972	90 Persen	Rp254.966.087	90 Persen	Rp773.482.875	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	90 Persen	Rp40.146.000	90 Persen	Rp35.679.800	90 Persen	Rp73.367.760	90 Persen	Rp103.367.760	90 Persen	Rp164.198.151	90 Persen	Rp416.759.471	KAPANEWON KASIHAN
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	90 Persen	Rp46.777.833	90 Persen	Rp89.301.184	90 Persen	Rp117.713.421	90 Persen	Rp147.713.421	90 Persen	Rp215.064.793	90 Persen	Rp616.570.652	KAPANEWON KASIHAN
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp503.750.000	100 Persen	Rp595.188.000	100 Persen	Rp807.961.000	100 Persen	Rp989.991.000	100 Persen	Rp1.474.032.000	100 Persen	Rp4.370.922.000	KAPANEWON PANDAK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp45.300.000	82 Persen	Rp66.040.000	83 Persen	Rp66.040.000	84 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PANDAK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	85 Persen	80 Angka		81 Angka	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	83 Angka	Rp50.000.000	83 Angka	Rp50.000.000	83 Angka	Rp250.000.000	KAPANEWON PANDAK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	89 Persen	Rp32.650.000	90 Persen	Rp37.900.000	90 Persen	Rp46.250.000	90 Persen	Rp66.600.000	90 Persen	Rp81.500.000	90 Persen	Rp264.900.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	82 Persen	Rp179.895.000	84 Persen	Rp224.935.000	86 Persen	Rp238.110.000	88 Persen	Rp266.950.000	88 Persen	Rp303.500.000	88 Persen	Rp1.213.390.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 Persen	82 Persen	Rp94.850.000	84 Persen	Rp134.850.000	86 Persen	Rp134.850.000	88 Persen	Rp149.000.000	88 Persen	Rp184.850.000	88 Persen	Rp698.400.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp6.310.000	100 Persen	Rp8.400.000	100 Persen	Rp18.400.000	100 Persen	Rp22.500.000	100 Persen	Rp26.750.000	100 Persen	Rp82.360.000	KAPANEWON PANDAK
																92		
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	95 Persen	Rp45.300.000	95 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PUNDONG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp399.541.000	90 Angka	Rp525.870.520	90 Angka	Rp728.127.745	90 Angka	Rp953.350.684	90 Angka	Rp1.479.373.976	90 Angka	Rp4.086.263.925	KAPANEWON PUNDONG

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp32.012.500	90 Persen	Rp29.974.875	90 Persen	Rp31.473.619	90 Persen	Rp33.047.299	90 Persen	Rp34.699.664	90 Persen	Rp161.207.957	KAPANEWON PUNDONG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 Persen	Rp210.794.000	80 Persen	Rp215.638.605	80 Persen	Rp226.420.535	80 Persen	Rp237.741.712	80 Persen	Rp249.628.640	80 Persen	Rp1.140.223.492	KAPANEWON PUNDONG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp169.492.500	90 Persen	Rp169.916.250	90 Persen	Rp178.412.063	90 Persen	Rp187.332.666	90 Persen	Rp196.699.299	90 Persen	Rp901.852.778	KAPANEWON PUNDONG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	90 Persen	Rp4.790.000	100 persen	Rp14.925.750	100 Persen	Rp25.672.038	100 Persen	Rp16.455.639	100 Persen	Rp17.278.421	100 Persen	Rp79.121.848	KAPANEWON PUNDONG
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PLERET
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PLERET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp549.024.000	80 Angka	Rp621.299.000	81 Angka	Rp770.338.000	81 Angka	Rp869.984.000	82 Angka	Rp1.424.155.000	82 Angka	Rp4.234.800.000	KAPANEWON PLERET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp38.992.500	90 Persen	Rp51.500.000	95 Persen	Rp72.000.000	95 Persen	Rp119.500.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp391.992.500	KAPANEWON PLERET

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PELAYANAN PUBLIK															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	90 Persen	Rp126.387.500	90 Persen	Rp151.000.000	95 Persen	Rp180.500.000	95 Persen	Rp232.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp929.887.500	KAPANEWON PLERET
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp115.475.000	90 Persen	Rp135.000.000	95 Persen	Rp160.000.000	95 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp190.000.000	100 Persen	Rp785.475.000	KAPANEWON PLERET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp55.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	100 Persen	Rp178.015.000	KAPANEWON PLERET
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PIYUNGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	82 Angka	Rp525.235.000	82 Angka	Rp614.882.000	82 Angka	Rp766.327.000	82 Angka	Rp955.906.000	82 Angka	Rp1.364.391.000	82 Angka	Rp4.226.741.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	92 Persen	Rp42.072.500	92 Persen	Rp75.000.000	92 Persen	Rp115.000.000	92 Persen	Rp125.000.000	92 Persen	Rp165.000.000	92 Persen	Rp522.072.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100 Persen	100 Persen	Rp124.932.500	100 Persen	Rp136.400.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp177.950.000	100 Persen	Rp235.750.000	100 Persen	Rp830.032.500	KAPANEWON PIYUNGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp135.000.000	100 Persen	Rp150.000.000	100 Persen	Rp165.000.000	100 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp880.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp17.500.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp145.515.000	KAPANEWON PIYUNGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PAJANGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80 Angka	Rp626.138.500	81 Angka	Rp730.288.000	81 Angka	Rp806.700.000	82 Angka	Rp875.900.000	82 Angka	Rp1.114.100.000	82 Angka	Rp4.153.126.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	Rp36.387.500	89 Persen	Rp55.000.000	90 Persen	Rp95.464.000	91 Persen	Rp150.000.000	92 Persen	Rp255.500.000	92 Persen	Rp592.351.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	88 Persen	Rp74.797.000	89 Persen	Rp87.500.000	90 Persen	Rp125.000.000	91 Persen	Rp185.000.000	92 Persen	Rp281.211.000	92 Persen	Rp753.508.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	100 Persen	88 Persen	Rp10.210.000	89 Persen	Rp16.000.000	90 Persen	Rp73.000.000	91 Persen	Rp120.000.000	92 Persen	Rp194.000.000	92 Persen	Rp413.210.000	KAPANEWON PAJANGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp97.249.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp130.000.000	100 Persen	Rp145.498.000	100 Persen	Rp200.000.000	100 Persen	Rp672.747.000	KAPANEWON PAJANGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	80 Angka	Rp505.086.000	81 Angka	Rp527.633.400	82 Angka	Rp754.492.400	83 Angka	Rp985.079.400	85 Angka	Rp1.523.654.400	85 Angka	Rp4.295.945.600	KAPANEWON SANDEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 angka	Rp55.797.500	91 Angka	Rp73.000.000	92 Angka	Rp74.000.000	93 Angka	Rp75.000.000	94 Angka	Rp76.000.000	94 Angka	Rp353.797.500	KAPANEWON SANDEN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp147.554.500	81 Persen	Rp166.207.600	82 Persen	Rp167.207.600	83 Persen	Rp168.207.600	84 Persen	Rp169.207.600	84	Rp818.384.900	KAPANEWON SANDEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp98.000.000	88 Persen	Rp111.000.000	89 Persen	Rp112.000.000	90 Persen	Rp113.000.000	91 Persen	Rp114.000.000	91 Persen	Rp548.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Stabilitas	n/a	100 Persen	Rp13.000.000	100 Persen	Rp66.000.000	100 Persen	Rp67.000.000	100 Persen	Rp68.000.000	100 Persen	Rp69.000.000	100 Persen	Rp283.000.000	KAPANEWON SANDEN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SRANDAKAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp481.662.000	86 Angka	Rp585.850.000	87 Angka	Rp798.206.000	88 Angka	Rp1.012.352.000	89 Angka	Rp1.530.821.000	89 Angka	Rp4.408.891.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp44.500.000	91 Persen	Rp46.750.000	92 Persen	Rp49.000.000	93 Persen	Rp51.500.000	94 Persen	Rp54.000.000	94 Persen	Rp245.750.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	95 Persen	Rp146.875.000	95 Persen	Rp155.000.000	96 Persen	Rp162.750.000	97 Persen	Rp171.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	98 Persen	Rp815.625.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	95 Persen	Rp132.125.000	95 Persen	Rp138.750.000	96 Persen	Rp145.000.000	97 Persen	Rp152.250.000	98 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp728.125.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp9.622.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.500.000	100 Persen	Rp11.000.000	100 Persen	Rp11.550.000	100 Persen	Rp52.672.000	KAPANEWON SRANDAKAN
4	0	0	PROGRAM	Persentase	n/a	96 Persen	Rp45.300.	97 Persen	Rp66.040.	98 Persen	Rp66.040.	99 Persen	Rp66.040.00	100	Rp66.040.00	100	Rp309.46	KAPANEWON

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	4	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			000		000		000		0	Persen	0	Persen	0.000	SEWON
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEWON
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp661.307.388	90 Angka	Rp677.434.308	90 Angka	Rp818.371.308	90 Angka	Rp958.371.308	90 Angka	Rp1.378.865.268	90 Angka	Rp4.494.349.580	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp58.215.000	90 Persen	Rp60.215.000	90 Persen	Rp60.215.000	90 Persen	Rp63.351.000	90 Persen	Rp63.351.000	90 Persen	Rp305.347.000	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp57.620.112	80 Persen	Rp60.535.000	80 Persen	Rp120.535.000	80 Persen	Rp210.535.000	80 Persen	Rp310.164.040	80 Persen	Rp759.389.152	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp88.357.500	100 Persen	Rp164.154.692	100 Persen	Rp194.154.692	100 Persen	Rp220.194.692	100 Persen	Rp276.154.692	100 Persen	Rp943.016.268	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp10.350.000	100 Persen	Rp76.390.000	100 Persen	Rp98.516.000	100 Persen	Rp98.516.000	100 Persen	Rp119.556.000	100 Persen	Rp403.328.000	KAPANEWON SEWON
4	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEDAYU

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	85 Angka	Rp598.889.000	85 Angka	Rp626.997.000	85 Angka	Rp856.620.000	85 Angka	Rp1.110.913.000	85 Angka	Rp1.675.020.000	85 Angka	Rp4.868.439.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp25.050.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp188.650.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp65.400.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp369.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp145.850.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp343.850.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp6.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp198.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp768.000.000	KAPANEWON SEDAYU
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp 45.300.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp -	82 Persen	Rp 50.000.000	83 Persen	Rp 50.000.000	84 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp 605.041.500	85 Angka	Rp 707.071.700	85 Angka	Rp 901.750.000	85 Angka	Rp 1.105.000.000	85 Angka	Rp 1.567.000.000	85 Angka	Rp4.885.863.540	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 angka	90 Angka	Rp 39.500.000	90 Angka	Rp 45.000.000	90 Angka	Rp 60.000.000	90 Angka	Rp 85.000.000	90 Angka	Rp 115.000.000	90 Angka	Rp344.500.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp 114.962.500	90 Persen	Rp 124.962.500	90 Persen	Rp 144.962.500	90 Persen	Rp 163.434.500	90 Persen	Rp 214.484.500	90 Persen	Rp762.806.500	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp 129.225.000	90 Persen	Rp 147.241.800	90 Persen	Rp 167.241.800	90 Persen	Rp 177.241.800	90 Persen	Rp 225.650.000	90 Persen	Rp846.600.400	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp 10.600.000	100 Persen	Rp 11.750.000	100 Persen	Rp 14.501.700	100 Persen	Rp 16.255.700	100 Persen	Rp 20.366.500	100 Persen	Rp73.473.900	KAPANEWON BANGUNTAPAN
			Jumlah Misi 1				Rp1.256.108.874.180		Rp1.275.955.482.000		Rp1.296.813.284.000		Rp1.311.535.592.000		Rp1.349.704.046.000		Rp6.490.167.278.520	
			Misi 2: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa															
			Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,02	80,63		81,09		81,54		81,99		82,44		82,44		DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup	73,90	74,01		74,11		74,20		74,29		74,39		74,39		DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			masyarakat yang tinggi															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	82,15 angka	Rp140.000.000.000	82,50 angka	Rp140.126.643.000	82,90 angka	Rp140.242.452.000	83,10 angka	Rp140.347.144.000	83,50 angka	Rp143.866.547.000	83,50 angka	Rp704.582.786.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Capaian SPM Rumah Sakit	77,50 Persen	80 Persen		80,50 Persen		81,00 Persen		81,50 Persen		82,00 Persen		82,00 Persen		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	Rp55.000.000	69 Persen	Rp59.950.000	71 Persen	Rp64.746.000	73 Persen	Rp69.279.000	73 Persen	Rp248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.733.836.320	84,15 Angka	Rp2.750.930.000	84,30 Angka	Rp2.763.020.000	84,40 Angka	Rp2.776.600.000	84,50 Angka	Rp2.798.350.000	84,50 Angka	Rp13.822.736.320	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang	1 indeks	1 indeks	Rp826.883.000	1 indeks	Rp831.000.000	1 indeks	Rp837.000.000	1 indeks	Rp842.850.000	1 indeks	Rp851.000.000	1 indeks	Rp4.188.733.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				diawasi)														
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	36 Kalurahan	40 Kalurahan	Rp943.664.600	45 Kalurahan	Rp957.000.000	50 Kalurahan	Rp948.000.000	55 Kalurahan	Rp950.500.000	60 Kalurahan	Rp953.000.000	60 Kalurahan	Rp4.752.164.600	DINAS KESEHATAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	25,93 Persen	33 Persen	Rp600.000.000	40 Persen	Rp4.044.050.000	48 Persen	Rp1.865.000.000	55 Persen	Rp2.035.000.000	62 Persen	Rp2.205.000.000	62 Persen	Rp10.749.050.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	180.645.120	84,15 Angka	Rp185.500.000	84,30 Angka	Rp190.000.000	84,40 Angka	Rp194.000.000	84,50 Angka	Rp198.000.000	84,50 Angka	Rp948.145.120	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	100 persen	37.128.755.263	100 persen	Rp37.129.000.000	100 persen	Rp37.130.000.000	100 persen	Rp37.131.000.000	100 persen	Rp37.132.000.000	100 persen	Rp185.650.755.263	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	176.881.680	100 Persen	Rp182.000.000	100 Persen	Rp186.000.000	100 Persen	Rp190.650.000	100 Persen	Rp194.000.000	100 Persen	Rp929.531.680	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	100 persen	100 persen	500.000.000	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	2.325.448.000	84,15 Angka	Rp1.755.000.000	84,30 Angka	Rp1.765.000.000	84,40 Angka	Rp1.775.000.000	84,50 Angka	Rp1.785.000.000	84,50 Angka	Rp9.405.448.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.461.858.400	84,15 Angka	Rp2.300.000.000	84,30 Angka	Rp2.380.000.000	84,40 Angka	Rp2.475.000.000	84,50 Angka	Rp2.580.000.000	84,50 Angka	Rp12.196.858.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.405.268.800	84,15 Angka	Rp2.526.000.000	84,30 Angka	Rp2.653.000.000	84,40 Angka	Rp2.786.000.000	84,50 Angka	Rp2.925.000.000	84,50 Angka	Rp13.295.268.800	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83,95 angka	84 Angka	Rp2.920.358.400	84,15 Angka	Rp3.005.000.000	84,30 Angka	Rp3.110.000.000	84,40 Angka	Rp3.215.000.000	84,50 Angka	Rp3.320.000.000	84,50 Angka	Rp15.570.358.400	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)														
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.850.678.294	84,15 Angka	Rp2.659.182.000	84,30 Angka	Rp2.715.265.000	84,40 Angka	Rp2.772.370.000	84,50 Angka	Rp2.830.517.000	84,50 Angka	Rp13.828.012.294	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.720.400	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp761.000.000	1 indeks	Rp2.901.417.064	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.949.358.400	84,15 Angka	Rp1.990.980.000	84,30 Angka	Rp2.033.699.600	84,40 Angka	Rp2.077.173.592	84,50 Angka	Rp2.121.417.064	84,50 Angka	Rp10.172.628.656	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT															
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.588.749.800	84,15 Angka	Rp1.624.495.869	84,30 Angka	Rp1.645.190.828	84,40 Angka	Rp1.666.041.736	84,50 Angka	Rp1.687.053.163	84,50 Angka	Rp8.211.531.396	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.216.541.116	84,15 Angka	Rp2.275.520.964	84,30 Angka	Rp2.336.033.988	84,40 Angka	Rp2.397.934.838	84,50 Angka	Rp2.461.258.209	84,50 Angka	Rp11.687.289.115	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.466.089.600	84,15 Angka	Rp695.000.000	84,30 Angka	Rp705.000.000	84,40 Angka	Rp715.000.000	84,50 Angka	Rp725.000.000	84,50 Angka	Rp4.306.089.600	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.075.268.800	84,15 Angka	Rp2.130.000.000	84,30 Angka	Rp2.186.250.000	84,40 Angka	Rp2.243.781.250	84,50 Angka	Rp2.302.625.781	84,50 Angka	Rp10.937.925.831	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.360.179.200	84,15 Angka	Rp1.396.600.000	84,30 Angka	Rp1.417.700.000	84,40 Angka	Rp1.437.600.000	84,50 Angka	Rp1.456.300.000	84,50 Angka	Rp7.068.379.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.272.316.420	84,15 Angka	Rp1.655.600.000	84,30 Angka	Rp1.676.356.000	84,40 Angka	Rp1.697.269.560	84,50 Angka	Rp1.718.342.255	84,50 Angka	Rp9.019.884.235	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Puskesmas														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.974.931.725	84,15 Angka	Rp2.077.334.231	84,30 Angka	Rp2.184.700.942	84,40 Angka	Rp2.189.700.942	84,50 Angka	Rp2.302.185.989	84,50 Angka	Rp10.728.853.829	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.705.952.000	84,15 Angka	Rp1.660.000.000	84,30 Angka	Rp1.695.600.000	84,40 Angka	Rp1.731.812.000	84,50 Angka	Rp145.000.000	84,50 Angka	Rp6.938.364.000	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.280.789.600	84,15 Angka	Rp1.314.168.000	84,30 Angka	Rp1.333.699.000	84,40 Angka	Rp1.352.994.000	84,50 Angka	Rp1.372.461.000	84,50 Angka	Rp6.654.111.600	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KABUPATEN/KOTA															
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.860.862.400	84,15 Angka	Rp2.865.504.000	84,30 Angka	Rp2.970.504.000	84,40 Angka	Rp3.075.504.000	84,50 Angka	Rp3.180.504.000	84,50 Angka	Rp14.952.878.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.988.358.400	84,15 Angka	Rp2.422.950.000	84,30 Angka	Rp2.451.130.000	84,40 Angka	Rp2.479.540.000	84,50 Angka	Rp2.508.180.000	84,50 Angka	Rp12.850.158.400	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM	Capaian Nilai	83,95 angka	84 Angka	Rp2.384.0	84,15	Rp712.00	84,30	Rp734.00	84,40	Rp755.000.0	84,50	Rp765.000.0	84,50	Rp5.350.0	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			37.982	Angka	0.000	Angka	0.000	Angka	00	Angka	00	Angka	37.982	KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.626.068.800	84,15 Angka	Rp1.640.000.000	84,30 Angka	Rp1.650.000.000	84,40 Angka	Rp1.660.000.000	84,50 Angka	Rp1.670.000.000	84,50 Angka	Rp8.246.068.800	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp777.179.200	84,15 Angka	Rp798.000.000	84,30 Angka	Rp810.000.000	84,40 Angka	Rp820.000.000	84,50 Angka	Rp835.000.000	84,50 Angka	Rp4.040.179.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.903.940.063	84,15 Angka	Rp2.720.040.000	84,30 Angka	Rp2.757.920.000	84,40 Angka	Rp2.786.920.000	84,50 Angka	Rp2.806.800.000	84,50 Angka	Rp13.975.620.063	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.005.768.800	84,15 Angka	Rp1.998.780.605	84,30 Angka	Rp2.099.719.635	84,40 Angka	Rp2.205.455.616	84,50 Angka	Rp2.316.228.396	84,50 Angka	Rp10.625.953.052	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.930.448.000	84,15 Angka	Rp2.940.000.000	84,30 Angka	Rp2.950.000.000	84,40 Angka	Rp2.960.000.000	84,50 Angka	Rp2.970.000.000	84,50 Angka	Rp14.750.448.000	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	Rp0	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM	Indeks capaian	1 indeks	1 indeks	Rp695.00	1 indeks	Rp715.00	1 indeks	Rp720.00	1 indeks	Rp725.000.0	1 indeks	Rp730.000.0	1 indeks	Rp3.585.0	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	SPM			0.000		0.000		0.000		00		00		00.000	KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.800.979.200	84,15 Angka	Rp1.667.600.000	84,30 Angka	Rp1.674.600.000	84,40 Angka	Rp1.681.600.000	84,50 Angka	Rp1.686.600.000	84,50 Angka	Rp8.511.379.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.651.878.200	84,15 Angka	Rp2.657.000.000	84,30 Angka	Rp2.663.000.000	84,40 Angka	Rp2.669.000.000	84,50 Angka	Rp2.675.000.000	84,50 Angka	Rp13.315.878.200	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.818.858.400	84,15 Angka	Rp1.634.000.000	84,30 Angka	Rp1.644.000.000	84,40 Angka	Rp1.654.000.000	84,50 Angka	Rp1.664.000.000	84,50 Angka	Rp8.414.858.400	DINAS KESEHATAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.455.179.200	84,15 Angka	Rp1.481.075.000	84,30 Angka	Rp1.507.466.125	84,40 Angka	Rp1.534.178.117	84,50 Angka	Rp1.561.215.789	84,50 Angka	Rp7.539.114.231	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,19	15,22		15,25		15,26		15,3		15,32		15,32		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	82 Angka	Rp5.009.338.342	82 Angka	Rp5.233.481.342	82 Angka	Rp5.533.481.342	82 Angka	Rp5.833.481.342	82 Angka	Rp6.921.161.342	82 Angka	Rp28.530.943.710	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEPENDIDIKAN	(kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM														DAN OLAHRAGA
1	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	3,88 Persen	4,18 Persen	Rp800.000.000	4,48 Persen	Rp3.175.000.000	4,78 Persen	Rp4.390.000.000	5,07 Persen	Rp2.390.000.000	5,37 Persen	Rp2.590.000.000	5,37 Persen	Rp13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	80 Angka	Rp831.968.820	80 Angka	Rp850.000.000	80 Angka	Rp900.000.000	80 Angka	Rp950.000.000	80 Angka	Rp1.000.000.000	80 Angka	Rp4.531.968.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	7,61 Persen	10,08 Persen	Rp416.798.700	12,55 Persen	Rp527.804.000	14,02 Persen	Rp2.050.000.000	17,48 Persen	Rp600.000.000	19,95 Persen	Rp1.000.000.000	19,95 Persen	Rp4.594.602.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	55 Medali	Rp8.350.081.966	65 Medali	Rp8.650.081.966	80 Medali	Rp8.900.081.966	100 Medali	Rp9.250.081.966	130 Medali	Rp11.750.081.966	130 Medali	Rp46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	80 Persen	Rp1.445.340.480	81 Persen	Rp1.745.340.480	82 Persen	Rp1.995.340.480	83 Persen	Rp2.345.340.480	84 Persen	Rp4.845.340.480	84 Persen	Rp12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	n/a	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	3	4		6		8		10		12		12		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	80,98 Angka	Rp1.036.350.000	81 Angka	Rp1.093.102.000	81,3 Angka	Rp1.152.071.001	81,5 Angka	Rp1.213.332.240	81,6 Angka	Rp1.656.258.364	81,6 Angka	Rp6.151.113.605	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	54 Persen	61,03 Persen	Rp1.425.000.000	68,38 Persen	Rp3.936.386.000	75,74 Persen	Rp6.862.053.999	83,08 Persen	Rp5.733.225.960	90,44 Persen	Rp6.077.448.556	90,44 Persen	Rp24.034.114.515	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Bahasa Sastra yang dilestarikan	n/a	18 Pelestarian	Rp3.300.000.000	46 Pelestarian	Rp6.879.050.000	76 Pelestarian	Rp7.770.950.000	104 Pelestarian	Rp7.177.450.500	132 Pelestarian	Rp7.756.495.550	132 Pelestarian	Rp32.883.946.050	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	n/a	219 Pelestarian	Rp10.125.000.000	454 Pelestarian	Rp15.783.924.000	691 Pelestarian	Rp16.251.193.000	953 Pelestarian	Rp18.324.602.300	1215 Pelestarian	Rp28.641.062.530	1215 Pelestarian	Rp89.125.781.830	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
			Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman	n/a	2,70		2,73		2,76		2,79		2,81		2,81		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang	Persentase penanganan gangguan ketentraman	n/a	100		100		100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			harmonis	ketertiban umum dan perlindungan masyarakat														KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	79 Angka	Rp2.952.127.000	80 Angka	Rp3.063.643.229	81 Angka	Rp3.370.007.552	82 Angka	Rp3.437.407.703	83 Angka	Rp3.781.148.473	83 Angka	Rp16.604.333.956	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0 5	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	27,22 Persen	29,37 Persen	Rp600.000.000	45,44 Persen	Rp1.500.000.000	66,88 Persen	Rp2.500.000.000	88,31 Persen	Rp3.500.000.000	100 Persen	Rp1.500.000.000	100 Persen	Rp9.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	0 1	0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	37,33 Persen	57,33 Persen	Rp2.229.678.400	84 Persen	Rp2.849.967.990	100 Persen	Rp33.599.967.990	100 Persen	Rp2.400.000.000	100 Persen	Rp2.500.000.000	100 Persen	Rp43.579.614.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp522.514.010	86 Angka	Rp808.737.010	87 Angka	Rp1.182.745.010	88 Angka	Rp800.000.000	89 Angka	Rp950.000.000	89 Angka	Rp4.263.996.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan	95 Persen	95 Persen	Rp341.009.000	100 Persen	Rp391.000.000	100 Persen	Rp416.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp1.998.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KARAKTER KEBANGSAAN	kebangsaan														
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	10,36 Persen	18 Persen	Rp61.000.000	23 Persen	Rp126.000.000	28 Persen	Rp226.000.000	33 Persen	Rp125.000.000	37 Persen	Rp168.049.000	37 Persen	Rp706.049.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	100 Persen	Rp360.293.590	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp1.960.293.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	Rp222.267.000	100 Persen	Rp447.267.000	100 Persen	Rp547.267.000	100 Persen	Rp409.446.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp2.076.247.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	n/a	-	Rp0	35 Persen	Rp417.000.000	50 Persen	Rp575.000.000	66,67 Persen	Rp645.000.000	100 Persen	Rp740.000.000	100 Persen	Rp2.377.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Misi 2				Rp633.154.020.520		Rp655.941.315.000		Rp696.175.958.000		Rp667.901.479.000		Rp695.494.573.000		Rp3.348.667.345.520	
			Misi 3: **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**															
			Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,12	3,8		3,97		4,48		4,83		5,12		5,12		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
			Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	30,67 Persen	37,33 Persen	Rp235.000.000	42,67 Persen	Rp340.000.000	48 Persen	Rp400.000.000	53,33 Persen	Rp390.000.000	58,67 Persen	Rp450.000.000	58,67 Persen	Rp1.815.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	n/a	14,28 Persen	Rp2.900.000	28,57 Persen	Rp20.000.000	57,14 Persen	Rp20.000.000	85,71 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp92.900.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	147,57 Persen	149 Persen	Rp525.935.120	151 Persen	Rp1.276.750.000	153 Persen	Rp1.276.750.000	155 Persen	Rp1.276.750.000	157 Persen	Rp1.519.750.000	157 Persen	Rp5.875.935.120	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	24 Persen	22,67 Persen	Rp80.687.000	21,33 Persen	Rp211.000.000	20 Persen	Rp211.000.000	18,67 Persen	Rp211.000.000	17,33 Persen	Rp325.000.000	17,33 Persen	Rp1.038.687.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	0	0	PROGRAM	Persentase	100 Persen	100	Rp31.000.	100	Rp61.000.	100	Rp61.000.	100	Rp61.000.00	100	Rp86.000.00	100	Rp300.00	DINAS

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	9	5	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi		Persen	000	Persen	000	Persen	000	Persen	0	Persen	0	Persen	0.000	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan				100 Persen	Rp2.833.025.000							100 Persen	Rp2.833.025.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp1.845.737.082	85 Angka	Rp2.576.729.802	85 Angka	Rp2.351.698.802	85 Angka	Rp2.230.167.802	85 Angka	Rp2.572.698.802	85 Angka	Rp11.577.032.290	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	100 Persen	Rp1.585.571.950	100 Persen	Rp2.746.076.470	100 Persen	Rp3.146.076.470	100 Persen	Rp3.446.076.470	100 Persen	Rp4.196.951.470	100 Persen	Rp15.120.752.830	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	Rp1.699.075.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp1.892.125.000,00	100 Persen	Rp6.357.575.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	Rp1.941.072.488	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp2.814.455.368	100 Persen	Rp1.578.210.368	100 Persen	Rp8.962.648.960	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Produksi Daging	15.222 Ton	15.326 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton		15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2 7	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase fasilitasi	100 Persen	100 Persen	Rp70.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp2.375.000.000	DINAS KETAHANAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	penanggulangan bencana														PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.700.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp32.000.000	100 Persen	Rp100.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	Rp792.243.360	6,315 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,32 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,325 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,33 ton/ha	Rp1.213.323.360	6,33 ton/ha	Rp5.090.536.800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp3.500.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	n/a	0	0	20 Persen	125.000.000	60 Persen	250.000.000	80 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	Rp625.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	Rp187.675.000	831 ton	Rp292.175.120,00	833 ton	Rp404.490.000,00	835 ton	Rp662.675.120,00	837 ton	Rp319.975.120,00	837 ton	Rp1.866.990.360	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	Rp1.459.882.000	12.805 ton	Rp1.474.817.880,00	12.878 ton	Rp3.610.882.000,00	12.959 ton	Rp1.613.413.880,00	13.046 ton	Rp2.133.888.880,00	13.046 ton	Rp10.292.884.640	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	5 Persen	Rp3.900.000	5 Persen	Rp3.900.000,00	5 Persen	Rp53.900.000,00	5 Persen	Rp53.900.000,00	5 Persen	Rp79.900.000,00	5 Persen	Rp195.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2 Persen	Rp42.900.000	2 Persen	Rp162.900.000,00	2 Persen	Rp127.900.000,00	5 Persen	Rp156.900.000,00	5 Persen	Rp306.950.000,00	5 Persen	Rp797.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan Desa Wisata	32 Persen	33,33 Persen	Rp1.000.000.000	34,67 Persen	Rp2.379.500.000	36 Persen	Rp1.475.000.000	37,33 Persen	Rp1.525.000.000	38,67 Persen	Rp1.760.000.000	93 Persen	Rp8.139.500.000	DINAS PARIWISATA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	Rp0	100 Persen	Rp735.000.000	100 Persen	Rp0	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp1.635.000.000	DINAS PARIWISATA
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80 Angka	Rp4.278.552.000	80 Angka	Rp4.570.540.000	82 Angka	Rp4.872.137.000	83 Angka	Rp5.183.648.000	84 Angka	Rp6.765.820.000	84 Angka	Rp25.670.697.000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 Persen	Rp2.902.000.000	3,13 Persen	Rp5.402.000.000	3,13 Persen	Rp3.602.000.000	3,13 Persen	Rp8.902.000.000	3,13 Persen	Rp7.902.000.000	3,13 Persen	Rp28.710.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	n/a	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp4.834.000.000	DINAS PARIWISATA
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	0 Persen	14 Persen	Rp400.000.000	28 Persen	Rp1.447.073.000	40 Persen	Rp2.528.000.000	50 Persen	Rp2.537.000.000	70 Persen	Rp2.537.000.000	70 Persen	Rp9.449.073.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 Persen	51 Persen	Rp160.000.000	52 Persen	Rp168.000.000	53 Persen	Rp184.800.000	54 Persen	Rp194.040.000	55 Persen	Rp213.444.000	55 Persen	Rp920.284.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase pertumbuhan	1 Persen	2 Persen	Rp6.070.923.713	3 Persen	Rp7.294.730.000	4 Persen	Rp6.623.334.000	5 Persen	Rp6.923.334.000	6 Persen	Rp8.200.000.000	6 Persen	Rp35.112.321.713	DINAS KOPERASI,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	omzet pedagang pasar rakyat														USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8 Persen	7 Persen	Rp179.957.500	7 Persen	Rp188.955.375	6 Persen	Rp207.850.900	6 Persen	Rp218.243.400	5 Persen	Rp242.000.000	5 Persen	Rp1.037.007.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	83 juta US$	80 juta US$	Rp654.020.000	90 juta US$	Rp686.721.000	100 juta US$	Rp755.393.100	110 juta US$	Rp873.162.700	120 juta US$	Rp1.200.000.000	500 juta US$	Rp4.169.296.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25 Persen	27 Persen	Rp349.223.100	30 Persen	Rp384.145.000	32 Persen	Rp422.559.500	35 Persen	Rp443.687.400	40 Persen	Rp488.056.200	40 Persen	Rp2.087.671.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	0 Persen	-	Rp0	10 Persen	Rp300.000.000	15 Persen	Rp500.000.000	20 Persen	Rp525.000.000	25 Persen	Rp600.000.000	25 Persen	Rp1.925.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,34 angka	81 Angka	Rp2.775.856.027	81.5 Angka	Rp3.217.891.625	82 Angka	Rp3.505.716.000	82,5 Angka	Rp3.682.832.000	83 Angka	Rp4.333.290.583	83 Angka	Rp17.515.586.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA	Persentase rekomendasi penerbitan izin	2,5 Persen	2,5 Persen	Rp24.835.120	2,5 Persen	Rp28.000.000	2,5 Persen	Rp29.500.000	2,5 Persen	Rp31.000.000	2,5 Persen	Rp32.000.000	2,5 Persen	Rp145.335.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			SIMPAN PINJAM	usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten														DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	66,88 Persen	70,23 Persen	Rp121.110.120	73,58 Persen	Rp155.895.000	75,25 Persen	Rp159.543.000	76,92 Persen	Rp166.757.500	78,59 Persen	Rp194.992.000	78,59 Persen	Rp798.297.620	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	56,54 Persen	59,52 Persen	Rp26.835.120	63,99 Persen	Rp47.500.000	65,48 Persen	Rp50.000.000	66,96 Persen	Rp52.500.000	68,45 Persen	Rp55.000.000	68,45 Persen	Rp231.835.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	60 Persen	Rp554.286.350	60 Persen	Rp169.774.000	60 Persen	Rp175.938.500	60 Persen	Rp187.325.000	60 Persen	Rp221.936.000	60 Persen	Rp1.309.259.850	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	Rp108.497.240	5 Persen	Rp281.127.000	5 Persen	Rp296.384.000	5 Persen	Rp314.845.000	5 Persen	Rp372.966.000	5 Persen	Rp1.373.819.240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,99	85 Angka	Rp1.167.283.800	85 Angka	Rp1.009.881.000	85 Angka	Rp1.521.264.000	85 Angka	Rp1.625.315.000	85 Angka	Rp2.494.934.000	85 Angka	Rp7.818.677.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KABUPATEN/KOTA															PINTU
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	n/a	100 Persen	Rp149.330.000	100 Persen	Rp233.500.000	100 Persen	Rp256.850.000	100 Persen	Rp282.535.000	100 Persen	Rp236.500.000	100 Persen	Rp1.158.715.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	7,85 Persen	8,30 Persen	Rp278.587.500	11,29 Persen	Rp340.038.000	12,79 Persen	Rp406.688.000	15,29 Persen	Rp480.003.000	17,79 Persen	Rp473.038.000	17,79 Persen	Rp1.978.354.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	Rp379.462.000	100 Persen	Rp413.962.000	100 Persen	Rp422.712.000	100 Persen	Rp432.337.000	100 Persen	Rp430.237.000	100 Persen	Rp2.078.710.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,90		3,50		3,40		3,30		3,20		3,20		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Nilai	80 Nilai	Rp3.000.000.000	81 Nilai	Rp2.500.000.000	82 Nilai	Rp3.000.000.000	83 Nilai	Rp3.250.000.000	84 Nilai	Rp3.500.000.000	84 Nilai	Rp15.250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 Persen	18,5 Persen	Rp3.400.000.000	19,5 Persen	Rp2.600.000.000	20,5 Persen	Rp2.750.000.000	21,5 Persen	Rp3.050.000.000	22,5 Persen	Rp3.350.000.000	22,5 Persen	Rp15.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	54 Persen	54 Persen	Rp7.595.276.000	56 Persen	Rp7.639.007.000	58 Persen	Rp7.929.068.000	60 Persen	Rp8.346.856.000	62 Persen	Rp8.845.071.000	62 Persen	Rp40.355.278.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	PROGRAM	Persentase	35 Persen	35 Persen	Rp1.350.0	36 Persen	Rp875.00	37 Persen	Rp900.00	38 Persen	Rp950.000.0	39 Persen	Rp975.000.0	39 Persen	Rp5.050.0	DINAS TENAGA

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	5	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) .			00.000		0.000		0.000		00		00		00.000	KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	3 2	0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	72 Persen	74 Persen	Rp575.000.000	80 Persen	Rp600.000.000	90 Persen	Rp625.000.000	100 Persen	Rp650.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	100 Persen	Rp3.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1 4	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp824.075.615	83 Angka	Rp865.278.871	83 Angka	Rp908.542.814	83 Angka	Rp953.969.955	83 Angka	Rp1.001.668.453	83 Angka	Rp4.553.535.708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	100 Persen	Rp3.458.543.215	100 Persen	Rp4.516.401.480	100 Persen	Rp4.222.310.172	100 Persen	Rp3.882.498.130	100 Persen	Rp4.294.388.138	100 Persen	Rp20.374.141.135	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp2.488.565.670	100 Persen	Rp4.063.753.649	100 Persen	Rp4.493.629.014	100 Persen	Rp4.971.991.915	100 Persen	Rp5.168.197.409	100 Persen	Rp21.186.137.657	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase ketersediaan bidang tanah	n/a	16 Persen	Rp600.000.000	36 Persen	Rp650.000.000	56 Persen	Rp700.000.000	77 Persen	Rp750.000.000	100 Persen	Rp800.000.000	100 Persen	Rp3.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.														DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	25 Persen	33 Persen	Rp1.057.984.500	41,67 Persen	Rp1.300.092.000	50 Persen	Rp1.300.092.000	58,33 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp6.258.352.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	n/a	80		90		100		100		100		100		DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	n/a	2 CBT	Rp171.000.000	2 CBT	Rp549.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp499.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp1.317.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	Rp0	25 Persen	Rp522.000.000	35 Persen	Rp622.000.000	50 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp2.388.000.000	DINAS PARIWISATA
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	Rp599.342.940	55 Persen	Rp530.997.000	60 Persen	Rp564.096.000	65 Persen	Rp612.759.000	70 Persen	Rp736.976.000	70 Persen	Rp3.044.170.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)															PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	Rp410.733.440	65 Persen	Rp358.033.000	70 Persen	Rp364.207.500	75 Persen	Rp379.917.000	80 Persen	Rp420.988.000	80 Persen	Rp1.933.878.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	81,50%	85,97 Persen	Rp1.684.041.210	90,65 Persen	Rp2.702.391.000	95,32 Persen	Rp2.151.503.500	100 Persen	Rp2.305.827.000	100 Persen	Rp2.773.672.217	100 Persen	Rp11.617.434.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	100 Persen	Rp25.735.120	100 Persen	Rp44.500.000	100 Persen	Rp49.000.000	100 Persen	Rp52.000.000	100 Persen	Rp57.000.000	100 Persen	Rp228.235.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	0 Persen	0 Persen	Rp0	0,22 Persen	Rp50.000.000	0,22 Persen	Rp62.000.000	0,22 Persen	Rp63.000.000	0,22 Persen	Rp65.000.000	0,22 Persen	Rp240.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				perusahaan Kawasan industri di kabupaten														
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	9,33 persen	10,67 persen	Rp400.000.000	12 persen	Rp593.000.000	13,33 persen	Rp828.000.000	14,67 persen	Rp406.000.000	17,33 persen	Rp393.000.000	17,33 persen	Rp2.620.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Misi 3				Rp61.564.136.300		Rp78.235.765.000		Rp77.131.520.000		Rp85.482.063.000		Rp93.618.840.000		Rp396.032.324.300	
			Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana															
			Tujuan : Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	n/a	66,1175		67,26		67,88		69,50		70,61		70,61		DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
			Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	n/a	73,71		75,05		76,40		77,47		79,08		79,08		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	80,62 Persen	81,03 Persen	Rp22.050.532.539	81,44 Persen	Rp22.812.684.000	81,85 Persen	Rp22.993.952.400	82,26 Persen	Rp23.063.347.640	82,67 Persen	Rp23.139.682.404	82,67 Persen	Rp114.060.198.983	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42 Persen	75,83 Persen	Rp39.940.351.125	76,24 Persen	Rp40.913.427.855	76,65 Persen	Rp40.954.770.640	77,06 Persen	Rp41.110.247.704	77,47 Persen	Rp42.120.859.933	77,47 Persen	Rp205.039.657.257	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	n/a	0	Rp0	65 Persen	Rp70.000.000.000	25 Persen	Rp30.000.000.000	10 Persen	Rp10.000.000.000		Rp0	100 Persen	Rp110.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	82,83	83 Angka	Rp6.231.608.230	83,5 Angka	Rp6.088.747.424	84 Angka	Rp6.292.974.714	84 Angka	Rp6.667.624.734	84 Angka	Rp6.729.739.755	84 Angka	Rp32.010.694.857	DINAS PEKERJAAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	n/a	10 Persen	Rp11.093.340.360	20 Persen	Rp25.059.600.452	30 Persen	Rp15.501.452.323	40 Persen	Rp66.089.613.546	50 Persen	Rp73.228.230.810	50 Persen	Rp190.972.237.491	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34 Persen	72,84 Persen	Rp790.328.980	74,34 Persen	Rp842.300.472	75,84 Persen	Rp906.530.519	77,34 Persen	Rp1.077.183.571	78,84 Persen	Rp1.104.901.928	78,84 Persen	Rp4.721.245.470	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	21,33 Persen	22,67 Persen	Rp824.650.000	25,33 Persen	Rp2.500.000.000	28 Persen	Rp600.000.000	30,67 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp5.124.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	29,93 Persen	30 Persen	Rp12.435.566.438	35 Persen	Rp12.785.572.133	40 Persen	Rp12.914.129.346	45 Persen	Rp13.655.542.281	50 Persen	Rp14.421.096.509	50 Persen	Rp66.211.906.707	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	81,5 Persen	82,4 Persen		83,3 Persen		84,2 Persen		85,1 Persen		86 Persen		86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak														
1	0 3	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	n/a	3,97 Persen	Rp3.635.314.000	4,6 Persen	Rp5.035.548.547	5,23 Persen	Rp5.309.103.402	5,86 Persen	Rp5.540.013.742	6,49 Persen	Rp4.636.195.116	6,49 Persen	Rp24.156.174.807	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0 Persen	10,59 Persen	Rp4.266.816.699	21,18 Persen	Rp5.589.155.000	31,77 Persen	Rp5.648.070.500	42,36 Persen	Rp5.762.877.550	52,95 Persen	Rp5.939.165.305	52,95 Persen	Rp27.206.085.054	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	98,75 Persen	99,18 Persen	Rp421.652.609	99,39 Persen	Rp2.128.675.558	99,6 Persen	Rp2.348.253.042	99,8 Persen	Rp2.493.951.306	100 Persen	Rp2.692.300.000	100 Persen	Rp10.084.832.515	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 4	0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	Rp406.039.100	100 Persen	Rp451.000.000	100 Persen	Rp496.100.000	100 Persen	Rp545.710.000	100 Persen	Rp600.281.000	100 Persen	Rp2.499.130.100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemanfaatan ruang Satuan	n/a	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp73.174.300.000	100 Persen	Rp850.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp75.374.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM,

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp3.390.000.000	100 Persen	Rp3.680.000.000	100 Persen	Rp2.010.000.000	100 Persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,00 angka	80,50 Angka	Rp965.187.000	80,75 Angka	Rp965.187.000	81 Angka	Rp1.061.705.000	81,25 Angka	Rp1.167.875.000	81,50 Angka	Rp1.284.662.000	81,50 Angka	Rp5.444.616.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	30,43	Rp13.012.540.000	30,43	Rp9.220.389.000	30,43	Rp10.689.762.000	30,43	Rp12.312.443.000	30,43	Rp14.128.890.000	30,43	Rp59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		
			Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfataan ruang	80,00	75,03		75,05		75,07		75,10		70,20		70,20		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	0 3	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	n/a	70 Persen	Rp1.397.829.950	70,1 Persen	Rp2.350.000.000	70,2 Persen	Rp1.495.000.000	70,3 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp7.182.829.950	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	0 3	1 3	PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan perencanaan dan	n/a	90 Persen	Rp500.000.000	90 Persen	Rp1.910.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp2.860.000.000	DINAS PERTANAHAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten														DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	n/a	n/a	Rp0,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,71	82 Angka	Rp941.654.430	83 Angka	Rp950.143.500	84 Angka	Rp923.791.000	85 Angka	Rp1.571.656.000	86 Angka	Rp2.310.564.000	86 Angka	Rp6.697.808.930	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	n/a	90 Persen	Rp386.090.620	90 Persen	Rp13.400.000.000	90 Persen	Rp11.400.000.000	90 Persen	Rp10.400.000.000	90 Persen	Rp400.000.000	90 Persen	Rp35.986.090.620	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	20,73 Persen	33,03 Persen	Rp4.220.382.000	35,37 Persen	Rp7.318.511.500	44,74 Persen	Rp10.746.608.000	54,58 Persen	Rp11.010.451.000	64,89 Persen	Rp8.651.181.000	64,89 Persen	Rp41.947.133.500	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
			Sasaran Daerah: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,01	62,75		63,59		64,42		65,24		66,07		66,07		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENYELENGGA	Persentase pemanfaatan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp250.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp250.000.000	100 Persen	Rp1.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan														HIDUP
x	x x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	3.278.515.080	83,25 Angka	Rp3.587.161.040	83,5 Angka	5.787.774.040	83,75 Angka	Rp3.980.745.040	84 Angka	4.191.158.040	84 Angka	Rp20.825.353.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	n/a	70 Persen	4.895.237.000	75 Persen	Rp1.745.000.000	80 Persen	1.590.000.000	85 Persen	Rp1.705.000.000	90 Persen	1.800.000.000	90 Persen	Rp11.735.237.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	n/a	30 Persen	3.782.201.120	32 Persen	Rp5.895.936.560	34 Persen	5.426.000.000	36 Persen	Rp6.268.600.000	38 Persen	5.850.000.000	38 Persen	Rp27.222.737.680	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	n/a	5 Persen	82.820.500	5 Persen	Rp106.000.000	5 Persen	117.000.000	5 Persen	Rp124.000.000	5 Persen	145.000.000	5 Persen	Rp574.820.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	n/a	1 penghargaan	16.310.000	1 penghargaan	Rp40.000.000	1 penghargaan	44.000.000	1 penghargaan	Rp50.000.000	1 penghargaan	55.000.000	1 penghargaan	Rp205.310.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	n/a	14,29 Persen	382.795.740	57,14 Persen	Rp1.700.000.000	85,71 Persen	910.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Rp3.337.795.740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	n/a	31,35 Persen	14.675.000	33,10 Persen	Rp15.000.000	34,84 Persen	20.000.000	36,58 Persen	Rp22.500.000	38,32 Persen	23.000.000	100 Persen	Rp95.175.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
2	1 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	n/a	16,67 Persen	31.900.000	23,33 Persen	Rp51.000.000	25 Persen	64.000.000	31 Persen	Rp73.000.000	33,33 Persen	82.000.000	34 Persen	Rp301.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	100 Persen	14.950.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	Rp124.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560	44,16 Persen	Rp10.086.535.400	45,87 Persen	10.303.791.960	46,86 Persen	Rp10.913.471.960	50,07 Persen	13.208.471.960	50,07 Persen	Rp52.802.563.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sasaran Daerah : Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	181,26	175,51		169,94		164,55		159,33		154,27		154,27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp350.000.000	100 Persen	Rp220.000.000	100 Persen	Rp5.050.000.000	100 Persen	Rp80.000.000	100 Persen	Rp5.700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80,50 angka	81,00 Angka	Rp5.564.133.000	81,50 Angka	Rp10.902.809.000	82,00 Angka	Rp7.693.333.000	82,50 Angka	Rp6.247.815.000	83,00 Angka	Rp7.802.762.000	83,00 Angka	Rp38.210.852.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	0 5	0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	0 5	0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Misi 4				Rp164.347.613.000		Rp361.180.510.000		Rp240.015.010.000		Rp277.390.268.000		Rp263.279.362.000		Rp1.306.212.763.000	
			Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel															
			Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	13,50	13,37		12,90		12,50		12,05		11,50		11,50		DINAS SOSIAL
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	72.101	72.296		71.667		71.380		71.059		70.668		70.668		DINAS SOSIAL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT* / *OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Sosial (PPKS)														
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	82 Angka	Rp1.442.465.488	82 Angka	Rp1.471.857.672	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.942.358.268	83 Angka	Rp7.741.612.152	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL
1	0	0	PROGRAM	cakupan	75 Persen	75 Persen	Rp159.33	75 Persen	Rp152.03	80 Persen	Rp252.03	80 Persen	Rp375.547.9	80 Persen	Rp475.547.9	80 Persen	Rp1.414.4	DINAS SOSIAL

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6	7	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial			4.904		0.720		0.720		04		04		92.152	
			Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,18	95,5		96		96,5		96,75		96,9		96,9		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	69,36		71,01		72,66		74,31		75,96		75,96		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	Rp550.000.000	38,67 Persen	Rp635.000.000	40 Persen	Rp775.000.000	41,33 Persen	Rp860.000.000	42,67 Persen	Rp815.000.000	42,67 Persen	Rp3.635.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	Rp63.875.000	66 Persen	Rp71.875.000	69 Persen	Rp457.899.000	72 Persen	Rp547.899.000	75 Persen	Rp612.899.000	75 Persen	Rp1.754.447.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	Rp434.963.300	0.00032	Rp434.708.820	0.00031	Rp905.000.000	0.00028	Rp925.000.000	0.00026	Rp940.000.000	0.00026	Rp3.639.672.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	6 persen	7 persen	Rp34.460.120	8 Persen	Rp34.460.120	9 Persen	Rp194.000.000	10 Persen	Rp294.000.000	11 Persen	Rp394.000.000	11 Persen	Rp950.920.240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya		Utama		Utama		KLA		KLA		KLA		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kalurahan	Rp55.799.245	30 Kalurahan	Rp55.799.245	45 Kalurahan	Rp900.000.000	60 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp2.811.598.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	0 8	0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	70 Persen	100 Persen	Rp629.728.475	100 Persen	Rp629.728.700	100 Persen	Rp881.000.000	100 Persen	Rp886.000.000	100 Persen	Rp891.000.000	100 Persen	Rp3.917.457.175	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

KODE			Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)*	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp1.938.485.000	83 Angka	Rp1.250.000.000	83 Angka	Rp1.500.000.000	83 Angka	Rp1.650.000.000	83 Angka	Rp1.732.500.000	83 Angka	Rp8.070.985.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	1,67	1,66	Rp150.544.950	1,65	Rp150.000.000	1,64	Rp165.000.000	1,63	Rp181.500.000	1,62	Rp194.700.000	1,62	Rp841.744.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	n/a	77,2 Persen	Rp5.548.497.130	77,2 Persen	Rp2.344.401.250	77,2 Persen	Rp2.090.369.135	77,2 Persen	Rp2.704.599.135	77,2 Persen	Rp4.127.300.000	77,2 Persen	Rp16.815.166.650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	82,5 Persen	83 Persen	Rp970.477.780	84 Persen	Rp973.795.865	84,5 Persen	Rp973.795.865	85 Persen	Rp1.123.795.865	85,5 Persen	Rp1.750.076.000	85,5 Persen	Rp5.791.941.375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Misi 5				Rp25.916.291.000		Rp22.308.217.000		Rp25.509.318.000		Rp27.063.393.000		Rp31.510.782.000		Rp132.308.001.000	
			Jumlah Total				Rp2.141.090.935.000		Rp2.393.621.289.000		Rp2.335.645.090.000		Rp2.369.372.795.000		Rp2.433.607.603.000		Rp11.673.387.712.340	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bantul berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*out come*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah pada RPJMD Tahun 2021–2026 dapat dilihat dari proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 7.1

Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul

Uraian	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	2.292.724.883.000	2.166.090.934.000	2.418.621.289.000	2.360.645.090.000	2.394.372.795.000	2.458.607.602
BELANJA DAERAH	2.267.724.883.000	2.141.090.935.000	2.393.621.289.000	2.335.645.090.000	2.369.372.795.000	2.433.607.603
Belanja Operasi	1.713.809.666.000	1.664.248.301.000	1.748.842.898.000	1.788.661.823.000	1.825.402.113.000	1.874.727.528
Belanja Pegawai	951.471.887.000	976.142.986.000	992.330.204.000	1.009.871.614.000	1.027.786.933.000	1.046.916.030
Belanja Barang dan Jasa	634.395.529.000	626.235.407.000	693.173.694.000	706.280.209.000	734.916.180.000	764.904.498
Belanja Hibah	122.107.250.000	55.601.908.000	57.339.000.000	66.510.000.000	56.699.000.000	56.907.000
Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000	6.268.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000
Belanja Modal	242.068.319.000,00	135.929.147.000	295.684.951.000	194.601.647.000	188.439.165.000	198.185.403
Belanja Tidak Terduga	34.055.411.000,00	22.686.428.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000
Belanja Transfer	277.791.487.000	318.227.059.000	329.093.440.000	332.381.620.000	335.531.517.000	340.694.671
Belanja Bagi Hasil	26.103.398.000,00	26.103.398.000	28.695.874.000	30.065.652.000	31.503.375.000	34.675.516
Belanja Bantuan Keuangan	251.688.089.000,00	292.123.661.000	300.397.566.000	302.315.968.000	304.028.142.000	306.019.155

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan pembangunan nasional.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2022 – 2026 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	82 Angka	Rp5.009.338.342	82 Angka	Rp5.233.481.342	82 Angka	Rp5.533.481.342	82 Angka	Rp5.833.481.342	82 Angka	Rp6.921.161.342	82 Angka	Rp28.530.943.710	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	3,88 Persen	4,18 Persen	800.000.000	4,48 Persen	3.175.000.000	4,78 Persen	4.390.000.000	5,07 Persen	2.390.000.000	5,37 Persen	2.590.000.000	5,37 Persen	Rp13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.733.836.320	84,15 Angka	Rp2.750.930.000	84,30 Angka	Rp2.763.020.000	84,40 Angka	Rp2.776.600.000	84,50 Angka	Rp2.798.350.000	84,50 Angka	Rp13.822.736.320	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	1 indeks	Rp826.883.000	1 indeks	Rp831.000.000	1 indeks	Rp837.000.000	1 indeks	Rp842.850.000	1 indeks	Rp851.000.000	1 indeks	Rp4.188.733.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	36 Kalurahan	40 Kalurahan	Rp943.664.600	45 Kalurahan	Rp957.000.000	50 Kalurahan	Rp948.000.000	55 Kalurahan	Rp950.500.000	60 Kalurahan	Rp953.000.000	60 Kalurahan	Rp4.752.164.600	DINAS KESEHATAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	25,93 Persen	33 Persen	Rp600.000.000	40 Persen	Rp4.044.050.000	48 Persen	Rp1.865.000.000	55 Persen	Rp2.035.000.000	62 Persen	Rp2.205.000.000	62 Persen	Rp10.749.050.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp180.645.120	84,15 Angka	Rp185.500.000	84,30 Angka	Rp190.000.000	84,40 Angka	Rp194.000.000	84,50 Angka	Rp198.000.000	84,50 Angka	Rp948.145.120	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 Persen	100 persen	Rp37.128.755.263	100 persen	Rp37.129.000.000	100 persen	Rp37.130.000.000	100 persen	Rp37.131.000.000	100 persen	Rp37.132.000.000	100 persen	Rp185.650.755.263	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp176.881.680	100 Persen	Rp182.000.000	100 Persen	Rp186.000.000	100 Persen	Rp190.650.000	100 Persen	Rp194.000.000	100 Persen	Rp929.531.680	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	100 persen	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.325.448.000	84,15 Angka	Rp1.755.000.000	84,30 Angka	Rp1.765.000.000	84,40 Angka	Rp1.775.000.000	84,50 Angka	Rp1.785.000.000	84,50 Angka	Rp9.405.448.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.461.858.400	84,15 Angka	Rp2.300.000.000	84,30 Angka	Rp2.380.000.000	84,40 Angka	Rp2.475.000.000	84,50 Angka	Rp2.580.000.000	84,50 Angka	Rp12.196.858.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.405.268.800	84,15 Angka	Rp2.526.000.000	84,30 Angka	Rp2.653.000.000	84,40 Angka	Rp2.786.000.000	84,50 Angka	Rp2.925.000.000	84,50 Angka	Rp13.295.268.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.920.358.400	84,15 Angka	Rp3.005.000.000	84,30 Angka	Rp3.110.000.000	84,40 Angka	Rp3.215.000.000	84,50 Angka	Rp3.320.000.000	84,50 Angka	Rp15.570.358.400	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.850.678.294	84,15 Angka	Rp2.659.182.000	84,30 Angka	Rp2.715.265.000	84,40 Angka	Rp2.772.370.000	84,50 Angka	Rp2.830.517.000	84,50 Angka	Rp13.828.012.294	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.720.400	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp761.000.000	1 indeks	Rp2.901.417.064	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.949.358.400	84,15 Angka	Rp1.990.980.000	84,30 Angka	Rp2.033.699.600	84,40 Angka	Rp2.077.173.592	84,50 Angka	Rp2.121.417.064	84,50 Angka	Rp10.172.628.656	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.588.749.800	84,15 Angka	Rp1.624.495.869	84,30 Angka	Rp1.645.190.828	84,40 Angka	Rp1.666.041.736	84,50 Angka	Rp1.687.053.163	84,50 Angka	Rp8.211.531.396	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.216.541.116	84,15 Angka	Rp2.275.520.964	84,30 Angka	Rp2.336.033.988	84,40 Angka	Rp2.397.934.838	84,50 Angka	Rp2.461.258.209	84,50 Angka	Rp11.687.289.115	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.466.089.600	84,15 Angka	Rp695.000.000	84,30 Angka	Rp705.000.000	84,40 Angka	Rp715.000.000	84,50 Angka	Rp725.000.000	84,50 Angka	Rp4.306.089.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.075.268.800	84,15 Angka	Rp2.130.000.000	84,30 Angka	Rp2.186.250.000	84,40 Angka	Rp2.243.781.250	84,50 Angka	Rp2.302.625.781	84,50 Angka	Rp10.937.925.831	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp870.000.000	1 indeks	Rp872.000.000	1 indeks	Rp875.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.360.179.200	84,15 Angka	Rp1.396.600.000	84,30 Angka	Rp1.417.700.000	84,40 Angka	Rp1.437.600.000	84,50 Angka	Rp1.456.300.000	84,50 Angka	Rp7.068.379.200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.832.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.272.316.420	84,15 Angka	Rp1.655.600.000	84,30 Angka	Rp1.676.356.000	84,40 Angka	Rp1.697.269.560	84,50 Angka	Rp1.718.342.255	84,50 Angka	Rp9.019.884.235	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.974.931.725	84,15 Angka	Rp2.077.334.231	84,30 Angka	Rp2.184.700.942	84,40 Angka	Rp2.189.700.942	84,50 Angka	Rp2.302.185.989	84,50 Angka	Rp10.728.853.829	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp770.000.000	1 indeks	Rp775.000.000	1 indeks	Rp780.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.705.952.000	84,15 Angka	Rp1.660.000.000	84,30 Angka	Rp1.695.600.000	84,40 Angka	Rp1.731.812.000	84,50 Angka	Rp145.000.000	84,50 Angka	Rp6.938.364.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp687.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.280.789.600	84,15 Angka	Rp1.314.168.000	84,30 Angka	Rp1.333.699.000	84,40 Angka	Rp1.352.994.000	84,50 Angka	Rp1.372.461.000	84,50 Angka	Rp6.654.111.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp2.860.862.400	84,15 Angka	Rp2.865.504.000	84,30 Angka	Rp2.970.504.000	84,40 Angka	Rp3.075.504.000	84,50 Angka	Rp3.180.504.000	84,50 Angka	Rp14.952.878.400	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp710.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.988.358.400	84,15 Angka	Rp2.422.950.000	84,30 Angka	Rp2.451.130.000	84,40 Angka	Rp2.479.540.000	84,50 Angka	Rp2.508.180.000	84,50 Angka	Rp12.850.158.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.384.037.982	84,15 Angka	Rp712.000.000	84,30 Angka	Rp734.000.000	84,40 Angka	Rp755.000.000	84,50 Angka	Rp765.000.000	84,50 Angka	Rp5.350.037.982	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.626.068.800	84,15 Angka	Rp1.640.000.000	84,30 Angka	Rp1.650.000.000	84,40 Angka	Rp1.660.000.000	84,50 Angka	Rp1.670.000.000	84,50 Angka	Rp8.246.068.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp699.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp777.179.200	84,15 Angka	Rp798.000.000	84,30 Angka	Rp810.000.000	84,40 Angka	Rp820.000.000	84,50 Angka	Rp835.000.000	84,50 Angka	Rp4.040.179.200	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp755.000.000	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.903.940.063	84,15 Angka	Rp2.720.040.000	84,30 Angka	Rp2.757.920.000	84,40 Angka	Rp2.786.920.000	84,50 Angka	Rp2.806.800.000	84,50 Angka	Rp13.975.620.063	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.844.080	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp815.000.000	1 indeks	Rp820.000.000	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.005.768.800	84,15 Angka	Rp1.998.780.605	84,30 Angka	Rp2.099.719.635	84,40 Angka	Rp2.205.455.616	84,50 Angka	Rp2.316.228.396	84,50 Angka	Rp10.625.953.052	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp861.000.000	1 indeks	Rp865.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.930.448.000	84,15 Angka	Rp2.940.000.000	84,30 Angka	Rp2.950.000.000	84,40 Angka	Rp2.960.000.000	84,50 Angka	Rp2.970.000.000	84,50 Angka	Rp14.750.448.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.000.000	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp720.000.000	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp730.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	83,95 angka	84 Angka	Rp1.800.979.200	84,15 Angka	Rp1.667.600.000	84,30 Angka	Rp1.674.600.000	84,40 Angka	Rp1.681.600.000	84,50 Angka	Rp1.686.600.000	84,50 Angka	Rp8.511.379.200	DINAS KESEHATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.000.000	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp850.000.000	1 indeks	Rp860.000.000	1 indeks	Rp867.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp2.651.878.200	84,15 Angka	Rp2.657.000.000	84,30 Angka	Rp2.663.000.000	84,40 Angka	Rp2.669.000.000	84,50 Angka	Rp2.675.000.000	84,50 Angka	Rp13.315.878.200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.818.858.400	84,15 Angka	Rp1.634.000.000	84,30 Angka	Rp1.644.000.000	84,40 Angka	Rp1.654.000.000	84,50 Angka	Rp1.664.000.000	84,50 Angka	Rp8.414.858.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,95 angka	84 Angka	Rp1.455.179.200	84,15 Angka	Rp1.481.075.000	84,30 Angka	Rp1.507.466.125	84,40 Angka	Rp1.534.178.117	84,50 Angka	Rp1.561.215.789	84,50 Angka	Rp7.539.114.231	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	85 angka	82,15		82,50		82,90		83,10		83,50		83,50		RUMAH SAKIT

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		angka	140.000.000.000,00	angka	140.126.643.000,00	angka	140.242.452.000,00	angka	140.347.144.000,00	angka	143.866.547.000,00	angka	704.582.786.000,00	PANEMBAHAN SENOPATI
				Capaian SPM Rumah Sakit	77,50 Persen	80 Persen		80,50 Persen		81,00 Persen		81,50 Persen		82,00 Persen		82,00 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,83	83 Angka	Rp6.231.608.230	83,5 Angka	Rp6.088.747.424	84 Angka	Rp6.292.974.714	84 Angka	Rp6.667.624.734	84 Angka	Rp6.729.739.755	84 Angka	Rp32.010.694.857	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	n/a	0	Rp0	65 Persen	Rp70.000.000.000	25 Persen	Rp30.000.000.000	10 Persen	Rp10.000.000.000		Rp0	100 Persen	Rp110.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp73.174.300.000	100 Persen	Rp850.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp425.000.000	100 Persen	Rp75.374.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	29,93 Persen	30 Persen	Rp12.435.566.438	35 Persen	Rp12.785.572.133	40 Persen	Rp12.914.129.346	45 Persen	Rp13.655.542.281	50 Persen	Rp14.421.096.509	50 Persen	Rp66.211.906.707	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten														DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	81,5 Persen	82,4 Persen		83,3 Persen		84,2 Persen		85,1 Persen		86 Persen		86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.064.441	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	85,19 Persen	Rp8.918.667.040	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	86,76 Persen	Rp9.962.587.119	100 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.417.653	89,89 Persen	Rp5.351.716.994	91,92 Persen	Rp5.436.888.693	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	95,98 Persen	Rp5.650.635.319	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	n/a	3,97 Persen	Rp3.635.314.000	4,6 Persen	Rp5.035.548.547	5,23 Persen	Rp5.309.103.402	5,86 Persen	Rp5.540.013.742	6,49 Persen	Rp4.636.195.116	6,49 Persen	Rp24.156.174.807	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	0 3	0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat kemantaban	80,62 Persen	81,03 Persen	Rp22.050.532.539	81,44 Persen	Rp22.812.684.000	81,85 Persen	Rp22.993.952.400	82,26 Persen	Rp23.063.347.640	82,67 Persen	Rp23.139.682.404	82,67 Persen	Rp114.060.198.983	DINAS PEKERJAAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERMUKIMAN	infrastruktur permukiman (jalan desa)														UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	n/a	10 Persen	Rp11.093.340.360	20 Persen	Rp25.059.600.452	30 Persen	Rp15.501.452.323	40 Persen	Rp66.089.613.546	50 Persen	Rp73.228.230.810	50 Persen	Rp190.972.237.491	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42 Persen	75,83 Persen	Rp39.940.351.125	76,24 Persen	Rp40.913.427.855	76,65 Persen	Rp40.954.770.640	77,06 Persen	Rp41.110.247.704	77,47 Persen	Rp42.120.859.933	77,47 Persen	Rp205.039.657.257	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34 Persen	72,84 Persen	Rp790.328.980	74,34 Persen	Rp842.300.472	75,84 Persen	Rp906.530.519	77,34 Persen	Rp1.077.183.571	78,84 Persen	Rp1.104.901.928	78,84 Persen	Rp4.721.245.470	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	21,33 Persen	22,67 Persen	Rp824.650.000	25,33 Persen	Rp2.500.000.000	28 Persen	Rp600.000.000	30,67 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp600.000.000	33,33 Persen	Rp5.124.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	n/a	70 Persen	Rp1.397.829.950	70,1 Persen	Rp2.350.000.000	70,2 Persen	Rp1.495.000.000	70,3 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp970.000.000	70,4 Persen	Rp7.182.829.950	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	90 Persen	Rp500.000.000	90 Persen	Rp1.910.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp150.000.000	90 Persen	Rp2.860.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	09	PROGRAM PENATAAN	Cakupan perencanaan	n/a	n/a	Rp0,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	penataan bangunan dan lingkungan														DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0 Persen	10,59 Persen	Rp4.266.816.699	21,18 Persen	Rp5.589.155.000	31,77 Persen	Rp5.648.070.500	42,36 Persen	Rp5.762.877.550	52,95 Persen	Rp5.939.165.305	52,95 Persen	Rp27.206.085.054	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	98,75 Persen	99,18 Persen	Rp421.652.609	99,39 Persen	Rp2.128.675.558	99,6 Persen	Rp2.348.253.042	99,8 Persen	Rp2.493.951.306	100 Persen	Rp2.692.300.000	100 Persen	Rp10.084.832.515	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	Rp406.039.100	100 Persen	Rp451.000.000	100 Persen	Rp496.100.000	100 Persen	Rp545.710.000	100 Persen	Rp600.281.000	100 Persen	Rp2.499.130.100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	27,22 Persen	29,37 Persen	600.000.000	45,44 Persen	1.500.000.000	66,88 Persen	2.500.000.000	88,31 Persen	3.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	Rp9.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN KEBUDAYAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	79 Angka	Rp2.952.127.000	80 Angka	Rp3.063.643.229	81 Angka	Rp3.370.007.552	82 Angka	Rp3.437.407.703	83 Angka	Rp3.781.148.473	83 Angka	Rp16.604.333.956	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0 5	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80 angka	81,00 Angka	Rp5.564.133.000	81,50 Angka	Rp10.902.809.000	82,00 Angka	Rp7.693.333.000	82,50 Angka	Rp6.247.815.000	83,00 Angka	Rp7.802.762.000	83,00 Angka	Rp38.210.852.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	-	Rp0	100 Persen	Rp350.000.000	100 Persen	Rp220.000.000	100 Persen	Rp5.050.000.000	100 Persen	Rp80.000.000	100 Persen	Rp5.700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01	0 5	0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana														AN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	82 Angka	Rp1.442.465.488	82 Angka	Rp1.471.857.672	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.442.465.362	83 Angka	Rp1.942.358.268	83 Angka	Rp7.741.612.152	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		DINAS SOSIAL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani														
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	75 Persen	Rp159.334.904	75 Persen	Rp152.030.720	80 Persen	Rp252.030.720	80 Persen	Rp375.547.904	80 Persen	Rp475.547.904	80 Persen	Rp1.414.492.152	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	80 Nilai	80 Nilai	Rp3.000.0	81 Nilai	Rp2.500.000	82 Nilai	Rp3.000.000	83 Nilai	Rp3.250.0	84 Nilai	Rp3.500.0	84 Nilai	Rp15.250.00	DINAS TENAGA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			00.000		.000		.000		00.000		00.000		0.000	KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 Persen	18,5 Persen	Rp3.400.000.000	19,5 Persen	Rp2.600.000.000	20,5 Persen	Rp2.750.000.000	21,5 Persen	Rp3.050.000.000	22,5 Persen	Rp3.350.000.000	22,5 Persen	Rp15.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	54 Persen	54 Persen	Rp7.595.276.000	56 Persen	Rp7.639.007.000	58 Persen	Rp7.929.068.000	60 Persen	Rp8.346.856.000	62 Persen	Rp8.845.071.000	62 Persen	Rp40.355.278.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 Persen	35 Persen	Rp1.350.000.000	36 Persen	Rp875.000.000	37 Persen	Rp900.000.000	38 Persen	Rp950.000.000	39 Persen	Rp975.000.000	39 Persen	Rp5.050.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	Rp550.000.000	38,67 Persen	Rp635.000.000	40 Persen	Rp775.000.000	41,33 Persen	Rp860.000.000	42,67 Persen	Rp815.000.000	42,67 Persen	Rp3.635.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KEBUDAYAAN															ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	Rp63.875.000	66 Persen	Rp71.875.000	69 Persen	Rp457.899.000	72 Persen	Rp547.899.000	75 Persen	Rp612.899.000	75 Persen	Rp1.754.447.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	Rp434.963.300	0.00032	Rp434.708.820	0.00031	Rp905.000.000	0.00028	Rp925.000.000	0.00026	Rp940.000.000	0.00026	Rp3.639.672.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6 persen	7 persen	Rp34.460.120	8 Persen	Rp34.460.120	9 Persen	Rp194.000.000	10 Persen	Rp294.000.000	11 Persen	Rp394.000.000	11 Persen	Rp950.920.240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kalurahan	Rp55.799.245	30 Kalurahan	Rp55.799.245	45 Kalurahan	Rp900.000.000	60 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp900.000.000	75 Kalurahan	Rp2.811.598.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	100 Persen	100 Persen	Rp629.728.475	100 Persen	Rp629.728.700	100 Persen	Rp881.000.000	100 Persen	Rp886.000.000	100 Persen	Rp891.000.000	100 Persen	Rp3.917.457.175	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang ditangani instansi terkait kabupaten														DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	30,67 Persen	37,33 Persen	Rp235.000.000	42,67 Persen	Rp340.000.000,00	48 Persen	Rp400.000.000,00	53,33 Persen	Rp390.000.000,00	58,67 Persen	Rp450.000.000,00	58,67 Persen	Rp1.815.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	n/a	14,28 Persen	Rp2.900.000	28,57 Persen	Rp20.000.000,00	57,14 Persen	Rp20.000.000	85,71 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp92.900.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	147,57 Persen	149 Persen	Rp525.935.120	151 Persen	Rp1.276.750.000,00	153 Persen	Rp1.276.750.000	155 Persen	Rp1.276.750.000	157 Persen	Rp1.519.750.000	157 Persen	Rp5.875.935.120	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	24 Persen	22,67 Persen	Rp80.687.000	21,33 Persen	Rp211.000.000	20 Persen	Rp211.000.000	18,67 Persen	Rp211.000.000	17,33 Persen	Rp325.000.000	17,33 Persen	Rp1.038.687.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	100 Persen	Rp31.000.000	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp61.000.000,00	100 Persen	Rp86.000.000,00	100 Persen	Rp300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,04	82 Angka	Rp941.654.430	83 Angka	Rp950.143.500	84 Angka	Rp923.791.000	85 Angka	Rp1.571.656.000	86 Angka	Rp2.310.564.000	86 Angka	Rp6.697.808.930	DINAS PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	n/a	90 Persen	Rp386.090.620	90 Persen	Rp13.400.000.000	90 Persen	Rp11.400.000.000	90 Persen	Rp10.400.000.000	90 Persen	Rp400.000.000	90 Persen	Rp35.986.090.620	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	20,73 Persen	33,03 Persen	Rp4.220.382.000	35,37 Persen	Rp7.318.511.500	44,74 Persen	Rp10.746.608.000	54,58 Persen	Rp11.010.451.000	64,89 Persen	Rp8.651.181.000	64,89 Persen	Rp41.947.133.500	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	3.278.515.080	83,25 Angka	Rp3.587.161.040	83,5 Angka	5.787.774.040	83,75 Angka	Rp3.980.745.040	84 Angka	4.191.158.040	84 Angka	Rp20.825.353.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan	n/a	0	-	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	Rp1.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				perundang-undangan														
2	1	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	n/a	14,29 Persen	382.795.740	57,14 Persen	Rp1.700.000.000	85,71 Persen	910.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Rp3.337.795.740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	n/a	70 Persen	4.895.237.000	75 Persen	Rp1.745.000.000	80 Persen	1.590.000.000	85 Persen	Rp1.705.000.000	90 Persen	1.800.000.000	90 Persen	Rp11.735.237.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	n/a	30 Persen	3.782.201.120	32 Persen	Rp5.895.936.560	34 Persen	5.426.000.000	36 Persen	Rp6.268.600.000	38 Persen	5.850.000.000	38 Persen	Rp27.222.737.680	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	n/a	31,35 Persen	14.675.000	33,10 Persen	Rp15.000.000	34,84 Persen	20.000.000	36,58 Persen	Rp22.500.000	38,32 Persen	23.000.000	100 Persen	Rp95.175.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	n/a	16,67 Persen	31.900.000	23,33 Persen	Rp51.000.000	25 Persen	64.000.000	31 Persen	Rp73.000.000	33,33 Persen	82.000.000	34 Persen	Rp301.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	n/a	5 Persen	82.820.500	5 Persen	Rp106.000.000	5 Persen	117.000.000	5 Persen	Rp124.000.000	5 Persen	145.000.000	5 Persen	Rp574.820.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	n/a	1 penghargaan	16.310.000	1 penghargaan	Rp40.000.000	1 penghargaan	44.000.000	1 penghargaan	Rp50.000.000	1 penghargaan	55.000.000	1 penghargaan	Rp205.310.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	100 Persen	14.950.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	Rp124.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560	44,16 Persen	Rp10.086.535.400	45,87 Persen	10.303.791.960	46,86 Persen	Rp10.913.471.960	50,07 Persen	13.208.471.960	50,07 Persen	Rp52.802.563.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83 Angka	Rp3.270.576.670	83.25 Angka	Rp3.527.457.358	83.50 Angka	Rp3.764.203.094	83.75 Angka	Rp4.029.945.929	84 Angka	Rp5.157.228.194	84 Angka	Rp19.749.411.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99 Persen	99,81 Persen	Rp626.137.394	99,82 Persen	Rp674.715.761	99,83 Persen	Rp735.641.493	99,84 Persen	Rp792.979.817	99,85 Persen	Rp872.277.799	99,85 Persen	Rp3.701.752.263	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	96 Persen	Rp431.856.669	96,1 Persen	Rp461.006.962	96,2 Persen	Rp500.562.813	96,3 Persen	Rp538.619.094	96,4 Persen	Rp592.481.004	96,4 Persen	Rp2.524.526.543	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99 Persen	99,5 Persen	Rp376.741.530	99,6 Persen	Rp900.380.308	99,7 Persen	Rp441.413.428	99,8 Persen	Rp479.554.771	99,9 Persen	Rp520.910.248	99,9 Persen	Rp2.719.000.285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	99 Persen	100 Persen	Rp89.968.737	100 Persen	Rp98.965.611	100 Persen	Rp108.862.172	100 Persen	Rp119.748.389	100 Persen	Rp113.902.755	100 Persen	Rp531.447.664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MASYARAKAT DAN DESA															
	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	n/a	82 Angka	824.075.615	83 Angka	865.278.871	84 Angka	908.542.814	85 Angka	953.969.955	86 Angka	1.001.668.453	86 Angka	4.553.535.708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan		100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp30.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	100 Persen	Rp3.458.543.215	100 Persen	Rp4.516.401.480	100 Persen	Rp4.222.310.172	100 Persen	Rp3.882.498.130	100 Persen	Rp4.294.388.138	100 Persen	Rp20.374.141.135	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	n/a	100 Persen	Rp2.488.565.670	100 Persen	Rp4.063.753.649	100 Persen	Rp4.493.629.014	100 Persen	Rp4.971.991.915	100 Persen	Rp5.168.197.409	100 Persen	Rp21.186.137.657	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	n/a	16 Persen	Rp600.000.000	36 Persen	Rp650.000.000	56 Persen	Rp700.000.000	77 Persen	Rp750.000.000	100 Persen	Rp800.000.000	100 Persen	Rp3.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	25 Persen	33 Persen	Rp1.057.984.500	41,67 Persen	Rp1.300.092.000	50 Persen	Rp1.300.092.000	58,33 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp6.258.352.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	Rp1.938.485.000	83 Angka	Rp1.250.000.000	83 Angka	Rp1.500.000.000	83 Angka	Rp1.650.000.000	83 Angka	Rp1.732.500.000	83 Angka	Rp8.070.985.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	1,67	1,66	Rp150.544.950	1,65	Rp150.000.000	1,64	Rp165.000.000	1,63	Rp181.500.000	1,62	Rp194.700.000	1,62	Rp841.744.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	n/a	77,2 Persen	Rp5.548.497.130	77,2 Persen	Rp2.344.401.250	77,2 Persen	Rp2.090.369.135	77,2 Persen	Rp2.704.599.135	77,2 Persen	Rp4.127.300.000	77,2 Persen	Rp16.815.166.650	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	82,5 Persen	83 Persen	Rp970.477.780	84 Persen	Rp973.795.865	84,5 Persen	Rp973.795.865	85 Persen	Rp1.123.795.865	85,5 Persen	Rp1.750.076.000	85,5 Persen	Rp5.791.941.375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERHUBUNGAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,00 angka	80,50 Angka	Rp965.187.000	80,75 Angka	Rp965.187.000	81 Angka	Rp1.061.705.000	81,25 Angka	Rp1.167.875.000	81,50 Angka	Rp1.284.662.000	81,50 Angka	Rp5.444.616.000	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	0	Rp0	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp3.390.000.000	100 Persen	Rp3.680.000.000	100 Persen	Rp2.010.000.000	100 Persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	30,43	Rp13.012.540.000	30,43	Rp9.220.389.000	30,43	Rp10.689.762.000	30,43	Rp12.312.443.000	30,43	Rp14.128.890.000	30,43	Rp59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	86 Angka	Rp1.938.603.598	87 Angka	Rp2.132.464.458	89 angka	Rp2.195.710.604	90 Angka	Rp2.415.281.266	92 Angka	Rp2.695.307.791	92 Angka	Rp11.377.367.717	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	50 Persen	70 Persen	Rp1.490.327.740	71 Persen	Rp1.639.360.514	72 Persen	Rp1.671.101.718	73 Persen	Rp1.698.953.412	74 Persen	Rp1.868.848.754	74 Persen	Rp8.368.592.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten														
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	n/a	1,29 Angka	Rp8.931.074.062	1.43 Angka	Rp9.824.181.468	1,57 Angka	Rp10.206.599.615	1,57 Angka	Rp10.592.259.576	1,58 Angka	Rp11.251.485.534	1,58 Angka	Rp50.805.600.255	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,34 angka	81 Angka	Rp2.775.856.027	81.5 Angka	Rp3.217.891.625	82 Angka	Rp3.505.716.000	82,5 Angka	Rp3.682.832.000	83 Angka	Rp4.333.290.583	83 Angka	Rp17.515.586.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi	2,5 Persen	2,5 Persen	Rp24.835.120	2,5 Persen	28.000.000	2,5 Persen	29.500.000	2,5 Persen	31.000.000	2,5 Persen	32.000.000	2,5 Persen	Rp145.335.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten														PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	66,88 Persen	70,23 Persen	Rp121.110.120	73,58 Persen	Rp155.895.000	75,25 Persen	Rp159.543.000	76,92 Persen	Rp166.757.500	78,59 Persen	Rp194.992.000	78,59 Persen	Rp798.297.620	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	56,54 Persen	59,52 Persen	Rp26.835.120	63,99 Persen	47.500.000	65,48 Persen	50.000.000	66,96 Persen	52.500.000	68,45 Persen	55.000.000	68,45 Persen	Rp231.835.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	60 Persen	Rp554.286.350	60 Persen	Rp169.774.000	60 Persen	Rp175.938.500	60 Persen	Rp187.325.000	60 Persen	Rp221.936.000	60 Persen	Rp1.309.259.850	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	Rp108.497.240	5 Persen	Rp281.127.000	5 Persen	Rp296.384.000	5 Persen	Rp314.845.000	5 Persen	Rp372.966.000	5 Persen	Rp1.373.819.240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	Rp599.342.940	55 Persen	Rp530.997.000	60 Persen	Rp564.096.000	65 Persen	Rp612.759.000	70 Persen	Rp736.976.000	70 Persen	Rp3.044.170.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	Rp410.733.440	65 Persen	Rp358.033.000	70 Persen	Rp364.207.500	75 Persen	Rp379.917.000	80 Persen	Rp420.988.000	80 Persen	Rp1.933.878.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	85 Angka	Rp1.167.283.800	85 Angka	Rp1.009.881.000	85 Angka	Rp1.521.264.000	85 Angka	Rp1.625.315.000	85 Angka	Rp2.494.934.000	85 Angka	Rp7.818.677.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	n/a	100 Persen	Rp149.330.000	100 Persen	Rp233.500.000	100 Persen	Rp256.850.000	100 Persen	Rp282.535.000	100 Persen	Rp236.500.000	100 Persen	Rp1.158.715.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	7,85 Persen	8,30 Persen	278.587.500	11,29 Persen	340.038.000	12,79 Persen	406.688.000	15,29 Persen	480.003.000	17,79 Persen	473.038.000	17,79 Persen	Rp1.978.354.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	Rp604.839.580	100 Persen	Rp463.100.000	100 Persen	Rp399.410.000	100 Persen	Rp439.351.000	100 Persen	Rp417.610.000	100 Persen	Rp2.324.310.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	Rp379.462.000	100 Persen	Rp413.962.000	100 Persen	Rp422.712.000	100 Persen	Rp432.337.000	100 Persen	Rp430.237.000	100 Persen	Rp2.078.710.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan	100 Persen	100 Persen	Rp102.785.120	100 Persen	Rp96.800.000	100 Persen	Rp106.480.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp117.128.000	100 Persen	Rp540.321.120	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PENANAMAN MODAL	Non Perijinan														TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	80 Persen	Rp1.445.340.480	81 Persen	Rp1.745.340.480	82 Persen	Rp1.995.340.480	83 Persen	Rp2.345.340.480	84 Persen	Rp4.845.340.480	84 Persen	Rp12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	55 Medali	Rp8.350.081.966	65 Medali	Rp8.650.081.966	80 Medali	Rp8.900.081.966	100 Medali	Rp9.250.081.966	130 Medali	Rp11.750.081.966	130 Medali	Rp46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	n/a	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Rp155.150.000	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp207.968.750	100 Persen	Rp228.765.625	100 Persen	Rp251.642.187	100 Persen	Rp1.014.191.562	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60 Persen	65 Persen	Rp1.184.565.600	70 Persen	Rp1.332.186.560	75 Persen	Rp1.374.185.313	80 Persen	Rp1.301.129.621	81 Persen	Rp2.508.509.884	81 Persen	Rp7.700.576.978	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22		URUSAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2		PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	80,98 Angka	Rp1.036.350.000	81 Angka	Rp1.093.102.000	81,3 Angka	Rp1.152.071.001	81,5 Angka	Rp1.213.332.240	81,6 Angka	Rp1.656.258.364	81,6 Angka	Rp6.151.113.605	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	54 Persen	61,03 Persen	1.425.000.000	68,38 Persen	3.936.386.000	75,74 Persen	6.862.053.999	83,08 Persen	5.733.225.960	90,44 Persen	6.077.448.556	90,44 Persen	Rp24.034.114.515	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Bahasa Sastra yang dilestarikan	n/a	18 Pelestarian	3.300.000.000	46 Pelestarian	6.879.050.000	76 Pelestarian	7.770.950.000	104 Pelestarian	7.177.450.500	132 Pelestarian	7.756.495.550	132 Pelestarian	Rp32.883.946.050	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	n/a	219 Pelestarian	10.125.000.000	454 Pelestarian	15.783.924.000	691 Pelestarian	16.251.193.000	953 Pelestarian	18.324.602.300	1215 Pelestarian	28.641.062.530	1215 Pelestarian	Rp89.125.781.830	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	80 Angka	Rp831.968.820	80 Angka	Rp850.000.000	80 Angka	Rp900.000.000	80 Angka	Rp950.000.000	80 Angka	Rp1.000.000.000	80 Angka	Rp4.531.968.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	7,61 Persen	10,08 Persen	Rp416.798.700	12,55 Persen	Rp527.804.000	14,02 Persen	Rp2.050.000.000	17,48 Persen	Rp600.000.000	19,95 Persen	Rp1.000.000.000	19,95 Persen	Rp4.594.602.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2 4	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	59 Persen	60 Persen	Rp215.832.480	61 Persen	Rp250.000.000	62 Persen	Rp300.000.000	63 Persen	Rp400.000.000	64 Persen	Rp700.000.000	64 Persen	Rp1.865.832.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				nasional)														
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 Persen	69 Persen	Rp19.236.000	70 Persen	Rp50.000.000	71 Persen	Rp1.133.865.000	72 Persen	Rp152.673.000	73 Persen	Rp167.080.000	73 Persen	Rp1.522.854.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp3.500.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	n/a	0	0	20 Persen	125.000.000	60 Persen	250.000.000	80 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	Rp625.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	Rp187.675.000	831 ton	Rp292.175.120,00	833 ton	Rp404.490.000,00	835 ton	Rp662.675.120,00	837 ton	Rp319.975.120,00	837 ton	Rp1.866.990.360	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	Rp1.459.882.000	12.805 ton	Rp1.474.817.880,00	12.878 ton	Rp3.610.882.000,00	12.959 ton	Rp1.613.413.880,00	13.046 ton	Rp2.133.888.880,00	13.046 ton	Rp10.292.884.640	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2	0	PROGRAM	Penurunan	5 Persen	5 Persen	Rp3.900.0	5	Rp3.900.000	5 Persen	Rp53.900.00	5 Persen	Rp53.900.	5	Rp79.900.	5 Persen	Rp195.500.0	DINAS

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	5	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	jumlah pelanggaran aturan			00	Persen	,00		0,00		000,00	Persen	000,00		00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	2 Persen	Rp42.900.000	2 Persen	Rp162.900.000,00	2 Persen	Rp127.900.000,00	5 Persen	Rp156.900.000,00	5 Persen	Rp306.950.000,00	5 Persen	Rp797.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp4.278.552.000	80 Angka	Rp4.570.540.000	82 Angka	Rp4.872.137.000	83 Angka	Rp5.183.648.000	84 Angka	Rp6.765.820.000	84 Angka	Rp25.670.697.000	DINAS PARIWISATA
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	32 Persen	33,33 Persen	Rp1.000.000.000	34,67 Persen	Rp2.379.500.000	36 Persen	Rp1.475.000.000	37,33 Persen	Rp1.525.000.000	38,67 Persen	Rp1.760.000.000	93 Persen	Rp8.139.500.000	DINAS PARIWISATA
1	0 3	1 3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	Rp0	100 Persen	Rp735.000.000	100 Persen	Rp0	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp1.635.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 Persen	Rp2.902.000.000	3,13 Persen	Rp5.402.000.000	3,13 Persen	Rp3.602.000.000	3,13 Persen	Rp8.902.000.000	3,13 Persen	Rp7.902.000.000	3,13 Persen	Rp28.710.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	n/a	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp4.834.000.000	DINAS PARIWISATA
3	2 6	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	n/a	2 CBT	Rp171.000.000	2 CBT	Rp549.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp499.000.000	2 CBT	Rp49.000.000	2 CBT	Rp1.317.000.000	DINAS PARIWISATA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			EKONOMI KREATIF	Kreatif														
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	Rp0	25 Persen	Rp522.000.000	35 Persen	Rp622.000.000	50 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp622.000.000	100 Persen	Rp2.388.000.000	DINAS PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a		100 Persen	Rp2.833.025.000							100 Persen	Rp2.833.025.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	Rp1.845.737.082	85 Angka	Rp2.576.729.802	85 Angka	Rp2.351.698.802	85 Angka	Rp2.230.167.802	85 Angka	Rp2.572.698.802	85 Angka	Rp11.577.032.290	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	100 Persen	Rp1.585.571.950	100 Persen	Rp2.746.076.470	100 Persen	Rp3.146.076.470	100 Persen	Rp3.446.076.470	100 Persen	Rp4.196.951.470	100 Persen	Rp15.120.752.830	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	Rp1.699.075.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp1.892.125.000,00	100 Persen	Rp6.357.575.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Penurunan kejadian dan	100 Persen	100 Persen	Rp1.941.072.488	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp2.814.455.368	100 Persen	Rp1.578.210.368	100 Persen	Rp8.962.648.960	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	jumlah kasus penyakit hewan menular														PERTANIAN
				Produksi Daging	15.326 Ton	15.456 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton		15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Rp70.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp2.375.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.700.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp22.000.000	100 Persen	Rp32.000.000	100 Persen	Rp100.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	Rp792.243.360	6,315 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,32 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,325 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,33 ton/ha	Rp1.213.323.360	6,33 ton/ha	Rp5.090.536.800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	0 Persen	14 Persen	400.000.000	28 Persen	1.447.073.000	40 Persen	2.528.000.000	50 Persen	2.537.000.000	70 Persen	2.537.000.000	70 Persen	Rp9.449.073.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 Persen	51 Persen	Rp160.000.000	52 Persen	Rp168.000.000	53 Persen	Rp184.800.000	54 Persen	Rp194.040.000	55 Persen	Rp213.444.000	55 Persen	Rp920.284.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	1 Persen	2 Persen	Rp6.070.923.713	3 Persen	Rp7.294.730.000	4 Persen	Rp6.623.334.000	5 Persen	Rp6.923.334.000	6 Persen	Rp8.200.000.000	6 Persen	Rp35.112.321.713	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																		DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8 Persen	7 Persen	Rp179.957.500	7 Persen	Rp188.955.375	6 Persen	Rp207.850.900	6 Persen	Rp218.243.400	5 Persen	Rp242.000.000	5 Persen	Rp1.037.007.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	83 juta US$	80 juta US$	Rp654.020.000	90 juta US$	Rp686.721.000	100 juta US$	Rp755.393.100	110 juta US$	Rp873.162.700	120 juta US$	Rp1.200.000.000	500 juta US$	Rp4.169.296.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25 Persen	27 Persen	Rp349.223.100	30 Persen	Rp384.145.000	32 Persen	Rp422.559.500	35 Persen	Rp443.687.400	40 Persen	Rp488.056.200	40 Persen	Rp2.087.671.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 0	0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	0 Persen	-	Rp0	10 Persen	Rp300.000.000	15 Persen	Rp500.000.000	20 Persen	Rp525.000.000	25 Persen	Rp600.000.000	25 Persen	Rp1.925.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	3 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	81,50%	85,97 Persen	Rp1.684.041.210	90,65 Persen	Rp2.702.391.000	95,32 Persen	Rp2.151.503.500	100 Persen	Rp2.305.827.000	100 Persen	Rp2.773.672.217	100 Persen	Rp11.617.434.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK														
3	3 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	100 Persen	Rp25.735.120	100 Persen	Rp44.500.000	100 Persen	Rp49.000.000	100 Persen	Rp52.000.000	100 Persen	Rp57.000.000	100 Persen	Rp228.235.120	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0 Persen	0 Persen	Rp0	0,22 Persen	Rp50.000.000	0,22 Persen	Rp62.000.000	0,22 Persen	Rp63.000.000	0,22 Persen	Rp65.000.000	0,22 Persen	Rp240.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2 2	0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	9,33 Persen	10,67 persen	Rp400.000.000	12 persen	Rp593.000.000	13,33 persen	Rp828.000.000	14,67 persen	Rp406.000.000	17,33 persen	Rp393.000.000	17,33 persen	Rp2.620.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3		URUSAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1		PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	3 2	0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	72 Persen	74 Persen	Rp575.000.000	80 Persen	Rp600.000.000	90 Persen	Rp625.000.000	100 Persen	Rp650.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	100 Persen	Rp3.150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	0 1		SEKRETARIAT DAERAH															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	14.208.911.120	83 Angka	10.249.528.900	83 Angka	11.331.547.240	83 Angka	10.800.822.664	83 Angka	11.784.585.000	83 Angka	Rp58.375.394.924	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	92 Persen	92 Persen	Rp1.043.927.620	92 Persen	Rp1.151.371.000	92 Persen	Rp1.266.508.100,00	92 Persen	Rp1.393.158.910,00	92 Persen	Rp1.532.490.000,00	92 Persen	Rp6.387.455.630	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				(EKPPD)														
				Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	Rp442.575.000	100 Persen	Rp550.000.000	100 Persen	Rp580.000.000	100 Persen	Rp595.000.000	100 Persen	Rp620.000.000	100 Persen	Rp2.787.575.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp3.723.619.270	100 Persen	Rp4.857.000.000	100 Persen	Rp5.342.700.000	100 Persen	Rp5.876.970.000	100 Persen	Rp5.375.000.000	100 Persen	Rp25.175.289.270	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp239.850.000	100 Persen	Rp553.207.500	100 Persen	Rp666.046.500	100 Persen	Rp714.387.650	100 Persen	Rp780.000.000	100 Persen	Rp2.953.491.650	SEKRETARIAT DAERAH
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 Persen	80 Persen	Rp1.095.088.990	80 Persen	Rp2.169.305.600	80 Persen	Rp2.386.236.160	80 Persen	Rp2.624.859.776	80 Persen	Rp2.663.111.000	80 Persen	Rp10.938.601.526	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	0 Persen	87,5 Persen	261.050.000	88 Persen	261.050.000	88,5 Persen	261.050.000	89 Persen	261.050.000	89,5 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89.50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan	80.5 Persen	81 Persen	150.000.000	82 Persen	200.000.000	83 Persen	230.000.000	84 Persen	245.000.000	85 Persen	250.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				SATRIYA di PD Kabupaten Bantul														
4	02		SEKRETARIAT DEWAN															
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	84 Angka	Rp28.007.830.550	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp34.625.814.130	85 Angka	Rp37.263.395.543	85 Angka	Rp40.989.735.097	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	80 Persen	82 Persen	Rp14.943.253.450	84 Persen	Rp13.013.911.337	86 Persen	Rp11.035.494.870	88 Persen	Rp8.316.640.457	90 Persen	Rp9.980.250.903	90 Persen	Rp57.289.551.018	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85,5 Angka	Rp1.595.755.060	86 Angka	Rp1.675.542.813	86,5 Angka	Rp1.759.319.954	87 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp1.759.319.954	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	90 Persen	95 Persen	Rp330.502.000	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp506.413.800	100 Persen	Rp554.065.000	100 Persen	Rp601.315.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	100 Persen	Rp2.351.135.980	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp3.475.219.775	100 Persen	Rp4.348.590.929	100 Persen	Rp4.646.105.575	100 Persen	Rp17.938.226.189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase indikator sasaran Renstra	95 Persen	95 Persen		96 Persen		96 Persen		97 Persen		97 Persen		97 Persen		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi														
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	100 Persen	Rp1.572.022.220	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp8.339.577.877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
5	02		KEUANGAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,14 Angka	84,5 Angka	Rp684.327.504.740	85 Angka	Rp709.274.223.000	85 Angka	Rp716.438.030.000	85,5 Angka	Rp730.029.284.000	85,5 Angka	Rp737.972.504.000	85,5 Angka	Rp3.578.041.545.740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	80 Persen	Rp299.595.500	83 Persen	Rp500.000.000	85 Persen	Rp550.000.000	88 Persen	Rp605.000.000	90 Persen	Rp665.500.000	90 Persen	Rp2.620.095.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp342.169.016.830	Tepat Waktu	Rp324.547.097.500	Tepat Waktu	Rp325.811.451.000	Tepat Waktu	Rp318.197.011.000	Tepat Waktu	Rp323.284.972.890	Tepat Waktu	Rp1.634.009.549.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	87,84 Persen	89 Persen		89 Persen		90 Persen		90 Persen		91 Persen		91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	Rp1.262.739.710	100 Persen	Rp1.470.000.000	100 Persen	Rp1.542.000.000	100 Persen	Rp2.114.000.000	100 Persen	Rp1.692.000.000	100 Persen	Rp8.080.739.710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	Rp10.302.989.220	100 Persen	Rp12.193.391.500	100 Persen	Rp12.827.418.000	100 Persen	Rp13.430.197.000	100 Persen	Rp14.082.037.110	100 Persen	Rp62.836.032.830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	82,43 Angka	Rp98.789.110.760	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,55 Angka	Rp102.195.950.000	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	82,65 Angka	Rp105.113.512.700	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	7 Persen	20 Persen	Rp381.726.000	40 Persen	Rp741.084.500	60 Persen	Rp741.084.500	75 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pengisian	n/a	30 Persen	Rp8.953.282.240	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp6.377.996.500	32 Persen	Rp6.426.537.800	32 Persen	Rp6.527.537.800	32 Persen	Rp34.814.116.440	BADAN KEPEGAWAIAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAERAH	kebutuhan formasi ASN														DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Peta Kompetensi ASN	n/a	6 Persen		9 Persen		12 Persen		15 Persen		18 Persen		18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	n/a	100 Persen	Rp230.343.740	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp253.953.973	100 Persen	Rp1.221.973.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,93 angka	83 Angka	Rp2.141.908.600	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp3.695.858.239	83 Angka	Rp4.260.897.302	83 Angka	Rp5.176.587.857	83 Angka	Rp18.130.253.801	INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	0	0	0	38,89 Persen	219.857.000	44,44 Persen	241.842.700	50 Persen	266.026.970	55,56 Persen	292.629.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat	n/a	12 Persen	Rp194.072.500	13 Persen	Rp303.445.378	14 Persen	Rp449.410.881	15 Persen	Rp643.072.513	16 Persen	Rp1.003.533.390	16 Persen	Rp2.593.534.663	INSPEKTORAT DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah terhadap peraturan yang berlaku														
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 Persen	Rp1.293.514.900	25 Persen	Rp1.432.401.820	30 Persen	Rp1.710.576.180	35 Persen	Rp2.367.871.214	40 Persen	Rp2.701.817.752	40 Persen	Rp9.506.181.867	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN															-
7	01		KAPANEWON															-
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANTUL
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	90 Persen	Rp31.520.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp32.976.000	90 Persen	Rp163.424.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100 Persen	Rp84.800.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp352.600.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraa	n/a	100 Persen	Rp143.690.000	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp844.753.440	KAPANEWON BANTUL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN UMUM	n Pemerintahan Umum														
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	85 Angka	Rp537.101.000	85 Angka	Rp679.013.140	85 Angka	Rp916.883.140	85 Angka	Rp1.159.235.140	85 Angka	Rp1.719.035.140	85 Angka	Rp5.011.267.560	KAPANEWON BANTUL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,59 Angka	80 Angka	Rp556.197.000	81 Angka	Rp641.466.500	82 Angka	Rp795.269.000	83 Angka	Rp976.385.000	84 Angka	Rp1.225.508.000	84 Angka	Rp4.194.825.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	95 Angka	Rp41.187.500	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka	Rp81.000.000	95 Angka	Rp115.000.000	95 Angka	Rp174.500.000	95 Angka	Rp482.437.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90%	90 Persen	Rp125.436.000	91 Persen	Rp137.450.000	92 Persen	Rp168.000.000	93 Persen	Rp172.000.000	94 Persen	Rp255.000.000	94 Persen	Rp857.886.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100%	100 Persen	Rp91.653.500	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen	Rp131.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp270.000.000	100 Persen	Rp734.307.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Stabilitas	n/a	100 Persen	Rp5.000.000	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen	Rp21.000.000,00	100 Persen	Rp32.000.000,00	100 Persen	Rp63.000.000,00	100 Persen	Rp131.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPUR

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														O
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	80 Angka	Rp564.587.500	80 Angka	Rp681.232.000	80 Angka	Rp830.000.000	80 Angka	Rp992.239.000	80 Angka	Rp1.537.926.000	80 Angka	Rp4.605.984.500	KAPANEWON DLINGO
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON DLINGO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp31.995.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp90.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp145.000.000	100 Persen	Rp421.995.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	100 Persen	Rp138.447.500	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp210.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp1.003.447.500	KAPANEWON DLINGO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp104.587.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp694.587.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp10.980.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp38.710.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp139.690.000	KAPANEWON DLINGO
X	X	0	PROGRAM	Capaian Nilai	80 Angka	80 Angka	Rp586.98	81	Rp633.681.0	81 Angka	Rp728.092.0	82 Angka	Rp864.62	82	Rp1.370.7	100	Rp4.184.086	KAPANEWON

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			2.500	Angka	00		00		1.000	Angka	10.000	Persen	.500	IMOGIRI
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	85 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON IMOGIRI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	Rp37.200.000	96 Persen	Rp55.000.000	97 Persen	Rp80.000.000	98 Persen	Rp125.000.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp452.200.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	95 Persen	Rp188.122.500	96 Persen	Rp210.000.000	97 Persen	Rp280.000.000	98 Persen	Rp341.000.000	100 Persen	Rp390.000.000	100 Persen	Rp1.409.122.500	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	95 Persen	Rp49.750.000	96 Persen	Rp130.000.000	97 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	100 Persen	Rp205.000.000	100 Persen	Rp724.750.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp18.600.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp93.000.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp110.000.000	0 Persen	Rp371.600.000	KAPANEWON IMOGIRI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp577.192.500	90 Angka	Rp663.568.500	90 Angka	Rp895.779.500	90 Angka	Rp1.152.411.500	90 Angka	Rp1.722.260.500	90 Angka	Rp5.011.212.500	KAPANEWON JETIS

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON JETIS
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON JETIS
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp25.475.000	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp28.187.500	90 Persen	Rp138.225.000	KAPANEWON JETIS
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp130.585.000	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp161.266.500	80 Persen	Rp775.651.000	KAPANEWON JETIS
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp119.087.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp651.137.500	KAPANEWON JETIS
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp15.000.000,00	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp5.250.000,00	100 Persen	Rp36.000.000	KAPANEWON JETIS
7	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	80 Angka	Rp623.496.000	81 Angka	Rp520.847.000	81 Angka	Rp634.537.000	82 Angka	Rp840.830.000	82 Angka	Rp985.535.000	84 Angka	Rp3.605.245.000	KAPANEWON KRETEK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KRETEK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Keistimewaan yang Berkualitas														
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp56.700.000	90 Persen	Rp100.000.000	91 Persen	Rp104.000.000	91 Persen	Rp108.000.000	92 Persen	Rp250.000.000	94 Persen	Rp618.700.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp135.000.000	82 Persen	Rp173.000.000	83 Persen	Rp217.000.000	85 Persen	Rp229.000.000	87 Persen	Rp341.000.000	87 Persen	Rp1.095.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	87 Persen	Rp73.000.000	88 Persen	Rp135.000.000	89 Persen	Rp197.000.000	90 Persen	Rp206.000.000	92 Persen	Rp315.000.000	92 Persen	Rp926.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp4.000.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp16.000.000	100 Persen	Rp18.000.000	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp98.000.000	KAPANEWON KRETEK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Persen	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp116.040.000	100 Persen	Rp509.460.000	KAPANEWON KASIHAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON KASIHAN
				Tingkat penerapan	n/a	85 Angka	Rp624.412.800	85 Angka	Rp705.586.439	85 Angka	Rp850.321.527	85 Angka	Rp953.380.527	85 Angka	Rp1.280.023.712	85 Angka	Rp4.413.725.005	KAPANEWON KASIHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp60.147.000	100 Persen	Rp61.681.100	100 Persen	Rp84.569.320	100 Persen	Rp144.569.320	100 Persen	Rp214.820.257	100 Persen	Rp565.786.997	KAPANEWON KASIHAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp98.440.367	90 Persen	Rp111.462.477	90 Persen	Rp134.306.972	90 Persen	Rp174.306.972	90 Persen	Rp254.966.087	90 Persen	Rp773.482.875	KAPANEWON KASIHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	90 Persen	Rp40.146.000	90 Persen	Rp35.679.800	90 Persen	Rp73.367.760	90 Persen	Rp103.367.760	90 Persen	Rp164.198.151	90 Persen	Rp416.759.471	KAPANEWON KASIHAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	90 Persen	Rp46.777.833	90 Persen	Rp89.301.184	90 Persen	Rp117.713.421	90 Persen	Rp147.713.421	90 Persen	Rp215.064.793	90 Persen	Rp616.570.652	KAPANEWON KASIHAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Persen	80 Angka	Rp503.750.000	81 Angka	Rp595.188.000	82 Angka	Rp807.961.000	83 Angka	Rp989.991.000	83 Angka	Rp1.474.032.000	83 Angka	Rp4.370.922.000	KAPANEWON PANDAK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PANDAK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten	n/a	0 Persen		82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PANDAK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Bantul														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	89 Persen	Rp32.650.000	90 Persen	Rp37.900.000	90 Persen	Rp46.250.000	90 Persen	Rp66.600.000	90 Persen	Rp81.500.000	90 Persen	Rp264.900.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	82 Persen	Rp179.895.000	84 Persen	Rp224.935.000	86 Persen	Rp238.110.000	88 Persen	Rp266.950.000	88 Persen	Rp303.500.000	88 Persen	Rp1.213.390.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 Persen	82 Persen	Rp94.850.000	84 Persen	Rp134.850.000	86 Persen	Rp134.850.000	88 Persen	Rp149.000.000	88 Persen	Rp184.850.000	88 Persen	Rp698.400.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp6.310.000	100 Persen	Rp8.400.000	100 Persen	Rp18.400.000	100 Persen	Rp22.500.000	100 Persen	Rp26.750.000	100 Persen	Rp82.360.000	KAPANEWON PANDAK
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	95 Persen	Rp45.300.000	95 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp50.000.000	95 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PUNDONG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp399.541.000	90 Angka	Rp525.870.520	90 Angka	Rp728.127.745	90 Angka	Rp953.350.684	90 Angka	Rp1.479.373.976	90 Angka	Rp4.086.263.925	KAPANEWON PUNDONG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan penyelenggaran pemerintahan	100 Persen	90 Persen	Rp32.012.500	90 Persen	Rp29.974.875	90 Persen	Rp31.473.619	90 Persen	Rp33.047.299	90 Persen	Rp34.699.664	90 Persen	Rp161.207.957	KAPANEWON PUNDONG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PUBLIK	dan pelayanan publik														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 Persen	Rp210.794.000	80 persen	Rp215.638.605	80 persen	Rp226.420.535	80 persen	Rp237.741.712	80 persen	Rp249.628.640	80 persen	Rp1.140.223.492	KAPANEWON PUNDONG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp169.492.500	90 persen	Rp169.916.250	90 persen	Rp178.412.063	90 persen	Rp187.332.666	90 persen	Rp196.699.299	90 persen	Rp901.852.778	KAPANEWON PUNDONG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	90 persen	Rp4.790.000	100 Persen	Rp14.925.750	100 Persen	Rp25.672.038	100 Persen	Rp16.455.639	100 Persen	Rp17.278.421	100 Persen	Rp79.121.848	KAPANEWON PUNDONG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	80 Angka	Rp549.024.000	80 Angka	Rp621.299.000	81 Angka	Rp770.338.000	81 Angka	Rp869.984.000	82 Angka	Rp1.424.155.000	82 Angka	Rp4.234.800.000	KAPANEWON PLERET
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PLERET
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PLERET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp38.992.500	90 Persen	Rp51.500.000	95 Persen	Rp72.000.000	95 Persen	Rp119.500.000	100 Persen	Rp110.000.000	100 Persen	Rp391.992.500	KAPANEWON PLERET
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Cakupan Pemberdayaan Kepada	100 Persen	90 Persen	Rp126.387.500	90 Persen	Rp151.000.000	95 Persen	Rp180.500.000	95 Persen	Rp232.000.000	100 Persen	Rp240.000.000	100 Persen	Rp929.887.500	KAPANEWON PLERET

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KELURAHAN	Masyarakat														
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp115.475.000	90 Persen	Rp135.000.000	95 Persen	Rp160.000.000	95 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp190.000.000	100 Persen	Rp785.475.000	KAPANEWON PLERET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp55.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	100 Persen	Rp178.015.000	KAPANEWON PLERET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	82 Angka	Rp525.235.000	82 Angka	Rp614.882.000	82 Angka	Rp766.327.000	82 Angka	Rp955.906.000	82 Angka	Rp1.364.391.000	82 Angka	Rp4.226.741.000	KAPANEWON PIYUNGAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PIYUNGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	92 Persen	Rp42.072.500	92 Persen	Rp75.000.000	92 Persen	Rp115.000.000	92 Persen	Rp125.000.000	92 Persen	Rp165.000.000	92 Persen	Rp522.072.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp124.932.500	100 Persen	Rp136.400.000	100 Persen	Rp155.000.000	100 Persen	Rp177.950.000	100 Persen	Rp235.750.000	100 Persen	Rp830.032.500	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 Persen	100 Persen	Rp135.000.000	100 Persen	Rp150.000.000	100 Persen	Rp165.000.000	100 Persen	Rp185.000.000	100 Persen	Rp245.000.000	100 Persen	Rp880.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kapanewon														
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp8.015.000	100 Persen	Rp17.500.000	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp40.000.000	100 Persen	Rp45.000.000	100 Persen	Rp145.515.000	KAPANEWON PIYUNGAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PAJANGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,53 Angka	80 Angka	Rp626.138.500	81 Angka	Rp730.288.000	81 Angka	Rp806.700.000	82 Angka	Rp875.900.000	82 Angka	Rp1.114.100.000	82 Angka	Rp4.153.126.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	88 Persen	Rp36.387.500	89 Persen	Rp55.000.000	90 Persen	Rp95.464.000	91 Persen	Rp150.000.000	92 Persen	Rp255.500.000	92 Persen	Rp592.351.500	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	88 Persen	Rp74.797.000	89 Persen	Rp87.500.000	90 Persen	Rp125.000.000	91 Persen	Rp185.000.000	92 Persen	Rp281.211.000	92 Persen	Rp753.508.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	88 Persen	Rp10.210.000	89 Persen	Rp16.000.000	90 Persen	Rp73.000.000	91 Persen	Rp120.000.000	92 Persen	Rp194.000.000	92 Persen	Rp413.210.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	n/a	100 Persen	Rp97.249.000	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp130.000.000	100 Persen	Rp145.498.000	100 Persen	Rp200.000.000	100 Persen	Rp672.747.000	KAPANEWON PAJANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UMUM	Pemerintahan Umum														
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp55.797.500	91 Persen	Rp73.000.000	92 Persen	Rp74.000.000	93 Persen	Rp75.000.000	94 Persen	Rp76.000.000	94 Persen	Rp353.797.500	KAPANEWON SANDEN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp147.554.500	81 Persen	Rp166.207.600	82 Persen	Rp167.207.600	83 Persen	Rp168.207.600	84 Persen	Rp169.207.600	84	Rp818.384.900	KAPANEWON SANDEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	87 Persen	Rp98.000.000	88 Persen	Rp111.000.000	89 Persen	Rp112.000.000	90 Persen	Rp113.000.000	91 Persen	Rp114.000.000	91 Persen	Rp548.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp13.000.000	100 Persen	Rp66.000.000	100 Persen	Rp67.000.000	100 Persen	Rp68.000.000	100 Persen	Rp69.000.000	100 Persen	Rp283.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Angka	80 Angka	Rp505.086.000	81 Angka	Rp527.633.400	82 Angka	Rp754.492.400	83 Angka	Rp985.079.400	85 Angka	Rp1.523.654.400	85 Angka	Rp4.295.945.600	KAPANEWON SANDEN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	85 Angka	85 Angka	Rp481.662.000	86 Angka	Rp585.850.000	87 Angka	Rp798.206.000	88 Angka	Rp1.012.352.000	89 Angka	Rp1.530.821.000	89 Angka	Rp4.408.891.000	KAPANEWON SRANDAKAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Instansi Pemerintah (AKIP)														
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SRANDAKAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp44.500.000	91 Persen	Rp46.750.000	92 Persen	Rp49.000.000	93 Persen	Rp51.500.000	94 Persen	Rp54.000.000	94 Persen	Rp245.750.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	95 Persen	Rp146.875.000	95 Persen	Rp155.000.000	96 Persen	Rp162.750.000	97 Persen	Rp171.000.000	98 Persen	Rp180.000.000	98 Persen	Rp815.625.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	95 Persen	Rp132.125.000	95 Persen	Rp138.750.000	96 Persen	Rp145.000.000	97 Persen	Rp152.250.000	98 Persen	Rp160.000.000	98 Persen	Rp728.125.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp9.622.000	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp10.500.000	100 Persen	Rp11.000.000	100 Persen	Rp11.550.000	100 Persen	Rp52.672.000	KAPANEWON SRANDAKAN
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	96 Persen	Rp45.300.000	97 Persen	Rp66.040.000	98 Persen	Rp66.040.000	99 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEWON

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEWON
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 angka	90 Angka	Rp661.307.388	90 Angka	Rp677.434.308	90 Angka	Rp818.371.308	90 Angka	Rp958.371.308	90 Angka	Rp1.378.865.268	90 Angka	Rp4.494.349.580	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp58.215.000	90 Persen	Rp60.215.000,00	90 Persen	Rp60.215.000,00	90 Persen	Rp63.351.000,00	90 Persen	Rp63.351.000,00	90 Persen	Rp305.347.000	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	80 Persen	Rp57.620.112	80 Persen	Rp60.535.000,00	80 Persen	Rp120.535.000,00	80 Persen	Rp210.535.000,00	80 Persen	Rp310.164.040,00	80 Persen	Rp759.389.152	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp88.357.500	100 Persen	Rp164.154.692,00	100 Persen	Rp194.154.692,00	100 Persen	Rp220.194.692,00	100 Persen	Rp276.154.692,00	100 Persen	Rp943.016.268	KAPANEWON SEWON
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp10.350.000	100 Persen	Rp76.390.000,00	100 Persen	Rp98.516.000,00	100 Persen	Rp98.516.000,00	100 Persen	Rp119.556.000,00	100 Persen	Rp403.328.000	KAPANEWON SEWON
04	0 1	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp66.040.000,00	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEDAYU
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000,00	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON SEDAYU

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				ASN di Kabupaten Bantul														
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,23 angka	85 Angka	Rp598.889.000	85 Angka	Rp626.997.000	85 Angka	Rp856.620.000	85 Angka	Rp1.110.913.000	85 Angka	Rp1.675.020.000	85 Angka	Rp4.868.439.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	90 Persen	Rp25.050.000	90 Persen	Rp40.900.000,00	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp40.900.000	90 Persen	Rp188.650.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Rp65.400.000	100 Persen	Rp75.900.000,00	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp369.000.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp145.850.000	100 Persen	Rp49.500.000,00	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp343.850.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp6.000.000	100 Persen	Rp188.000.000,00	100 Persen	Rp198.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp768.000.000	KAPANEWON SEDAYU
04	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp 45.300.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp 66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp -	82 Persen	Rp 50.000.000	83 Persen	Rp 50.000.000	84 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp 50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG	Capaian Nilai Akuntabilitas	85 Angka	85 Angka	Rp 605.041.5	85 Angka	Rp 707.071.700	85 Angka	Rp 901.750.000	85 Angka	Rp 1.105.000	85 Angka	Rp 1.567.000.	85 Angka	Rp4.885.863.540	KAPANEWON BANGUNTAPAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			00						.000		000			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 Persen	Rp 39.500.000	90 Persen	Rp 45.000.000	90 Persen	Rp 60.000.000	90 Persen	Rp 85.000.000	90 Persen	Rp 115.000.000	90 Persen	Rp344.500.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	90 Persen	Rp 114.962.500	90 Persen	Rp 124.962.500	90 Persen	Rp 144.962.500	90 Persen	Rp 163.434.500	90 Persen	Rp 214.484.500	90 Persen	Rp762.806.500	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	90 Persen	Rp 129.225.000	90 Persen	Rp 147.241.800	90 Persen	Rp 167.241.800	90 Persen	Rp 177.241.800	90 Persen	Rp 225.650.000	90 Persen	Rp846.600.400	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100 Persen	Rp 10.600.000	100 Persen	Rp 11.750.000	100 Persen	Rp 14.501.700	100 Persen	Rp 16.255.700	100 Persen	Rp 20.366.500	100 Persen	Rp73.473.900	KAPANEWON BANGUNTAPAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85 Angka	Rp522.514.010	86 Angka	Rp808.737.010	87 Angka	Rp1.182.745.010	88 Angka	Rp800.000.000	89 Angka	Rp950.000.000	100 Angka	Rp4.263.996.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	95 Persen	95 Persen	Rp341.009.000	100 Persen	Rp391.000.000	100 Persen	Rp416.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp1.998.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	37,33 Persen	57,33 Persen	Rp2.229.678.400	84 Persen	Rp2.849.967.990	100 Persen	Rp33.599.967.990	100 Persen	Rp2.400.000.000	100 Persen	Rp2.500.000.000	100 Persen	Rp43.579.614.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	10,36 Persen	18 Persen	Rp61.000.000	23 Persen	Rp126.000.000	28 Persen	Rp226.000.000	33 Persen	Rp125.000.000	37 Persen	Rp168.049.000	95 Persen	Rp706.049.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	100 Persen	Rp360.293.590	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp1.960.293.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	Rp222.267.000	100 Persen	Rp447.267.000	100 Persen	Rp547.267.000	100 Persen	Rp409.446.000	100 Persen	Rp450.000.000	100 Persen	Rp2.076.247.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	n/a	-	0	35 Persen	417.000.000	50 Persen	575.000.000	66,67 Persen	645.000.000	100 Persen	740.000.000	100 Persen	Rp2.377.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Rp2.141.090.935.000		Rp2.393.621.289.000		Rp2.335.645.090.000		Rp2.369.372.795.000		Rp2.433.607.603.000			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja makro daerah, indikator kinerja utama daerah (sasaran daerah) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah).

Indikator kinerja makro bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro Kabupaten Bantul tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44
2	Tingkat Kemiskinan	%	13.50	13.50	13.37	12.9	12.5	12.05	11.5	11.5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.90	3.50	3.40	3.30	3.20	3.20
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.80	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12
5	Rasio Gini	Angka	0.381	0.37	0.36	0.35	0.325	0.32	0.31	0.31

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	IKU PEMDA
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA
3	Nilai Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3.24	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45	3.45	IKU PEMDA
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.03	88.03	88.10	88.40	88.80	89.10	89.50	89.50	IKU PEMDA
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	73.90	74.01	74.11	74.20	74.29	74.39	74.39	IKU PEMDA
7	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	IKU PEMDA
8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	IKU PEMDA
9	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PEMDA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	IKU PEMDA
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.90	3.50	3.40	3.30	3.20	3.20	IKU PEMDA
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100	IKU PEMDA
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,4	77,74	79,08	79,08	IKU PEMDA
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75.01	80	75.03	75.05	75.07	75.10	75.20	75.20	IKU PEMDA
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63.02	63.01	62.75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKU PEMDA
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IKU PEMDA
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668	IKU PEMDA
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.78	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96	IKU PEMDA
19	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	IKU BUPATI

Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:.

Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.01	80.02	80.63	81.09	81.54	81.99	82.44	82.44	TUJUAN	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73.9	74.01	74.11	74.2	74.29	74.39	74.39	IKU PEMDA	DINAS KESEHATAN
	Net Death Rate (NDR)	permil	21.7	21.7	21.5	21	20.5	20	19.5	19.5	IKU PD	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88.7	80.7	72.6	64.5	56.5	56.5	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6.93	8	7.7	7.3	6.9	6.5	6.3	6.3	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2.8	2.75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1.75	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	125	120	115	110	105	105	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Prevalensi stunting	Persen	9.74	9	9	8,5	8	7,5	7	7	IKU PD	DINAS KESEHATAN
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	93,91	93,91	94	94,22	94,25	94,26	94,3	94,3	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,88	94,88	95	95,22	95,25	95,26	95,3	95,3	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,35	98,35	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi warga negara	Persen	13,57	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	IKU PD	DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	-83,3	33	33	33,5	34	34,5	35	35,5	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	90	90	85	85,5	86	86,5	87	87	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	n/a	n/a	10	18	23	25	30	30	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,42	3,42	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.46	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	IKU PEMDA	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	9	12	15	18	21	24	27	27	IKU PD	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,7	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	TUJUAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU PEMDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Presentase Pemilih yang berpartisipasi.	Persen	80,32	75	75	77	77	78	78	78	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.66	3.12	3.8	3.97	4.48	4.83	5.12	5.12	TUJUAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN
	Rasio Gini	Angka	0,381	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	IKU PEMDA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PERDAGANGAN
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91.4	91.4	90.4	90.8	91	91.2	91.2	91.2	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0.712	0.712	0.714	0.714	0.714	0.714	0.714	0.714	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	1.59	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.65	IKU PD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.348.313	1,870,000	2,057,000	2,262,700	2,488,970	2,737,867	3,011,654	3,011,654	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,56	1	1,25	1,5	1,75	2	2,1	2,1	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	675.000	708.750	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565	904.565	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40	2.038,40	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	n/a	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1594,75	1684,64	1824,47	2030,54	2290,35	2640,66	3110,56	3110,56	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	4.06	3.9	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	IKU PEMDA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	5000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	IKU PD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	NA	NA	80	90	100	100	100	100	IKU PEMDA	DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	n/a	14	16	18	18	18	18	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	n/a	0.2	0.31	0.41	0.56	0.84	0.97	0.97	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pertumbuhan industri	persen	1.8	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.3	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	65	70	70	70	70	70	70	70	IKU PD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Tingkat Kemiskinan	persen	13,5	13,5	13.37	12,9	12,5	12,05	11,5	11,5	TUJUAN	DINAS SOSIAL
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	orang	72.101	71.101	71.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668	IKU PEMDA	DINAS SOSIAL
	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	DINAS SOSIAL
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12*	95.18	95.5	96	96.5	96.75	96.9	96.9	TUJUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	NA	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2.56	2.54	2.5	2.45	2.4	2.35	2.3	2.3	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II	Aspek Pelayanan Umum											
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	n/a	66 Persen	70 Persen	75 Persen	79 Persen	83 Persen	83 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	n/a	3,88 Persen	4,18 Persen	4,48 Persen	4,78 Persen	5,07 Persen	5,37 Persen	5,37 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,38 angka	85 angka	83 Angka	83,5 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50 Persen	77,50 Persen	80 Persen	80,50 Persen	81 Persen	82,50 Persen	82 Persen	82 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29 Persen	57,29 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73 Persen	73 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69 hari	2,69 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29 kali	46,29 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS KESEHATAN
	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		UPTD JAMKESDA
	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		UPTD LABKESDA
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	83,92 angka	83.95 angka	84 angka	84,15 angka	84,30 angka	84,40 angka	84,50 angka	84,50 angka		27 PUSKESMAS
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		27 PUSKESMAS
	Indeks kapasitas Sumberdaya	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Manusia Kesehatan											KESEHATAN
	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36 Kalurahan	36 Kalurahan	40 Kalurahan	45 Kalurahan	50 Kalurahan	55 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan		DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	18,5 Persen	25,93 Persen	33 Persen	40 Persen	48 Persen	55 Persen	62 Persen	62,9 Persen		DINAS KESEHATAN
	Indeks capaian SPM	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks		27 PUSKESMAS
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Persen	75,42	75,42 Persen	75,83 Persen	76,24 Persen	76,65 Persen	77,06 Persen	77,47 Persen	77,47 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	80,62 Persen	81,03 Persen	81,44 Persen	81,85 Persen	82,26 Persen	82,67 Persen	82,67 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	10 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34 Persen	71,34 Persen	72,84 Persen	74,34 Persen	75,84 Persen	77,34 Persen	78,84 Persen	78,84 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	n/a	0	65 Persen	25 Persen	10 Persen	0	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93 Persen	29,93 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82,06 Persen	81,5 Persen	82,4 Persen	83,3 Persen	84,2 Persen	85,1 Persen	86 Persen	86 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36 Persen	82,36 Persen	83,56 Persen	84,38 Persen	85,19 Persen	85,98 Persen	86,76 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83 Persen	84,83 Persen	87,86 Persen	89,89 Persen	91,92 Persen	93,95 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	n/a	3,97 Persen	4,6 Persen	5,23 Persen	5,86 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70,1 Persen	70,2 Persen	70,3 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	82,99 Persen	82,99 Persen	10,59 Persen	21,18 Persen	31,77 Persen	42,36 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75 Persen	98,75 Persen	99,18 Persen	99,39 Persen	99,6 Persen	99,8 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen		27,22 Persen	29,37 Persen	45,44 Persen	66,88 Persen	88,31 Persen	100 Persen	100 Persen		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANG

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	dan evakuasi korban bencana											AN BENCANA DAERAH
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	n/a	n/a	n/a	45 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	65 Persen		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PPKS	Persen	55 Persen	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80 Persen	80 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70 Persen	70 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50 persen	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	99 Persen	57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS SOSIAL
	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS SOSIAL
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	17,5 Persen	18,5 Persen	18,5 Persen	19,5 Persen	20,5 Persen	21,5 Persen	22,5 Persen	22,5 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	52 Persen	54 Persen	54 Persen	56 Persen	58 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Persen	32 Persen	35 Persen	54 Persen	36 Persen	37 Persen	38 Persen	39 Persen	39 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	peserta BPJS Ketenagakerjaan).											
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Capaian Desa Prima	Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Unit	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	5 unit		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	5 Kalurahan		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												KALURAHAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka		DINAS PERHUBUNGAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten											
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Angka	n/a	n/a	1,29 Angka	1.43 Angka	1,57 Angka	1,57 Angka	1,58 Angka	1,58 Angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67.55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase usaha simpan pinjam	Persen	60.12 Persen	56,54 Persen	59,52	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96	68,45 Persen	68,45 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				Persen			Persen				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Aplikasi SIM dalam	Persen	n/a	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Layanan Perijinan dan Non Perijinan				Persen			Persen				PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Jumlah prestasi Olahraga	medali	50 medali	n/a	55 medali	65 medali	80 medali	100 medali	130 medali	130 medali		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	n/a	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	Persentase perputakaan yang terakreditasi	Persen	4,94 Persen	7,61 Persen	10,08 Persen	12,55 Persen	14,02 Persen	17,48 Persen	19,95 Persen	19,95 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	93 Persen		DINAS PARIWISATA
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	15,19 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	10 Persen		DINAS PARIWISATA
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	-											
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	PERDAGANGAN											
	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai ekspor	juta US$	122 juta US$	83 juta US$	80 juta US$	90 juta US$	100 juta US$	110 juta US$	120 juta US$	500 juta US$		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Cakupan promosi penggunaan dan	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen		DINAS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemasaran dalam negeri											KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0.20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	1,33 persen	2,67 persen	2,67 persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	0 Pesen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	SEKRETARIAT DAERAH											
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka		SEKRETARIAT

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Instansi Pemerintah (AKIP)											DAERAH
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89.50 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80.5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DEWAN											
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	PERENCANAAN											
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen		BADAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi											PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	KEUANGAN											
	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												DAN ASET DAERAH
3	KEPEGAWAIAN											
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	INSPEKTORAT DAERAH											
	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen		0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen		n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen		n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
G	UNSUR KEWILAYAHAN											
	KAPANEWON											
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANTUL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Kabupaten Bantul											
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	98 Persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
2	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
3	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
4	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON IMOGIRI

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
5	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
6	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	94 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
7	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON KASIHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	n/a	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen		KAPANEWON KASIHAN
8	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK
9	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
10	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Umum											
11	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
12	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
13	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
14	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
15	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
16	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
17	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan penyelenggaran	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	pemerintahan dan pelayanan publik											BANGUNTAPAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	41,67 Persen	66,67 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
III	Aspek Daya Saing											
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)	TUJUAN	Semua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4	IKU PEMDA	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	memiliki nilai IKM minimal B											DAERAH
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	90	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	IKU PD	SEKRETARIAT DPRD
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	IKU PD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	21.69	17	21.69	22.19	22.69	23.19	23.69	23.69	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Nilai Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK,	persen	91.5	91.5	81	82	83	84	85	85	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten											
	Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.24	3.24	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45	3.45	IKU PEMDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.03	80	83.75	84	84.25	84.5	84.75	84.75	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	n/a	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	7.8	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.7	2.7	2.7	2.75	2.8	2.9	3	3	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.03	88.03	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5	89.5	IKU PEMDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87.89	80.5	85.25	85.5	85.75	86	86.25	86.25	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	n/a	3	4	6	8	10	12	12	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	IKM Kapanewon	angka	95.5	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANTUL
	IKM Kapanewon	angka	95.73	95	95	95	95	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	IKM Kapanewon	angka	95.54	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON DLINGO
	IKM Kapanewon	angka	91.11	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON IMOGIRI
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON JETIS
	IKM Kapanewon	angka	92	92	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON KRETEK
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON KASIHAN
	IKM Kapanewon	angka	92.27	92.45	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PANDAK
	IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PUNDONG
	IKM Kapanewon	angka	95.82	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON PLERET
	IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON PIYUNGAN
	IKM Kapanewon	angka	95.78	90	94	94.5	95	95.5	96	96	IKU PD	KAPANEWON PAJANGAN
	IKM Kapanewon	angka	98.48	100	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON SANDEN
	IKM Kapanewon	angka	92.58	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SRANDAKAN
	IKM Kapanewon	angka	90.99	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SEWON
	IKM Kapanewon	angka	95.61	95	91	92	93	94	95	95	IKU PD	KAPANEWON SEDAYU
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61	TUJUAN	DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	IKU PEMDA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	78.02	78.02	78.43	78.84	79.25	79.66	80.07	80.07	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	IKU PD	DINAS PERHUBUNGAN
	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,01	80	75,03	75,05	75,07	75,1	75,2	75,2	IKU PEMDA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72	72,5	73	73,5	74	74	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	63,01	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKU PEMDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,8	56	40	40,5	41	41,5	42	42	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	85,18	90	87	87,5	88	88,5	89	89	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	54,82	61,2	57	59	61	63	65	65	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IKU PEMDA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan pencapaian visi jangka panjang, yaitu "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" akan dapat terwujud pula.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi didasarkan dari pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD setiap tahun.
3) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul akan menyusun RKPD Tahun 2027 pada tahun 2026, yang merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam hal pada tahun 2026 RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bantul pada periode berkenaan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang berlokasi di Bantul, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diterbitkan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

CASCADING

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN**						**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**76,43 (BB)**	**78,00 (BB)**	**80,00 (BB)**	**82,00 (BB)**	**82,5 (BB)**	**83,25 (BB)**	**83,75 (BB)**	**83,75 (BB)**	**Hasil penilaian KemenPAN RB atas laporan kinerja Pemerintah Daerah**	**Semua Perangkat Daerah**	**KEMENPAN RB**
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Hasil penilaian Kemendagri atas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	KEMENDAGRI
				Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	Nilai AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
					Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama dikali 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pengaturan tata laksana perangkat daerah			Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi jumlah perangkat daerah yang dinilai x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah kebijakan yang dihasilkan per tahun x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	90	90	90	Jumlah tingkat capaian seluruh program Setda dibagi jumlah program Setda	SEKRETARIAT DAERAH	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
								Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dibagi Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
								Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disediakan dibagi jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang harus disediakan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan Perekonomian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan x 100%	SEKREATRIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	
								Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Nilai realisasi pengadaan dengan metode tender dibagi nilai rencana pengadaan dengan metode tender x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan dibagi Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89.50 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80.5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan budaya pemerintahan SATRIYA dibagi jumlah perangkat daerah x 100^	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
				Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD		Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	(Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100%	SEKRETARIAT DPRD	
				Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Kesesuaian sasaran daerah, indikator sasaran daerah, program, indikator program dan target program	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah			Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	Jumlah rata-rata capaian sasaran daerah dibagi jumlah sasaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah															
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% Dokumen perencanaan sesuai tahapan : 4 dok Dokumen Pengendalian sesuai tahapan : 6 dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanatkan peraturan Mendagri x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya profesionalisme ASN		Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BKN
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pengawas) dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	Jumlah tambahan formasi yang disetujui Menpan dibagi jumlah kekurangan kebutuhan formasi dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
								Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen	Jumlah aparatur yang sudah dinilai potensinya dibagi jumlah total ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
								Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
				Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah Peningkatan inovasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan		Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan tata kelola kearsipan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar		Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen	T = (a + i + s + j) / 4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen	T = (m + b + g + a + c + i) / 6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BPK
				Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah		Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
								Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
								Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	(Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
					Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	21,69	17	21,69	22,19	22,69	23,19	23,69	23,69	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	Hasil Monitoring dari 8 area intervensi yang dilakukan KPK	INSPEKTORAT DAERAH	KPK
				Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Transparansi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	91,5	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dibagi seluruh LHP BPK dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
					Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen	PD pelaksana Danais yang berkualitas dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen	Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	PD yang menerapkan Manajemen Resiko dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEMENPAN RB
				Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika		Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.03	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi															
							PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pengamanan informasi	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai		Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	n/a	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						Pengembangan aplikasi dan statistik		Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Angka	n/a	n/a	1,29 Angka	1.43 Angka	1,57 Angka	1,57 Angka	1,58 Angka	1,58 Angka	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON	BAGIAN ORGANISASI
				Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu		IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87,89	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25	Nilai SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Peningkatan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan		Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	Jumlah Persentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPEI, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
								Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	n/a	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah PD yang menggunakan hak akses	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen	Jumlah Data Anomali/ganda/ jumlah data adminduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah buku profil yang disebarkan / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,5	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bantul	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANTUL	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	98 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BANTUL	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANTUL	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,73	95	95	95	95	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bambanglipuro	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,54	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Dlingo	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON DLINGO	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON DLINGO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON DLINGO	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	91,11	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Imogiri	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON IMOGIRI	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON IMOGIRI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON IMOGIRI	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Jetis	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON JETIS	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON JETIS	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON JETIS	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92	92	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kretek	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KRETEK	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON KRETEK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KRETEK	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kasihan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KASIHAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON KASIHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KASIHAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,27	92,45	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pandak	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PANDAK	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PANDAK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PANDAK	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pundong	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PUNDONG	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PUNDONG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PUNDONG	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,82	90	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pleret	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PLERET	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PLERET	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PLERET	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PLERET	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Piyungan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PIYUNGAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PIYUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PIYUNGAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,78	90	94	94,5	95	95,5	96	96	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pajangan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PAJANGAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON PAJANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PAJANGAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	98,48	100	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sanden	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SANDEN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SANDEN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SANDEN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,58	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SRANDAKAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SRANDAKAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SRANDAKAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90,99	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sewon	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEWON	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SEWON	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SEWON	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEWON	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,61	95	91	92	93	94	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sedayu	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEDAYU	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON SEDAYU	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEDAYU	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Banguntapan	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
2	**Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**	**Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya**						**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**80,01**	**80,02**	**80,63**	**81,09**	**81,54**	**81,99**	**82,44**	**82,44**	**IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata- rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak**	**DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi					Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39	74,39	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS	BPS BANTUL
				Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Menurunnya angka kematian		Net Death Rate (NDR)	permil	21,7	21,7	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5	Angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit setiap 1000 pasien keluar.	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	82,38 angka	85 angka	83 Angka	83,5 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	84 Angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50 Persen	77,50 Persen	80 Persen	80,50 Persen	81 Persen	81,50 Persen	82 Persen	82 Persen	Indikator SPM rumah sakit yang tercapai dibagi seluruh indikator SPM rumah sakit x 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29 Persen	57,29 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73 Persen	73 Persen	Jumlah hari perawatan dibagi (jumlah tempat tidur dikali 365 hari) dikali 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69 hari	2,69 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	((Jumlah tempat tidur x 365 hari)-Jumlah Pasien yang Keluar)dibagi Jumlah Pasien yang Keluar	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
								Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29 kali	46,29 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) dibagi Jumlah Tempat Tidur	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
				Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup x100.000	DINAS KESEHATAN	
				Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan			Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,93	8	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3	AKB =Jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi jumlah lahir hidup kali 1000	DINAS KESEHATAN	
								Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2,8	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75	CFR Covid 19 = Jumlah kematian karena covid 19 dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita covid 19 dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP ditambah Indeks Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan perhitungan : (50% x capaian indeks fasilitas pelayanan kesehatan) + (50% x capaian indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP)	DINAS KESEHATAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang di hitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) + (20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga) + (20% x Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)) +(20% x Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan) + (20% x Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga)	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pendampingan pembiayaan kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pendampingan pembiayaan kesehatan dikali 100%	UPTD JAMKESDA	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pelayanan laboratorium kesehatan dikali 100%	UPTD LABKESDA	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	angka	83,92 angka	83.95 angka	84 angka	84,15 angka	84,30 angka	84,40 angka	84,50 angka	84,50 angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	27 PUSKESMAS	
								Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dibagi (5 layanan UKM dan 4 Layanan UKM) dikali 100%	27 PUSKESMAS	
				Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat		Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	125	120	115	110	105	105	Insiden Rate DBD = Jumlah orang yang sakit DBD dalam1 tahun dibagi jumlah penduduk x 100.000	DINAS KESEHATAN	
					Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan			Prevalensi stunting	Persen	9,74	9	9	8,5	8	7,5	7	7	Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek dibagi total jumlah balita dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : (50% x Persentase pemenuhan SDMK) + (50% x Persentase SDMK memiliki STR)	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36 Kalurahan	36 Kalurahan	40 Kalurahan	45 Kalurahan	50 Kalurahan	55 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan	Desa Siaga Purnama Mandiri	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	18,5 Persen	25,93 Persen	33 Persen	40 Persen	48 Persen	55 Persen	62 Persen	62,9 Persen	Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehata Tradisional (Yankestrad) terintegrasi / seluruh Puskesmas * 100%	DINAS KESEHATAN	
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9% x capaian pelayanan kesehatan bayi sesuai standar) + (8 % x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15 -59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun ke atas mendapatkan skriing kesehatan sesuai standar) + (8% capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar) + (8% penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8% x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang endapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)	27 PUSKESMAS	
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^{n} (E^t_i / P^t_i)$ Keterangan: - HLS^t_a = harapan lama sekolah pada umur a di tahun t. - E^t_i = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t. - P^t_i = penduduk usia i pada tahun t. - i = usia (a, a+1, ..., n). - FK = faktor koreksi pesantren (jumlah santri sekolah dan mukim dibagi jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1). - Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah. - Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BPS BANTUL
				Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	93,91	93,91	94	94,22	94,25	94,26	94,3	94,3	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,88	94,88	95	95,22	95,25	95,26	95,3	95,3	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,35	98,35	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	98,9	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
					Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	13,57	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	n/a	66 Persen	70 Persen	75 Persen	79 Persen	83 Persen	83 Persen	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) dikali 100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	n/a	3,88 Persen	4,18 Persen	4,48 Persen	4,78 Persen	5,07 Persen	5,37 Persen	5,37 Persen	Jumlah sekolah berbasis budaya dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dikalikan 100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka		Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	-83,3	33	33	33,5	34	34,5	35	35,5	Jumlah pemustaka yg berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	90	90	85	85,5	86	86,5	87	87	Nilai SKM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	4,94 Persen	7,61 Persen	10,08 Persen	12,55 Persen	14,02 Persen	17,48 Persen	19,95 Persen	19,95 Persen	Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Meningkatkan prestasi olahraga	Fasilitasi minat dan bakat generasi muda Pembangunan sarana prasarana olah raga Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	Meningkatnya prestasi olahraga		Peningkatan prestasi olahraga	Persen	n/a	n/a	10	18	23	25	30	30	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	medali	50 medali	n/a	55 medali	65 medali	80 medali	100 medali	130 medali	130 medali	Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				Meningkatkan kualitas pemuda	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan Peningkatan kapasitas kepemudaan Peningkatan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,42	3,42	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	n/a	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten)*100%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	Jumlah Organisasi Pramuka yang aktif	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah					Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah Desa/Kalurahan yang memiliki 4 pedikat sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa *Preneur* dan Desa Prima)	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah		Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	9	12	15	18	21	24	27	27	Jumlah Desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda yang Terdata dikali 100%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
								Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
								Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya						Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,70	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	Survey masyarakat oleh lembaga independen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LEMBAGA INDEPENDEN
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis					Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan penegakan perda Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat		Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	70 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan) / (Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	n/a	27,22 Persen	29,37 Persen	45,44 Persen	66,88 Persen	88,31 Persen	100 Persen	100 Persen	Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan dikali 100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan		Presentase Pemilih yang berpartisipasi.	Persen	80,32	75	75	77	77	78	78	78	jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolahan dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan /jumlah sekolahx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen	Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	FKUB Aktif /FKUB se Kab. Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dibagi permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dikali 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di rekondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	41,67 Persen	66,67 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lokasi yang direkondisi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	**Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**	**Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas**						**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**-1,66**	**3,12**	**3,8**	**3,97**	**4,48**	**4,83**	**5,12**	**5,12**	**Pertumbuhan PDRB** **PDRB(t+1) – PDRB(t) x 100%** **PDRB(t)** **Dimana:** **t+1= tahun pengamatan PDRB** **t= tahun pengamatan PDRB sebelumnya**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,** **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** **DINAS PARIWISATA** **DINAS KUKMP PERDAGANGAN**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Rasio Gini	Angka	0,381	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	G = 1- á Pi (Qi + Qi-1) dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3= ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5= ketimpangan tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN	BPS BANTUL
				Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,4	91,4	90,4	90,8	91	91,2	91,2	91,2	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen	Desa Mandiri Pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100% Jumlah Lumbung Tahun 2020 = 7 Unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen	(Jumlah cadangan pangan) / (Jumlah kebutuhan pangan)*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	17,33 Persen	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100% Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Tahun 2020 = 18 Kalurahan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	Meningkatnya produksi pertanian		Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0,712	0,712	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan dibagi jumlah prasarana pertanian yang tersedia dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah bibit ternak yang diberikan fasilitas perlindungan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t)–jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) / (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
								Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton	Jumlah daging sapi. Kambing, itik dan ayam	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan Peningkaan nilai tambah perikanan Peningkatan pengawasan dan pengendalain	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat		Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1.59	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun dasar dikalikan 100 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	Jumlah Produksi perikanan tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun kemarin dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikalikan 100 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total pJumlah produksi olahan ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100 %roduksi dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.348.313	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.654	3.011.654	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n	DINAS PARIWISATA	
					Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,56	1	1,25	1,50	1,75	2,00	2,10	2,10	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	DINAS PARIWISATA	
					Peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata			Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	675.000	708.750	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565	904.565	Rata -rata belanja wisatawan saat berkunjung	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	93 Persen	Desa wisata yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	15,19 Persen	Peningkatan pembangunan atau rehabilitasi 3 sarana prasarana di destinasi baru	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	10 Persen	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali seratus persen	DINAS PARIWISATA	
				Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar tradisional	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40	2.038,40	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data BPS)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen	Desa Preneur yang dipromosikan/dipasarkan dibagi seluruh Desa Preneur yang ditetapkan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen	(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan - omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) / (omzet pedagang di lokasi pasar 't'sebelum dilakukan pengembangan) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	122 juta US$	83 juta US$	80 juta US$	90 juta US$	100 juta US$	110 juta US$	120 juta US$	500 juta US$	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	(Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan) / (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	n/a	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Koperasi yang berkualitas = Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67.55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koeprasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60.12 Persen	56,54 Persen	59,52 Persen	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96 Persen	68,45 Persen	68,45 Persen	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya nilai investasi		Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1.594,75	1.684,64	1.824,47	2.030,54	2.290,35	2.640,66	3.110,56	3.110,56	Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen	((Jumlah investasi thn n – Jumlah investasi tahun-1) di kabupaten) / (Jumlah investasi di tahun n - 1 di Kabupaten)*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja x100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BPS BANTUL
				Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	Meningkatknya serapan tenaga kerja		Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	5000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	Jumlah tenaga kerja yang terserap	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	17,5 Persen	18,5 Persen	18,5 Persen	19,5 Persen	20,5 Persen	21,5 Persen	22,5 Persen	22,5 Persen	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi) / (Jumlah tenaga kerja keseluruhan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	52 Persen	54 Persen	54 Persen	56 Persen	58 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen	(Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan) / (Jumlah pencaker yang terdaftar)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	32 Persen	35 Persen	54 Persen	36 Persen	37 Persen	38 Persen	39 Persen	39 Persen	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak) / (Jumlah Perusahaan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	0 Persen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri		Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	25	27	33	43	53	63	73	73	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan Sasaran Penataan Kalurahan, dibagi jumlah seluruh Kalurahan , dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar kalurahan dibagi Pelaksanaaan Kerjasama Antar Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dengan baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan, dikali 100 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi Jumlah LPM dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan yang dilakukan inventarisasi tanah kalurahan dibagi seluruhkalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	Kalurahan yang melaksanakan urusan keistimewaan kelembagan berdasarkan Peraturan bupati Kewenangan Kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)	DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	*Indonesia Creative Cities Network* (ICCN) atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia
				Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif		Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	n/a	14	16	18	18	18	18	Capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	Peningkatan desa wisata yang sudah mandiri (CBT = Community Based Tourism)	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen	Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI	DINAS PARIWISATA	
				Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil	Meningkatnya kualitas UMKM		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	65	70	70	70	70	70	70	70	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen	Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan	Meningkatnya pertumbuhan industri		Pertumbuhan industri	Persen	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif			Pertumbuhan industri kreatif	Persen	n/a	0,2	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97	0,97	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0.20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecol menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	10,67 persen	12 persen	13,33 persen	14,67 persen	17,33 persen	17,33 persen	Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	**Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana**	**Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan**						**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**Indeks**	**n/a**	**n/a**	**66,12**	**67,26**	**67,88**	**69,50**	**70,61**	**70,61**	**(indeks kualitas infrastruktur+ kesesuaian pemanfaatan ruang + IKLH + IRB yang setarakan dalam persen) dibagi 4**	**DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik					Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	(40% x tingkat kemantaban jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78,02	78,02	78,43	78,84	79,25	79,66	80,07	80,07	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)+(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	Persen	75,42	75,42 Persen	75,83 Persen	76,24 Persen	76,65 Persen	77,06 Persen	77,47 Persen	77,47 Persen	(Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	80,62 Persen	81,03 Persen	81,44 Persen	81,85 Persen	82,26 Persen	82,67 Persen	82,67 Persen	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (/ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	10 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34 Persen	71,34 Persen	72,84 Persen	74,34 Persen	75,84 Persen	77,34 Persen	78,84 Persen	78,84 Persen	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisi) / (Jumlah tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah Kabupaten)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	n/a	0	65 Persen	25 Persen	10 Persen	0	100 Persen	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	(Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting) / (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93 Persen	29,93 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	(Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha))*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
								Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	82,06 Persen	81,5 Persen	82,4 Persen	83,3 Persen	84,2 Persen	85,1 Persen	86 Persen	86 Persen	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk seluruhnya x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36 Persen	82,36 Persen	83,56 Persen	84,38 Persen	85,19 Persen	85,98 Persen	86,76 Persen	100 Persen	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	(Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak) / (Jumlah total penduduk) * 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83 Persen	84,83 Persen	87,86 Persen	89,89 Persen	91,92 Persen	93,95 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	n/a	3,97 Persen	4,6 Persen	5,23 Persen	5,86 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen	(Panjang drainase ditangani) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan : SK Bupati No. 220 Tahun 2016 selesai di tahun 2021 Tahun 2021 sd 2026 berdasarkan : SK Bupati No. 82 Tahun 2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	82,99 Persen	82,99 Persen	10,59 Persen	21,18 Persen	31,77 Persen	42,36 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75 Persen	98,75 Persen	99,18 Persen	99,39 Persen	99,6 Persen	99,8 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Pemanfaatan ruang SRS	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	Selisih kejadian n tahun dengan kejadian baseline tahun)/baseline x 100%	DINAS PERHUBUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PERHUBUNGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	DINAS PERHUBUNGAN	
								Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	V / C Ratio di Jalan kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik					Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75,01	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20	Pemanfaatan ruang / perencanaan ruang x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang		Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan tata ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70,1 Persen	70,2 Persen	70,3 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen	Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen); (rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas/rekom FPRD atau TKPRD yang diterbitkan + temuan pengawasan yang ditindak lanjuti/rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas)	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah		Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan pertanahan	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan sengketa garapan)*100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekom pemanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangkutan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen	tanah yang dikelola (tanah yang dilakukan penatausahaan (bidang yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya) / total tanah kasultanan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	72,00	62,76	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKLH = (0.376xIKA)+(0.405xIKU)+(0.219xIKL)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,80	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	IKA = Ii + Ij + Ik + Im	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	85,18	90,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	IKU = 100-((50/0,9) x(Ieu-0,1))	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	54,82	61,20	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	ITL = 100-((84,3-((LTL/LWK) x 100)) x(50/54,3))	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan seumber pencemaran air dan udara dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen	Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi jumlah lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/ nasional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten) dibagi (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Pengaduan masyarakat yang tertangani) dibagi (total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi) x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	(Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	(Total volume sampah yang dapat ditanganI) / (Total vol timbulan sampah kabupatenI)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Terwujudnya penurunan risiko bencana					Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas	BPBD	BNPB
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Assesment 71 indikator	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen	Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	n/a	n/a	n/a	45 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	65 Persen	Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) ditambah (jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan / atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) dibagi (Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)*100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
5	**Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel**	**Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat**						**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**13,5**	**13,5**	**13,37**	**12,90**	**12,50**	**12,05**	**11,50**	**11,50**	**Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)**	**DINAS SOSIAL**	**BPS BANTUL**
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial
				Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel Pembangunan infrastruktur ramah difabel	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		PPKS yang ditangani dan dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	55 Persen	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen	jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80 Persen	80 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS	DINAS SOSIAL	
								Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70 Persen	70 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah PPKS yang diikutsertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50 persen	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	99 Persen	57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	
		Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12*	95,18	95,5	96	96,5	96,75	96,9	96,9	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96	IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
				Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen	ARG kali APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi 100.000 penduduk perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga dibagi jumlah penduduk perempuan Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (lbh dr 900).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEMEN PPPA
				Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak Menyediakan Layanan Ramah Anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA		Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950	nilai Evaluasi KLA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	Jumlah Desa layak anak se Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah anak korban kekerasan yang ditanganı instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak Kabupaten Bantul	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali		Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,56	2,54	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3	Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* /mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	(Jumlah peserta KB Aktif Modern) / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen	Jumlah pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina dibagi Jumlah Kelompok Tribina dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Jl. R.W. Monginsidi 01 Kompleks Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
https://bappeda.bantulkab.go.id